



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025,

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 16), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2025

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025

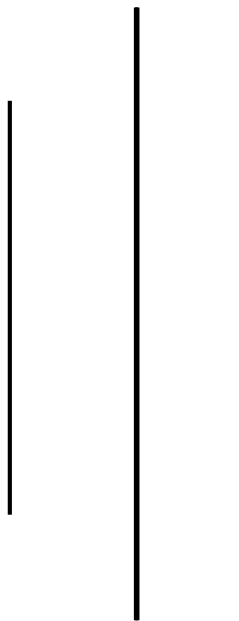
1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
3. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
7. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
9. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
11. Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
15. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
17. Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
20. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
21. Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
22. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
23. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
24. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
26. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
28. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
29. Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
30. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
31. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
32. Biro Umum Setda Provinsi Bali.
33. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
34. Badan Penghubung Provinsi Bali.


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
JL. D.I.PANJAITAN NOMOR 14 RENON DENPASAR

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan sesanti angayu bagia kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan dalam pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

Bali, 9 Juli 2025

Inspektur,



I Wayan Sugiada, S.H.,M.H.

NIP. 19651231 198603 1 175

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	10
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali.....	13
3.3 Program dan Kegiatan.....	14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma dalam sistem Pemerintahan di Indonesia yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik semakin ditegaskan. Pemerintahan semacam ini disamping merupakan peluang juga sekaligus sebagai tantangan bagi Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan issue paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah semestinya mendapat respon dari pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah untuk mewujudkan good governance.

UNDP memberikan pengertian bahwa governance mempunyai 3 pilar yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Oleh karena itu Institusi dari governance meliputi 3 domain yaitu State (Negara atau Pemerintahan) private sector (sektor swasta dan dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok- kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik. Jadi good governance dapat diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif diantara domain state, private sector dan society.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam good governance tersebut tampaknya saat ini domain state menjadi domain yang memegang peranan penting dalam perwujudan good governance, karena pada domain ini mempunyai fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain private sector dan society, serta fungsi administratif

penyelenggaraan pemerintahan. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi mekanisme private sector dan society.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai salah satu dari sub sistem didalam domain state mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan clear government (pemerintahan yang bersih) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan tidak lepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, dimana fungsi-fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan dinamis sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 disusun secara komprehensif dan terkoordinasi dengan instansi terkait mencakup seluruh program dan kegiatan baik yang fokusnya di Pemerintah Provinsi Bali maupun yang di Kabupaten/Kota se Bali.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

- c. Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Disusunnya Rancana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjabarkan secara lebih rinci dari kebijakan dan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam upaya pembinaan dan pengawasan ke dalam suatu program dan kegiatan lebih detail sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta jumlah anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

1.3.2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Bali.
- b. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil-hasil kegiatan dan dampaknya terhadap pelaksanaan program untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan.
- c. Diketuainya gambaran kegiatan dan strategi pelaksanaan serta jadwal kegiatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Diketuainya gambaran alokasi anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun berkenaan
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3 Isu - Isu penting penyelenggaraan tugas dalam fungsi perangkat daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan & Sasaran renja perangkat daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Berdasarkan DPA Induk tahun 2025 maka evaluasi capaian sampai triwulan I dengan 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp.36.279.683.543,- realisasi keuangan sampai dengan triwulan II mencapai Rp. 6.208.782.633,- (17,11%)

Adapun rincian capaian keuangan program tahun 2025 sampai Triwulan I adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan jumlah anggaran Rp. 31.630.352.851,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.288.821.231,- dengan persentase 16,72% dan realisasi fisik sebesar 27,76%.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan jumlah anggaran Rp. 2.267.877.588,- realisasi keuangan sebesar Rp. 561.616.878,- dengan persentase 24,76% dan realisasi fisik sebesar 28,24%.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan jumlah anggaran Rp. 2.381.453.104,- realisasi keuangan sebesar Rp. 358.344.524,- dengan persentase 15,05% dan realisasi fisik sebesar 19,06%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Agar tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik sudah ditetapkan struktur organisasi termasuk pula penetapan uraian tugasnya.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 yang terdiri dari Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus dengan obyek pemeriksaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali. Dari PKPT Tahun 2025 rencana akan dilakukan pemeriksaan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Disamping melakukan pemeriksaan, Inspektorat juga melakukan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Evaluasi dan review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota se-Bali. Diharapkan dengan memberikan asistensi lebih awal mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali yaitu melakukan pengawasan dalam hal ini pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga dalam melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis Lainnya.

Berdasarkan kajian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 maka prioritas program Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat, dapat dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu:

1. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan Threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman
3. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Melalui metode diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan isu strategis:

- a. Tuntutan memperoleh Opini BPK (WTP) yang lebih berkualitas dan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Penerapan SPIP/MRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang lebih efektif;
- c. Tuntutan penguatan Kapabilitas APIP yang lebih optimal;
- d. Tuntutan memberikan Pelayanan Publik yang Prima;
- e. Tuntutan Optimalisasi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), Stranas PK dan Survey Penilaian Integritas (SPI);

Diharapkan melalui isu-isu strategi tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menjawab dan mewujudkannya serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi dan Misi-nya. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk

memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.
4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali belum memiliki aparat pengawas yang memadai baik Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah .
5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.
6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun hasil perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.

8. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK RI.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden tertuang dalam RPJPN 2025-2045 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa”. Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran yang terdiri dari:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (Delapan) Misi atau agenda pembangunan 2045 dengan penjelasan sebagai berikut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan

karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi;
8. Kestinambungan pembangrnan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Delapan agenda (Asta Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi misi Presiden/Wakil dijabarkan dalam strategi pembangunan jangka menengah yang digariskan dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi RPJMN 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali

3.2.1. Tujuan dan Sasaran

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan program/kegiatan pemerintah sekaligus sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan;
- b. Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali;
- c. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP;
- d. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal;
- e. Meningkatnya upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali;
- f. Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali.

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program/kegiatan dan sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah dilakukan Pemetaan/Mapping terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

Sesuai Permendagri 13/2006				Nama Kegiatan pada RKPD 2021		Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan	
KODE			KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		NAMA KEGIATAN	INDIKATOR		NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)				
(1)				(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
4	06		Inspektorat														
4	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		X	X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja					85	90	
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	X	01	1,01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat daerah yang disusun	Dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%
														Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan program dan kegiatan perangkat Daerah yang disusun	Dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%
														Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	100%

	X	X	0	1,0	
		X	1	2	

Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Laporan Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan ASN sesuai ketentuan	100%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sesuai ketentuan	100%
		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Bahan Pelaksanaan verifikasi yang dipersiapkan	Dokumen bahan pelaksanaan verifikasi yang sesuai ketentuan	100%
		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang sesuai ketentuan	100%
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan dipersiapkan	dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang sesuai ketentuan	100%
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	dokumen keuangan bulanan/semesteran yang sesuai ketentuan	100%

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.02.03.12)	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	Terpeliharanya instalasi listrik dengan baik	12 bulan
			Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan (01.02.03.15)	jumlah surat kabar harian lokal/nasional yang disediakan	Tersedianya informasi secara lengkap dan aktual	12 bulan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (01.02.03.16)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Tersedianya logistik kantor yang cukup dan memadai	12 bulan
			Penyediaan makanan dan minuman rapat (01.02.03.17)	Jumlah hidangan (makanan dan minuman) rapat yang disediakan	Terpenuhinya jamuan dalam pelaksanaan tugas rapat/koordinasi secara memadai	12 bulan
			Rapat rapat koordniasi ke luar daerah (01.02.03.18)	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi ke luar daerah	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan baik	12 bulan
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (01.02.03.22)	Jumlah paket pengadaan barang/jasa perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik dan representatif	12 bulan

													Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (01.02.03.28)	jumlah paket pemeliharaan bangunan gedung/instalasi kantor	Terpeliharaan ya bangunan/ instalasi kantor dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan
													Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (01.02.03.29)	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara yang dipelihara secara rutin/berkala	Terpeliharaan ya mobil dinas jabatan dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan
													Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (01.02.03.30)	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Terpeliharaan ya kendaraan dinas operasional dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan
													Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor (01.02.03.34)	Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Terpeliharaan ya peralatan kantor dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan
4	06	03*	Peningkatan Kapabilitas APIP		6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten /Kota					

4	06	04*	Peningkatan Maturitas SPIP *ada pada RPJMD SB namun tidak tercantum dalam RKPD	Peningkatan Kapasitas Aparat Pegawai Intern Pemerintah	6	01	02	1,01	
				Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	6	01	02	1,01	01
			Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah *tidak ada pada RPJMD SB		6	01	02	1,01	02
				Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	6	01	02	1,01	03
				Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah	6	01	02	1,01	04
				Pemeriksaan Reguler					
				Review Dokumen Rencana Pembangunan dan					

										Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal				
												Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan	Tertibnya administrasi dan tata kelola pemerintahan	- 55 laporan reguler - 3 LHP urusan kab/kota
												Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan review kinerja dan keuangan	Terwujudnya keselarasan dokumen kinerja, perencanaan, dan keuangan	- 2 LHR LK - 4 LHR DAK - 7 LHR Perencanaan
												Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan pelaksanaan WBS yang ditindaklanjuti	Presentase penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti	1 laporan
												Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan evaluasi kinerja dan keuangan	Jumlah laporan evaluasi kinerja dan keuangan	- 9 Lap. EKPPD - 45 LKjIP - 1 Lap. SPIP

Anggaran Tahunan Daerah					
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6	01	02	1,02	01
Pengawasan Dana Desa	6	01	02	1,02	02
Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	6	01	02	1,02	03
Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah	6	01	02	1,02	04
Pemeriksaan Urusan ke Kabupaten/ Kota					
Evaluasi PPRG					

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pemeriksaan terhadap permasalahan - permasalahan yang bersifat khusus/kasus.				
		Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan audit khusus, kasus, tujuan tertentu dan Dana BOS	Terlaksananya audit khusus, kasus, tujuan tertentu dan Dana BOS	16 laporan
		Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan review kinerja dan keuangan	Terwujudnya keselarasan dokumen kinerja dan keuangan	- 4 Lap PA-PBJ
		Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan pemantauan Dana Desa dan penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya pemantauan Dana Desa dan penanganan Pengaduan Masyarakat	-2 laporan Dana Desa -12 Laporan Saber Pungli
		Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan evaluasi PPRG	Terwujudnya Kesetaraan Gender di Prov Bali dan Kab/Kota	3 Laporan PPRG

[illegible]

4	06	02	Peningkatan Reformasi Birokrasi		6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan						
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	6	01	03	1,01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan				
				Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Harta Kekayaan dan Pajak Pegawai	6	01	03	1,01	01					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang pengawasan	Terwujudnya program kerja pengawasan tahunan APIP	100%
				Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	6	01	03	1,01	02					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan/penilaian rumusan kebijakan fasilitasi pengawasan	Terlaksananya pelaporan/penilaian fasilitasi pengawasan	- 1 laporan LHKPN - 1 laporan LHKASN - 2 laporan TLHP - 4 laporan PAK
				Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas, Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tunas Integritas	6	01	03	1,02				Asistensi dan Pendampingan	Persentase penugasan pada OPD				

					6	01	0 3	1,0 2	02					Asistensi dan Pendamping an	Jumlah laporan Asistensi dan Pendampingan	Terlaksanan ya asistensi dan pendamping an	12 Bulan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp.36.779.683.543,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut ini:

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, merupakan pokok-pokok dan garis besar program dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2025. Rencana Kerja disusun sebagai acuan/pedoman dalam pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, sumber dana yang tersedia, serta personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban serta rasa tanggung jawab masing-masing dan semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan kemampuan sehingga tugas-tugas kita dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

Bali, 9 Juli 2025

Inspektur,



I Wayan Sugiada, S.H., M.H.

NIP. 19651231 198603 1 175



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



**BAPPEDA PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dalam Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Perubahan Renja ini memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan memperhatikan target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali 2025 ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami harapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sehingga dalam penyusunan selanjutnya dapat lebih disempurnakan.



Bali, 9 Juli 2025

Kepala Bappeda Provinsi Bali,

I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si

NIP. 19710814 200003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Landasan Hukum 4

 C. Maksud dan Tujuan.....6

 D. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN
 TRIWULAN I TAHUN 2025 8

BAB III MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA
 DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....29

BAB IV PENUTUP.....39

LAMPIRAN 40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
dan Pencapaian Rencana Strategis sampai sampai
Triwulan I Tahun 2025.....9

Tabel 2. Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Bappeda Provinsi Bali.....30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanananaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 ini disusun RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. SE Mendagri ini mengamanatkan Pemerintah Daerah menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan, dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini, kemudian dengan adanya SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ yang mengamanat untuk mengakomodasi asta cita dalam pembangunan di daerah tahun 2025, serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan

perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dimaksud seperti: (1) penyelarasan tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2025; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus disesuaikan.

Sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *topdown* dan *bottom-up*. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Semesta Berencana Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, maka perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 dapat ditetapkan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7); dan

14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 12);
15. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sesuai dengan amanat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan amanat tersebut maka maksud disusunnya Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran tentang perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bali dalam satu tahun anggaran untuk menuju terwujudnya tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, serta untuk peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 menuju tahapan penyusunan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2025.

2. Tujuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 368 Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah. Dengan demikian tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 adalah:

- a. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan anggaran).
- b. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah.
- c. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat: Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat: matrik perubahan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta pagu pendanaannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target, atau bahkan melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan atau pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada Triwulan I.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai 87,13 (100%)	Nilai 86,24	100%	Nilai 87,15 (100%)	Nilai 87,15 (100%)	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	25%
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	11 dokumen	27,27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Target Dokumen RKA SKPD di akomodir dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Target Dokumen Perubahan RKA SKPD di akomodir dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
						DPA-SKPD		
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	15 laporan	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	100%	Target Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di akomodir dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	15,54%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan						
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	59 Orang/bulan	100%	71 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	12,60%
5.01.01.1.02.0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 dokumen	1042 dokumen	192,96 %	540 dokumen	1000 dokumen	19,70%
5.01.01.1.02.0003	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	14 dokumen	14 dokumen	28,57%
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	100%	100%	100%	100%	100%	17,65%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	-
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 paket	4 paket	100%	7 paket	7 paket	40%
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%	3 paket	3 paket	-
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	-
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	25%
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	25%
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	66,67%	66,67%	100%	100%	-
5.01.01.107.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	-	0,00%	2 paket	2 paket	-
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2 unit	100%	1 unit	1 unit	-
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disesuaikan	100%	100%	100%	100%	100%	12,50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		kebutuhan						
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	3 laporan	33,33%
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	-
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	100%	88,76%	88,76%	100%	100%	0,44%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 unit	32 unit	100%	31 unit	31 unit	3,23%
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	201 unit	120 unit	85,71%	190 unit	190 unit	-
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	-
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	1 berita acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	-
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 berita acara	1 berita acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	-
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
	Provinsi	(RPJPD/RPJMD/RKPD)						
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	-
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	6 masukan	100%	6 dokumen	6 dokumen	-
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	1 buku	100%	1 buku	1 buku	-
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Kesesuaian Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	12,20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
	Pembangunan Daerah	Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah						
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	25%
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	6 laporan	50%
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 dokumen	19 dokumen	100%	27 dokumen	27 dokumen	-
5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Validitas Data Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota						
5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		Pembangunan Manusia dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA						
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
	Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
		Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-1)			Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
			Target Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana Tabel 1 diatas, sub kegiatan rata-rata masih berada dibawah 50%. Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja pada Triwulan I sebagai berikut :

- a. Penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan kebijakan anggaran;
- b. Proses administrasi kegiatan yang masih dalam tahap awal pelaksanaan penyusunan dokumen;
- c. Masih dalam proses pengadaan barang dan jasa (kendala TKDN);
- d. Adanya beberapa belanja yang menyesuaikan dengan standar harga.

BAB III

MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 serta berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Bappeda Provinsi Bali dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2025 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down* dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 mencerminkan penyesuaian terhadap target kinerja, output kegiatan, serta sumber dan besaran pendanaan yang dialokasikan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Bali dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 ditampilkan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERENCANAAN				29.056.451.327	27.349.354.927	27.707.328.292	357.973.365	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai 87,13	Nilai 87,13	23.240.773.183	22.805.921.183	23.163.894.548	357.973.365	
5	01	01	1.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen	286.122.014	231.698.014	231.698.014	0	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	227.981.114	203.909.114	203.909.114	0	
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.474.400	11.474.400	11.474.400	0	
5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.444.900	11.444.900	11.444.900	0	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	35.221.600	4.869.600	4.869.600	0	
5	01	01	1.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	16.671.010.143	16.671.010.143	16.671.010.143	0	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RPKD		
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	123 Orang/Bulan	16.365.850.481	16.365.850.481	16.365.850.481	0	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	176.934.150	176.934.150	176.934.150	0	
5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	128.225.512	128.225.512	128.225.512	0	
5	01	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	48 Jenis	48 Jenis	1.887.106.486	1.506.678.486	1.646.669.686	0	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	64.000.810	64.000.810	64.000.810	0	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	730.788.232	730.788.232	870.779.432	139.991.200	Penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Set/Bappeda
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	129.063.004	129.063.004	129.063.004	0	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	66.119.210	56.483.210	56.483.210	0	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	63.183.410	63.183.410	63.183.410	0	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	99.255.410	59.805.410	59.805.410	0	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	734.696.410	403.354.410	403.354.410	0	
5	01	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	411.144.692	411.144.692	411.144.692	0	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	361.989.600	361.989.600	361.989.600	0	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	49.155.092	49.155.092	49.155.092	0	
5	01	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Laporan	8 Laporan	960.658.584	960.658.584	960.658.584	0	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	36.616.910	36.616.910	36.616.910	0	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	197.266.492	197.266.492	197.266.492	0	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	726.775.182	726.775.182	726.775.182	0	
5	01	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik	227 unit	227 unit	3.024.731.264	3.024.731.264	3.242.713.429	217.982.165	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RPKD		
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit	771.388.362	771.388.362	771.388.362	0	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	190 Unit	192.660.410	192.660.410	192.660.410	0	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	2.060.682.492	2.060.682.492	2.278.664.657	217.982.165	penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/750/Set/Bappeda
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yan berlaku	100%	100%	3.549.418.406	2.544.619.206	2.544.619.206	0	
5	01	02	1.01		Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	1.808.235.542	1.305.487.542	1.305.487.542	0	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	84.497.500	73.047.500	15.570.300	-57.477.200	Pergeseran pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Set/Bappeda
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	2 Berita Acara	164.767.400	142.467.400	93.767.400	-48.700.000	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.558.970.642	1.089.972.642	1.196.149.842	106.177.200	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	02	1.02		Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	553.439.032	447.561.132	449.420.232	1.859.100	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	6 Dokumen	522.329.832	420.614.132	424.005.332	3.391.200	Penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Se t/Bappeda
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	31.109.200	26.947.000	25.414.900	-1.532.100	
5	01	02	1.03		Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	41 Dokumen	41 Dokumen	1.096.374.132	735.504.132	735.504.132	0	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	8 Laporan	274.355.700	73.387.700	95.827.700	22.440.000	Penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Se t/Bappeda
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	6 Laporan	582.461.632	486.249.632	483.609.632	-2.640.000	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	27 Dokumen	239.556.800	175.866.800	156.066.800	-19.800.000	
5	01	02	1.04		Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700	56.066.400	54.207.300	-1.859.100	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RPKD		
5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700	56.066.400	54.207.300	-1.859.100	Penambahan pagu anggaran sesuai Nota Dinas Nomor B.28.900.1/1716/Set/Bappeda
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	2.266.259.738	1.998.814.538	1.998.814.538	0	
5	01	03	1.01		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	748.575.764	673.332.564	673.332.564	0	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	1 Dokumen	1 Dokumen	132.314.520	102.227.320	102.227.320	0	
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPKD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	116.194.510	101.187.310	101.187.310	0	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	1 Dokumen	1 Dokumen	275.847.622	260.580.422	260.580.422	0	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPKD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	224.219.112	209.337.512	209.337.512	0	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	03	1.02		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen	4 Dokumen	748.575.564	671.759.564	671.759.564	0	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	240.081.022	220.637.022	220.637.022	0	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	229.211.812	202.925.812	202.925.812	0	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	85.873.110	82.993.110	82.993.110	0	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	193.409.620	165.203.620	165.203.620	0	
5	01	03	1.03		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	769.108.410	653.722.410	653.722.410	0	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	326.252.960	295.770.960	295.770.960	0	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDUK 2025	PAGU 2025 PERGESERAN TAHAP I	PAGU THP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD		
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	78.929.700	50.477.700	50.477.700	0	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	285.012.150	256.286.150	256.286.150	0	
5	01	03	1.03	0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	78.913.600	51.187.600	51.187.600	0	
JUMLAH									29.056.451.327	27.349.354.927	27.707.328.292	357.973.365	

Pada tabel 2. diatas dapat dilihat bahwa pagu pada Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 telah mengalami perubahan dari pagu awal Rp. 29.056.451.327,- (dua puluh sembilan miliar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Namun, per Maret 2025 total rencana biaya pada tahun anggaran 2025 adalah Rp. 27.349.354.930,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Hal ini sebagai upaya dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dan untuk optimalisasi pencapaian kinerja dan efektifitas pelaksanaan anggaran, pada tahapan perubahan RKPD 2025 pagu anggaran Bappeda Provinsi Bali mengalami perubahan menjadi Rp. 27.707.328.292 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 ini, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025.

Lampiran 1.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHAPAN RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RKPD**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								28.036.014.506,00	29.056.451.327,00	27.707.328.292,00	-328.686.214,00						34.865.057.556,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							28.036.014.506,00	29.056.451.327,00	27.707.328.292,00	-328.686.214,00							34.865.057.556,00	
	5.01	PERENCANAAN							28.036.014.506,00	29.056.451.327,00	27.707.328.292,00	-328.686.214,00							34.865.057.556,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajem en Kinerja				87,15 Nilai	87,15 Nilai	22.130.957.426,00	23.240.773.183,00	23.163.894.548,00	2.943.551.334,00							25.074.508.760,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28 Dokumen	33 Dokumen	293.733.500,00	286.122.014,00	231.698.014,00	-62.035.486,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		351.197.457,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	235.592.600,00	227.981.114,00	203.909.114,00	-31.683.486,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			262.401.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.474.400,00	11.474.400,00	11.474.400,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.706.406,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.444.900,00	11.444.900,00	11.444.900,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.294.748,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	20 Laporan	35.221.600,00	35.221.600,00	4.869.600,00	-30.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.794.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3 Jenis	3 Jenis	16.852.532.834,00	16.671.010.143,00	16.671.010.143,00	-181.522.691,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		18.599.278.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	120 Orang/ Bulan	16.520.870.414,00	16.365.850.481,00	16.365.850.481,00	-155.019.933,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.172.957.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	900 Dokumen	197.567.800,00	176.934.150,00	176.934.150,00	-20.633.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			264.657.025,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	134.094.620,00	128.225.512,00	128.225.512,00	-5.869.108,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			161.664.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				48 Jenis	48 Jenis	1.571.810.772,00	1.887.106.486,00	1.646.669.686,00	74.858.914,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		1.487.250.262,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.127.540,00	64.000.810,00	64.000.810,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			63.104.238,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	16 Paket	397.243.220,00	730.788.232,00	870.779.432,00	473.536.212,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			323.989.422,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	126.678.652,00	129.063.004,00	129.063.004,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			139.636.871,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.245.940,00	66.119.210,00	56.483.210,00	-13.762.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			93.784.853,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	67.310.140,00	63.183.410,00	63.183.410,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			99.713.792,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	103.382.140,00	99.255.410,00	59.805.410,00	-43.576.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			113.824.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	738.823.140,00	734.696.410,00	403.354.410,00	-335.468.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			653.196.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan				3 Jenis	3 Jenis	120.606.140,00	411.144.692,00	411.144.692,00	290.538.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		118.191.152,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	73.835.400,00	361.989.600,00	361.989.600,00	288.154.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	46.770.740,00	49.155.092,00	49.155.092,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			63.191.152,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8 Laporan	8 Laporan	890.695.920,00	960.658.584,00	960.658.584,00	69.962.664,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		1.081.791.938,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	40.743.640,00	36.616.910,00	36.616.910,00	-4.126.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			44.854.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	194.882.140,00	197.266.492,00	197.266.492,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			381.784.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	655.070.140,00	726.775.182,00	726.775.182,00	71.705.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			655.153.752,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				227 Unit	227 Unit	2.401.578.260,00	3.024.731.264,00	3.242.713.429,00	841.135.169,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali		3.436.799.221,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				31 Unit	31 Unit	761.208.980,00	771.388.362,00	771.388.362,00	10.179.382,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.302.110.128,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				190 Unit	190 Unit	203.287.140,00	192.660.410,00	192.660.410,00	-10.626.730,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			204.189.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1.437.082.140,00	2.060.682.492,00	2.278.664.657,00	841.582.517,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.930.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku				100 Persen	100 Persen	3.536.912.840,00	3.549.418.406,00	2.544.619.206,00	2.807.876.521,00							6.344.789.361,00		
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	1.817.484.840,00	1.808.235.542,00	1.305.487.542,00	-511.997.298,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat		2.875.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																			
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	84.497.500,00	84.497.500,00	15.570.300,00	-68.927.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	2 Berita Acara	164.767.400,00	164.767.400,00	93.767.400,00	-71.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.568.219.940,00	1.558.970.642,00	1.196.149.842,00	-372.070.098,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	567.561.600,00	553.439.032,00	449.420.232,00	-118.141.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		996.217.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				6 Dokumen	6 Dokumen	536.452.400,00	522.329.832,00	424.005.332,00	-112.447.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			961.889.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	31.109.200,00	31.109.200,00	25.414.900,00	-5.694.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.327.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku				41 Dokumen	41 Dokumen	1.060.496.700,00	1.096.374.132,00	735.504.132,00	-324.992.568,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		2.059.865.901,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	274.355.700,00	274.355.700,00	95.827.700,00	-178.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			722.009.069,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	6 Laporan	546.584.200,00	582.461.632,00	483.609.632,00	-62.974.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			931.243.786,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				27 Dokumen	27 Dokumen	239.556.800,00	239.556.800,00	156.066.800,00	-83.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			406.613.046,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD				1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700,00	91.369.700,00	54.207.300,00	-37.162.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		413.706.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.700,00	91.369.700,00	54.207.300,00	-37.162.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			413.706.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.368.144.240,00	2.266.259.738,00	1.998.814.538,00	1.077.615.195,00							3.445.759.435,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1 Dokumen	1 Dokumen	776.821.100,00	748.575.764,00	673.332.564,00	-103.488.536,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.202.678.933,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	140.567.980,00	132.314.520,00	102.227.320,00	-38.340.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			173.030.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	120.321.240,00	116.194.510,00	101.187.310,00	-19.133.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			140.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	285.843.460,00	275.847.622,00	260.580.422,00	-25.263.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			557.047.785,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	230.088.420,00	224.219.112,00	209.337.512,00	-20.750.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			332.241.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				4 Dokumen	4 Dokumen	776.820.700,00	748.575.564,00	671.759.564,00	-105.061.136,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.266.075.702,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	250.076.860,00	240.081.022,00	220.637.022,00	-29.439.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			309.182.443,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	235.080.920,00	229.211.812,00	202.925.812,00	-32.155.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			554.453.860,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	89.999.840,00	85.873.110,00	82.993.110,00	-7.006.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			158.577.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	201.663.080,00	193.409.620,00	165.203.620,00	-36.459.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			243.861.944,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	814.502.440,00	769.108.410,00	653.722.410,00	-160.780.030,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		977.004.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	351.013.340,00	326.252.960,00	295.770.960,00	-55.242.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			406.378.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	78.929.700,00	78.929.700,00	50.477.700,00	-28.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			107.085.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	305.645.800,00	285.012.150,00	256.286.150,00	-49.359.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			356.473.264,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	78.913.600,00	78.913.600,00	51.187.600,00	-27.726.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			107.068.036,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		J U M L A H							28.036.014.506,00	29.056.451.327,00	27.707.328.292,00	-328.686.214,00						34.865.057.556,00		



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025



Brida *Kompak*
Berinovasi *Keren*

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan pokok-pokok perubahan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025. Perubahan Renja BRIDA Provinsi Bali T.A 2025 mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan serta pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BRIDA Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Berdasarkan acuan tersebut, maka Renja Perubahan BRIDA Provinsi Bali merupakan wujud dari sebuah konsistensi komitmen dan kejelasan arah perencanaan berdasarkan analisis gambaran pelayanan BRIDA Provinsi Bali, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja BRIDA Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dan penentuan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi Bali untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya dengan disusunnya Renja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra serta sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Badan Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi Bali,



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH
NIP. 19721111 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali T.A 2025	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Sampai Dengan TW I.....	7
2.2 Hambatan dan Kendala.....	27
2.3 Solusi	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025	28
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dan Capaian kinerja s.d Triwulan I 2025.....	7
Tabel 2.2	Realisasi Capaian Pembangunan Daerah Triwulan I T.A 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	8
Tabel 2.3	Program, Kegan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	10
Tabel 2.4	Realisasi Fisik dan Keuangan BRIDA Tahun Anggaran 2025 Sampai dengan Triwulan I.....	14
Tabel 2.5	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	20
Tabel 3.1	Pagu Indikatif Program dan Kegiatan BRIDA Provinsi Bali Dalam Perubahan Renja Tahun 2025.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alokasi Belanja BRIDA Tahun Anggaran 2025 (DPA Induk).....	9
Gambar 2.2	Rencana Alokasi Belanja Perubahan BRIDA Tahun Anggaran 2025.....	30
Gambar 2.3	Rencana Prioritas Alokasi Belanja Perubahan BRIDA Tahun Anggaran 2025.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi dari perencanaan pembangunan adalah memberikan pedoman, pegangan dan arah, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi yang teratur serta sebagai alat koordinasi dalam rangka proses pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mengacu pula pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali Tahun 2025 telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BRIDA Provinsi Bali tahun 2024-2026, yang berpedoman dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta telah dibahas dalam dengan seluruh pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, dan penyempurnaan. Namun demikian, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sesuai disebutkan dalam pasal 343 ayat (1) bahwa:” Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sekaligus menjawab dinamika perencanaan tahunan daerah, perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 akan dilaksanakan dengan memperhatikan adanya penyesuaian/penyesuaian serta perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya yang harus disesuaikan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan penganggaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BRIDA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- 1) Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Bali di bidang penelitian dan pengembangan;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan BRIDA Provinsi Bali;

- 5) Menciptakan konsistensi dan kesinambungan kegiatan pembangunan serta keselarasan program, kegiatan BRIDA Provinsi Bali dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah;
- 6) Menjadi acuan untuk menyusun evaluasi kinerja tahunan BRIDA Provinsi Bali.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Triwulan II

Pada bab ini memuat evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja BRIDA Provinsi Bali tahun 2025 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan I tahun 2025, kendala yang dihadapi dan solusi yang akan ditempuh.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan BRIDA Provinsi Bali

Dalam Bab ini disajikan seluruh rencana program Penelitian dan Pengembangan Daerah beserta kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun 2025 baik yang mengalami perubahan maupun tidak disertai dengan pendanaannya.

BAB IV Penutup

Pada bab ini menjelaskan harapan dari Perubahan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025 dan mengurai prinsip dan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025 antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Sampai Dengan TW I.

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, Badan Riset dan Inovasi Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama dalam pencapaian target dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Tahun 2025 dan Capaian Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2025

No	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	TARGET KINERJA RENSTRA	REALISASI KINERJA
	SASARAN STRATEGIS		TAHUN 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (66,75)	Persiapan Proses verifikasi Kelengkapan Data Dukung Indikator IID
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholder</i>	100 %	25% (Persiapan, Pembahasan KAK Kajian)
3	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	100 %	100 % (Jumlah fasilitasi 22 permohonan KI)

Sumber: Renstra BRIDA Tahun 2024-2026, data diolah

Dengan memperhatikan dan berpijak pada hal tersebut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan, Badan Riset dan Inovasi Daerah diharapkan ke depannya mampu menjadi *center of excellent* dalam mewujudkan “Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi”, sebagai pusat riset dan inovasi di daerah yang terintegrasi dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sekaligus solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan mendorong pengembangan potensi unggulan daerah demi peningkatan kesejahteraan, melalui peningkatan layanan riset dan inovasi daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diukur setiap tahunnya :

Tabel 2.2

Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Triwulan I T.A 2025
Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024 -2026	2025		Sumber Data	Ket
				Target	Capaian Sampai Dengan Tw I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK PELAYANAN UMUM							
PENUNJANG URUSAN							
4	Penelitian dan Pengembangan						
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	25	Brida	Masih dalam proses pembahasan KAK
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	25	Brida	Masih dalam proses pembahasan KAK
	Penerapan SIDA:					Brida	
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	16,6	85	25	Brida	Dalam proses persiapan
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persen	77,8	85	25	Brida	Dalam proses persiapan

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (ROD) 2024-2026, data diolah

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali Tahun 2025 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan I tahun 2025 dalam upaya mendukung ketercapaian Kinerja Strategis dan Operasional Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025. Proses evaluasi ini dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian sasaran prioritas kelitbangan yang tertuang dalam dokumen Renja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025 dapat terwujud.

Rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali meliputi rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan alokasi anggaran induk sebesar Rp. 23.285.290.479,00. Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri atas 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut ;



Gambar 2.1
Alokasi Belanja BRIDA Tahun Anggaran 2025 (DPA Induk)

Adapun 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan berikut target kinerja dirinci sebagai berikut

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali

No	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	TARGET VOL.SAT
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (2 Program; 9 Kegiatan; 27 Sub Kegiatan)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (6 Kegiatan; 16 Sub Kegiatan)			
I	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	<i>12 Dokumen</i>
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>5 Dokumen</i>
II	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>46 orang/ bulan</i>
4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>8 Paket</i>
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>2 Paket</i>
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>1 Dokumen</i>
9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>1 Laporan</i>
IV	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
10	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah paket mebel yang disediakan</i>	<i>29 paket</i>
11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>42 unit</i>
V	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		

No	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	TARGET VOL.SAT
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>1 Laporan</i>
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>1 Laporan</i>
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Laporan</i>
VI	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>10 unit</i>
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>5 unit</i>
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (3 Kegiatan; 11 Sub Kegiatan)		
VII	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN		
1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	<i>Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan, Rakor BRIDA</i>	<i>5 Dokumen</i>
2	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	<i>Kajian Penelitian Tata Kelola Desa Adat</i>	<i>1 Dokumen</i>
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	a. FGD b. Dokumen Verifikasi Indikator IID (Indeks Inovasi Daerah) c. Dokumen IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) d. Publikasi Jurnal Bali Membangun Bali e. Seminar Nasional Jurnal Bali Membangun Bali	<i>6 Dokumen</i>
4	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/ Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	<i>Kajian Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undanga Tentang Pemerintah Provinsi Bali</i>	<i>1 Rekomendasi</i>
VIII	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
5	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	<i>Laporan/ Kajian/ Penelitian Bidang Ekonomi</i>	<i>5 dokumen</i>
6	Sub Kegiatan Penelitian Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	<i>3 Dokumen</i>

No	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	TARGET VOL.SAT
7	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	<i>1 Dokumen</i>
8	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup</i>	<i>1 dokumen</i>
IX	KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI		
9	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>	<i>1 Laporan</i>
10	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	<i>1 Laporan</i>
11	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual</i>	<i>1 Laporan</i>

Namun demikian, menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1087 Tahun 2025 Tentang Pencermatan Dpa-Skpd Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 11 Februari 2025, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran diminta agar mencermati seluruh DPA SKPD Tahun Anggaran 2025 serta melakukan efisiensi anggaran belanja secara mandiri.

Menindaklanjuti hal tersebut, secara mandiri Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah melakukan efisiensi sebesar Rp 1.302.571.200,00 atau sebesar 5,59 % dari Pagu Induk Awal Tahun 2025 sehingga Pagu Pergeseran BRIDA dalam DPA Tahun 2025 Menjadi sebesar Rp.21.982.719.279,00. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana kerja BRIDA Provinsi Bali sampai triwulan I tahun 2025, realisasi fisik telah mencapai 17,35 persen dari target 20,60 persen (deviasi 3,25 %), sedangkan realisasi keuangan mencapai 14,55 persen dari target 20,60 persen (deviasi 6,05%).

Tabel 2.4
Realisasi Fisik dan Keuangan BRIDA Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I

Bulan Maret

SKPD : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAH AN / UPAYA PEMECAHAN NYA / KETERANGAN LAINNYA
					FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
			(AK)/ REALISASI SD BLN INI	(C / ΣPAGU KEGIATAN)	(=Z)	(ISI MANUAL PPTK)	(H-G)	(F x G)	(F xH)	(K-J)	(=G)	(F/DX100)	(N-M)	(FXM)	(FXN)	(Q-P)	(D-F)	
1	5.05.01.1.01.000 1 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	23,789,000.00	17,716,900.00	0.11%	79.19	74.48	-	0.09	0.08	(0.01)	79.19	74.48	(4.72)	0.09	0.08	(0.01)	6,072,100.00	
2	5.05.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,162,000.00	-	0.16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,162,000.00	
3	5.05.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,284,006,527	2,030,563,138	51.33%	18.02	18.03	0.01	9.25	9.26	0.01	18.02	18.00	(0.02)	9.25	9.24	(0.01)	9,253,443,389	
4	5.05.01.1.06.000 1 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	21,938,000.00	13,457,000.00	0.10%	100.00	100.00	-	0.10	0.10	-	100.00	61.34	(38.66)	0.10	0.06	(0.04)	8,481,000.00	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAH AN / UPAYA PEMECAHAN NYA / KETERANGAN LAINNYA
					FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISA SI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISA SI	DEVIASI		
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
5	5.05.01.1.06.000 2 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,905,500.00	125,021,000.0 0	0.90%	100.00	100.00	-	0.90	0.90	-	100.00	62.85	(37.15)	0.90	0.57	(0.34)	73,884,500.00	
6	5.05.01.1.06.000 4 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107,436,400.00	4,000,000.00	0.49%	32.22	32.22	-	0.16	0.16	-	32.22	3.72	(28.50)	0.16	0.02	(0.14)	103,436,400	
7	5.05.01.1.06.000 5 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24,180,200.00	10,926,000.00	0.11%	34.06	34.06	-	0.04	0.04	-	34.06	45.19	11.13	0.04	0.05	0.01	13,254,200.00	
8	5.05.01.1.06.000 6 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	14,998,700.00	2,017,600.00	0.07%	16.79	16.79	-	0.01	0.01	-	16.79	13.45	(3.33)	0.01	0.01	(0.00)	12,981,100.00	
9	5.05.01.1.06.000 9 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195,834,000.00	24,105,200.00	0.89%	56.71	56.71	-	0.51	0.51	-	56.71	12.31	(44.40)	0.51	0.11	(0.40)	171,728,800	
10	5.05.01.1.07.000 5 - Pengadaan Mebel	411,888,400.00	266,000,000	1.87%	100.00	100.00	-	1.87	1.87	-	100.00	64.58	(35.42)	1.87	1.21	(0.66)	145,888,400	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAH AN / UPAYA PEMECAHAN NYA / KETERANGAN LAINNYA
					FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
11	5.05.01.1.07.001 0 - Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	465,615,240.00	-	2.12%	100.00	-	(100.00)	2.12	-	(2.12)	100.00	-	(100)	2.12	-	(2.12)	465,615,240	
12	5.05.01.1.08.000 1 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,992,600.00	3,180,000.00	0.02%	100.00	100.00	-	0.02	0.02	-	100.00	63.69	(36.31)	0.02	0.01	(0.01)	1,812,600.00	
13	5.05.01.1.08.000 2 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167,200,000.00	27,045,172.00	0.76%	25.00	25.00	-	0.19	0.19	-	25.00	16.18	(8.82)	0.19	0.12	(0.07)	140,154,828	
14	5.05.01.1.08.000 4 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341,506,444.00	95,612,574.00	1.55%	46.62	46.62	-	0.72	0.72	-	46.62	28.00	(18.62)	0.72	0.43	(0.29)	245,893,870	
15	5.05.01.1.09.000 2 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	795,794,806.00	242,750,310.00	3.62%	37.39	37.39	-	1.35	1.35	-	37.39	30.50	(6.89)	1.35	1.10	(0.25)	553,044,496	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAH AN / UPAYA PEMECAHAN NYA / KETERANGAN LAINNYA
					FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
16	5.05.01.1.09.000 9 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,337,527,562.00	203,319,214.00	6.08%	28.58	28.58	-	1.74	1.74	-	28.58	15.20	(13.38)	1.74	0.92	(0.81)	1,059,208,348	
17	5.05.02.1.01.000 2 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4,119,365,000.00	57,812,060.00	18.74%	2.60	-	(2.60)	0.49	-	(0.49)	2.60	1.40	(1.20)	0.49	0.26	(0.22)	4,061,552,940	
18	5.05.02.1.01.008 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	292,539,000.00	6,930,000.00	1.33%	9.60	-	(9.60)	0.13	-	(0.13)	9.60	2.37	(7.23)	0.13	0.03	(0.10)	285,609,000	
19	5.05.02.1.01.001 2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	245,784,000.00	4,075,000.00	1.12%	37.40	-	(37.40)	0.42	-	(0.42)	37.40	1.66	(35.74)	0.42	0.02	(0.40)	223,709,000	
20	5.05.02.1.01.001 3 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Peraturan	193,920,000.00	-	0.88%	13.94	-	(13.94)	0.12	-	(0.12)	13.94	-	(13.94)	0.12	-	(0.12)	193,920,000	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAH AN / UPAYA PEMECAHAN NYA / KETERANGAN LAINNYA
					FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
21	5.05.02.1.03.000 2 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	215,129,000.00	7,075,000.00	0.98%	-	3.61	3.61	-	0.04	0.04	-	3.29	3.29	-	0.03	0.03	208,054,000	
22	5.05.02.1.03.000 4 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	694,682,000.00	12,300,000.00	3.16%	1.78	1.77	(0.01)	0.06	0.06	(0.00)	1.78	1.77	(0.01)	0.06	0.06	(0.00)	682,382,000	
23	5.05.02.1.03.000 6 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	234,732,500.00	3,750,000.00	1.07%	6.84	0.97	(5.87)	0.07	0.01	(0.06)	6.84	1.60	(5.24)	0.07	0.02	(0.06)	230,982,500	
24	5.05.02.1.03.000 7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	218,611,000.00	1,920,000.00	0.99%	1.50	1.50	0.00	0.01	0.01	0.00	1.50	0.88	(0.62)	0.01	0.01	(0.01)	216,691,000	
25	5.05.02.1.04.000 2 Program Kegiatan Uji Coba dan penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi	154,760,000.00	33,228,680.00	0.70%	22.43	29.97	7.54	0.16	0.21	0.05	22.43	21.47	(0.96)	0.16	0.15	(0.01)	121,531,320	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAH AN / UPAYA PEMECAHAN NYA / KETERANGAN LAINNYA
					FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISA SI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISA SI	DEVIASI		
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
26	5.05.02.1.04.000 4Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	61,661,400.00	100,000.00	0.28%	1.07	5.57	4.50	0.00	0.02	0.01	1.07	0.16	(0.90)	0.00	0.00	(0.00)	61,561,400.00	
27	5.05.02.1.04.000 5 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	120,760,000.00	5,965,000.00	0.55%	12.53	10.00	(2.53)	0.07	0.05	(0.01)	12.53	4.94	(7.59)	0.07	0.03	(0.04)	114,795,000	
	JUMLAH	21,982,719,279	3,198,869,848	100.00%	20.60	17.35	(3.25)	20.60	17.35	(3.25)	20.60	14.55	(6.05)	20.60	14.55	(6.05)	18,783,849,431	

Tabel 2.5
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangka t Daerah Penangg ung jawab	Ket
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7			-8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		-12	-13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ Stakeholder dalam perumusan Kebijakan Daerah		0		0.00	100	Persentas e (%)	7,428,959,900.00		133,155,740.00		1.79%	133,155,740.00				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Persentase Kekayaan Intelektual Daerah yang Terasilitasi Pendaftarannya					100	Persentas e (%)									BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5.05.02. 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan				0.00	100	Persentas e (%)	5,209,594,000.00	25	68,817,060.00	2 5	1.32%	68,817,060.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7			-8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		-12	-13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.02.1.01.00.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			5	370,023,922.00	6	Laporan	4,270,000,000.00	1	57,812,060.00	167	1.35%		427,835,982.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.1.01.00.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa			1	236,619,146.00	1	Laporan	325,000,000.00	0	6,930,000.00	0	2.13%		243,549,146.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.1.01.00.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola			6	426,330,602.00	7	Dokumen	386,742,000.00	0	4,075,000.00	0	1.05%		430,405,602.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.1.01.00.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan			1	105,529,792.00	1	rekomendasi	227,852,000.00	0	0.00	0	0.00%		105,529,792.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				0.00	100	Persentase (%)	0.00				#DIV/0!		0.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangka t Daerah Penanggu ng jawab	Ket
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7			-8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		-12	-13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.02. 1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan				0.00	100	Persentas e (%)	1,725,000,000.00		25,045,000.00		1.45%		25,045,000.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02. 1.03.00 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			5	579,5 76,69 3.00	2	Dokumen	250,000,000.00	1	7,075,000.00	5 0	2.83%		586,651,693.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02. 1.03.00 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan			3	941,9 13,40 8.00	4	Dokumen	975,000,000.00	0	12,300,000.00	0	1.26%		954,213,408.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02. 1.03.00 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			1	80,73 9,756 .00	1	Dokumen	266,000,000.00	0	3,750,000.00	0	1.41%		84,489,756.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02. 1.03.00 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			1	67,34 6,559 .00	1	Dokumen	234,000,000.00	0	1,920,000.00	0	0.82%		69,266,559.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02. 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi				0.00	100	Persentas e (%)	494,365,900.00		39,293,680.00		7.95%		39,293,680.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangka t Daerah Penanggu ng jawab	Ket
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7			-8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		-12	-13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.02. 1.04.00 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			1	140,1 65,99 6.00	2	Laporan	185,000,000.00	0	33,228,680.00	0	17.96%		173,394,676.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02. 1.04.00 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan			1	97,99 0,724 .00	1	Laporan	139,365,900.00	0	100,000.00	0	0.07%		98,090,724.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02. 1.04.00 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			1	195,1 86,27 1.00	4	Laporan	170,000,000.00	0	5,965,000.00	0	3.51%		201,151,271.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
2	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		0.00		0.00	80	Nilai	15,856,330,579.00		3,065,714,108.0 0		19.33%		3,065,714,108.0 0		#DIV/0!	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17	39,72 9,100 .00	100	Persentas e (%)	105,000,000.00	25	17,716,900.00	2 5	16.87%		57,446,000.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00	12	Dokumen	55,000,000.00	3	17,716,900.00	2 5	32.21%		17,716,900.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangka t Daerah Penangg ung jawab	Ket
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7			-8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		-12	-13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.01. 1.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00	5	Laporan	50,000,000.00	2	0.00	4 0	0.00%		0.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			552	8,418 ,103, 905.0 0	100	Persentas e (%)	11,284,006,527.00	25	2,030,563,138.0 0	2 5	18.00%		10,448,667,043. 00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0.00	46	Orang/Bul an	11,284,006,527.00	25	2,030,563,138.0 0	2 5	18.00%		2,030,563,138.0 0			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan			14	447,7 27,05 3.00	100	Persentas e (%)	935,482,800.00		179,526,800.00		19.19%		627,253,853.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	6	Paket	21,938,000.00	6	13,457,000.00	1 0 0	61.34%		13,457,000.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	28	Paket	198,905,500.00	28	125,021,000.00	1 0 0	62.85%		125,021,000.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00	8	Paket	107,436,400.00	0	4,000,000.00	0	3.72%		4,000,000.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	6	Paket	24,180,200.00	6	10,926,000.00	1 0 0	45.19%		10,926,000.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangka t Daerah Penangg ung jawab	Ket
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7			-8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		-12	-13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.01. 1.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				0.00	1	Dokumen	14,998,700.00	0	2,017,600.00	0	13.45%		2,017,600.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00	1	Laporan	568,024,000.00	0	24,105,200.00	0	4.24%		24,105,200.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang Diadakan			2	16,50 0,000 .00	100	Persentas e (%)	884,819,840.00		266,000,000.00		30.06%		282,500,000.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0.00	29	Paket	419,204,600.00	29	266,000,000.00	1 0 0	63.45%		266,000,000.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0.00	30	Unit	465,615,240.00	0	0.00	0	0.00%		0.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan			3	438,6 85,32 4.00	100	Persentas e (%)	513,699,044.00		125,837,746.00		24.50%		564,523,070.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7			-8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		-12	-13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.01.1.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0.00	1	Laporan	167,200,000.00	0	27,045,172.00	0	16.18%		27,045,172.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.1.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00	1	Laporan	4,992,600.00	1	3,180,000.00	100	63.69%		3,180,000.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.1.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0.00	1	Laporan	341,506,444.00	1	95,612,574.00	100	28.00%		95,612,574.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan			15	2,410,016,240.00	100	Persentase (%)	2,133,322,368.00		446,069,524.00		20.91%		2,856,085,764.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.1.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0.00	8	Unit	795,794,806.00	0	242,750,310.00	0	30.50%		242,750,310.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.1.09.00.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00	5	Unit	1,337,527,562.00	0	203,319,214.00	0	15.20%		203,319,214.00			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

2.2 Hambatan dan Kendala

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi diketahui bahwa sebagian besar kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, namun masih ada beberapa keterlambatan dalam perealisasiian dalam pengadaan belanja, antara lain belanja sarana dan prasarana gedung kantor dan belanja kajian yang masih dalam proses.

2.3 Solusi

Mempertimbangkan kondisi tersebut dan meminimalkan adanya deviasi (diatas 5 %) terhadap serapan anggaran dan akan dilaksanakan pencermatan kembali terhadap setiap pelaksanaan belanja serta penyesuaian kembali Rencana Aliran Kas (RAK) sekaligus sebagai bentuk upaya pengendalian untuk mendukung optimalisasi sasaran kegiatan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis BRIDA Tahun 2024-2026, perubahan rencana kerja BRIDA Tahun 2025 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan :

- 1) Efektifitas penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
- 2) Efisiensi Sumber Daya dalam mendukung Kemanfaatan kegiatan; dan
- 3) Akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Rumusan Perubahan Renja BRIDA Tahun 2025 merupakan penyesuaian kembali pagu anggaran program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, serta telah mempertimbangkan skala prioritas/urgensi belanja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025 utamanya dalam mendukung kebijakan Pembangunan daerah, meliputi hal-hal, sebagai berikut:

- a. Penyesuaian kembali terhadap belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. Tambahan alokasi pagu anggaran untuk 15 orang pakar sebagai anggota Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.250.000.000,00 sehingga keanggotaan Pokli menjadi 40 orang dari sebelumnya 25 orang.
- c. Tambahan Alokasi Pagu Belanja Untuk Pelaksanaan Kajian sebesar Rp.1.500.000.000,00:
 - 1) Analisis Kelayakan Daerah dan Kelayakan Usaha Pembentukan BUMD Pangan;
 - 2) Analisis Kelayakan Daerah dan Kelayakan Usaha Pembentukan BUMD Energi Bersih;
 - 3) Naskah Akademik Ranperda Pembentukan BUMD Pangan, Energi dan Transportasi;

- 4) Kajian Pengembangan Bawang Putih Lokal Bali; dan
- 5) Master Plan Pengembangan Kawasan Nusa Penida
- d. Tambahan anggaran belanja sebesar Rp. 1.242.473.200,00 untuk:
 - 1) penyusunan 12 Naskah Akademik Ranperda prioritas sebesar Rp.1.200.000.000,00;
 - a) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan;
 - b) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah, serta Praktik NOMINEE;
 - c) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pelindungan Pantai/ Pesisir untuk kepentingan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal;
 - d) Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Usaha Transportasi Pariwisata;
 - e) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penertiban Usaha Pariwisata;
 - f) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pelindungan Wisatawan di Bali;
 - g) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Bali Bersih Sampah;
 - h) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru;
 - i) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Detail Tata Ruang Provinsi Bali dengan Kawasan Tematik untuk Memberi Kepastian Hukum bagi Investor;
 - j) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pelindungan Kesucian Gunung;
 - k) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Badan Pengelola Pariwisata Bali;

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Badan Ekonomi Kreatif dan Digital
 - 2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi masyarakat /krama Bali sebesar Rp.30.000.000,00
 - 3) Pemberian Apresiasi/penghargaan bagi pemenang inovasi daerah (*Swacitta Nugraha*) sebesar Rp.12.473.200,00.
- e. Pergeseran pagu antar sub kegiatan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kajian serta peningkatan sarana dan prasarana perkantoran secara lebih optimal dan memadai.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan kajian pengembangan BUMD dan Penyusunan Master Plan Nusa Penida, maka akan ditambahkan dua sub kegiatan tambahan dalam Perubahan Renja 2025 yakni Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.



Gambar 3.1

Rencana Alokasi Belanja Perubahan BRIDA Tahun Anggaran 2025

Sedangkan Rencana Alokasi Belanja dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja BRIDA Tahun Anggaran 2025 akan dialokasikan terhadap pembiayaan yang bersifat *Fix Cost*, Belanja Penunjang dan Prioritas sesuai tabel berikut:

I. RENCANA KEGIATAN				II. BELANJA FUNGSIONAL	III. BELANJA PROGRAMIS
Sal. dan Tugasan AKM	Sal. dan THK Tugas Kamus	Keterangan Peta	Daerah Bali	Keterangan	Program, Proyek, Pemeliharaan dan Pengembangan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.607.603.521	Sal. dan THK Tugas Rp. 120.109.476 Sal. dan THK Tugas Rp. 120.109.476 Sal. dan THK Tugas Rp. 238.832.440 Sal. dan THK Tugas Rp. 180.285.988 Sal. dan THK Tugas Rp. 120.109.476	Program Kecamatan Kecamatan Provinsi Bali Rp. 5.416.000.000	1. Sal. dan THK Tugas, Rp. Rp. 167.200.000 2. Sal. dan THK Tugas Rp. 546.154.500	1. Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Rp. 58.051.000 2. Sal. dan THK Tugas Rp. 3.074.808.745	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Perumahan dan Pengajian Rural Rp. 2.788.600.000 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Rp. 2.463.154.500 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Rp. 379.554.100
10.607.603.521 (100%)	754.199.948 (100%)	5.416.000.000 (100%)	713.364.541 (100%)	3.132.755.745 (100%)	5.631.416.600 (100%)
	17.883.935.918 (86,87%)			3.132.755.745 (11,84%)	5.631.416.600 (21,32%)
			29.458.707.363 (100%)		

Gambar 3.2

Rencana Prioritas Alokasi Belanja Perubahan BRIDA Tahun Anggaran 2025

Adapun Perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Pagu Indikatif Program dan Kegiatan BRIDA Provinsi Bali Dalam Perubahan Renja Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Badan Riset dan Inovasi Daerah							19.119.816.620,00	23.285.290.479,00	26.458.707.363,00						27.967.650.000,00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							19.119.816.620,00	23.285.290.479,00	26.458.707.363,00						27.967.650.000,00			
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							19.119.816.620,00	23.285.290.479,00	26.458.707.363,00						27.967.650.000,00			
1	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				80 Nilai	80 Nilai	15.324.816.620,00	15.856.330.579,00	15.409.290.763,00							15.574.150.000,00		
	5	05	01	101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	105.000.000,00	105.000.000,00	58.951.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		130.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	10001	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	23.789.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	10001	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

										5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	35.162.000,00	35.162.000,00	Kota Denp asar, Denp asar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Tata Kelola Pemerinta han dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERA H	
	5	05	01	1 . 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administras i Keuangan Perangkat Daerah	-			51 Orang/ Bulan	46 Orang/ Bulan	10.428.500.000, 00	11.284.006.527, 00	10.807.953.52 1,00			-	7. Tata Kelola Pemerinta han dan Reformasi Birokrasi	Apara tur		11.471.350.000, 00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERA H
	5	05	01	1 . 0 2	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/ Bulan	46 Orang/ Bulan	10.428.500.000, 00	11.284.006.527, 00	10.807.953.52 1,00	Kota Denp asar, Denp asar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	7. Tata Kelola Pemerinta han dan Reformasi Birokrasi			11.471.350.000, 00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERA H
	5	05	01	1 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administras i Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	685.568.200,00	935.482.800,00	563.292.800,0 0			Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Tata Kelola Pemerinta han dan Reformasi Birokrasi	Apara tur		696.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERA H
	5	05	01	1 . 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	21.938.000,00	21.938.000,00	21.938.000,00	Kota Denp asar, Denp asar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Tata Kelola Pemerinta han dan Reformasi Birokrasi			23.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERA H
	5	05	01	1 . 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					31 Paket	28 Paket	198.907.000,00	198.905.500,00	198.905.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokras			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	1006	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					9 Paket	8 Paket	107.475.000,00	107.436.400,00	107.436.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	1006	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	6 Paket	24.180.200,00	24.180.200,00	24.180.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	1006	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.998.700,00	14.998.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			16.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	1006	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	318.068.000,00	568.024.000,00	195.834.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			320.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	107			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	-			100 Persen	100 Persen	1.697.754.884,00	884.819.840,00	1.684.011.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
							Pengadaan Mebel																	
	5	05	01	107	005			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	29 Paket	517.834.600,00	419.204.600,00	607.456.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	107	001		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	30 Unit	1.179.920.284,00	465.615.240,00	1.076.555.240,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanak an	-			100 Persen	100 Persen	497.015.980,00	513.699.044,00	519.869.144,00			Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		518.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

	5	05	01	10081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.992.600,00	11.162.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	10082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	167.200.000,00	167.200.000,00	167.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			177.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	10084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	324.815.980,00	341.506.444,00	341.506.444,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			335.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	1009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanak an	-			100 Persen	100 Persen	1.910.977.556,00	2.133.322.368,00	1.775.212.858,00			Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.958.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	10092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	8 Unit	737.999.776,00	795.794.806,00	779.517.101,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			758.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	109	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.172.977.780,00	1.337.527.562,00	995.695.757,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
37	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan				100 Persen 16 Laporan	100 Persen	3.795.000.000,00	7.428.959.900,00	11.049.416.600,00							11.393.500.000,00		
	5	05	02	101		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			6 Laporan	6 Laporan	1.640.000.000,00	5.209.594.000,00	8.206.608.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota			8.065.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	101	002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				6 Laporan	6 Laporan	840.000.000,00	4.270.000.000,00	5.874.365.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi				7.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

	5	05	02	10018	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa				1 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00	325.000.000,00	292.539.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	10012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																	
						Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				7 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	386.742.000,00	245.784.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	10013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																	
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	175.000.000,00	227.852.000,00	1.793.920.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			265.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	1003	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			100 Persen 29 Dokumen	100 Persen	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	2.463.154.500,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Akademisi		2.825.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	10032	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	215.129.000,00	Kota Denpasar, Semu a Kecamatan Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	103	003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				-	3 Dokumen	-	-	500.000.000,00	Kota Denpasar, Semu a Kecamatan Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	103	004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	4 Dokumen	975.000.000,00	975.000.000,00	894.682.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	103	006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	266.000.000,00	266.000.000,00	234.732.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			275.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	103	007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	234.000.000,00	234.000.000,00	218.611.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	103	009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				-	1 Dokumen	-	-	400.000.000,00	Kota Denpasar, Semu a Kecamatan , Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			750.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	104		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-			7 Laporan	100 Persen	430.000.000,00	494.365.900,00	379.654.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi		503.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	104	002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				2 Laporan	2 Laporan	185.000.000,00	185.000.000,00	167.232.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			203.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	104	004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	

							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	139.365.900,00	61.661.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	150.760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangi n Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	J U M L A H												19.119.816.620,00	23.285.290.479,00	26.458.707.363,00						27.967.650.000,00		

BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali Tahun 2025 diharapkan dinamika kegiatan riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), Pengembangan Inovasi Daerah serta tuntutan kebutuhan layanan fasilitasi Kekayaan Intelektual bagi *Krama*/masyarakat di Bali tetap dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam implementasinya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025, telah memperhatikan pencapaian target kinerja yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024– 2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Bali dengan tetap dilakukan penguatan kolaborasi, sinergi, kemitraan, koordinasi dan kerja sama dengan segenap *stakeholder* terkait, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi Bali, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Lembaga Penelitian PTN/PTS di Provinsi Bali, Lembaga Kelitbangan Kementerian/Non Kementerian di Provinsi Bali dan Dunia Usaha dan Industri.

Perubahan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dalam mendukung penyiapan Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Bali, serta sebagai acuan dalam penyesuaian kembali perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan program kegiatan tahun 2025 BRIDA Provinsi Bali yang akan dituangkan dalam Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



RENCANA KERJA BKPSDM PROVINSI BALI TAHUN 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Sesanthi Angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan rencana ini, kami sejauh mungkin berusaha mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 ini tidak akan terlaksana tanpa kerja keras jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas partisipasi tersebut.

Sebaik apapun sebuah rencana harus disertai dengan implementasi yang baik. Untuk itu kami berharap agar Renja ini dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan kemudian dibarengi dengan implementasi yang baik.

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali



Drs. I WAYAN BUDIASA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650601 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu...	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV RENCANA KERJA	
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	26
BAB V PENUTUP.....	27
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

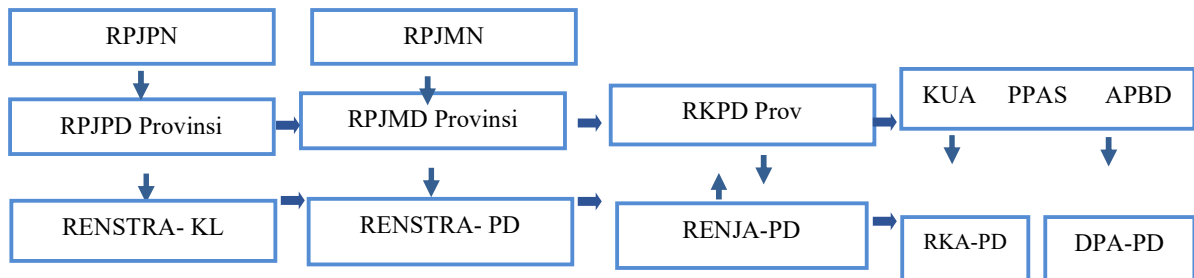
1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan

bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKPSDM Provinsi Bali harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Bali yang tercantum dalam RKPD.



Gambar 1.1

Hubungan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali 2025 merupakan penjabaran dari Rancangan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali 2024-2026, Rancangan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, serta hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali 2018-2023. Penyusunan Renja tersebut diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh Bappeda. Tahapan selanjutnya adalah melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah kepada seluruh Tim Penyusun. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali. Materi orientasi yang diberikan meliputi: tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali 2025, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusun Renja Perangkat Daerah, dan kesiapan Data SIPD. Setelah tahapan orientasi dilakukan, lanjut tim penyusun menyusun agenda kegiatan, dan melakukan proses penyusunan dengan

terlebih dahulu menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Renja BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi strategis yang dihadapi BKPSDM saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja pencapaian Rencana Strategis BKPSDM Provinsi Bali.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025. Penjabaran ini merupakan upaya menjaga konsistensi dan sinkronisasi perencanaan Pemerintah Daerah dan perencanaan pada perangkat daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali 2025 adalah :

1. Menentukan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tahun 2025.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2025 dengan RKPD tahun 2025.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Sistematika Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan⁶
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Bali dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang kepegawaian melaksanakan 3 (tiga) Program dan 46 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun kelima akan diuraikan secara detail pada Lampiran.

Secara umum program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali pada tahun 2023 telah dapat terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari pencapaian fisik dan keuangan, capaian yang diraih Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali telah cukup optimal, dimana rata-rata tertimbang capaian fisik mencapai 98,69% dan capaian keuangan mencapai 87,86%. Berikut data capaian fisik dan keuangan dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Realisasi fisik dan keuangan BKPSDM Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2025

NO	Unit / Program	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
1	BKPSDM Provinsi Bali				
	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	34.904.503.485	6.738.266.821	19,30	26,54
	2) Program Kepegawaian Daerah	3.980.709.552	627.886.174	15,78	18,25
	3) Program Pengembang	1.160.814.394	33.518.946	2,89	3,54

NO	Unit / Program	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
	an Sumber Daya Manusia				
2	UPTD. PKP				
	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	383.965.252	106.150.674	27,65	35,57
	2) Program Kepegawaian Daerah	1.451.247.300	11.292.600	0,78	4,70
3	UPTD. PKSDM				
	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8.000.000.000	892.417.135	11,16	22,25
	Total	49.880.639.983	8.409.532.350	16,86	24,10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebagai lembaga teknis mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang kepegawaian, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menjalankan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dituntut menghasilkan kinerja pelayanan yang berkualitas, yang diukur dengan sejumlah indikator kinerja.

Target sasaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pelayanan yang diberikan mulai dari Kenaikan Pangkat Pegawai, Pensiun pegawai, serta layanan yang terkait dengan kepegawaian.

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tidak mengukur kinerjanya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), melainkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pelaksanaan kinerja pelayanan telah sesuai dengan NSPK. Pengukuran kinerja berdasarkan Indikator Kinerja utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pengukuran Capaian Kinerja BKPSDM Provinsi Bali tahun 2024 diukur berdasarkan pada cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	skala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Indeks sistem merit	0.82	0,94	114,63	Sangat Baik

Berdasarkan Keputusan komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 190/KEP.KASN/C/XI/2023 Tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan Bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan, pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 386,5 (tiga ratus delapan puluh enam koma lima), dan Indeks 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat). Keputusan KASN ini berlaku 2 tahun yaitu dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Capaian kinerja BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024 telah melewati target yang ditetapkan pada Renstra maka di tahun 2025, BKPSDM Provinsi Bali akan menetapkan target kinerja diatas realisasi yang telah dicapai yaitu target sebesar 0,95 .

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Yang dimaksud dengan prinsip meritokrasi adalah pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi dan kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Tujuan sistem merit adalah mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas, Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN, Memberikan kepastian karier ASN, Mengelola ASN secara efektif dan efisien, Memberikan penghargaan bagi ASN

yang adil dan layak. Untuk itu sangat penting dilakukan penilaian sistem merit untuk memastikan bahwa sistem merit diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Perolehan nilai sistem merit Provinsi Bali dengan Kementrian dan Provinsi lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Tahun 2024 perolehan nilai sistem merit Pemerintah Provinsi Bali (BKPSDM) mendapatkan Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 386,5 (tiga ratus delapan puluh enam koma lima) berada di bawah Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 400 (empat ratus). Namun Provinsi Bali masih unggul dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan Kategori IV (Sangat Baik) dengan Nilai 383 (tiga ratus delapan puluh tiga). Perolehan nilai sistem merit Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memperoleh nilai 390 (tiga ratus sembilan puluh) dengan kategori IV (Sangat Baik) lebih unggul dibandingkan Provinsi Bali. Sedangkan jika dibandingkan dengan BKN dengan nilai 380 (tiga ratus delapan puluh) dan kategori IV (Sangat Baik), Provinsi Bali masih unggul. Sebagai wujud penerapan sistem merit yang sangat baik, Pemerintah Provinsi Bali (BKPSDM) menjadi salah satu dari 22 Instansi Pemerintah yang telah disetujui untuk mengisi JPT melalui *Talent Pool*, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.2 Instansi Pemerintah Yang Telah Disetujui Untuk Mengisi JPT Melalui Talent Pool

2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Tahun 2024 dengan Tujuan/sasaran strategis yaitu meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sudah tercapai dengan baik, bahkan melewati target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Provinsi Bali. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja BKPSDM Provinsi Bali, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Yang Dilakukan

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Indeks sistem merit	0.82	0,94	116,4	Komitmen pimpinan	Komitmen pimpinan menjadi faktor terbesar yang memberikan arah yang jelas bagi seluruh pegawai BKPSDM Prov .Bali dalam merencanakan dan menetapkan target kinerja, rencana

					• Sumber Daya Manusia, Ketersediaan sumber daya manusia sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi rencana program dan kegiatan tidak mungkin dilakukan. Kerjasama tim yang solid dan komitmen pimpinan menyebabkan tujuan organisasi tercapai. • Pelayanan Publik dilaksanakan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada • Meningkatnya Pengembangan kompetensi ASN • Meningkatnya penerapan manajemen talenta	aksi dan merealisasikannya • Memastikan sumber daya manusia memadai dengan mengikuti diklat ,seminar,workshop,dll • Mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana • Terdapat inovasi - inovasi baru yang memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian seperti SIMATA, Ruang Konsultasi Virtual, SAMRT VAC 5.0, PLASMA ,Jagat Kerthi dan SICORPU • merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi ASN dengan berbasis corporate university melalui diklat, seminar , workshop sehingga ASN dapat memenuhi 20 JP pertahun • Melakukan pemetaan dan pengembangan talenta PNS dalam SIMATA • Konsisten melakukan peremajaan data dan informasi dalam SIMPEG dan SIMATA sehingga memuat data yang valid dan

						terkini untuk dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan kebutuhan pegawai • Memanfaatkan SIMATA dalam pengembangan karier pegawai dalam rangka promosi sehingga pengisian jabatan dilakukan lebih transparan, terbuka, adil dan objektif. • Meningkatkan kinerja dan integritas ASN • Melakukan penegakan disiplin ASN, memberikan sanksi dan penghargaan, melakukan penerapan kode etik dan perilaku ASN. • Pemantauan kinerja pegawai secara berkala dan mengoptimalkan dialog kinerja sebagai media komunikasi dan monitoring kinerja pegawai dengan evaluasi kinerja secara periodik disertai umpan balik .

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebagai instansi yang bertanggung jawab atas manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdapat isu-isu strategis yang dihadapi dan perlu dipecahkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut, antara lain:

1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja belum optimal

Pengembangan aparatur merupakan kesempatan yang diberikan instansi pemerintah kepada para pegawai ASN untuk meningkatkan prestasi pada jabatan-jabatan strategis melalui pola karier (*career path*). Problem yang terjadi di instansi pemerintah justru selama ini belum ada perencanaan yang jelas terhadap pengembangan aparatur. Kurang optimalnya pengembangan aparatur ASN di instansi pemerintah menunjukkan salah satu bukti bahwa perencanaan pengembangan ASN belum didesain secara optimal. Pengembangan aparatur selain sebagai pedoman penjenjangan karir, juga berfungsi sebagai alat motivasi pegawai dalam melaksanakan peran, tugas pokok, dan fungsinya.

Konsekuensi dari kebijakan pengalihan guru SMA/SMK yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, memadai dan berkualitas. Bertambahnya jumlah pegawai yang dikelola 100% lebih dari jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Bali sebelum pelimpahan pegawai dari Kabupaten/Kota, maka Kepegawaian Daerah Provinsi Bali berkewajiban memberikan pelayanan kepegawaian yang memadai. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbunyi “Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Standar Kinerja perlu dioptimalkan sehingga membantu pegawai memahami lingkup tanggungjawab, skill, pengetahuan serta tugas pokok dan fungsi, mendukung perlakuan yang sama pada jabatan yang

sama, serta memfasilitasi komunikasi antara pimpinan dan staf atas pelaksanaan pekerjaan

2. Sistem Layanan Kepegawaian Belum Terintegrasi

Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diselenggarakan berdasarkan sistem merit (*merit system*), yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Inti dari sistem merit adalah bahwa semua keputusan manajemen kepegawaian semata-mata didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta sama sekali tidak boleh dicemari oleh praktek-praktek KKN. Penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan sistem merit diharapkan dapat membuat semua pegawai ASN terpacu untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya serta menunjukkan kinerja maksimum karena dalam sistem merit setiap orang dihargai berdasarkan ketiga faktor tersebut.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil konsekuensi mengimplementasikan sistem merit dalam manajemen kepegawaian adalah menghasilkan Reformasi bidang kepegawaian melalui transformasi manajemen kepegawaian mulai dari administrasi kepegawaian, manajemen SDM, Pengembangan potensi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten sejahtera melayani.

Salah satu aspek dari merit sistem adalah sistem informasi dimana dengan adanya sistem informasi dimungkinkan untuk menyusun basis data terpadu serta dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN. Sistem yang dimiliki haruslah saling terintegrasi sehingga memberikat data yg update tanpa harus melakukan input data yang sama berulang kali mada sistem yang berbeda, hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar sistem kepegawaian memberikan informasi dan layanan yang maksimal.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan lembaga teknis yang memberikan pelayanan kepada para pegawai ASN dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta pelayanan tertentu kepada sebagian pegawai ASN di lingkungan Kabupaten/Kota di Bali. Pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain dalam penerimaan CPNS serta calon praja IPDN. Untuk renja tahun 2025, tidak terdapat usulan program dan kegiatan langsung dari pihak masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi yang hendak dicapai melalui pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Kesemuanya itu dituangkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan

antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan menyusun program yang secara langsung mendukung prioritas pembangunan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, serta secara tidak langsung berkontribusi atas sasaran pembangunan yang lain.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi perangkat daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menetapkan tujuan, yaitu **“Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Bali”** Tujuan ini sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Bali yaitu untuk Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. Misi ini hanya dapat dicapai jika pengelolaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara *Specific* (spesifik), *Measureable* (dapat diukur), *Attributable* (Bermanfaat), *Reliable* (Dapat dipercaya), *Timely* (Tepat waktu) dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, kearifan lokal yang ada di masyarakat, serta mengantisipasi tantangan dan peluang, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan visi yang akan dicapai yaitu

"Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan

Semesta Berencana dalam Bali Era Baru"

yang bermakna "Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala - Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945."

Demi mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 22 (dua puluh dua) Misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai strategi untuk menjaga, memperkuat, dan memajukan Alam, Manusia, serta Kebudayaan Bali. Adapun Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Misi 1.** Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.
- Misi 2.** Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
- Misi 3.** Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.
- Misi 4.** Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.
- Misi 5.** Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu,

professional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Misi 6. Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

Misi 7. Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Misi 8. Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan Pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalyaya dan Pasraman di Desa Adat.

Misi 9. Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali

Misi10. Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional

Misi11. Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali

Misi12. Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.

Misi13. Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali.

Misi14. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.

Misi15. Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.

Misi16. Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.

Misi17. Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.

Misi18. Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan

Misi19. Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.

Misi20. Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih

Misi21. Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.

Misi22. Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali, peran sumber daya manusia (SDM) sangatlah menentukan. RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) salah satu tujuan pembangunan Provinsi Bali adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan salah satu sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN.

Tanpa SDM yang kompeten, yang dikelola dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, visi dan misi Provinsi Bali hanya akan menjadi untaian kata-kata indah di atas kertas. Oleh karenanya, BKPSDM Provinsi Bali berusaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas manajemen SDM Aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebagai tujuan yang ingin dicapai sekaligus dalam rangka untuk mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Bali periode 2025-2029. Peran ini makin penting mengingat bahwa salah satu misi yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Bali adalah Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan sasaran yang sama dengan tujuan diatas yaitu Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali, untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator yaitu indeks merit sistem, sasaran dan indikator dapat kami sampaikan pada tabel berikut :

Rencana Strategis BKPSDM Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal periode (2021)	Target Tahun ke-			Kondisi Kinerja pada akhir periode
					1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)	
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	0.80	0.82	0.83	0.84	0.84

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	8
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Indeks sistem merit	0.95	Capaian kinerja BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2024 telah melewati target yang ditetapkan pada Renstra 2024-2026 maka di tahun 2025, BKPSDM Provinsi Bali akan menetapkan target kinerja diatas realisasi yang telah dicapai yaitu target sebesar 0,95 .

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi perangkat daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



barang/jasa. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
- b. Target kinerja sesuai RPJMN.
- c. Target kinerja Kementerian terkait.
- d. Pencapaian NSPK, khususnya bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pada tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali melakukan penyusunan Program dan kegiatan yang akan direncanakan dengan melihat kondisi serta tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 sesuai dengan lampiran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tahun 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan pendanaan belanja untuk program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada Renja Tahun 2025 sebesar Rp. 60,677,584,666,-. Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 beserta pagu anggaran, indikator dan target kinerja, serta lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran.

BAB V

PENUTUP

Sebagai satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini memiliki kedudukan yang sangat penting untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Rencana Kerja ini menerjemahkan perencanaan jangka menengah ke dalam rencana tahunan yang bersifat operasional dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang.

Rencana Kerja (Renja) ini bukanlah sebuah dokumen yang berdiri sendiri. Di satu sisi, Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 dan di sisi lain menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tahun 2025.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tahun 2025 ini ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dan pada esensinya merupakan komitmen bersama dari semua jajaran pimpinan dan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Oleh karena itu semua jajaran pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh demi tercapainya target-target kinerja selama tahun 2024 serta terwujudnya visi, misi, tujuan serta sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun.



Bali, 9 Juli 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Drs. I WAYAN BUDIASA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650601 199203 1 001

LAMPIRAN



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
 - c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; dan
 - d. melaporkan hasil kerja Tim kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 5 Maret 2024



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI
NOMOR B.30.000.7.2/3968/SET/BKPSDM TANGGAL 5 MARET TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA TAHUN 2025 BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 2. Kepala Bidang Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 3. Kepala Bidang Jabatan Administrasi dan Pimpinan Tinggi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 5. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 6. Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
 7. Kepala UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 5 Maret 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BADAN Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19650601 199203 1 001



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





පිළිගිණු ආරාධිතයා
PEMERINTAH PROVINSI BALI
තැනැත්තීන්ගේ සේවය සඳහා
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
සම්පත් මානව
SUMBER DAYA MANUSIA

තැනැත්තීන්ගේ සේවය සඳහා
Jalan Cok Agung Tresna Nomor 31 Denpasar (80235). Telepon (0361) 227217
Laman : www.bkpsdm.baliprov.go.id, Pos-el : bkpsdm@baliprov.go.id

BERITA ACARA
Nomor : B.10.996/1962/SET/BKPSDM

**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI BALI**

Pada hari Senin tanggal 19 bulan Pebruari tahun 2024 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 19 Februari 2024

Pukul : 13.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Melati UPTD PKSDM Provinsi Bali

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2025
BKPSDM Provinsi Bali.

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi;
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Renja BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah BKPSDM Provinsi Bali; dan
- KELIMA** : Berita Acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi untuk Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

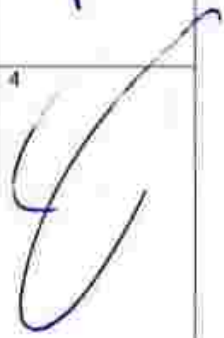
Bali, 19 Februari 2024
Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali,

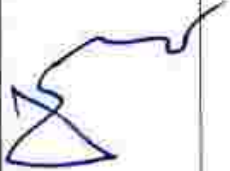


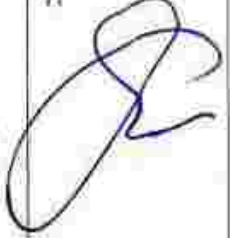
I DEWA PUTU SUNARTHA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19650430 199112 1 002

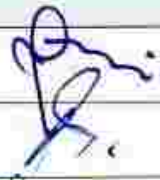
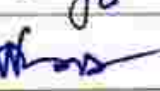
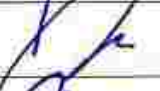
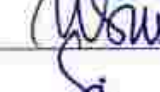
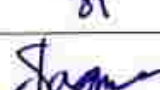
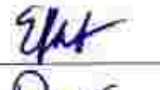
Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	Dr. Yudhantoro Bayu Wiratmoko, S.Kom, MMSI Hp. 0361 728384	Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara	Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai No 646 Suwung, Denpasar-Bali	¹ 
2	NIWAYAN Menta Suyasa Hp. 081337554899	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem	Jl. Untung Surapati, Subagan, Kabupaten Karangasem-Bali	² 
3	NIWAYAN SRI LASMIRI Hp. 08133467636	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar	Jl Kebo Iwo Gianyar-Bali	³ 
4	MADE MATHINDRA PUTRA, SSTP, AMN Hp. 08113887836	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Bangli	Jl. Brigjen Ngurah Rai No.22, Kawan, Kabupaten Bangli,-Bali	⁴ 

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
5	Siluh Ketut Natalis Semaradani, S. Sos, M. Si Hp. 0812363949	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana	Jl. Surapati No 1 Negara Kabupaten Jembrana Bali	5 
6	I Gusti Ayu Satnika Subakti, S. STP, M, PA Hp. 0361811203	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Tabanan	Jl. Pahlawan, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali	6 
7	I Putu Wicaksana, SSTP, Si, MH Hp. 03619009240	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Badung	Jl. Raya Sempidi, Kabupaten Badung-Bali	7 
8	I Gede Arya R. Girei Hp. 081805512908	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Buleleng	Jln. Laksamana Baktiseraga, Buleleng,-Bali	8 
9	W. Dhiantari Hp. 081337139449	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Klungkung	Semarapura, Kecamatan Klungkung, Klungkung, Bali	9 

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
10	Puwa Agus Mahendra Udayana, SE, MM Hp. 081737789444	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	Jl. Mataram No.2 Denpasar	10 
11	Ida Bagus Gede Wesnawa Purna, ST. M. SI Hp 0361226974	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	Jl Kapten Cokorda Agung Tresna, Niti Mandala, Renon, Denpasar	11 

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No telp.	Tanda tangan
42	Satrika Sukati	BKPSDM Tabanan	Jl. Pahlawan no 15	42 
43	Devi Puji Hg	UPP MUP	Jl. ut 1 .MP	43 
44	IB Gat Dianto Kurniawan	Disdikpora prov	Jl puputan	44 
45	Awad Yoga Eryans	Bapenda	Jl. Cendekia	45 
46	NI kadik Sumari.	Discominpos	Jl Di Panjaitan	46 
47	NI kt wurdan	Biro Kesra	081933028938	47 
48	Ikanf Anni Widiastu	B. Pura Kesra	081933044529	48 
49	Windu Kanaka	Biro Hukum	08172504160	49 
50	hi pt karni j.	BKPSDM	0818144860	50 
51	MADE MAHINDRA	BKPSDM Tabanan	0811302036	51 
52	Natalij	BKPSDM Tabanan	08123639649	52 
53	Purni Mesuli adi	BKPSDM	08214600001	53 
54	Thengy Trii Angah	BKPSDM	08113861733	54 
55	W. Mela	BKPSDM	08196107602	55 
56	Eri Dipta A	BKPSDM	081999035457	56 
57	Yudhananda S.W	BKN	08111930001	57 
58	I.A. Widyantani A	BKN	0817397514	58 
59	Siska	PUPRKIM	08113999392	59 
60	Sangung Vadiada	BKPSDM		60 
61	Sang De	BKPSDM		61 
62	Candra	BKPSDM		62 "Candra"
63	Dewi Erawati	BKPSDM		63 
64	Dian	BKPSDM		64 
65	Dayu Bulan	BKPSDM		65 

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No telp.	Tanda tangan
66	I W Sumanjaya	657	08144584436	66
67	I Putu Suparta Jaya	Rappata	085767441566	67
68	Gsa Ayu Ratna	BKPSDM		68
69	Komang Puspini	BKPSDM		69
70	Dayu Rini	BKPSDM		70
71	Puerama Andani	BKPSDM		71
72	Linda Yasmita	BKPSDM		72
73	Md. Agus Dwi. S.	BKPSDM		73
74	Ika Ayu R Puspawati	BKPSDM		74
75	Ketut Nilon	BKPSDM		75
76	A.A. Ketna H.	BKPSDM		76
77	Md. Aat Suryawan	BKPSDM		77
78	Mina Rosanti	BKPSDM		78
79	NILOM	BKPSDM	085737270793	79
80	Ari Suryawati	BKPSDM	082144067220	80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No telp.	Tanda tangan
90	IMARETTE V H W	BKN	081 236 00565	90 
91	Mahadi Sanatana	BKPSDM		91
92	Md Dwi Dewatta	BKPSDM		92
93	Md Agus Asta Panca	BKPSDM		93
94	Komang Mastika	BKPSDM		94
95	Komang Noparlanan	BKPSDM		95
96	Gede Hendra	BKPSDM		96
97	Cod Putra Adnyana	BKPSDM		97
98	Candra Parwata	BKPSDM		98
99	Themy Tein. A.	BKPSDM		99
100	Putu Karma. J.	BKPSDM		100

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
 NOMOR : B.10.996/1962/SET/BKPSDM
 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Provinsi Bali Tahun 2025**

Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Sisa Target Kinerja yang belum tertangani	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2025	Kebutuhan Dana Tahun 2025	Lokasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,55 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	87 Nilai	86 Nilai	29.224.552.282	Bali
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	4 jenis	243.743.500	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	65.646.000	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.600.000	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	93.197.500	
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	81.300.000	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 laporan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	25.133.219.762	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 orang/bulan	138 orang/bulan	137 orang/bulan	137 orang/bulan	137 orang/bulan	25.133.219.762	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	-	-	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	17 Orang	26 Orang	26 Orang	-	-	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	7 layanan	6 layanan	7 layanan	7 layanan	6 jenis	559.010.400	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	17.766.000	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 paket	3 paket	3 paket	4 paket	153.768.400	
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	3 paket	98.891.000	

[illegible]

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Sisa Target Kinerja yang belum tertangani	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2025	Kebutuhan Dana Tahun 2025	Lokasi
	1 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	87.950.240	
	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	152.502.440	
	3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	198.503.140	
	3 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	4jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis	5 jenis	14.338.948.632	
	1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	164.375.140	
	2 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	-	1 Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	13.949.999.316	
	3 Evaluasi Diklat dan sertifikasi jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	-	-	-	1 laporan	1 laporan	50.000.000	
	4 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	48.447.000	
	5 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	126.127.176	
	4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	646.885.540	
	1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	151.958.280	
	2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1155 orang	800 orang	3 orang	3 orang	3 orang	162.254.000	
	3 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1227 orang	1200 orang	1500 orang	1500 orang	1500 orang	138.090.280	
	4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	32.684.700	
	5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi pegawai	jumlah Asn yangdiberikan tanda jasa	-	-	-	400 orang	400 orang	161.898.280	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.011.075.420	Bali
	1 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah jenis kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan	100 persen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	6 jenis	2.011.075.420	
	1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	305.362.140	
	2 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten Kota yang Tersertifikasi	6.167 Orang	100 orang	70 Orang	70 Orang	120 orang	550.308.440	
	3 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	317.338.000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Sisa Target Kinerja yang belum tertangani	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2025	Kebutuhan Dana Tahun 2025	Lokasi
	4 Pembinaan,Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	149.444.000	
	5 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	-	-	-	2 laporan	2 laporan	567.778.000	
	6 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	3 dokumen	20 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	120.844.840	
Jumlah								48.688.706.454	

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
 NOMOR : B.10.996/1962/SET/BKPSDM
 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2024

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Provinsi Bali Tahun 2025**

Sub Unit : UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Sisa Target Kinerja yang belum tertangani	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2025	Kebutuhan Dana Tahun 2025	Lokasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,55 nilai	86 nilai	87 nilai	87 nilai	86 Nilai	443.372.280	Bali
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	62.541.100	
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 paket	3 paket	3 paket	11.815.100	
	2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	1 laporan	8 laporan	8 laporan	1 laporan	50.726.000	
	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	26.951.400	
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	2 unit	6 unit	6 unit	7 unit	26.951.400	
	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	263.774.980	
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 laporan	5 laporan	38 laporan	38 laporan	5 laporan	263.774.980	
	4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana	1 jenis	2 layanan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	90.104.800	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	2 unit	-	-	2 unit	78.214.800	
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	17 unit	17 unit	17 unit	12 unit	11.890.000	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	-	59 ,00 nilai	61.00 Nilai	61.00 Nilai	60 nilai	1.807.822.500	Bali
	1 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1.807.822.500	
	1 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	34 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.807.822.500	
Jumlah								2.251.194.780	

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH

NOMOR : B.10.996/1962/SET/BKPSDM

TANGGAL : 19 PEBRUARI 2024

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Bali Tahun 2025

Sub Unit : UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Sisa Target Kinerja yang belum tertangani	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2025	Kebutuhan Dana Tahun 2025	Lokasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,55 nilai	83 Nilai	83 nilai	83 nilai	83 Nilai	6.959.832.000	Bali
	1 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	88 persen	6.959.832.000	
	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	6.959.832.000	

LAMPIRAN III : BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT
DAERAH PROVINSI
NOMOR : B.10.996/1962/SET/BKPSDM
TANGGAL : 19 PEBRUARI 2024

**Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Perangkat Daerah BKPSDM Provinsi Bali**

N o	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

MANUSCRIPT RECEIVED FOR THE JOURNAL
FROM THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES
ON 10/10/1967

ID	Projektname	Investitionsbetrag (€)	Kosten (€)	Erwarteter Cashflow (€)	NPV (€)	Sensitivitätsanalyse																Risikoindex	Bemerkungen
						Szenario 1: Optimistisch								Szenario 2: Realistisch									
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		
1	Projekt A: Neuentwicklung Produkt X	10.000.000	8.000.000	12.000.000	1.000.000	U1: 12.500.000	U2: 12.000.000	U3: 11.500.000	U4: 11.000.000	U5: 10.500.000	U6: 10.000.000	U7: 9.500.000	U8: 9.000.000	R1: 13.000.000	R2: 12.500.000	R3: 12.000.000	R4: 11.500.000	R5: 11.000.000	R6: 10.500.000	R7: 10.000.000	R8: 9.500.000	0,8	Hohe Rendite, geringes Risiko
2	Projekt B: Erweiterung bestehender Linie	5.000.000	4.000.000	6.000.000	0,500.000	U1: 6.500.000	U2: 6.000.000	U3: 5.500.000	U4: 5.000.000	U5: 4.500.000	U6: 4.000.000	U7: 3.500.000	U8: 3.000.000	R1: 7.000.000	R2: 6.500.000	R3: 6.000.000	R4: 5.500.000	R5: 5.000.000	R6: 4.500.000	R7: 4.000.000	R8: 3.500.000	0,5	Mittlere Rendite, mittleres Risiko
3	Projekt C: Marktforschung & Prototyp	2.000.000	1.500.000	3.000.000	0,200.000	U1: 3.500.000	U2: 3.000.000	U3: 2.500.000	U4: 2.000.000	U5: 1.500.000	U6: 1.000.000	U7: 500.000	U8: 0	R1: 4.000.000	R2: 3.500.000	R3: 3.000.000	R4: 2.500.000	R5: 2.000.000	R6: 1.500.000	R7: 1.000.000	R8: 500.000	0,2	Niedrige Rendite, hohes Risiko
4	Projekt D: Automatisierung Produktion	15.000.000	12.000.000	18.000.000	1.500.000	U1: 18.500.000	U2: 18.000.000	U3: 17.500.000	U4: 17.000.000	U5: 16.500.000	U6: 16.000.000	U7: 15.500.000	U8: 15.000.000	R1: 19.000.000	R2: 18.500.000	R3: 18.000.000	R4: 17.500.000	R5: 17.000.000	R6: 16.500.000	R7: 16.000.000	R8: 15.500.000	0,7	Hohe Rendite, hohes Risiko
5	Projekt E: Neuentwicklung Software	8.000.000	6.000.000	10.000.000	0,800.000	U1: 11.000.000	U2: 10.500.000	U3: 10.000.000	U4: 9.500.000	U5: 9.000.000	U6: 8.500.000	U7: 8.000.000	U8: 7.500.000	R1: 11.500.000	R2: 11.000.000	R3: 10.500.000	R4: 10.000.000	R5: 9.500.000	R6: 9.000.000	R7: 8.500.000	R8: 8.000.000	0,6	Mittlere Rendite, hohes Risiko
6	Projekt F: Marketingkampagne	3.000.000	2.000.000	4.000.000	0,300.000	U1: 4.500.000	U2: 4.000.000	U3: 3.500.000	U4: 3.000.000	U5: 2.500.000	U6: 2.000.000	U7: 1.500.000	U8: 1.000.000	R1: 5.000.000	R2: 4.500.000	R3: 4.000.000	R4: 3.500.000	R5: 3.000.000	R6: 2.500.000	R7: 2.000.000	R8: 1.500.000	0,3	Niedrige Rendite, hohes Risiko
7	Projekt G: Personalentwicklung	1.000.000	700.000	1.500.000	0,100.000	U1: 1.800.000	U2: 1.600.000	U3: 1.400.000	U4: 1.200.000	U5: 1.000.000	U6: 800.000	U7: 600.000	U8: 400.000	R1: 2.000.000	R2: 1.800.000	R3: 1.600.000	R4: 1.400.000	R5: 1.200.000	R6: 1.000.000	R7: 800.000	R8: 600.000	0,1	Niedrige Rendite, hohes Risiko
8	Projekt H: Logistikoptimierung	6.000.000	4.500.000	8.000.000	0,600.000	U1: 9.000.000	U2: 8.500.000	U3: 8.000.000	U4: 7.500.000	U5: 7.000.000	U6: 6.500.000	U7: 6.000.000	U8: 5.500.000	R1: 9.500.000	R2: 9.000.000	R3: 8.500.000	R4: 8.000.000	R5: 7.500.000	R6: 7.000.000	R7: 6.500.000	R8: 6.000.000	0,4	Mittlere Rendite, hohes Risiko
9	Projekt I: Forschung & Entwicklung	20.000.000	15.000.000	25.000.000	2.000.000	U1: 28.000.000	U2: 26.000.000	U3: 24.000.000	U4: 22.000.000	U5: 20.000.000	U6: 18.000.000	U7: 16.000.000	U8: 14.000.000	R1: 30.000.000	R2: 28.000.000	R3: 26.000.000	R4: 24.000.000	R5: 22.000.000	R6: 20.000.000	R7: 18.000.000	R8: 16.000.000	0,9	Sehr hohe Rendite, sehr hohes Risiko
10	Projekt J: Wartung & Instandhaltung	4.000.000	3.000.000	5.000.000	0,400.000	U1: 5.500.000	U2: 5.000.000	U3: 4.500.000	U4: 4.000.000	U5: 3.500.000	U6: 3.000.000	U7: 2.500.000	U8: 2.000.000	R1: 6.000.000	R2: 5.500.000	R3: 5.000.000	R4: 4.500.000	R5: 4.000.000	R6: 3.500.000	R7: 3.000.000	R8: 2.500.000	0,4	Mittlere Rendite, hohes Risiko
11	Projekt K: Neuentwicklung Produkt Y	12.000.000	9.000.000	14.000.000	0,900.000	U1: 14.500.000	U2: 14.000.000	U3: 13.500.000	U4: 13.000.000	U5: 12.500.000	U6: 12.000.000	U7: 11.500.000	U8: 11.000.000	R1: 15.000.000	R2: 14.500.000	R3: 14.000.000	R4: 13.500.000	R5: 13.000.000	R6: 12.500.000	R7: 12.000.000	R8: 11.500.000	0,7	Hohe Rendite, hohes Risiko
12	Projekt L: Erweiterung bestehender Linie Z	7.000.000	5.000.000	9.000.000	0,700.000	U1: 10.000.000	U2: 9.500.000	U3: 9.000.000	U4: 8.500.000	U5: 8.000.000	U6: 7.500.000	U7: 7.000.000	U8: 6.500.000	R1: 10.500.000	R2: 10.000.000	R3: 9.500.000	R4: 9.000.000	R5: 8.500.000	R6: 8.000.000	R7: 7.500.000	R8: 7.000.000	0,6	Mittlere Rendite, hohes Risiko
13	Projekt M: Marktforschung & Prototyp W	1.500.000	1.000.000	2.500.000	0,150.000	U1: 3.000.000	U2: 2.500.000	U3: 2.000.000	U4: 1.500.000	U5: 1.000.000	U6: 500.000	U7: 0	U8: 0	R1: 3.500.000	R2: 3.000.000	R3: 2.500.000	R4: 2.000.000	R5: 1.500.000	R6: 1.000.000	R7: 500.000	R8: 0	0,1	Niedrige Rendite, hohes Risiko
14	Projekt N: Automatisierung Produktion V	18.000.000	14.000.000	22.000.000	1.800.000	U1: 22.000.000	U2: 21.000.000	U3: 20.000.000	U4: 19.000.000	U5: 18.000.000	U6: 17.000.000	U7: 16.000.000	U8: 15.000.000	R1: 23.000.000	R2: 22.000.000	R3: 21.000.000	R4: 20.000.000	R5: 19.000.000	R6: 18.000.000	R7: 17.000.000	R8: 16.000.000	0,8	Hohe Rendite, hohes Risiko
15	Projekt O: Neuentwicklung Software U	9.000.000	7.000.000	11.000.000	0,900.000	U1: 12.000.000	U2: 11.500.000	U3: 11.000.000	U4: 10.500.000	U5: 10.000.000	U6: 9.500.000	U7: 9.000.000	U8: 8.500.000	R1: 12.500.000	R2: 12.000.000	R3: 11.500.000	R4: 11.000.000	R5: 10.500.000	R6: 10.000.000	R7: 9.500.000	R8: 9.000.000	0,7	Mittlere Rendite, hohes Risiko
16	Projekt P: Marketingkampagne T	2.500.000	1.500.000	3.500.000	0,250.000	U1: 4.000.000	U2: 3.500.000	U3: 3.000.000	U4: 2.500.000	U5: 2.000.000	U6: 1.500.000	U7: 1.000.000	U8: 500.000	R1: 4.500.000	R2: 4.000.000	R3: 3.500.000	R4: 3.000.000	R5: 2.500.000	R6: 2.000.000	R7: 1.500.000	R8: 1.000.000	0,2	Niedrige Rendite, hohes Risiko
17	Projekt Q: Personalentwicklung S	1.200.000	800.000	1.800.000	0,120.000	U1: 2.000.000	U2: 1.800.000	U3: 1.600.000	U4: 1.400.000	U5: 1.200.000	U6: 1.000.000	U7: 800.000	U8: 600.000	R1: 2.200.000	R2: 2.000.000	R3: 1.800.000	R4: 1.600.000	R5: 1.400.000	R6: 1.200.000	R7: 1.000.000	R8: 800.000	0,1	Niedrige Rendite, hohes Risiko
18	Projekt R: Logistikoptimierung Q	5.500.000	4.000.000	7.500.000	0,550.000	U1: 8.000.000	U2: 7.500.000	U3: 7.000.000	U4: 6.500.000	U5: 6.000.000	U6: 5.500.000	U7: 5.000.000	U8: 4.500.000	R1: 8.500.000	R2: 8.000.000	R3: 7.500.000	R4: 7.000.000	R5: 6.500.000	R6: 6.000.000	R7: 5.500.000	R8: 5.000.000	0,5	Mittlere Rendite, hohes Risiko
19	Projekt S: Forschung & Entwicklung P	22.000.000	17.000.000	27.000.000	2.200.000	U1: 30.000.000	U2: 28.000.000	U3: 26.000.000	U4: 24.000.000	U5: 22.000.000	U6: 20.000.000	U7: 18.000.000	U8: 16.000.000	R1: 32.000.000	R2: 30.000.000	R3: 28.000.000	R4: 26.000.000	R5: 24.000.000	R6: 22.000.000	R7: 20.000.000	R8: 18.000.000	1,0	Sehr hohe Rendite, sehr hohes Risiko
20	Projekt T: Wartung & Instandhaltung N	3.500.000	2.500.000	4.500.000	0,450.000	U1: 5.000.000	U2: 4.500.000	U3: 4.000.000	U4: 3.500.000	U5: 3.000.000	U6: 2.500.000	U7: 2.000.000	U8: 1.500.000	R1: 5.500.000	R2: 5.000.000	R3: 4.500.000	R4: 4.000.000	R5: 3.500.000	R6: 3.000.000	R7: 2.500.000	R8: 2.000.000	0,4	Mittlere Rendite, hohes Risiko

[illegible]

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025																	

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

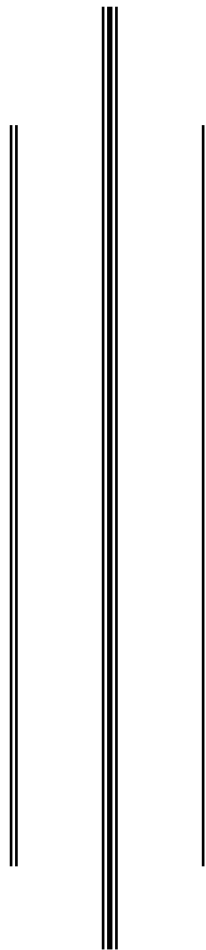
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp. 40.951.681.431	Rp. 575.633.000			Rp. 41.527.314.431	Rp. 36.664.380.344	Rp. 575.633.000			Rp. 37.240.013.344	Rp. 227.259.614.275,00	
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp. 39.432.851.037	Rp. 575.633.000			Rp. 40.008.484.037	Rp. 35.496.913.655	Rp. 575.633.000			Rp. 36.072.546.655	Rp. 225.602.988.855,00	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 34.575.659.485	Rp. 575.633.000			Rp. 35.151.292.485	Rp. 31.716.541.153	Rp. 575.633.000			Rp. 32.292.174.153	Rp. 220.741.595.279,00	
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 244.340.600				Rp. 244.340.600	Rp. 102.382.600				Rp. 102.382.600	Rp. 225.621.025,00	
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 65.646.000				Rp. 65.646.000	Rp. 10.200.000				Rp. 10.200.000	Rp. 65.646.000,00	
5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000,00	
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 75.074.600				Rp. 75.074.600	Rp. 37.042.600				Rp. 37.042.600	Rp. 75.075.025,00	
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 100.020.000				Rp. 100.020.000	Rp. 51.540.000				Rp. 51.540.000	Rp. 81.300.000,00	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 31.401.080.353				Rp. 31.401.080.353	Rp. 28.902.250.366				Rp. 28.902.250.366	Rp. 217.126.746.234,00	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 31.401.080.353				Rp. 31.401.080.353	Rp. 28.902.250.366				Rp. 28.902.250.366	Rp. 217.126.746.234,00	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 573.843.234				Rp. 573.843.234	Rp. 469.012.234				Rp. 469.012.234	Rp. 559.010.400,00	
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 17.762.400				Rp. 17.762.400	Rp. 17.762.400				Rp. 17.762.400	Rp. 17.766.000,00	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 153.768.400				Rp. 153.768.400	Rp. 153.768.400				Rp. 153.768.400	Rp. 153.768.400,00	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 85.079.034				Rp. 85.079.034	Rp. 85.079.034				Rp. 85.079.034	Rp. 98.891.000,00	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 22.503.400				Rp. 22.503.400	Rp. 10.280.400				Rp. 10.280.400	Rp. 8.695.000,00	
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 4.137.000				Rp. 4.137.000	Rp. 4.137.000				Rp. 4.137.000	Rp. 4.140.000,00	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 290.593.000				Rp. 290.593.000	Rp. 197.985.000				Rp. 197.985.000	Rp. 275.750.000,00	
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 200.000	Rp. 575.633.000			Rp. 575.833.000	Rp. 0	Rp. 575.633.000			Rp. 575.633.000	Rp. 575.839.000,00	
5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Rp. 200.000	Rp. 575.633.000			Rp. 575.833.000	Rp. 0	Rp. 575.633.000			Rp. 575.633.000	Rp. 575.839.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.123.115.978				Rp. 1.123.115.978	Rp. 976.616.633				Rp. 976.616.633	Rp. 1.165.624.220,00
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 2.386.400				Rp. 2.386.400	Rp. 2.386.400				Rp. 2.386.400	Rp. 2.400.000,00
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 253.600.000				Rp. 253.600.000	Rp. 253.600.000				Rp. 253.600.000	Rp. 253.600.000,00
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 867.129.578				Rp. 867.129.578	Rp. 720.630.233				Rp. 720.630.233	Rp. 909.624.220,00
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.233.079.320				Rp. 1.233.079.320	Rp. 1.266.279.320				Rp. 1.266.279.320	Rp. 1.088.754.400,00
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 996.648.320				Rp. 996.648.320	Rp. 1.010.648.320				Rp. 1.010.648.320	Rp. 890.984.400,00
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 118.731.000				Rp. 118.731.000	Rp. 118.731.000				Rp. 118.731.000	Rp. 80.000.000,00
5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 117.700.000				Rp. 117.700.000	Rp. 136.900.000				Rp. 136.900.000	Rp. 117.770.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp. 4.857.191.552				Rp. 4.857.191.552	Rp. 3.780.372.502				Rp. 3.780.372.502	Rp. 4.861.393.576,00
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				Rp. 1.673.304.922				Rp. 1.673.304.922	Rp. 1.255.051.807				Rp. 1.255.051.807	Rp. 1.713.300.760,00
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 74.830.000				Rp. 74.830.000	Rp. 41.856.000				Rp. 41.856.000	Rp. 74.830.000,00
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 890.904.000				Rp. 890.904.000	Rp. 788.914.000				Rp. 788.914.000	Rp. 920.904.000,00
5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 71.584.000				Rp. 71.584.000	Rp. 39.368.000				Rp. 39.368.000	Rp. 71.584.000,00
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 150.033.410				Rp. 150.033.410	Rp. 97.385.705				Rp. 97.385.705	Rp. 162.320.140,00
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 271.750.500				Rp. 271.750.500	Rp. 154.596.500				Rp. 154.596.500	Rp. 263.590.500,00
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 214.203.012				Rp. 214.203.012	Rp. 132.931.602				Rp. 132.931.602	Rp. 220.072.120,00
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN				Rp. 448.790.930				Rp. 448.790.930	Rp. 284.395.815				Rp. 284.395.815	Rp. 432.035.820,00
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 71.793.110				Rp. 71.793.110	Rp. 34.097.405				Rp. 34.097.405	Rp. 81.200.240,00
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 187.543.410				Rp. 187.543.410	Rp. 116.113.705				Rp. 116.113.705	Rp. 152.502.440,00
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 189.454.410				Rp. 189.454.410	Rp. 134.184.705				Rp. 134.184.705	Rp. 198.333.140,00
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN				Rp. 2.115.429.394				Rp. 2.115.429.394	Rp. 1.863.443.689				Rp. 1.863.443.689	Rp. 2.069.171.456,00
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 100.730.492				Rp. 100.730.492	Rp. 73.996.492				Rp. 73.996.492	Rp. 164.375.140,00
5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 1.587.606.492				Rp. 1.587.606.492	Rp. 1.492.206.492				Rp. 1.492.206.492	Rp. 1.585.222.140,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	02	1.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 27.248.000				Rp. 27.248.000	Rp. 18.608.000				Rp. 18.608.000	Rp. 32.000.000,00
5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 280.244.000				Rp. 280.244.000	Rp. 216.266.000				Rp. 216.266.000	Rp. 161.447.000,00
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 119.600.410				Rp. 119.600.410	Rp. 62.366.705				Rp. 62.366.705	Rp. 126.127.176,00
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Rp. 619.666.306				Rp. 619.666.306	Rp. 377.481.191				Rp. 377.481.191	Rp. 646.885.540,00
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 150.185.902				Rp. 150.185.902	Rp. 93.996.197				Rp. 93.996.197	Rp. 151.958.280,00
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 122.577.100				Rp. 122.577.100	Rp. 59.545.100				Rp. 59.545.100	Rp. 162.254.000,00
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 177.870.702				Rp. 177.870.702	Rp. 122.816.997				Rp. 122.816.997	Rp. 161.898.280,00
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 136.347.902				Rp. 136.347.902	Rp. 84.056.197				Rp. 84.056.197	Rp. 138.090.280,00
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 32.684.700				Rp. 32.684.700	Rp. 17.066.700				Rp. 17.066.700	Rp. 32.684.700,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp. 1.518.830.394				Rp. 1.518.830.394	Rp. 1.167.466.689				Rp. 1.167.466.689	Rp. 1.656.625.420,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Rp. 1.518.830.394				Rp. 1.518.830.394	Rp. 1.167.466.689				Rp. 1.167.466.689	Rp. 1.656.625.420,00
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				Rp. 1.518.830.394				Rp. 1.518.830.394	Rp. 1.167.466.689				Rp. 1.167.466.689	Rp. 1.656.625.420,00
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 273.191.492				Rp. 273.191.492	Rp. 202.709.492				Rp. 202.709.492	Rp. 274.167.140,00
5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 263.898.000				Rp. 263.898.000	Rp. 204.089.000				Rp. 204.089.000	Rp. 265.818.000,00
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 499.545.492				Rp. 499.545.492	Rp. 531.056.492				Rp. 531.056.492	Rp. 497.161.140,00
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 246.566.500				Rp. 246.566.500	Rp. 116.684.500				Rp. 116.684.500	Rp. 366.547.500,00
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 114.950.910				Rp. 114.950.910	Rp. 69.561.205				Rp. 69.561.205	Rp. 119.773.640,00
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Rp. 120.678.000				Rp. 120.678.000	Rp. 43.366.000				Rp. 43.366.000	Rp. 133.158.000,00
UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai																			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp. 1.981.602.552	Rp. 25.550.000			Rp. 2.007.152.552	Rp. 1.712.021.322	Rp. 25.550.000			Rp. 1.737.571.322	Rp. 2.029.542.180,00
5	03				KEPEGAWAIAN				Rp. 1.981.602.552	Rp. 25.550.000			Rp. 2.007.152.552	Rp. 1.712.021.322	Rp. 25.550.000			Rp. 1.737.571.322	Rp. 2.029.542.180,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 383.375.252	Rp. 25.550.000			Rp. 408.925.252	Rp. 258.563.622	Rp. 25.550.000			Rp. 284.113.622	Rp. 431.314.580,00
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 53.659.800				Rp. 53.659.800	Rp. 26.514.400				Rp. 26.514.400	Rp. 53.455.700,00



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH
BPKAD TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan angayu bagia kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertha wara nugraha-Nya, Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dapat tersusun sesuai dengan waktunya.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan usulan akhir dari perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Rancangan Akhir Rencana Kerja selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sinkronisasi dan konsistensi dalam perencanaan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada akhirnya diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi terhadap pelayanan publik.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam penyusunan perencanaan anggaran perangkat daerah yang lebih baik.

Denpasar, 9 Juli 2025
Kepala BPKAD

I Ketut Madnyasa, S.Sos, M.Si
NIP. 19720203 199203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025	5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan Tahun 2025	7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	20
BAB VI PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Masing-Masing Urusan dan Perangkat Daerah	Halaman 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanananaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 ini disusun RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan, dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 diawali dengan

penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah diajukan oleh perangkat masing-masing dan dikoordinir oleh Bappeda Litbang Provinsi Bali. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali. Materi orientasi meliputi: tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusun Renja Perangkat Daerah, dan kesiapan Data SIPD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7); dan
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dengan visi dan misi Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali; serta
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Dokumen Penyampaian Renja Perubahan 2025

Sistematika Dokumen Penyampaian Renja Perubahan 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Penyampaian Renja Perubahan 2025.

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini memuat Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan Tahun 2025 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan I tahun 2025

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Dalam Bab ini disajikan Renja Perangkat Daerah diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV : Penutup

Dalam BAB ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan I tahun 2025. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025: dari total 3 program yang dilaksanakan oleh BPKAD, sebanyak 2 program telah mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret), sebanyak 1 program belum mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret). Untuk level kegiatan, dari jumlah total 13 kegiatan : 9 kegiatan telah mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret); dan 4 kegiatan belum mencapai target pada Triwulan I (bulan Maret).

Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang target kinerjanya sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan kinerja pada triwulan I dan II, seperti untuk indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja dan untuk yang telah mencapai target pada triwulan I tahun 2025 kebanyakan adalah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

1. Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada BPKAD.
2. Kegiatan yang bersifat koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga menyebabkan berkurang beban konsumsi, perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga target kinerja pada sub kegiatan tersebut tidak akan tercapai.
3. Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan capaian kinerja pada triwulan I.
4. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1.
5. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan-triwulan berikutnya, antara lain seperti :

1. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas;
2. Koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran;
3. Penataan kembali terhadap rancangan APBD 2025 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;
4. Koordinasi teknis secara efektif dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas dan terukur.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing urusan dan Perangkat Daerah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel 2.1.

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
pada Masing-Masing Urusan dan Perangkat Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		-12	-13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	5.02	KEUANGAN											
1	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	25	4.536.202.282,00	25	0,44%		4.536.202.282,00		0,44%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	16,66	260.344.228,00	16,7	15,36%		1.370.563.783,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		0,00		0,00%		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang		0,00		0,00%		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN	

		PPAS	Disusun									DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		0,00		0,00%		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		0,00		0,00%		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		260.344.228,00		27,42%		260.344.228,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		0,00		0,00%		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	20	81.071.200,00	20	15,77%		378.394.339,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		19.831.200,00		18,16%		19.831.200,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		5.700.000,00		7,10%		5.700.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		20.100.000,00		31,60%		20.100.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi		31.840.000,00		16,33%		31.840.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		3.600.000,00		5,46%		3.600.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan perbendaharaan disusun tepat waktu	25	136.183.862,00	25	29,54%		549.119.313,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK		136.183.862,00		29,54%		136.183.862,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu	0	80.602.992,00	0	12,98%		539.806.813,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		80.452.992,00		14,69%		80.452.992,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		150.000,00		0,21%		150.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	0	3.978.000.000,00	0	0,39%		2.170.846.928.845,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		0,00		0,00%		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		2.600.000.000,00		1,27%		2.600.000.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1.378.000.000,00		1,01%		1.378.000.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		0,00		0,00%		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan implementasi SIPD	25	0,00	25	0,00%		109.404.451,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		0,00		0,00%		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset		115.137.246,00		9,20%		115.137.246,00		9,20%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	0	115.137.246,00	0	9,20%		2.404.985.200,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		240.000,00		0,20%		240.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		4.320.000,00		19,49%		4.320.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		9.000.000,00		4,99%		9.000.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		101.577.246,00		10,92%		101.577.246,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,2	4.491.777.152,00	0,2	13,75%		4.491.777.152,00	13,75%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	25	97.687.088,00	25	5,99%		1.660.126.123,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9.130.000,00		53,39%		9.130.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		44.052.082,00		18,94%		44.052.082,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3.513.760,00		29,45%		3.513.760,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1.081.000,00		13,51%		1.081.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		14.638.082,00		11,50%		14.638.082,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10.250.000,00		5,54%		10.250.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15.022.164,00		1,43%		15.022.164,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	25	61.109.167,00	25	21,07%		301.653.482,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000,00		63,69%		3.000.000,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		58.109.167,00		20,37%		58.109.167,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	25	166.609.658,00	25	8,37%		2.461.168.189,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		35.512.346,00		4,21%		35.512.346,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0,00		0,00%		0,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		17.031.082,00		10,13%		17.031.082,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		114.066.230,00		11,72%		114.066.230,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	25	4.660.000,00	25	10,50%		4.660.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.660.000,00		10,50%		4.660.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	25	4.161.711.239,00	25	14,49%		4.161.711.239,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		151.708.914,00		1,77%		506.775.169,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.010.002.325,00		19,90%		4.010.002.325,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
4	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0,2	161.617.533,00	0,2	16,62%		161.617.533,00		16,62%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	25	158.902.574,00	25	19,88%		158.902.574,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	106.325.000,00	68,81%	106.325.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0,00	0,00%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52.577.574,00	8,35%	52.577.574,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1.378.000,00	1,20%	1.378.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.028.000,00	2,35%	490.218.295,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	0,00%	11.994.120,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	350.000,00	8,33%	9.603.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00%	53.472.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00%	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	25	1.336.959,00	25	2,30%		1.336.959,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00		0,00%		0,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.336.959,00		2,35%		1.336.959,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset		22.657.800,00		1,08%		22.657.800,00		1,08%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah		22.657.800,00		1,08%		22.657.800,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		22.657.800,00		1,08%		22.657.800,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Isu-Isu yang berkembang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari Isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali telah mampu mengatasi isu yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; utamanya keterbatasan sumber daya manusia diupayakan peningkatan kompetensi dan pelatihan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); mampu meningkatkan penerapan MDGs menjadi SDGs terutama menjaga pengelolaan anggaran APBD mampu membiayai program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD Provinsi Bali.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan sumber daya pendukung masih bisa dikembangkan serta penerapan sistem informasi keuangan daerah (SIPKD) dan (SIMDA) yang mampu membantu mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dalam perbaikan perencanaan program pada RPJMD 2018-2023 yang akan datang menyampaikan usulan kepada kepala daerah terpilih agar program-program yang menyentuh masyarakat terus ditingkatkan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan pendanaan belanja langsung untuk program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali pada Rancangan Renja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 1.308.207.872.732,00. Berikut ini disajikan rumusan rencan program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagaimana terlampir pada lampiran I Program dan Kegiatan Tahun 2025.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan usulan akhir dari perangkat daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Secara ringkas Rencana Kerja Perubahan BPKAD Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai sistem perencanaan perangkat daerah mempunyai fungsi penting dalam menjabarkan sistem perencanaan daerah, sebagai media sinkronisasi perencanaan strategis jangka menengah RKPD dan Renstra SKPD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan salah satu isu yang dihadapi sekarang yaitu melakukan penyesuaian terhadap pajak dan retribusi daerah.
3. Pada Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebanyak 3 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar *Rp 1.308.207.872.732,00*

Demikianlah pokok-pokok penting dalam penyusunan dan penyajian Rancangan Renja Perangkat daerah, semoga ada manfaatnya bagi para perencana di daerah untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terima kasih.



RENJA PERUBAHAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI BALI

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 disusun setelah tahap penyesuaian Pagu Anggaran berdasarkan ketersediaan APBDP TA. 2025. Rencana Kerja ini akan terus disempurnakan melalui tahapan-tahapan sesuai amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini sudah kami upayakan semaksimal mungkin, tetapi kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan dan perbaikan lebih lanjut di masa yang akan datang. Oleh karena itu masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan. Akhirnya semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan untuk kita melaksanakan tugas-tugas kedepan.

Denpasar, 9 Juli 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI,**



I Dewa Tagel Wirasa, SE.Ak., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680209 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika penulisan	8
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025.....	9
2.1 Analisis Kinerja Perangkat Daerah	9
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.3 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	25
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah.....	27
3.2 Program dan Kegiatan	28
3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	32
 BAB IV PENUTUP.....	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Hasil Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan*)	12
Tabel 2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Bali	26
Tabel 3.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024	29
Tabel 3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten / Kota Tahun 2024	31
Tabel 3.3 Rincian Perubahan Rencana Kerja dan kebutuhan Pendanaan Program Kegiatan tahun 2024	Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi semua potensi pendapatan daerah yang ada, terutama penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.

Rancangan perubahan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 tahun ke-1, dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Dokumen rancangan perubahan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 memuat rancangan program dan kegiatan serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam RKPD Perubahan Tahun 2025. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Badan Pendapatan Daerah merupakan wujud dari pola perencanaan teknokratik dan partisipatif sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan mitra kerjanya.



Rincian Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan.

Adapun fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali antara lain:

- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencukupi pembiayaan urusan rumah tangga dan pembangunan secara mandiri merupakan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali untuk selalu memacu diri meningkatkan kemandiriannya dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan



usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

1.2. Landasan hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889



- Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 - 14) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 - 15) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
 - 16) Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 12);
 - 17) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan



Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

- 18) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22)
- 19) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen rancangan perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 sesuai dengan amanat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 3343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau



2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan amanat tersebut maka maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran tentang perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam satu tahun anggaran untuk menuju terwujudnya tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, serta untuk peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 menuju tahapan penyusunan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2025 adalah :

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- 2) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah
- 3) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat daerah.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan rancangan perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat: Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat: Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat: Matrik perubahan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah beserta pagu pendanaanya.

BAB IV PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 yaitu Tujuan 1 : Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali, dengan sasaran Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali. Mengacu tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan *core business* nya sebagai instansi pengelola pendapatan daerah mempunyai tujuan yaitu **“Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali”**.

Persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah menjadi tolok ukur kemampuan/kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan. Tahun 2023 persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 69,58%, dan pada tahun 2024 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 70,76%. Pencapaian Target kinerja hasil/keluaran tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung antara lain :

1. Adanya komitmen kerja dan kinerja yang tinggi dari seluruh unsur baik ASN maupun non ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali selaku leader beserta team work dengan instansi terkait (kepolisian, jasa raharja, dan OPD penghasil) dalam optimalisasi penerimaan PAD, sehingga semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat sasaran.



3. Adanya dukungan motivasi dari Pimpinan yang memberikan support bagi pelaksana teknis dan penyusun kebijakan untuk selalu berinovasi dalam optimalisasi PAD.
4. Penambahan sarana dan prasarana penunjang yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran samsat.
5. Pengembangan E-samsat yang dilakukan bertahap dan berkelanjutan secara signifikan memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
6. Dukungan anggaran/pembiayaan operasional yang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga target kinerja yang diharapkan bisa tercapai.
7. Adanya strategi-strategi yang efektif dan efisien dalam intensifikasi potensi pajak daerah, khususnya pada penguraian dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
8. Dukungan dari Bank Pembangunan Daerah Bali dan 7 Bank Nasional, yang telah membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan E-Samsat online.

Sampai dengan tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali telah melakukan berbagai inovasi dan pengembangan terhadap inovasi yang sudah ada dalam rangka mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah antara lain:

- 1) Samsat Ibu Jari
- 2) Bumdes bersamsat
- 3) E-PBBKB
- 4) Samsat Keliling (Samling)



5) E-Samsat

Bekerjasama dengan 7 bank nasional dan 1 bank daerah (BPD Bali)

6) Samsat Kerti

Pelayanan pembayaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan computer dan printer sehingga bisa mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat.

Bapenda Provinsi Bali telah menambah dan melengkapi motor Samsat Kerti di UPTD PPRD Kab/Kota. Motor samsat kerti membantu WP didaerah yang susah terjangkau untuk bisa membayar pajak dan menerima langsung lembar STNK yang telah disahkan tanpa harus ke kantor Samsat, sehingga layanan ini sangat efektif karena selain untuk *door to door* juga bisa langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

7) Pengembangan Pengembangan dan peningkatan layanan berbasis online terus ditingkatkan untuk mengikuti arus perkembangan teknologi global yang berbasis IT. Adapun pengembangan sistem informasi pendapatan daerah yang telah dilakukan hingga tahun 2024 antara lain :

✓ Inovasi Samsat drive thru.

(sudah direalisasikan pada seluruh UPTD. PPRD di Kabupaten/Kota).

✓ Inovasi Samsat drive thru 2 shift

(sudah direalisasikan pada UPTD. PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar)

✓ Inovasi Pajak Air Permukaan online.

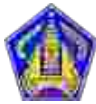
✓ Inovasi pembayaran Samsat melalui Qris BPD Bali.



- ✓ Inovasi dashboard Penerimaan Pendapatan Daerah.
- ✓ Inovasi pembayaran samsat era baru melalui Virtual Account Samsat (VAST).
- ✓ Inovasi pembayaran Multi Transaksi MITRA VAST
- ✓ Inovasi layanan Samsat berbudaya melalui Labda Pecingkreman Desa (LPD).
- ✓ Peningkatan sarana prasarana kendaraan operasional samsat kerti.

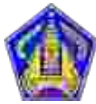
Implementasi kontribusi wisatawan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang baru sebagai sarana pemeliharaan alam dan budaya Bali.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Hasil Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

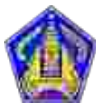


Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Hasil Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan*)

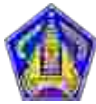
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil) dan Indikator Kegiatan /Sub Kegiatan (Keluaran)	Target Program dan Kegiatan (Renja Badan 2025)	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
			Realisasi Triwulan I 2025	Persentase Realisasi (%)
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	-	-
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	1 dokumen	25
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2 Laporan	33
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang/ Bulan	311 Orang/ Bulan	91,47
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	0%	0
Sub Kegiatan :				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	0	0
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	0 paket	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	1 paket	25
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3 laporan	25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan	25



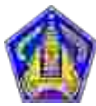
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	0,00 %	0
Sub Kegiatan :				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	0 unit	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 unit	0 unit	0
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (n-1)	23 unit	8 unit	35
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 unit	11 unit	12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	0 unit	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 unit	0 unit	0
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	0%	0
Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 laporan	0 laporan	0
Sub Kegiatan :				
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi	100%	100%	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	111,56
Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD	100%	28,91%	28,91
Sub Kegiatan :				
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	0 dokumen	0



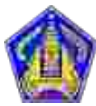
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 laporan	0 laporan	0
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	3 laporan	25
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 laporan	0 laporan	0
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	3 laporan	25
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KAB. BULELENG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	-	-
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	0 paket	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	0 paket	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	0 paket	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3 laporan	25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan	25
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0 laporan	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	3 unit	30



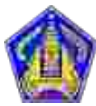
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	0 unit	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0 unit	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	111,56
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (1)	100%	27,84%	27,84
Sub Kegiatan :				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 laporan	3 laporan	25
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	5.000 dokumen SSPD	1.200 dokumen SSPD	24
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KAB. JEMBRANA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	-	-
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	0 paket	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 paket	50
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3 laporan	25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan	25
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				



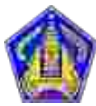
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	0 unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	0 unit	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0 unit	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	6 unit	26,09
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	111,56
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (2)	100%	26,79%	26,79
Sub Kegiatan :				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 laporan	3 laporan	25
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	14.518 dokumen SSPD	3.352 dokumen SSPD	23,09
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KAB. TABANAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	-	-
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 paket	50
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3 laporan	25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan	25
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25



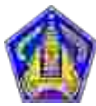
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	12 unit	92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	0 unit	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 unit	0 unit	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	111,56
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (3)	100%	27,39%	27,39
Sub Kegiatan :				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 laporan	3 laporan	25
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	12.620 dokumen SSPD	28 dokumen SSPD	0,22
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KAB. BADUNG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	-	-
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	3 paket	80
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	- paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 paket	75
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	50
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3 laporan	50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan	50
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	50



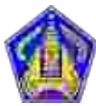
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0 laporan	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	9 laporan	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	50
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	3 unit	63,64
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	0 unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	0 unit	50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	0 unit	46,88
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	115,75
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (4)	100%	25,13%	60,04
Sub Kegiatan :				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 laporan	3 laporan	50
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	288 dokumen SSPD	72 dokumen SSPD	50,69
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	-	-
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	1 paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0 paket	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1 dokumen	100



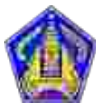
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	1 laporan	50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	2 laporan	50
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	0 unit	50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	0 unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	0 unit	-
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	115,75
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)	100%	26,42%	58,72
Sub Kegiatan :				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 laporan	0 laporan	50
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	154.572 dokumen SSPD	119 dokumen SSPD	26,59
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	-	-
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	50%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100



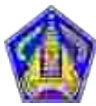
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3 dokumen	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3 laporan	50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan	50
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	50
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	1 unit	10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	0 unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 unit	0 unit	20,69
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	115,75
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)	100%	25,72%	64,07
Sub Kegiatan :				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 laporan	3 laporan	50
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	13.119 dokumen SSPD	8.842 dokumen SSPD	140,74
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KAB. BANGLI				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	-	-



Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	0 dokumen	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	0 laporan	100
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan	100%	25%	50
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	0 unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	0 unit	47,62
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	0 unit	43,75
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	115,75
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)	100%	27,40%	63,33
Sub Kegiatan :				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 laporan	3 laporan	50



Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	10.000 dokumen SSPD	1.190 dokumen SSPD	11,90
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KAB. KLUNGKUNG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	-	-
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0 paket	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3 laporan	25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan	25
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	4 unit	50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	10 unit	43,48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100



Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 unit	4 unit	21,05
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	111,56
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)	100%	25,80%	25,80
Sub Kegiatan :				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 laporan	3 laporan	25
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	10.963 dokumen SSPD	2.741 dokumen SSPD	25
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KAB. KARANGASEM				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	-	-
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	15 paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	4 paket	50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 paket	50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	0 dokumen	22,22
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3 laporan	50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3 laporan	50
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan	100%	25%	25
Sub Kegiatan :				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100



Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	0 unit	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	0 unit	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	0 unit	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23%	62,73%	111,56
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)	100%	26,50%	26,50
Sub Kegiatan :				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 laporan	3 laporan	25
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	13.155 dokumen SSPD	3.210 dokumen SSPD	24,40

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Isu-isu yang berkembang Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) di daerah yang sangat mempengaruhi struktur pendapatan Provinsi Bali dengan adanya beberapa kebijakan yang menyebabkan potensi pendapatan dari sektor pajak menurun.

Dari isu tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai berikut :

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah.



- 2) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD;
Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda yang disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Potensi pendapatan daerah di Provinsi Bali belum dipetakan dengan cermat sehingga penggalian dan pengelolaan belum optimal. Hal ini memerlukan pemikiran dari semua aspek komponen baik itu Legislatif, pemerintah maupun masyarakat karena nantinya potensi-potensi baru yang belum tergali apabila dilakukan pemetaan dan pengelolaan yang tepat dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial guna membiayai pembangunan daerah.
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak khususnya kendaraan operasional Samling dan motor untuk optimalisasi *door to door*;
- 4) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih rendah yang disebabkan masih lemahnya aturan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak tertib membayar pajak;
- 5) Masih kurangnya kemampuan dan ketrampilan sumber daya aparatur dalam pengelolaan PAD dan penguasaan IT;
- 6) Masyarakat belum optimal memanfaatkan Teknologi Berbasis Digital;
- 7) Kendaraan listrik ditetapkan dengan tarif 0% melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023. Rencana penggunaan kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan sesuai dengan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Beberapa aturan pajak kendaraan listrik yang tercantum pada UU HKPD pasal 7 ayat (3d) disebutkan bahwa yang dikecualikan dari obyek PKB salah satunya adalah mobil listrik.

Selain itu pada pasal 12 ayat (3d) disebutkan bahwa yang dikecualikan dari obyek BBNKB salah satunya adalah mobil listrik.

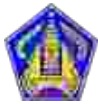
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

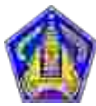
Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diuraikan dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang; Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Program</i>	Nihil	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
	<i>Kegiatan</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil





BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

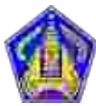
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi, misi, *core business* serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan. Terkait dengan tugas pokok tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mengampu tujuan 1 yaitu Menurunkan tingkat kemiskinan krama Bali, sasaran ke-2 yaitu Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali.

Dengan demikian tujuan Bapenda Provinsi Bali adalah **“Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali”**. (kemandirian fiskal suatu daerah diukur dari kemampuan



keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan wilayah).

Dengan **indikator** persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah.

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah :

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”, dengan **Indikator** : Persentase peningkatan PAD

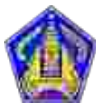
Selaras dengan isu strategis dan permasalahan yang berkembang maka strategi untuk optimalisasi kemandirian fiskal adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD.

Sedangkan arah kebijakan untuk mendukung strategi tersebut antara lain :

- 1) Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
- 2) Memberikan Insentif dan Disinsentif Pajak
- 3) Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

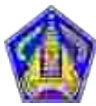
3.2. Program dan Kegiatan

Sebagai implementasi strategi dan arah kebijakan, maka disusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

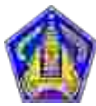


Tabel 3.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3) Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6) Fasilitas Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

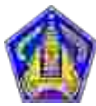


		Pemerintahan Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9) Pengelolaan Pendapatan Daerah	1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 5) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah



Tabel 3.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada
UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di
Kabupaten / Kota Tahun 2025

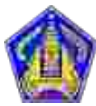
No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1) Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6) Fasilitas Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4) Pengelolaan Pendapatan Daerah	1) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 2) Penagihan Pajak Daerah



3.3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali meliputi rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Perumusan rencana program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan prioritas program, kegiatan, dan anggaran perangkat daerah sesuai dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, serta mempertimbangkan hasil pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

Adapun rincian rencana kerja perubahan dan pendanaan pada tahun anggaran 2025 dan perkiraan maju tahun 2025 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1 Tabel 3.3** Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini.



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan, Visi dan Misi pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Bali tahun 2025.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	43.878.900,00	47.662.300,00	47.662.300,00	3.783.400,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		49.806.130,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	19.562.100,00	22.721.100,00	22.721.100,00	3.159.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.370.810,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	24.316.800,00	24.941.200,00	24.941.200,00	624.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.435.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	107.755.269.287,00	140.831.740.151,00	143.633.709.782,00	35.878.440.495,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		118.530.796.215,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				340 Orang/ Bulan	340 Orang/ Bulan	107.755.269.287,00	140.831.740.151,00	143.633.709.782,00	35.878.440.495,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK AIR PERMUKAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			118.530.796.215,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.932.000,00	7.039.000,00	10.556.000,00	5.624.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.742.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	335.062.500,00	318.006.500,00	318.006.500,00	-17.056.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			318.914.101,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	101.575.894,00	101.575.894,00	101.575.894,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			111.733.483,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	55.013.300,00	54.960.300,00	324.960.300,00	269.947.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.369.577.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.428.800,00	2.428.800,00	2.428.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.671.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	471.325.000,00	483.325.000,00	483.325.000,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			518.511.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	2.618.028.401,00	7.752.675.449,00	9.824.583.949,00	7.206.555.548,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.441.911.274,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	9 Unit	226.733.625,00	226.733.625,00	226.733.625,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			534.725.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				90 Unit	90 Unit	972.493.671,00	970.874.300,00	1.279.862.900,00	307.369.229,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.267.972.080,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	1.418.801.105,00	6.555.067.524,00	8.317.987.424,00	6.899.186.319,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.639.213.794,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.148.700,00	3.148.700,00	6.147.400,00	2.998.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.465.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	387.433.104,00	387.433.104,00	387.433.104,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			426.176.414,40	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	418.053.373,00	420.453.373,00	420.453.373,00	2.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			514.858.710,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	120.765.240,00	124.469.592,00	124.469.592,00	3.704.352,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			132.863.434,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	1.362.003.540,00	1.434.609.652,00	1.434.609.652,00	72.606.112,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.498.208.624,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	934.849.220,00	839.934.430,00	839.934.430,00	-94.914.790,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.028.334.142,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1.440.000.000,00	1.284.252.460,00	1.634.252.460,00	194.252.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.297.476.813,10	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				43 Unit	43 Unit	1.188.227.961,00	1.213.538.973,00	1.233.538.973,00	45.311.012,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.367.575.287,10	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	27.008.900,00	27.008.900,00	0,00	103.061.150,00							130.070.050,00	
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina				100 persen	100 persen	27.008.900,00	27.008.900,00	0,00	-27.008.900,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten/Kota		130.070.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	27.008.900,00	27.008.900,00	0,00	-27.008.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.070.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	324.466.500,00	238.541.400,00	162.026.400,00	-162.440.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			357.037.560,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	259.290.700,00	259.290.600,00	93.709.600,00	-165.581.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			285.219.880,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	144.804.100,00	143.625.200,00	143.625.200,00	-1.178.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			159.284.510,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	243.995.900,00	378.095.700,00	308.975.700,00	64.979.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			310.635.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	47.120.000,00	47.120.000,00	34.960.000,00	-12.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.580.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.259.300,00	5.259.300,00	5.259.300,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.372.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	134.450.900,00	134.216.140,00	192.580.600,00	58.129.700,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			209.225.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			38.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	7 Paket	10.239.200,00	10.239.200,00	10.239.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.626.840,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.854.500,00	4.854.500,00	4.854.500,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.841.030,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	-350.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	77.400.000,00	77.400.000,00	63.000.000,00	-14.400.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			134.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.980.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	261.000.000,00	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			336.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			297.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.450.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	550.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			62.955.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	171.910.540,00	175.714.492,00	175.714.492,00	3.803.952,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			279.484.774,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	21.180.000,00	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			41.954.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	655.549.960,00	643.353.314,00	643.353.314,00	-12.196.646,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			721.104.956,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	16.723.800,00	16.723.800,00	16.723.800,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			28.303.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	1.899.996.300,00	1.753.359.942,00	1.741.959.942,00	-158.036.358,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.130.387.930,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				5000 Dokumen SSPD	5000 Dokumen SSPD	1.817.436.300,00	1.715.377.516,00	1.686.877.516,00	-130.558.784,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.035.281.930,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA								149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00						181.954.158.775,30		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.664.700,00	3.664.700,00	3.664.700,00	0,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.381.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	122.250.800,00	122.248.420,00	129.410.120,00	7.159.320,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			202.493.610,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	4.691.900,00	4.691.900,00	4.691.900,00	0,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.148.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00	-25.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.280.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	29.700.000,00	29.700.000,00	44.580.000,00	14.880.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			49.005.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	181.000.000,00	181.000.000,00	181.000.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			199.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			209.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.703.000,00	46.703.000,00	46.703.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			58.334.760,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	110.324.040,00	154.708.392,00	154.708.392,00	44.384.352,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			438.632.194,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	58 Unit	41.020.000,00	41.020.000,00	41.020.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.122.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	437.354.976,00	430.385.464,00	391.487.608,00	-45.867.368,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			766.705.473,60	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	23 Unit	20.625.800,00	20.625.800,00	13.435.800,00	-7.190.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			26.477.990,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	391.489.260,00	360.859.772,00	370.929.772,00	-20.559.488,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			430.638.186,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				14518 Dokumen SSPD	14518 Dokumen SSPD	714.195.680,00	671.186.002,00	633.186.002,00	-81.009.678,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			785.651.644,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.949.800,00	6.949.800,00	6.949.800,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.282.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	136.874.500,00	136.866.890,00	142.850.490,00	5.975.990,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			157.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.783.700,00	6.783.700,00	6.783.700,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.712.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.393.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	-18.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.445.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.460.000,00	21.285.000,00	21.285.000,00	3.825.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.373.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.978.200,00	1.978.200,00	1.978.200,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	184.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			323.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, teratur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.855.000,00	45.855.000,00	45.855.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			53.680.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	220.767.640,00	225.937.992,00	225.937.992,00	5.170.352,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			270.254.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	21.460.000,00	21.460.000,00	21.460.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			24.054.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	378.321.400,00	533.098.428,00	533.098.428,00	154.777.028,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			458.419.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	17 Unit	20.388.200,00	16.250.000,00	16.250.000,00	-4.138.200,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.967.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	488.503.540,00	449.620.592,00	449.620.592,00	-38.882.948,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			602.584.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12620 Dokumen SSPD	12620 Dokumen SSPD	541.685.680,00	498.676.002,00	507.226.002,00	-34.459.678,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			665.241.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG									149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00						181.954.158.775,30	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.037.600,00	5.037.600,00	8.925.600,00	3.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.103.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	134.005.000,00	133.993.390,00	174.517.890,00	40.512.890,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			219.997.690,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17.228.800,00	17.186.050,00	17.186.050,00	-42.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.984.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.744.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.596.600,00	10.575.000,00	10.575.000,00	-21.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.120.000,00	18.120.000,00	20.370.000,00	2.250.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.815.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.978.200,00	1.978.200,00	1.978.200,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	378.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			439.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	437.230.947,00	437.230.947,00	437.230.947,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.272.000,00	36.265.000,00	36.265.000,00	-7.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			58.543.760,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	185.962.040,00	188.338.992,00	188.338.992,00	2.376.952,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			294.476.314,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.875.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	656.857.697,00	664.194.297,00	816.055.844,00	159.198.147,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			740.250.721,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	27.840.000,00	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.855.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	2.321.488.440,00	2.140.725.352,00	1.635.525.352,00	-685.963.088,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.553.637.284,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				288 Dokumen SSPD	288 Dokumen SSPD	749.787.820,00	665.703.576,00	624.473.576,00	-125.314.244,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			824.766.602,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.435.800,00	4.435.800,00	4.435.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.043.020,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	127.167.600,00	199.920.870,00	404.761.770,00	277.594.170,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			219.912.957,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	57.122.194,00	57.122.194,00	57.122.194,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			62.834.413,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.529.500,00	65.536.700,00	65.536.700,00	7.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			92.974.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.424.000,00	6.424.000,00	6.424.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.666.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	20.880.000,00	20.875.000,00	20.875.000,00	-5.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			41.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	12 Laporan	13.365.000,00	13.365.000,00	13.365.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			29.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	474.550.000,00	474.550.000,00	474.550.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	505.918.462,00	391.923.894,00	391.923.894,00	-113.994.568,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			556.510.308,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	47.925.000,00	47.895.800,00	51.270.800,00	3.345.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			61.173.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	148.644.780,00	203.989.104,00	226.489.104,00	77.844.324,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			208.098.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.671.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	782.765.751,00	751.906.893,00	901.906.893,00	119.141.142,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			943.574.610,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	33.306.900,00	33.026.900,00	49.764.600,00	16.457.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			138.260.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				2 Laporan	2 Laporan	2.892.660.500,00	2.609.200.078,00	2.609.200.078,00	-283.460.422,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.165.426.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				154572 Dokumen SSPD	154572 Dokumen SSPD	489.903.540,00	490.087.084,00	547.087.084,00	57.183.544,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			695.466.613,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00						181.954.158.775,30		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.931.000,00	16.931.000,00	16.931.000,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.856.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	145.969.900,00	145.966.580,00	145.966.580,00	-3.320,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			203.336.870,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.718.634,00	56.718.634,00	56.718.634,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			62.390.497,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.475.000,00	22.463.600,00	22.463.600,00	-11.400,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			23.864.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.212.500,00	8.212.500,00	8.212.500,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.274.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.397.500,00	12.375.000,00	15.600.000,00	3.202.500,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			28.512.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.600.000,00	20.040.000,00	18.120.000,00	-9.480.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			36.828.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.826.000,00	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.168.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			261.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	310.000.000,00	310.000.000,00	337.094.457,00	27.094.457,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			363.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			62.363.840,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	127.897.500,00	147.497.500,00	147.497.500,00	19.600.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			171.849.920,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	38.990.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	-690.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			42.801.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	562.185.680,00	551.731.412,00	560.762.898,00	-1.422.782,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			681.588.021,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	29 Unit	35.910.000,00	35.020.000,00	35.020.000,00	-890.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.534.710,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	1.257.299.920,00	1.154.773.644,00	1.154.773.644,00	-102.526.276,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.410.089.912,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				13119 Dokumen SSPD	13119 Dokumen SSPD	644.552.100,00	590.206.150,00	590.131.150,00	-54.420.950,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			791.776.018,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI								149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00					181.954.158.775,30		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.009.700,00	7.009.700,00	7.009.700,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.675.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	116.789.300,00	116.788.300,00	116.788.300,00	-1.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			128.467.130,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.399.700,00	3.399.700,00	3.399.700,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.255.000,00	3.250.800,00	3.250.800,00	-4.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.742.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	-25.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.040.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			39.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.376.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			132.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	359.849.487,00	359.849.487,00	359.849.487,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			395.834.436,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, teratur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	47.995.000,00	47.995.000,00	-5.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	61.318.700,00	104.518.700,00	104.518.700,00	43.200.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			115.197.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.100.000,00	7.100.000,00	14.290.000,00	7.190.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			16.423.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	418.503.540,00	412.176.002,00	412.176.002,00	-6.327.538,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			460.353.894,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	8.099.200,00	8.099.200,00	8.099.200,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14.619.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	544.049.960,00	492.786.822,00	492.786.822,00	-51.263.138,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			598.454.956,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10000 Dokumen SSPD	10000 Dokumen SSPD	649.732.100,00	594.342.232,00	577.622.232,00	-72.109.868,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			714.705.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG								149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00					181.954.158.775,30			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.660.400,00	2.660.400,00	2.660.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.260.960,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.056.200,00	110.050.400,00	110.050.400,00	-5.800,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			174.172.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.280.000,00	30.280.000,00	30.280.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.308.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.674.000,00	3.674.000,00	3.674.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			11.464.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.452.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.332.600,00	4.325.000,00	4.325.000,00	-7.600,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.808.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	42.900.000,00	42.900.000,00	26.454.000,00	-16.446.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			79.332.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			198.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	218.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.840.000,00	42.835.000,00	42.835.000,00	-5.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			48.180.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	129.386.500,00	152.991.500,00	152.991.500,00	23.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			245.925.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	16.390.000,00	16.390.000,00	16.390.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.671.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	727.914.240,00	707.464.134,00	707.464.134,00	-20.450.106,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			965.705.664,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	19 Unit	18.170.000,00	17.560.000,00	17.560.000,00	-610.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			19.987.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	479.393.540,00	440.509.592,00	433.280.592,00	-46.112.948,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			528.289.894,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10963 Dokumen SSPD	10963 Dokumen SSPD	489.293.540,00	463.615.756,00	448.345.756,00	-40.947.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			540.213.894,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00								181.954.158.775,30	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
	5.02	KEUANGAN							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	42.521.683.243,00							181.954.158.775,30		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja				88 Nilai Sakip	88 Nilai Sakip	131.364.826.408,00	169.715.984.904,00	176.102.333.585,00	29.661.558.331,50							161.026.384.739,50		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia				100 Persen	100 Persen	2.997.957.322,00	3.090.780.242,00	3.678.889.402,00	680.932.080,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.323.868.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.827.100,00	3.827.100,00	3.827.100,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.379.760,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	122.252.000,00	122.245.980,00	122.245.980,00	-6.020,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			166.352.670,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	27.837.000,00	27.837.000,00	27.837.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.620.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.182.900,00	5.182.900,00	5.182.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.392.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	-25.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.752.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.780.000,00	55.410.000,00	61.650.000,00	33.870.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.561.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia				100 Persen	100 Persen	5.817.915.473,00	5.736.320.905,00	5.850.474.418,00	32.558.945,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.660.100.068,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.191.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			181.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237.000.000,00	237.000.000,00	289.060.356,00	52.060.356,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			260.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	12.081.777.025,00	12.206.805.857,00	13.017.013.734,00	935.236.709,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.964.903.009,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	52.498.000,00	52.490.000,00	52.490.000,00	-8.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			57.910.380,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	101.863.740,00	123.835.592,00	129.435.592,00	27.571.852,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			134.875.114,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	14.200.000,00	14.200.000,00	34.200.000,00	20.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.744.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	352.092.840,00	333.843.542,00	433.843.542,00	81.750.702,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			554.062.124,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	11.902.600,00	16.020.500,00	16.020.500,00	4.117.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN HIBAH DARI BA DAN/LEMBAGA/ ORGANISASI DALAM NEGERI	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.622.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah				56.23 Persen	56.23 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	2.392.469.345,80							20.797.703.985,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)				100 Persen	100 Persen	18.405.234.640,00	17.108.139.606,00	16.216.419.606,00	-2.188.815.034,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.797.703.985,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	516.385.680,00	491.616.002,00	496.176.002,00	-20.209.678,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			579.310.248,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				13155 Dokumen SSPD	13155 Dokumen SSPD	497.703.540,00	458.820.592,00	473.920.592,00	-23.782.948,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			581.023.894,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		J U M L A H							149.797.069.948,00	186.851.133.410,00	192.318.753.191,00	1.599.943.026.112,00							181.954.158.775,30	

**DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI BALI**

Jl. D.I. Panjaitan No. 6 Renon - Denpasar

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Angayubagia dan Puji Syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah yang disusun berdasarkan atas Renja dan masukan-masukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Provinsi Bali.

Akhirnya kami banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali ini. Semoga menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kelanjutan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2025.

Om Santih Santih Santih Om

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Bali,



Dr. I Gede Agung Teja Ehusana Yadnya, SSTP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780728 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 7

 1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

 TAHUN 2025 10

 2.1 Kendala dan Solusi 23

BAB III MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

 PERANGKAT DAERAH..... 24

BAB IV PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 11

Tabel 3.1 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Provinsi Bali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana di Provinsi Bali merupakan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik maka diperlukan perencanaan yang matang setiap tahunnya dan mengacu pada Renstra yang ada. Perencanaan pembangunan penanggulangan bencana memerlukan pembenahan secara berkesinambungan baik internal maupun eksternal tentunya dengan strategi yang baik.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki tingkat potensi bencana yang tinggi sehingga memiliki potensi terhadap beberapa jenis bencana, terutama dengan tsunami, gempa bumi, ancaman gunung berapi dan tanah longsor. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak yang hanya untuk “tanggap darurat bencana” saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum bencana (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program saja maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (identifikasi bahaya, kesiapsiagaan, analisa risiko, preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan/terus menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga ke tingkat internasional. Dengan demikian, dengan potensi kebencanaan yang beragam, tingkat kerentanan yang cenderung tinggi di beberapa kawasan di Provinsi Bali, diperlukan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali melaksanakan urusan penanggulangan bencana sehingga pengurangan risiko bencana dapat teratasi dengan baik. Untuk dapat tercapainya hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya, seperti :

- a. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Penanggulangan Bencana
- b. Mengadakan pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- c. Mengadakan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana
- d. Mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana
- e. Membuat dan memasang Peta/Tanda/Rambu Rawan Bencana Kab/Kota se-Bali
- f. Meningkatkan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana
- g. Mengadakan Gladi Penanggulangan Bencana
- h. Meningkatkan Kapasitas Respons Kebencanaan
- i. Meningkatkan Kapasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- j. Meningkatkan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana
- k. Melakukan Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana
- l. Melakukan Monitoring dan Memantau Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana
- m. Meningkatkan Pelayanan *Crisis Centre* Pusdalops Penanggulangan Bencana
- n. Melaksanakan Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini
- o. Meningkatkan Kapasitas Sistem Peringatan Dini Tsunami

Sejalan dengan perubahan asumsi arah kebijakan baik secara nasional maupun di daerah serta perkembangan dinamika kondisi perekonomian dan keuangan daerah baik terkait dengan penerimaan pendapatan, kebijakan belanja dan target pembiayaan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025. Perubahan tersebut akan berpengaruh pada estimasi sasaran target output/outcome program dan kegiatan serta target pada Renstra dan RPD yang telah ditetapkan. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

Tahun 2025 juga mengakomodir perubahan target Renja Tahun 2025 sesuai dengan kondisi terkini dan mengakomodir penyesuaian belanja daerah yang akan dilaksanakan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
- 26) Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

- 27) Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12);
- 28) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- 29) Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 352 ayat bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2025.
- b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- c. Keadaan yang menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Berdasarkan amanat tersebut maka maksud disusunnya Perubahan Renja BPBD Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran tentang perubahan anggaran yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Bali dalam satu tahun anggaran untuk menuju terwujudnya tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, serta untuk peningkatan pelayanan, target capaian

kinerja, serta pengorganisasian program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya Perubahan Renja BPBD Provinsi Bali digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan BPBD Provinsi Bali Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 351 ayat (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dengan demikian tujuan penyusunan Perubahan Renja BPBD Provinsi Bali 2025 adalah:

- a) Penyesuaian pagu sub kegiatan (penambahan dan pengurangan/pergeseran).
- b) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah.
- c) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali 2025 adalah menjabarkan Rencana Strategis Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 khususnya Rencana Kerja Tahun 2025 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali 2025 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja BPBD Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat: Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
	Bab ini memuat: Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
BAB III	MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	Bab ini memuat: matrik perubahan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta pagu pendanaannya.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target, atau bahkan melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Subkegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja BPBD Provinsi Bali tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Target dan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tw I Tahun 2025	
				Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	6	7	8
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83,85%	83,85%	
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen	100 Persen	
1.05.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	40,92%

1.05.01.1.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21,85%
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	
1.05.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	18,19%
1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur dengan kelengkapan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	1 Paket	
1.05.01.1.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas Beserta atribut kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-
1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	
1.05.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
1.05.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

1.05.01.1.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12,30%
1.05.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	23,14%
1.05.01.1.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	25,00%
1.05.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4,73%
1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.01.1.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	111 Unit	29 Unit	46,05%
1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	
1.05.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25,00%

1.05.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	31,43%
1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	38 Unit	80,13%
1.05.01.1.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7 Unit	-
1.05.01.1.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	6 Unit	50,70%
1.05.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	-
1.05.01.1.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 Unit	79 unit	12,56%

1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	3 Persen	3 Persen	
		Persentase penanganan darurat bencana	100 Persen	100 Persen	
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	100 Persen	100 Persen	
1.05.03.1.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	
1.05.03.1.01.0004	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang	-
1.05.03.1.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	

1.05.03.1.02.0013	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	19,51%
1.05.03.1.02.0023	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1 Laporan	70 Orang	-
1.05.03.1.02.0024	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00%
1.05.03.1.02.0025	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	1 Dokumen	-

1.05.03.1.02.0027	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 Orang	80 Orang	1,04%
1.05.03.1.02.0028	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	145 Unit	145 Keluarga	-
1.05.03.1.02.0030	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	145 Orang	-
1.05.03.1.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	
1.05.03.1.03.0028	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900 Orang	900 Orang	-

1.05.03.1.03.0030	Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	38,82%
1.05.03.1.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis	5 Jenis	
1.05.03.1.04.0007	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	26,78%
1.05.03.1.04.0010	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	-	4 Lembaga	-

1.05.03.1.04.0013	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-	30 Orang	-
1.05.03.1.04.0018	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen	7,38%
1.05.03.1.04.0019	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	12,35%
1.05.03.1.04.0023	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	9 Kabupaten/Kota	-
UPTD.Pengendalian Daerah					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				

1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,85%	83,85%	
1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	
1.05.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25,00%
1.05.01.1.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1 Dokumen	16,53%
1.05.01.1.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Laporan	20,31%
1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.01.1.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	73 Unit	106 Unit	43,24%

1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	
1.05.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1 laporan	25,00%
1.05.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 laporan	1 laporan	21,91%
1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	
1.05.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	11 unit	22,04%
1.05.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	-
1.05.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73 Unit	118 Unit	3,72%
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	3 Persen	3 Persen	

1.05.03.1.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	
1.05.03.1.02.0029	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	7 dokumen	1 dokumen	16,84%
1.05.03.1.02.0030	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	-	70 Orang	-
1.05.03.1.04	Kegiatan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis	5 Jenis	
1.05.03.1.04.0017	Sub Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 dokumen	1 dokumen	4,12%

2.1 Kendala dan Solusi

Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.1 diatas, masih banyak terdapat kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 50% (lima puluh persen) bahkan 0 (nol). Hal ini dikarenakan oleh:

- a. Kegiatan memang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.
- b. Terdapat pengadaan yang dilaksanakan secara konsolidasi di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
- c. Proses pengadaan bahan bakar minyak dilaksanakan per termin sesuai arahan BPKAD;
- d. Pengadaan barang sedang dalam proses tayang pada e-katalog;
- e. Masih ada penyelesaian administrasi SPJ.

Terhadap dinamika yang terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan alternatif penyelesaian kendala dalam permasalahan yaitu :

- a. Selalu tepat waktu dalam menyelesaikan SPJ;
- b. Beberapa Sub kegiatan agar dipercepat penyelesaian administrasi SPJ;
- c. Penyelesaian SPJ agar didampingi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk percepatan administrasi;
- d. Kerjasama dengan pihak NGO, BUMN, Dunia Usaha dalam mencapai target sub kegiatan.

BAB III
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD_P) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 serta berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I dengan melakukan pergeseran pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya ditampilkan sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Provinsi Bali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							35.472.000.000,00	36.640.929.623,00	34.480.653.947,00							35.111.930.672,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.472.000.000,00	36.640.929.623,00	34.480.653.947,00							35.111.930.672,00				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							35.472.000.000,00	36.640.929.623,00	34.480.653.947,00							35.111.930.672,00				
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)				83.85 Persen	83.85 Persen	26.301.747.631,00	27.422.423.254,00	27.018.784.578,00							27.159.212.172,00				
	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	-			100 Persen	100 Persen	204.079.000,00	204.092.000,00	204.092.000,00			Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		325.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	97.050.000,00	97.051.000,00	34.621.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			168.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	107.029.000,00	107.041.000,00	54.301.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			157.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	-			100 Persen	100 Persen	14.321.714.887,00	15.676.945.478,00	15.676.945.478,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		14.834.756.225,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	14.321.714.887,00	15.676.945.478,00	15.676.945.478,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Pajak Kendaraa n Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			14.834.756.225,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	-			1 Paket	1 Paket	172.000.000,00	168.104.200,00	168.104.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		300.825.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	172.000.000,00	168.104.200,00	73.504.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			300.825.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	-			100 Persen	100 Persen	683.247.224,00	721.099.724,00	721.099.724,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		807.450.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.984.800,00	9.982.800,00	9.982.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			10.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	112.712.800,00	116.047.800,00	116.047.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			47.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	86.229.424,00	86.229.424,00	86.229.424,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			78.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.131.100,00	20.258.600,00	20.258.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			10.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			25.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	381.350.000,00	415.742.000,00	181.071.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Renon Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-		1 Tahun	1 Tahun	2.431.287.000,00	2.518.099.100,00	2.518.099.100,00			Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		714.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	905.145.500,00	869.369.100,00	868.666.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			609.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	-			100 Persen	100 Persen	2.966.844.520,00	2.808.465.352,00	2.808.465.352,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		2.061.477.734,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	258.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			131.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.245.773.200,00	1.186.386.448,00	1.186.386.448,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			1.489.059.734,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-			1 Tahun	1 Tahun	5.522.575.000,00	5.325.617.400,00	5.325.617.400,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		8.115.203.213,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	2.467.969.800,00	2.287.969.800,00	2.287.969.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			3.018.309.933,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	16.000.000,00	22.380.000,00	22.380.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			15.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	2.372.000.000,00	2.372.000.000,00	2.413.504.724,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				79 Unit	79 Unit	87.970.000,00	64.810.000,00	64.810.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			84.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana		100 3 Persen	100 3 Persen	9.170.252.369,00	9.218.506.369,00	7.461.869.369,00							7.952.718.500,00	

	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	-				9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/Kota	185.448.000,00	181.668.000,00	181.668.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,	Lingkungan, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		367.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				600 Orang	600 Orang	185.448.000,00	181.668.000,00	109.275.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,	Lingkungan, Kehutan an, dan Energi		367.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	-				100 Persen	100 Persen	3.133.258.200,00	3.194.171.100,00	3.194.171.100,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,	Lingkungan, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		3.458.882.375,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																	

							Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana					2 Kawasan	2 Kawasan	392.616.500,00	441.354.500,00	380.586.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			535.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
							Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana					70 Orang	70 Orang	100.159.500,00	69.690.300,00	8.175.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			420.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi																		

						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				160 Orang	145 Orang	496.545.600,00	490.898.900,00	380.257.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi			281.060.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	-			9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/Kota	1.214.251.200,00	1.214.183.200,00	1.214.183.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		1.680.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																

							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				900 Orang	900 Orang	752.037.200,00	752.027.200,00	752.027.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan an, Kehutan an, dan Energi			840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	462.214.000,00	462.156.000,00	248.042.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan an, Kehutan an, dan Energi			840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulan n Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	-			5 Jenis	5 Jenis	4.637.294.969,00	4.628.484.069,00	4.628.484.069,00		Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		2.446.336.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																
						Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	275.663.800,00	277.076.400,00	154.667.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi		498.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi																

						Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal					4 Lembaga	4 Lembaga	28.980.000,00	28.980.000,00	28.980.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			30.429.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi																	
						Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)					30 Orang	30 Orang	182.292.500,00	180.802.000,00	103.478.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			191.407.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																	

							Jumlah Dokumen yang dilegalikan					1 Dokumen	1 Dokumen	438.317.500,00	438.317.500,00	208.097.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutan an, dan Energi			21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																		
							Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)					1 Dokumen	1 Dokumen	76.490.000,00	76.490.000,00	13.590.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutan an, dan Energi			78.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

	1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	25.992.300,00	25.992.300,00	25.992.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			31.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			63.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-			1 Tahun	1 Tahun	2.431.287.000,00	2.518.099.100,00	2.518.099.100,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		714.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				101 Unit	106 Unit	1.526.141.500,00	1.648.730.000,00	1.648.730.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	-			100 Persen	100 Persen	2.966.844.520,00	2.808.465.352,00	2.808.465.352,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		2.061.477.734,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			256.410.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.223.071.320,00	1.124.078.904,00	1.124.078.904,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			184.758.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-		1 Tahun	1 Tahun	5.522.575.000,00	5.325.617.400,00	5.325.617.400,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah		8.115.203.213,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	140.800.000,00	140.800.000,00	140.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			4.601.806.992,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			174.506.063,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				120 Unit	118 Unit	312.835.200,00	312.657.600,00	312.657.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			220.830.225,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana				100 3 Persen Persen	100 3 Persen Persen	9.170.252.369,00	9.218.506.369,00	7.461.869.369,00							7.952.718.500,00	
		1	05	03	1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	-			100 Persen	100 Persen	3.133.258.200,00	3.194.171.100,00	3.194.171.100,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		3.458.882.375,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	
							Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	953.198.200,00	953.192.000,00	751.322.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkung an, Kehutan an, dan Energi			1.067.321.525,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																	

						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana linas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				70 Orang	70 Orang	212.230.800,00	212.209.900,00	209.259.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingku ngan, Kehutan an, dan Energi			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulan g n Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	-		5 Jenis	5 Jenis	4.637.294.969,00	4.628.484.069,00	4.628.484.069,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingku ngan, Kehutan an, dan Energi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		2.446.336.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																

							Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.450.060.069,00	3.450.000.069,00	3.375.620.069,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi				1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H												35.472.000.000,00	36.640.929.623,00	34.480.653.947,00								35.111.930.672,00	

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 disusun, sebagai dasar dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran (RKA/DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

1. Bahwa Upaya Penanggulangan Bencana merupakan suatu siklus kegiatan yang berkesinambungan dan terus menerus mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang tertuang pada Program/kegiatan dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana.
2. Pelaksanaan dari Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali tahun 2025 akan memenuhi capaian sasaran dan target kinerjanya sesuai renja BPBD Provinsi Bali apabila didukung anggaran yang memadai.
3. Potensi kebencanaan yang beragam, tingkat kerentanan yang cenderung tinggi di beberapa kawasan di Provinsi Bali, diharapkan menemukan pola baru/ inovasi dalam penanganan bencana terutama pada kegiatan pra bencana yang bertujuan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait pengurangan risiko bencana.

Tindak lanjut

Perubahan Renja ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali untuk kegiatan di Tahun 2025 yang akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Perubahan Renja Tahun 2025 bahwa Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sinkron dengan RKPD sehingga dapat dijadikan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Demikianlah Dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 disusun semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2025. Terima kasih.



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR B.33.500.14.2.1/1655/BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

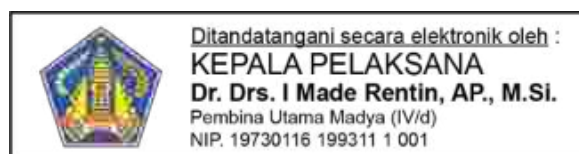
KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
2. Mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
3. Menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; dan
4. Melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 26 Februari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar
(3 exemplar).
4. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI BALI
NOMOR B.33.500.14.2.1/1655 /BPBD/2024
TANGGAL 26 FEBRUARI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

- Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala UPTD. Pengendalian Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Pengendalian Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8. I Wayan Suwirta, S.Sos, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA PELAKSANA
Dr. Drs. I Made Rentin, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19730116 199311 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

"OM SWASTIASTU"

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali berhasil menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan (Renja P) ini merupakan rumusan keinginan untuk mewujudkan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan (Renja P) juga merupakan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) ini adalah untuk menggambarkan tahapan – tahapan perencanaan dari program dan kegiatan di Tahun 2025, dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Melalui penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) ini juga dapat memberikan gambaran target – target yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Tahun 2025, yang mana target – target tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja P) ini kami susun, semoga dapat digunakan dengan baik sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan beberapa tahun kedepan.

"OM SHANTI, SHANTI, SHANTI, OM"

Bali, 9 Juli 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Bali,



Gede Suralaga, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700525 198907 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi	ii
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan RENJA	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Dokumen RENJA	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	61
2.4 Review Terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali	64
2.5 Penelahaan Usulan Masyarakat.....	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	75
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	75
3.2 Tujuan Renja Perangkat Daerah.....	77
3.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	78
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	83
BAB V PENUTUP	85

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
- Ketua : Sekretaris Badan
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Daerah
 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 3. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 4. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
 5. Dewa Ayu Ngurah Tica Suartati, SE.
 6. Ida Bagus Oka Apriadi, SH.,MH.
 7. Agus Santoso, S.Sos.
 8. Ni Kadek Rudiani, SH.,MH.
 9. Ni Putu Artani, SE.,M.Si.
 10. I Made Artanegara, S.STP.,M.Si.
 11. Nyoman Ayu Trisna Ridayanti, SH.,MH.
 12. I Wayan Mardiana, SE.
 13. I Gede Yudhi Permadi Kusuma, S.Kom.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan bagian penting dalam menunjang keberhasilan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RENJA Perangkat Daerah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025 disusun berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai terjemahan dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen pengganti dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.

RENJA Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat

Daerah dan RKPD. Sebagai dokumen tahunan, RENJA mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RENJA merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA ke dalam program dan kegiatan. Disamping itu RENJA juga memuat arahan operasional dan acuan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RENJA

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali didasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- 13) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan.

Renja Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan sesuai dengan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2025 adalah menjabarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tahun 2024-2026. Rencana Kerja Tahun 2025 juga menjadi bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2025 akan disesuaikan pada RKPD tersebut. Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2025 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2025.
- 2) Merancang program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tahun 2025.
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025 dengan RKPD tahun 2025.
- 5) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 6) Tujuan tersusunnya Renja ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan

program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Dokumen RENJA

Sistematika dokumen RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri dari 5 Bab yang masing-masing bab substansinya saling terkait dan mejadi satu kesatuan.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan RENJA
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen RENJA

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Derah
- 2.4 Review Terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali
- 2.5 Penelahaan Usulan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input*, *output*, dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator *output*nya.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali selama Triwulan I Tahun 2025 dan perkiraan capaian target diakhir tahun 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali yang perlu dilanjutkan dalam Rencana Kerja Tahun kedepannya.

2.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 dan
Perbandingannya dengan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2023			2024			Target Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Capaian s/d 2024
			Target	Realiasi	Capaian %	Target	Realiasi	Capaian %		
	Tujuan Strategis									
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	Indeks Demokrasi	81	83.21	102.73%	81	85.13	105.10%	81	85.13
	Sasaran Strategis									
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	N/A	N/A	N/A	76.00	83.74	110.18%	78	83.74
2	Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa	Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan	N/A	N/A	N/A	76.00	82.94	109.13%	78	82.94
3	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat	Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat	N/A	N/A	N/A	76.00	83.90	110.39%	78	83.90
4	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.00	83.87	101.05	83.00	84.00	101.20%	84	84.00

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan di tahun 2024 untuk masing – masing tujuan strategis dan sasaran strategis dengan indikator kinerja, realisasinya rata-rata sudah memberikan hasil kinerja yang baik dengan tercapainya target kinerja tersebut. Khusus untuk Sasaran Strategis Nomor 1, 2, dan 3 menggunakan Indikator yang baru disusun dan dicantumkan pada Renstra 2024-2026, sehingga capaian Indikator Sasaran Strategis tersebut tidak terdapat capaian di tahun 2023 serta tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi target kinerja untuk Tahun 2024 sudah sangat baik dan memberikan peningkatan pada beberapa target realisasasi kinerja tersebut. Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2024, sehingga

semua pelaksanaan kinerja tersebut mendukung dari adanya capaian akhir tercapainya target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 dan Perbandingannya dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2022			2023			2024		
			Target	Realiasi	Capaian %	Target	Realiasi	Capaian %	Target	Realiasi	Capaian %
	Tujuan Strategis										
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	Indeks Demokrasi	81	75.35	93.02%	81	83.21	102.73%	81	85.13	105.10%
	Sasaran Strategis										
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.00	83.74	110.18%
2	Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa	Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.00	82.94	109.13%
3	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat	Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.00	83.90	110.39%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83.23	100.28%	83.00	83.87	101.05	83.00	84.00	101.20%

Pada Tabel 2.2 di atas dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2022 sampai 2024, target kinerja tersebut merupakan target kinerja dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 dan Renstra 2024-2026 sehingga tidak semua target kinerja dapat diperbandingkan karena adanya penambahan target kinerja baru pada Renstra 2024-2026. Dilihat dari capaian kinerja tujuan dan sasaran dari tahun 2022-2024 khususnya yang dapat diperbandingkan yaitu Indikator Tujuan Indeks Demokrasi dan Indikator Sasaran Strategis Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja sudah terdapat

peningkatan yang menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Peningkatan capaian kinerja sudah terlihat dari Tahun 2022 s.d. 2024 (khusus indikator yang dapat dibandingkan). Hal tersebut menunjukkan setiap tahunnya kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sudah lebih baik setiap tahunnya, sehingga pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik setiap tahunnya.

2.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 dan Perbandingannya dengan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2022			2023			2024			Target Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Capaian s/d 2024
			Target	Realiasi	Capaian %	Target	Realiasi	Capaian %	Target	Realiasi	Capaian %		
	Tujuan Strategis												
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	Indeks Demokrasi	81	75.35	93.02%	81	83.21	102.73%	81	85.13	105.10%	81	85.13
	Sasaran Strategis												
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.00	83.74	110.18%	78	83.74
2	Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa	Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.00	82.94	109.13%	78	82.94
3	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat	Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.00	83.90	110.39%	78	83.90
4	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83.23	100.28%	83.00	83.87	101.05	83.00	84.00	101.20%	84	84.00

Pada Tabel diatas menjelaskan bahwa target pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 dan Renstra 2024-2026 sehingga tidak semua target kinerja dapat diperbandingkan karena adanya penambahan target kinerja baru pada Renstra 2024-2026. Dilihat dari capaian kinerja tujuan dan sasaran dari tahun 2022-2024 khususnya yang dapat diperbandingkan yaitu Indikator Tujuan Indeks Demokrasi dan Indikator Sasaran Strategis Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja sudah terdapat peningkatan yang menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Target jangka menengah yang dicantumkan adalah target pada Renstra 2024-2026. Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 dan Perbandingannya dengan Target Jangka Menengah rata-rata sudah tercapai sesuai target yang tercantum pada Renstra 2024-2026. Walaupun target jangka menengah sudah tercapai, kedepannya masih perlu dilakukan inovasi dalam pelaksanaan kinerja sehingga capaian yang sudah dicapai tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan capaiannya.

2.1.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 (Nilai IDI 2023) dan Perbandingannya dengan Target Nasional

No.	Keterangan	Tahun			Keterangan
		2021	2022	2023	
	Nilai Indeks Demokrasi				
1	Provinsi Bali	75.35	83.21	85.13	Provinsi Bali
2	Nasional	78.12	80.41	79.51	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat
3	Pusat	81.33	84.29	83.14	Pusat
4	Provinsi	76.08	77.95	77.21	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (<https://www.bps.go.id/idi/statistics-table/2/MjE2MSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>)

Nilai IDI Nasional 2023 adalah sebesar 79,51 dengan kategori sedang, nilai IDI Nasional tersebut di bawah daripada nilai IDI Provinsi Bali sebesar 85,13 dengan katagori Tinggi. Capaian IDI Tahun 2023 yang dirilis di tahun 2024 Provinsi Bali mendapat peringkat Pertama sehingga menjadikan Provinsi Bali daerah yang paling demokratis berdasarkan capaian IDI tersebut. Capaian IDI Tahun 2023 tersebut naik 5 peringkat dari peringkat 6 pada capaian tahun 2022.

Capaian IDI Provinsi Bali secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.5. Pada Tabel 2.5. dapat dilihat sumbangsih masing-masing *variable* untuk peningkatan Nilai IDI Tahun 2021 ke 2023. Sebagian besar terdapat peningkatan capaian yang dilihat pada *variable* tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang bersinergi dan berkolaborasi dengan Instansi Terkait telah berhasil menaikkan capaian Nilai IDI Tahun 2023. Kedepannya diharapkan Capaian Nilai IDI Tahun 2024 dapat dipertahankan pada peringkat pertama serta mendapatkan nilai yang lebih baik lagi daripada capaian di Tahun 2024.

Grafik 2.1 Nilai IDI Tahun 2023 di Provinsi Bali



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2024

Grafik 2.2 Urutan Capaian Nilai IDI Tahun 2023 Nasional

Perbandingan IDI Provinsi 2022 dan 2023				
Peringkat	Provinsi	2022	2023	Selisih
1	Bali	83,21	85,13	1,92
2	DKI Jakarta	82,13	84,57	2,43
3	DI Yogyakarta	85,62	83,88	-1,75
4	Jawa Barat	83,34	83,04	-0,30
5	Kalimantan Timur	83,58	82,28	-1,31
6	Jawa Timur	84,92	82,01	-2,91
7	Kalimantan Barat	81,48	81,69	0,21
8	Jawa Tengah	84,79	80,87	-3,91
9	Kalimantan Utara	78,79	80,47	1,68
10	Kalimantan Selatan	80,86	80,44	-0,41
11	Sumatera Utara	79,53	80,34	0,80
12	Gorontalo	73,74	79,71	5,96
13	Sulawesi Tengah	80,92	79,13	-1,79
14	Lampung	78,32	78,37	0,05
15	Sumatera Selatan	80,59	78,17	-2,42
16	Kepulauan Riau	78,77	77,66	-1,11
17	Kalimantan Tengah	79,30	77,57	-1,74

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2024

Tabel 2.5 Rincian Capaian IDI Provinsi Bali Tahun 2023 per Aspek

Aspek/ Aspect	Indikator/Indicator	2021	2022	2023
Kebebasan Freedom	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara Guaranteed freedom of assembly, association, expression, and opinion by state officials	93.95	93.9763	100
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat Guaranteed freedom of assembly, association, expression, and opinion among communities	84.89	69.8816	70.1722
	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan / Guaranteed freedom of belief	89.92	100	80.1148
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan Guaranteed freedom of assembly, association, expression, opinion, and belief in every policy	90	90	100
	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat Guaranteed right to vote and be elected in elections	99.24	99.237	99.237
	Pemenuhan hak-hak pekerja / Fulfillment of workers' rights	50.8	56.8331	56.5667
	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya A free press in carrying out its duties and functions	75.72	79.78	82.58
Kesetaraan Equality	Kesetaraan gender / Gender equality	95.17	95.3291	97.2808
	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan Community participation in influencing public policy through representative institutions	36.36	100	100
	Anti monopoli sumber daya ekonomi / Antimonopoly of economic resources	69.33	62.6667	63.5
	Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial Access of the poor to social protection and security	81.44	80.2395	86.9
	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah / Equality of job opportunities between regions	94.63	95.2	97.31
	Akses masyarakat terhadap informasi publik / Public access to public information	83.29	84.11	83.86
	Kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsi / Equality in basic services	81.22	81.56	81.5
Kapasitas Lembaga Demokrasi Capacity of Institutions of Democracy	Kinerja lembaga legislatif / Performance of the legislative	58.33	50	82.35
	Kinerja lembaga yudikatif / Performance of the judiciary	84.28	84.71	83.94
	Netralitas penyelenggara pemilu / Neutrality election organizers	70	70	70
	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah Decisions of the State Administrative Court (PTUN) regarding government officials' policies	85	80	85
	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat Government guarantees the preservation of the environment and people's living spaces	70.7	70.89	71.38
	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah Budget transparency in the form of providing information on APBN/D by the government	28.57	100	100
	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik / Bureaucratic performance in public services	66.8	80	84.2
	Pendidikan politik pada kader partai politik / Political education for political party cadres	45.71	100	100
Skor Indeks Demokrasi / Democracy Index Score:		75.35	83.21	85.1269

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2024

**Tabel 2.6 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Bali
sampai dengan Tahun 2024**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2023(sampai dengan bulan Maret)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	7			8			9 = (8/7) x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5) x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				199,287,182,859			196,741,706,746		98.72%					KESBANGPOL	
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	11,053,190,607	84.00	nilai	9,902,559,111	101.20%	89.59%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8	Dokumen	49,207,800	8	Dokumen	45,846,290	100.00%	93.17%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	34,212,800	4	dokumen	32,688,690	100%	95.55%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	14,995,000	4	dokumen	13,157,600	100%	87.75%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	8,348,401,423	100	%	7,485,246,782	100%	89.66%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang	8,348,401,423	44	Orang	7,485,246,782	100%	89.66%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	%	455,724,000	100	%	342,858,564	100.00%	75.23%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14,989,100	1	Paket	9,493,500	100%	63.34%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	108,585,000	5	Paket	84,221,900	100%	77.56%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	75,000,000	3	Paket	73,900,000	100%	98.53%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	34,623,800	3	Paket	23,945,900	100%	69.16%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	4,996,100	2	Dokumen	3,576,000	100%	71.58%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	217,530,000	12	Laporan	147,721,264	100%	67.91%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan selesai	100	%	125,643,800	100	%	87,278,800	100%	69.47%						
	8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	125,643,800	10	Unit	87,278,800	100%	69.47%						
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	100	%	1,042,803,584	100.00	%	1,014,325,252	100%	97.27%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	6,960,000	1	Laporan	5,800,000	100%	83.33%					KESBANGPOL	

8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	100	%	1,042,803,584	100.00	%	1,014,325,252	100%	97.27%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	6,960,000	1	Laporan	5,800,000	100%	83.33%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	128,500,000	12	Laporan	106,868,112	100%	83.17%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	907,343,584	12	Laporan	901,657,140	100%	99.37%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	100	%	1,031,410,000	100.00	%	927,003,423.00	100%	89.88%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	836,280,000	8	Unit	743,034,300.00	100.00%	88.85%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	Unit	12,000,000	150	Unit	11,250,000.00	100.00%	93.75%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	Unit	25,640,000	36	Unit	22,480,000	100.00%	87.68%						
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	143,000,000	1	Unit	139,489,123	100.00%	97.54%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	14,490,000	9	Unit	10,750,000	100.00%	74.19%					KESBANGPOL	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90	%	4,320,805,120	90	%	3,690,242,210	90.00	85.41%					KESBANGPOL	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	4,320,805,120	100.00	%	3,690,242,210	100.00%	85.41%					KESBANGPOL	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500	Orang	741,921,620	500	Orang	567,547,453	100%	76.50%					KESBANGPOL	
8.01.02.1.01.012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	36	Orang	3,578,883,500	72	Orang	3,122,694,757	200.00%	87.25%					KESBANGPOL	

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	80	%	180,789,855,052	83	%	180,450,445,116	104%	99.81%					KESBANGPOL	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	%	180,789,855,052	100%	%	180,450,445,116	100%	99.81%					KESBANGPOL	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang	180,789,855,052	100	Orang	180,450,445,116	100.00	99.81%					KESBANGPOL	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata	80	%	218,457,000	100	%	97,717,686	125%	44.73%					KESBANGPOL	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	%	218,457,000	100.00	%	97,717,686	100.00%	44.73%					KESBANGPOL	
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	Orang	218,457,000	100	Orang	97,717,686	100%	44.73%					KESBANGPOL	

8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	80	%	553,056,560	100	%	539,636,618	125%	97.57%					KESBANGPOL	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	553,056,560	100.00	%	539,636,618	100.00%	97.57%					KESBANGPOL	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	Orang	553,056,560	100	Orang	539,636,618	100%	97.57%					KESBANGPOL	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	90	%	2,351,818,520	90	%	2,061,106,005	100%	87.64%					KESBANGPOL	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	%	2,351,818,520	100.00	%	2,061,106,005	100%	87.64%					KESBANGPOL	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40	Orang	1,364,464,520	40	Orang	1,123,278,215	100%	82.32%					KESBANGPOL	
8.01.06.1.01.046	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12	Dokumen	987,354,000	12	Dokumen	937,827,790	100%	94.98%					KESBANGPOL	

Tabel 2.7 Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
				(AK)/REALISASI SD BLN INI	(C / ΣPAGU KEGIATAN)	(=Z)	(ISI MANUAL PPTK)	(I-H)	(F x G)	(F xH)	(K-J)	(=G)	(F/DX100)	(O-N)	(FXM)	(FXN)	(R-Q)	(D-F)	DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN
1	8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,212,800.00	34,212,800.00	32,688,690.00	0.02%	100.00	100.00	-	0.02	0.02	-	100.00	95.55	(4.45)	0.02	0.02	(4.45)	1,524,110.00	
2	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,995,000.00	14,995,000.00	13,157,600.00	0.01%	100.00	100.00	-	0.01	0.01	-	100.00	87.75	(12.25)	0.01	0.01	(12.25)	1,837,400.00	
3	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,741,852,164.00	8,348,401,423.00	7,485,246,782.00	4.18%	100.00	99.17	(0.83)	4.18	4.15	(0.83)	100.00	89.66	(10.34)	4.18	3.75	(10.34)	863,154,641.00	Belanja Tapera tidak terealisasi
4	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,989,100.00	14,989,100.00	9,493,500.00	0.01%	100.00	100.00	-	0.01	0.01	-	100.00	63.34	(36.66)	0.01	0.00	(36.66)	5,495,600.00	
5	8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78,585,000.00	108,585,000.00	84,221,900.00	0.05%	100.00	100.00	-	0.05	0.05	-	100.00	77.56	(22.44)	0.05	0.04	(22.44)	24,363,100.00	
6	8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,000,000.00	75,000,000.00	73,900,000.00	0.04%	100.00	100.00	-	0.04	0.04	-	100.00	98.53	(1.47)	0.04	0.04	(1.47)	1,100,000.00	
7	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,623,800.00	34,623,800.00	23,945,900.00	0.02%	100.00	100.00	-	0.02	0.02	-	100.00	69.16	(30.84)	0.02	0.01	(30.84)	10,677,900.00	
8	8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,996,100.00	4,996,100.00	3,576,000.00	0.00%	100.00	100.00	-	0.00	0.00	-	100.00	71.58	(28.42)	0.00	0.00	(28.42)	1,420,100.00	
9	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138,330,000.00	217,530,000.00	147,721,264.00	0.11%	100.00	100.00	-	0.11	0.11	-	100.00	67.91	(32.09)	0.11	0.07	(32.09)	69,808,736.00	
10	8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125,643,800.00	125,643,800.00	87,278,800.00	0.06%	100.00	100.00	-	0.06	0.06	-	100.00	69.47	(30.53)	0.06	0.04	(30.53)	38,365,000.00	

11	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,960,000.00	6,960,000.00	5,800,000.00	0.00%	100.00	100.00	-	0.00	0.00	-	100.00	83.33	(16.67)	0.00	0.00	(16.67)	1,160,000.00	
12	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000,000.00	128,500,000.00	106,868,112.00	0.06%	100.00	100.00	-	0.06	0.06	-	100.00	83.17	(16.83)	0.06	0.05	(16.83)	21,631,888.00	
13	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	861,343,584.00	907,343,584.00	901,657,140.00	0.45%	100.00	100.00	0.00	0.45	0.45	0.00	100.00	99.37	(0.63)	0.45	0.45	(0.63)	5,686,444.00	
14	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	828,165,000.00	836,280,000.00	743,034,300.00	0.42%	100.00	100.00	-	0.42	0.42	-	100.00	88.85	(11.15)	0.42	0.37	(11.15)	93,245,700.00	
15	8.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	12,000,000.00	12,000,000.00	11,250,000.00	0.01%	100.00	100.00	-	0.01	0.01	-	100.00	93.75	(6.25)	0.01	0.01	(6.25)	750,000.00	
16	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,640,000.00	25,640,000.00	22,480,000.00	0.01%	100.00	100.00	-	0.01	0.01	-	100.00	87.68	(12.32)	0.01	0.01	(12.32)	3,160,000.00	
17	8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143,000,000.00	143,000,000.00	139,489,123.78	0.07%	100.00	100.00	-	0.07	0.07	-	100.00	97.54	(2.46)	0.07	0.07	(2.46)	3,510,876.22	
18	8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,490,000.00	14,490,000.00	10,750,000.00	0.01%	100.00	100.00	-	0.01	0.01	-	100.00	74.19	(25.81)	0.01	0.01	(25.81)	3,740,000.00	
19	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	741,921,620.00	741,921,620.00	567,547,453.00	0.37%	100.00	97.75	(2.25)	0.37	0.36	(2.25)	100.00	76.50	(23.50)	0.37	0.28	(23.50)	174,374,167.00	terdapat belanja yg tidak terealisasi karena rasionalisasi anggaran
20	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	3,578,883,500.00	3,578,883,500.00	3,122,694,757.00	1.79%	100.00	99.35	(0.65)	1.79	1.78	(0.65)	100.00	87.25	(12.75)	1.79	1.56	(12.75)	456,188,743.00	terdapat belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan tidak terealisasi dikarenakan sewa kamar sudah include dengan tempat pertemuan

21	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	180,149,915,352.00	181,164,239,852.00	180,450,445,116.00	90.74%	100.00	100.00	(0.00)	90.74	90.73	(0.00)	100.00	99.61	(0.39)	90.74	90.38	(0.39)	713,794,736.00	
22	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	118,457,000.00	218,457,000.00	97,717,686.00	0.11%	100.00	51.20	(48.80)	0.11	0.06	(48.80)	100.00	44.73	(55.27)	0.11	0.05	(55.27)	120,739,314.00	
23	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	553,056,560.00	553,056,560.00	539,636,618.00	0.28%	100.00	100.00	-	0.28	0.28	-	100.00	97.57	(2.43)	0.28	0.27	(2.43)	13,419,942.00	
24	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,364,464,520.00	1,364,464,520.00	1,123,278,215.00	0.68%	100.00	100.00	-	0.68	0.68	-	100.00	82.32	(17.68)	0.68	0.56	(17.68)	241,186,305.00	
25	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	987,354,000.00	987,354,000.00	937,827,790.00	0.49%	100.00	97.63	(2.37)	0.49	0.48	(2.37)	100.00	94.98	(5.02)	0.49	0.47	(5.02)	49,526,210.00	Belanja makmin tidak terealisasi karena makmin sudah difasilitasi oleh biro umum
	JUMLAH	198,758,878,900.00	199,661,567,659.00	196,741,706,746.78	100.00%	100.00	99.88	(0.12)	100.00	99.88	(0.12)	100.00	98.54	(1.46)	100.00	98.54	(1.46)	2,919,860,912.22	

**Tabel 2.8 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Bali
sampai dengan Triwula I Tahun 2025**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	7			8			9 = (8/7) x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5) x 100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				44,711,770,873			3,609,870,588		8.07%					KESBANGPOL	
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.5	nilai	13,370,231,451	-	nilai	2,572,679,741	0.00%	19.24%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8	Dokumen	80,596,000	5	Dokumen	15,360,000	62.50%	19.06%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	57,956,000	1	dokumen	-	25%	0.00%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	22,640,000	4	dokumen	15,360,000	100%	67.84%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100	%	10,015,015,243	100.00	%	1,801,732,258	100.00	17.99%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Orang	10,015,015,243	59	Orang	1,801,732,258	100%	17.99%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	6	Laporan	601,359,824	0	Laporan	8,489,200	0.00%	1.41%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	14,921,500	0	Paket	-	0%	0.00%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	240,117,300	0	Paket	-	0%	0.00%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	77,229,424	0	Paket	-	0%	0.00%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	35,880,500	0	Paket	950,000	0%	2.65%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	4,996,100	0	Dokumen	-	0%	0.00%					KESBANGPOL	
	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	228,215,000	2	Laporan	7,539,200	17%	3.30%					KESBANGPOL	

8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	3	Laporan	606,324,240	0	Laporan	-	0%	0.00%						
8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	Paket	189,401,500	0	Paket	-	0%							
8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	416,922,740	0	Unit	-	0%	0.00%						
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah	3	Laporan	1,058,014,344	15.70	%	166,110,383	15.70%	15.70%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	11,994,800	1	Laporan		100%	0.00%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	130,000,000	3	Laporan	26,563,989	25%	20.43%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	916,019,544	3	Laporan	139,546,394	25%	15.23%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah terpelihara	5	Laporan	1,008,921,800	57.59	%	580,987,900.00	57.59%	57.59%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	Unit	790,100,000	6	Unit	580,987,900.00	26.09%	73.53%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	19,960,000	0	Unit		0.00%	0.00%						
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	181,981,800	0	Unit		0.00%	0.00%					KESBANGPOL	
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13	Unit	16,880,000	0	Unit		0.00%	0.00%					KESBANGPOL	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	92	%	4,489,872,394	0	%	42,103,386	0.00	0.94%					KESBANGPOL	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	4,489,872,394	20.00%	%	42,103,386	20.00%	0.94%					KESBANGPOL	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500	Orang	1,041,752,794	50	Orang	24,533,246	10%	2.35%					KESBANGPOL	
8.01.02.1.01.012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	72	Orang	3,448,119,600	0	Orang	17,570,140	0.00%	0.51%					KESBANGPOL	

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	85	%	24,195,610,794	0	%	35,913,246	0%	0.15%					KESBANGPOL	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	%	24,195,610,794	20%	%	35,913,246	20%	0.15%					KESBANGPOL	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200	Orang	24,195,610,794	0	Orang	35,913,246	0.00	0.15%					KESBANGPOL	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata	85	%	503,817,000	0	%	340,786,923	0%	67.64%					KESBANGPOL	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	%	503,817,000	25.00%	%	340,786,923	25.00%	67.64%					KESBANGPOL	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500	Orang	503,817,000	100	Orang	340,786,923	20%	67.64%					KESBANGPOL	

8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	85	%	836,547,322	0	%	538,925,128	0%	64.42%					KESBANGPOL	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	836,547,322	20.00%	%	538,925,128	20.00%	64.42%					KESBANGPOL	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	Orang	836,547,322	25	Orang	538,925,128	25%	64.42%					KESBANGPOL	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	95	%	1,315,691,912	0	%	79,462,164	0%	6.04%					KESBANGPOL	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	%	1,315,691,912	20.00%	%	79,462,164	20%	6.04%					KESBANGPOL	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40	Orang	350,834,212	10	Orang	78,962,164	25%	22.51%					KESBANGPOL	
8.01.06.1.01.046	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12	Dokumen	964,857,700	3	Dokumen	500,000	25%	0.05%					KESBANGPOL	

Tabel 2.9 Realisasi Fisik Keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
				(AK)/REALISASI SD BLN INI	(C / ΣPAGU KEGIATAN)	(=Z)	(ISI MANUAL PPTK)	(I-H)	(F x G)	(F xH)	(K-J)	(=G)	(F/DX100)	(O-N)	(FXM)	(FXN)	(R-Q)	(D-F)
1	8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57,956,000.00	-	-	0.00	23.39	10.00	(13.39)	0.03	0.01	(13.39)	23.39	-	(23.39)	0.03	-	23.39	57,956,000.00
2	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,640,000.00		15,360,000.00	0.00	88.07	67.84	(20.23)	0.04	0.03	(20.23)	88.07	67.84	(20.23)	0.04	0.03	20.23	7,280,000.00
3	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,015,015,243.00		1,801,732,258.00	0.22	28.43	28.43	(0.00)	6.37	6.37	(0.00)	28.43	17.99	(10.44)	6.37	4.03	10.44	8,213,282,985.00
4	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,921,500.00		-	0.00	100.00	10.00	(90.00)	0.03	0.00	(90.00)	100.00	-	(100.00)	0.03	-	100.00	14,921,500.00
5	8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240,117,300.00		-	0.01	7.55	3.78	(3.78)	0.04	0.02	(3.78)	7.55	-	(7.55)	0.04	-	7.55	18,140,000.00
6	8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantorr	77,229,424.00		-	0.00	22.64	8.00	(14.64)	0.04	0.01	(14.64)	22.64	-	(22.64)	0.04	-	22.64	77,229,424.00
7	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35,880,500.00		950,000.00	0.00	75.29	4.92	(70.38)	0.06	0.00	(70.38)	75.29	2.65	(72.65)	0.06	0.00	72.65	34,930,500.00

8	8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,996,100.00		-	0.00	25.22	10.00	(15.22)	0.00	0.00	(15.22)	25.22	-	(25.22)	0.00	-	25.22	4,996,100.00
9	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228,215,000.00		7,539,200.00	0.01	-	9.61	(53.57)	-	0.05	(53.57)	63.18	3.30	(59.87)	0.32	0.02	59.87	402,759,000.00
15	8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	189,401,500.00		-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,401,500.00
10	8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	416,922,740.00		-	0.01	38.12	10.00	(28.12)	0.36	0.09	(28.12)	38.12	-	(38.12)	0.36	-	38.12	416,922,740.00
11	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,994,800.00		-	0.00	100.00	90.00	(10.00)	0.03	0.02	(10.00)	100.00	-	(100.00)	0.03	-	100.00	11,994,800.00
12	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130,000,000.00		26,563,989.00	0.00	27.65	27.65	-	0.08	0.08	-	27.65	20.43	(7.21)	0.08	0.06	7.21	103,436,011.00
13	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	916,019,544.00		139,546,394.00	0.02	30.90	30.90	(0.00)	0.63	0.63	(0.00)	30.90	15.23	(15.66)	0.63	0.31	16.08	759,842,200.00
14	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	790,100,000.00		580,987,900.00	0.02	81.67	73.98	(7.68)	1.44	1.31	(7.68)	81.67	73.53	(8.13)	1.44	1.30	8.13	209,112,100.00
15	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,960,000.00		-	0.00	21.34	12.07	(9.27)	0.01	0.01	(9.27)	21.34	-	(21.34)	0.01	-	21.34	19,960,000.00
16	8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181,981,800.00		-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,981,800.00

17	8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,880,000.00	-	0.00	18.07	-	(18.07)	0.01	-	(18.07)	18.07	-	(18.07)	0.01	-	18.07	16,880,000.00
18	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,041,752,794.00	24,533,246.00	0.02	4.36	3.10	(1.27)	0.10	0.07	(1.27)	4.36	2.35	(2.01)	0.10	0.05	2.07	682,056,104.00
19	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	3,448,119,600.00	17,570,140.00	0.08	3.77	0.65	(3.12)	0.29	0.05	(3.12)	3.77	0.51	(3.26)	0.29	0.04	3.26	835,630,600.00
20	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24,195,610,794.00	35,913,246.00	0.54	0.39	0.15	(0.23)	0.21	0.08	(0.23)	0.39	0.15	(0.24)	0.21	0.08	0.29	159,611,384.00
21	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	503,817,000.00	340,786,923.00	0.01	82.44	67.80	(14.64)	0.93	0.76	(14.64)	82.44	67.64	(14.80)	0.93	0.76	14.80	163,030,077.00
22	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	836,547,322.00	538,925,128.00	0.02	76.38	65.88	(10.50)	1.43	1.23	(10.50)	76.38	64.42	(11.96)	1.43	1.21	11.96	294,815,394.00
23	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	350,834,212.00	78,962,164.00	0.01	96.04	45.38	(50.65)	0.75	0.36	(50.65)	96.04	22.51	(73.53)	0.75	0.18	73.53	271,872,048.00
24	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	964,857,700.00	500,000.00	0.02	28.69	30.25	1.56	0.62	0.65	1.56	28.69	0.05	(28.64)	0.62	0.00	28.64	964,357,700.00
	JUMLAH	44,711,770,873.00	-	1.00	13.83	11.86	(1.97)	13.51	11.86	(1.65)	13.83	8.07	(5.76)	13.83	8.07	(5.76)	41,101,900,285.00

Pada Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 198.838.878.900,- Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 198.510.828.700,- dan Belanja modal sebesar Rp. 328.050.200,-. Pada tahun 2024 terdapat perubahan dalam APBD sehingga jumlah anggaran kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pun mengalami perubahan. Perubahan anggaran tersebut melalui mekanisme perubahan APBD 2024, dengan total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 199.287.182.859,- dengan rincian Belanja operasi menjadi Rp. 198.929.132.659,- Serta Belanja modal menjadi Rp. 358.050.200,-. Perubahan tersebut dilakukan terkait adanya penyesuaian anggaran pada beberapa Sub Kegiatan dan juga adanya tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali terutama penambahan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Adapun realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 196,741,706,746 ,- (98,72%) dan realisasi fisik sebesar 99,88% berdasarkan data realisasi fisik dan keuangan. Penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 98,72% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024 dapat dibilang sudah cukup baik untuk mencapai tujuan organisasi dimana jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian Sasaran Organisasi yang rata-rata sudah baik dan tercapai sehingga penyerapan anggaran di tahun 2024 sudah memberikan dukungan yang baik terhadap capaian organisasi.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam hal melaksanakan anggaran di Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada untuk tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan realisasi anggaran tersebut sudah dilakukan pengecekan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku, sehingga diharapkan sudah dapat meminimalisir dari kesalahan yang ada nantinya. Pelaksanaan anggaran di

Tahun 2024 sudah dilaksanakan untuk mendukung tujuan organisasi seperti menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mensukseskan Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024. Serta kegiatan lainnya yang menunjang kinerja dari Pemerintah Provinsi Bali. Pelaksanaan anggaran juga sudah dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dimana menitikberatkan pengawasan dari atasan/pimpinan unit kerja dalam melaksanakan anggaran di Tahun 2024, sehingga dengan pengawasan langsung dari atasan diharapkan dapat meminimalisir dari risiko yang mungkin terjadi.

Berbanding dengan realisasi anggaran di Tahun 2023 sebesar 98,88% yang lebih tinggi sebesar 0,16% daripada capaian di Tahun 2024. Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 36.506.475.368,- Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 36.181.123.868,- dan Belanja modal sebesar Rp. 325.351.500,-. Pada tahun 2023 terdapat perubahan dalam APBD sehingga jumlah anggaran kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pun mengalami perubahan. Perubahan anggaran tersebut melalui mekanisme perubahan APBD 2023, dengan total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 113.575.445.756,- dengan rincian Belanja operasi menjadi Rp. 113.111.260.256,- Serta Belanja modal menjadi Rp. 464.185.500,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 112.303.015.855,- (98,88%) dengan rincian Belanja Operasi Rp. 112.010.690.703,- (99,03%), Belanja Modal sebesar Rp. 292.325.152,- (62,98%).

Pada Tahun 2025 dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian fisik dari 21 sub kegiatan di tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar 11,86% lebih rendah dari target sebesar 13,51%. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.609.870.588,00 dari total anggaran sebesar Rp. 44.711.873,00 (8,07%) dengan realisasi kinerja dengan Sub Kegiatan yang sudah mencapai target sebanyak 3 dari 21 Sub Kegiatan. Untuk Kegiatan yang sudah mencapai target sebanyak 1 dari 11 Kegiatan serta belum ada Target Kinerja Program yang sudah tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar” mendukung pencapaian sasaran tersebut. Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2023			2024			Target Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Capaian s/d 2024
			Target	Realiasi	Capaian %	Target	Realiasi	Capaian %		
	Tujuan Strategis									
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	Indeks Demokrasi	81	83.21	102.73%	81	85.13	105.10%	81	85.13
	Sasaran Strategis									
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	N/A	N/A	N/A	76.00	83.74	110.18%	78	83.74
2	Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa	Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan	N/A	N/A	N/A	76.00	82.94	109.13%	78	82.94
3	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat	Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat	N/A	N/A	N/A	76.00	83.90	110.39%	78	83.90
4	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.00	83.87	101.05	83.00	84.00	101.20%	84	84.00

1. Analisis Keberhasilan Capaian Tujuan Strategis :

Perlu diketahui bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 mengalami perubahan karena terdapat perubahan konsep demokrasi yang digunakan. Konsep yang digunakan pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 terbatas pada dimensi politik,

sedangkan pada tahun 2021 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat provinsi dan nasional, sementara Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 menghasilkan indeks tingkat Provinsi, Pusat, dan Nasional. Realisasi nilai IDI Tahun 2022 dapat dilihat Tabel 2.5 sebelumnya.

Tabel 2.11 Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek (Metode Baru)

Aspek Indeks Demokrasi (Metode Baru)	Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek (Metode Baru)		
	2023	2022	2021
Kesetaraan	65,28	85,35	84,02
Kesetaraan	115,75	113,90	77,25
Kapasitas Lembaga Demokrasi	84,28	72,63	63,92
Nilai Indeks Demokrasi	85,12	82,21	75,33

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2024

Target kinerja Indeks demokrasi yang sudah tercapai di tahun 2024 salah satunya diakibatkan oleh meningkatnya nilai dari ketiga aspek IDI. Peningkatan tertinggi yaitu pada nilai dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang hanya bernilai 63,92 poin pada IDI Tahun 2021 dan menjadi 84,28 poin pada IDI Tahun 2023. Peningkatan capaian Nilai IDI Tahun 2023 tidak terlepas dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik.

Pada Tahun 2024 sudah terlaksananya *Focus Group Discussion (FGD)* IDI untuk mendukung peningkatan dari capaian IDI di Tahun 2024. Serta telah dilaksanakannya pendidikan politik masyarakat khususnya pemilih

pemula yang menjadi pemilih pada Pemilu 2024, baik secara daring melalui sosial media dan pelaksanaan secara luring/konvensional dengan kehadiran peserta. Pelaksanaan pendidikan politik tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai politik yang tidak hanya terbatas pada saat masyarakat menggunakan hak pilihnya pada bilik suara. Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan terus melakukan kegiatan untuk mendukung capaian nilai IDI dengan berfokus kepada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang sebelumnya memberikan capaian nilai terendah pada IDI Komposit Provinsi Bali Tahun 2024. Pada Tahun 2025 sudah direncanakan berbagai program dan kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IDI di tahun 2023 tersebut.

2. Analisis Keberhasilan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dihitung dengan formula sebagai berikut :

- a. Pengukuran dilakukan dengan melakukan survei ke masyarakat di Provinsi Bali, dimana survei disebarkan melalui Google Form sehingga diperoleh hasil dari survei tersebut, dengan total responden yang merespon sebanyak 200 responden yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- b. Data yang digunakan adalah data Primer yang berbentuk skala likert dari rentang 1-5 (Kategori Sangat Kurang – Sangat Baik) yang mencerminkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang ada dalam survei.
- c. Perhitungan Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dilakukan dengan menentukan (Rincian perhitungan terlampir):
 - ☐ Jumlah skor per unsur atau komponen pertanyaan
 - ☐ Jumlah Responden

□ Jumlah Bobot per Variabel adalah $1/5$ (Jumlah Variabel) = 0,2 (Nilai Penimbang)

d. Variabel dan Indikator yang dinilai :

Tabel 2.12. Variabel dan Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Indikator		Pertanyaan Kuisisioner
Kode	Keterangan	
K1	Rasa Aman dan Nyaman Lingkungan Sekitar	Lingkungan sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) sudah tercipta rasa aman dan nyaman !
K2	Keterlibatan masyarakat	Masyarakat di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) ikut terlibat untuk menciptakan Rasa Aman dan Nyaman !
K3	Aktifitas Orang Asing di Sekitar	Aktifitas orang asing di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan !
K4	Lingkungan bebas konflik	Tidak terdapat konflik di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) !
K5	Upaya Pemerintah	Pemerintah (Pemerintah Desa/ Kabupaten/Provinsi/Pusat) sudah memiliki upaya untuk menciptakan kondisi keamanan dan kenyamanan di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) !

Tabel 2.13. Perhitungan Capaian Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2024

SNilai			836	856	809	833	853	
/Unsur								
NRR /			4.180	4.280	4.045	4.165	4.265	
Unsur								
NRR			0.836	0.856	0.809	0.833	0.853	*)
tertimbang/								4.187
unsur								**) 83.740
IKM Unit pelayanan								
Keterangan :			No.	UNSUR PELAYANAN				
- K1 s.d. K5			K1	Rasa Aman dan Nyaman Lingkungan Sekitar				
- NRR			K2	Keterlibatan masyarakat				
- IKM			K3	Aktifitas Orang Asing di Sekitar				
- *)			K4	Lingkungan bebas konflik				
-**)			K5	Upaya Pemerintah				
NRR Per Unsur								
NRR tertimbang per unsur								
SKOR INDEKS : 83.740								
Mutu Pelayanan :								
A (Sangat Baik)			: 88,31 – 100			83,740 BAIK		
B (Baik)			: 76,61 – 88,30					
C (Kurang Baik)			: 65,00 – 76,60					
D (Tidak Baik)			: 25,00 – 64,99					

Tabel 2.13 diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja ini sudah mencapai target yang ditetapkan dimana dengan target awal yang ditetapkan sebesar 76 dengan realisasi sebesar 83,14 (110,18%). Interpretasi yang dapat diberikan dari nilai indeks sebesar 83,14 tersebut adalah bahwa masyarakat di Provinsi Bali yang menjawab survey Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di tahun 2024 sebesar 83,14% menjawab bahwa di daerah tempat tinggalnya sudah terasa aman dan nyaman untuk beraktifitas.

Pemenuhan target pada sasaran Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial didukung oleh telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Adapun peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat adalah dengan menciptakan inovasi berupa Sistem Informasi Data Konflik (SIPELIK). SIPELIK ini pada tahun 2021 sudah berjalan dan sudah disosialisasikan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk dapat digunakan. Dalam pengoperasiannya SIPELIK ini mampu memberikan data mengenai potensi konflik yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sampai pada tingkat kecamatan. Sehingga dengan hadirnya SIPELIK ini pencapaian sasaran Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial sudah dapat direalisasikan sesuai target di tahun 2024.

Pencapaian kinerja adalah dukungan dari capaian kegiatan dari Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan pelaksanaan kegiatan yang menitik beratkan kepada kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal untuk melakukan pengamanan di Provinsi Bali. Pengamanan di Provinsi Bali yang dilaksanakan sesuai dengan Tim Kerja yang dibentuk seperti : 1) Tim Kewaspadaan Dini di Daerah, 2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, 3) Tim Pemantauan Orang Asing dan 4) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali. Pembentukan Tim Kerja tersebut dilakukan bersama Instansi

Vertikal dan Forkopimda yang terkait seperti : 1) Kodam IX Udayana, 2) Polda Bali, 3) Korem 163 Wira Satya, 4) Kejati Bali, 5) BINDA Bali, 6) Kanwil KumHam Bali, 7) Kanwil Kemenag Bali, 8) Lanal, 9) Lanud, 10) Bais TNI, 11) OPD Terkait.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Tahun 2024 juga telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mata dan telinga Kepala Daerah dengan menjalankan fungsi kewaspadaan dini. Fungsi kewaspadaan dini di tahun 2024 sudah berjalan dengan baik, sehingga informasi tersebut dapat diolah dan digunakan untuk mencegah adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang menyebabkan instabilitas keamanan di daerah. Fungsi kewaspadaan dini tersebut sangat penting untuk diteruskan dengan dukungan anggaran yang memadai, yang nantinya diharapkan dapat mengurangi potensi ATHG di daerah.

3. Analisis Keberhasilan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan Indikator Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat dihitung dengan formula sebagai berikut :

- a. Pengukuran dilakukan dengan melakukan survei ke masyarakat di Provinsi Bali, dimana survei disebarluaskan melalui Google Form sehingga diperoleh hasil dari survei tersebut, dengan total responden yang merespon sebanyak 200 responden yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- b. Data yang digunakan adalah data Primer yang berbentuk skala likert dari rentang 1-5 (Kategori Sangat Kurang – Sangat Baik) yang mencerminkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang ada dalam survei.
- c. Perhitungan Indeks dilakukan dengan menentukan (Rincian perhitungan terlampir) :
 - Jumlah skor per unsur atau komponen pertanyaan

□ Jumlah Responden

□ Jumlah Bobot per Variabel adalah $1/5$ (Jumlah Variabel) = 0,2 (Nilai Penimbang)

d. Variabel dan Indikator yang dinilai :

Tabel 2.14. Variabel dan Indikator Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator		Pertanyaan
Kode	Keterangan	
B1	Terjaminnya hak-hak politik di masyarakat	Tidak ada pembatasan terhadap kebebasan hak-hak politik (Contoh : Mengikuti kegiatan politik, menjadi anggota Partai Politik, menggunakan hak pilih, dll) di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) !
B2	Kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi dalam bidang politik	Jika ada Pemilihan Umum, Saya akan menggunakan hak pilih Saya dengan baik dan benar !
B3	Pemahaman Kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab dalam bidang politik	Saya bebas memilih Calon Presiden/Gubernur/Bupati/Anggota Legislatif pada saat Pemilihan Umum tanpa ada unsur pengaruh dari orang lain !
B4	Terjaminnya keamanan dan kenyamanan Situasi dan Kondisi politik di sekitar	Situasi dan kondisi politik di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) terjamin keamanannya !
B5	Kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik) ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah	Saya percaya Pemerintah (Pemerintah Desa/Kabupaten/Provinsi/Pusat) sudah memberikan pelayanan yang terbaik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu !

Tabel 2.15. Perhitungan Capaian Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat Tahun 2024

SNilai /Unsur			801	862	855	827	850	
NRR / Unsur			4.005	4.310	4.275	4.135	4.250	
NRR tertimbang/ unsur			0.801	0.862	0.855	0.827	0.850	*)
								4.195
								**) 83.900
IKM Unit pelayanan								83.900
Keterangan :			No.	UNSUR PELAYANAN				
- B1 s.d. B5	=	Unsur-Unsur Penilaian	K1	Terjaminnya hak-hak politik di masyarakat				
- NRR	=	Nilai rata-rata	K2	Kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi dalam bidang politik				
- IKM	=	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	K3	Pemahaman Kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab dalam bidang politik				
- *)	=	Jumlah NRR tertimbang	K4	Terjaminnya keamanan dan kenyamanan Situasi dan Kondisi politik di sekitar				
-**)	=	Jumlah NRR Tertimbang x 20	K5	Kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik)				
NRR Per Unsur	=	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi						
NRR tertimbang per unsur	=	NRR per unsur x 0,2						
SKOR INDEKS :								83.900
Mutu Pelayanan :								83,900 BAIK
A (Sangat Baik)	:	88,31 – 100						
B (Baik)	:	76,61 – 88,30						
C (Kurang Baik)	:	65,00 – 76,60						
D (Tidak Baik)	:	25,00 – 64,99						

politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik.

Pada Tahun 2024 sudah terlaksananya *Focus Group Discussion (FGD)* IDI untuk mendukung peningkatan dari capaian IDI di Tahun 2024. Serta telah dilaksanakannya pendidikan politik masyarakat khususnya pemilih pemula yang menjadi pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024, baik secara daring melalui sosial media dan pelaksanaan secara luring/konvensional dengan kehadiran peserta. Pelaksanaan pendidikan politik tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai politik yang tidak hanya terbatas pada saat masyarakat menggunakan hak pilihnya pada bilik suara.

Isu partisipasi masyarakat selalu aktual di dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Inilah salah satu isu penting yang sulit untuk ditinggalkan dalam berbagai pembicaraan tentang pemilu. Aspek partisipasi masyarakat menentukan suatu proses dan hasil pemilu. Lewat peran serta mereka, masyarakat turut pula berkontribusi bagi legitimasi terhadap segenap tahapan pemilu. Tidaklah mungkin untuk mengupayakan suatu pemilu yang bebas dan adil tanpa partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan hal mendasar dalam politik yang mana tanpanya demokrasi akan kehilangan spirit yang menyokong keberlangsungannya. Tanpa ruang partisipasi, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politik mereka. Padahal pilihan politik masyarakat berhubungan dengan upaya memengaruhi proses pengambilan keputusan menyangkut berbagai urusan bersama termasuk pengisian posisi-posisi yang diperebutkan melalui pemilu.

Pada dasarnya, partisipasi politik adalah tentang bagaimana warga negara memengaruhi secara langsung atau tidak langsung proses politik melalui tindakan-tindakan mereka. Partisipasi politik diletakkan sebagai bagian hak fundamental yang memungkinkan warga negara untuk memperjuangkan apa yang mereka pandang bernilai. Partisipasi politik juga didorong motif tertentu berkaitan kepentingan-kepentingan warga negara

memberi dukungan terhadap semua yang menguntungkan, dan sebaliknya, menolak segala yang dipandang merugikan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling penting adalah partisipasi dalam pemilu. Partisipasi dalam pemilu merupakan bagian dari hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu juga menjadi bagian dari hak warga negara mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945. Sebagai bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi, penyediaan ruang partisipasi dalam setiap tahapan pemilu tak terhindarkan. Bahkan, sesuai mandat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, hak tersebut juga mesti dimajukan melalui proses legislasi maupun pelaksanaan agenda pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemilu.

Berbagai kegiatan di Tahun 2024 sudah dilakukan untuk menunjang tugas dan fungsi dalam pembinaan politik dalam negeri untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Serentak tahun 2024. Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pemilu sebesar 83,82% capaian ini berbanding terbalik dengan capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada 2024 sebesar 71,92%. Sehingga kedepannya perlu dilakukan kegiatan pendidikan politik yang lebih massif lagi baik dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Instansi Terkait serta partai politik. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak kepada peningkatan wawasan masyarakat dalam hal politik serta pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 5 tahun kedepan.

4. Analisis Keberhasilan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa dengan Indikator Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan

Indikator Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan dihitung dengan formula sebagai berikut :

- a. Pengukuran dilakukan dengan melakukan survei ke masyarakat di Provinsi Bali, dimana survei disebarakan melalui *Google Form* sehingga diperoleh hasil dari survei tersebut, dengan total responden yang merespon sebanyak 200 responden yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- b. Data yang digunakan adalah data Primer yang berbentuk skala likert dari rentang 1-5 (Katagori Sangat Kurang – Sangat Baik) yang mencerminkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang ada dalam survei.
- c. Perhitungan Indeks dilakukan dengan menentukan (Rincian perhitungan terlampir) :
 - ☐ Jumlah skor per unsur atau komponen pertanyaan
 - ☐ Jumlah Responden
 - ☐ Jumlah Bobot per Variabel adalah $1/5$ (Jumlah Variabel) = 0,2 (Nilai Penimbang)
- d. Variabel dan Indikator yang dinilai :

Tabel 2.17. Variabel dan Indikator Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan

Indikator		Pertanyaan
Kode	Keterangan	
B1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	Tidak ada pembatasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara (Pemerintah Desa/Kabupaten/Provinsi/Pusat) di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) !
B2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	Tidak ada pembatasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) !

B3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Saya merasa bebas beribadah di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) meskipun memeluk keyakinan agama yang berbeda dengan mayoritas di lingkungan Saya tinggal (Banjar/Desa) !
B4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Setiap kebijakan Pemerintah (Pemerintah Desa/Kabupaten/Provinsi/Pusat) menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan di sekitar tempat tinggal Saya (Banjar/Desa) !
B5	Upaya pemerintah dalam menjaga kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan	Pemerintah (Pemerintah Desa/Kabupaten/Provinsi/Pusat) sudah memiliki upaya untuk menjaga kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan !

Tabel 2.18. Perhitungan Capaian Indeks Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan Tahun 2024

SNilai /Unsur			804	805	862	838	838	
NRR / Unsur			4.020	4.025	4.310	4.190	4.190	
NRR tertimbang/ unsur			0.804	0.805	0.862	0.838	0.838	*)
								4.147
								**) 82.940
IKM Unit pelayanan								
Keterangan :			No.	UNSUR PELAYANAN				
- B1 s.d. B5	=	Unsur-Unsur Penilaian	K1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara				
- NRR	=	Nilai rata-rata	K2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat				
- IKM	=	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	K3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan				
- *)	=	Jumlah NRR tertimbang	K4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan				
-**)	=	Jumlah NRR Tertimbang x 20	K5	Upaya pemerintah dalam menjaga kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan				
NRR Per Unsur	=	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi						
NRR tertimbang per unsur	=	NRR per unsur x 0,2						
SKOR INDEKS : 82.940								
Mutu Pelayanan :				82,940 BAIK				
A (Sangat Baik)	:	88,31 – 100						
B (Baik)	:	76,61 – 88,30						
C (Kurang Baik)	:	65,00 – 76,60						
D (Tidak Baik)	:	25,00 – 64,99						

Tabel 2.18 diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja ini sudah mencapai target yang ditetapkan dimana dengan target awal yang ditetapkan sebesar 76 dengan realisasi sebesar 82,940 (109,13%). Interpretasi yang dapat diberikan dari nilai indeks sebesar 83,90 tersebut adalah bahwa masyarakat di Provinsi Bali yang menjawab survey Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan di tahun 2024 sebesar 83,90% menjawab bahwa masyarakat sudah terjamin dalam hal Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan di wilayah tempat tinggalnya masing-masing.

Tabel 2.19. Capaian Aspek Kebebasan IDI Tahun 2023 Provinsi Bali

Aspek/ Aspect	Indikator/Indicator	2021	2022	2023
Kebebasan Freedom	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara Guaranteed freedom of assembly, association, expression, and opinion by state officials	93.95	93.9763	100
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat Guaranteed freedom of assembly, association, expression, and opinion among communities	84.89	69.8816	70.1722
	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan / Guaranteed freedom of belief	89.92	100	80.1148
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan Guaranteed freedom of assembly, association, expression, opinion, and belief in every policy	90	90	100
	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat Guaranteed right to vote and be elected in elections	99.24	99.237	99.237
	Pemenuhan hak-hak pekerja / Fulfillment of workers' rights	50.8	56.8331	56.5667
	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya A free press in carrying out its duties and functions	75.72	79.78	82.58
Skor Indeks Demokrasi / Democracy Index Score:		75.35	83.21	85.1269

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2024

Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa sangat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalankan beberapa kebijakan strategis pada Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa yaitu Pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno, Peringatan hari lahir Pancasila, Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental, Pelaksanaan Hari

Bela Negara. Pelaksanaan kegiatan tersebut sangat kompleks dilaksanakan untuk dapat meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dengan bentuk kegiatan yang berupa sosialisasi, bimtek dan forum tatap muka.

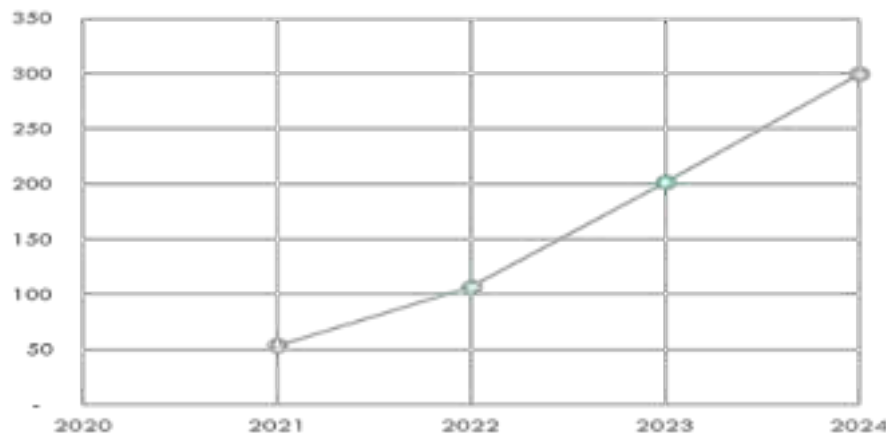
Selain kegiatan tersebut kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat juga sudah dilakukan dengan baik melalui pertemuan-pertemuan yang bersifat konvensional dan juga didukung oleh platform sosial media untuk menyebarluaskan pemahaman masyarakat mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui Youtube, Instagram, Facebook dan juga Tiktok yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa juga didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yaitu telah dilakukan koordinasi dan dukungan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali melalui pemberian hibah. Hibah kepada FKUB tersebut diharapkan dapat memfasilitasi FKUB untuk meningkatkan kerukunan umat beragama di Provinsi Bali. Selain itu telah dilaksanakan sinergi dan koordinasi terkait Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bersama dengan instansi terkait.

Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa juga didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang tercatat di Provinsi Bali. Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakatan. Hal tersebut menandakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali turut serta menjaga Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa, hal tersebut dapat dilihat bahwa

setiap tahunnya jumlah ormas yang tercatat bertambah banyak dari tahun 2021-2024

Gambar 2.3. Jumlah Ormas Tercatat di Provinsi Bali Tahun 2021-2024



Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Bali, 2024

5. Analisis Keberhasilan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dengan Indikator Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Sasaran Strategis, Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dengan *outcome* Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja yang didapatkan melalui **Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Bali, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023** memperoleh nilai sebesar **84** dengan kategori “**(A) – MEMUASKAN**”. Hasil penilaian atas masing-masing aspek dan komponen akuntabilitas kinerja secara rinci disajikan dalam Lampiran Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.20. Rincian Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.42	24.94
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23.06	25.28
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.64	12.72
4	Evaluasi Internal	25.00	21.75	21.06
Nilai Evaluasi Kinerja		100.00	83.87	84.00
Predikat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali perlu melakukan pembenahan terhadap poin-poin yang menjadi hasil evaluasi SAKIP tersebut, sehingga penerapan SAKIP kedepannya dapat lebih baik lagi.

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Melihat dari pengertian tersebut, dalam hal ini berarti semakin sedikit sumber daya atau dana yang digunakan dalam suatu usaha atau proses, maka akan dikatakan semakin efisien. Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan usaha atau pekerjaan, dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan, seperti tenaga, waktu, dan biaya, tapi tetap dapat menghasilkan *output* sesuai dengan rencana atau harapan, maka akan dinilai semakin efisien. Kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran

dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

Tabel 2.21. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja Tahun 2024			Anggaran Tahun 2024			Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Katagori
			Target	Realiasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %			
1	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	76.00	83.74	110.18%	2,351,818,520	2,061,106,005	87.64%	0.20	101.15%	Sangat Efisien
2	Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa	Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan	76.00	82.94	109.13%	5,092,318,680	4,327,596,514	84.98%	0.22	105.32%	Sangat Efisien
3	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat	Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat	76.00	83.90	110.39%	180,789,855,052	180,450,445,116	99.81%	0.10	73.97%	Cukup Efisien
4	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.00	84.00	101.20%	11,053,190,607	9,902,559,111	89.59%	0.11	78.69%	Cukup Efisien
TOTAL						199,287,182,859	196,741,706,746	98.72%			

Tentunya dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sudah mencoba melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada terutama dalam penggunaan anggaran yang ada, hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 3.3. bahwa terdapat 2 program dalam penggunaan anggaran yang dapat dikategorikan sangat efisien dan 2 program yang dalam penggunaan anggarannya dapat dikategorikan cukup efisien.

Efisiensi penggunaan anggaran tidak hanya dapat dilihat dari perhitungan pada Tabel 3.16 namun juga dapat dilihat dari bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kinerja. Pada tahun 2024 sendiri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam menggunakan anggaran sudah berfokus kepada kinerja yang dapat meningkatkan capaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selain

itu juga sudah dilaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah program yang dilaksanakan 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dimana semuanya sudah mendukung dari pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024 tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) dalam menunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai sebesar 83. Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan nilai 84 (101,20%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen penyusunan, perencanaan dan evaluasi perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 8 dokumen, dengan realisasi kinerja sebesar 8 dokumen (100%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen dengan realisasi kinerja 4 dokumen (100%).

- 2) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 4 dokumen dengan realisasi kinerja 4 dokumen (100%).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sebesar 100 %, dengan realisasi kinerja sebesar 100 %.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah 44 orang dengan realisasi kinerja 44 orang (100%).

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 1 Paket dan realisasi kinerja 1 Paket selama 1 tahun (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 5 Paket dan realisasi kinerja 5 Paket selama 1 tahun (100%).

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 3 Paket dan realisasi kinerja 3 Paket selama 1 tahun (100%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target sebanyak 3 Paket dan realisasi kinerja 3 Paket selama 1 tahun (100%).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, dengan target sebanyak 2 Dokumen dan realisasi kinerja 2 Dokumen selama 1 tahun (100%).
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target sebanyak 12 Laporan dan realisasi kinerja 12 Laporan selama 1 tahun (100%).

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase paket pengadaan selesai dengan target kinerja sebesar 100%, dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan jumlah 10 Unit dengan realisasi kinerja 10 Unit (100%).

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi dengan target kinerja sebesar 100%, dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja sebanyak 1 Laporan dan realisasi kinerja 1 Laporan (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan realisasi kinerja 12 Laporan (100%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan realisasi kinerja 12 Laporan (100%).

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah terpelihara dengan target kinerja sebesar 100%, dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dengan target sebesar 8 Unit dan realisasi kinerja sebanyak 8 Unit (100%).

- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan target kinerja Jumlah Mebel yang Dipelihara dengan target sebanyak 150 Unit dan realisasi kinerja sebanyak 150 Unit (100%)
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target sebanyak 36 Unit dan realisasi kinerja sebanyak 36 Unit (100%).
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan target sebanyak 1 Unit dan realisasi kinerja sebanyak 1 Unit (100%).
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target sebanyak 9 Unit dan realisasi kinerja sebanyak 9 Unit (100%).

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Indikator kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah persentase meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan target sebesar 90%. Realisasi capaian kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebesar 90% (100%). Sub kegiatan dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target kinerja sebesar 100% dan ealisasi kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan target kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan target 500 orang dan realisasi kinerja 500 orang (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka, dengan target kinerja Jumlah Paskibraka dengan target 36 orang dan realisasi kinerja 72 orang (200%)
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik. Indikator kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Adalah Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik dengan target sebesar 80 %. Realisasi capaian kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 83% (104%).

Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan target kinerja sebesar 100% dealisasi kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan target kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan target 100 Orang dan realisasi kinerja 100 Orang (100%).

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya bertujuan untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk menurunkan ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah dengan target sebesar 80 %. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100 % (125%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan target kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target 100 Orang dan realisasi kinerja 100 Orang (100%).

5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan dan pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang tercatat di Daerah. Indikator kinerja Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah Persentase Ormas yang terdata dengan target sebesar 80 %. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 100% (125%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan target kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan target 100 Orang dan realisasi kinerja 100 Orang (100%).

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial bertujuan untuk meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial untuk sehingga keamanan tetap terjaga serta pemetaan konflik sosial dapat dilaksanakan. Indikator kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial dengan target sebesar 90% dengan realisasi sebesar 90% (100%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan bertujuan untuk merumuskan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan target sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan target 40 Orang dan realisasi kinerja 40 Orang (100%).

- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan target 12 Dokumen dan realisasi kinerja 12 Dokumen (100%).

Pada Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 masih terdapat beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut :

- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu :
 1. Masih kurangnya pemahaman ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengenai penerapan SAKIP yang baik, sehingga dapat mendukung tujuan organisasi.
 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas.
 3. Kurang optimalnya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas akibat keterbatasan anggaran yang ada.
 4. Belum meratanya pemahaman ASN terkait peraturan tentang keuangan dan penyusunan SPJ.
 5. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tidak dapat mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana di Perangkat Daerah.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi penerapan SAKIP yang baik ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
2. Melakukan pengajuan kepada BKPSDM Provinsi Bali guna dapat mengisi pos jabatan yang kosong.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.
4. Perlu dilakukan sosialisasi lebih masif lagi kepada semua pegawai terkait peraturan keuangan dan pembuatan SPJ.
5. Penyusunan dan penetapan RKBMD dilaksanakan melalui rapat bersama.

□ Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa.
2. Masih minimnya pembinaan nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan penolakan terhadap Pancasila.
3. Belum optimalnya dalam penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, revolusi mental.
4. Pengukuran pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
5. Masih minimnya pembinaan nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan penolakan terhadap Pancasila.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk kegiatan Bulan Bung Karno untuk secara tidak langsung melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
2. Melaksanakan bimbingan teknis berupa seminar wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparatur pemerintah yang dilakukan dalam rangkaian penyelenggaraan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan serentak juga pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

□ Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah :

1. Kurangnya informasi perkembangan politik di daerah.
2. Terbatasnya pendidikan politik di masyarakat.
3. Pengukuran pemahaman masyarakat terhadap politik, belum dapat dilaksanakan secara maksimal

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Dukungan anggaran untuk pemantauan dan perkembangan politik di daerah.
 2. Dukungan anggaran pendidikan politik masyarakat.
 3. Melaksanakan Pendidikan politik berkolaborasi dengan Stakeholder terkait.
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
1. Sinergi dalam pencegahan P4GN masih belum maksimal dilakukan di daerah
 2. Pengukuran pemahaman masyarakat terhadap kerukunan beragama, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan pencatatan keberadaanya dalam registrasi dan database di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.

- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yaitu :
1. Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan pencatatan keberadaanya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
 2. Pengukuran terhadap partisipasi Ormas dalam Pemerintahan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan pencatatan keberadaanya dalam registrasi dan database di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.

2. Membuat wadah kegiatan bagi ormas untuk dapat turut serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yaitu :
1. Urgensi peningkatan kewaspadaan daerah yang dapat mengganggu stabilitas nasional terutama pasca pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pilkada Tahun 2024.
 2. Masih adanya konflik sosial yang belum selesai di Tahun 2024.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
2. Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.
3. Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
4. Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dihadapkan kepada beberapa tantangan dan peluang, dimana tantangan dan peluang itu tetap ada dari tahun ke tahun sehingga tetap membutuhkan strategi dan kebijakan untuk meminimalkannya.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang memadai dan handal di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.
5. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan,

serta evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal yaitu :

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
3. Beberapa alasan Bali menjadi Target Serangan Teroris adalah :
 - a. Bali merupakan daerah tujuan pariwisata yang terkenal di dunia.
 - b. Banyaknya wisatawan orang asing yaitu dari Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Italia dan lainnya yang berada di Bali.
 - c. Apabila serangan teroris terjadi di Bali, hal ini dengan cepat berdampak global karena dengan mudah di akses melalui media internasional
 - d. Sehubungan dengan ketiga hal tersebut di atas memenuhi salah satu karakter terorisme yaitu publikasi dengan cepat ke seluruh dunia.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak lingkungan, sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Sebagai perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki peranan dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Selain situasi dan kondisi umum, di daerah Bali juga terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor yang berpotensi menghambat yang sudah dijelaskan dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah. Sekalipun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya yang sudah dijelaskan dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, selanjutnya diangkat beberapa isu-isu strategis antara lain:

- 1) Radikalisme dan terorisme masih berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Bali;
- 2) Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat dan belum optimalnya pemahaman nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 3) Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara;
- 4) Belum maksimalnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang *multi culture* secara nasional dan akhirnya berimbas ke daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal
- Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
- Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi
- Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi

Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2025, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut:

“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas pokok dan fungsinya mengampu PRIORITAS 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali



Gambar 2.4.

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

Berdasarkan Gambar 5.6 yang menggambarkan Prioritas Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali akan dilaksanakan melalui Program Prioritas sebagai berikut:

1. Bali Samasta Digital, melalui kegiatan: (1) Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir; (2) Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet;

- (3) Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari; (4) Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari; (5) Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali.
2. Memperkuat penyelenggaraan Keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat, dengan arah kebijakan: (1) Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali; (2) Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian; (3) Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat; (4) Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan; dan (5) Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali.

Tabel 2.22
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN
Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali	Sasaran 1 : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional
	Sasaran 2 : Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat
Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Sasaran 3 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

TUJUAN	SASARAN
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pelindungan Tenaga Kerja Krama Bali
	Sasaran 5 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
	Sasaran 6 : Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional dan Internasional
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali
Tujuan 3 : Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali.	Sasaran 1 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali
	Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah
	Sasaran 4 : Terbentuknya Pusat-Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa-deso Setiap Kabupaten/Kota di Bali.
	Sasaran 5 : Meningkatnya Peran UMKM dan Koperasi sebagai Penggerak Utama Perekonomian Bali
	Sasaran 6 : Meningkatnya Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standarisasi, Sertifikasi, serta

TUJUAN	SASARAN
	Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional.
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepariwisata
Tujuan 4 : Meningkatnya Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali	Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien
Tujuan 5 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Sasaran 1 : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan Ramah Lingkungan
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum
Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
	Sasaran 2 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan
	Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan
	Sasaran 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan
Tujuan 7 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu

TUJUAN	SASARAN
Tujuan 8 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN
	Sasaran 2 : Meningkatnya Manajemen Sektor Publik
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum
	Sasaran 6 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi
	Sasaran 7 : Optimalnya Kemandirian Fiskal Bali

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sudah dijabarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengampu Tujuan 7 yaitu “Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim” dan **Sasaran 2 : Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat.**

2.5 Penelahaan Usulan Masyarakat

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025 tidak bisa terlepas dari masukan-masukan dari masyarakat. Pada Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025 masukan masyarakat akan diserap melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2024, dengan masukan dan saran dari stakeholder dan masyarakat sebagai berikut :

1. Masukan dan saran dari Bapak Ketua KPU Provinsi Bali, dengan poin-poin sebagai berikut :
 - 1) Pada Pelaksanaan Pemilu perlu dilakukan seleksi yang ketat khususnya untuk petugas KPPS yang wajib bisa baca dan tulis agar menghindari kesalahan dalam penulisan saat melakukan rekapitulasi suara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali diharapkan dapat membantu juga menjaga realitas Pemilu kedepannya.
 - 2) Mohon dapat dipertimbangkan bantuan untuk renovasi Gedung KPU Provinsi Bali karena sudah terdapat kerusakan di beberapa titik seperti kebocoran gedung saat musim hujan.
 - 3) Kedepan agar terus dilakukan sinergi untuk melaksanakan pembinaan partai politik agar tidak ada kasus Korupsi yang menjerat, sehingga perlu dukungan dana pembinaan yang cukup besar. Selain itu perlu dilakukan sidak beberapa kali agar tidak ada penyalahgunaan anggaran dari Partai Politik tersebut.
 - 4) Sosialisasi pelaksanaan Pemilu sangat penting dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan instansi terkait, sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.
2. Masukan dan saran dari Perwakilan Bawaslu Provinsi Bali, dengan poin-poin sebagai berikut :
 - 1) Bawaslu diwajibkan untuk mengawasi kinerja KPU. Saat ini kondisi sosial media yang terbuka, *cyber crime* pasti kewalahan. Kita perlu pakai

intuisi, kami sampai mempunyai tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu awasi pemilu.

- 2) Setelah sekian lama dengan berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, laporan demi laporan mengedepankan sisi pencegahan, tidak hanya penindakan. Namun masyarakat ekspektasinya yang berlebihan, jangankan masyarakat luar, KPPS saja masih salah dalam pelaksanaan tugasnya, apalagi masyarakat awam dengan pemilu.
- 3) Sampai saat ini kondisi masih kondusif, koordinasi dengan KPU mempunyai semangat menciptakan situasi kondusif. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang makan korban, di Bawaslu sendiri ada meninggal dunia. Proses ini harus diperbaiki, dari pemilu-ke pemilu.
- 4) Harus dikawal betul pergerakan suara, rekapitulasi sampai pagi, bahkan ada yang kecelakaan, keguguran, hernia karena mengangkat baliho.
- 5) Perlu mengedepankan kolaborasi, biasanya kalo berjamaah akan lebih baik. Kolaborasi saya tawarkan, untuk bisa kalau 2025 saya usulkan, kita sampaikan proyeksi yang fenomenal. Ini sebuah kajian akademis, sebuah kolaborasi pembentukan sebuah museum. Bangun museum sebagai perwujudan demokrasi.
- 6) Bawaslu sampai 2013 sampai sebagai GNEG selalu mengambil tempat di Bali, jadi forum-forum internasional kita arahkan tidak rapat di hotel, tetapi kita sandingkan dengan museum yang ada. Kita coba demokrasi kita jadikan objek yang menarik. Jika itu itu kita bisa kolaborasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mungkin ini akan menjadi ikonik. Manfaatkan situasi ini, agar perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi renja yang strategis.
- 7) Untuk koordinasi saya kira sudah baik walaupun dalam keterbatasan, apapun hasilnya adalah kita eksekutif pengejawantahan apapun harus dieksekusi.

3. Masukan dan saran dari Perwakilan Polda Bali , dengan poin-poin sebagai berikut :

- 1) *Flasback* pemilu ada laporan yang masuk formal dan materiil yang lengkap oleh Bawaslu bisa diatasi sehingga berjalan dengan lancar. Salah satunya permasalahan *database* di Kabupaten Buleleng kami langsung turun ke lapangan.
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali merupakan mata dan telinga dari Pemerintah Provinsi Bali.
 - 3) Perlu dilakukan pengawasan terhadap rekapitulasi statemen yang akan berpengaruh pada persepsi publik, dan berpengaruh pada media.
 - 4) Persepsi kita klasifikasikan yang mana akan mempengaruhi kestabilan politik, kegaduhan politik, yang jelas akan berpengaruh kebijakan pada tahun 2025
 - 5) Perantau di Bali saat ini tidak sungkan-sungkan ribut, mungkin itu masukan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kegiatan Deteksi Dini kedepannya.
 - 6) Perlu dilakukan sinergi antar semua pihak yang intinya, agar menjaga ketertiban untuk setiap lokasi ketika pemilu, jaga ketertiban antar suku.
 - 7) Orang asing meningkat di bali (fenomena bule banyak tingkah), sehingga perlu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui pemantauan orang asing sehingga tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.
6. Masukan dan saran dari Perwakilan Korem 163/Wira Satya, dengan poin-poin sebagai berikut :
- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali harus mampu mengkoordinis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota. Sehingga perlu dibentuk menyarankan *comment centre* yang terpusat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana bisa berkomunikasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di daerah. Sehingga bisa di monitor kegiatan yang ada di daerah.
8. Masukan dan saran dari Perwakilan FKPT Provinsi Bali, dengan poin-poin sebagai berikut :

- 1) Kesiapsiagaan Nasional perlu mendapat perhatian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
 - 2) Kolaborasi pencegahan terorisme perlu dilakukan bersama masyarakat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
 - 3) FKPT merupakan mitra kerja dari BNPT, sehingga perlu dilakukan sinergi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Terutama dalam melaksanakan pembinaan kepada generasi muda.
 - 4) Perlu dibentuk duta damai dunia maya untuk mencegah pendiskreditan pemerintah.
 - 5) Harapan agar FKPT dan forum-forum lainnya dapat difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali kedepannya.
11. Masukan dan saran dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, dengan poin-poin sebagai berikut :
- 1) AL yang melaksanakan kegiatan di Provinsi Bali nama kegiatannya 5th Multilateral Naval Exercise yang melibatkan 3 Kab (Badung, Denpasar dan Karangasem). Mohon dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut serta mohon pengkondisian kegiatan di daerah agar dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut.
12. Masukan dan saran dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, dengan poin-poin sebagai berikut :
- 1) Usulan Diklat Intelijen yang dikoordinir oleh Kesbangpol Provinsi. Dimana peserta diklat tersebut adalah dari Kesbangpol Kab/kota se Bali. Nanti di diklat tersebut agar dijelaskan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam intelijen, sehingga tidak *copy paste* saja sistem intelijennya di Lapangan.
13. Perwakilan Bappeda Provinsi Bali, dengan poin-poin sebagai berikut :
- 1) Kesbangpol bali bisa memetakan apa saran dan masukan tadi, terkait dengan FKP, mungkin setelah ini dilaksanakan musrenbang.

- 2) Paparan renja 2025 terkait apa yang menjadi isu masalah strategis, agar kedepannya bisa dicarikan solusi untuk pemecahan permasalahan dimana nantinya bisa dituangkan dalam program rancangan.
- 3) Untuk anggraan memang sudah mengacu pada prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 4) Program yang telah dilaksanakan tentunya ada pemantuan .
- 5) Pagunya saya kira ini baru dipermukaan kalau lihat lebih dalam disanalah ada rincian lebih lanjut.
- 6) FKD harus ada berita acara, dokumen disampaikan ke Bappeda untuk di verifikasi, nanti komunikasikan kalau ada yang kurang jelas.

12. Perwakilan BINDA Bali, dengan poin-poin sebagai berikut :

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai mata dan telinga Gubernur serta menjaga wibawa Pemerintah Daerah.
- 2) Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan tupoksinya.
- 3) Agar dapat merencanakan program sesuai dengan urgensi yang ada.
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali harus bisa merangkul semua masyarakat di Provinsi Bali dengan sinergi aparat terkait untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali disusun dengan berpedoman pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Begitupula Dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2025 adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2025-2029. Adapun Prioritas Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia.
2. Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.

5. Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Tahun 2026 turut serta mendukung dari pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pada Prioritas Nasional 1, 7 dan 8.

3.2 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kedepan. Yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali disusun berpedoman pada RPD Provinsi Bali dan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah, melaksanakan Misi Kepala Daerah,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis pada hakekatnya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Bali saat ini serta untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih yaitu :

"Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru",

Serta Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yaitu :

1) Misi ke 21 : Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.

Bidang Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

maka tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah:

"Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis"

Dengan Indikator Tujuan adalah:

"Indeks Demokrasi Indonesia"

3.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran hakekatnya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi. Untuk mendukung terwujudnya Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menetapkan 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Sasaran strategis 1 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran **"Indeks Kewaspadaan Nasional"**

2. Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran strategis 2 tersebut diukur dengan indikator sasaran **“Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan”**

3. Meningkatnya wawasan pendidikan politik masyarakat

Sasaran Strategis 3 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran **“Indeks Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat”**

4. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Sasaran Strategis 4 tersebut di atas merupakan sasaran pendukung yang dengan indikator sasaran **“Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja”**.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, pada Tahun 2025 dalam Renja Perubahan dilakukan penyesuaian Bahasa sasaran strategis ke 1 dan 3 di atas. Penyesuaian dilakukan untuk memberikan gambaran *Outcome* yang lebih jelas dan berdampak dari Sasaran Strategis tersebut.

Tabel 3.1
Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja		
							2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia					81	84	85
			1) Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional			76	84	84
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	90%	95%	100%
			2) Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa	Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan			76	83	84
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan	80%	85%	90%

						Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah			
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	80%	85%	90%
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90%	92%	94%
			3) Meningkatnya Wawasan pendidikan politik masyarakat	Indeks pemahaman pendidikan politik masyarakat			76	84	84
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	80%	85%	90%

			4) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	84	84

Catatan :

- Beberapa target kinerja di Tahun 2025 dan 2026 disesuaikan dari target pada Renstra Tahun 2024-2026, berdasarkan realisasi di Tahun 2024, serta mengacu kepada hasil evaluasi Kinerja yang dituangkan pada LKJiP Tahun 2024.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk dapat meningkatkan capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai Indikator Kinerja, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengusulkan 6 program beserta kegiatannya melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Tentunya pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan ditentukan oleh tercapainya tujuan dan sasaran setiap tahunnya. Begitupula untuk Tahun 2025 akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut sebagai berikut :

- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan Pemantauan Deteksi Dini Cegah Dini Ancaman Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) kondisi daerah setiap hari.
 - b. Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di daerah Provinsi Bali.
 - c. Pemantauan Orang Asing.
 - d. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Bali
- Bidang Politik Dalam Negeri dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat.
 - b. Pencairan Bantuan Partai Politik.
 - c. FGD Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali.
 - d. Pemantauan Situasi dan Kondisi Politik Daerah.
 - e. Pemantauan Situasi Politik Pasca Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Bulan Bung Karno.

- b. Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (Revolusi Mental).
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Hari-Hari Besar (Lahirnya Pancasila, Hari Pahlawan, dan Hari Bela Negara)
 - d. Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan.
 - e. Pembentukan Paskibraka.
- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Laporan Fasilitasi Kegiatan FKUB Provinsi Bali.
 - b. Pelaksanaan P4GN di Provinsi Bali
 - c. Fasilitasi Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Bali.
 - d. Hibah Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Pelaksanaan Pemantauan, Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Bali.

Tentunya untuk melaksanakan kegiatan yang sangat strategis tersebut dibutuhkan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 telah dilakukan Pemetaan/*Mapping* terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 untuk Klasifikasi dan kodefikasi Kesatuan Bangsa Dan Politik masuk dalam urusan pemerintahan umum dengan kode 8.01. dan untuk Pemetaan/*Mapping* Program dan Kegiatan sampai sub kegiatan yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tertuang pada Tabel terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025 yang berpedoman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, maka dapat dijadikan acuan bagi seluruh Unit Kerja/Bidang yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan 1 (satu) tahun ke depan. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Dalam Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2025 memuat rencana kebijakan serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang merupakan penjabaran tahunan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di tahun 2025;
- 2) Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, dan dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
- 3) Dalam mendukung penyiapan APBD Pemerintah Provinsi Bali, keberadaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali diintegrasikan dengan Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali (RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali).

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00						58.005.137.412,00			
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				83.5 Nilai	83.5 Nilai	12.394.216.428,00	13.595.343.451,00	13.568.348.027,00	424.738.304,00							12.818.954.732,00		
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	104.930.400,00	131.164.000,00	80.596.000,00	-24.334.400,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		88.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	74.940.800,00	93.164.000,00	57.956.000,00	-16.984.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			49.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	29.989.600,00	38.000.000,00	22.640.000,00	-7.349.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			38.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan				100 %	100 %	9.313.377.684,00	10.015.015.243,00	10.015.015.243,00	701.637.559,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		9.546.212.126,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan	9.313.377.684,00	10.015.015.243,00	10.015.015.243,00	701.637.559,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.546.212.126,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				6 Laporan	6 Laporan	670.697.724,00	775.903.824,00	601.359.824,00	-69.337.900,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		694.517.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.371.000,00	0,00	0,00	-12.371.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	14.921.500,00	14.921.500,00	14.921.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			38.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	NON URUSAN							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00		
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00		
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	138.647.600,00	0,00	0,00	-138.647.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00		
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	240.117.300,00	240.117.300,00	240.117.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			138.647.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	77.229.424,00	0,00	0,00	-77.229.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	77.229.424,00	77.229.424,00	77.229.424,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.613.600,00	0,00	0,00	-34.613.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	35.880.500,00	35.880.500,00	35.880.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.613.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.996.100,00	0,00	0,00	-4.996.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	12 Dokumen	0,00	4.996.100,00	4.996.100,00	4.996.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.996.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	402.840.000,00	0,00	0,00	-402.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	402.759.000,00	228.215.000,00	228.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			402.760.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	233.807.640,00	606.324.240,00	711.824.240,00	478.016.600,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		207.312.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	74.884.900,00	189.401.500,00	294.901.500,00	220.016.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	158.922.740,00	416.922.740,00	416.922.740,00	258.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			207.312.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	1.082.591.180,00	1.058.014.344,00	1.144.530.920,00	61.939.740,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		1.312.225.736,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.994.800,00	11.994.800,00	11.994.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	139.100.000,00	9.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			247.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	940.596.380,00	916.019.544,00	993.436.120,00	52.839.740,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.042.225.736,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	NON URUSAN							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00	
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah terpelihara				5 Laporan	5 Laporan	988.811.800,00	1.008.921.800,00	1.015.021.800,00	26.210.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		970.687.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 unit Unit	23 unit Unit	772.100.000,00	0,00	0,00	-772.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00							58.005.137.412,00		
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				-	23 unit Unit	0,00	790.100.000,00	790.100.000,00	790.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			749.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	17.850.000,00	19.960.000,00	19.960.000,00	2.110.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			31.024.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	181.981.800,00	181.981.800,00	181.981.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			173.030.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	16.880.000,00	16.880.000,00	22.980.000,00	6.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.532.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila				92 %	92 %	4.382.046.020,00	4.732.046.394,00	4.687.872.394,00	5.339.765.500,00							9.721.811.520,00		
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	4.382.046.020,00	4.732.046.394,00	4.687.872.394,00	305.826.374,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		9.721.811.520,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	846.846.320,00	1.196.846.794,00	1.239.752.794,00	392.906.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.669.323.645,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																			
			Jumlah Paskibraka				72 Orang	72 Orang	3.535.199.700,00	3.535.199.600,00	3.448.119.600,00	-87.080.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.052.487.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik				85 %	85 %	24.272.226.420,00	24.374.767.294,00	24.195.610.794,00	4.168.675.810,00							28.440.902.230,00		
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1200 Orang	1200 Orang	24.272.226.420,00	24.374.767.294,00	24.195.610.794,00	-76.615.626,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		28.440.902.230,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1200 Orang	1200 Orang	24.272.226.420,00	24.374.767.294,00	24.195.610.794,00	-76.615.626,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			28.440.902.230,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata				85 %	85 %	246.649.900,00	681.089.000,00	503.817.000,00	240.850.100,00							487.500.000,00		
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500 Orang	500 Orang	246.649.900,00	681.089.000,00	503.817.000,00	257.167.100,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		487.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500 Orang	500 Orang	246.649.900,00	681.089.000,00	503.817.000,00	257.167.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			487.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah				85 %	85 %	897.378.760,00	1.049.045.322,00	836.547.322,00	346.998.500,00							1.244.377.260,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	897.378.760,00	1.049.045.322,00	836.547.322,00	-60.831.438,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		1.244.377.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	897.378.760,00	1.049.045.322,00	836.547.322,00	-60.831.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.244.377.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial				95 %	95 %	1.598.246.320,00	1.676.175.912,00	4.150.316.912,00	3.693.345.350,00							5.291.591.670,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	40 Orang	1.598.246.320,00	1.676.175.912,00	4.150.316.912,00	2.552.070.592,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		5.291.591.670,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	40 Orang	598.246.420,00	676.176.212,00	3.185.459.212,00	2.587.212.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.070.045.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				12 Dokumen	12 Dokumen	999.999.900,00	999.999.700,00	964.857.700,00	-35.142.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.221.546.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							43.790.763.848,00	46.108.467.373,00	47.942.512.449,00	4.151.748.601,00						58.005.137.412,00		



PEMERINTAH PROVINSI BALI



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

Jl. DI. Panjaitan No.10 Niti Mandala Renon Denpasar



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Angayubagia dan Puji Syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025.

Rencana Kerja merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah yang disusun berdasarkan atas Rancangan Renja dan masukan-masukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Provinsi Bali.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 ini, semoga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025.

Om Santih Santih Santih Om

Bali, 9 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI


I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721216 199803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar isi ii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistematika Penulisan 11

**Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU 12**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
s/d Triwulan I tahun berkenaan 2025 12

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah 26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 34

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 37

3.3 Program dan Kegiatan 38

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 40

Bab V PENUTUP 47

5.1 Kesimpulan 47

5.2 Saran 48



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai amanah UUD 45, maka seluruh elemen penyelenggara negara/pengelola pemerintahan wajib melakukan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai bidang urusannya masing-masing. Pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik dibanding dengan keadaan sebelumnya sehingga terjadi suatu pertumbuhan dan kemajuan, yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan dan pemerataan: Pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan usaha, Akses dan kualitas pelayanan publik, serta Daya saing Daerah sesuai pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk pembangunan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, nyaman dan kondusif.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja termasuk perangkat daerah yang mengampu salah Jenis Pelayanan Dasar yaitu bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pada Pasal 5 dan 6 Bab III, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 tahun 2023 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Seiring dinamika perubahan regulasi yang terjadi, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di daerah secara paralel terus berproses. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah, telah mempedomani seluruh rangkaian proses sistem perencanaan di daerah. Pasca diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sebagai tindak lanjutnya di Provinsi Bali telah ditetapkan Perda Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No. 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Demikian pula halnya dengan telah berlakunya Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai konsekuensi logis dari pencabutan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti perubahan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 16 ayat (2) yakni melalui beberapa tahapan, yaitu:



A. Persiapan Penyusunan;

Tahapan persiapan penyusunan yaitu:

- 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 2) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

B. Penyusunan Rancangan awal;

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah **paling lambat minggu pertama bulan Desember**. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- 3) Tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- 4) Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- 5) Penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.



C. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (c) merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan **paling lambat minggu pertama bulan Maret**.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan maka kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.

D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat



Daerah, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

E. Perumusan Rancangan Akhir.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

F. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Renja Perangkat Daerah disampaikan **paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan**. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan tersebut kemudian disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda. Verifikasi seluruh Renja Perangkat Daerah, **paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah**. Bappeda menyampaikan seluruh Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. **Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan**. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.



Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Rancangan Renja yang nantinya disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2025.

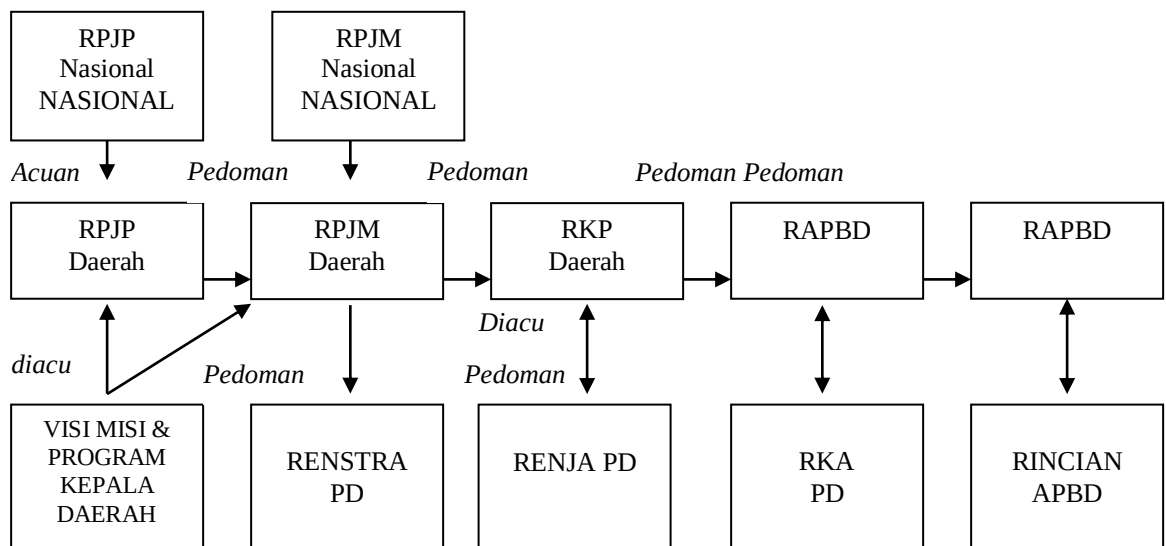
Perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali dan Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Provinsi Bali. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berkewajiban untuk mempedomani Renja serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA-APBD) dan Prioritas



Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2025, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah maka berikut disajikan keterkaitan antar dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya dalam Gambar berikut :

Gambar 1.1.
Hubungan Dokumen Renja Satpol PP Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan Gambar 1.1. diatas tampak keterkaitan yang jelas antara RPJMN, RPJPD, RPJMD sampai pada Renstra Perangkat daerah.

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pasal 201 ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum Kepala Daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

- 1.2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 - 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 - 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 - 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- 1.2.12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 1.2.13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7);
- 1.2.14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- 1.2.15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- a) Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2025;
- b) Sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025;
- c) Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Provinsi Bali dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- a) Menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
- b) Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
- c) Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, laporan kinerja triwulan, laporan tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- d) Memudahkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.



1.4 . Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan susunan sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan :

Bab ini menguraikan Latar belakang yang menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan, Pengertian ringkas tentang Renja Satpol PP, keterkaitan dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya dan dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab. II Hasil Evaluasi Pencapaian Program/Kegiatan Tahun Lalu :

Bab ini menjelaskan tentang :

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Provinsi Bali dan Capaian Rencana Strategis sampai Tahun 2023 pada periode Tahun 2018 – 2023;
- 2) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Bali;
- 3) Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 4) Review terhadap rancangan awal RKPD.

Bab. III Tujuan dan Sasaran :

Pada bab ini diuraikan tentang tujuan, sasaran dan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Bali.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan :

Pada bab ini diuraikan rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025.

Bab. V Penutup :

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan dan Saran.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I tahun berkenaan 2025 (tahun n) mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali s/d Triwulan I Tahun Berkenaan 2025 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2024 Periode 2024-2026.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a) Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



b) Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 3. Ketua Tim Kerja Sama dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 3. Ketua Tim Intelijen.



- d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
 2. Seksi Teknis Fungsional;
 3. Ketua Tim Data dan Pengembangan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 2. Seksi Operasional Linmas;
 3. Ketua Tim Bina Perlindungan Masyarakat.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2024, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 219 orang dengan status :

PNS = 96 Orang
Non PNS = 123 Orang
Jumlah = 219 Orang

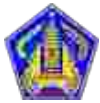
Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	14
2	S1	39
3	D3	3
4	SLTA/SMK	40
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		JUMLAH

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	7
3	III	71
4	IV	17
5	IX (PPPK)	1
JUMLAH		96



2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat s/d Triwulan I Tahun 2025

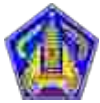
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025 s/d Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7/6) x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			47,826,909,899.93				10,175,333,715		17.83 %
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.63	22,301,782,483.93	83.6	30,165,536,233	-	5,521,472,898	-	18.30 %
	1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	15,242,330	24 Dokumen	21,000,000	14 Dokumen	9,724,100	58 %	46.31 %
	1.05.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	11,719,020	13 dokumen	16,000,000	9 dokumen	5,819,000	70 %	36.37 %
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	3,523,310	11 dokumen	5,000,000	5 dokumen	3,905,100	45 %	78.10 %



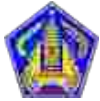
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025 s/d Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7/6) x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18,238,091,548	100%	24,998,328,311	25%	3,804,754,692	25 %	15.22 %
	1.05.01.1.02.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	18,238,091,548	100 Orang/Bulan	24,998,328,311	100 Orang/Bulan	3,804,754,692	100 %	15.22 %
	1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	5 paket	241,096,000	-	-	-	-	-	-
	1.05.01.1.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 paket	241,096,000	-	-	-	-	-	-
	1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis	447,375,342	5 jenis	795,582,690	2 jenis	65,704,090	40 %	8.26 %
	1.05.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik	1 Paket	40,559,000	1 Paket	40,706,800	1 Paket	18,485,750	100 %	45.41 %
	1.05.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	9 Paket	295,244,803	9 Paket	551,436,600	1 Paket	27,284,390	11 %	4.95 %
	1.05.01.1.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan	1 Paket	57,575,000	1 Paket	106,033,390	-	10,947,000	-	10.32 %
	1.05.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang siap edar	3 Paket	15,042,360	2 Paket	12,301,900	-	1,681,750	-	13.67 %



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025 s/d Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7/6) x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.05.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	38,954,179	2 Laporan	85,104,000	-	7,305,200	-	8.58 %
	1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 paket	87,930,920.93	1 paket	103,985,300	-	-	-	-
	1.05.01.1.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	39,258,000	2 paket	103,985,300	-	-	-	-
	1.05.01.1.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	48,672,920.93	-	-	-	-	-	-
	1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,106,474,703	12 bulan	1,140,116,342	3 bulan	261,039,034	25 %	22.90 %
	1.05.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,998,700	1 Laporan	1,910,000	100%	63.69 %
	1.05.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	123,463,909	12 Laporan	165,000,000	3 Laporan	32,071,794	25 %	19.44 %
	1.05.01.1.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	49,875,574	5 Laporan	48,720,000	1 Laporan	22,030,824	20 %	45.22 %
	1.05.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	930,635,220	2 Laporan	923,397,642	-	205,026,416	-	22.20 %



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025 s/d Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7/6) x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	2,165,571,640	12 bulan	3,106,523,590	3 bulan	1,380,250,982	25 %	44.43 %
	1.05.01.1.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	43 unit	2,165,571,640	49 Unit	2,841,523,590	10 Unit	1,380,250,982	20 %	48.57 %
	1.05.01.1.09.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	5 unit	75,000,000	-	-	-	-
	1.05.01.1.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 unit	190,000,000	-	-	-	-
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	25,525,127,416	100%	26,906,001,735	25%	4,653,860,817	25%	17.30 %
			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%		100%		100%		100%	
			Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	



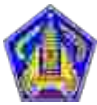
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025 s/d Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7/6) x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	288 pelanggaran	23,615,245,289	170 Pelanggaran	25,171,533,677	45 pelanggaran	4,259,697,275	26 %	16.92 %
	1.05.02.1.01.0006	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	55,178,970	1 Dokumen	58,998,610	-	10,011,082	-	16.97 %
	1.05.02.1.01.0010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	50 Orang	29,999,900	-	-	-	-
	1.05.02.1.01.0013	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	18,588,986,968	50 Unit	20,450,348,273	50 Unit	3,411,518,116	100 %	16.68 %
	1.05.02.1.01.0014	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	132,203,801	1 Dokumen	81,949,400	1 Dokumen	22,122,150	100 %	26.99 %
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	15,633,144	2 Laporan	19,993,200	-	-	-	-
	1.05.02.1.01.0016	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	96,723,140	14 Laporan	103,555,110	3 Laporan	16,151,082	20 %	15.60 %



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025 s/d Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7/6) x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.05.02.1.01.0017	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	190 Kasus	4,513,962,916	36 Laporan	4,207,317,872	9 Laporan	755,733,299	25 %	17.96 %
	1.05.02.1.01.0018	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	131 Orang	212,556,350	192 Orang	219,371,312	40 Orang	44,161,546	30 %	20.13 %
	1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	200 kasus	1,776,147,235	195 Kasus	1,734,468,058	31 Kasus	394,163,542	15 %	22.73 %
	1.05.02.1.02.0001	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	22,474,000	4 Laporan	12,181,200	1 Laporan	12,000,000	50 %	98.51
	1.05.02.1.02.0002	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1,505,375,630	12 Laporan	1,419,622,038	3	310,461,378	25 %	21.87
	1.05.02.1.02.0003	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	248,297,605	4 Laporan	302,664,820	1	71,702,164	25 %	23.69



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025 s/d Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7/6) x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 orang	133,734,892	-	-	-	-	-	-
	1.05.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	133,734,892	-	-	-	-	-	-



2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2024 menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 2.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi kinerja
1	91≤100	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagai penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar dan sekaligus mengampu standar pelayanan minimal (SPM). Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Pada Tabel berikut disajikan Capaian Kinerja Masing- Masing Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024 :

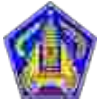


Tabel 2.5
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
	Rata-rata capaian					100	Sangat Baik	Hijau Tua

Tabel 2.6
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6
1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	30%
2.1. Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	30%
3.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	100%	100%	30%



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)												(16)
1	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	75%	100%	100%	

Dari ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis tersebut, seluruhnya dapat mencapai target sehingga capaian kinerja secara rata-rata termasuk dalam kategori **sangat baik** yaitu sebesar 100% dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi telah mencapai target (100%).
- 2) Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti telah mencapai target (100%).
- 3) Persentase Pengembangan SDA Pol PP tercapai sebesar 100%.

Capaian pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2024

Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan dasar yang mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- 1. Jenis Pelayanan Dasar :
Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum**
- 2. Target Pencapaian SPM :
Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas



Provinsi Bali								
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

3. Anggaran Alokasi anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024 seluruhnya bersumber dari Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

4. Dukungan Personil Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan PolisiPamong Praja Provinsi Bali tahun 2024, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 219 Orang, dengan status :

PNS = 96 Orang

Non PNS = 123 Orang

5. Hasil Capaian

FORM 5.E.4 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRAMTIBUM

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.	200	200	100	0	0	100	100	Tuntas Paripurna

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian program dan kegiatan.

2.3.1. Isu Strategis

- a) Perubahan Regulasi yang Dinamis;
- b) Kemajuan Teknologi Informasi;
- c) Bali Sebagai Destinasi Wisata Dunia;

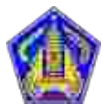
2.3.2. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Adanya perubahan (tarik ulur) kewenangan Pusat dan Daerah;
- b) Masih adanya persaingan tidak sehat di berbagai sektor usaha jasa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Sensitivitas Trantibumas terhadap kunjungan wisata.

2. Solusi

- a) Melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap masyarakat/ pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinannya;
- b) Membangun Koordinasi, Kolaborasi & Sinergitas dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Komponen masyarakat dalam Peningkatan pasitas SDA guna mendukung Kinerja Pol PP;
- c) Mewujudkan pariwisata berkualitas dan Bermartabat;
- d) Satpol PP selalu proaktif, melakukan tindakan antisipasi, penegakan cara yustisi dan non Yustisi kepada pelanggar;
- e) Membangun peran serta partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan daerah.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis untuk menghubungkan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama. Adapun langkah-langkah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Perbandingan rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan kebutuhan OPD terlihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.6	30,225,602,000	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.6	30,227,937,233	
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	21,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	21,000,000	
1.05.01.1.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	16,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	16,000,000	
1.05.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	5,000,000	
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	21,000,000,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	24,998,328,311	
1.05.01.1.02.001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	21,000,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	24,998,328,311	
1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 paket	172,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	-	
1.05.01.1.05.002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	172,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	



1.05.01 .1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	878,102,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	857,983,690	
1.05.01 .1.06.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,706,800	
1.05.01 .1.06.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	635,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	551,436,600	
1.05.01 .1.06.0 004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	106,033,390	
1.05.01 .1.06.0 005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12,301,900	
1.05.01 .1.06.0 009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	113,102,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	147,505,000	
1.05.01 .1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket	1,195,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	103,985,300	
1.05.01 .1.07.0 005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	115,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	103,985,300	
1.05.01 .1.07.0 009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,080,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
1.05.01 .1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,273,500,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,140,116,342	
1.05.01 .1.08.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,998,700	
1.05.01 .1.08.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165,000,000	
1.05.01 .1.08.0 003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	48,720,000	
1.05.01 .1.08.0 004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	1,041,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	923,397,642	



1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	5,686,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	3,106,523,590	
1.05.01.1.09.001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48 Unit	4,691,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	2,841,523,590	
1.05.01.1.09.007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	75,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	75,000,000	
1.05.01.1.09.009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	920,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190,000,000	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	33,279,231,403	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	28,571,880,335	
			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%				Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%		
			Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%				Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%		
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	170 Pelanggaran	30,771,231,403	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	170 Pelanggaran	26,350,233,577	
1.05.02.1.01.006	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	105,776,440	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	73,554,610	
1.05.02.1.01.010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	100,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	29,999,900	



1.05.02 .1.01.0 013	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	22,554,135,003	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	20,450,348,273	
1.05.02 .1.01.0 014	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	350,000,000	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	367,849,300	
1.05.02 .1.01.0 015	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	30,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	19,993,200	
1.05.02 .1.01.0 016	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	370,000,000	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	103,555,110	
1.05.02 .1.01.0 017	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	36 Laporan	6,151,233,540	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	36 Laporan	4,955,245,872	
1.05.02 .1.01.0 018	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Denpasar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	282 Orang	1,110,086,420	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Denpasar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	192 Orang	349,687,312	
1.05.02 .1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 kasus	2,370,000,000	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus	2,221,646,758	
1.05.02 .1.02.0 001	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	50,000,000	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	99,999,900	



1.05.02 .1.02.0 002	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1,970,000,000	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1,742,662,038	
1.05.02 .1.02.0 003	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	350,000,000	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	378,984,820	
1.05.02 .1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Denpasar	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 orang	138,000,000	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Denpasar	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	-	-	
1.05.02 .1.03.0 001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 laporan	138,000,000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	-		
TOTAL					63,504,833,403					58,799,817,568	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tanggal 16 Pebruari tahun 2024 telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk menerima masukan dari *stakeholder* terkait mengenai program dan kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan di tahun 2025 sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dilaksanakan Forum Perangkat Daerah tersebut dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mensinegritaskan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan OPD terkait, Instansi Vertikal, TNI/Polri, dan Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali. Adapun beberapa masukan dan saran untuk Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9 Kab/Kota	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	170 Pelanggaran	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 orang	



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai upaya dilaksanakan pemerintah melalui pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Mengacu pada UU. No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan berakhirnya periode RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, maka untuk menetapkan Tujuan dan sasaran yang akan dituangkan pada Bab III Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mengacu pada RPD Provinsi Bali 2024-2026, dan selanjutnya akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi;
- 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; dan
- 3) Program dan Kegiatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

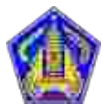
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025, Visi Misi Presiden periode RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Visi :“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;



- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

B. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan rumusan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, telah ditetapkan tujuan selama kurun waktu tiga tahun mendatang sebagai berikut :

- Tujuan 1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali
- Tujuan 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing
- Tujuan 3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali
- Tujuan 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim
- Tujuan 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi
- Tujuan 6. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan
- Tujuan 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung **Tujuan ke 6** : “*Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan*”, serta mendukung mewujudkan **sasaran** : “*Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat*”

Guna dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



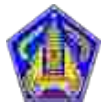
C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali yang memiliki tugas pokok : menegakkan Perda/Perkada, menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta memberikan Perlindungan Masyarakat, maka strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan Ketertiban dan Kenyamanan serta perlindungan masyarakat	1. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional 2. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum



3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari :

Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman, dan Taat Perda/Perkada

- Sasaran :**
- 1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada
 - 2. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 3. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 – 2026.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Per Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/ Perkada	1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	1.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	100%
			2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	2.1 Persentase Pelanggaran Perda/ Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%
			3. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	3.1 Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan sesuai berikut :

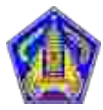
I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat
3. Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
8. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;

B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.



II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Setelah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2025, yang diselenggarakan pada tanggal 16 Pebruari 2024 dengan melibatkan beberapa *Stakeholder* dan instansi terkait, telah ditetapkan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor : B36.027/1531/Set/Satpol PP, tanggal 16 Pebruari 2024, serta sesuai dengan hasil verifikasi anggaran dari tim TAPD, susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Satpol PP Provinsi Bali terdiri dari 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan yang telah disertai dengan penerapan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Kebutuhan Dana Indikatif Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDUK		PERUBAHAN	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.6	30,227,937,233	83.6	27,909,493,629
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	21,000,000	24 Dokumen	21,000,000
		Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	
1.05.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	16,000,000	13 Dokumen	16,000,000
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	5,000,000	11 Laporan	5,000,000
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	24,998,328,311	100%	23,002,728,987
		Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	
1.05.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	24,998,328,311	100 Orang/Bulan	23,002,728,987



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDUK		PERUBAHAN	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	857,983,690	5 Jenis	795,582,690
		Hasil : Persentase Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	
1.05.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,706,800	1 Paket	40,706,800
1.05.01.1.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	551,436,600	9 Paket	551,436,600
1.05.01.1.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	106,033,390	1 Paket	106,033,390
1.05.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12,301,900	2 Paket	12,301,900
1.05.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	147,505,000	2 Laporan	85,104,000
1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	103,985,300	1 Paket	103,985,300
		Hasil : Persentase Terlaksananya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100%	
1.05.01.1.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	103,985,300	2 Paket	103,985,300



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDUK		PERUBAHAN	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,140,116,342	12 bulan	895,950,767
		Hasil : Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	
1.05.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,998,700	1 Laporan	2,998,700
1.05.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165,000,000	12 Laporan	165,000,000
1.05.01.1.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	48,720,000	5 Laporan	48,720,000
1.05.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	923,397,642	2 Laporan	679,232,067
1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	3,106,523,590	12 bulan	3,090,245,885
		Hasil : Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		100%	
1.05.01.1.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	2,841,523,590	49 Unit	2,825,245,885
1.05.01.1.09.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	75,000,000	5 unit	75,000,000
1.05.01.1.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190,000,000	1 unit	190,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDUK		PERUBAHAN	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	28,571,880,335	100%	25,701,451,565
		Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%		100%	
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%		100%	
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	170 Pelanggaran	26,350,233,577	170 Pelanggaran	24,243,704,492
		Hasil : Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	100%		100%	
1.05.02.1.01.0006	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	73,554,610	1 Dokumen	42,720,905
1.05.02.1.01.0010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Keluaran : Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	29,999,900	50 Orang	29,999,900
1.05.02.1.01.0013	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	20,450,348,273	50 Unit	20,450,348,273



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDUK		PERUBAHAN	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.02.1.01.0014	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	367,849,300	1 Dokumen	81,949,400
1.05.02.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	19,993,200	2 Laporan	19,993,200
1.05.02.1.01.0016	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	103,555,110	14 Laporan	87,277,405
1.05.02.1.01.0017	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	36 Laporan	4,955,245,872	36 Laporan	3,344,599,507
1.05.02.1.01.0018	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Keluaran : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	192 Orang	349,687,312	192 Orang	186,815,902
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus	2,221,646,758	195 Kasus	1,457,747,073
		Hasil : Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	100%		100%	



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDUK		PERUBAHAN	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.02.1.02.0001	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	99,999,900	4 Laporan	12,181,200
1.05.02.1.02.0002	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1,742,662,038	12 Laporan	1,175,456,463
1.05.02.1.02.0003	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	378,984,820	4 Laporan	270,109,410
Jumlah				58,799,817,568		53,610,945,194

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dan ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan setiap tahun akan dievaluasi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja setiap tahunnya.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 ini tersusun berkat kerja keras dari segenap jajaran aparaturnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilakukan secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam proses pembangunan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perlindungan masyarakat.

5.1 Kesimpulan

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yaitu :

Tujuan 6 : Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan.

Sasaran : Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat.

2. Tahapan proses yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Renja Tahun 2025 telah berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yang salah satunya menerapkan prinsip 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) dengan cara mengevaluasi kembali kegiatan yang kurang efektif atau kurang fokus tidak diusulkan/mengganti dengan kegiatan lain yang lebih fokus.

3. Penyesuaian kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada Tahun 2025 telah mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan tersebut, namun jika terdapat hal-hal di luar perkiraan yang dapat menyebabkan terjadinya perputaran anggaran di lingkungan OPD, maka sebagai upaya tindak lanjut adalah dengan mengevaluasi dan menyesuaikan kembali target kinerja masing-masing kegiatan (penurunan atau peningkatan target) sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.

5.2 Saran

1. Melakukan penyesuaian terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
2. Melakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/Kota dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025



Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar (80235)



Disdikpora Provinsi Bali



Disdikpora Provinsi Bali



Disdikpora Provinsi Bali

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Rasa Angayubagia kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahaNya, Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Terselesainya penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan koordinasi yang baik serta partisipasi aktif dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, oleh karena itu melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Pada kesempatan ini pula, kami memohon kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan, kritik, dan saran demi kesempurnaan dokumen ini sehingga besar harapan kami agar dokumen ini dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Bali. Terima kasih.

Om Santhi, Santhi, Santhi Om

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas,



Dr. KN. Boy Jayawibawa
NIP. 19651730 199203 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.4 Maksud dan Tujuan	7
1.5 Sistematika Penyusunan Renja Disdikpora Provinsi Bali	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	17
3.1 Prioritas Pembangunan.....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	21
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	24
3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	28
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDIKPORA PROVINSI BALI TAHUN 2025	42
BAB V PENUTUP	44
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
LAMPIRAN I PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDIKPORA PROVINSI BALI TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
LAMPIRAN II Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencananan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dimaksud seperti (1) penyelarasan tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dengan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan I

tahun 2025; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus dipergunakan.

Sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *topdown* dan *bottom-up*. Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Semesta Berencana Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah.
2. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah.
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan acuan Kepala Dinas dalam menentukan Usulan Belanja Langsung yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD.
4. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

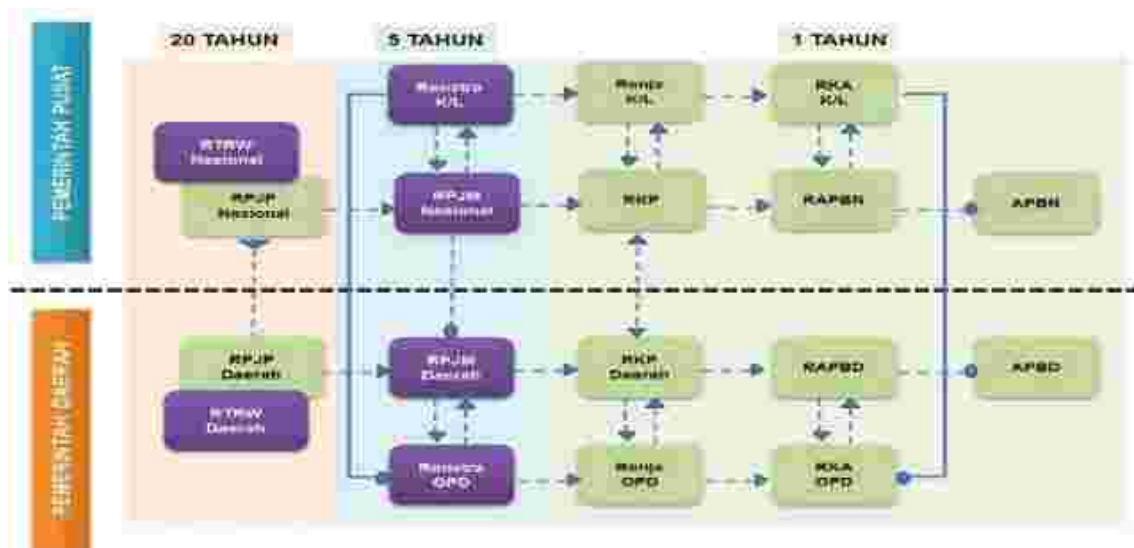
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Pebruari 2025 Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2018); (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
- 22) Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 23) Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22);

- 24) Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagi dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

Hubungan dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 Sebagai berikut :



Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

Dalam praktiknya, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 juga disusun tetap memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang

merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses sistematis, Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2025 serta dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

1.3.1. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025

Keterkaitan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 meliputi sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2020-2025. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2. Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pelaksanaan dari RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran RPD Provinsi Bali periode 2025-2029, arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

1.3.3. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 memuat Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan mengacu pada Renstra Tahun 2025-2026. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025, hasil penelahan, direktif kepala daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, dan hasil evaluasi sampai triwulan II terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan rancangan KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan rancangan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 untuk dibahas dan disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Bali. Penyusunan KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.

1.3.4. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 di wilayah Provinsi Bali disusun menjadi pedoman bagi Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 agar antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan tema dan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.4 Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam urusan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dengan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Bali di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali; serta
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA PROVINSI BALI SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada Bab ini diuraikan tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan I tahun 2025, kendala yang dihadapi dan solusi yang akan ditempuh

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDIKPORA PROVINSI BALI TAHUN 2025

Dalam BAB ini memuat matrik Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Dalam BAB ini menjelaskan harapan dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan mengurai prinsip dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI BALI SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan I tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Renja Semesta Berencana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan sampai triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali telah mencapai 12,16 persen dengan realisasi keuangan mencapai 11,18 persen.

Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang target kinerjanya sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan kinerja pada triwulan I dan II, seperti untuk indikator Indeks, Angka Partisipasi Sekolah atau Nilai Manajemen Kinerja dan untuk yang telah mencapai target pada triwulan I tahun 2025 kebanyakan adalah sub kegiatan rutin urusan kerumahtanggaan pada Perangkat Daerah.

Terdapat beberapa program/kegiatan yang telah berkinerja dengan baik namun di samping itu pula terdapat beberapa program/kegiatan yang kinerjanya di dalam pencapaian target masih perlu ditingkatkan baik dari segi capaian kinerja fisik

maupun serapan anggaran sehingga perlu dilakukan upaya-upaya serta langkah-langkah strategis dalam setiap pelaksanaan kinerja agar pencapaian target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat dicapai secara optimal dan memperoleh solusi penanganan yang tepat berpedoman dengan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan yang bersifat koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga menyebabkan berkurang beban konsumsi, perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga target kinerja pada sub kegiatan tersebut tidak akan tercapai.
3. Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan capaian kinerja pada triwulan I dan II, seperti indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja.
4. Adanya kesalahan uraian belanja pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
5. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1 atau 2.
6. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan-triwulan berikutnya, antara lain seperti :

1. Penyesuaian-penyesuaian terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.
2. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.
3. Koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran
4. Penataan kembali terhadap rancangan APBD 2025 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;
5. Dukungan penganggaran non-government dalam meningkatkan efektifitas pencapaian indikator sasaran
6. Koordinasi teknis secara efektif dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas dan terukur.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan Evaluasi RKPD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
-1	-2	-3	-4	-5	-6 Rp	-7 Rp	-8 Rp	I -9 Rp	II -10 Rp	III -11 Rp	IV -12 Rp	-13 Rp	-14 Rp	-15 Rp	-16			
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA																		
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA																		
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																		
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,75	1.334.195.333.095,00	163.292.998.906,00	82	1.334.195.333.095,00	163.292.998.906,00	0,00	0,00	0,00	163.292.998.906,00	163.292.998.906,00	12%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	3	27.048.000,00	24	193.750.900,00	3	27.048.000,00	0,00	0,00	0,00	3	27.048.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	25.068.000,00	21	85.979.500,00	2	25.068.000,00	0,00	0,00	0,00	2	25.068.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1.980.000,00	3	107.771.400,00	1	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1	1.980.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	14	161.154.276.596,00	177	1.319.132.887.513,00	14	161.154.276.596,00	0,00	0,00	0,00	14	161.154.276.596,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10680	161.135.676.596,00	28317	1.317.702.881.213,00	10680	161.135.676.596,00	0,00	0,00	0,00	10680	161.135.676.596,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	0,00	4500	1.284.575.800,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	18.600.000,00	96	145.430.500,00	2	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2	18.600.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	1	27.620.000,00	12	766.145.000,00	1	27.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1	27.620.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	27.620.000,00	9	766.145.000,00	1	27.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1	27.620.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik		0,00	100	68.193.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0,00	36	68.193.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25	44.308.651,00	100	986.579.810,00	25	44.308.651,00	0,00	0,00	0,00	25	44.308.651,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	12.402.451,00	167	459.411.560,00	17	12.402.451,00	0,00	0,00	0,00	17	12.402.451,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	8.650.000,00	6	95.000.000,00	1	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1	8.650.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	0,00	10	10.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.392.000,00	6	31.526.250,00	4.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392.000,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	18.864.200,00	36	389.802.000,00	3	18.864.200,00	0,00	0,00	0,00	3	18.864.200,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	25	1.753.245.759,00	100	9.847.361.472,00	25	1.753.245.759,00	0,00	0,00	0,00	25	1.753.245.759,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	207.973.949,00	36	978.222.150,00	3	207.973.949,00	0,00	0,00	0,00	3	207.973.949,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1.545.271.810,00	36	8.869.139.322,00	3	1.545.271.810,00	0,00	0,00	0,00	3	1.545.271.810,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	25	286.499.900,00	100	3.200.415.000,00	25	286.499.900,00	0,00	0,00	0,00	25	286.499.900,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	286.499.900,00	72	954.665.000,00	7	286.499.900,00	0,00	0,00	0,00	7	286.499.900,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	8	1.977.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	24	268.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
2 Meningkatkan Daya Saing dan Peningkatan Tenaga Kerja Krama Bali																		
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	72	1.255.080.400,00	10	38.417.620,00	72,5	1.255.080.400,00	10	38.417.620,00	0,00	0,00	0,00	10	38.417.620,00	3%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi		38.417.620,00	273	1.255.080.400,00		38.417.620,00	0,00	0,00	0,00		38.417.620,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi		11.788.040,00	3	148.051.900,00		11.788.040,00	0,00	0,00	0,00		11.788.040,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektivitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda		300.000,00	200	193.722.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		24.754.580,00	180	775.739.500,00		24.754.580,00	0,00	0,00	0,00		24.754.580,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		1.575.000,00	90	101.177.000,00		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00		1.575.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda		0,00	75	36.390.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	50,5	81.967.430.900,00	51	81.967.430.900,00	54.645.332.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.645.332.700,00	54.645.332.700,00	67%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan		5.968.350.000,00	15	21.650.590.900,00		5.968.350.000,00	0,00	0,00	0,00		5.968.350.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.03.1.02.0004	Kekukertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		5.965.100.000,00	500	13.526.517.500,00		5.965.100.000,00	0,00	0,00	0,00		5.965.100.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara		3.250.000,00	10	8.124.073.400,00		3.250.000,00	0,00	0,00	0,00		3.250.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional		500.000,00	360	316.840.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		I		II		III		IV		-13		-14		-15			-16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		500.000,00			2	316.840.000,00		500.000,00			0,00		0,00		0,00		500.000,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	59	48.676.482.700,00	59	60.000.000,00	59	48.676.482.700,00		48.676.482.700,00			0,00		0,00		0,00	59	48.676.482.700,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1	48.676.482.700,00	3	60.000.000,00	1	48.676.482.700,00		48.676.482.700,00			0,00		0,00		0,00	1	48.676.482.700,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	53	1.500.000.000,00		0,00	53,5	1.500.000.000,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka		0,00		53,5	1.500.000.000,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		0,00		3	1.500.000.000,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
3)Meningkatnya kualitas pendidikan																										
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah APS Penduduk Usia 16 - 18 tahun		100			100																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri	50,5	627.419.858.522,00		103.758.333.838,00	50,75	627.419.858.522,00		103.758.333.838,00			0,00		0,00		0,00	103.758.333.838,00		103.758.333.838,00			17%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Sekolah APS Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun	100				100																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Indeks Iklim Keamanan SMA					94																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Indeks Iklim Kebencanaan SMA					99																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Inklusivitas SMA				41.101.775.272,00	89	294.740.595.118,00		41.101.775.272,00			0,00		0,00		0,00		41.101.775.272,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional					75,5																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional					61,25																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0,00	24	68.000.000.000,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0,00	20	1.980.000.000,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0,00	8	382.366.000,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti Biaya Personil Peserta Didik				81.364.255,00	600	4.704.150.000,00		81.364.255,00			0,00		0,00		0,00		81.364.255,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1.500.000,00	1202	2.768.179.000,00		1.500.000,00			0,00		0,00		0,00		1.500.000,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	839	5.355.399.370,00	1501	31.956.434.118,00	839	5.355.399.370,00		5.355.399.370,00			0,00		0,00		0,00	839	5.355.399.370,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				11.062.040,00	200	77.120.000,00		11.062.040,00			0,00		0,00		0,00		11.062.040,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				36.980.000,00	407	125.380.000,00		36.980.000,00			0,00		0,00		0,00		36.980.000,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				35.613.539.607,00	489	161.691.130.000,00		35.613.539.607,00			0,00		0,00		0,00		35.613.539.607,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				0,00	342	57.409.900,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300.000,00	3	44.690.000,00		300.000,00			0,00		0,00		0,00		300.000,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah				0,00	86	8.871.116.400,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0,00	1800	86.942.800,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				0,00	180	10.919.377.000,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				0,00	1	3.000.000.000,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1.650.000,00	1	76.299.900,00		1.650.000,00			0,00		0,00		0,00		1.650.000,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Indeks Iklim Keamanan SMK					93,5																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Indeks Iklim Kebencanaan SMK					97,5																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Indeks Inklusivitas SMK					85,55																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional				59.783.336.338,00	69,75	307.220.573.724,00		59.783.336.338,00			0,00		0,00		0,00		59.783.336.338,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional					56,9																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK					79,55																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK					91																DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0,00	9	22.212.384.000,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0,00	10	11.150.616.000,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0,00	10	3.914.925.900,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengikuti Biaya Personil Peserta Didik				268.309.611,00	1650	5.338.581.500,00		268.309.611,00			0,00		0,00		0,00		268.309.611,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3.740.000,00	870	2.418.875.000,00		3.740.000,00			0,00		0,00		0,00		3.740.000,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	449	3.165.654.178,00	4150	20.272.868.244,00	449	3.165.654.178,00		3.165.654.178,00			0,00		0,00		0,00	449	3.165.654.178,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0,00	200	88.862.000,00					0,00		0,00		0,00		0,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12.360.000,00	337	460.992.000,00		12.360.000,00			0,00		0,00		0,00		12.360.000,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				55.468.452.549,00	525	180.529.850.000,00		55.468.452.549,00			0,00		0,00		0,00		55.468.452.549,00				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I -9	II -10	III -11	IV -12	-13	-14	(%) -15	-16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		620.000,00	344	45.760.000,00		620.000,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0,00	3	66.960.000,00				0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi/edang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi/edang/berat		0,00	20	4.012.000.000,00				0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar		864.200.000,00	116	9.211.539.880,00		864.200.000,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0,00	1500	86.574.200,00				0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		0,00	64	47.370.185.000,00				0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0,00	1	37.600.000,00				0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Keamanan SDBL			94								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Keamanan SMALB			94								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Keamanan SMPBL			94								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Kebinekaan SDBL			99								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Kebinekaan SMALB			93,75								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Iklim Kebinekaan SMPBL			89,5								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Inklusivitas SDBL			93								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Inklusivitas SMALB		2.873.222.228,00	99	25.458.689.680,00		2.873.222.228,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Indeks Inklusivitas SMPBL			90								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Literasi SDBL berdasarkan Asesmen Nasional			73,75								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional			78								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Literasi SMPBL berdasarkan Asesmen Nasional			78								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Numerasi SDBL berdasarkan Asesmen Nasional			62,5								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional			70,5								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
				Rerata kompetensi Numerasi SMPBL berdasarkan Asesmen Nasional			67,5								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		0,00	4	1.880.000.000,00				0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1.500.000,00	4674	3.523.966.200,00		1.500.000,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		9.449.500,00	1000	1.431.464.000,00		9.449.500,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	108	790.952.397,00	447	4.649.915.980,00	108	790.952.397,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Ketenagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Ketenagaan dan Manajemen		54.223.862,00	38	761.324.300,00		54.223.862,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		1.994.525.569,00	42	10.806.510.000,00		1.994.525.569,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	60	402.850,00	150	15.547.600,00	60	402.850,00		0,00	60	402.850,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		999.000,00	42	16.171.600,00		999.000,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi/edang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi/edang/berat		0,00	2	1.918.000.000,00				0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar		0,00	28	362.880.000,00				0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		21.169.050,00	14	90.910.000,00		21.169.050,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja NPK Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik	100	60.319.100,00	100	60.319.100,00		1.780.000,00		0,00		0,00	3%
		1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal		1.780.000,00	67	60.319.100,00		1.780.000,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		110.000,00	5	26.079.400,00		110.000,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
		1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		1.670.000,00	9	34.239.700,00		1.670.000,00		0,00		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-9	-10	-11	-12	-13	-14	(%)	-15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	I	II	III	IV	-9	-10	-11	-12	-13	-14	(%)	-15
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN																			
1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																			
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,75	1.034.872.366,00	230.238.673,00	82	1.034.872.366,00	230.238.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.238.673,00	230.238.673,00		22%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	25	20.448.115,00	100	170.880.100,00	25	20.448.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	20.448.115,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan		2.100.000,00	12	140.162.500,00		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100.000,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan		0,00	9	3.499.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		18.348.115,00	36	27.218.000,00		18.348.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.348.115,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang usuan pemerintah daerah yang tersedia	25	142.710.558,00	100	755.752.296,00	25	142.710.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	142.710.558,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan	3	142.710.558,00	36	755.752.296,00	3	142.710.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	142.710.558,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungus Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	25	67.080.000,00	100	108.240.000,00	25	67.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	67.080.000,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajanya		67.080.000,00	6	96.400.000,00		67.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.080.000,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0,00	15	1.440.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0,00	54	8.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
2.Meningkatnya kualitas pendidikan																			
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK	80	1.163.362.000,00	78.975.164,00	82,5	1.163.362.000,00	78.975.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.975.164,00	78.975.164,00		7%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK		36.531.082,00	92	685.647.000,00		36.531.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.531.082,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	160	10.936.000,00	2100	94.290.000,00	160	10.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160	10.936.000,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	149	16.505.286,00	570	31.636.000,00	149	16.505.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	16.505.286,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0,00	540	14.040.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		11.089.796,00	273	545.681.000,00		11.089.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.089.796,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK		40.444.082,00	60	477.715.000,00		40.444.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.444.082,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	160	12.826.000,00	1140	77.760.000,00	160	12.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160	12.826.000,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0,00	480	13.950.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	105	16.510.286,00	540	31.374.000,00	105	16.510.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105	16.510.286,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		11.107.796,00	174	354.631.000,00		11.107.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.107.796,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
																</			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16		
No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16		
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN																					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																					
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,75	664.648.242,00		134.142.266,00	82	664.648.242,00		134.142.266,00	0,00		0,00		134.142.266,00	134.142.266,00	20%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu		75	5.285.400,00	100	32.440.600,00	75	5.285.400,00	0,00		0,00		0,00	75	5.285.400,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10	3.550.400,00	60	8.613.000,00	10	3.550.400,00	0,00		0,00		0,00	10	3.550.400,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	1.735.000,00	3	6.547.600,00	1	1.735.000,00	0,00		0,00		0,00	1	1.735.000,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	36	17.280.000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah		17	97.644.066,00	100	541.397.642,00	17	97.644.066,00	0,00		0,00		0,00	17	97.644.066,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2	97.644.066,00	36	541.397.642,00	2	97.644.066,00	0,00		0,00		0,00	2	97.644.066,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan		25	31.212.800,00	100	90.810.000,00	25	31.212.800,00	0,00		0,00		0,00	25	31.212.800,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1	31.212.800,00	3	90.810.000,00	1	31.212.800,00	0,00		0,00		0,00	1	31.212.800,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
2.Meningkatnya kualitas pendidikan																					
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	60,25	87.742.100,00		9.394.800,00	60,5	87.742.100,00		9.394.800,00	0,00		0,00		0,00	9.394.800,00	9.394.800,00	11%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN
		1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah			5.759.900,00	3	60.376.800,00		5.759.900,00	0,00		0,00		0,00		5.759.900,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya			5.759.900,00	600	60.376.800,00		5.759.900,00	0,00		0,00		0,00		5.759.900,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan			3.634.900,00	3	27.365.300,00		3.634.900,00	0,00		0,00		0,00		3.634.900,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya			3.634.900,00	240	27.365.300,00		3.634.900,00	0,00		0,00		0,00		3.634.900,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70,6	59.140.000,00		1.988.800,00	70,8	59.140.000,00		1.988.800,00	0,00		0,00		0,00	1.988.800,00	1.988.800,00	3%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN
		1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya Linas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali			1.988.800,00	87,4	59.140.000,00		1.988.800,00	0,00		0,00		0,00		1.988.800,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
		1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			1.988.800,00	675	59.140.000,00		1.988.800,00	0,00		0,00		0,00		1.988.800,00		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJUJURAN	
Rate-rata capaian kinerja (%)										0%	145.525.866,00	0%	34,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	145.525.866,00		
Predikat kinerja Sangat Rendah																					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2025 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2025.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2025-2029. Adapun Prioritas Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia
2. Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri

Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

4. **Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.**
5. Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8 Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal	Meningkatnya Penguatan dan Pemajuan Adat serta Budaya Bali Berlandaskan Nilai-Nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>
		Meningkatnya peran Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi
		Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Subak
		Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali (<i>Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci</i>)
Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman
		Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi generasi muda Bali
		Tercapainya peningkatan prestasi olahraga Provinsi Bali pada level nasional dan internasional
		Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali
Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata	Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali.	Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan
		Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
		Meningkatnya Investasi Daerah Yang Mendorong Pemerataan Pembangunan di Bali
		Terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru berbasis potensi dan keunggulan lokal

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran
		di desa-desa setiap Kabupaten/Kota di Bali.
		Meningkatnya jumlah dan skala usaha UMKM dan koperasi yang berdaya saing
		Meningkatnya daya saing, kualitas, dan jangkauan pasar produk industri lokal Bali melalui standarisasi, sertifikasi, serta ekspansi ke pasar nasional dan internasional.
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan
Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
		Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah
		Meningkatnya cakupan luasan hutan lindung
		Meningkatnya sumber daya mineral
		Meningkatnya pemanfaatan energi yang berkelanjutan
Bali Pulau Digital dan Keamanan Digital	Tersedianya infrastruktur digital berkualitas yang inklusif dan merata di seluruh pelosok Provinsi Bali	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi di Masyarakat
	Terwujudnya Stabilitas dan Keamanan Masyarakat dan mitigasi	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
		Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana terpadu
	Meningkatnya kualitas tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya Profesionalisme ASN

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
		Meningkatnya kualitas layanan publik

3.1 Prioritas Pembangunan

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal
- Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
- Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi
- Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
- Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2025, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut:

“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan RPJMD Pemerintah Provinsi Bali 2025-2029, tujuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga”**

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang diampu oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Bali 2024-2029, maka sasaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Pemuda
3. Meningkatnya prestasi atlet pada kejuaraan olahraga tingkat Provinsi

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berserta Indikator Kinerja termuat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	95,20	96,24	97,3	98,37	99,45	100	
				Persentase sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Baik	96,36	96,60	96,84	97,10	97,33	97,58	
	2. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan		Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Pemuda	Persentase Peningkatan Jumlah Pemuda yang mengikuti Pengembangan Kepemudaan		24,66	25,39	26,16	26,94	27,75	
	3. Tercapainya peningkatan prestasi olahraga Provinsi Bali pada level nasional dan internasional		Meningkatnya prestasi atlet pada kejuaraan olahraga tingkat Provinsi	Persentase atlet berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat Provinsi		46,89	47,36	47,84	48,31	48,80	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam lima tahun mendatang merupakan tahapan lanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Bali. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dan merupakan bagian dari program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Dalam rangka penyelarasan Arah Kebijakan pembangunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dengan RPJMD Provinsi Bali, maka dalam proses perumusan arah kebijakan tersebut telah berpedoman pada Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, arah kebijakan RPJMD Provinsi Bali dan arah kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Hal ini sebagai wujud adanya kesinambungan perencanaan pembangunan dari pusat ke daerah. Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas, berikut ini tabel yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan digunakan dalam mewujudkan Pembangunan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 2. Dukungan Pembiayaan Pendidikan 3. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 4. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan 5. Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan 6. Pembinaan Aparatur dan Manajemen Satuan Pendidikan 7. Peningkatan Prestasi Peserta Didik 8. Penguatan Kurikulum Muatan Lokal 9. Memantapkan peran sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pasraman non formal	1. Revitalisasi sarana dan prasarana Pendidikan 2. Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk membantu kebutuhan biaya operasional sekolah dan biaya penunjang proses pembelajaran 3. Menyediakan biaya personil bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah 4. Pemenuhan SPM Pendidikan 5. Pendataan dan Penjaringan ATS bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 6. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan 7. Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Digital 8. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan karir Guru dan Tenaga Kependidikan 9. Melaksanakan reuiu RKAS, Kurikulum, dan Rapor Pendidikan 10. Penguatan peran Pengawas/Pendamping dalam melakukan pendampingan di Satuan Pendidikan 11. Pengembangan talenta melalui pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (kegiatan lomba sains, seni, dan olahraga di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional) 12. Penguatan Literasi dan Numerasi peserta didik

			13. Penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal 14. Revitalisasi SMK dalam rangka menjadikan SMK Pusat Keunggulan 15. Pendidikan dan pelatihan vokasi <i>link and match</i> dengan DU/DI 16. Perencanaan SMK menerapkan BLUD 17. Menyediakan bahan ajar/bahan bacaan untuk penguatan kurikulum muatan lokal 18. Mengembangkan sekolah sebagai pusat pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, penguatan dan pembudayaan nilai-nilai kearifan lokal melalui pasraman kilat
	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Pemuda	1. Peningkatan peran organisasi kepemudaan 2. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda	1. Penataan sistem manajemen dan kebijakan organisasi kepemudaan secara terpadu dan berkelanjutan 2. Mengembangkan talenta dan kompetensi kepemudaan dalam upaya mewujudkan pemuda mandiri dan kreatif; 3. Perluasan kesempatan pemuda memperoleh pelatihan dan keterampilan; 4. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, pemuda kader dan kepemimpinan dalam mendukung pembangunan; 5. Menyelenggarakan forum diskusi pemuda dan kolaborasi dalam penguatan peran pemuda 6. Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda 7. Pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi 8. Pengembangan pendidikan Kepramukaan;

	Meningkatnya prestasi atlet pada kejuaraan olahraga tingkat Provinsi	Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan	1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga layanan khusus bersinergi dengan lembaga/organisasi keolahragaan 2. Meningkatkan penyelenggaraan dan partisipasi kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan 4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar 5. Pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi 6. Pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan 7. Peningkatan pola kemitraan dengan wirausaha dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga pariwisata.

3.4 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
		Pengadaan Mebel Sekolah			Pengadaan Mebel Sekolah
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
		Pembangunan Ruang Kelas Baru			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			Pembangunan Ruang Kelas Baru
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Pengadaan Mebel Sekolah			Pengadaan Mebel Sekolah
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
					Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
		Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan			UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Mebel			Pemeliharaan Mebel

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus

Sebelumnya			Sesudah		
Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENDIDIKAN, KEMEPUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI

TAHUN 2025

Dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART* (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*) yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), dan *Spatial* (titik koordinat) lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan :

- 1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
- 2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
- 3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

PRIORITAS 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan.



Gambar 4.1

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

Berdasarkan Gambar 5.2 yang menggambarkan prioritas Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik, Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

- 1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di

- FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan Kesejahteraan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerak masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (6) memantapkan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, dan (7) memantapkan pelayanan kesehatan tradisional Bali.
 3. Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS).
 4. **Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) Mengembangkan labotarium dan sarana prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) Menetapkan SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3) Pemetaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, dan (4) Pendidikan Vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/industri.**
 5. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi, dan (2) pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.
 6. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, dan (3) Pelayanan anak di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
 7. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui: (1) Pelayanan dan rehabilitasi sosial Gelandangan dan Pengemis, (2) Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, dan (3) Perlindungan sosial bencana alam dan sosial.

Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali terlampir.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2025 menjadi bahan materi pembangunan yang sangat strategis. Dengan mengetahui tercapai dan tidak tercapainya sasaran pembangunan ataupun adanya penyimpangan dalam orientasi pembangunan akan secara cepat dapat diketahui. Begitu pula halnya terkait dengan sistem penyusunan anggaran akan memiliki sebuah dokumen pendekatan yang nyata karena layak tidak layaknya sebuah kebijakan untuk dibiayai sangat tergantung dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan.

Evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan harus berpedoman pada instrument yang jelas dan terukur dengan cermat. Mengingat keputusan atas kegiatan-kegiatan baru itu diarahkan untuk menjawab persoalan yang ditemui tahun sebelumnya. Sehingga tidak ada alasan untuk membuat kegiatan tanpa dasar perencanaan yang jelas.

Sisi penting yang perlu dicermati dari sistem penganggaran adalah kegiatan yang banyak belum tentu membutuhkan dana yang besar justru bisa terjadi sebaliknya. Jumlah kegiatan yang sedikit membutuhkan anggaran yang besar. Jadi, kebutuhan besar kecilnya anggaran sangat ditentukan oleh sifat dan jenis kegiatan itu sendiri. Umumnya, kegiatan yang bersifat belanja modal (pengadaan barang/fisik) membutuhkan anggaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat nonfisik seperti pembinaan, perjalanan dinas, workshop, bimtek, dan sejenisnya.

[illegible]

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12);
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 33);
27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 12);
29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 31);



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- menghimpun bahan/materi yang terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;
 - mengolah bahan/materi dimaksud di atas dan menyusun Perubahan Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;
 - menyampaikan hasil dokumen Perubahan Rencana Kerja (*RENJA*) Tahun Anggaran 2025 kepada Bappeda Provinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali; dan
 - melaporkan hasil kerja Tim penyusun kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 4 April 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Gubernur Provinsi Bali di Bali (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
- Inspektur Provinsi Bali di Bali;
- Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
- Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali; dan
- Yang bersangkutan.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BALI
NOMOR 1152 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
- B. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
- C. Sekretaris : Ketua Tim Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
- D. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 - 3. Kepala Bidang Pembinaan PK dan PLK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 - 4. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 - 5. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 - 6. Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 - 7. Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 - 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.



9. Ni Luh Putu Suastini, S.IP.,MAP., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
10. I Gusti Made Suyadnya, S.Kom., staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
11. Luh Putu Regita Septa Dewi, S.STP., staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
12. Komang Soma Atmaja., staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
13. Ni Made Sila Arini, SE., staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
14. Ponti Hardiyanto., staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
15. I Gede Arnaba Yasa, S.Pd., staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
16. Made Juni Arka, SH., staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
17. I Bagus Nyoman Artha Adi Putra, S.Pd., staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
18. Ni Luh Eka Wirasni, S.Pd., staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.





PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
TAHUN 2025



diskes.baliprov.go.id



Dinas Kesehatan Provinsi Bali



Dinas Kesehatan Provinsi Bali

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Rencana Kerja merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan atas Rancangan Renja dan masukan dalam musyawarah melalui Forum Perangkat Daerah (FPD).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu menerangi segala upaya kita dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bali, 9 Juli 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Bali



Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19680622 199903 1 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN 2024	 6
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.....	 25
 BAB IV PENUTUP	 111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan TW I Tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Bali	8
Tabel 3.1	Matrik Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan.

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 ini disusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dengan disusunnya Renstra Periode Tahun 2025-2029 ini maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap Renja tahun 2025 untuk memastikan arahan perencanaan pembangunan dan penganggaran telah sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang saat ini tengah disusun.

Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD tahun 2025 berdampak pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renja dimaksud seperti: (1) penyelarasan tujuan dan sasaran

menyesuaikan dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025-2029; (2) perubahan indikator kinerja utama, program/kegiatan menyesuaikan dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025-2029; serta (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Bali memuat rancangan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Perubahan RKPD yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, dan memperhatikan capaian evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Triwulan I tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Kesehatan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
18. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 2594 Tahun 2025 Tentang Penyampaian Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 Sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah antara lain:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
4. Menciptakan kesinambungan kegiatan dan keselarasan program, kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
5. Menjadi acuan untuk menyusun evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025.

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Triwulan I

Pada bab ini memuat evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2025 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan I tahun 2025, kendala yang dihadapi dan solusi yang akan ditempuh.

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Dalam Bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun 2025 baik yang mengalami perubahan maupun tidak disertai dengan pendanaannya.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini menjelaskan harapan dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025 dan mengurai prinsip dan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
TAHUN 2025

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan I tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian sasaran yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana kerja Dinas Kesehatan sampai triwulan I tahun 2025. Dari total 5 program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta UPTDnya sebanyak 1 telah mencapai target pada triwulan I (bulan Maret), sebanyak 4 program belum mencapai target pada triwulan I (bulan Maret). Untuk level kegiatan sebanyak 17 kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 103 sebagian besar sudah tercapai targetnya sesuai yang ditargetkan di TW I meski ada capaian realisasi anggaran yang belum terealisasi yaitu sebanyak 31 sub kegiatan

Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang target kinerjanya sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan kinerja pada triwulan I, seperti untuk indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja dan untuk yang telah mencapai target pada triwulan I tahun 2025 kebanyakan adalah sub kegiatan rutin urusan kerumahtanggaan.

Sebagian besar UPTD yang telah berkinerja dengan baik namun di samping itu pula terdapat beberapa UPTD yang kinerjanya di dalam pencapaian target masih perlu ditingkatkan baik dari segi capaian kinerja fisik maupun serapan anggaran sehingga perlu dilakukan upaya-upaya serta langkah–langkah strategis dalam setiap pelaksanaan kinerja agar pencapaian target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat dicapai secara optimal dan memperoleh solusi penanganan yang tepat berpedoman dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

1. Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
2. Kegiatan yang bersifat koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga menyebabkan berkurang beban konsumsi, perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga target kinerja pada sub kegiatan tersebut tidak akan tercapai;
3. Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan capaian kinerja pada triwulan I, seperti indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja;
4. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1;
5. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan-triwulan berikutnya, antara lain seperti :

1. Penyesuaian-penyesuaian terhadap Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025;
2. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas;
3. Koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran;
4. Penataan kembali terhadap rancangan APBD 2025 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;

5. Dukungan penganggaran non-government dalam meningkatkan efektifitas pencapaian indikator sasaran;
6. Koordinasi teknis secara efektif dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas dan terukur.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan TW I Tahun 2025
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7
				K	Rp	K	Rp	
							779.522.132.355	132.186.036.091,00
I	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI				338.377.029.572		64.920.999.409,00
I	01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5	nilai	308.274.393.822	-	60.584.259.465,00
I	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	7	Dokumen	97.402.210	3,00	7.511.082,00
1	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	dokumen	51.666.800	2,00	-
2	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	45.735.410	1,00	7.511.082
II	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100	Persen	298.910.916.172	25,00	59.362.301.694,00
3	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1705	orang/ bulan	298.716.634.158	1.702	59.324.746.284
4	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	194.282.014	3	37.555.410,00
III	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	Persen	1.530.245.594	20,00	55.549.950,00
5	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.069.751.200	-	-
6	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	273.968.394	-	6.720.000,00
7	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	9.000.000	-	645.000

**DINAS
KESEHATAN
PROVINSI BALI**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7
				K	Rp	K	Rp	
8	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	77.170.300	2,00	
9	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	91.772.000	-	
10	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.583.700	-	
IV	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	Persen	6.379.058.346	12,50	
11	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	484.500.000	3,00	
12	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	5.894.558.346	-	
V	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100	Persen	1.356.771.500	10,00	
13	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44	Unit	515.400.000	-	25.667.400,00
14	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	81.769.500	-	1.232.000,00
15	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	759.602.000	-	-
II	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Cakupan Kepesertaan JKN - Persentase Desa UCI - Persentase Faskes yang Terakreditasi - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan - Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- 98,3 - 97 - 100 - 89 - 96	- Persen - Persen - Persen - Nilai - Persen	29.136.354.690	- 99,87 - 0 - 100 - 87,72 - 12,03	4.249.780.676,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7
				K		Rp	K	Rp	
I	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	Persen	28.850.109.360	25,00	4.220.985.074,00	
16	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4.380.824	Orang	208.365.580	1.095.206,00	19.751.360,00	
17	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Layanan kesehatan pada kondisi kejadian	130.000	Orang	109.857.800	32.500	17.586.560,00	
18	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	198.797.730	-	22.533.246,00	
19	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	Dokumen	204.191.520	-	19.101.920,00	
20	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	Dokumen	109.976.400	-	8.793.280,00	
21	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	88.276.492	-	7.511.082,00	
22	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	Dokumen	2.434.272.498	-	928.996.616,00	
23	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	24.657.838.700	2,00	3.138.131.400	
24	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	112.280.000	-	-	
25	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	399.741.520	-	19.101.920,00	
26	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1	Dokumen	98.582.600	-	19.125.770,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7
				K		Rp	K	Rp	
27	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	150	Paket	37.500.000	5,00	1.250.000,00	
28	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	137.301.520	-	19.101.920,00	
29	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang degan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	53.127.000	-	-	
II	1.02.02.1.04.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	77	Persen	89.529.110	-	10.101.082,00	
30	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	89.529.110	-	10.101.082,00	
III	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi,	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	100	Persen	196.716.220	25,00	18.694.520,00	
31	.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	25	Unit	101.876.540	5,00	9.901.240,00	
32	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	196	Unit	94.839.680	196,00	8.793.280,00	
III	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	76	Persen	232.728.360	82,50	28.370.300,00	
I	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	100	Persen	176.894.460	-	26.812.800,00	
33	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	290000	Orang	176.894.460	-	26.812.800,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7
				K		Rp	K	Rp	
II	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	90	Persen	55.833.900	-	1.557.500,00	
34	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200	Orang	11.520.000	-	-	
35	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	44.313.900	-	1.557.500,00	
IV	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	86	Persen	269.509.970	50,00	36.055.722,00	
I	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100	Persen	184.423.570	-	27.262.442,00	
36	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	40	Sarana	184.423.570	-	27.262.442,00	
II	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100	Persen	85.086.400	-	8.793.280,00	
37	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	20	Sarana	85.086.400	-	8.793.280,00	
V	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	66,67	Persen	464.042.730	-	22.533.246,00	
I	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya dukungan kerjasama mitra potensial/lintas sektor	1	Mitra Potensial	357.317.730	-	22.533.246,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7
				K		Rp	K	Rp	
38	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	357.317.730	-	22.533.246,00	
II	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	77.78	Persen	21.125.000	-	-	
39	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	21.125.000	-	-	
III	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang 80% Rumah Tangganya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7	Kabupaten	85.600.000	-	-	
40	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	85.600.000	-	-	
II	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT				4.935.016.046	-	402.924.010	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
I	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	Nilai	4.639.631.012	-	347.646.436,00	
I	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	Persen	319.350.500	25,00	14.305.000,00	
41	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	17.924.000	-	-	
42	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	128.584.400	-	-	
43	1.02.01.1.06.00042	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	155.458.100	-	12.055.000,00	
44	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	6.134.000	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7
				K		Rp	K	Rp	
45	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	11.250.000	1,00	2.250.000,00	
II	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	Persen	1.174.585.512	25,00	203.667.936,00	
46	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	363.900.000	3,00	51.586.296,00	
47	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	810.685.512	1,00	152.081.640,00	
III	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100	Persen	1.145.695.000	-	-	
48	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit	39.175.000	-	-	
49	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	56.520.000	-	-	
50	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1.050.000.000	-	-	
IV	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	82	Nilai	2.000.000.000	79,11	129.673.500,00	
51	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.000.000.000	1,00	129.673.500,00	
II	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100	Persen	295.385.034	25,00	55.277.574,00	
I	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peserta pelatihan yang lulus sesuai standar	100	Persen	295.385.034	25,00	55.277.574,00	
52	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	150	Orang	295.385.034	150,00	55.277.574,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7
				K	Rp	K	Rp	
III	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa			9.736.301.689		579.694.191,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTI BALI SADHAJIWA
I	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	Nilai	9.541.224.569	-	561.674.671,00
I	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	Persen	492.940.500	25,00	178.948.050,00
53	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	82.895.200	-	-
54	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	Paket	410.045.300	6,00	178.948.050,00
II	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	Persen	1.746.835.086	25,00	336.252.121,00
55	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	644.000.000	9,00	125.635.907,00
56	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	1.102.835.086	15,00	210.616.214,00
III	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100	Persen	345.370.000	25,00	1.843.000,00
57	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	108.100.000	3,00	1.843.000,00
58	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	Unit	144.270.000	3,00	-
59	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	93.000.000	-	-
IV	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali	82	Nilai	6.956.078.983	84,00	44.631.500,00
60	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit	6.956.078.983	1,00	44.631.500,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7
				K	Rp	K	Rp	
II	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89	Nilai	195.077.120	87,72	18.019.520,00
I	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar	70	Persen	195.077.120	20,00	18.019.520,00
61	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	1	Unit	195.077.120	-	18.019.520,00
IV	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD. KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL				6.485.355.390	-	945.234.438,00
I	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	Nilai	3.463.550.570	-	352.018.750,00
I	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	Persen	902.580.120	25,00	150.518.000,00
62	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.015.500	-	-
63	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	651.780.020	1,00	18.250.000,00
64	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	202.695.800	1,00	128.175.000,00
65	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	19.790.800	1,00	3.448.000,00
66	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1.500.000	-	-
67	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	21.798.000	1,00	645.000,00
II	1.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	jasa	1.086.875.510	25,00	191.077.650,00

**UPTD
KESEHATAN
PENGobatan
TRADISIONAL**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7
				K		Rp	K	Rp	
68	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	98.500.000	3,00	15.218.304,00	
69	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	988.375.510	3,00	175.859.346,00	
III	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100	Persen	1.474.094.940	25,00	10.423.100,00	
70	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	unit	263.900.000	3,00	6.033.100,00	
71	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	unit	50.690.000	3,00	4.390.000,00	
72	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1.159.504.940	-	-	
II	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89	Nilai	3.021.804.820	87,72	593.215.688,00	
I	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	3,00	Persen	3.021.804.820	-	593.215.688,00	
73	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	102.880.400	-	18.866.000,00	
74	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	158.690.210	-	28.582.442,00	
75	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	1.017.847.192	-	254.269.870,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7
				K	Rp	K	Rp	
76	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	1.742.387.018	1,00	291.497.376,00
V	1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD BALI MANDARA				264.941.693.514	-	48.189.645.154
I	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	Nilai	210.686.107.309	-	48.189.645.154,00
I	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	Persen	30.686.107.309	3	5.470.812.744,00
77	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	30.686.107.309	3	5.470.812.744,00
II	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Bali Mandara	82	Nilai	180.000.000.000	88,30	42.718.832.410,00
78	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	180.000.000.000	1	42.718.832.410,00
II	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89	Nilai	54.255.586.205	87,72	-
I	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana di rumah sakit	1	Laporan	54.255.586.205	-	-
79	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	Unit	8.277.374.205	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7
				K		Rp	K	Rp	
80	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	3	Unit	45.978.212.000	-	-	RUMAH SAKIT JIWA
VI	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD. RUMAH SAKIT JIWA				54.564.212.278		3.888.119.144,00	
I	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	Nilai	37.904.398.608	-	3.879.479.144,00	
I	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	Persen	11.904.398.608	25,00	2.307.439.031,00	
81	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	1.114.110.402	3,00	226.425.509,00	
82	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	10.790.288.206	3,00	2.081.013.522,00	
II	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa	82	Nilai	26.000.000.000	89,97	1.572.040.113,00	
83	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	26.000.000.000	1,00	1.572.040.113,00	
II	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89	Nilai	16.659.813.670	87,72	8.640.000,00	
I	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana di rumah sakit	1	Laporan	16.659.813.670	-	8.640.000,00	
84	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka pen	1	Unit	16.659.813.670	-	8.640.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7
				K	Rp	K	Rp	
VII	1.02.0.00.0.00.01.0006	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA			90.000.000.000	-	12.527.067.650	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
I	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	Nilai	90.000.000.000	-	12.527.067.650,00
I	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara	82	Nilai	90.000.000.000	85,70	12.527.067.650,00
85	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	90.000.000.000	-	12.527.067.650,00
VIII	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan			10.482.523.866	-	732.352.095	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	Nilai	4.607.580.112	-	547.606.797,00
I	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100	Persen	680.691.200	57,14	204.517.100,00
86	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.575.400	1,00	9.768.000,00
87	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	252.289.300	2,00	6.295.500,00
88	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	408.786.200	5,00	184.948.600,00
89	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	3.720.300	1,00	2.065.000,00
90	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	-	-	-
91	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	4.320.000	1,00	1.440.000,00
II	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100	Persen	906.126.200	-	-
92	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	56.126.200	-	-
93	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	850.000.000	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7
				K	Rp	K	Rp	
III	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai sop	100	Persen	1.898.521.612	25,00	306.197.697,00
94	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.082.000	-	2.600.000,00
95	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	780.000.000	-	85.401.319,00
96	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	1.113.439.612	1,00	218.196.378,00
IV	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100	Persen	1.122.241.100	76,19	36.892.000,00
97	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	40.800.000	1,00	3.887.000,00
98	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	59	Unit	57.000.000	-	-
99	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108	Unit	532.441.100	13,00	18.300.000,00
100	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	492.000.000	1,00	14.705.000,00
II	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89	Nilai	5.874.943.754	87,72	184.745.298,00
I	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan	1	Laporan	4.851.273.960	-	71.314.492,00
101	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	dokumen	360.783.000	-	26.248.000,00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7
				K		Rp	K	Rp	
102	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5	Paket	4.490.490.960	-	45.066.492,00	
II	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi	9	produk	1.023.669.794	2,00	113.430.806,00	
103	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	Dokumen	1.023.669.794	-	113.430.806,00	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)* yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), dan *Spatial* (titik koordinat) lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program kegiatan yang dirancang harus memperhatikan :

1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengacu kepada tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, adapun tujuannya adalah Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan sasarannya adalah Meningkatnya derajat kesehatan manusia. Sedangkan Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Krama Bali
2. Meningkatnya manajemen kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Dokumen Perubahan Renja ini disusun mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025-2026 dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan sampai triwulan I tahun 2025. Perubahan terhadap tujuan, sasaran, dan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025 menggunakan dasar dan memperhatikan :

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi;
4. Solusi terhadap permasalahan di bidang kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2025;

Perubahan rencana program/kegiatan/subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Matrik Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN				732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
1 ,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450,00	669.673.590.802,00	716.945.375.153,00	26.961.006.894,00							727.248.007.344,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	7 Dokumen	7 Dokumen	302.479.600,00	336.035.010,00	97.402.210,00	-205.077.390,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Aparatur		302.479.700,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah</i>	4 Doku men	4 Doku men	205.158.900,00	205.158.900,00	51.666.800,00	-153.492.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			205.159.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3 Lapo ran	3 Lapo ran	97.320.700,00	130.876.110,00	45.735.410,00	-51.585.290,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			97.320.700,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Pers en	100 Pers en	321.946.089.832 ,00	298.910.916.172 ,00	299.367.555.223 ,00	- 22.578.534.609, 00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Aparatur		321.946.089.832 ,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1742 Oran g/ Bula n	1705 Oran g/ Bula n	321.932.607.032 ,00	298.716.634.158 ,00	299.173.273.209 ,00	- 22.759.333.823, 00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PAJAK KENDARAA N BERMOTO R (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PELAYANA N KESEHATA N DI TEMPAT PELAYANA N KESEHATA N LAINNYA YANG SEJENIS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			321.932.607.032 ,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	12 Doku men	12 Doku men	13.482.800,00	194.282.014,00	194.282.014,00	180.799.214,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			13.482.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	-	100 Pers en	4.359.649.194,0 0	4.109.879.914,0 0	4.989.879.114,0 0	630.229.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Aparatur		5.568.974.814,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pake t	1 Pake t	6.922.000,00	8.583.700,00	8.583.700,00	1.661.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			7.044.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	4 Pake t	4 Pake t	1.634.783.200,00	1.069.751.200,00	1.069.751.200,00	-565.032.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.765.198.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Pake t	2 Pake t	231.928.394,00	273.968.394,00	273.968.394,00	42.040.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			234.668.394,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	5 Pake t	5 Pake t	76.630.500,00	77.170.300,00	77.170.300,00	539.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			76.631.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lapo ran	1 Lapo ran	22.500.000,00	22.500.000,00	9.000.000,00	-13.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lapo ran	2 Lapo ran	188.543.000,00	188.318.000,00	91.772.000,00	-96.771.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			188.724.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintah an daerah sesuai SOP</i>	-	100 Pers en	63.323.941.241, 00	54.876.381.983, 00	55.713.414.983, 00	- 7.610.526.258,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Aparatur		64.294.433.685, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Lapo ran	12 Lapo ran	480.000.000,00	484.500.000,00	484.500.000,00	4.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapo ran	12 Lapo ran	9.546.833.440,0 0	5.894.558.346,0 0	5.894.558.346,0 0	3.652.275.094,0 0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			9.650.459.580,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemelihara an Barang Milik Daerah sesuai SOP	100 Pers en	100 Pers en	4.436.777.600,0 0	5.578.172.540,0 0	6.350.072.540,0 0	1.913.294.940,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Aparatur		5.468.801.310,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	44 Unit	584.600.000,00	515.400.000,00	515.400.000,00	-69.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			584.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	78.929.500,00	81.769.500,00	81.769.500,00	2.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			84.190.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	1 Unit	879.602.000,00	893.602.000,00	759.602.000,00	-120.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			879.602.000,00	DINAS KESEHATAN
2 ,	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes yang Terakredita si Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Cakupan Kepesertaa n JKN	-	100 89 96 97 98,3 Pers en Nilai Pers en Pers en	31.663.771.517, 00	110.015.978.059 ,00	113.857.203.159 ,00	31.919.741.616, 00							63.583.513.133, 00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 2.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Pers en	100 Pers en	30.873.449.176,00	33.535.926.174,00	32.895.583.974,00	2.022.134.798,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Masyarakat		29.964.705.946,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana															
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824Orang	4380824Orang	167.893.500,00	267.525.580,00	208.365.580,00	40.472.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			167.894.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk yang Mendapatka n Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 00 Oran g	1300 00 Oran g	61.610.000,00	141.542.800,00	109.857.800,00	48.247.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			61.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Doku men	1 Doku men	153.291.500,00	288.757.730,00	198.797.730,00	45.506.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			302.432.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Doku men	1 Doku men	69.620.000,00	174.231.520,00	137.301.520,00	67.681.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			69.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Doku men	1 Doku men	166.020.000,00	270.631.520,00	204.191.520,00	38.171.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			166.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Doku men	1 Doku men	98.106.200,00	138.072.600,00	109.976.400,00	11.870.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			98.106.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Doku men	1 Doku men	99.960.000,00	140.026.492,00	88.276.492,00	-11.683.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			109.956.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Doku men	3 Doku men	1.422.335.136,0 0	2.536.062.498,0 0	2.434.272.498,0 0	1.011.937.362,0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.172.335.136,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	1 Doku men	0,00	53.127.000,00	53.127.000,00	53.127.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			53.123.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Doku men	12 Doku men	24.633.909.100,00	24.665.908.700,00	24.657.838.700,00	23.929.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			24.633.909.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Surveilans Kesehatan	-	1 Doku men	0,00	112.280.000,00	112.280.000,00	112.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			98.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaaa n Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Doku men	1 Doku men	99.996.000,00	322.771.520,00	399.741.520,00	299.745.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			109.996.040,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.1.02. 0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/ Kota</i>	1 Doku men	1 Doku men	33.770.000,00	115.867.600,00	98.582.600,00	64.812.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			33.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	150 Paket	150 Paket	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			37.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanak an e- Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	77 persen	77 persen	34.749.700,00	105.464.110,00	89.529.110,00	54.779.410,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Masyarakat		34.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.03. 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Sistem Informasi Kesehatan	1 Doku men	1 Doku men	34.749.700,00	105.464.110,00	89.529.110,00	54.779.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			34.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	100 Pers en	100 Pers en	199.999.500,00	298.116.220,00	196.716.220,00	-3.283.280,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Masyarak at		533.025.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.04. 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalika n, Diawasi dan Ditindaklanj uti Perizinanny a	25 Unit	25 Unit	99.999.500,00	150.356.540,00	101.876.540,00	1.877.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			154.101.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.04. 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan															
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	196 Unit	196 Unit	100.000.000,00	147.759.680,00	94.839.680,00	-5.160.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			378.924.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersedia an Tenaga Kesehatan	-	76 Pers en	369.660.800,00	755.220.894,00	571.067.294,00	394.835.200,00							764.496.000,00	
	1.02.0 3.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase perencanaaa n kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	100 perse n	100 perse n	63.798.000,00	201.448.460,00	176.894.460,00	113.096.460,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Sumber Daya Manusia Kesehata n		63.798.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 3.1.01. 0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan															
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2900 0 Oran g	2900 0 Oran g	63.798.000,00	201.448.460,00	176.894.460,00	113.096.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			63.798.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 3.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi</i>	90 perse n 90 Pers en	90 perse n	305.862.800,00	553.772.434,00	394.172.834,00	88.310.034,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Sumber Daya Manusia Kesehata n		700.698.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 3.1.02. 0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan															
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>	200 Oran g	200 Oran g	84.590.000,00	84.590.000,00	11.520.000,00	-73.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			84.590.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 3.1.02. 0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasa n Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.800,00	99.999.400,00	44.313.900,00	-55.685.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			434.822.000,00	DINAS KESEHATAN
4 ,	1.02.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Ketersedia an Obat Esensial	-	86 Pers en	207.230.000,00	389.259.970,00	269.509.970,00	893.600,00							208.123.600,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 4.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100 perse n	100 perse n	108.090.000,00	250.153.570,00	184.423.570,00	76.333.570,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Masyarakat		108.123.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 4.1.01. 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK															
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	40 Sara na	40 Sara na	108.090.000,00	250.153.570,00	184.423.570,00	76.333.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			108.123.600,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 4.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	<i>Persentase Pengendali an dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional</i>	100 Pers en	100 Pers en	99.140.000,00	139.106.400,00	85.086.400,00	-14.053.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Masyarak at		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 4.1.02. 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional															
			<i>Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalika n dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanj ut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional</i>	20 Sara na	20 Sara na	99.140.000,00	139.106.400,00	85.086.400,00	-14.053.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mengemban gkan Desa/Kelur ahan Siaga Aktif Mandiri	66,67 Pers en	66,67 Pers en	433.118.700,00	685.451.330,00	464.042.730,00	1.204.580.300,00							1.637.699.000,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatn ya dukungan kerjasama mitra potensial/lin tas sektor	-	1 Mitra Pote nsial	283.118.700,00	535.451.330,00	357.317.730,00	74.199.030,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Seluruh lapisan masyarak at		948.313.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi															
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberday aan, Penggalang an Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	1 Doku men	1 Doku men	283.118.700,00	535.451.330,00	357.317.730,00	74.199.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			948.313.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Tingkat Daerah Provinsi									pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 5.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang 80% Rumah Tangganya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	7 Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	85.600.000,00	-14.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Masyarakat		611.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 5.1.02. 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	85.600.000,00	-14.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			611.750.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 5.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/ Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	77,78 Pers en	77,78 Pers en	50.000.000,00	50.000.000,00	21.125.000,00	-28.875.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Masyarakat		77.636.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 5.1.03. 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	21.125.000,00	-28.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			77.636.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
		UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT				732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450,00	669.673.590.802,00	716.945.375.153,00	26.961.006.894,00							727.248.007.344,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	4.359.649.194,00	4.109.879.914,00	4.989.879.114,00	630.229.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		5.568.974.814,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.1.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	17.924.000,00	17.924.000,00	17.924.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			6.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	5 Pake t	5 Pake t	128.584.400,00	128.584.400,00	128.584.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			144.107.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pake t	1 Pake t	155.458.100,00	155.458.100,00	155.458.100,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			146.369.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 Pake t	2 Pake t	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			5.205.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lapo ran	1 Lapo ran	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			11.250.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintah an daerah sesuai SOP</i>	100 perse n	100 perse n	63.323.941.241, 00	54.876.381.983, 00	55.713.414.983, 00	- 7.610.526.258,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		64.294.433.685, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Lapo ran	12 Lapo ran	363.900.000,00	363.900.000,00	363.900.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			363.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	3 Lapo ran	1.017.417.780,0 0	810.685.512,00	810.685.512,00	-206.732.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.017.417.780,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaaa n barang milik daerah sesuai SOP	100 Pers en	100 Pers en	4.436.777.600,0 0	5.578.172.540,0 0	6.350.072.540,0 0	1.913.294.940,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		5.468.801.310,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	39.175.000,00	39.175.000,00	39.175.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			39.175.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	42 Unit	93.420.000,00	56.520.000,00	56.520.000,00	-36.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			99.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.050.000.000,0 0	1.050.000.000,0 0	1.050.000.000,0 0	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.050.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesma s	82 Nilai	82 Nilai	304.956.078.983 ,00	304.956.078.983 ,00	347.931.078.983 ,00	42.975.000.000, 00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Seluruh lapisan masyarak at		325.370.489.183 ,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediaka n Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.000.000.000,0 0	2.000.000.000,0 0	2.500.000.000,0 0	500.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			2.914.410.200,0 0	DINAS KESEHATAN
2 ,	1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100 pers en	100 pers en	369.660.800,00	755.220.894,00	571.067.294,00	394.835.200,00							764.496.000,00	
	1.02.0 3.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peserta pelatihan yang lulus sesuai standar	100 perse n	100 perse n	305.862.800,00	553.772.434,00	394.172.834,00	88.310.034,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z). dan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		700.698.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												penyandang disabilitas.					
	1.02.0 3.1.02. 0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan															
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>	150 Oran g	150 Oran g	121.273.000,00	369.183.034,00	295.385.034,00	174.112.034,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			121.286.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00						793.441.839.077 ,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BIDANG KESEHATAN															
1 ,	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	82,5 Nilai	700.287.000.450 ,00	669.673.590.802 ,00	716.945.375.153 ,00	26.961.006.894, 00							727.248.007.344 ,00	
	1.02.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	-	100 Pers en	4.359.649.194,0 0	4.109.879.914,0 0	4.989.879.114,0 0	630.229.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		5.568.974.814,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	4 Pake t	3 Pake t	83.201.920,00	82.895.200,00	82.895.200,00	-306.720,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.1.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	16 Paket	16 Paket	521.754.800,00	410.045.300,00	410.045.300,00	-111.709.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			521.754.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP</i>	100 persen	100 persen	63.323.941.241,00	54.876.381.983,00	55.713.414.983,00	- 7.610.526.258,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		64.294.433.685,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan	36 Laporan	644.000.000,00	644.000.000,00	644.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			644.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	62 Lapo ran	48 Lapo ran	1.331.252.340,0 0	1.102.835.086,0 0	1.102.835.086,0 0	-228.417.254,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.331.252.340,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaaa n barang milik daerah sesuai SOP	100 perse n	100 perse n	4.436.777.600,0 0	5.578.172.540,0 0	6.350.072.540,0 0	1.913.294.940,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		5.468.801.310,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	8 Unit	8 Unit	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			118.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	89 Unit	161.970.000,00	144.270.000,00	144.270.000,00	-17.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			162.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	1 Unit	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			93.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratoriu m Kesehatan Provinsi Bali	-	82 Nilai	304.956.078.983 ,00	304.956.078.983 ,00	347.931.078.983 ,00	42.975.000.000, 00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		325.370.489.183 ,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediaka n Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.956.078.983,0 0	6.956.078.983,0 0	6.956.078.983,0 0	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			6.956.078.983,0 0	DINAS KESEHATAN
2 ,	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	-	89 Nilai	31.663.771.517, 00	110.015.978.059 ,00	113.857.203.159 ,00	31.919.741.616, 00							63.583.513.133, 00	
	1.02.0 2.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya pemeliharaa an alat kesehatan sesuai standar	-	70 Pers en	555.573.141,00	76.076.471.555, 00	80.675.373.855, 00	80.119.800.714, 00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Seluruh lapisan masyarak at		33.051.031.287, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.01. 0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	1 Unit	177.120.000,00	292.517.120,00	195.077.120,00	17.957.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PAJAK ROKOK	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			178.410.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL				732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				732.960.781.467,00	781.519.501.055,00	832.107.198.306,00	99.146.416.839,00							793.441.839.077,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450,00	669.673.590.802,00	716.945.375.153,00	26.961.006.894,00							727.248.007.344,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 persen	100 persen	4.359.649.194,00	4.109.879.914,00	4.989.879.114,00	630.229.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		5.568.974.814,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.1.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pake t	1 Pake t	5.015.500,00	5.015.500,00	5.015.500,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan</i>	12 Pake t	16 Pake t	350.766.420,00	651.780.020,00	651.780.020,00	301.013.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			228.638.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Pake t	2 Pake t	76.295.800,00	202.695.800,00	202.695.800,00	126.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			133.177.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	4 Pake t	3 Pake t	17.978.800,00	19.790.800,00	19.790.800,00	1.812.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			12.318.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lapo ran	2 Lapo ran	34.358.000,00	34.358.000,00	21.798.000,00	-12.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			32.154.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah an daerah sesuai SOP	100 Pers en	100 Pers en	63.323.941.241, 00	54.876.381.983, 00	55.713.414.983, 00	- 7.610.526.258,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		64.294.433.685, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapo ran	12 Lapo ran	98.500.000,00	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			96.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lapo ran	13 Lapo ran	1.996.793.400,0 0	988.375.510,00	988.375.510,00	- 1.008.417.890,0 0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.937.033.720,0 0	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaa n barang milik daerah sesuai SOP</i>	100 perse n	100 perse n	4.436.777.600,0 0	5.578.172.540,0 0	6.350.072.540,0 0	1.913.294.940,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		5.468.801.310,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	3 Unit	7 Unit	57.400.000,00	263.900.000,00	263.900.000,00	206.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			57.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	4 Unit	88.790.000,00	50.690.000,00	50.690.000,00	-38.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			85.518.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	1.159.504.940,0 0	1.159.504.940,0 0	1.129.504.940,0 0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89 Nilai	89 Nilai	31.663.771.517, 00	110.015.978.059 ,00	113.857.203.159 ,00	31.919.741.616, 00							63.583.513.133, 00	
	1.02.0 2.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	3 perse n	3 perse n	30.873.449.176, 00	33.535.926.174, 00	32.895.583.974, 00	2.022.134.798,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		29.964.705.946, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Doku men	1 Doku men	50.533.400,00	122.080.400,00	102.880.400,00	52.347.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			125.120.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.1.02. 0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	78.487.500,00	158.690.210,00	158.690.210,00	80.202.710,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			81.417.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Doku men	1 Doku men	304.318.360,00	1.017.847.192,0 0	1.017.847.192,0 0	713.528.832,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			278.069.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)															
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penangana n Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	2.496.147.680,0 0	1.794.227.018,0 0	1.742.387.018,0 0	-753.760.662,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.056.517.300,0 0	DINAS KESEHATAN
		RSUD BALI MANDARA				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
1 ,	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450 ,00	669.673.590.802 ,00	716.945.375.153 ,00	26.961.006.894, 00							727.248.007.344 ,00	
	1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah an daerah sesuai SOP	100 Pers en	100 Pers en	63.323.941.241, 00	54.876.381.983, 00	55.713.414.983, 00	- 7.610.526.258,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Aparatur		64.294.433.685, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapo ran	12 Lapo ran	32.937.846.599, 00	30.686.107.309, 00	30.686.107.309, 00	- 2.251.739.290,0 0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			33.459.255.883, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara	-	82 Nilai	304.956.078.983 ,00	304.956.078.983 ,00	347.931.078.983 ,00	42.975.000.000, 00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Seluruh lapisan masyarak at		325.370.489.183 ,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediaka n Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	180.000.000.000 ,00	180.000.000.000 ,00	200.000.000.000 ,00	20.000.000.000, 00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			180.000.000.000 ,00	DINAS KESEHATAN
2 ,	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai	89 Nilai	31.663.771.517, 00	110.015.978.059 ,00	113.857.203.159 ,00	31.919.741.616, 00							63.583.513.133, 00	
	1.02.0 2.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Lapo ran	1 Lapo ran	555.573.141,00	76.076.471.555, 00	80.675.373.855, 00	80.119.800.714, 00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Masyarak at		33.051.031.287, 00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.1.01. 0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan															
			Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-	3 Unit	0,00	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00	45.978.212.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN -PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.852.712.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.01. 0026	Pengembangan Rumah Sakit															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarka n kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	1 Unit	0,00	8.277.374.205,0 0	8.277.374.205,0 0	8.277.374.205,0 0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PAJAK ROKOK	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			8.277.374.205,0 0	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT JIWA				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BIDANG KESEHATAN															
1 ,	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450 ,00	669.673.590.802 ,00	716.945.375.153 ,00	26.961.006.894, 00							727.248.007.344 ,00	
	1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Pers en	100 Pers en	63.323.941.241, 00	54.876.381.983, 00	55.713.414.983, 00	- 7.610.526.258,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		64.294.433.685, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapo ran	12 Lapo ran	1.114.110.402,0 0	1.114.110.402,0 0	1.114.110.402,0 0	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			1.114.110.402,0 0	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapo ran	12 Lapo ran	11.290.251.720,00	10.790.288.206,00	10.790.288.206,00	-499.963.514,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			11.290.251.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa	82 Nilai	82 Nilai	304.956.078.983,00	304.956.078.983,00	347.931.078.983,00	42.975.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		325.370.489.183,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.1.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			26.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai	89 Nilai	31.663.771.517,00	110.015.978.059,00	113.857.203.159,00	31.919.741.616,00							63.583.513.133,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 2.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Lapo ran	1 Lapo ran	555.573.141,00	76.076.471.555,00	80.675.373.855,00	80.119.800.714,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Masyarak at		33.051.031.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.01. 0026	Pengembangan Rumah Sakit															
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	1 Unit	0,00	16.677.094.270,00	16.659.813.670,00	16.659.813.670,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN -PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			16.025.000.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
1 ,	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD	-	82 Nilai	700.287.000.450 ,00	669.673.590.802 ,00	716.945.375.153 ,00	26.961.006.894, 00							727.248.007.344 ,00	
	1.02.0 1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara	-	82 Nilai	304.956.078.983 ,00	304.956.078.983 ,00	347.931.078.983 ,00	42.975.000.000, 00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	Seluruh lapisan masyarak at		325.370.489.183 ,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediaka n Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	90.000.000.000, 00	90.000.000.000, 00	93.000.000.000, 00	3.000.000.000,0 0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			90.000.000.000, 00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00	
1 ,	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450 ,00	669.673.590.802 ,00	716.945.375.153 ,00	26.961.006.894, 00							727.248.007.344 ,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 perse n	100 perse n	4.359.649.194,0 0	4.109.879.914,0 0	4.989.879.114,0 0	630.229.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		5.568.974.814,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pake t	1 Pake t	12.592.400,00	11.575.400,00	11.575.400,00	-1.017.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			12.732.940,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	8 Pake t	8 Pake t	298.335.460,00	252.289.300,00	252.289.300,00	-46.046.160,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			277.518.230,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Pake t	6 Pake t	407.686.200,00	408.786.200,00	408.786.200,00	1.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			449.664.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 Pake t	3 Pake t	3.970.300,00	3.970.300,00	3.720.300,00	-250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			4.367.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lapo ran	1 Lapo ran	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	-11.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			12.870.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lapo ran	1 Lapo ran	53.836.000,00	53.836.000,00	4.320.000,00	-49.516.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			59.219.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	-	100 Pers en	961.984.000,00	906.126.200,00	2.495.972.100,0 0	1.533.988.100,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		4.296.738.820,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.07. 0005	Pengadaan Mebel															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Pake t	1 Pake t	111.984.000,00	56.126.200,00	56.126.200,00	-55.857.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			61.738.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			935.000.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintah an daerah sesuai SOP</i>	100 perse n	100 perse n	63.323.941.241, 00	54.876.381.983, 00	55.713.414.983, 00	- 7.610.526.258,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		64.294.433.685, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Lapo ran	1 Lapo ran	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			5.590.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapo ran	1 Lapo ran	780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangase m, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			858.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	2 Lapo ran	1.717.953.560,0 0	1.113.439.612,0 0	1.113.439.612,0 0	-604.513.948,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.096.382.060,0 0	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaa n barang milik daerah sesuai SOP</i>	100 perse n	100 perse n	4.436.777.600,0 0	5.578.172.540,0 0	6.350.072.540,0 0	1.913.294.940,0 0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		5.468.801.310,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a</i>	2 Unit	2 Unit	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			40.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0005	Pemeliharaan Mebel															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	59 Unit	59 Unit	75.480.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-18.480.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangase m, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			62.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	151 Unit	108 Unit	566.511.100,00	532.441.100,00	532.441.100,00	-34.070.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangase m, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			585.685.210,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	6 Unit	6 Unit	489.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangase m, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			541.200.000,00	DINAS KESEHATAN
2 ,	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89 Nilai	89 Nilai	31.663.771.517, 00	110.015.978.059 ,00	113.857.203.159 ,00	31.919.741.616, 00							63.583.513.133, 00	
	1.02.0 2.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratoriu m, dan alkes yang diadakan	1 Lapo ran	1 Lapo ran	555.573.141,00	76.076.471.555, 00	80.675.373.855, 00	80.119.800.714, 00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	ASN dan Non ASN		33.051.031.287, 00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.1.01. 0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan															
			<i>Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>	1 Doku men	1 Doku men	195.000.000,00	360.783.000,00	360.783.000,00	165.783.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			214.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.01. 0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	5 Paket	183.453.141,00	4.490.490.960,00	4.490.490.960,00	4.307.037.819,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			503.035.082,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi	9 Produk	9 Produk	30.873.449.176,00	33.535.926.174,00	32.895.583.974,00	2.022.134.798,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	ASN dan Non ASN		29.964.705.946,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.02. 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	9 Doku men	2 Doku men	899.950.800,00	1.178.775.794,0 0	1.023.669.794,0 0	123.718.994,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangase m, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.308.529.470,0 0	DINAS KESEHATAN	
		RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00								793.441.839.077 ,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				732.960.781.467 ,00	781.519.501.055 ,00	832.107.198.306 ,00	99.146.416.839, 00							793.441.839.077 ,00		
1 ,	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	82,5 Nilai	700.287.000.450 ,00	669.673.590.802 ,00	716.945.375.153 ,00	26.961.006.894, 00							727.248.007.344 ,00		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	-	100 perse n	4.359.649.194,0 0	4.109.879.914,0 0	4.989.879.114,0 0	630.229.920,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	-		5.568.974.814,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	-	4 Pake t	0,00	0,00	992.955.200,00	992.955.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.051.178.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Lapo ran	0,00	0,00	71.116.000,00	71.116.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	-	100 perse n	961.984.000,00	906.126.200,00	2.495.972.100,0 0	1.533.988.100,0 0			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	-		4.296.738.820,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	471.980.900,00	471.980.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			1.000.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.07. 0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Pake t	0,00	0,00	217.865.000,00	217.865.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			2.000.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah an daerah sesuai SOP	-	100 perse n	63.323.941.241, 00	54.876.381.983, 00	55.713.414.983, 00	- 7.610.526.258,0 0			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	-		64.294.433.685, 00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	1 Lapo ran	0,00	0,00	250.280.000,00	250.280.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			250.280.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			yang Disediakan														
	1.02.0 1.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Lapo ran	0,00	0,00	586.753.000,00	586.753.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	4.436.777.600,0 0	5.578.172.540,0 0	6.350.072.540,0 0	1.913.294.940,0 0			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	-		5.468.801.310,0 0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	-	3 Unit	0,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	31 Unit	0,00	0,00	221.900.000,00	221.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	-	3 Unit	0,00	0,00	630.000.000,00	630.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSU Dharma Yadya	-	1 Unit Kerja	304.956.078.983 ,00	304.956.078.983 ,00	347.931.078.983 ,00	42.975.000.000, 00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	-		325.370.489.183 ,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.1.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediaka n Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	0,00	19.475.000.000, 00	19.475.000.000, 00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN DARI BLUD	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			19.500.000.000, 00	DINAS KESEHATAN
2 ,	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	-	89 Nilai	31.663.771.517, 00	110.015.978.059 ,00	113.857.203.159 ,00	31.919.741.616, 00							63.583.513.133, 00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 2.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar</i>	-	50 Pers en	555.573.141,00	76.076.471.555,00	80.675.373.855,00	80.119.800.714,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	-		33.051.031.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.01. 0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan															
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>	-	16 Unit	0,00	0,00	1.112.792.100,00	1.112.792.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.1.01. 0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	-	1 Pake t	0,00	0,00	3.600.830.800,00	3.600.830.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan			3.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3 ,	1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersedia an Tenaga Kesehatan	-	76 Pers en	369.660.800,00	755.220.894,00	571.067.294,00	394.835.200,00							764.496.000,00	
	1.02.0 3.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti pelatihan	-	100 %	305.862.800,00	553.772.434,00	394.172.834,00	88.310.034,00			-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan	-		700.698.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 3.1.02. 0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan															
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	4 Oran g	0,00	0,00	42.953.900,00	42.953.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagaker jaan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN

BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2025 yang berpedoman dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, maka dapat dijadikan acuan bagi seluruh Unit Kerja/Bidang yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program, kegiatan/sub kegiatan 1 (satu) tahun ke depan. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan 2025 memuat rencana kebijakan serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kesehatan yang merupakan penjabaran tahunan rencana kerja Provinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan di tahun 2025; 2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali; 3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Pemerintah Provinsi Bali, keberadaan Perubahan Renja Dinas Kesehatan diintegrasikan dengan rancangan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan (RKA Dinkes).

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk kegiatan tahun 2025. Semoga upaya Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2025 dalam melaksanakan urusan kesehatan di Provinsi Bali dapat lebih terarah dan terukur.



PUPRKIM

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bali**
dispuprkim.baliprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *asung kertha wara nugraha*-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 serta dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026, sehingga hasil pelaksanaan pembangunan dibidang infrastruktur dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan tersebut akan dapat dicapai, apabila dalam pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan pembangunan infrastruktur mempunyai acuan yang jelas serta mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja perubahan ini belum sempurna, untuk itu masukan dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan, sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam hal penyediaan infrastruktur yang memadai dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 09 Juli 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali



Nusakti Yasa Wedha. ST.,MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671001 199703 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Dengan telah diterbitkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka penyajian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah wajib mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud dan dalam uraian berikut akan disajikan Pedoman Ringkas Penyajian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah salah satu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana Renja merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global namun tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semakin berkembangnya paradigma baru dalam kehidupan sosial politik, ekonomi di masyarakat, menuntut adanya perubahan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan, menuju sistem pemerintahan yang baik dalam

artian berdaya guna, berhasil guna, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta penegakan demokrasi dan keadilan (*Good Governance*).

Tuntutan cita-cita luhur tersebut akan dapat diwujudkan, apabila seluruh jajaran aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan memiliki akuntabilitas kinerja yang baik dalam arti arah kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai rencana, maksud, tujuan yang jelas dan terarah, sesuai legalitas kewenangan, memiliki indikator sasaran yang terukur, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dalam arti bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pembangunan di bidang infrastruktur merupakan penunjang di seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang meliputi pemenuhan irigasi yang menunjang ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat, penyediaan jalan yang mantap untuk menunjang kelancaran arus transportasi/distribusi barang dan jasa.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebagai Dinas Teknis melaksanakan 3 (tiga) Urusan Wajib. Adapun 3 (tiga) urusan wajib tersebut terdiri dari: 2 (Dua) Urusan Wajib Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu: 1) Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 2) Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan 1 (Satu) Urusan Wajib Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu: Urusan Pertanahan. Adapun isu – isu strategis yang berkembang dalam 3 (tiga) urusan wajib yang diampu antara lain :

- a. Belum terpenuhinya target kondisi dan kapasitas infrastruktur pekerjaan umum;
- b. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan sarana penunjang ke-PU-an;
- c. Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
- d. Belum optimalnya tertib pengaturan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang.;
- e. Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- f. Belum Tersedianya *Database* Pertanahan Yang Handal.

Telah digariskan oleh Pemerintah Pusat bahwa apa yang menjadi Visi-Misi Daerah harus selaras dengan Visi-Misi Pembangunan Nasional. Pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; (2)

mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antar daerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri, meningkatkan akses informasi kepada masyarakat dengan memberi hak informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, arah Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah yang digariskan oleh pemerintah pusat, dan bila dijabarkan lebih rinci sesuai karakteristik daerah akan ditekankan pada aspek-aspek yang sesuai dengan 5 (lima) Bidang Prioritas Pembangunan Bali yaitu: (1) Bidang Pangan, Sandang dan Papan; (2) Bidang Kesehatan dan Pendidikan; (3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; (4) Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan (5) Bidang Pariwisata. Kelima bidang prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik diseluruh kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan dapat mempercepat tercapainya 5 (Lima) Bidang Prioritas Pembangunan Bali dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi terutama potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan atau di pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah Provinsi Bali.

Infrastruktur merupakan motor penggerak (*engine of economic growth*) pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong bagi kesejahteraan penduduk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar yang semakin meningkat, seiring dengan percepatan pertumbuhan penduduk. Perkembangan Kepariwisata di Bali yang telah berkembang demikian pesat dengan menjadikan Bali sebagai pusat bisnis, perdagangan dan kebudayaan haruslah diimbangi pula dengan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang layak dan memadai, sehingga selain untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan infrastruktur juga dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Bali yang secara langsung telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali.

Hal ini sesuai dengan kebijakan pengembangan koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dalam WPS (Wilayah Pengembangan Strategis) dimana dalam mendukung perspektif nasional, Provinsi Bali merupakan pintu gerbang kegiatan utama pariwisata di Indonesia, memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas (infrastruktur) untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi utama pariwisata.

Bahwa pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada, dimana jaringan prasarana dan sarana dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional, sehingga pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk di kawasan perdesaan.

Saat ini disadari, bahwa isu-isu penyediaan kebutuhan infrastruktur telah menjadi isu prioritas yang harus ditangani yang memerlukan sinergisitas dalam penyediaannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Mengembangkan prasarana dan sarana publik yang memadai terutama pada wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara wilayah Bali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara;
2. Menyelaraskan konsep program instansi-instansi terkait (dalam tata ruang dan lingkungan hidup) menyangkut : Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kependudukan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Pertanian, Kelautan, Perkebunan, Ke-PU-an (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya), dengan mengikutsertakan Subak dan Desa Pakraman;
3. Mengimplementasikan tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan peraturan/perda tata ruang dan peruntukannya, didukung dengan kesungguhan operasional pengendalian dan menindak pelanggarannya;

4. Melestarikan daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai) daerah perlindungan jurang;
5. Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang, karena banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga proporsi pemanfaatan ruang optimal dan kelestarian manfaat mantap berkelanjutan dalam keseimbangan dinamika perubahan;
6. Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), guna memayungi kebijakan kabupaten/kota dan mencegah kesemrawutan dan tumpang tindih, disertai dengan konsistensi dari aparat dalam implementasinya.

Untuk memenuhi tuntutan tugas dan fungsi tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (2-58/2023));
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 ini adalah agar tersusunnya rencana program dan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 ini mengacu pada Pasal 131 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 11 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a). Renstra Perangkat Daerah; dan
- b). Renja Perangkat Daerah.

Sementara itu dalam pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat daerah diatur dalam pasal 125 s/d 143 dengan Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi:

- a) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- c) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d) Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- e) Penetapan Renja Perangkat Daerah

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2020-2022 secara umum akan dijelaskan pada tabel dibawah ini, dimana dari target capaian keuangan 100% pada tahun 2023 tercapai 90.21% dan capaian fisik tercapai 96.38%. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain: terbitnya Surat Edaran Gubernur Nomor 5232 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 yang menyebabkan terjadinya skenario pembayaran sehingga banyak paket pekerjaan Tahun Anggaran

2023 akan dibayarkan di tahun anggaran 2024 dan beberapa paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun kendala lainnya yang dihadapi pada tahun anggaran 2023 di Bidang Cipta Karya antara lain sebagai berikut Pengadaan Lost Furniture Interior Kios di Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu yang ada berpotensi kemungkinan tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut, persertifikatan Tanah Rumah Negara Gol. II tidak dapat dilaksanakan karena masih melengkapi berbagai administrasi pendukung yang belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2023. Adapun upaya dalam mengatasi kendala di atas yaitu menganggarkan kembali pada TA. 2024 sebesar nilai pekerjaan yang belum terbayarkan pada TA. 2023 mengingat paket pekerjaan tersebut secara keberlanjutan harus diselesaikan.

Kendala yang dihadapi Bidang Bina Marga pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut adanya perubahan status jalan nasional dan jalan kabupaten/kota menjadi status jalan provinsi mengakibatkan meningkatnya target capaian sasaran strategis Program Penyelenggaraan Jalan di Provinsi Bali sebesar 62,01 Km (semula sebesar 743,34 Km menjadi sebesar 805,35 Km). Dengan bertambah panjang status Jalan Provinsi maka keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin yang teralokasi mengakibatkan semakin tidak optimalnya pemeliharaan rutin jalan yang bisa dilaksanakan sehingga perlu adanya tambahan anggaran pada tahun-tahun berikutnya, saluran drainase jalan banyak juga yang berfungsi sebagai saluran irigasi serta masyarakat masih banyak yang membuang sampah ke saluran drainase jalan sehingga kerap menyebabkan banjir. Demikian juga banyak saluran pembuangan yang dipersempit bahkan ditutup/dialihfungsikan akibat pengembangan pemukiman, sehingga air di badan jalan tidak dapat dialirkan dan menyebabkan genangan pada badan jalan, penanaman pohon dilakukan pada bahu jalan yang merupakan Ruang Manfaat Jalan, sehingga menyulitkan dalam pengembangan jalan serta terdapat akar pohon yang merusak struktur jalan dan saluran drainase jalan. Jalan menjadi bergelombang dan berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan/pejalan kaki serta saluran menjadi tidak berfungsi, dan pesatnya perkembangan pusat kegiatan masyarakat dan perumahan permukiman yang menuntut penyediaan fasilitas yang memadai seperti air bersih, listrik, dan internet, termasuk pemasangan papan nama/reklame, namun karena keterbatasan ruang, jaringan utilitas tersebut ditempatkan pada Ruang Milik Jalan/di badan jalan.

Pelaksanaan pekerjaan pengembalian kondisi atas pemasangan utilitas tersebut seringkali tidak sempurna dan menyebabkan penurunan kondisi jalan. Upaya dalam mengatasi kendala di atas adalah mengusulkan penambahan anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan dan mengusahakan sumber pendanaan selain APBD, pemisahan antara saluran irigasi dan saluran drainase jalan, melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait untuk membatasi bahkan meniadakan penanaman pohon di bahu jalan, dan lebih selektif dalam penerbitan Rekomendasi Teknis untuk perijinan dan lebih mengintensifkan pengawasan pekerjaan pengembalian kondisi.

Kendala pada bidang Perumahan adalah Belum teridentifikasinya kebutuhan lapangan (kerusakan terkait PSU kewenangan provinsi yang di usulkan oleh kabupaten/kota), tidak lengkapnya data pendukung dokumen PSU permukiman (SPK, Laporan Progres Pekerjaan, *As Built Drawing*, *Shop Drawing*, Dokumentasi), dan anggaran yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target dan tidak terupdatenya SK Kumuh di beberapa kabupaten/kota. Adapun upaya dalam mengatasi kendala di atas yaitu menerapkan skala prioritas kawasan kumuh dan koordinasi update SK Kumuh terbaru kabupaten/kota dan peningkatan anggaran serta peningkatan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kendala dalam pelaksanaan Program Penatagunaan Tanah adalah Data terkait pemanfaatan Tanah Kewenangan Provinsi tidak lengkap. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu menerapkan skala prioritas kawasan kumuh dan koordinasi update SK Kumuh terbaru kabupaten/kota dan melakukan pendataan di masing-masing kabupaten/kota. Secara detail Hasil Evaluasi Kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel be

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DINAS									
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	85	85	85	100%	85	14.16	16.66%
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	14 dokumen	13 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	15 dokumen	0	0
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan		7 dokumen						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan		6 dokumen						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen		4 laporan	4 laporan	100%	7 laporan	0	0.00%
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16.66%	16.66%
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	178 orang/bulan	150 orang	188 Orang/Bulan	188 Orang/Bulan	100%	178 Orang/ Bulan	178 Orang/ Bulan	16.66%
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	7 Layanan	18 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	0	0
1.03.01.1.06.0001	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Tahun						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0.00%
1.03.01.1.06.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor		1 Tahun						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	4 paket	0	0.00%
1.03.01.1.06.0004	Sub Kegiatan: Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah ketersediaan sarana upakara keagamaan		1 Tahun						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0.00%
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan		1 Tahun						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	3 paket	0	0.00%
1.03.01.1.06.0006	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran		1 Tahun						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0	0.00%
1.03.01.1.06.0008	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah ketersediaan makanan dan minuman		850 orang						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.1.06.0009	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah		1 Tahun						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	0	0.00%
1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	0	0
1.03.01.1.07.0006	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mic Wireless Conference; Pengadaan Panel Pompa Air; Pengadaan TV Lainnya		3 Set; 1 Paket; 1 Set						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit		9 Unit; 1 Paket	9 Unit; 1 Paket	100%	15 unit	0	0.00%
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	4 Layanan	3 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	100%	4 Layanan	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000		300 Lembar						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah belanja tagihan telepon, tagihan air, dan tagihan listrik		1 Tahun						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	1 laporan	8%
1.03.01.1.08.0003	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ketersediaan hari besar yang tertangani		11 Hari Besar						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	0	0.00%
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	belanja tagihan DSDP dan belanja angkutan sampah; jumlah layanan kebersihan kantor		1 Tahun; 1 Tahun						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100%	3 Layanan	0	0
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara : roda 4 dan roda 2		28 Unit						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		39 Unit	39 Unit	100%	36 unit	0	0.00%
1.03.01.1.09.0006	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		119 Unit						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit		119 unit	119 unit	100%	119 unit	0	0.00%
1.03.01.1.09.0009	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara		7 Unit						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 unit	7 unit	100%	7 unit	0	0.00%
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	82.04%	77.96%	80.27%	80.27%	100.00%	81.18%	0.00%	0.00%
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Keluaran : Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14 D.I	14 D.I	14 D.I	14 D.I	14 D.I	14 D.I	0	0
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditangani dengan rehabilitasi		3398 meter						
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,2 Km		11.54 KM	11.54 KM	100%	5.269 KM	0	0.00%
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara		14 D.I						
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	172.972 km		172.972 KM	172.972 KM	100%	172.972 KM	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku		1 Dokumen						
		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	3 Dokumen	0	0.00%
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	10 Dokumen							
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48.74%	49.00%	48.50%	48.50%	100%	48.63%	0.00%	0.00%
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	6 unit	5 Prasarana SDA	5 Prasarana SDA	5 Prasarana SDA	100%	5 Prasarana SDA	0	0
1.03.02.1.01.0003	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.02.2.01.0120	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai						6 Dokumen	0	0.00%
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	14 Dokumen							
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya								
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	3 dokumen					1 Dokumen	0	0.00%
1.03.02.1.01.0009	Sub Kegiatan: Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,159 Km	5 Prasarana SDA	0.26563 KM	0.26563 KM	100%	0,26563 KM	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 03.02.1.01.0120	Sub Kegiatan: Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 unit							
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara; Jumlah prasarana SDA yang dipelihara (saluran pembuang)		4 Embung, 4362 m						
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 unit		5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	0	0.00%
1.03.02.1.01.0096	Sub Kegiatan: Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun		5 Prasarana SDA						
		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,87 Km					0.17 KM	0	0.00%
1.03.02.1.01.0082	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara								
		Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.215 km							
1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi Sungai		5,3452 Ha						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman		92.00%						
		Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95,5%%		93.00%	93.00%	100%	95%	0%	0%
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Keluaran : Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM		5 SPAM	5 SPAM	100.00%	5 SPAM	0.00%	0.00%
1.03.03.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan		1 Paket						
		Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM			3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM						2 dokumen	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen							
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	15 Liter/Detik					10 Liter/Detik	0	95%
1.03.03.1.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional			2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
1.03.03.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun		2 Paket						
		Kapasitas Pembangunan SPAM Regional			5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	100%			
1.03.03.1.01.05	Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional			230 SR	230 SR	100%			
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	92.00%	89.79%	89.95%	89.95%	100.00%	90.90%	0.00%	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Keluaran : Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	4200 SR	4200 SR	4200 SR	4200 SR	100.00%	4200 SR	0.00%	0.00%
1.03.05.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun			3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	0	0.00%
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen							
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	76.8 m3/hari							
1.03.05.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Akses layanan air limbah		1 paket						
		Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat			74 Rumah Tangga	74 Rumah Tangga	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.05.1.01.05	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	75%	72%	74.00%	74.00%	100.00%	75%	0.45%	75%
1.03.09.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	17 Kawasan	27 Bangunan	23 Bangunan	23 Bangunan	100.00%	19 Kawasan	0	0
1.03.09.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun sesuai ketentuan		12 dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun			13 Dokumen	13 Dokumen	100%			
1.03.09.1.01.0009	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	15 Dokumen							
1.03.09.1.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen laporan supervisi pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		23 dokumen						
		Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			15 Kawasan	15 Kawasan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.09.1.01.0010	Sub Kegiatan: Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	17 kawasan							
1.03.09.1.01.03	Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun		43 paket						
		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			32 Kawasan	26 Kawasan	81.25%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.09.1.01.0008	Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	17 Kawasan					5 kawasan	0.45%	75.00%
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan air minum layak	75.00%							
1.03.07.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	285 SR							
1.03.07.1.01.0031	Sub Kegiatan: Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	285 SR							
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	82.65%	79.95%	78.67%	74.64%	94.88%	78.67%	74.64%	94.88%
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Keluaran : Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	649,89 Km	743.34 Km	743.34 Km	601.14 Km	80.87%	593,88 Km	0.00%	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.10.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		8 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	5 Dokumen	0	0.00%
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8 Dokumen							
	Sub Kegiatan: Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		3 Kabupaten/ Kota	-	-				
1.03.10.1.01.0044	Sub Kegiatan: Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen						
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan		2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0.00%
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	805,35 Km							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.10.1.01.0042	Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,26 Km	1 Ruas Jalan	1 (satu) ruas jalan	1 (satu) ruas jalan	100%			
1.03.10.1.01.06	Sub Kegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar			9.59 KM	9.59 KM	100%			
1.03.10.1.01.0040	Sub Kegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	52,31 Km					9,59 Km	9,59 Km	100%
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10,71 Km		-	-		0,20 Km	0	0.00%
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		2.27 Km						
		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			-	-		2,15 Km	0.00	0%
1.03.10.1.01.0038	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		4.3 Km	21.04 KM	11.498 KM	54.65%	2,04 Km	0	0.00%
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	9,38 Km							
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		743.34 Km	743.34 KM	601.14 KM	80.87%	800,61 Km	0	0.00%
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	743,66 Km							
1.03.10.1.01.21	Sub Kegiatan: Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana		11 Kegiatan	2.5 KM	0.72 KM	29%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.10.1.01.23	Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		3 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%	5 Dokumen	0	0.00%
1.03.10.1.01.0024	Sub Kegiatan: Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	64,42 Km							
1.03.10.1.01.0028	Sub Kegiatan: Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			-	-		1 Dokumen	0	0.00%
		Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Panjang Jalan yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	805,35 Km							
1.03.10.1.01.29	Sub Kegiatan: Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran		1 Buah	-	-				
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat		16.51%						
		Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	25.90%		19.64%	19.64%	100.00%	22.77%	0.00%	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.11.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Keluaran : Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi		100%	100%	100%	100%			
1.03.11.1.02.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi		3 Kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Keluaran : Jumlah sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan rapat pembahasan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	5 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	0 Dokumen	0%
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	50 Paket Pekerjaan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100%
1.03.11.1.03.0006	Sub Kegiatan: Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	0 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.11.1.03.0008	Sub Kegiatan: Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen							
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	15 Kegiatan	3 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	0	0
1.03.11.1.01.04	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota		70 Orang; 3 kegiatan						
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan			205 Orang	205 Orang	100%			
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan: Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	390 orang					190 Orang	0 Dokumen	22.77%
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	94.34%					93.62%	93.02%	93.02%
		Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang		94.00%	95%	95%	100%			
1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	1 Perda	2 Dokumen	-	-		1 Perda		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Rinci Tata Ruang Provinsi									
1.03.12.1.01.0001	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi		3 Paket	-	-				
1.03.12.1.01.0005	Sub Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi					1 Publikasi	0	0.00%
1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Keluaran : Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	1	11%
		Keluaran : Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	100%		100%	100%	100%			
1.03.12.1.02.03	Sub Kegiatan: Sub Kegiatan: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota			9 Dokumen	9 Dokumen	100%			
1.03.12.1.02.0006	Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen					1 Dokumen	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan RDTR Kabupaten/Kota									
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Keluaran : Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi		100%	100%	100%	100%			
		Keluaran : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
1.03.12.1.03.0004	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan					1 Laporan	0	0.00%
1.03.12.1.03.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.03.12.1.03.0006	Sub Kegiatan: Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen		-	-		1 Dokumen	0	0.00%
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Keluaran : Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi									
1.03.12.1.04.0014	Sub Kegiatan: Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen							
1.03.12.1.04.0007	Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen							
1.03.12.1.04.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali		1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
1.03.12.1.04.0014	Sub Kegiatan: Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						1 Dokumen	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.12.1.04.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali		1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
1.03.12.1.04.0006	Sub Kegiatan : Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat						1 Dokumen	0	0.00%
1.04	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan/ Rehabilitasi/ Relokasi Rumah Korban Bencana Provinsi dan Dampak Program Pemerintah Daerah Provinsi		70%	71%	71%	100%			
		Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100%					100%	13%	13%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Keluaran : Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	14.49%
1.04.02.1.01.01	Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai		1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi			1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
1.04.02.1.01.0008	Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi						1 Dokumen	1 dokumen	56%
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen							
1.04.02.1.01.0006	Sub Kegiatan: Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah	Jumlah data perumahan kewenangan Provinsi yang disusun		1 Dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Susun dan Rumah Khusus									
		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	11.30%
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Keluaran : Jumlah rumah layak huni akibat relokasi program provinsi yang dibangun		2 Unit						
		Keluaran : Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun	1 Paket		1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 paket	11.78%
1.04.02.1.03.05	Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun		2 Unit						
		Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun			1 Unit Rumah	1 Unit Rumah				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.02.1.03.0006	Sub Kegiatan: Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi RelokasiProgram Provinsi yang DilaksanakanOperasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah					1 Unit Rumah	1 unit rumah	11.78%
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	4.89%					5.94%	0.10%	0.10%
1.04.03.1.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Keluaran : Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	6.77%					7.82%	0.10%	0.10%
1.04.03.1.02.0003	Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	30 Unit Rumah					95 Unit Rumah	0 rumah	0.09%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.03.1.02.0014	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	1,88 Ha					1,68 Ha	0.252 Ha	0.15%
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kewenangan Provinsi		45.00%						
		Persentase luasan kawasan permukiman kumuh			6.62%	0.81%	12%			
		Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	71.00%					70.00%	1.36%	1.36%
1.04.05.1.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Keluaran : Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum		8.50%						
		Keluaran : Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	7.82%		8.50%	8.21%	96.59%	2.50%	1.36%	1.36%
1.04.05.1.01.0001	Sub Kegiatan: Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Permukiman yang disusun sesuai ketentuan		1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Dokumen PSU Permukiman		1 Dokumen						
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	100.00%	1 Lokasi	1 Lokasi	0.01%
1.04.05.1.01.0003	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Penyediaan PSU Permukiman		1 Dokumen						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasidan Sinkronisasi Dalam RangkaPenyediaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum Permukiman	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	0	0
2.1	URUSAN PERTANAHAN									
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan						9.72 Ha	0%	0%
2.10.05.1.01	Kegiatan: Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan						1 Laporan	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
2.10.05.1.01.0003	Sub Kegiatan: Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan						1 Laporan	0	0
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase data informasi pertanahan yang handal	60%	40%	50%	33.33%	67%	30%	0%	0%
2.10.10.1.01	Kegiatan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparanya lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0
2.10.10.1.01.0001	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi		1 Dokumen						
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.10.06	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	100%					100%	0%	0%
2.10.06.1.01	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Keluaran: Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi	1 dokumen					1 dokumen	0	0
2.10.06.1.01.0003	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara					1 Berita Acara	0	0%
B	UPTD BPP									
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan	85	85	85 Nilai	85 Nilai	100%	85 Nilai	0	0
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase layanan administrasi perkantoran		100%						
1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Tahun						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase layanan administrasi perkantoran		100%						
		Keluaran : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	0	0
1.03.01.1.06.0001	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Tahun						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	0.00	0%
1.03.01.1.06.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		1 Tahun						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	0.00	0%
1.03.01.1.06.0004	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sarana upakara keagamaan		1 Tahun						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	0.00	0%
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan		1 Tahun						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	0.00	0%
1.03.01.1.06.0006	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran		1 Tahun						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0.00	0%
1.03.01.1.06.0008	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Ketersediaan makanan dan minuman		1 Tahun						
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0.00	0%
1.03.01.1.06.0009	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah		1 Tahun						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	0.00	0%
1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan		1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	0	0
1.03.01.1.07.0006	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		36 Unit	36 Unit	100%	2 Unit	0.00	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.1.07.0005	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Paket					5 Paket	0.00	0%
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani		100%						
		Keluaran : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	1 tahun		1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	0	0
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000		100 lembar						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0.00	0%
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan air, listrik, internet, dan telepon		1 Tahun						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0.00	0%
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor		1 Tahun						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	0.00	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani		100%						
		Keluaran : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	1 tahun		1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	0	0
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas		8 Unit						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	0.00	0%
1.03.01.1.09.0006	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		28 Unit						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		26 Unit	26 Unit	100%	26 Unit	0.00	0%
1.03.01.1.09.0009	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor		1 Tahun						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	0.00	0%
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100%	100%	95%	95%	100%	100%	17%	17%
1.03.11.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan (UPTD.BPP)		1 Tahun						
1.03.11.1.02.01	Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan, dan peralatan pendukung alat berat		2 Paket						
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan (UPTD.BPP)	100%		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.11.1.03.02	Sub Kegiatan: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi			12 Laporan	12 Laporan	100%			
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Laporan					12 Paket Pekerjaan	2 Paket Pekerjaan	17%
C	UPTD PAM									
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum		85						
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%						
1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM		11 orang						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.50%		93.00%	93.00%	100.00%	95%	95%	95%
		Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota		42.20%						
		Persentase Serapan Air Curah SPAM dikelola Provinsi oleh Kabupaten/Kota	-		43.04%	43.04%	100.00%	-		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan	-	7 Layanan	1 Tahun	1 Tahun	100.00%	-		
		Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 unit		-	-		5 unit	5 Unit	100%
1.03.03.1.01.09	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah SPAM Regional Yang dikelola dengan baik		5 SPAM						
		Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	-		5 Unit	5 Unit	100%	-		
1.03.03.1.01.0019	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) yang Dioperasikandan Dipelihara	5 Unit					5 Unit	5 Unit	100%
D	UPTD PAL									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah		85						
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%						
1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM		12 orang						
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	8.29%	8.29%
1.03.05.1.01	Kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Keluaran : Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik		1 SPALD						
		Keluaran : Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1 SPALD		1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	8.29%
1.03.05.1.01.09	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Layanan Air Limbah/Sambungan Rumah (SR) pada SPALD Regional		15000 SR						
		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara			1 Unit	1 Unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Bulan Pebruari)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.05.1.01.0018	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara						1 Unit		8.29%
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2023 sesuai dengan yang sudah dijelaskan diatas tercapai 90.21%. Secara umum pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Bali sudah berjalan lancar. Apabila ditinjau berdasarkan indikator program yang sudah ditentukan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2022 - 2024 serta proyeksi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2025	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			85	85	85	85	85	14.16	85	
2	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan			85	85	85	85	85	14.16	85	
3	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum			85	-	-	85	-	-	-	
4	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah			85	-	-	85	-	-	-	
5	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik			77.96%	80.27%	81.18%	77.96%	80.27%	0.00%	82.04%	
6	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik			49.00%	48.50%	48.63%	49.00%	48.50%	0.00%	48.74%	
7	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman			92.00%	-	-	92.00%	-	-	-	
8	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak				93.00%	95.00%	-	93.00%	0.00%	95.50%	
9	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak			89.79%	89.95%	90.90%	89.79%	89.95%	0.00%	92.00%	
10	Persentase bangunan gedung dan			72.00%	74.00%	75%	72%	74.00%	0.00%	75%	

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2025	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
	lingkungannya dalam kondisi baik										
11	Persentase cakupan pelayanan air minum layak			-	-	-	-	-	-	75.00%	
12	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap			80.21%	78.67%	78.67%	79.95%	74.64%	74.64%	82.65%	
13	Persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat			16.51%	-	-	16.51%	-	-	-	
14	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat			-	19.64%	22.77%	-	19.64%	-	25.90%	
15	Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang			94.00%	95.00%	-	94.00%	95.00%	-	-	
16	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang			-	-	93.62%	-	-	93.02%	94.34%	
17	Persentase Penyediaan/ Rehabilitasi/ Relokasi Rumah Korban Bencana Provinsi dan Dampak Program Pemerintah Daerah Provinsi			70.00%	71.00%	-	70.00%	71.00%	-	-	
18	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi			-	-	100%	-	-	12.78%	100%	
19	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh			-	-	5.94%	-	-	0.10%	4.89%	
20	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kewenangan Provinsi			45.00%	-	-	45.00%	-	-	-	

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2025	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
21	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh			-	6.62%	-	-	0.81%	-	-	
22	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU			-	-	70.00%	-	-	1.36%	71.00%	
23	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan			-	-	9.72 Ha	-	-	-	-	
24	Persentase data informasi pertanahan yang handal			40%	50.00%	30.00%	40%	33.33%	-	60%	
25	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi			-	-	100%	-	-	-	100%	
26	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi			100%	95.00%	100%	100%	95.00%	16.67%	100%	
27	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak			-	93.00%	95%	-	93.00%	95.00%	95.50%	
28	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota			41.00%	-	-	42.20%	-	-	-	
29	Persentase Serapan Air Curah SPAM dikelola Provinsi oleh Kabupaten/Kota			-	43.04%	-	-	43.04%	-	-	
30	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.			100%	100%	100%	100%	100%	8.29%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Dari analisa perkembangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa isu-isu penting pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali, sebagai berikut:

- ❖ Belum terpenuhinya target kondisi dan kapasitas Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- ❖ Belum optimalnya akses dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan sarana penunjang ke-PU-an;
- ❖ Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
- ❖ Belum optimalnya tertib pengaturan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang;
- ❖ Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- ❖ Belum tersedianya Database Pertanahan yang Handal.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan bahwa Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) Urusan yaitu: Urusan Absolut, Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Konkuren. Dimana Urusan Konkuren dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebagai Dinas Teknis melaksanakan 3 (tiga) Urusan Wajib. Adapun 3 (tiga) urusan wajib tersebut terdiri dari: 2 (Dua) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu: 1) Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 2) Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan 1 (Satu) Urusan Wajib Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu: Urusan Pertanahan. Dalam menjalankan 3 (tiga) urusan diatas sesuai dengan perkembangan tentunya banyak permasalahan yang dihadapi. Diantara permasalahan yang dihadapi diatas dapat dijabarkan sesuai dengan urusan masing-masing yaitu:

1. Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibagi dalam beberapa bidang urusan prioritas, yaitu: Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Ke-Ciptakarya-an dan Bidang Penataan Ruang. Adapun

permasalahan yang muncul pada bidang urusan prioritas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah sebagai berikut:

I. Bidang Irigasi/Sumber Daya Air

- a. Kerusakan pantai akibat adanya abrasi;
- b. Belum meratanya ketersediaan air baku di Bali;
- c. Kinerja jaringan dan prasarana irigasi yang belum optimal.

II. Bidang Jalan / Bina Marga

- a. Perubahan status Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten/Kota menjadi jalan provinsi mempengaruhi capaian target sasaran strategis program penyelenggaraan jalan di Provinsi Bali;
- b. Lingkup pekerjaan meliputi pengendalian tanaman, normalisasi saluran, *patching* serta Pekerjaan Preventif (campuran aspal panas, laburan aspal buras, laburan aspal burda, dan sealing) pada ruas jalan yang belum mendapatkan penanganan efektif. Pekerjaan Preventif ini akan sangat mempengaruhi penurunan nilai kemantapan Jalan Provinsi.

III. Bidang Ke-Ciptakarya-an dan UPTD. PAL

- a. Pemanfaatan Kapasitas SPAM Yang belum Maksimal (Capaian Tahun 2023 Masih 43,04%);
- b. Belum maksimalnya Jumlah Sambungan Rumah pelanggan air limbah domestik di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung;
- c. Kualitas Baku Mutu Air Belum Sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga perlu dilakukan peningkatan IPAL;
- d. Tingkat kehandalan operasional dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat belum maksimal.

IV. Bidang Penataan Ruang

Belum optimalnya kinerja aspek pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.

2. Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
- b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU) di Kawasan kumuh kewenangan Provinsi Bali;

- c. Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk.

3. Permasalahan Urusan Pertanahan

Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di daerah.

2.4 **Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 sampai saat ini telah disusun berupa rancangan awal RKPD, dan telah mendapat masukan dari berbagai sumber dan *stakeholder* dalam acara konsultasi publik serta menerima beberapa masukan dari perwakilan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Selain unsur tersebut, pada tahapan ini dari unsur legislative juga sudah memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran dewan, dimana semuanya bersumber dari evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023. Pada intinya, apapun yang dikerjakan oleh perangkat daerah di semua tingkatan, muaranya adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk tahun ini, sebelum Musrenbang Provinsi Bali akan ditambahkan agenda yaitu dengan penyusunan Pra RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) agar RKPD yang disusun anggaran indikatifnya sudah mendekati anggaran definitif, sehingga tidak jauh beda bila dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil *review* terhadap program/kegiatan yang dituangkan dalam Rancangan Awal RKPD, dan setelah disandingkan dengan kebutuhan program/kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, maka dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD sudah mengadopsi dan sudah sama dengan yang tertuang dalam program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Sesuai dengan review terhadap rancangan akhir RKPD bahwa Penataan ruang wilayah Provinsi Bali telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali mengatur mengenai struktur ruang (pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang).

Sedangkan jalan dan jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran transportasi darat. Total panjang jalan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali berdasarkan data BPS tahun 2023 adalah 8.702,80 Km

dimana terdiri dari Jalan kewenangan nasional (negara) sepanjang 589,64 Km, Jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 805,35 Km, dan jalan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sepanjang 7.308,81 Km.

Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Status Jalan/Road Status			
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah
Jembrana	72,91	29,37	1 003,74	1 106,02
Tabanan	75,34	155,65	872,00	1 102,99
Badung	54,12	63,64	809,59	927,35
Gianyar	66,56	88,85	556,98	712,39
Klungkung	30,82	12,69	464,96	508,47
Bangli	12,40	167,37	999,00	1 178,77
Karangasem	91,24	128,56	1 202,59	1 421,39
Buleleng	146,61	106,28	949,82	1 202,71
Denpasar	39,64	52,94	450,13	542,71
Jumlah / Total :	589,64	805,35	7 308,81	8 702,80

Sumber: BPS Bali 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi penekanan kabupaten/kota untuk turut mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Bali. Adapun tanggapan dan usulan tersebut diantaranya meliputi:

1. *Crosscutting* Dinas PUPRKIM Provinsi dengan instansi Pemerintah Provinsi Bali lainnya serta instansi vertikal sudah selaras baik dari segi administrasi maupun saat terlaksananya kegiatan khususnya pada infrastruktur jalan. Terkait dokumen perencanaan kab./kota, setiap tahun kab./kota khususnya Kota Denpasar selalu mengundang Dinas PUPRKIM Provinsi Bali dalam acara Forum Perangkat Daerah untuk menyelaraskan dokumen perencanaan kab./kota dengan dokumen perencanaan pemerintah provinsi;
2. Terkait 3 (tiga) usulan paket pekerjaan hasil Musrenbang Desa seperti Pengurugan dan Penataan Tukad Gerombong, Perbaikan Senderan/Tanggul

Tukad Guming, Perbaikan Senderan/Tanggul Tukad Bugbugan, sungai yang ada di Bali secara kewenangan pada BWS Bali Penida sehingga Dinas PUPRKIM selalu berkoordinasi dengan BWS Bali Penida terkait penanganan sungai apalagi yang mencakup adat dan bangunan seperti berbatasan dengan pura, sekolah, setra;

3. Terkait usulan Peningkatan Jalan Surapati dan Peningkatan Jalan Hayam Wuruk sudah menjadi atensi dan masuk dalam rencana kegiatan tahun 2025. Khusus pemeliharaan trotoar dimasukkan secara gelondongan dengan nama paket Pemeliharaan Trotoar Jalan pada Ruas Jalan Provinsi yang mencakup seluruh pemeliharaan trotoar yang menjadi kewenangan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali. Usulan Peningkatan Jalan Cokroaminoto-Sp. Cokroaminoto-Gn. Galunggung dan Sp. Cokroaminoto-Maruti akan dicross cek kembali untuk menghitung lebih tepatnya panjang jalan yang masuk dalam kondisi mantap dan tidak mantap;
4. Penanganan Jalan Rendang - Bts. Kota Amlapura menjadi prioritas dari Bina Marga Dinas PUPRKIM Provinsi Bali dan sebelum benar-benar dilaksanakan untuk tahun 2024 sementara difokuskan ke pemeliharaan rutin dengan melakukan *patching* di beberapa ruas jalan yang rusak;
5. Terkait persampahan pasti berhubungan dengan TPA Regional dan untuk TPS 3R harus berkoordinasi ke DKLH;
6. PPAT terkait e-MRT masih dalam tahap 1 yaitu studi pertimbangan pembagian 4 (empat) jalur yaitu Hangtuh (sampai ke barat), dari dan ke Teuku Umar, dari Ubud menuju Central Parkir Kuta dan apabila berlanjut sampai akhir akan menyebar ke wilayah Sarbagita. Mengenai pencapaian SPM dan penanganan TPA bisa diusulkan ke dana BKK;
7. Koordinasi antar OPD dan instansi vertikal terkait sangat diperlukan dan diharapkan berjalan dengan baik. Khusus persampahan, untuk pembangunan TPA Regional dan TPA Provinsi menjadi kewenangan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, untuk operasional, pelaksanaan serta pengelolaannya menjadi kewenangan DKLH Provinsi Bali;
8. *Crosscutting* Dinas PUPRKIM Provinsi Bali dengan Dinas Perhubungan sudah terintegrasi dengan baik mulai dari ruas jalan Provinsi, fasilitas keselamatan jalan Provinsi dan berkolaborasi dalam proyek-proyek strategis;

9. Pada tahun 2023, dilaksanakan Penataan Kawasan Kumuh di Desa Candikuning tetapi karena anggarannya sangat besar maka dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan Penataan Kawasan Kumuh di Desa Candikuning pada tahun 2024 dan tahap kedua Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Candikuning pada tahun 2025. Penanganan rumah layak huni yang menjadi kewenangan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali dan merupakan bagian dari penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional dimana salah satunya adalah Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur, maka dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan dapat membantu permasalahan infrastruktur yang terjadi di Provinsi Bali. Masalah konektivitas terutama infrastruktur jalan merupakan agenda kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional untuk mencapai keseimbangan antar wilayah, mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dicapai melalui, sasaran strategis: (1) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan (2) Meningkatnya kemantapan jalan nasional. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program (a) Menurunnya waktu tempuh pada koridor utama dari 2,7 Jam per 100 Km menjadi 2,2 Jam per 100 Km; (b) Meningkatnya pelayanan jalan nasional dari 101 Milyar Kendaraan/Km menjadi 133 Milyar Kendaraan/Km; dan (c) Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategi sebagai berikut: Preservasi jalan nasional sepanjang 47.017 Km; Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km; Pembangunan jembatan, sepanjang 29.859 M; Penggantian jembatan sepanjang 19.951 M; Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km dan dukungan jalan daerah untuk pengembangan kawasan.

Sementara untuk penanganan permasalahan air minum dan sanitasi di daerah, Kementerian PUPR telah merencanakan agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

Dengan sasaran program yaitu: (1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum aman bagi masyarakat; (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak; (3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

- a. Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi utama:

- ❖ Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khusus 1.500 Liter/Detik.
- ❖ Pengembangan SPAM PDAM terfasilitasi untuk 174 PDAM dan 522 kawasan MBR, dan pengembangan SPAM Non PDAM terfasilitasi untuk 50 Non PDAM dan 106 Kawasan MBR.
- ❖ Pembinaan penyelenggaraan SPAM/penyehatan sebanyak 13 Laporan.
- ❖ Pendampingan restrukturisasi utang pada 75 PDAM.
- ❖ Fasilitasi Opsi pembiayaan SPAM (perbankan) sebanyak 113 Laporan.
- ❖ Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS dan B to B) sebanyak 112 Laporan

Sementara itu untuk peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar, melalui strategi:

- ❖ Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12 Kota/Kab, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200 Kawasan, penambahan IPAL skala kawasan sebanyak 200 Kawasan, serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT di 222 Kota/Kab.
- ❖ Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan di 170 Kota/Kab.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) memenuhi kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Attainable/ Achievable, Relevant, Time Bound – Continuously Improve*).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, maka pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan meliputi: 2 (Dua) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 1 (Satu) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu: Urusan Pertanahan. Dari 3 (tiga) urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, maka dapat dirumuskan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, meliputi:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni Kewenangan Provinsi;
2. Terwujudnya Kelestarian Alam dan Layanan Infrastruktur Dasar Berkualitas Kewenangan Provinsi;
3. Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Pendukung Transportasi di Provinsi Bali;

4. Terwujudnya Pembangunan Bali yang Harmonis sesuai dengan Penataan Ruang dan Daya Dukung Lingkungan.

Berdasarkan tujuan diatas maka dapat dirumuskan sasaran yang hendak dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dimana sasaran dari tujuan tersebut terdiri dari 6 (enam) sasaran yaitu;

1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni kewenangan Provinsi;
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kewenangan Provinsi;
3. Meningkatnya kondisi dan keamanan sempadan pantai dan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Bali;
4. Meningkatnya cakupan layanan air minum aman dan sanitasi layak kewenangan Provinsi;
5. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Provinsi;
6. Meningkatnya pembangunan yang berbasis wilayah dan lingkungan.

Secara rinci dari tujuan yang sudah dijabarkan diatas dapat uraikan sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti dibawah ini:

A. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni Kewenangan Provinsi

Secara rinci tujuan ini dijabarkan kembali melalui beberapa indikator tujuan yaitu sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi;
2. Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh;
3. Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU.

B. Terwujudnya Kelestarian Alam dan Layanan Infrastruktur Dasar Berkualitas Kewenangan Provinsi

Secara rinci tujuan ini dijabarkan kembali melalui beberapa indikator tujuan yaitu sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Persentase cakupan layanan Air Minum Layak;
2. Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak;
3. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah;

- C. Meningkatnya kapasitas infrastruktur pendukung transportasi di Provinsi Bali
Secara rinci tujuan ini dijabarkan kembali melalui 1 (satu) indikator tujuan yaitu:
1. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap.
- D. Terwujudnya pembangunan Bali yang harmonis sesuai dengan penataan ruang dan daya dukung lingkungan
Secara rinci tujuan ini dijabarkan kembali melalui beberapa indikator tujuan yaitu sebanyak 8 (delapan) indikator yaitu:
1. Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
 2. Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik;
 3. Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik;
 4. Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
 5. Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat;
 6. Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi;
 7. Persentase data informasi pertanahan yang handal;
 8. Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah disusun berdasarkan SIPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan pemetaan program serta kegiatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri diatas diamanatkan bahwa; Perencanaan Pembangunan Daerah, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD serta untuk program dan kegiatan yang belum tercover dalam Permendagri tersebut diharapkan agar mengusulkan untuk ditambah pada Permendagri diatas. Data dan informasi diatas mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumberdaya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi menggambarkan capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Gambaran capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Capaian kinerja pembangunan Daerah memperhatikan indikator yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdiri atas 6 Bidang, 1 Sekretariat dan 3 UPTD dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Bidang Sumber Daya Air;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Bina Konstruksi;
6. Bidang Tata Ruang;
7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. UPTD. Pengelolaan Air Minum;
9. UPTD. Pengelolaan Air Limbah; dan
10. UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam Tahun 2025 melaksanakan 18 Program dan 33 Kegiatan serta 85 Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - I. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - II. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - III. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 9. Fasilitas Kunjungan Tamu
 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - IV. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan:
 11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 12. Pengadaan Mebel
 - V. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- VI. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan:
 - 17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - VII. Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
 Sub Kegiatan:
 - 20. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 21. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 22. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - VIII. Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan:
 - 23. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - 24. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
 - 25. Pembangunan Tanggul Sungai
 - 26. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya
 - 27. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya
 - 28. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - 29. Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - IX. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan:

30. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
31. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - X. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

Sub Kegiatan:

 32. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 33. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - XI. Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

 34. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 35. Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 36. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
6. Program Pengembangan Permukiman
 - XII. Kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

 37. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
7. Program Penyelenggaraan Jalan

- XIII. Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- Sub Kegiatan:
38. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 39. Pengelolaan Leger Jalan
 40. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 41. pelebaran Jalan Menuju Standar
 42. Rehabilitasi Jalan
 43. Pemeliharaan Rutin Jalan
 44. Pemeliharaan Berkala Jalan
 45. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
 46. Pembangunan Jalan
 47. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- XIV. Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan:
48. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
- XV. Kegiatan: Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Sub Kegiatan:
49. Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi
 50. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
- XVI. Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- Sub Kegiatan:
51. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- XVII. Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
- Sub Kegiatan:

- 52. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
- XVIII. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - Sub Kegiatan:
 - 53. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
- XIX. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan:
 - 54. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 55. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
- XX. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan:
 - 56. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
 - 57. Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan
- 10. Program Pengembangan Perumahan
 - XXI. Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Sub Kegiatan:
 - 58. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
 - 59. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
 - XXII. Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Sub Kegiatan:
 - 60. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
- 11. Program Kawasan Permukiman
 - XXIII. Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Sub Kegiatan:

- 61. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - 62. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
- 12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - XXIV. Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Sub Kegiatan:
 - 63. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - 64. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 - 65. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
- 13. Program Penatagunaan Tanah
 - XXV. Kegiatan: Perencanaan penggunaan tanah yang hamparnya lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan:
 - 66. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
- 14. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - XXVI. Kegiatan: Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan:
 - 67. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 15. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - XXVII. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan:
 - 68. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
- 16. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

XXVIII. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

Sub Kegiatan:

- 69. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

17. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD.BPP)

XXIX. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 70. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 71. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 72. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 73. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 74. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 75. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 76. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

XXX. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- 77. Pengadaan Mebel
- 78. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

XXXI. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 79. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 80. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 81. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

XXXII. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 82. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 83. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 84. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

18. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

XXXIII. Kegiatan: Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sub Kegiatan:

85. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

Secara rinci rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif sebagai usulan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Bali yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disesuaikan dengan pagu tahap perencanaan RKPD Perubahan Tahun 2025 serta Perkiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

TABEL T-C. 33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	DINAS				420,298,774,922.20				683,139,230,780.00
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				473,804,484,614.20				687,282,002,960.00
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	7	85	55,311,398,129.00			85	36,197,841,808.00
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu		14 dokumen	646,726,604.00			14 dokumen	1,349,785,446.00
		Hasil: Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi		100%				100%	
1.03.01.1.01.000 1	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	8 Dokumen	373,006,372.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Dokumen	748,242,237.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.01.1.01.000 7	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	6 Laporan	273,720,232.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Laporan	601,543,209.00
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	50,066,016,070.00			100%	28,311,315,507.00
		Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran		100%				100%	
1.03.01.1.02.000 1	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	178 orang/bulan	50,066,016,070.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)		178 orang/bulan	28,311,315,507.00
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		7 Layanan	494,280,720.00			7 Layanan	859,072,700.00
		Hasil: persentase layanan administrasi perkantoran		100%				100%	
1.03.01.1.06.000 1	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	1 Paket	22,172,600.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	24,207,800.00
1.03.01.1.06.000 2	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	3 Paket	57,485,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	60,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
1.03.01.1.06.000 4	Sub Kegiatan: Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	1 Paket	50,820,120.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	57,500,000.00
1.03.01.1.06.000 5	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	1 Paket	66,734,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	85,009,600.00
1.03.01.1.06.000 6	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	2 Dokumen	15,816,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	16,260,000.00
1.03.01.1.06.000 8	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	12 Laporan	52,250,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	52,500,000.00
1.03.01.1.06.000 9	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	10 Laporan	229,003,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	464,820,000.00
1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 Layanan	544,881,300.00			1 Layanan	652,100,200.00
		Hasil : persentase layanan administrasi perkantoran		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.01.1.07.000 6	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	17 unit	462,242,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 unit	279,781,800.00
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel		Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin		82,638,800.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		4 Layanan	1,042,456,040.00			4 Layanan	1,178,632,100.00
		Hasil: persentase layanan administrasi perkantoran		100%				100%	
1.03.01.1.08.000 1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	1 Laporan	7,190,600.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	3,600,000.00
1.03.01.1.08.000 2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	12 Laporan	436,600,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	562,000,000.00
1.03.01.1.08.000 3	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	11 Laporan	49,770,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Laporan	100,000,000.00
1.03.01.1.08.000 4	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	12 Laporan	548,895,440.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	377,932,100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kantor yang Disediakan							
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		3 Layanan	2,517,037,394.00			3 Layanan	3,846,935,855.00
		Hasil: persentase layanan administrasi perkantoran		100%				100%	
1.03.01.1.09.000 2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	28 Unit	1,568,132,460.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28 Unit	1,564,610,700.00
1.03.01.1.09.000 6	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	119 Unit	192,696,230.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		119 Unit	205,846,420.00
1.03.01.1.09.000 9	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Kota Denpasar, Kec. Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin	7 Unit	756,208,704.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Unit	1,298,890,795.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik		48.74 %	27,568,323,054.00			81.18%	64,760,209,387.00
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Keluaran : Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya		14 D.I	14,964,681,834.00			14 D.I	20,025,956,995.00
		Hasil :Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanan		14 DI				14 DI	
1.03.02.1.02.001 4	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Bangli, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana	4,981 KM	9,575,918,330.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Km	11,308,400,688.00
1.03.02.1.02.002 1	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Bangli, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab, Badung, Kab. Klungkung, Kota Denpasar	172.972 km	3,799,225,634.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		172.972 km	5,359,424,371.00
1.03.02.1.02.003 2	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kab.Klungkung, Kab.Jembrana,Kab.Taba nan,Kab.Bangli,Kab.Gia nyar,Kab.Buleleng,Kab. Badung	9 Dokumen	1,589,537,870.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dokumen	3,358,131,936.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani		6 unit	12,603,641,220.00			5 unit	44,734,252,392.00
		Hasil: persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik		48.74%				48.87%	
1.03.02.1.01.000 9	Sub Kegiatan: Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Kab. Tabanan, Kab. Gianyar	0 Km	0.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0,138 Km	9,061,090,951.00
1.03.02.1.01.008 2	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Karangasem, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan	0.215 km	217,073,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0.215 km	2,697,183,700.00
1.03.02.1.01.009 6	Sub Kegiatan: Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Kab. Karangasem, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng	0,16 KM	11,293,200,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0,470 Km	14,143,795,837.00
1.03.02.1.01.010 5	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Karangasem, Kab. Buleleng	5 unit	310,353,300.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 unit	3,304,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03.02.1.01.0120	Sub Kegiatan: Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kab. Karangasem	0 unit	0.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	11,061,090,951.00
1.03.02.1.01.012 1	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kab.Karangasem	2 Dokumen	210,236,200.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	461,090,953.00
1.03.02.2.01.012 2	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Kab.Badung,Kab.Bulele ng,Kab.Karangasem,Ka b.Tabanan,Kab.Jembra na,Kab.Gianyar	5 Dokumen	572,778,220.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Dokumen	4,006,000,000.00
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak		95,5%	31,402,440,709.00			93%	40,225,000,000.00
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Keluaran : Meningkatnya kapasitas layanan SPAM		5 SPAM	31,402,440,709.00			5 SPAM	40,225,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Lintas Kabupaten/Kota								
		Hasil: persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali		95,5%%				93%	
1.03.03.1.01.001 5	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	9 Kabupaten/Kota se Provinsi Bali	3 Dokumen	1,859,117,454.00	APBD		4 Dokumen	1,679,199,232.00
1.03.03.1.01.001 7	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) LintasKabupaten/Kot a yang dibangun	Kabupaten Buleleng	15 Liter/Detik	29,543,323,255.00	APBD		15 Liter/Detik	6,395,800,768.00
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak		92.00%	3,425,956,952.00			95.1%	16,412,639,203.00
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Keluaran : Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani		4200 SR	3,425,956,952.00			4200 SR	16,412,639,203.00
		Hasil: Persentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali		92.00%				95.1%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.05.1.01.001 5	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kab. Badung dan Kota Denpasar	2 Dokumen	258,946,400.00	APBD		1 Dokumen	105,000,000.00
1.03.05.1.01.001 3	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	Kab. Badung dan Kota Denpasar	76.8 m3/hari	3,167010,552.00	APBD		76.8 m3/hari	2,682,090,000.00
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik		76 %	164,638,342,300.00			75%	283,093,946,800.00
1.03.09.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik		8 Kawasan	1164,638,342,300.00			19 Kawasan	283,093,946,800.00
		Hasil: Persentase Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dibangun dapat berfungsi dengan baik		75%				75%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.09.1.01.000 8	Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kota Denpasar Kab. Bangli Kab. Tabanan Kab. Karangasem	17 Kawasan	233,261,555,800.00	APBD		21 Kawasan	269,093,946,800.00
1.03.09.1.01.000 9	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	9 Kabupaten/Kota se Provinsi Bali	15 Dokumen	6,376,788,500.00	APBD		21 Dokumen	5,000,000,000.00
1.03.09.1.01.001 0	Sub Kegiatan: Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kota Denpasar Kab. Bangli Kab. Tabanan Kab. Karangasem	17 kawasan	0	APBD		21 Dokumen	9,000,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan air minum layak		75.00%	2,762,994,300.00			75%	2,815,000,000.00
1.03.07.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional		285 SR	2,762,994,300.00			19 Kawasan	2,815,000,000.00
		Hasil: Meningkatnya kapasitas layanan SPAM		19 Kawasan				75%	
1.03.07.1.01.003 1	Sub Kegiatan: Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di KawasanStrategis Provinsi	Kab. Buleleng	285 SR	2,762,994,300.00	APBD		290 SR	2,815,000,000.00
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap		82.65%	149,152,544,485.00			85.27%	231,175,383,200.00
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Keluaran : Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap		649,89 Km	149,152,544,485.00			637,21 Km	231,175,383,200.00
		Hasil : persentase terlaksananya pekerjaan jalan dan jembatan		100.00%				100.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.10.1.01.002 4	Sub Kegiatan: Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	Kab. Bangli; Kab. Gianyar; Kab. Tabanan; Kab. Karangasem; Kab. Buleleng; Kab. Badung; Kota Denpasar	64,42 Km	0	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)		6 Dokumen	7,625,724,000.00
1.03.10.1.01.002 8	Sub Kegiatan: Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Panjang Jalan yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem	805,35 Km	79,206,000.00	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)		1 Dokumen	200,000,000.00
1.03.10.1.01.003 0	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem	10,71 Km	16,726,643,413.00	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)		4,20 Km	26,412,000,000.00
1.03.10.1.01.003 1	Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			58,369,753,120.00			15,54 Km	34,217,659,200.00
1.03.10.1.01.003 3	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem	743,66 Km	25,538,155,276.00	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)		805,35 Km	39,112,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.10.1.01.003 8	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Denpasar; Kab. Bangli	9,38 Km	21,962,734,461.00	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)		12,02 Km	62,504,000,000.00
1.03.10.1.01.004 0	Sub Kegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Kab. Karangasem; Kab. Gianyar; Kab. Badung; Kab. Tabanan; Kab. Bangli	52,31 Km	16,246,134,607.00	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)			20,000,000,000.00
1.03.10.1.01.004 1	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem	8 Dokumen	8,409,202,000.00	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)		8 Dokumen	6,604,000,000.00
1.03.10.1.01.004 2	Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kab. Bangli	0,26 Km	0	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)		3,40 Km	32,100,000,000.00
1.03.10.1.01.004 3	Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem	805,35 Km	1,720,715,608.00	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)		1 Dokumen	1,900,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.10.1.01.004 4	Sub Kegiatan: Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem	1 Dokumen	100,000,000.00	Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)		1 Dokumen	500,000,000.00
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat		25.90%	1,251,891,912.00			22.77%	3,743,185,694.00
1.03.11.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Keluaran : Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi			-			3 Kegiatan	50,000,000.00
		Hasil: Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi						100%	
1.03.11.1.02.000 8	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan						100%	50,000,000.00
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Keluaran : Jumlah sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan		5 Kegiatan	432,461,690.00			5 Kegiatan	2,612,890,154.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		jasa konstruksi dan rapat pembahasan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi							
		Hasil: Peningkatan Pemahaman pemangku kepentingan jakon dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap peraturan perundang-undangan jasa konstruksi		100%				100%	
1.03.11.1.03.0008	Sub Kegiatan: Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	kota Denpasar, Kec. Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod	1 Dokumen	240,946,150.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Kegiatan	297,910,580.00
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Provinsi Bali	50 Paket Pekerjaan	191,515,540.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Paket Pekerjaan	295,808,856.00
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa		11 Kegiatan	819,430,222.00			12 Kegiatan	1,080,295,540.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Konstruksi di 9 kab/kota							
		Hasil: Persentase tenaga ahli yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian Kerja)		15%				15%	
1.03.11.1.01.001 4	Sub Kegiatan: Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	kota Denpasar, Kec. Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod	390 orang	819,430,222.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		360 Orang	1,080,295,540.00
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang		94.34%	1,488,214,952.00			96.24%	2,441,001,568.00
		Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang							
1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan		1 Perda	59,292,100.00			1 Perda	284,226,141.00
		Hasil :persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.12.1.01.000 5	Sub Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	9 Kabupaten Kota di Provinsi Bali	1 Publikasi	59,292,100.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Publikasi	284,226,141.00
1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Keluaran : Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi		9 Dokumen	702,511,870.00			9 Dokumen	607,629,933.00
		Hasil :Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
1.03.12.1.02.000 6	Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	9 Kabupaten Kota di Provinsi Bali	1 Dokumen	702,511,870.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	607,629,933.00
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi		1 Dokumen	335,639,550.00			100%	755,834,523.00
		Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.12.1.03.000 4	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	9 Kabupaten Kota di Provinsi Bali	1 Laporan	296,306,950.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	471,608,382.00
1.03.12.1.03.000 6	Sub Kegiatan: Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	9 Kabupaten Kota di Provinsi Bali	1 Dokumen	39,332,600.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	284,226,141.00
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali		2 Dokumen	390,771,432.00			2 Dokumen	793,310,971.00
		Keluaran : Persentase Meningkatnya Tertib Tata Ruang							
		Hasil :persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang		100%				100%	
1.03.12.1.04.001 4	Sub Kegiatan: Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	2 Kabupaten Kota di Provinsi Bali	1 Dokumen	250,550,632.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	434,131,933.00
1.03.12.1.04.000 7	Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	9 Kabupaten Kota di Provinsi Bali	1 Dokumen	140,220,800.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	359,179,038.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.04	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				9,667,688,430.00				6,417,795,300.00
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi		100%	1,838,837,380.00			100%	1,722,710,600.00
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Keluaran : Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan		1 Paket	281,619,450.00			1 Paket	323,704,400.00
		Hasil: Persentase ketersediaan database perumahan Kewenangan Provinsi		100%				100%	
1.04.02.1.01.000 8	Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Provinsi Bali	1 Dokumen	111,749,700.00	PAD		1 Dokumen	26,473,700.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.04.02.1.01.000 6	Sub Kegiatan: Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kab. Jemberana	1 Dokumen	169,869,750.00	PAD		1 Dokumen	297,230,700.00
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Keluaran : umlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun		1 Paket	1,557,217,930.00			1 Paket	1,399,006,200.00
		Hasil: Persentase rumah pasca bencana dan relokasi proyek pemerintah provinsi yang tertangani		100.00%				100.00%	
1.04.02.1.03.000 6	Sub Kegiatan: Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kota Denpasar	1 Unit Rumah	1,557,217,930.00	PAD		1 Unit Rumah	1,399,006,200.00
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh		4.89%	6,523,090,300.00			5.94%	3,061,760,000.00
1.04.03.1.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai	Keluaran : Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum		6.77%	6,523,090,300.00			7.82%	3,061,760,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	(PSU) Pada Kawasan Permukiman							
		Hasil: persentase Jumlah PSU Permukiman yang dibangun pada kawasan kumuh provinsi		6.77%				7.82%	
1.04.03.1.02.000 3	Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Kab. Bangli dan Kab. Buleleng	30 Unit Rumah	5,531,654,300.00	PAD		30 Unit Rumah	1,582,560,000.00
1.04.03.1.02.001 4	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Kab. Tabanan	1,88 Ha	991,436,000.00	PAD		2,66 Ha	1,479,200,000.00
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh						5.94%	1,633,324,700.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU		71.00%	1,305,760,750.00				1,633,324,700.00
1.04.05.1.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Keluaran : Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman		7.82%	1,305,760,750.00			7.82%	1,633,324,700.00
		Hasil: persentase Jumlah PSU Pemukiman yang dibangun pada kawasan kumuh provinsi		7.82%				7.82%	
1.04.05.1.01.000 1	Sub Kegiatan: Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kab. Karangasem	1 Dokumen	8,518,400.00	PAD		1 Dokumen	131,612,000.00
1.04.05.1.01.000 2	Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Kab. Karangasem	1 Lokasi	1,255,283,350.00	PAD		1 Lokasi	1,446,190,700.00
1.04.05.1.01.000 3	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan	Provinsi Bali	1 Laporan	41,959,000.00	PAD		1 Laporan	55,522,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	dan Utilitas Umum Permukiman	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman							
2.1	URUSAN PERTANAHAN				6,121,179,700.00				307,195,700.00
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan		1,23 Ha	5,882,758,000.00				
2.10.05.1.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan. Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah poran penyelesaian permasalahan ganti kerugian tanah untuk pembangunan		1 Laporan	5,882,758,000.00				
2.10.05.1.01.000 1	Sub Kegiatan: Penyelesaian Maslaah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	Kab. Bangli, Kab. Gianyar	1 Laporan	5,882,758,000.00	PAD			
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase data informasi pertanahan yang handal		60%	207,200,000.00			60%	270,348,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.10.1.01	Kegiatan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparanya lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi		1 Dokumen	207,200,000.00			1 Dokumen	270,348,000.00
		Hasil: Persentase data informasi pertanahan yang handal		30%				30%	
2.10.10.1.01.000 1	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Kab. Bangli, Kab. Gianyar	1 Laporan	207,200,000.00	PAD		1 Laporan	220,348,000.00
2.10.06	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi		100%	31,221,700.00			60%	86,847,700.00
2.10.06.1.01	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Keluaran: Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi		1 dokumen	31,221,700.00			1 Dokumen	36,847,700.00
		Hasil : Jumlah akses redistribusi tanah		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.06.1.01.000 3	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Provinsi Bali	1 Berita Acara	31,221,700.00	PAD		1 Berita Acara	36,847,700.00
B	UPTD BPP				3,920,805,940.00				3,202,152,358.00
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan		85	134,933,330.00			85	1,182,981,640.00
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi		1 Tahun	93,556,900.00			100%	98,775,300.00
		Hasil: Persentase layanan administrasi perkantoran		100%				1 tahun	
1.03.01.1.06.000 1	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	2 Paket	11,782,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	11,782,000.00
1.03.01.1.06.000 2	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	3 Paket	20,930,200.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	19,853,600.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.01.1.06.000 4	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	2 Paket	32,500,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	32,500,000.00
1.03.01.1.06.000 5	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	3 Paket	4,638,700.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	4,619,700.00
1.03.01.1.06.000 6	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	3 Dokumen	4,446,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	5,000,000.00
1.03.01.1.06.000 8	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	10 Laporan	13,500,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	13,500,000.00
1.03.01.1.06.000 9	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	10 Laporan	5,760,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	11,520,000.00
1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 layanan	117,626,300.00				172,318,400.00
		Hasil : persentase layanan administrasi perkantoran							
1.03.01.1.07.000 6	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	2 Unit	47,615,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	15,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.01.1.07.000 5	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	65 Paket	70,010,800.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65 Paket	157,318,400.00
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi		1 tahun	221,193,200.00			100%	134,300,000.00
		Hasil: Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani		100%				1 tahun	
1.03.01.1.08.000 1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	12 Laporan	1,193,200.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	2,000,000.00
1.03.01.1.08.000 2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	12 Laporan	80,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	53,100,000.00
1.03.01.1.08.000 4	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	4 Laporan	140,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	80,000,000.00
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi		1 tahun	702,556,930.00			100%	777,587,940.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Hasil: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani		100%				1 tahun	
1.03.01.1.09.000 2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6 Unit	329,075,880.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Unit	345,331,100.00
1.03.01.1.09.000 6	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	40 Unit	23,960,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26 Unit	24,420,000.00
1.03.01.1.09.000 9	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	7 Unit	349,521,050.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	407,836,840.00
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi		100%	2,785,872,610.00			100%	2,019,170,718.00
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas		100%	2,785,872,610.00			100%	2,019,170,718.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Air, Tanah dan Bahan Bangunan (UPTD.BPP)							
		Hasil: Persentase kepuasan pengguna layanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan		100%				100%	
1.03.11.1.03.000 4	Sub Kegiatan: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	12 Laporan	2,785,872,610.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	2,019,170,718.00
C	UPTD PAM				38,269,710,452.00				32,150,000,000.00
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak		95.50%	38,269,710,452.00			93%	32,150,000,000.00
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		5 unit	38,269,710,452.00			5 unit	32,150,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		hasil : Persentase Serapan Air Curah SPAM dikelola Provinsi oleh Kabupaten/Kota		44%	38,269,710,452.00			46%	32,150,000,000.00
1.03.03.1.01.001 9	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kota Denpasar	5 Unit	38,269,710,452.00	PKB, Pendapatan dari BLUD		5 Unit	32,150,000,000.00
D	UPTD PAL				16,436,373,000.00				13,625,549,203.00
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.		100%	16,436,373,000.00			100%	13,625,549,203.00
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Keluaran : Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara		1 SPALD	16,436,373,000.00			1 SPALD	13,625,549,203.00
		Hasil: Persentase Layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang berfungsi dengan baik		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi Pekerjaan	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03.05.1.01.001 8	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	Kab. Badung. Kuta; Kota Denpasar, Denpasar Selatan; Kota Denpasar, Denpasar Timur; Kota Denpasar, Denpasar Utara	1 Unit	16,436,373,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan dari BLUD		1 Unit	13,625,549,203.00
TOTAL PAGU RENJA PERUBAHAN DINAS PUPRKIM TAHUN 2025 - 2026					571,202,834,328.00				687,589,198,660.00

BAB IV

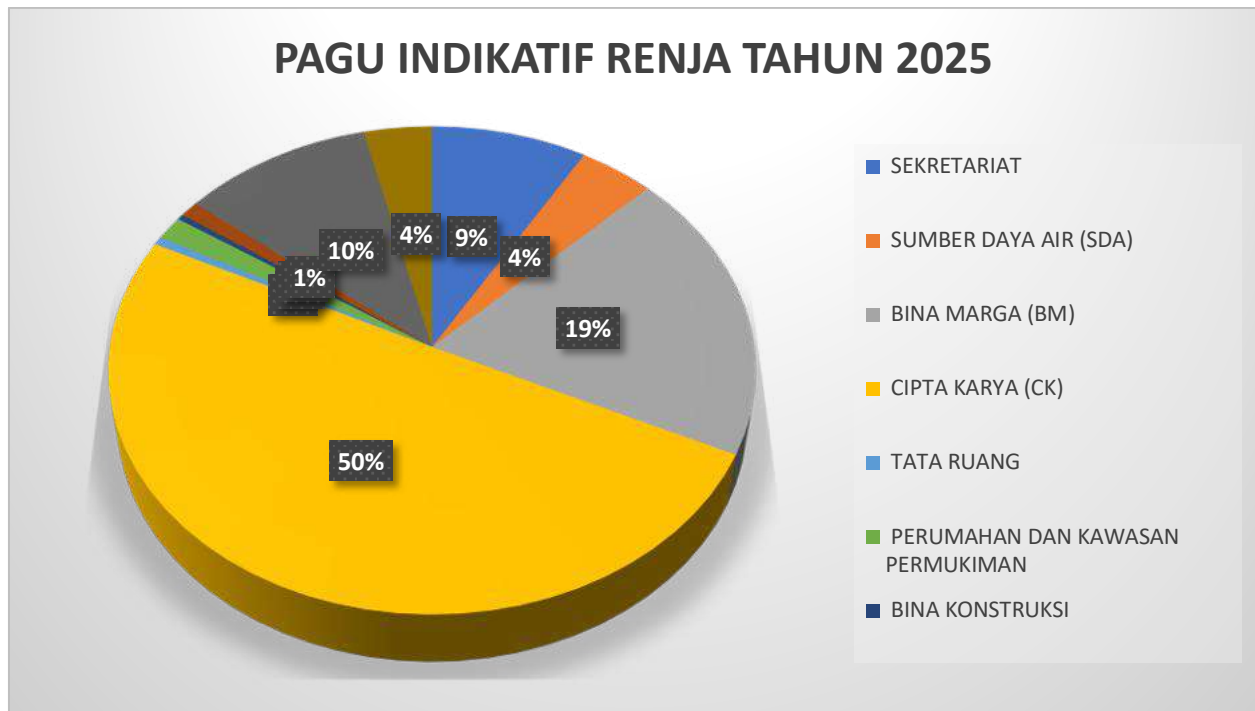
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 secara rinci telah ditampilkan pada Tabel T-C.33, dan Rencana Kerja Perubahan tersebut juga telah memuat besaran pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Renja tersebut. Adapun rekapitulasi dari rencana pagu indikatif per Bidang dan UPTD dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Pagu Indikatif Per Bidang dan UPTD

No.	Bidang/UPTD	Pagu Indikatif
1	Sekretariat	46.157.988.413,00
2	Bidang Sumber Daya Air	32.881.361.379,00
3	Bidang Cipta Karya	276.887.902.456,00
4	Bidang Bina Marga	147,797,656,615.00
5	Bidang Tata Ruang	1.227.771.672,00
6	Bidang Bina Konstruksi	1.108.611.526,00
7	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.661.944.555,00
8	UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian (UPTD. BPP)	3.920.805.940,00
9	UPTD. Pengelolaan Air Minum (UPTD. PAM)	36.218.719.622,00
10	UPTD. Pengelolaan Air Limbah (UPTD. PAL)	15.340.072.150,00
Total		571.202.834.328,00

Komposisi Pagu Indikatif Per Bidang dan UPTD



Memperhatikan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pagu indikatif Bidang Cipta Karya merupakan yang paling besar dibandingkan dengan bidang lainnya, hal ini dikarenakan pada sub kegiatan di Bidang Cipta Karya yaitu Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya terdapat anggaran hibah tunai (hibah uang) yang akan diserahkan kepada kelompok Masyarakat yang difasilitasi oleh anggota dewan. Dimana nilai dari hibah tersebut sebesar 140 Juta Rupiah.

BAB V PENUTUP

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025, diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif .

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran 5 (lima) Bidang Prioritas Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, serta mengingat kewenangan provinsi pada bidang pekerjaan umum dan perumahan masih terbatas maka Program dan Kegiatan bidang infrastruktur yang telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya 5 bidang prioritas pembangunan tidak hanya membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup, namun juga membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

Koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sangat diharapkan dengan pihak-pihak terkait, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat melalui instansi vertikal di daerah yang mewilayah Bali, serta *stakeholder* lainnya maupun dukungan dan partisipasi masyarakat luas, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dapat berjalan dengan lancar serta dapat menunjang pencapaian program-program di akhir tahun RPD Provinsi Bali periode 2024-2026.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat beberapa kaidah yang harus diterapkan seperti:

Efisiensi: Memastikan penggunaan sumber daya (termasuk anggaran) secara efisien agar hasil yang dicapai maksimal dengan biaya minimal.

Efektivitas: Menjamin bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Transparansi: Membuka informasi secara jelas dan terbuka kepada publik mengenai rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Akuntabilitas: Menyelenggarakan kegiatan dengan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Partisipasi: Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja.

Semua kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.



Rencana Kerja 2025



24 Dinas Sosial PPA Bali

Jl. Cok Agung Tresna No. 2 Denpasar, Bali (80234)
Telepon (0361) 229827

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2024-2026, sehingga pembangunan pada urusan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.

Terselesainya dokumen ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan koordinasi yang baik serta partisipasi aktif berbagai pihak. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa Renja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas,

The image shows a circular official stamp of the Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

dr. A. A. Saung Mas Dwipayani, M.Kes.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197206282002122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

 TRIWULAN I TAHUN 2025..... 10

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

 Triwulan I Tahun 2025 10

 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

 Perangkat Daerah 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 25

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 27

 3.3 Program dan Kegiatan 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33

BAB V PENUTUP 126

 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 126

 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 127

 5.3 Rencana Tindak Lanjut 128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
s.d. Triwulan I Tahun 2025 11

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Bali 29

Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju
Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Bali 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial..... 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi diinstruksikan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang kemudian yang dijabarkan dalam Rencana Strategis 2024-2026. Dokumen tersebut kemudian akan dijabarkan untuk jangka waktu 1 tahun dalam Rencana Kerja (Renja).

RENJA adalah bentuk dokumen perencanaan paling kongkrit yang menjabarkan program dan kegiatan suatu Organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. RENJA PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial terjemahan dari visi, misi serta program yang ditetapkan dalam RENSTRA perangkat daerah.
2. RENJA merupakan acuan perangkat daerah untuk perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025 serta salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja sebagai wujud kinerja SKPD yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD (RENJA PD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA PD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD. Dalam perencanaan pembangunan di bidang Sosial tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali selaku penanggung jawab teknis terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial dan mewujudkan tata kehidupan krama bali yang madani sesuai dengan nilai-nilai budaya bali berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut setiap tahunnya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan wajib Bidang Sosial dan Urusan pilihan bidang Pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak menyusun Rencana Kerja (Renja) dan menyediakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pada Angka 3);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta

Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);
27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
28. Peraturan Gubernur Bali Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program –

program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berperan dalam penanganan.

B. Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
- Merumuskan Program dan Kegiatan yang hendak dilaksanakan yang disertai dengan Input, Output serta Outcome pagu anggaran dan target indikator kinerja pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang fungsi Perencanaan, keterkaitan Renja dengan Renstra, isi secara ringkas Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I

Tahun 2025, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis dalam pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu:

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Bali Tahun 2025 sejumlah 13 (tiga belas) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Pelayanan Sosial dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, pada bagian ini program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah

BAB V Penutup, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Berikut adalah realisasi capaian kinerja fisik dan keuangan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, selengkapnya pada tabel 2.1 di bawah ini:

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
s.d. Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Bali

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Dinas Sosial P3A					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,717,600	49.88	65.95	49.88	10.29
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4,952,200	40.91	40.46	40.91	34.37
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,234,800	17.37	7.33	17.37	6.64
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,681,909,121	42.66	42.25	42.66	15.67
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,508,200	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140,310,892	100.00	-	100.00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96,022,700	16.18	13.67	16.18	6.77
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,647,200	-	-	-	-
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	11,250,000	25.00	20.00	25.00	19.81

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,505,000	24.66	22.36	24.66	18.86
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	180,000,000	29.42	25.00	29.42	16.28
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488,462,484	26.07	26.07	26.07	17.86
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,175,080,364	47.46	35.82	47.46	30.49
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	1,695,930,825	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1,165,741,546	30.41	27.95	30.41	18.85
Program Pemberdayaan Sosial					
Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3,484,600	3.58	-	3.58	-
Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	78,398,500	20.78	1.40	20.78	1.40
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	41,310,000	-	-	-	-
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0	-	-	-	-
Program Rehabilitasi Sosial					
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	57,784,600	99.09	0.00	99.09	0.00
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	120,504,300	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2,500,000,000	40.00	25.00	40.00	23.00
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	155,516,600	78.44	-	78.44	-
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	600,647,100	0.32	-	0.32	-
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	226,861,200	0.79	-	0.79	-

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12,960,000	32.21	-	32.21	-
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	151,012,500	32.50	20.32	32.50	1.84
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	14,352,200	10.10	-	10.10	-
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30,570,600	42.65	-	0.00	-
Sub Kegiatan Pemulasaraan	260,890,100	0.36	-	0.36	-
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	19,999,400	42.67	9.14	42.67	6.80
Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal	158,840,000	34.29	20.37	34.29	12.74
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					
Sub Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI	17,136,600.00	64.43	44.94	64.43	44.94
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	29,142,000	38.41	27.53	38.41	27.52
Sub Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9,480,000	-	-	-	-
Program Penanganan Bencana					

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					
Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3,240,000	100.00	-	100.00	-
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3,240,000	100.00	-	100.00	-
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	335,331,800	26.16	-	26.16	-
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	329,238,400	58.68	3.72	58.68	3.07
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan					
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					
Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	37,085,800	2.05	-	2.05	-
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi					
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	132,283,500	15.52	5.94	15.52	3.69

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Program Perlindungan Perempuan					
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	27,906,100	50.10	2.79	50.10	2.22
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	9,958,600	2.45	-	2.45	-
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak					

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	2,732,700	17.66	10.60	17.66	9.51
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					
Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	36,685,700	0.25	-	0.25	-
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	648,691,600	16.76	16.71	16.76	16.69
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/	95,242,800	0.94	-	0.94	-
Program Perlindungan Khusus Anak					

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	13,743,600	6.68	-	6.68	-
UPTD Pelayanan Sosial					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,813,400	100.00	-	100.00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170,000,000	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159,941,800	52.46	60.00	52.46	59.80
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,015,000	22.39	22.00	22.39	21.89
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216,100,000	27.85	26.30	27.85	23.67
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337,221,344	39.18	13.86	39.18	21.67
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263,322,984	60.12	9.03	60.12	6.46
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,484,397,000	6.84	-	6.84	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,136,217,130	33.57	31.38	33.57	21.88
Program Rehabilitasi Sosial					
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					
Sub Kegiatan Pengasuhan	91,401,500	55.80	55.63	55.80	55.63
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	1,478,250,000	25.00	25.00	25.00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	89,750,000	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	21,680,300	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	125,759,400	16.74	15.06	16.74	11.75
Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100,000,000	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	9,120,000	-	-	-	-
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	996,450,000	25.00	25.00	25.00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	70,000,000	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10,000,000	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	164,987,000	55.19	55.19	55.19	51.29

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6,720,000	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pemulasaraan	60,000,000	30.00	0.00	30.00	0.00
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,528,800	100.00	-	100.00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,266,900	100.00	-	100.00	-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,932,000	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,000,000	25.12	25.00	25.12	24.09
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129,131,492	52.99	39.82	52.99	37.29
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83,519,944	29.13	26.04	29.13	18.17
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	387,381,702	29.10	26.15	29.10	13.69

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Program Perlindungan Perempuan					
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	127,407,200	9.57	-	9.57	-
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3,360,000	-	-	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	4,361,812,000	1.60	-	1.60	-
Program Perlindungan Khusus Anak					
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	PERSENTASE (%)			
		FISIK		KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2,099,000	100.00	-	100.00	-
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	69,018,000	-	58.40		
JUMLAH	46,155,147,728				

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan urusan sosial maupun urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

A. Urusan Sosial

1. Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan.
2. Masih adanya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang belum mendapat penanganan rehabilitas sosial secara maksimal.
3. Perlu adanya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan tali kasih bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Taruna Siaga Bencana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. IDG Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 73,77% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 76,90% (Data BPS, 2024).
2. Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2023 mencapai 18,88%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural Tahun 2023 sebesar 34,75% dari total 3.893 pejabat struktural.
3. Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2023 sebesar 70,63% mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 69,62%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 83,55% (Data BPS, 2024).
4. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan wilayah kejadian, meningkat dari tahun 2023 yakni sebanyak 340 kasus.

Dari identifikasi permasalahan diatas bisa kita simpulkan adapun isu-isu penting atau strategis dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali adalah:

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender
3. Masih tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Belum Optimalnya Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

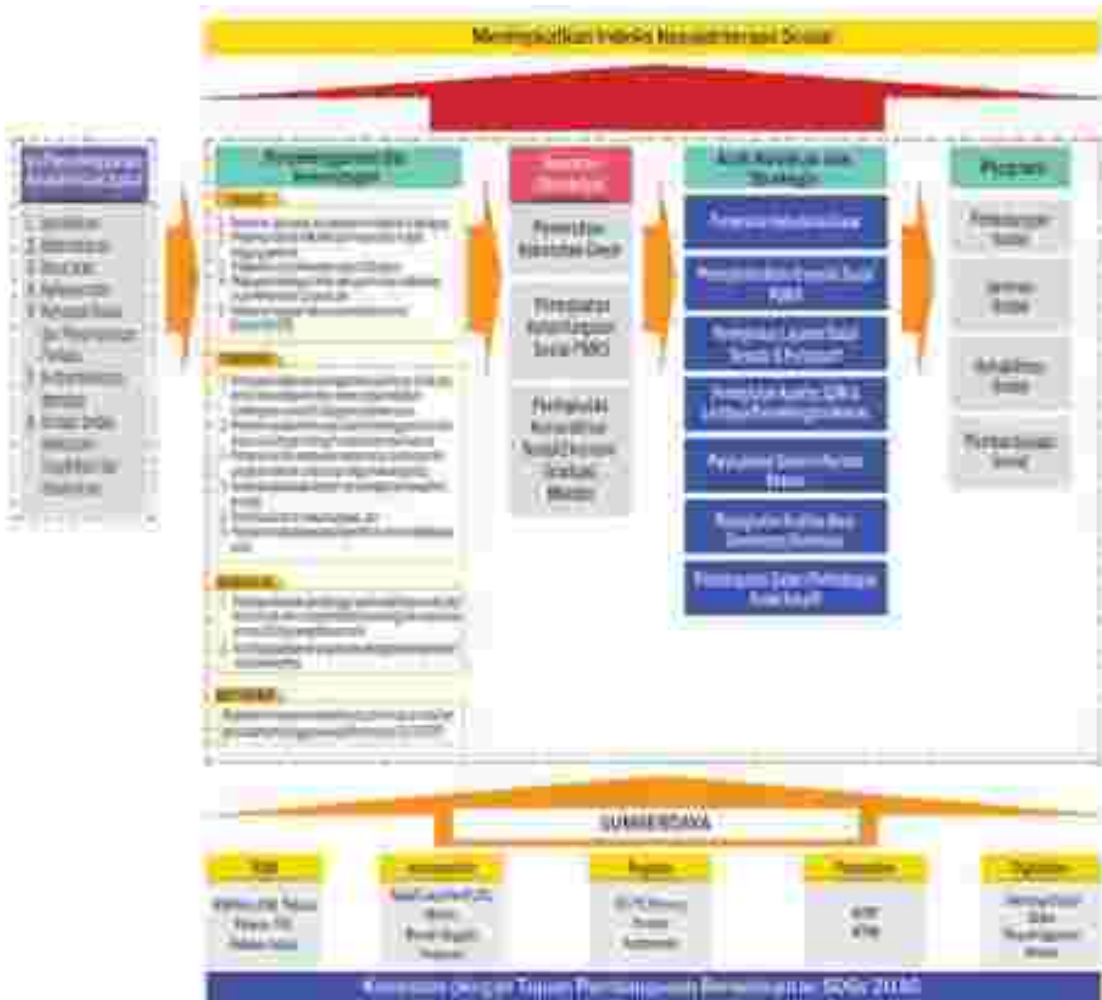
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 yang terkait dengan Kementerian Sosial, yaitu agenda ke dua Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; agenda ketiga Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing; agenda keempat Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; serta agenda ketujuh Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial yang berdasarkan arah dan kebijakan nasional dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Skema Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Sumber : Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Penyelenggaraan dan kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti pada skema diatas adalah:

1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial.
2. Penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional.
3. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sesuai dengan kewenangannya.
4. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
6. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disesuaikan dengan paradigma yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat. Hal ini juga berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Bali serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dengan visi tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan PPKS. Peran sebagai penggerak dijalankan dengan cara melakukan advokasi dan sinergi, sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial mendapat dukungan

dari satuan perangkat kerja daerah lain baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah kabupaten/kota.

Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, bantuan dan jaminan sosial serta pemberdayaan dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, serta menjalin kemitraan strategis dengan lembaga - lembaga pelayanan lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional baik sumber daya aparatur maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) yang terlatih sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada PPKS. Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ingin dicapai adalah Kesejahteraan Sosial masyarakat Bali yang berlandaskan *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan manusia (*Pawongan*) dan manusia dengan alam/lingkungan (*Palemahan*).

1. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali adalah Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah, maka ditetapkan 2 sasaran yaitu :

- a. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yang Berkualitas.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Bali

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yang Berkualitas.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak

3.3 Program dan Kegiatan

A. PROGRAM

Berdasarkan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026, maka program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali untuk Tahun 2025 sejumlah 13 (tiga belas) program sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
- 3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4. Program Rehabilitasi Sosial
- 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
9. Program Perlindungan Perempuan
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
13. Program Perlindungan Khusus Anak

B. KEGIATAN

Berdasarkan program tersebut, kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 sejumlah 26 (dua puluh enam) kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Pelayanan Sosial dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

4. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
6. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
8. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
9. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
 - c. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- 11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
- 12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- 13. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan adalah:

1. Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjelaskan kewenangan Provinsi untuk memberikan pelayanan di dalam panti.
2. Program kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Dokumen hasil analisis gender dalam *Gender Analytical Pathway (GAP)* untuk menciptakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
4. Masukan dan saran dari stakeholder lain yang diakomodir dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah.
5. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial P3A Provinsi Bali tahun sebelumnya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam dokumen ini adalah Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 dan sudah diinput dalam sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD – RI) dan berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) Provinsi Bali serta juga hasil kesepakatan pada forum perangkat daerah. Adapun Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 tersaji dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Pemerintah Provinsi Bali
(Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak				39.668.756.488,00	44.592.460.351,00	46.155.147.728,00				40.317.466.211,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai	A Nilai	30.135.182.688,00	30.527.198.551,00	32.203.062.428,00				30.906.517.211,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 persen	100 persen	52.864.600,00	52.864.600,00	52.864.600,00				7.500.000,00
1	06	01	1.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokume n	2 Dokume n	27.907.600,00	27.907.600,00	5.717.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
1	06	01	1.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	4.952.200,00	4.952.200,00	4.952.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000,00
1	06	01	1.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.004.800,00	20.004.800,00	24.234.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
1	06	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 persen	100 persen	20.170.802.108,00	20.681.909.121,00	20.681.909.121,00				20.640.450.104,00
1	06	01	1.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	148 Orang/ Bulan	20.170.802.108,00	20.681.909.121,00	20.681.909.121,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraa n Bermoto r (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambaha n Dukunga n Pendana		20.640.450.104,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													an atas Kebijaka n Penggaji an Pegawai Pemerint ah dengan Perjanjia n Kerja		
1					NON URUSAN				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai	A Nilai	30.135.182.688,00	30.527.198.551,00	32.203.062.428,00				30.906.517.211,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen	100 persen	623.380.300,00	622.956.600,00	622.956.600,00				988.731.000,00
1	06	01	1.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.508.200,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai	A Nilai	30.135.182.688,00	30.527.198.551,00	32.203.062.428,00				30.906.517.211,00
1	06	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen	100 persen	623.380.300,00	622.956.600,00	622.956.600,00				988.731.000,00
1	06	01	1.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	0,00	7.508.200,00	7.508.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.400.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					NON URUSAN				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai	A Nilai	30.135.182.688,00	30.527.198.551,00	32.203.062.428,00				30.906.517.211,00
1	06	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen	100 persen	623.380.300,00	622.956.600,00	622.956.600,00				988.731.000,00
1	06	01	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	79.649.600,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												n, Semua Kel/Desa			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai	A Nilai	30.135.182.688,00	30.527.198.551,00	32.203.062.428,00				30.906.517.211,00
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen	100 persen	623.380.300,00	622.956.600,00	622.956.600,00				988.731.000,00
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2 Paket	0,00	79.649.600,00	140.310.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		85.246.000,00
1	06	01	1.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	96.022.700,00	96.022.700,00	96.022.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		119.085.000,00
1	06	01	1.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.647.200,00	5.647.200,00	5.647.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.000.000,00
1	06	01	1.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	3.660.000,00	3.660.000,00	11.250.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.500.000,00
1	06	01	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	172.163.000,00	172.163.000,00	87.505.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		105.500.000,00
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	-	100 persen	1.178.419.140,00	1.211.783.828,00	1.211.783.828,00				1.055.000.000,00
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		245.000.000,00
1	06	01	1.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	471.772.020,00	488.462.484,00	488.462.484,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		165.000.000,00
1	06	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	-	100 persen	8.109.716.540,00	7.957.684.402,00	7.957.684.402,00				8.214.836.107,00
1	06	01	1.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	1.133.511.380,00	1.175.080.364,00	1.175.080.364,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.400.000.000,00
1	06	01	1.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	-	1 Unit	0,00	0,00	1.695.930.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.695.930.825,00
1	06	01	1.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	1.221.010.200,00	1.155.808.038,00	1.165.741.546,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.304.055.490,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	5.45 Persen	5.45 Persen	115.633.100,00	115.633.100,00	123.193.100,00				303.810.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	02	1.0 1		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial	100 persen	100 persen	3.484.600,00	3.484.600,00	3.484.600,00				62.500.000,00
1	06	02	1.0 1	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokume n	20 Dokume n	3.484.600,00	3.484.600,00	3.484.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		62.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	02	1.0 2		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial	161 Orang	57 Orang	112.148.500,00	112.148.500,00	112.148.500,00				241.310.000,00
1	06	02	1.0 2	000 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi										
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	57 Orang	57 Orang	112.148.500,00	112.148.500,00	78.398.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		200.000.000,00
1	06	02	1.0 2	000 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	-	1 Lembaga	0,00	0,00	41.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41.310.000,00
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100 persen	0 persen	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00				45.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	03	1.0 1		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	0 Orang	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00				45.000.000,00
1	06	03	1.0 1	000 1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	19.65 persen	19.65 persen	7.442.198.500,00	7.441.584.300,00	7.534.056.800,00				6.910.852.500,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	06	04	1.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyangang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	675 Orang	872 Orang	2.778.624.600,00	2.778.648.900,00	2.778.648.900,00				2.318.000.000,00	
1	06	04	1.0 1	000 1	Penyediaan Permakanan											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 Orang	155 Orang	28.624.600,00	28.624.600,00	57.784.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Pengharg aan Kinerja		28.000.000,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													Tahun Sebelum nya			
1	06	04	1.0 1	000 4	Penyediaan Alat Bantu											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 Orang	107 Orang	30.000.000,00	30.024.300,00	120.504.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		40.000.000,00	
1	06	04	1.0 1	000 5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti											

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Pengharg aan Kinerja Tahun Sebelum nya		2.000.000.000,00
1	06	04	1.0 1	000 6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial										
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	580 Orang	580 Orang	220.000.000,00	220.000.000,00	155.516.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		250.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	04	1.0 2		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	827 Orang	1202 Orang	2.607.286.000,00	2.607.285.000,00	2.607.285.000,00				2.942.202.500,00
1	06	04	1.0 2	000 2	Penyediaan Makanan										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	722 Orang	1087 Orang	403.782.600,00	403.782.600,00	600.647.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Pengharg aan Kinerja Tahun		150.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													Sebelum nya		
1	06	04	1.0 2	000 6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial										
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	40 Orang	236.941.200,00	236.941.200,00	226.861.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
1	06	04	1.0 2	001 0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	38.120.000,00	38.120.000,00	12.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	04	1.0 3		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	135 Orang	731 Orang	1.872.088.500,00	1.871.531.000,00	1.871.531.000,00				1.354.650.000,00
1	06	04	1.0 3	000 1	Penyediaan Permakanan										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	321 Orang	203.890.000,00	203.812.500,00	151.012.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun		56.650.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													Sebelum nya		
1	06	04	1.0 3	000 6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial										
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260 Orang	260 Orang	24.500.800,00	24.500.800,00	14.352.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		50.000.000,00
1	06	04	1.0 3	001 0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	44.970.600,00	44.970.600,00	30.570.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		30.000.000,00
1	06	04	1.0 3	001 2	Pemulasaraan										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	14 Orang	30 Orang	272.890.100,00	272.890.100,00	260.890.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Pengharg aan Kinerja Tahun Sebelum nya		170.000.000,00
1	06	04	1.0 4		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi	220 Orang	430 Orang	184.199.400,00	184.119.400,00	184.119.400,00				296.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan dasarnya									
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	220 Orang	430 Orang	19.999.400,00	19.999.400,00	19.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		146.000.000,00
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	220 Orang	430 Orang	164.200.000,00	164.120.000,00	158.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	0.04 persen	0.04 persen	142.568.100,00	142.567.700,00	55.758.600,00				356.000.000,00
1	06	05	1.0 1		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur	20 orang	20 orang	17.136.600,00	17.136.600,00	17.136.600,00				48.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	05	1.0 1	000 1	Pengangkatan Anak antar WNI										
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	17.136.600,00	17.136.600,00	17.136.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		48.000.000,00
1	06	05	1.0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	200 kelu	292 keluarga	125.431.500,00	125.431.100,00	125.431.100,00				308.000.000,00
1	06	05	1.0 2	000 1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Keluarga	192 Keluarga	119.791.500,00	119.791.100,00	29.142.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		155.000.000,00
1	06	05	1.0 2	000 2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota										

					Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	100 Keluarga	5.640.000,00	5.640.000,00	9.480.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		153.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 persen	100 persen	351.413.100,00	351.411.800,00	341.811.800,00				493.750.000,00
1	06	06	1.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi	720 Orang	695 Orang	351.413.100,00	351.411.800,00	351.411.800,00				493.750.000,00
1	06	06	1.0 1	000 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2 Unit	2 Unit	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		13.750.000,00
1	06	06	1.0 1	000 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		130.000.000,00
1	06	06	1.0 1	000 5	Pelayanan Dukungan Psikososial										
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	620 Orang	595 Orang	344.933.100,00	344.931.800,00	335.331.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		350.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Penanganan TMP sesuai standar	-	100 Persen	309.258.400,00	309.258.400,00	329.238.400,00				115.000.000,00
1	06	07	1.0 1		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	-	1 TMP	309.258.400,00	309.258.400,00	309.258.400,00				115.000.000,00
1	06	07	1.0 1	000 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi										
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	898 Makam	898 Makam	309.258.400,00	309.258.400,00	329.238.400,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		115.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.802.720.860,00	6.337.626.086,00	6.220.787.438,00				2.562.536.500,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.802.720.860,00	6.337.626.086,00	6.220.787.438,00				2.562.536.500,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	-	100 Persen	114.967.700,00	114.967.700,00	169.369.300,00				117.333.500,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	02	1.0 1		Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	40 Lembaga	40 Lembaga	37.634.200,00	37.634.200,00	37.634.200,00				40.000.000,00
2	08	02	1.0 1	000 8	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	100 Orang	100 Orang	37.634.200,00	37.634.200,00	37.085.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000,00
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	47 Lembaga	47 Lembaga	77.333.500,00	77.333.500,00	77.333.500,00				77.333.500,00
2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	250 Orang	250 Orang	77.333.500,00	77.333.500,00	132.283.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		77.333.500,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	11.89 Nilai	11.89 Nilai	193.146.100,00	4.656.445.300,00	4.520.485.300,00				394.685.100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	03	1.0 1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	4 Dokume n	2 Dokume n	85.466.100,00	186.953.300,00	186.953.300,00				84.546.100,00
2	08	03	1.0 1	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dokume n	2 Dokume n	59.546.100,00	59.546.100,00	27.906.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		59.546.100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				15.000.000,00
2	08	03	1.03	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokume n	0 Dokume n	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	-	73.14 Nilai	11.891.000,00	11.878.600,00	9.958.600,00				35.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	04	1.0 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan	5 Lembaga	5 Lembaga	11.891.000,00	11.878.600,00	11.878.600,00				35.000.000,00
2	08	04	1.0 2	000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	45 Orang	11.891.000,00	11.878.600,00	9.958.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	35 Persen	35 Persen	9.996.400,00	9.996.400,00	2.732.700,00				40.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	05	1.0 1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan	2 Dokume n	1 Dokume n	9.996.400,00	9.996.400,00	9.996.400,00				40.000.000,00
2	08	05	1.0 1	000 1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi										
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokume n	1 Dokume n	9.996.400,00	9.996.400,00	2.732.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi		40.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													Hasil (DBH)		
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	76.20 Nilai	76.20 Nilai	817.082.900,00	817.082.900,00	780.620.100,00				525.000.000,00
2	08	06	1.0 1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	20 Lembaga	20 Lembaga	45.325.700,00	45.325.700,00	45.325.700,00				100.000.000,00
2	08	06	1.0 1	000 3	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	45.325.700,00	45.325.700,00	36.685.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	06	1.0 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2 Dokume n	2 Dokume n	771.757.200,00	771.757.200,00	771.757.200,00				425.000.000,00
2	08	06	1.0 2	000 1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi										
						Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang	650.611.600,00	650.611.600,00	648.691.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		325.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	06	1.0 2	000 5	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota										
					Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	121.145.600,00	121.145.600,00	95.242.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.28 Nilai	1.28 Nilai	24.243.500,00	93.260.600,00	84.860.600,00				74.517.900,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	07	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	1 Laporan	1 Laporan	24.243.500,00	93.260.600,00	93.260.600,00				74.517.900,00
2	08	07	1.0 3	000 6	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	3 Dokume n	3 Dokume n	19.743.600,00	19.743.600,00	13.743.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
					UPTD Pelayanan Sosial				39.668.756.488,00	44.592.460.351,00	46.155.147.728,00				40.317.466.211,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37.866.035.628,00	38.254.834.265,00	39.934.360.290,00				37.754.929.711,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai	A Nilai	30.135.182.688,00	30.527.198.551,00	32.203.062.428,00				30.906.517.211,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen	100 persen	623.380.300,00	622.956.600,00	622.956.600,00				988.731.000,00
1	06	01	1.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.824.000,00	9.813.400,00	9.813.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
1	06	01	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	0,00	0,00	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.000.000,00
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	159.941.800,00	159.941.800,00	159.941.800,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		275.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												n, Semua Kel/Desa			
1	06	01	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	17.415.000,00	17.415.000,00	3.015.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen	100 persen	1.178.419.140,00	1.211.783.828,00	1.211.783.828,00				1.055.000.000,00
1	06	01	1.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	201.100.000,00	201.100.000,00	216.100.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		275.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	01	1.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	320.547.120,00	337.221.344,00	337.221.344,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
1	06	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen	100 persen	8.109.716.540,00	7.957.684.402,00	7.957.684.402,00				8.214.836.107,00
1	06	01	1.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7 Unit	273.554.280,00	278.322.984,00	263.322.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.654.397.000,00	3.654.397.000,00	3.484.397.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1.272.399.220,00	1.136.217.130,00	1.136.217.130,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.714.849.792,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhannya	19.65 persen	19.65 persen	7.442.198.500,00	7.441.584.300,00	7.534.056.800,00				6.910.852.500,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	04	1.0 2		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	827 Orang	1202 Orang	2.607.286.000,00	2.607.285.000,00	2.607.285.000,00				2.942.202.500,00
1	06	04	1.0 2	000 1	Pengasuhan										
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	45 Orang	91.401.500,00	91.401.500,00	91.401.500,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
1	06	04	1.0 2	000 2	Penyediaan Makanan										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	45 Orang	1.478.250.000,00	1.478.250.000,00	1.478.250.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		1.478.250.000,00
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang										
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 Orang	45 Orang	89.750.000,00	89.750.000,00	89.750.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	04	1.0 2	000 5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	45 Orang	21.680.300,00	21.680.300,00	21.680.300,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		30.000.000,00
1	06	04	1.0 2	000 7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari										
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45 Orang	45 Orang	125.760.400,00	125.759.400,00	125.759.400,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		175.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	04	1.0 2	000 9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	45 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		318.952.500,00
1	06	04	1.0 2	001 0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	15 Orang	21.600.000,00	21.600.000,00	9.120.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120.000.000,00

												Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	494 Orang	731 Orang	1.872.088.500,00	1.871.531.000,00	1.871.531.000,00				1.354.650.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	04	1.0 3	000 1	Penyediaan Permakanan										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang	996.450.000,00	996.450.000,00	996.450.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		738.000.000,00
1	06	04	1.0 3	000 2	Penyediaan Sandang										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		130.000.000,00
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		50.000.000,00
1	06	04	1.0 3	000 7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang	164.987.000,00	164.987.000,00	164.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		50.000.000,00
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang	14.400.000,00	13.920.000,00	6.720.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000,00

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Pengharg aan Kinerja Tahun Sebelum nya		50.000.000,00
					UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak				39.668.756.488,00	44.592.460.351,00	46.155.147.728,00				40.317.466.211,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.802.720.860,00	6.337.626.086,00	6.220.787.438,00					2.562.536.500,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.802.720.860,00	6.337.626.086,00	6.220.787.438,00					2.562.536.500,00
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD PPA)	A Nilai	A Nilai	30.135.182.688,00	30.527.198.551,00	32.203.062.428,00				30.906.517.211,00
2	08	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen	100 persen	623.380.300,00	622.956.600,00	622.956.600,00				988.731.000,00
2	08	01	1.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1.528.800,00	1.528.800,00	1.528.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00
2	08	01	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	26.680.000,00	26.266.900,00	26.266.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
2	08	01	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	43.340.000,00	43.340.000,00	19.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		51.000.000,00
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen	100 persen	1.178.419.140,00	1.211.783.828,00	1.211.783.828,00				1.055.000.000,00
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 persen	100 persen	8.109.716.540,00	7.957.684.402,00	7.957.684.402,00				8.214.836.107,00
2	08	01	1.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4 Unit	164.439.280,00	129.131.492,00	129.131.492,00	Kota Denpasar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
2	08	01	1.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	38.961.340,00	41.345.692,00	83.519.944,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00
2	08	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	351.443.840,00	387.381.702,00	387.381.702,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	11.89 Nilai	11.89 Nilai	193.146.100,00	4.656.445.300,00	4.520.485.300,00				394.685.100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	03	1.0 1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	4 Dokume n	18 Dokume n	85.466.100,00	186.953.300,00	186.953.300,00				84.546.100,00
2	08	03	1.0 1	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	4 Dokume n	18 Dokume n	25.920.000,00	127.407.200,00	127.407.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		25.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	03	1.0 2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	7.680.000,00	4.369.492.000,00	4.369.492.000,00				295.139.000,00
2	08	03	1.0 2	000 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	80 Orang	80 Orang	7.680.000,00	7.680.000,00	3.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000,00
2	08	03	1.0 2	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi										
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban	-	80 Layanan	0,00	4.361.812.000,00	4.361.812.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana Pelayana n Perlindu ngan		230.139.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kekerasan Kewenangan Provinsi							Perempu an dan Anak DAK Fisik- Bidang Perlindu ngan Perempu an dan Anak- Perlindu ngan Perempu an dan Anak		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	-	1.28 Nilai	24.243.500,00	93.260.600,00	84.860.600,00				74.517.900,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	07	1.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	15 Laporan	4 Laporan	24.243.500,00	93.260.600,00	93.260.600,00				74.517.900,00
2	08	07	1.0 3	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokume n	1 Dokume n	4.499.900,00	4.499.000,00	2.099.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.499.900,00
2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan										

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	-	100 Orang	0,00	69.018.000,00	69.018.000,00	-	DAK Non Fisik- Dana Pelayana n Perlindu ngan Perempu an dan Anak		69.018.000,00
J U M L A H									39.668.756.488,00	44.592.460.351,00	46.155.147.728,00				40.317.466.211,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai pedoman dan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 sehingga dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal. Pada Tahun 2025 Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 13 (tiga belas) Program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Pelayanan Sosial dan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan kebersamaan.

Sebagai salah satu urusan wajib pemerintah maka besar harapan kami pagu yang tertuang dalam perubahan rencana kerja ini dapat terakomodir dengan baik dengan harapan tujuan dan sasaran yang diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dapat terwujud. Adapun sebagai catatan apabila tidak dapat diakomodir secara keseluruhan maka perubahan perencanaan kerja Tahun 2025 ini akan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang berpengaruh langsung pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Indikator Kinerja sesuai dengan NSPK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dan mengutamakan kegiatan-kegiatan prioritas Gubernur Bali.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No 86 tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersumber dari APBD. Sehubungan dengan itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dimaksudkan untuk menyesuaikan pedoman bagi jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali terikat akan dokumen perencanaan ini.
- b. Berdasarkan pada uraian butir (a) diatas maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perlu menguraikan teknis dari program dan kegiatan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan juga Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali ini, diharapkan pula dapat mendorong partisipasi masyarakat khususnya stakeholders terkait dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, Meningkatkan

kualitas perlindungan perempuan, Meningkatkan kualitas perlindungan anak di Kabupaten/Kota.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti secara teknis oleh bidang-bidang dalam menyusun Perubahan RKA tahun 2025.
- b. Pada akhir tahun anggaran 2025, Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali wajib melakukan bahan evaluasi tingkat keberhasilan tolak ukur kinerja kegiatan sehingga dapat mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas sehingga bisa menjadi pedoman untuk menyusun rencana kerja (Renja) untuk tahun anggaran berikutnya.

Bali, 9 Juli 2025



BERITA ACARA

KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI TAHUN 2024
NOMOR : B.35.050/472/SEKRET/D.SP3A

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 20 Pebruari 2024
Jam	: 09,30 WITA s.d selesai
Tempat	: Aula Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

MENYERPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;



- KETIGA : Menyetujui daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 20 Februari 2024

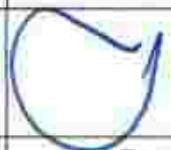
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali



Dr. Drh. Luh Ayu Aryani, M.P
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19730907 199803 2 002

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	Kadek Dwi Sutrisna, S.IP	BAPPEDA Provinsi Bali	Jl. Cokorda Agung Tresna Denpasar	
2	Anak Agung Gde Putrawan S.Sos., M.Si	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	Jl. Kesatrian No.18, Gianyar	
3	I Wayan Jimat, SKM., M.Si	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	Jl. Birgjen Ngurah Rai No 85, Kawan Bangli	
4	Ni Luh Gede Yastini, SH	KPPAD Provinsi Bali	Jl. Cok Agung Tresna No.57 Dps	



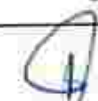
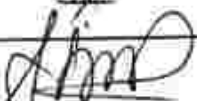
LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI

NOMOR : B.35.050/472/SEKRET/D.SP3A
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

DAFTAR HADIR PESERTA
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI

Tanggal : 20 Februari 2024

Tempat : Aula Dinas Sosial P3A Provinsi Bali

No	Nama Lengkap	Lembaga / Instansi	Jabatan	No. Telp	Tanda Tangan
1	Nym. Dama	Komutec	Wk	087761447001	
2	ADU ARJANI	DIN SOS P3A	Kadis	081338700032	
3	Widiatara	Dinas P3A	Staf	0812354000	
4	PT Kusih	Dinas P3A	Wk	081.229.2117	
5	Natalia Ys	Dinas P3A	Suprog	08123237000	
6	Imade Nursana	Koordinator TKK	Koordinator	08124796576	
7	I.3. Siti Aneang	Dinas P3A Badung	Kabid PA dan PKK	08123626220	
8	NI Made Sukowati	DINAS P3A	JF Perencanaan	082237669415	
9	Putu Aguslini	Dinas P3A	Kabid PPA	081337163237	
10	Dewa Ayu Made Widyandari	Dinas P3A	Staf	089681730149	
11	NI Wayan En Katar	Dinas P3A	JF Perencanaan	085238372685	
12	Imade Desa	IRSM Prov.	Ketua	08199982934	
13	Made Dinar Setiogi P	PANDUKAPU	Staf	081 238266531	
14	NI Wayan Arini	DINAS P3A	Staf	087761644409	
15	I GIP Almaria	Dinas P3A	JF	081907244257	
16	AA Ole Purawan	DINAS P3A	KADIS	0813091003	
17	Nym GPELD	DINAS P3A	Perencanaan	08123629217	
18	NI Made Suarya	Dinas P3A	Kadis	0812361670	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



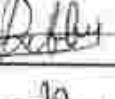
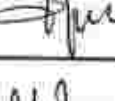
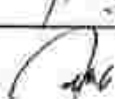
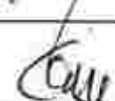
No	Nama Lengkap	Lembaga / Instansi	Jabatan	No. Telp	Tanda Tangan
19	Kangia	DPAD PPA	Analisis PPA	08786054007	
20	Oka P	Dinas Jember	Kecus	081291167434	
21	P. Gopis	Dinas Buleh	Eksekusi	087702071668	
22	Hefy	Dinas P3D	Grup PPA	08122855240	
23	Kader Dura	Pegada PPA	STP Hilir	08133855538	
24	MIL MARTHA	KURI BAK	KETUA	08111333196	
25	I Nyoman Bawa	Pertanian Bali			
26	I W. Junt	Musik	Jalis	08724655 P	
27	Dr. Md. Md. Dinda	Dinas PPA	Sekadus		
28	Dia putu. Winda	FK CES pro	Ketur		
29	Guc Alit	Pas Bali	Warhuan	081958801720	
30	YASTINI	PPAD Bali	Petra	085935374149	
31	HARMAWATI	PPPA PRB Jember	Kasubid	081338527090	
32	Fatmawati	BKOW P. Bali	St. Sekum	08787857567	
33	ETTY CHRISNAWAN	BKOW BALI	SEKUM	081337344568	
34	D A Eka Retri K	UPPD. Yansos	Ica UPPD		
35	Emmy Tamiyati	Mimris	Kabid	08123958745	
36	Resedana	Diskominfos	Stat	082839760061	
37	Ngurah Bawinnya	Diskominfos	Stat	08575278731	
38	Ayu Sukma A.P	FAD Bali	Sekretaris	081558132042	
39	I Gede KT Riyasari	Stat UPPD Pelsos	Staf NON PNS	08573722888	
40	Ramy Agasy	UPPD Pelsos	Stat	08781408725	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Nama Lengkap	Lembaga / Instansi	Jabatan	No. Telp	Tanda Tangan
41	Ika Seti Benji Daryu Permedi	UPPD. Yargas	staf	08103955266	
42	I Nyoman Witan	RSD Prov Bali	Katun Nerya	08573982329	
43	Ruhu Manasoputra	Dinas P3A	Penas Muda	08191675836	
44	Imade Dedy Zuantra	Dinas P3A	Staf Seng	087486484030	
45	Made Chandra K	Dinas Prov Bali	Staf	081239574707	
46	Debby Sintha Uti	Dinas Prov Bali	staf	081238076795	
47	Wayan Agendra	Dinas Prov Bali	staf	087811488888	
48	Wayan Ketesni	Dinas Prov Bali	staf		
49	A.A. Wida	Dinas Prov Bali	staf		
50	Edy Santosa Rute	Dinas P3A Prov Bali	staf	08199906566	
51	I Wayan Denna Pelent	Dinas P3A Bali	staf	08133876716	
52	Pande Supriya	Dinas P3A	staf	08133776708	
53	I Komang Astawa	Dinas P3A	Staf	085738758	
54	I Komang Badi Arata	Dinas P3A	Staf	08974231768	
55	I Gede Suprapda	Dinas P3A	Staf	08135328305	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT
DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI
NOMOR : B.35.050/472/SEKRET/D.SP3A
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL P3A PROVINSI BALI**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
						36,195,764,630
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27,113,739,630
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					135,092,400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	70,592,400	70,592,400
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	7,500,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	8,500,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	7,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	8,500,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	13,500,000	14,500,000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	23,500,000	25,550,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20,170,802,108
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/Bulan	133 Orang/Bulan	20,170,802,108	20,640,450,104
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					359,831,000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,500,000	17,400,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	87,246,000	85,246,000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	121,085,000	119,085,000
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	13,000,000	14,000,000



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	13,000,000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	6,500,000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	104,500,000	105,500,000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				408,000,000	413,500,000
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,500,000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	240,000,000	245,000,000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	165,000,000	165,000,000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,040,014,122	6,238,838,626
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	34 unit	1,350,000,000	1,400,000,000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3,385,958,632	3,534,783,136
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	1,304,055,490	1,304,055,490
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				451,500,000	472,500,000
6	Penerbitan I in Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				51,500,000	62,500,000
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	35 Dokumen	40 Dokumen	51,500,000	62,500,000
7	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				400,000,000	410,000,000
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	65 orang	65 orang	60,000,000	70,000,000
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	57 orang	57 orang	200,000,000	200,000,000
25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	9 LK3	9 LK3	100,000,000	100,000,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
26	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 LKS	30 LKS	40,000,000	40,000,000
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				45,000,000	45,000,000
8	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				45,000,000	45,000,000
27	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	15 orang	15 orang	45,000,000	45,000,000
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				7,155,650,000	7,274,650,000
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant				2,319,000,000	2,338,000,000
28	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	70 Orang	24,000,000	28,000,000
29	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 Orang	30 Orang	10,000,000	15,000,000
30	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang	30,000,000	40,000,000
31	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	2,000,000,000	2,000,000,000
32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang	250,000,000	250,000,000
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	9 Dokumen	9 Dokumen	5,000,000	5,000,000
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant				390,000,000	395,000,000
34	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	300 Orang	300 Orang	150,000,000	150,000,000
35	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	150,000,000	150,000,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
36	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 orang	10 orang	10,000,000	10,000,000
37	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	50,000,000	50,000,000
38	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	30,000,000	35,000,000
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti				311,650,000	356,650,000
39	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	56,650,000	56,650,000
40	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	25,000,000	50,000,000
41	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	50,000,000	50,000,000
42	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	30,000,000	30,000,000
43	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	15 Orang	20 Orang	150,000,000	170,000,000
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				4,080,000,000	4,130,000,000
44	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	300 Orang	300 Orang	146,000,000	146,000,000
45	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 orang	20 orang	24,000,000	24,000,000
46	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	20 orang	20 orang	3,600,000,000	3,600,000,000
47	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	20 orang	20 orang	10,000,000	10,000,000
48	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	20 orang	20 orang	150,000,000	200,000,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
49	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	300 Orang	300 Orang	150,000,000	150,000,000
13	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAP A di Dalam Panti				55,000,000	55,000,000
50	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	70 Orang	50,000,000	50,000,000
51	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	5,000,000	5,000,000
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				361,125,000	364,875,000
14	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				56,125,000	56,875,000
52	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	47,500,000	48,000,000
53	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang	8,625,000	8,875,000
15	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				305,000,000	308,000,000
54	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	200 KPM	200 KPM	155,000,000	155,000,000
55	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	200 Keluarga	200 Keluarga	150,000,000	153,000,000
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				663,750,000	663,750,000
16	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				663,750,000	663,750,000
56	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	200 orang	200 orang	120,000,000	120,000,000
57	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	50,000,000	50,000,000
58	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	18 Lokasi	18 Lokasi	13,750,000	13,750,000
59	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 orang	200 orang	130,000,000	130,000,000
60	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	650 Orang	650 Orang	350,000,000	350,000,000



Balai
Serifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				405,000,000	420,000,000
17	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				405,000,000	420,000,000
61	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen (50 Kijing)	1 Dokumen (50 Kijing)	220,000,000	220,000,000
62	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	898 Makam	900 Makam	100,000,000	115,000,000
63	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan (2 orang penjaga)	1 Laporan (2 orang penjaga)	85,000,000	85,000,000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1,432,749,600	1,432,749,600
VIII	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				216,900,000	216,900,000
18	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				103,500,000	103,500,000
64	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	3	4	12,000,000	12,000,000
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	3	4	11,500,000	11,500,000
66	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	32	35	40,000,000	40,000,000
67	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	JJumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	40	45	40,000,000	40,000,000
19	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				83,400,000	83,400,000
68	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	4 Dokumen	28,400,000	28,400,000
69	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/ Kota	32 Organisasi	34 Organisasi	55,000,000	55,000,000
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				30,000,000	30,000,000
70	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	2 Lembaga	30,000,000	30,000,000
I	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				70,000,000	70,000,000
21	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				25,000,000	25,000,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
71	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	4	4	25,000,000	25,000,000
22	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				45,000,000	45,000,000
72	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	9	9	30,000,000	30,000,000
73	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9	9	15,000,000	15,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					328,350,000	328,350,000
23	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				113,350,000	113,350,000
74	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	32	64	28,350,000	28,350,000
75	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	15	15	30,000,000	30,000,000
76	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	6	9	55,000,000	55,000,000
24	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				115,000,000	115,000,000
77	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3	3	30,000,000	30,000,000
78	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25	25	35,000,000	35,000,000
79	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2	2	50,000,000	50,000,000
25	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	100,000,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
80	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100,000,000	100,000,000
I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				55,000,000	55,000,000
26	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				55,000,000	55,000,000
81	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2	2	40,000,000	40,000,000
82	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2	2	15,000,000	15,000,000
II	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				695,499,600	695,499,600
27	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				125,000,000	125,000,000
83	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1	1	25,000,000	25,000,000
84	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	20	20	100,000,000	100,000,000
28	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				570,499,600	570,499,600
85	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	250	250	325,000,000	325,000,000
86	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	2	100,000,000	100,000,000
87	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1	1	95,499,600	95,499,600
88	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	3	3	50,000,000	50,000,000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				67,000,000	67,000,000
29	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				32,000,000	32,000,000
89	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	9 Organisasi	9 Organisasi	2,000,000	2,000,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
90	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/keurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	30,000,000
30	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				32,000,000	32,000,000
91	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	9	9	32,000,000	32,000,000
31	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3,000,000	3,000,000
92	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1	1	2,000,000	2,000,000
93	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1	1	1,000,000	1,000,000
TOTAL DINAS SOSIAL P3A					37,628,514,230	38,469,186,730
	UPTD PELAYANAN SOSIAL					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12,548,520,000	6,690,727,292
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10,200,920,000	3,468,149,792
32	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11,400,000	13,300,000
94	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	11,400,000	13,300,000
33	Administrasi Umum Perangkat Daerah				361,520,000	450,000,000
95	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15,000,000	20,000,000
96	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	75,000,000	120,000,000
97	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	250,000,000	275,000,000
98	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	6,000,000
99	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	9,000,000
100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15,020,000	20,000,000
34	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				453,000,000	85,000,000
101	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	360,000,000	20,000,000
102	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	20,000,000	25,000,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
103	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	73,000,000	40,000,000
35	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				675,000,000	305,000,000
104	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	300,000,000	275,000,000
105	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	375,000,000	30,000,000
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8,700,000,000	2,614,849,792
106	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	300,000,000	400,000,000
107	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	7,000,000,000	500,000,000
108	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1,400,000,000	1,714,849,792
V	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2,347,600,000	3,222,577,500
37	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti				1,158,800,000	1,774,577,500
109	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45 orang	45 orang	85,000,000	350,000,000
110	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 orang	45 orang	450,000,000	410,625,000
111	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 orang	45 orang	100,000,000	120,000,000
112	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 orang	45 orang	25,000,000	30,000,000
113	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	20 orang	20 orang	250,000,000	250,000,000
114	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi	45 orang	45 orang	100,000,000	175,000,000
115	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 orang	45 orang	120,000,000	318,952,500



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
116	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	45 orang	45 orang	28,800,000	120,000,000
38	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				1,188,800,000	1,448,000,000
117	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	650,000,000	738,000,000
118	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	30,000,000	130,000,000
119	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	200,000,000	150,000,000
120	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	28,800,000	100,000,000
121	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	25,000,000	50,000,000
122	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	150,000,000	150,000,000
123	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	50,000,000	50,000,000
124	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 orang	100 orang	30,000,000	30,000,000
125	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 orang	30 Orang	25,000,000	50,000,000
TOTAL UPT PELAYANAN SOSIAL					12,548,520,000	6,690,727,292
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,143,500,000	2,044,500,000
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,946,000,000	1,847,000,000
39	Administrasi Umum Perangkat Daerah				176,000,000	176,000,000
126	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	5,000,000	5,000,000
127	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100,000,000	100,000,000
128	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5,000,000	5,000,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
129	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000
130	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	51,000,000	51,000,000
40	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				550,000,000	451,000,000
131	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	150,000,000	51,000,000
132	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	150,000,000	150,000,000
133	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	250,000,000	250,000,000
41	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20,000,000	20,000,000
134	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000
42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,200,000,000	1,200,000,000
135	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	300,000,000	300,000,000
136	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	450,000,000	450,000,000
137	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	450,000,000	450,000,000
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				157,500,000	157,500,000
43	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25,000,000	25,000,000
138	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	4	4	25,000,000	25,000,000
44	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				132,500,000	132,500,000
139	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	80 Kasus	80 Kasus	65,000,000	65,000,000
140	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	80 Kasus	80 Kasus	67,500,000	67,500,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
VIII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				40,000,000	40,000,000
45	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40,000,000	40,000,000
141	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	2	2	40,000,000	40,000,000
TOTAL UPT PPA					2,143,500,000	2,044,500,000
GRAND TOTAL					52,320,534,230	47,204,414,022



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI

NOMOR : B.35.050/472/SEKRET/D.SP3A

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

**DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL P3A PROVINSI BALI TAHUN 2025**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128 Orang/Bulan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 unit	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
6	Penerbitan I in Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Dokumen	
7	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 orang	
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 orang	
25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 LK3	
26	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 LKS	
III PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
8	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
27	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 orang	
IV PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			
28	Penyediaan Permakanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	
29	Penyediaan Sandang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
30	Penyediaan Alat Bantu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	
31	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	
32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			
34	Penyediaan Makanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	
35	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
36	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	
37	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	
38	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Orang	
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti			
39	Penyediaan Permakanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
40	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	
41	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
42	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
43	Pemulasaraan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	15 Orang	
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
44	Penyediaan Permakanan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	
45	Penyediaan Sandang	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	
46	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	
47	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
48	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	
49	Pemulangan ke Daerah Asal	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	
13	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAP A di Dalam Panti			
50	Penyediaan Permakanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	
51	Penyediaan Sandang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
14	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
52	Pengangkatan Anak antar WNI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Orang	
53	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	
15	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
54	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 KPM	
55	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Keluarga	
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
16	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
56	Penyediaan Permakanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang	
57	Penyediaan Sandang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang	
58	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Lokasi	
59	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang	
60	Pelayanan Dukungan Psikososial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650 Orang	
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
17	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
61	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen (50 Kijing)	
62	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	898 Makam	
63	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan (2 orang penjaga)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
VIII	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
18	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
64	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	
66	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32	
67	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40	
19	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			
68	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	
69	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Organisasi	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
70	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lembaga	
I PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
21	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
71	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	
22	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
72	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	
73	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
23	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
74	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32	
75	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
76	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	
24	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
77	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	
78	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	
79	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	
25	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
80	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	
I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
26	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
81	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	
82	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	
II	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
27	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
83	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	
84	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	
28	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
85	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250	
86	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	
87	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	
88	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
29	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
89	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Organisasi	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
90	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	
30	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			
91	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	
31	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
92	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	
93	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	
UPTD PELAYANAN SOSIAL				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
32	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
94	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	
33	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
95	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	5 Paket	
96	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	5 Paket	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
97	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	5 Paket	
98	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	1 Paket	
99	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	1 Dokumen	
100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
34	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
101	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	
102	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	
103	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	
35	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
104	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	5 Laporan	
105	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	2 laporan	
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
106	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3 Unit	
107	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3 Unit	
108	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3 Unit	
V	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
37	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			
109	Pengasuhan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk	45 orang	
110	Penyediaan Makanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
111	Penyediaan Sandang	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk	45 orang	
112	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk	45 orang	
113	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk	20 orang	
114	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk	45 orang	
115	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk	45 orang	
116	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk	45 orang	
38	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
117	Penyediaan Permakanan	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	100 orang	
118	Penyediaan Sandang	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	100 orang	
119	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	100 orang	
120	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	100 orang	
121	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	100 orang	
122	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	100 orang	
123	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup SehariHari	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	100 orang	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
124	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	100 orang	
125	Pemulasaraan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
39	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
126	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	
127	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	
128	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	
129	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
130	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	
40	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
131	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	
132	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	
133	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	
41	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
134	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	
42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
135	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	
136	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	
137	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
43	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
138	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	
44	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
139	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Kasus	
140	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Kasus	
VIII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
45	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
141	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI
NOMOR 109 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 153 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
- b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
- c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali; dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Pebruari 2024



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Bali
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
6. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI
NOMOR 109 TAHUN 2024
TANGGAL 22 FEBRUARI 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI**

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
- Sekretaris : Natalia Yosephin Sihombing, S.IP., M.AP
Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
5. Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
6. Kepala UPTD. Pelayanan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
7. Kepala UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
10. Erni Wororatri, S.Sos, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
11. Ni Luh Putu Manasaputri Indrasawarni, S.IP., M.AP, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





**DPMD
DUKCAPIL**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Menyadari bahwa optimalisasi pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana memerlukan dukungan dari berbagai pihak, maka keberadaan Rencana Kerja Perubahan ini akan kami jabarkan secara terinci dalam rangka memperoleh masukan serta gagasan yang lebih perspektif bagi keberhasilan tugas-tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali serta keberhasilan pembangunan di Provinsi Bali sebagai bagian dari pembangunan Nasional.

Akhirnya seraya mengharapkan sumbangan pemikiran dari kita semua, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang telah disusun ini kami ajukan sebagai dasar Perencanaan Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali guna menjadi landasan operasional dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2025.

Bali, 9 Juli 2025

KEPALA DINAS



I Made Dwi Dewata, S.STP.,M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750417 199601 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	35
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	36
3.1 Tujuan dan Sasaran	36
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	37
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
BAB V PENUTUP	91
5.1 Catatan Penting	91
5.2 Kaidah Pelaksanaan	91
5.3 Tindak Lanjut.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Fisik Dan Keuangan APBD Provinsi Bali Bulan Maret Tahun 2025	8
Tabel 2. 2	(Tabel T-C 19 ,Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).....	13
	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Tahun 2025.....	13
Tabel 2.3	(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	26
Tabel 3.1	Program/Kegiatan dan Sub. Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.....	38
Tabel 4.1	Renja dan Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Perubahan Renja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Perubahan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Perubahan Renja OPD dimulai dari tahapan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan/ pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD,
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

1.2 Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 1.2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 1.2.8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 1.2.10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 1.2.11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- 1.2.12. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- 1.2.13. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);

1.3 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran (RKPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang fungsi Perencanaan, keterkaitan Renja dengan Renstra, isi secara ringkas Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 meliputi: realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan anggaran. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta peraturan perundang-undang yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing;

2.2 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Berisi alternatif solusi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan program

dan kegiatan yang baru / tidak / belum direalisasikan/dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan target / tahapan pelaksanaan program / kegiatan yang telah disesuaikan pada awal tahun perencanaan.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 Tujuan dan Sasaran, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

3.3 Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah,

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
- d. Tabel rumusan rencana program dan kegiatan.

BAB IV Penutup, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

4.1. Catatan Penting menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan),

4.2. Kaidah Pelaksanaan menguraikan tentang kaidah pelaksanaan

4.3. Tindak Lanjut menguraikan tentang rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 meliputi: realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan anggaran.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025 memiliki **7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan sub kegiatan)**, dengan anggaran pada pergeseran tahap I sebesar **Rp 21.521.921.537 ,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)**. Anggaran tersebut termasuk **Belanja Hibah** sebesar **Rp 1.180.000.000,-** (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), sampai dengan triwulan I (Maret Tahun 2025) sudah terealisasi sebesar **Rp 3.144.787.938,-** (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 14,61% dari pagu total Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

Telaahan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali s.d Triwulan I (Maret) Tahun 2025

- Belum semua Program terlaksana untuk di Triwulan I (masih dalam tahap pelaksanaan sesuai dengan target tahun 2025),
- Belum semua Kegiatan terlaksana untuk di Triwulan I (masih dalam tahap pelaksanaan sesuai dengan target tahun 2025),
- Belum semua Sub Kegiatan terlaksana untuk di Triwulan I (masih dalam tahap pelaksanaan sesuai dengan target tahun 2025)

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu

- Tidak semua pelaksanaan kegiatan ada di triwulan I, sehingga banyak kegiatan yang belum dilaksanakan

- Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban atas dokumen kependudukan relatif masih rendah
- Kegiatan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah belum dilaksanakan oleh instansi terkait.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Daerah Triwulan I Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali secara rinci tertuang pada Tabel 2.2 (Tabel T-C 19 ,Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Tahun 2025.

Tabel 2.1
Laporan Fisik Dan Keuangan APBD Provinsi Bali Bulan Maret Tahun 2025

No	Nomenklature Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan / Upaya Pemecahannya / Keterangan Lainnya
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	7	8	9	10
1	2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	353.619.030	71.253.636	26,83	20,15	181.536.394	Dalam Proses Konsolidasi (terdapat pergeseran pada aliran kas)
2	2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	236.063.720	17.022.164	15,94	7,21	138.219.556	Dalam Proses Konsolidasi (terdapat pergeseran pada aliran kas)
3	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.455.000	-	13,73	-	15.715.000	Dalam Proses Konsolidasi (terdapat pergeseran pada aliran kas)
4	2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.205.012	36.933.246	22,51	14,03	152.831.766	Dalam Proses Konsolidasi serta menunggu proses pencairan di keuangan dikarenakan adanya selektivitas belanja (terdapat pergeseran pada aliran kas)
5	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.823.823.571	2.153.124.159	28,42	16,79	10.670.699.412	Realisasi Sesuai dengan Jumlah Pegawai saat ini
6	2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.066.130	23.533.246	38,99	18,38	104.532.884	Dalam Proses Konsolidasi
7	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.992.400	-	100,00	-	5.992.400	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan

No	Nomenklature Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan / Upaya Pemecahannya / Keterangan Lainnya
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	7	8	9	10
8	2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.523.100	2.000.000	100,00	7,84	23.523.100	Dalam Proses Konsolidasi
9	2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.738.750	7.416.000	14,19	9,79	68.322.750	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
10	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.048.100	157.850	64,57	2,61	5.890.250	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
11	2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.626.600	645.700	24,94	13,96	3.980.900	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
12	2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	1.350.000	-	50,00	-	1.350.000	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
13	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.624.000	41.851.426	19,11	16,44	82.580.574	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan (terdapat pergeseran pada aliran kas)
14	2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.439.600	-	23,23	-	6.439.600	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
15	2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.800.000	32.890.465	25,03	18,82	141.909.535	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
16	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515.870.594	118.705.584	23,67	23,01	397.165.010	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan

No	Nomenklature Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan / Upaya Pemecahannya / Keterangan Lainnya
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	7	8	9	10
17	2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.098.383.428	296.356.938	55,84	26,98	802.026.490	Terkendala di proses pembayaran melalui e-catalog Versi 6
18	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.810.000	-	37,41	-	99.810.000	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
19	2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	135.878.612	22.880.046	26,45	16,84	100.998.566	Belum terealisasi karena adanya selektivitas belanja (terdapat pergeseran pada aliran kas)
20	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	187.162.830	35.373.246	35,37	18,90	108.964.584	Dalam Proses Konsolidasi (terdapat pergeseran pada aliran kas)
21	2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	441.492.840	30.154.328	7,50	6,83	363.866.512	Dalam Proses Konsolidasi (terdapat pergeseran pada aliran kas)
22	2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	37.595.700	-	36,12	-	16.280.700	Dalam Proses Konsolidasi (terdapat pergeseran pada aliran kas)
23	2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	141.746.520	17.047.164	17,90	12,03	89.659.356	(terdapat pergeseran pada aliran kas)

No	Nomenklature Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan / Upaya Pemecahannya / Keterangan Lainnya
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	7	8	9	10
24	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	189.354.940	30.680.928	30,85	16,20	133.714.012	Dalam Proses Konsolidasi (terdapat pergeseran pada aliran kas)
25	2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	585.557.120	52.285.664	14,89	8,93	245.874.456	Dalam Proses Konsolidasi (terdapat pergeseran pada aliran kas)
26	2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.424.528.080	94.229.656	14,27	2,13	3.903.118.424	Dalam Proses Konsolidasi serta kegiatan diundur pelaksanaannya (terdapat pergeseran pada aliran kas)
27	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	199.955.000	-	70,68	-	199.955.000,00	SK Tim Stunting masih dalam proses serta Dana BOKB belum proses penyaluran
28	2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	478.838.860	60.246.492	27,30	12,58	312.176.368	Dalam Proses Konsolidasi (terdapat pergeseran pada aliran kas)

No	Nomenklature Sub Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan / Upaya Pemecahannya / Keterangan Lainnya
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	7	8	9	10
		22.984.549.537	3.144.787.938	26,26	13,68	19.839.761.599	Realisasi tidak mencapai target karena sebagian besar belanja sedang dalam proses konsolidasi serta adanya selektivitas belanja karna keterbatasan Uang Persediaan pada rekening Bendahara Pengeluaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
			4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		15.296.384.285		0	82,85	Nilai	15.572.756.285	0	4.588.121.198	0	29,46%		4.588.121.198		29,99%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.13.01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			0,04	267.326.295	0,12	%	351.660.012	0	61.099.869	0	17,37%		328.426.164		
2.13.01. 1.01.000 1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah				0	3	Dok	88.455.000	0	0	0	0,00%		0		
2.13.01. 1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	1	Lap	263.205.012	1	61.099.869	100	23,21%		61.099.869		
2.13.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan			100	9.295.758.233	100	%	12.951.889.701	25	4.026.997.366	25	31,09%		13.322.755.59 9		
2.13.01. 1.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				0	95	Orang /Bulan	12.823.823.571	50	3.992.697.497	47,5	31,14%		3.992.697.497		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.13.01. 1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0	12	Dok	128.066.130	3	34.299.869	25	26,78%		34.299.869		
2.13.01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum			12	839.868.068	12	Bulan	373.902.950	3	52.070.976	25	13,93%		891.939.044		
2.13.01. 1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia				0	1	Paket	5.992.400	1	0	100	0,00%		0		
2.13.01. 1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0	3	Paket	25.523.100	0	2.000.000	0	7,84%		2.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0	3	Paket	75.738.750	3	7.416.000	100	9,79%		7.416.000		
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0	1	Paket	6.048.100	1	157.850	100	2,61%		157.850		
2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				0	2	Dok	4.626.600	2	645.700	100	13,96%		645.700		
2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu				0	4	Lap	1.350.000	0	0	0	0,00%		0		
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0	3	Lap	254.624.000	1	41.851.426	33,3	16,44%		41.851.426		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.13.01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terselesaikan			100	401.381.000	100	%	6.439.600	25	0	25	0,00%		401.381.000		
2.13.01. 1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0	1	Unit	6.439.600	0	0	0	0,00%		0		
2.13.01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselesaikan			100	658.636.605	100	%	690.670.594	25	151.596.049	25	21,95%		810.232.654		
2.13.01. 1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0	1	Lap	174.800.000	1	32.890.465	100	18,82%		32.890.465		
2.13.01. 1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0	1	Lap	515.870.594	1	118.705.584	100	23,01%		118.705.584		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.13.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terselesaikan			100	1.406.840.460	100	%	1.198.193.428	25	296.356.938	25	24,73%		1.703.197.398		
2.13.01. 1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan				0	17	Unit	1.098.383.428	0	296.356.938	0	26,98%		296.356.938		
2.13.01. 1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0	51	Unit	99.810.000	0	0	0	0,00%		0		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang		554.639.370		0	93,87	Persentase (%)	666.251.370	88,04	65.527.574	93,8	9,84%		65.527.574		11,81%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Desa				0	93,87	%	666.251.370	88,04	65.527.574	93,8	9,84%		65.527.574		
2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dok Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa			1	340.668.286	1	Dok	187.162.830	0	35.373.246	0	18,90%		376.041.532		
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dok Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			1	469.285.515	1	Dok	441.492.840	0	30.154.328	0	6,83%		499.439.843		
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dok Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa			1	87.505.776	1	Dok	37.595.700	0	0	0	0,00%		87.505.776		
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Desa yang Mengalami Peningkatan PADes		123.878.612		0	29	Desa	135.878.612	27	22.880.046	93,1	16,84%		22.880.046		18,47%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa dan Kemitraan			4,25	295.341.420	4,56	%	135.878.612	4,25	22.880.046	93,2	16,84%		318.221.466		
2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				0	1	Dok	135.878.612	0	22.880.046	0	16,84%		22.880.046		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif		4.566.609.660		0	99,69	%	5.341.186.660	7,94	194.243.412	8	3,64%		194.243.412		4,25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.13.05. 1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif			100	5.228.832.541	100	%	5.341.186.660	7,94	194.243.412	7,9	3,64%		5.423.075.953		
2.13.05. 1.01.000 4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0	1500	Unit	141.746.520	823	17.047.164	54,9	12,03%		17.047.164		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				0	2	Dok	189.354.940	0	30.680.928	0	16,20%		30.680.928		
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0	2	Dok	585.557.120	0	52.285.664	0	8,93%		52.285.664		
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				0	1	Lap	4.424.528.080	0	94.229.656	0	2,13%		94.229.656		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Instansi Pelaksana yang Menerbitkan KTP EI Mencapai Target.		252.790.030		0	100	%	353.619.030	25	71.253.636	25	20,15%		71.253.636		28,19%
2.12.02. 1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk			100	322.014.522	100	%	353.619.030	25	71.253.636	25	20,15%		393.268.158		
2.12.02. 1.01.000 4	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dok Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				0	1	Dok	353.619.030	0	71.253.636	0	20,15%		71.253.636		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPI	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0- 18 tahun mencapai target		155.241.720		0	100	%	236.063.720	25	17.022.164	25	7,21%		17.022.164		10,96%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.12.03. 1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Dok pencatatan sipil			80,67	320.575.368	81	%	236.063.720	20,25	17.022.164	25	7,21%		337.597.532		
2.12.03. 1.01.000 4	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				0	1	Lap	236.063.720	0	17.022.164	0	7,21%		17.022.164		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor perangkat daerah dan mitra kerja yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana		572.377.860		0	4	Sektor	678.793.860	1	60.246.492	25	8,88%		60.246.492		10,53%
2.14.03. 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali			2819	316.199.902	1351	Orang	678.793.860	0	60.246.492	0	8,88%		376.446.394		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4		5		6			7		(8) = (7/6) x 100%		(9) = 5 + 7		(10) = (9/4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.14.03. 1.01.001 0	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Bangga Kencana				0	9	Daerah	199.955.000	0	0	0	0,00%		0		
2.14.03. 1.01.001 3	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/di sediakan				0	1	Dok	478.838.860	0	60.246.492	0	12,58%		60.246.492		

Tabel 2.3
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
1	-	-	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	100%	100%	100%	100%	99 %	100%	100%	100%	Rata-rata Capaian
2	-	-	Rasio bayi berakte kelahiran	96,67%	98,96%	99,46%	99,96%	99,45 %	99,58	99,46%	99,96%	-
3	-	-	Rasio pasangan berakte nikah	65,38%	67,38%	69,38%	71,38%	56,38%	58,96	69,38%	71,38%	-
4	-	-	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-
5	-	-	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	-
6	-	-	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	100%	100%	100%	99,6%	99,56	100%	100%	-

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	-	-	Cakupan penerbitan akta kelahiran	58%	60%	62%	64%	50,85%	52,61	62%	64%	-
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	-	-	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Bali dibina	84,9%	88,05%	91,02%	94,35%	82,39%	94,81	91,02%	94,35%	-
2	-	-	Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah dibina	12,29%	31,84%	39,80%	47,76%	12,29%	31,84	39,80%	47,76%	-
3	-	-	Persentase LPM Berprestasi Provinsi Bali	23,02%	25,25%	27,48%	29,71%	20,89%	22,85	27,48%	29,71%	-
4	-	-	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	-
5	-	-	Persentase Posyandu Aktif	79,8%	79%	79,5%	80%	81,2%	97,94	79,5%	80%	-

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	-	-	Persentase Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	325%	330	335%	340%	325%	330	335%	340%	-
7	-	-	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	76,92%	98,43	98,75%	99,06%	99,21%	99,68	98,75%	99,06%	-
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
1	-	-	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,15%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	1,29%	0,71	-0,02%	-0,02%	-
2	-	-	Total Fertility Rate (TFR)	2,3%	2,1%	2,0 %	2,0%	2,07%	2,03	2,0 %	2,0	-
3	-	-	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	40%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	-

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	-	-	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	30%	50%	60%	66%	25	100	60%	66%	-
5	-	-	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	2 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1	1	1 kebijakan	1 kebijakan	-
6	-	-	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	6 sektor	6 sektor	7 sektor	8 sektor	6 sektor	6	7	8 sektor	-

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	-	-	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	12 kerjasama	18 kerjasama	22 kerjasama	26 kerjasama	14 kerjasama	14	22 kerjasama	26 kerjasama	-
8	-	-	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3%	2%	2%	2%	N/A	-	2%	2%	-
9	-	-	Angka pemakai kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	56,5%	54%	54,5%	55%	63,54%	68,87	54,5%	55%	-
10	-	-	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	27,66%	28%	27,5%	27%	17,7%	17,4	27,5%	27%	-
11	-	-	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	39,75%	N/A	N/A	N/A	N/A%	0,71	N/A	N/A	-

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	-	-	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,88%	9,86%	9,7%	9,5%	15,5%	2,03	9,7	9,5%	-
13	-	-	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	41%	50%	51%	52%	37,14%	100	51%	52%	-
14	-	-	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	22,5%	23%	23%	23%	15,1%	100	23%	23%	-
15	-	-	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	88,9%	60,62%	60,62%	60,62%	50,33%	1	60,62%	60,62%	-
16	-	-	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	90%	62,0%	63,0%	64,0%	22,87%	6	63,0%	64,0%	-
17	-	-	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	73%	26,2%	26,4%	26,9%	7,07%	14	26,4%	26,9%	-
18	-	-	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100%	42%	43%	44%	71,92%	-	43%	44%	-

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	-	-	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	530%	68%	69%	70%	311%	68,87	69%	70%	-
20	-	-	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100 %	17,4	100%	100%	-
21	-	-	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	94%	93%	94%	95%	27,66%	0,71	94%	95%	-

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	-	-	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1,03	2,03	1	1	-
23	-	-	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	-
24	-	-	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	16%	100%	100%	100%	14%	100	100%	100%	-
25	-	-	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21,64%	21,7%	21,8%	21,9	N/A	1	21,8%	21,9	-

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	-	-	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	15,5%	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	-

2.2 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Terhadap dinamika yang terjadi pada pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang di dalam Renja Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025, berikut beberapa solusi dan alternatif penyelesaian kendala dan permasalahan yaitu :

- a. Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Adminduk ke Kota/Kabupaten.
- b. Meningkatkan koordinasi dan mengusulkan kembali blangko KTP-el ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi pelayanan Adminduk dengan Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Adminduk.
- d. Melakukan koordinasi kepada PPTK di lingkup Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Bali terkait pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai terkait urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu **“Terwujudnya pelayanan publik Administrasi Kependudukan yang tertib”**, dengan dua sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya Pencatatan Sipil.
- b. Meningkatnya Pendaftaran Penduduk

Tujuan yang akan dicapai terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **“Mewujudkan 462 Desa Mandiri Di Provinsi Bali Pada Tahun 2025”**. Sasaran yang akan dicapai terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa.
- b. Meningkatnya Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi Desa.
- c. Meningkatnya Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna
- d. Meningkatnya Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Tujuan yang akan dicapai terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu **“Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui program Keluarga Berencana Krama Bali”**, dengan sasaran yaitu meningkatnya penataan penduduk dan Keluarga Berencana.

Tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :
“Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Yang Hijau, Tangguh, Dan Sejahtera, Serta Peningkatan Daya Saing Daerah”

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata

Prioritas 2 : Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Prioritas 3 : Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas 4 : Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

Prioritas 5 : Lingkungan Hidup

Prioritas 6 : Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Prioritas yang didukung terkait urusan yang ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali yaitu:

Prioritas 3 : Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil Provinsi Bali mengacu kepada Perubahan RKPD tahun 2025. Hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja sampai dengan triwulan I memperlihatkan bahwa dipandang perlu penyempurnaan terhadap rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil Provinsi Bali tahun 202 5agar sasaran dan tujuan rencana kerja tercapai.

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program/kegiatan dan sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 telah dilakukan Pemetaan/Mapping terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.Program/Kegiatan dan Sub. Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Program/Kegiatan dan Sub. Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					22.984.549.537	24.521.921.537	1.537.372.000	
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					589.682.750	408.031.750	(181.651.000)	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI		100%	100%	353.619.030	252.790.030	(100.829.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		mencapai target							
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	- Output Kegiatan: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk		100%	100%	353.619.030	252.790.030	(100.829.000)	
		- Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota		9 kab/kota	9 kab/kota				
2.12.021.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	353.619.030	252.790.030	(100.829.000)	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target		100%	100%	236.063.720	155.241.720	(80.822.000)	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	- Output Kegiatan: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		81%	81%	236.063.720	155.241.720	(80.822.000)	
		- Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan akta kelahiran di kabupaten/kota		9 kab/kota	9 kab/kota				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.03.1.01.004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	1 Laporan	236.063.720	155.241.720	(80.822.000)	PAD Prov Bali
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					21.716.072.927	23.541.511.927	1.825.439.000	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai	15.572.756.285	15.296.384.285	(276.372.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Output Kegiatan: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja		0,12%	0,12%	351.660.012	205.480.012	(146.180.000)	
		- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 Dokumen	3 Dokumen	88.455.000	15.715.000	(72.740.000)	PAD Prov Bali
2.13.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Provinsi Bali, Seluruh Kab/Kota, Seluruh Kec,	1 Laporan	1 Laporan	263.205.012	189.765.012	(73.440.000)	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Seluruh Desa/Kel						
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Output Kegiatan: Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	100%	12.951.889.701	12.951.889.701	-	
		- Hasil Kegiatan:Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	95 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan	12.823.823.571	12.823.823.571	-	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU Tambahan Dukungan Pendanaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ,PAD Prov Bali, PKB
2.13.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 Dokumen	12 Dokumen	128.066.130	128.066.130	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Output Kegiatan: Jumlah Bulan Tersedianya Layanan		12 Bulan	12 Bulan	373.902.950	243.710.950	(130.192.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Administrasi Umum							
		- Hasil Kegiatan:Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	1 paket	1 paket	5.992.400	5.992.400	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	3 paket	3 paket	25.523.100	25.523.100	-	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Disediakan							
2.13.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	3 paket	3 paket	75.738.750	75.738.750	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	1 paket	1 paket	6.048.100	6.048.100	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pernudang- Undangan yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	2 dokumen	2 dokumen	4.626.600	4.626.600	-	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4 laporan	4 laporan	1.350.000	1.350.000	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 laporan	3 laporan	254.624.000	124.432.000	(130.192.000)	PAD Prov Bali
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Output Kegiatan: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	100%	6.439.600	6.439.600	-	
		- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen		82,85 Nilai	82,85 Nilai				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kinerja							
2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	1 unit	1 unit	6.439.600	6.439.600	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Output Kegiatan: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan		100%	100%	690.670.594	690.670.594	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Hasil Kegiatan:Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 laporan	1 laporan	174.800.000	174.800.000	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 laporan	1 laporan	515.870.594	515.870.594	-	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Output Kegiatan: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	100%	1.198.193.428	1.198.193.428	-	
		- Hasil Kegiatan:Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	17 unit	17 unit	1.098.383.428	1.098.383.428	-	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jabatan							
2.13.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	51 unit	51 unit	99.810.000	99.810.000	-	PAD Prov Bali
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes		29 Desa	29 Desa	135.878.612	123.878.612	(12.000.000)	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	- Output Kegiatan: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar		4,56%	4,56%	135.878.612	123.878.612	(12.000.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		desa dan kemitraan,							
		- Hasil Kegiatan:Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes		29 Desa	29 Desa				
2.13.03.1.01.001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	135.878.612	123.878.612	(12.000.000)	PAD Prov Bali
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang		93,87%	93,87%	666.251.370	554.639.370	(111.612.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Output Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa		93,87%	93,87%	666.251.370	554.639.370	(111.612.000)	
		- Hasil Kegiatan: Persentase Desa Cepat Berkembang		93,87%	93,87%				
2.13.04.1.01.002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	187.162.830	144.337.830	(42.825.000)	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.1.01.008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	441.492.840	394.020.840	(47.472.000)	PAD Prov Bali
2.13.04.1.01.016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	37.595.700	16.280.700	(21.315.000)	PAD Prov Bali
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif		99,69%	99,69%	5.341.186.660	7.566.609.660	2.225.423.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Output Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif		100%	100%	5.341.186.660	7.566.609.660	2.225.423.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Hasil Kegiatan: Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang mampu menjalankan tugas, pokok dan fungsi		100%	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.1.01.004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1500 unit	1500 unit	141.746.520	2.106.706.520	1.964.960.000	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.1.01.005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2 dokumen	2 dokumen	189.354.940	164.394.940	(24.960.000)	PAD Prov Bali
2.13.05.1.01.006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2 dokumen	2 dokumen	585.557.120	298.160.120	(287.397.000)	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.1.01.009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Laporan	1 Laporan	4.424.528.080	4.997.348.080	572.820.000	PAD Prov Bali
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					678.793.860	572.377.860	(106.416.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana		4 sektor	4 sektor	678.793.860	572.377.860	(106.416.000)	
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Output Kegiatan: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali		1351 orang	1351 orang	678.793.860	572.377.860	(106.416.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Hasil Kegiatan: Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana		4 sektor	4 sektor				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	9 Daerah	9 Daerah	199.955.000	199.955.000	-	DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Keluarga Berencana
TOTAL						22.984.549.537	24.521.921.537	1.537.372.000	

BAB IV

RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pagu anggaran pada Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali mengalami perubahan anggaran menjadi Rp 24.521.921.537,- bertambah sebesar Rp**1.537.372.000,-** dari anggaran induk yang besarnya Rp 22.984.549.537,-

Adapun beberapa perubahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- 1. Rasionalisasi anggaran** sebesar Rp 1.462.628.000,- sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1526 Tahun 2025 tentang pelaksanaan efisiensi belanja di 14 (empat belas) sub kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Pagu anggaran sub kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan berkurang sebesar Rp 100.829.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 252.790.030,-
 - b. Pagu anggaran sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp 80.822.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 155.241.720,-
 - c. Pagu anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berkurang sebesar Rp 72.740.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 15.715.000,-
 - d. Pagu anggaran sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkurang sebesar Rp 73.440.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 189.765.012,-
 - e. Pagu anggaran sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berkurang sebesar Rp 130.192.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 124.432.000,-
 - f. Pagu anggaran sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp 12.000.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 123.878.612,-

- g. Pagu anggaran sub kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa berkurang sebesar Rp 42.825.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 144.337.830,-
- h. Pagu anggaran sub kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan berkurang sebesar Rp 47.472.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 394.020.840,-
- i. Pagu anggaran sub kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas berkurang sebesar Rp 21.315.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 16.280.700,-
- j. Pagu anggaran sub kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat berkurang sebesar Rp 35.040.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 106.706.520,-
- k. Pagu anggaran sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa berkurang sebesar Rp 24.960.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 164.394.940,-
- l. Pagu anggaran sub kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna berkurang sebesar Rp 287.397.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 298.160.120,-
- m. Pagu anggaran sub kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga berkurang sebesar Rp 427.180.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 3.997.348.080,-
- n. Pagu anggaran sub kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal berkurang sebesar Rp 106.416.000,- sehingga pagu sub kegiatan menjadi sebesar Rp 372.422.860,-

2. **Adanya penambahan anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,-** yang dialokasikan sebesar Rp 2.000.000.000,- di sub kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) dan sebesar Rp 1.000.000.000,- dialokasikan di sub keg Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, untuk mendukung penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (kegiatan TP PKK) dan kegiatan TP Posyandu Provinsi Bali,

Berikut dijabarkan secara rinci pada Tabel 4.1 Renja dan Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel 4.1 Renja dan Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					22.984.549.537	24.521.921.537	1.537.372.000	
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					589.682.750	408.031.750	(181.651.000)	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI		100%	100%	353.619.030	252.790.030	(100.829.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		mencapai target							
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	- Output Kegiatan: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk		100%	100%	353.619.030	252.790.030	(100.829.000)	
		- Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota		9 kab/kota	9 kab/kota				
2.12.021.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	353.619.030	252.790.030	(100.829.000)	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target		100%	100%	236.063.720	155.241.720	(80.822.000)	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	- Output Kegiatan: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		81%	81%	236.063.720	155.241.720	(80.822.000)	
		- Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan akta kelahiran di kabupaten/kota		9 kab/kota	9 kab/kota				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.03.1.01.004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	1 Laporan	236.063.720	155.241.720	(80.822.000)	PAD Prov Bali
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					21.716.072.927	23.541.511.927	1.825.439.000	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai	15.572.756.285	15.296.384.285	(276.372.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Output Kegiatan: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja		0,12%	0,12%	351.660.012	205.480.012	(146.180.000)	
		- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 Dokumen	3 Dokumen	88.455.000	15.715.000	(72.740.000)	PAD Prov Bali
2.13.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Provinsi Bali, Seluruh Kab/Kota, Seluruh Kec,	1 Laporan	1 Laporan	263.205.012	189.765.012	(73.440.000)	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Seluruh Desa/Kel						
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Output Kegiatan: Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	100%	12.951.889.701	12.951.889.701	-	
		- Hasil Kegiatan:Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	95 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan	12.823.823.571	12.823.823.571	-	Dana Alokasi Umum (DAU),DAU Tambahan Dukungan Pendanaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ,PAD Prov Bali, PKB
2.13.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 Dokumen	12 Dokumen	128.066.130	128.066.130	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Output Kegiatan: Jumlah Bulan Tersedianya Layanan		12 Bulan	12 Bulan	373.902.950	243.710.950	(130.192.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Administrasi Umum							
		- Hasil Kegiatan:Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	1 paket	1 paket	5.992.400	5.992.400	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	3 paket	3 paket	25.523.100	25.523.100	-	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Disediakan							
2.13.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	3 paket	3 paket	75.738.750	75.738.750	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	1 paket	1 paket	6.048.100	6.048.100	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pernudang- Undangan yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	2 dokumen	2 dokumen	4.626.600	4.626.600	-	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4 laporan	4 laporan	1.350.000	1.350.000	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Bali, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 laporan	3 laporan	254.624.000	124.432.000	(130.192.000)	PAD Prov Bali
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Output Kegiatan: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	100%	6.439.600	6.439.600	-	
		- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen		82,85 Nilai	82,85 Nilai				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kinerja							
2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Bali, DenpasarTimur, Sumerta Kelod	1 unit	1 unit	6.439.600	6.439.600	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Output Kegiatan: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan		100%	100%	690.670.594	690.670.594	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Hasil Kegiatan:Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 laporan	1 laporan	174.800.000	174.800.000	-	PAD Prov Bali
2.13.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 laporan	1 laporan	515.870.594	515.870.594	-	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Output Kegiatan: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		100%	100%	1.198.193.428	1.198.193.428	-	
		- Hasil Kegiatan:Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,85 Nilai	82,85 Nilai				
2.13.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	17 unit	17 unit	1.098.383.428	1.098.383.428	-	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jabatan							
2.13.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	51 unit	51 unit	99.810.000	99.810.000	-	PAD Prov Bali
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes		29 Desa	29 Desa	135.878.612	123.878.612	(12.000.000)	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	- Output Kegiatan: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar		4,56%	4,56%	135.878.612	123.878.612	(12.000.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		desa dan kemitraan,							
		- Hasil Kegiatan:Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes		29 Desa	29 Desa				
2.13.03.1.01.001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	135.878.612	123.878.612	(12.000.000)	PAD Prov Bali
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang		93,87%	93,87%	666.251.370	554.639.370	(111.612.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Output Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa		93,87%	93,87%	666.251.370	554.639.370	(111.612.000)	
		- Hasil Kegiatan: Persentase Desa Cepat Berkembang		93,87%	93,87%				
2.13.04.1.01.002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	187.162.830	144.337.830	(42.825.000)	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.1.01.008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	441.492.840	394.020.840	(47.472.000)	PAD Prov Bali
2.13.04.1.01.016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	37.595.700	16.280.700	(21.315.000)	PAD Prov Bali
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif		99,69%	99,69%	5.341.186.660	7.566.609.660	2.225.423.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Output Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif		100%	100%	5.341.186.660	7.566.609.660	2.225.423.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Hasil Kegiatan: Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang mampu menjalankan tugas, pokok dan fungsi		100%	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.1.01.004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1500 unit	1500 unit	141.746.520	2.106.706.520	1.964.960.000	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.1.01.005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2 dokumen	2 dokumen	189.354.940	164.394.940	(24.960.000)	PAD Prov Bali
2.13.05.1.01.006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2 dokumen	2 dokumen	585.557.120	298.160.120	(287.397.000)	PAD Prov Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.1.01.009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Laporan	1 Laporan	4.424.528.080	4.997.348.080	572.820.000	PAD Prov Bali
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					678.793.860	572.377.860	(106.416.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana		4 sektor	4 sektor	678.793.860	572.377.860	(106.416.000)	
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Output Kegiatan: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali		1351 orang	1351 orang	678.793.860	572.377.860	(106.416.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Hasil Kegiatan: Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana		4 sektor	4 sektor				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target		Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	9 Daerah	9 Daerah	199.955.000	199.955.000	-	DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Keluarga Berencana
TOTAL						22.984.549.537	24.521.921.537	1.537.372.000	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai pihak utamanya *stakeholders* terkait, sehingga berhasil disusun dokumen perencanaan untuk satu tahun kedepan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali terikat akan dokumen perencanaan ini. Dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali ini, diharapkan pula dapat mendorong partisipasi masyarakat khususnya *stakeholders* terkait dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga ikut bertanggung jawab dalam upaya peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang lebih berkualitas.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025, memperhatikan Kaidah –Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

- A. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu,
- B. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- C. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
- D. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

5.3 Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali sendiri maupun *stakeholder* terkait yang berkepentingan. Semoga Renja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025.

Bali, 9 Juli 2025



I Made Dwi Dewata, S.STP.,M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750417 199601 1 001



PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali

KATA PENGANTAR



Puja pengastuti dan Angayubagia kami haturkan ke hadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 telah selesai disusun.

Perubahan Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Periode 2024 – 2026 serta mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029. Perubahan Renja ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA SKPD Perubahan Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja ini diharapkan segala potensi yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat diarahkan dan dioptimalkan secara bertahap dalam rangka Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien.

Demikian agar Perubahan Renja ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025.

Bali, 9 Juli 2025
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Provinsi Bali



Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680531 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2025.....	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfos Triwulan I Tahun 2025 Dan Capaian Renstra Diskominfos	 7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	 50
2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD	51
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	 64
 BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	 66
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	 66
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	68
3.3 Program Dan Kegiatan	69
 BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	 73
BAB V Penutup	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada Lampiran V disebutkan bahwa tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi tersebut, diperlukan sebuah rencana kerja konkret yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang mana Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta dengan telah dilantiknnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 ini disusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus

sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan disusunnya Renstra Periode Tahun 2025-2029 ini maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap perubahan Renja Tahun 2025 untuk memastikan arahan perencanaan pembangunan dan penganggaran telah sesuai dengan dokumen Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yang saat ini tengah disusun.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, serta menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Oleh karenanya, substansi Perubahan Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan Tingkat Pusat dan dokumen perencanaan Tingkat Provinsi, dan tentunya mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- k. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- l. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- m. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
- n. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- o. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
- s. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- t. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- u. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
- x. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12);

- y. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- z. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);
- aa. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 24).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan tujuan pada visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai standar acuan kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya selama 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025) sebagaimana telah tertuang dalam Rancangan RPJMD Pemerintah Provinsi Bali dan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan: Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

- BAB II Hasil Evaluasi Renja Diskominfo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I: Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2025 Triwulan I dan Capaian Renstra Diskominfo, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Perubahan RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah: Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan;
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan;
- BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOS TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOS

Sesuai Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ditetapkan perencanaan kinerja untuk tahun 2025 sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 43 Sub kegiatan.

Dalam tabel 2.1 berikut disajikan program, kegiatan dan indikator kinerja dalam target dan realisasi kinerja sbb :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskominfos Th 2025	Realisasi Renja Diskominfos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.8 Nilai	82.8 Nilai	)	Hasil penilaian belum ada)
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	4 Dokumen	25.00
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33.30
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25.00
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	75 Dokumen	9 Dokumen	12.00
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	78 Orang/ Bulan	121 Orang/ Bulan	100.00
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	0 Dokumen	-

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskominfos Th 2025	Realisasi Renja Diskominfos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25.00
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100.00
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	7 Paket	15.60
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0 Paket	-
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13505 Dokumen	13505 Dokumen	1911 Dokumen	14.15
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	16.70
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	10 Laporan	20.00
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	0 Paket	-

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskominfos Th 2025	Realisasi Renja Diskominfos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0 Paket	-
2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0 Unit	-
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25.00
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25.00
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	16.70
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit	674 Unit	25 Unit	3.70
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit	7 Unit	25.00

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskominfos Th 2025	Realisasi Renja Diskominfos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	489 Unit	489 Unit	0 Unit	-
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	99 Unit	10 Unit	10.10
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	0 Unit	-
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	51 Unit	8 Unit	15.69
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan	94.10 persen	94.10 persen	0 persen	-
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	83.00 Indeks	83.00 Indeks	0 indeks	-
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten Digital	120 Konten Digital	36 Konten Digital	30.00
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	90.00%	90.00%	0 Dokumen	-

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskominfos Th 2025	Realisasi Renja Diskominfos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	-
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	100.00
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	225 Pemohon	225 Pemohon	75 Pemohon	33.30
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	3 Rekomendasi	25.00
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100.00
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82.07	82.07	0 Nilai	-

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskominfos Th 2025	Realisasi Renja Diskominfos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	100 Persen	73.33 persen	73.30
2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	-
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	-
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	100.00
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	4.20 nilai	4.20 nilai		-
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor	11 Sektor	0 Sektor	-
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	50 Orang	0 Orang	-

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskomifos Th 2025	Realisasi Renja Diskomifos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	100%	%	
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	-
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	76.00 nilai	76.00 nilai	0 nilai	-
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD	29 OPD	29 OPD	100.00
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	-

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskomifos Th 2025	Realisasi Renja Diskomifos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	-
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	-
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	100.00
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 OPD	29 OPD	29 OPD	100.00
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah		100.00
	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital					

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskomifos Th 2025	Realisasi Renja Diskomifos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82.07	82.07	0 Nilai	-
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	100 Persen	73.33 Persen	73.30
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	25 Aplikasi	25 Aplikasi	5 Aplikasi	20.00
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	-
	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali					
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82.07	82.07	0 Nilai	-

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		
				Target Renja Diskominfos Th 2025	Realisasi Renja Diskominfos Th 2025	Tingkat Realisasi ()
1	2	3	4	6	7	8 (7/6)
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	100 Persen	73.33 Persen	73.30
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	9 Unit	9 Unit	0 Unit	-
2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	umlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100.00

Mengacu pada anggaran induk tahun 2025 sesuai DPA tertanggal 2 Januari 2025 nomor DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2025 maka jumlah keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp. 391,563,686,845.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Triwulan I, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan baru mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 30.00%.

Realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 11.069.118.397,00 atau sebesar 2,83%. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2025 Triwulan I, maka uraian program berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 32,917,975,065.00 terealisasi sebesar Rp. 5,106,524,150.00 (15.51%).
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 12,609,073,172.00 terealisasi Rp. 2,814,083,873.00 (22.32%).
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran Rp. 345,194,454,648.00 dapat terealisasi Rp. 2,982,574,458.00 (0.86%).
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan anggaran Rp. 431,471,640.00 dapat terealisasi Rp. 60,973,228.00 (14.13%).
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran Rp. 410,712,320.00 terealisasi Rp. 104,962,688.00 (25.56%).

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan perangkat daerah dalam tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal/waktu pelaksanaan dan dukungan anggaran, sehingga target fisik dan keuangan dapat terealisasi dengan maksimal. Tujuan Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menargetkan indeks sebesar 3,20 dan terealisasi sebesar 4,30 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 4,07. Pada pemeringkatan nilai, indeks 4,30 merupakan peringkat dengan kategori Memuaskan karena berada di level 4,20 – 5,00. Pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui program-program prioritas secara garis besar dapat diuraikan sbb:

1. Program pengelolaan aplikasi informatika

Diwujudkan dengan kegiatan:

a) Pelayanan Jaringan Internet dan Intranet

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki perangkat jaringan internet terintegrasi untuk menyediakan layanan akses internet untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sebagai Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* dalam bidang Teknologi Informasi maka dibutuhkan konektivitas yang tinggi dan layanan internet untuk menunjang kinerja pegawai. Pada tahun 2024 pengadaan layanan internet IP transit internasional pada Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar 4 Gbps dan digunakan untuk pelayanan internet yang terintegrasi untuk seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali.

Selain layanan internet kepada Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga memberikan layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se-Bali. Besar bandwidth yang dialokasikan untuk setiap titik adalah sebesar 50 mbps. Data Layanan Free Wifi di SMAN/SMKN/SLBN sesuai tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Data Layanan Free Wifi di SMAN/SMKN/SLBN sampai tahun 2024.

No	Kab./Kota	Jumlah			
		SMA	SMK	SLB	Total
1	Jembrana	7	5	1	13
2	Tabanan	9	3	1	13
3	Badung	13	4	1	18
4	Gianyar	9	8	1	18
5	Klungkung	6	2	1	9
6	Bangli	5	9	1	15
7	Karangasem	10	6	1	17
8	Buleleng	17	14	2	33
9	Denpasar	14	7	3	24
Jumlah		90	58	12	160

b) Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta responsif. Pengelolaan dan pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis

elektronik terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali melalui UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Roadmap SPBE Provinsi Bali dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali.

Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dari periode 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 62 aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Adapun daftar aplikasi yang dibangun/dikembangkan adalah sesuai tabel 2.3.

Tabel 2.3 Daftar Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
1	Sistem Monitoring Kemiskinan dan Stunting (SiGenting)	https://sigenting.baliprov.go.id
2	Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA)	https://sigapura.baliprov.go.id
3	Sistem Perizinan Elektronik (PRETISE)	https://prestise.baliprov.go.id
4	Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana (PIKBS)	https://invest.baliprov.go.id
5	Sistem Informasi, Pendataan dan Penyelenggaraan Pungutan Bagi Wisatawan Asing (LOVE BALI)	Website : https://lovebali.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/lovebali-playstore App Store : https://balikom.info/lovebali-appstore
6	Sistem Keuangan Desa	https://sikuat.baliprov.go.id

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
	Adat (SIKUAT)	
7	Kantor Virtual	Website : https://kanal.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/kanal-playstore App Store : https://balikom.info/kanal-appstore
8	Kantor Virtual Publik	https://kanal.baliprov.go.id
9	Sistem Layanan Kepegawaian (SIMPEG)	https://simpeg.baliprov.go.id
10	Sistem Absensi berbasis Pengenalan Wajah dan Lokasi	Website : https://hadir-app.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/hadir-playstore App Store : https://balikom.info/hadir-appstore
11	Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online (SIKEPO)	https://sikepo.baliprov.go.id
12	Sistem Antrean Layanan Publik	Website : https://antrean.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/antrean-playstore App Store : https://balikom.info/antrean-appstore
13	Bali Media Centre (BMC) : Portal Berita, Survei, Konsultasi/HelpDesk, Kontak dan Informasi Publik lainnya	Website : https://bmc.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/bmc-playstore App Store : https://balikom.info/bmc-appstore
14	Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	https://sisnaker.baliprov.go.id
15	Sistem Pelayanan Perikanan (SIMPELKAN)	https://simplkan.baliprov.go.id
16	Layanan Bali Digital Festival	https://digifest.baliprov.go.id
17	Sistem Penyelenggaraan Event (EVENTID) : Registrasi, Absensi, Piagam Elektronik	Website : https://undangan.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/undangan-playstore App Store : https://balikom.info/undangan-appstore
18	Virtual Reality (VR) Pura Pulaki	https://var.baliprov.go.id/
19	Virtual Reality (VR)	https://var.baliprov.go.id/

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
	Gamelan Tradisional Rindik, Kecek, dll	
20	Virtual Reality (VR) Nyomia Bhutakala	https://var.baliprov.go.id/
21	Virtual Tour 360 Experience	https://virtualtour360.baliprov.go.id/
22	Augmented Reality (AR) Daerah Tujuan Wisata	https://var.baliprov.go.id/
23	Augmented Reality (AR) Instagram Filter Bali Era Baru	https://var.baliprov.go.id/link-tree
24	Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali	Website : https://balisatudata.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/balisatudata-playstore App Store : https://balikom.info/balisatudata-appstore
25	Smart Dashboard”	https://smart.baliprov.go.id/
26	Sistem Pendataan Data Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota	https://datasektoral.baliprov.go.id/
27	Sistem Pengelolaan Data (CERAKEN) Kebudayaan Bali	https://ceraken.baliprov.go.id/
28	Bali Knowledge Based System (INSIGHT)	https://insight.baliprov.go.id/
29	Sistem Single Sign On (SSO)	https://sso.baliprov.go.id
30	Sistem Manajemen Talenta (SIMATA)	https://simata.baliprov.go.id/
31	Sistem Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali	Website : https://aset.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/aset-playstore App Store : https://balikom.info/aset-appstore
32	Sistem Perpustakaan Digital “Pustaka Bali”	https://esakip.baliprov.go.id/
33	Sistem Strategi Penguatan Manajemen Resiko Berkualitas (SUPERMANKUAT)	https://supermankuat.baliprov.go.id/
34	Sistem Pemantauan	https://petiemas.baliprov.go.id

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
	Internal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (PETIEMAS)	
35	Layanan Smartlink	https://www.balikom.info/
36	Sistem Notifikasi Terintegrasi	https://notifikasi.baliprov.go.id/
37	Sistem Pendataan Koperasi (Online Data Koperasi)	https://koperasi.baliprov.go.id/
38	Sistem pendataan IKM dan UMKM	https://officeumkm.baliprov.go.id/
39	Marketplace bagi Produk Koperasi, UMKM dan IKM Bali (Made in Bali)	Website : https://madeinbali.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/madeinbali-playstore
40	Integrasi Pembayaran Layanan Aplikasi/ One Payment Gateway (SiPAY)	https://sipay.baliprov.go.id/
41	Pameran Virtual Pembangunan Bali	https://pameran.baliprov.go.id/
42	Permohonan Informasi Publik dalam Portal Bali Satu Data	Website : https://balisatudata.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/balisatudata-playstore App Store : https://balikom.info/balisatudata-appstore
43	Sistem Perpustakaan Digital (Pustaka Bali)	https://pustakabali.baliprov.go.id/
44	Kelas Virtual	Website : https://kelasvirtual.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/kelasvirtual-playstore App Store : https://balikom.info/kelasvirtual-appstore
45	Website Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bung Karno	https://bulanbungkarno.baliprov.go.id/

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
46	Layanan Pemanfaatan Aset	Website : https://aset.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/siwa-playstore App Store : https://balikom.info/siwa-appstore
47	Layanan Bug Bounty	https://bugbounty.baliprov.go.id/
48	Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)	https://jidhat.baliprov.go.id/
49	Sistem Sensus Desa Adat	https://sensusadat.baliprov.go.id/
50	Sistem Informasi Krama Desa Adat (KRAMA)	https://krama.baliprov.go.id/login
51	Sistem Manajemen Aset Desa Adat (PADRUWEN)	https://aset.baliprov.go.id/
52	Sistem Manajemen Lembaga Usaha Milik Desa Adat (BUPDA)	https://aset.baliprov.go.id/
53	Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat (SIK-KBS)	Website : https://sik-kbs.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/sik-kbs-playstore App Store : https://balikom.info/sik-kbs-appstore
54	Sistem Inventori (SIRI)	https://siri.baliprov.go.id/
55	Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan	https://labkes.baliprov.go.id/
56	Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan (SILEBAH)	https://silebah.baliprov.go.id/
57	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali	Website : https://jdih.baliprov.go.id/ Play Store : https://balikom.info/jdihprovbali-playstore App Store : https://balikom.info/jdihprovbali-appstore
58	Whistleblower System (WBS) Pemprov Bali	https://wbs.baliprov.go.id/
59	Website Turyapada	https://turyapada.baliprov.go.id/
60	SIAP SWASTISABA	https://swastisaba.baliprov.go.id/

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
61	Sistem Informasi Layanan Cuti Terintegrasi (SILACI)	Website : https://hadir-app.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/hadir-playstore App Store : https://balikom.info/hadir-appstore
62	Sistem Pengawasan dan Pelaporan Terintegrasi E-KTTP (SIWALATRI E-KTPP)	Website : https://siwalatri.baliprov.go.id Play Store : https://balikom.info/AndroidApp App Store : https://balikom.info/IOsApp

c) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali

Dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat, peran teknologi informasi kini menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah. Pusat data menjadi komponen yang sangat penting dalam mengelola, menyimpan, dan menganalisis data secara efektif. Sebagai tulang punggung infrastruktur teknologi informasi, pusat data bukan hanya sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai katalisator dalam transformasi digital yang memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik saat ini mengelola Pusat Data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi serta pusat penyaluran akses internet ke seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. Pusat Data ini juga menyediakan layanan komputasi private cloud untuk Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Layanan komputasi yang saat ini digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) berupa layanan

virtual machine yang digunakan untuk menempatkan data, aplikasi, dan website. Private cloud ini dibangun di atas perangkat keras HP Blade Server C7000 dengan jumlah server fisik sebanyak 11 (sebelas) unit, dengan total kapasitas terpasang sebagai berikut:

- vCPU: 128 core (alokasi minus, namun tidak digunakan secara penuh)
- Memori: 768 GB (tersisa 300 GB)
- Storage: 22 TB (tersisa 4 TB)
- Bandwidth: 4 Gbps

Namun, saat ini Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki backup server, sehingga apabila terjadi down pada pusat data, aplikasi tidak bisa diakses oleh publik. Selain itu, Pusat Data ini juga belum sepenuhnya memenuhi standar Pusat Data Nasional sebagaimana amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (2). Dalam rangka menjaga agar pusat data dapat berfungsi optimal dan untuk mencegah gangguan, pada tahun 2024 dilakukan kegiatan pemeliharaan berupa penggantian peralatan/komponen server serta pemeliharaan genset untuk memastikan kestabilan cadangan daya listrik apabila terjadi pemadaman dari PLN.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perangkat server yang saat ini digunakan sudah mulai berusia tua dan tidak lagi dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Perangkat keras yang sudah diskontinu ini semakin sulit untuk diupgrade, dan kesulitan dalam

pembaruan software juga mulai terlihat. Untuk mendukung digitalisasi birokrasi dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi, serta memastikan kelangsungan operasional Pusat Data dalam jangka panjang, pada tahun 2025 direncanakan untuk menambahkan server baru yang lebih sesuai dengan standar terkini. Penambahan server baru ini akan meningkatkan kapasitas penyimpanan, komputasi, serta memberikan dukungan untuk layanan cloud server bagi Perangkat Daerah yang lebih efisien dan handal.

Selain itu, untuk memaksimalkan kerja dan memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah, diperlukan perangkat pendukung yang lebih modern, seperti personal komputer yang dapat bekerja selama 24 jam untuk memantau dan mengelola server Pusat Data secara lebih optimal. Penambahan server baru ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pusat Data tetap berfungsi dengan baik, dapat memberikan layanan yang prima kepada masyarakat, serta mendukung efisiensi operasional Pemerintah Provinsi Bali.

d) Pembangunan Lanjutan Taman Teknologi Komunikasi
“Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali”

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi ini dilakukan untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa

Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru. Pembangunan Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” untuk tahap awal sudah selesai dilaksanakan. Pekerjaan interior dasar, instalasi listrik, dan sistem pemancar telah dipasang untuk mendukung fungsionalitas menara sebagai pemancar siaran digital. Pada April 2025, siaran TV digital resmi mengudara melalui Turyapada Tower dengan menayangkan 10 kanal televisi nasional dan daerah yang bekerjasama dengan ANTV (VIVA Group). Saat ini Tower Turyapada sedang mempersiapkan siaran TV digital yang bekerjasama dengan TVRI dan Nusantara TV sebagai penyelenggara MUX di Bali.

Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pendukung antara lain:

- a. Planetarium Tower Turyapada;
- b. Pusat Kendali Operasional Tower Turyapada;
- c. Restoran Outdoor;
- d. Area komunal & Lobby komunal, Lobby Glamping, dan Wahana Outbond
- e. Dinding Penahan Tanah (DPT), Landscape Kawasan Turyapada Tower, Pagar BRC dan Tembok Beton;
- f. Penataan Areal Parkir;
- g. Jalan Akses dari Jalan Utama menuju Areal Parkir Turyapada Tower dan Jalan Lingkar Selatan Turyapada Tower;
- h. Bangunan Tempat Suci;
- i. Mess Pegawai Tower Turyapada; dan

- j. Tempat Pengelolaan Sampah Kawasan Turyapada Tower.

Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dilakukan kerjasama dengan LPPM Universitas Udayana melalui pekerjaan Swakelola Manajemen Konstruksi. Swakelola Manajemen Konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi bertujuan antara lain:

- i. Dapat dicapai hasil perencanaan dan pelaksanaan konstruksi fisik Taman Teknologi Komunikasi yang sesuai dengan dokumen kontrak baik dari sisi kualitas, kuantitas serta dapat diselesaikan dalam waktu dan biaya yang telah ditentukan; dan
 - ii. Terwujudnya sistem manajerial (Manajemen Konstruksi) yang terkoordinasi antar disiplin ilmu didalam proses pembangunan konstruksi fisik, baik dalam proses pelaksanaan fisik konstruksi serta proses masa pemeliharaan melalui proses penerapan fungsi-fungsi Manajemen Konstruksi dan penempatan personil-personil yang sesuai dalam pelaksanaannya.
- e) Layanan BKK Wifi Gratis
- Pada tahun 2024 layanan BKK Wifi Gratis bagi Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas pada 2.118 titik layanan wifi untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah. Layanan Free Wifi

tersebut dikecualikan untuk Kabupaten Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung. Data layanan BKK Free Wifi terinci sesuai tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Layanan BKK Free Wifi

NO	KAB./KOTA	Lokasi Pemasangan				Jumlah Titik Wifi
		Desa Adat	Puskesmas	Fasilitas Umum	Objek Wisata	
1	JEMBRANA	64	10	36	13	123
2	TABANAN	349	20	106	24	499
3	GIANYAR	273	81	99	28	481
4	KLUNGKUNG	122	9	27	3	161
5	BANGLI	172	12	38	39	261
6	KARANGASEM	143	12	13	53	221
7	BULELENG	169	19	66	43	297
8	DENPASAR	35	21	17	2	75
9	BADUNG	Dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung				
JUMLAH		1,327	184	402	205	2,118

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah tidak terlepas dari adanya penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Program-program kegiatan yang mendukung kebijakan pemerintah tentu harus tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, media luar ruang dan media online. Guna mengoptimalkan hubungan antara instansi pemerintah, media massa dan stakeholder lainnya serta mengoptimalkan penyebaran informasi program dan

kebijakan pemerintah, maka berbagai upaya telah ditempuh sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media Televisi, Radio, Media Online, Media Sosial dan Konten Kreatif.

Fokus dan sasaran publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Bali bukan hanya terbatas pada masyarakat luas, tetapi juga pada para praktisi jurnalistik di media massa. Hal ini mengingat semakin derasnya arus informasi yang memenuhi ruang-ruang publik. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat menjadi semakin banyak dan beragam. Di sinilah pentingnya menjalin hubungan dengan pers, sehingga kualitas informasi yang bersumber dari media baik cetak, elektronik, maupun online dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar. Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kerjasama dengan 18 Media Cetak, 32 Media Online, 4 Media Televisi dan 34 Media Radio. Kegiatan penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial Pemerintah Provinsi Bali dan konten-konten kreatif berupa iklan radio/TV, tayangan sosialisasi maupun media luar ruang seperti spanduk, banner, backdrop, baliho dan billboard disamping mendokumentasikan kegiatan pimpinan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan. Berkembangnya era digital saat ini, menuntut pemerintah daerah untuk mencari cara-cara menarik dalam mengemas informasi agar informasi-informasi khususnya mengenai program-program dan kebijakan pemerintah lebih menarik, mudah dipahami, relevan dan lebih cepat sampai ke Masyarakat.

b. Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi publik dilaksanakan dalam rangka penyampaian program-program pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan pemerintah sekaligus masyarakat dapat memantau, mengawasi program-program tersebut. Pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yakni secara offline (tatap muka langsung) dan online melalui alamat *website* <https://diskominfos.baliprov.go.id> dan melalui *email* diskominfos@baliprov.go.id. Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan jaminan untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintah Provinsi Bali menindaklanjuti implementasi dari Undang-Undang tersebut, dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi serta menetapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris di OPD sebagai PPID Pelaksana.

Untuk meningkatkan kualitas layanan PPID, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah melakukan rapat koordinasi dengan PPID

Pelaksana secara rutin dan juga menyelenggarakan bimbingan teknis singkat terkait dengan keterbukaan informasi dari berbagai narasumber.

Dalam upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan Kolaborasi Bali Digifest yang bertempat di Ardha Candra, Taman Budaya (Art Center) Bali. Bali Digital Festival yang berisi konferensi, pameran, dan exhibition ini diselenggarakan, bukan hanya untuk menjadi ajang penyampaian gagasan dan ide, namun yang lebih penting daripada itu, harus dilihat sebagai bagian dari langkah-langkah taktis Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya membangun ekosistem Digital Berkelanjutan, untuk mewujudkan Transformasi Digital yang bersifat integratif dan kolaboratif. Namun perlu diingat dan dicatat, bahwa apapun bentuk pembangunan Bali termasuk Pembangunan di bidang digital harus tetap menjaga, menghormati, dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada 3 (tiga) fundamental pembangunan Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali, dan Budaya Bali, untuk mewujudkan Bali yang berkualitas dan Bali berkelanjutan.

- c. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, melalui: Literasi Informasi dan media sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Kegiatan penguatan pengelolaan opini publik dan isu publik pada tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta pemantauan isu-isu publik di media massa, media online dan

media sosial. Output yang dihasilkan berupa analisa isu dan berita yang menghasilkan rekomendasi terkait strategi komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai bahan masukan untuk tindak lanjut maupun perencanaan program dan kegiatan pembangunan;

- Kegiatan fasilitasi terhadap Komisi Informasi Provinsi Bali yang dilakukan sepanjang tahun melalui dukungan administratif, kelembagaan dan keuangan. Dukungan administratif untuk membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari khususnya penyelesaian sidang sengketa informasi. Dukungan kelembagaan dalam bentuk kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Dukungan keuangan diberikan dalam bentuk ketersediaan anggaran melalui DPA pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Pada tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Bali menyelenggarakan 2 kali sidang sengketa informasi dengan hasil 1 putusan dan 1 mediasi.

d. Pelaksanaan Literasi Digital

Pelaksanaan Literasi Digital Tahun 2024 dilaksanakan dengan berkolaborasi dan melibatkan komunitas maupun Lembaga Masyarakat yang aktif bergerak dibidang penanganan HOAX serta Literasi Digital seperti RTIK Provinsi Bali dan MAFINDO Wilayah Bali.

1. Pelaksanaan Literasi Digital Melalui Tatap Muka

Pelaksanaan Literasi Digital Tahun 2024 melalui tatap muka dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Sasaran peserta ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Tema dari Literasi Digital dengan target sasaran ASN adalah “ASN Tangkal HOAX melalui Cek Fakta”. Pelaksanaan Literasi Digital “ASN Tangkal HOAX melalui Cek Fakta” ini bertujuan agar ASN memiliki pemahaman tentang cek fakta dan memiliki kemampuan dasar dalam cek fakta. Selain itu juga mendorong ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk mampu memanfaatkan media social secara bijak sesuai dengan kode etik kepegawaian dan peraturan lainnya serta sebesar-besarnya dipergunakan untuk menyebarkan informasi terkait program Pembangunan.

- b. Sasaran peserta Masyarakat Umum, KIM dan UMKM

Dalam rangka menumbuhkan Netizen Cakap Digital dilaksanakan dengan topik “Memanfaatkan Media Sosial untuk Menambah Penghasilan”. Topik ini dalam rangka mengembangkan kemampuan *entrepreneur* masyarakat dan menumbuhkan perekonomian digital melalui pemanfaatan media sosial.

- c. Sasaran Masyarakat Umum, Pelajar, ASN

Di bidang keamanan digital dilaksanakan untuk mengantisipasi berbagai Tindakan kejahatan online antara lain Investasi Bodong dan Judi Online dengan tema “Mewaspadaai Bahaya Pinjol dan Judi Online di Media Sosial”.

2. Pelaksanaan Literasi Digital melalui Media Sosial

Pelaksanaan Literasi Digital melalui media sosial dilaksanakan melalui beberapa *platform* yakni Instagram, Facebook dan Youtube, dengan nama akun yang sama yaitu **opinipublik12**. Pelaksanaan Literasi Digital melalui media sosial utamanya Instagram **opinipublik12** diharapkan mampu menjangkau lebih banyak peserta melalui unggahan konten-konten baik berupa ilustrasi, foto, reel maupun infograpik terkait literasi digital.

3. Pelaksanaan Literasi Digital pada Pameran Pembangunan

Pelaksanaan Literasi Digital Tahun 2024 juga dilaksanakan dengan memanfaatkan event atau kegiatan Pameran Pembangunan. Sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, Pameran Pembangunan merupakan sarana efektif untuk mensosialisasikan Literasi Digital. Selain itu Pameran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 di laksanakan dengan berkolaborasi dan bersamaan dengan kegiatan Bali Digifest yang merupakan pameran terkait pelaksanaan tugas pemerintah di bidang digital, sekaligus sarana pengembangan ekosistem digital untuk Masyarakat Bali. Literasi Digital pada Pameran Pembangunan ditampilkan melalui kegiatan “Pojok Literasi Digital.” Pada Pojok Literasi Digital, ditampilkan berbagai informasi terkait 4 pilar Literasi Digital yaitu Digital Ethic, Digital Culture, Digital Skill dan Digital Safety melalui penayangan video pendek hasil lomba Literasi

Digital, permainan dan talkshow. Talkshow menghadirkan narasumber dari penggiat-penggiat Literasi Digital di Bali antara lain MAFINDO Wilayah Bali, RTIK Provinsi Bali, OJK, dan instansi/Lembaga yang berkepentingan terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

4. Pelaksanaan Literasi Digital melalui Kolaborasi Stakeholder

Selain melaksanakan Literasi Digital melalui kegiatan tatap muka pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, penayangan konten Instagram, Pojok Literasi Digital pada Pameran Pembangunan dan juga dilaksanakan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti RTIK Provinsi Bali dan MAFINDO Wilayah Bali. Kolaborasi diberikan melalui dukungan fasilitasi untuk Literasi Digital yang dilakukan baik oleh RTIK Provinsi Bali dan MAFINDO Wilayah Bali.

e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Selama tahun 2024 kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pelayanan sound system melalui satu unit mobil, lengkap dengan perangkat sound beserta tenaga operatornya, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan perangkat daerah lainnya.
- Pelaksanaan Forum Kehumasan Provinsi Bali diawali dengan pengumpulan data-data tentang isu-isu aktual dimasyarakat, dilanjutkan dengan analisis isu-isu, alternatif pemecahan masalah, dilanjutkan

dengan sosialisasi pemecahan masalah melalui forum kehumasan

3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Urusan Persandian di Pemerintah Daerah merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun layanan yang perlu dilakukan sesuai kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian adalah melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menyelenggarakan urusan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Bidang Persandian pada tahun 2024 melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Analisa kebutuhan SDM persandian (Jabatan Fungsional Sandiman) dan Analisa kebutuhan sumber daya keamanan informasi lainnya serta pengelolaan SDM Persandian untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan BSSN atau pihak lain yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang berhubungan dengan pelaksanaan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan tahun 2024 yakni melalui Lentera Siber dengan konsep melibatkan peserta secara langsung berinteraksi serta menjadikan peserta sebagai target

serangan siber dengan harapan lebih tertanam kesadaran keamanan informasi/siber. Selanjutnya dalam mencegah infeksi *malware* di perangkat (komputer dan laptop) aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali serta untuk memudahkan monitoring keamanan perangkat dari *malware*, dilaksanakan pengadaan *antivirus* terpusat (*TrendMicro*)

b. Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

Menyelenggarakan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mendeteksi, menanggulangi dan memulihkan segala bentuk ancaman serangan cyber yang bertujuan mengamankan informasi elektronik. CSIRT adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan usaha-usaha untuk memitigasi, memperbaiki dan atau mengembalikan sebuah Sistem Elektronik ke kondisi normal. Pada Tanggal 5 Mei 2021 telah diresmikan Baliprov-CSIRT dengan anggota CSIRT adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

c. Kontra Penginderaan

Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan Jammer yang bertujuan pengamanan informasi non elektronik Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan pemeriksaan barang elektronik untuk menghindari terjadinya penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran informasi. Tahun 2024 kegiatan ini dilakukan dengan melakukan fasilitasi kegiatan pengacakan sinyal (jammer) pada saat kunjungan kepala negara.

d. Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Sertifikat Elektronik (SE) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Sampai dengan saat ini pemegang Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah Sekretaris Daerah, Eselon II, KaUPTD, Sekretaris, Pejabat Keuangan yang menangani dana dekon dan Ka SMAN, SMKN dan SLBN di lingkup Pemprov Bali. Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan salah satu upaya untuk mengamankan informasi elektronik.

e. IT Security Assesment (ITSA)

ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi elektronik (software) dalam tahapan testing (sebelum aplikasi diluncurkan) dengan tujuan untuk menemukan celah kerentanan keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan dikemudian hari. Aplikasi yang dilakukan untuk melakukan pengujian antara lain: *Kali Linux*, *OWASP ZAP*, *BurpSuite* dan *Pentest Tool*. Sebelumnya VA/ITSA dilakukan oleh BSSN dengan kuota 3 aplikasi per Tahun. Sejak tahun 2023 kegiatan VA/ITSA sudah dapat dilakukan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

f. Pengelolaan *Secure Email* SANAPATI dan *Selection*

Pengelolaan *email* SANAPATI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 41/03-E/HK/2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana E-Mail Sanapati pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali. *Email* SANAPATI adalah surat elektronik (*email*) yang menggunakan jalur komunikasi tertutup dan memiliki proteksi terhadap *spam*, *fake mail*, *phising* dan *email bombing*. *Email* SANAPATI digunakan sebagai media kirim terima informasi yang aman dalam kerangka Jaring Komunikasi Sandi internal dan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan *SELECTION (Secure File Encryption)* merupakan *tool* untuk *enkripsi/dekripsi file* yang berbasis sistem operasi *windows* dan memiliki fitur autentikasi lisensi mandiri serta penerapan aspek kriptografis pada fitur keamanannya.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Bali Satu Data merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali s/d Triwulan I Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp) (TW I)	Prsentase Tw I				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target ()	Realisasi ()	Target ()	Realisasi ()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4-5)
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67,685,700	1,760,000	94.40	21.16	94.40	2.60	65,925,700
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,290,300	-	37.49	18.83	37.49	0.00	16,290,300
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25,526,326,517	4,075,966,509	35.45	35.45	35.45	15.97	21,450,360,008
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VeriFikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,445,301,700	13,284,000	1.55	1.52	1.55	0.92	1,432,017,700
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15,443,000	7,425,000	50.51	50.00	50.51	48.08	8,018,000

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp) (TW I)	Prsentase Tw I				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target ()	Realisasi ()	Target ()	Realisasi ()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4-5)
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42,914,800	16,037,250	74.54	48.89	74.54	37.37	26,877,550
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	87,500,000	4,305,000	11.60	11.60	11.60	4.92	83,195,000
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13,670,400	5,280,000	100.00	50.00	100.00	38.62	8,390,400
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	31,522,600	2,707,600	25.10	25.10	25.10	8.59	28,815,000
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,630,000	-	27.79	27.79	27.79	0.00	12,630,000
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683,978,000	23,542,956	23.60	12.46	23.5987	3.442063	660,435,044
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	199,761,000	-	29.38	0.50	29.3781	0	199,761,000
2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	697,980,340	-	98.60	0.55	98.6024	0	697,980,340
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,998,700	1,910,000	100.00	100.00	100.00	63.69	1,088,700

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp) (TW I)	Prsentase Tw I				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target ()	Realisasi ()	Target ()	Realisasi ()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4-5)
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	385,000,000	90,560,191	25.00	26.42	25.00	23.52	294,439,809
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	180,000,000	-	25.00	25.00	25.00	0.00	180,000,000
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2,151,128,888	648,435,348	37.38	37.91	37.38	30.14	1,502,693,540
2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6,400,000	-	25.00	2.05	25.00	0.00	6,400,000
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99,490,000	5,000,000	43.38	26.49	43.38	5.03	94,490,000
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,164,773,120	210,310,296	21.34	19.35	21.34	18.06	954,462,824
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	87,180,000	-	28.09	16.67	28.09	0.00	87,180,000
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1,381,642,780	170,989,886	43.39	12.69	43.39	12.38	1,210,652,894

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp) (TW I)	Prsentase Tw I				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target ()	Realisasi ()	Target ()	Realisasi ()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4-5)
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	1,484,001,282	191,004,100	44.15	23.15	44.15	12.87	1,292,997,182
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1,687,524,460	152,353,410	13.34	13.35	13.30	9.03	1,535,171,050
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2,373,117,170	2,052,777,574	88.38	87.85	88.38	86.50	320,339,596
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1,357,171,032	50,501,410	10.33	5.59	10.33	3.72	1,306,669,622
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	342,520,420	41,885,164	31.26	20.98	31.26	12.23	300,635,256
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3,983,096,028	154,572,329	32.20	23.66	32.20	3.88	3,828,523,699

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp) (TW I)	Prsentase Tw I				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target ()	Realisasi ()	Target ()	Realisasi ()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4-5)
2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	2,935,189,600	8,511,500	46.82	0.50	46.82	0.29	2,926,678,100
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	297,507,110,322	810,547,012	16.01	0.27	16.01	0.27	296,696,563,310
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	18,466,602,192	65,667,600	33.52	9.03	33.52	0.36	18,400,934,592
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4,293,218,250	383,877,900	38.26	19.39	38.26	8.94	3,909,340,350
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3,849,887,240	331,556,950	54.11	17.89	54.11	8.61	3,518,330,290
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	11,514,213,894	1,371,333,496	37.61	11.91	37.61	11.91	10,142,880,398

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp) (TW I)	Prsentase Tw I				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target ()	Realisasi ()	Target ()	Realisasi ()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4-5)
2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	umlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	6,628,233,150	11,080,000	56.98	0.18	56.98	0.17	6,617,153,150
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	138,351,510	24,008,582	18.44	26.05	18.44	17.35	114,342,928
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	142,417,110	15,896,982	42.54	19.73	42.54	11.16	126,520,128
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	150,703,020	21,067,664	35.38	34.66	35.38	13.98	129,635,356
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	34,024,900	716,500	54.14	4.23	54.14	2.11	33,308,400

Kode	Uraian Belanja	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp) (TW I)	Prsentase Tw I				Sisa Anggaran (Rp)
					Fisik		Keuangan		
					Target ()	Realisasi ()	Target ()	Realisasi ()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4-5)
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	172,677,410	85,655,706	56.41	54.67	56.41	49.60	87,021,704
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10,312,800	324,500	60.73	12.88	60.73	3.15	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	72,312,000	-	14.52	0.05	14.52	0.00	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	121,385,210	18,265,982	29.04	17.53	29.04	15.05	103,119,228
TOTAL			391,563,686,845	11,069,118,397	21.41	5.12	21.41	2.83	380,412,268,148

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali berperan dalam mendukung tujuan 5 yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi yang diwujudkan dengan komunikasi dan informasi publik yang

efektif dan efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Sedangkan untuk dapat mendukung tujuan 6 RPD Provinsi Bali yaitu Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan diwujudkan dengan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi melalui Program Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.

Dalam rangka mewujudkan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien berbasis Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi juga melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Tugas pokok dan fungsi diwujudkan dalam bentuk program dan direalisasi melalui kegiatan dengan sub-sub kegiatannya.

Pelaksanaan program dan kegiatan terdapat koordinasi dan sinergi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja Pembangunan, diantaranya:

- i. Sinkronisasi keterbukaan informasi publik;
- ii. Melaksanakan Koordinasi terkait pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah untuk penyediaan akses internet yang terhubung ke Pusat Data Nasional;
- iii. Koordinasi pelaksanaan *smart province/smart city*;
- iv. Koordinasi pelaksanaan CSIRT dan Email Sanapati;
- v. Koordinasi dan sinergi dalam tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data

yang dilakukan melalui Forum SDI Tingkat Provinsi dan Forum Walidata Tingkat Daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Pada RKPD tahun 2025 telah direncanakan target pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 391,563,686,845 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pada RKPD Perubahan tahun 2025 telah ditetapkan target pagu anggaran sebesar Rp. 248,580,772,845 (Dua Ratus Empat Puluh Depalan Milliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Secara total terdapat pengurangan pagu anggaran dikarenakan adanya Efisiensi Anggaran sesuai Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 serta adanya pergeseran anggaran dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ke Biro Humas dan Protokol sesuai amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025, dimana adanya pembentukan kembali Biro Humas dan Protokol yang sebelumnya sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 merupakan salah satu bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yaitu Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi.

Selain pergeseran pagu terdapat juga perubahan target kinerja dan penambahan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk dapat melaksanakan kegiatan Rehab (perluasan/penambahan volume) Gedung kantor sesuai Tabel 2.5.

Pada urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase Informasi Yang Disebarluaskan dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Persentase Layanan Teknologi Informatika.

Pada urusan pemerintahan bidang Statistik terdapat Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik.

Pada urusan pemerintahan bidang Persandian terdapat program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Indeks Evalaksan.

Rekapitulasi daftar perubahan anggaran program dan kegiatan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 RKPD Perubahan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				391,563,686,845	248,580,772,845	(142,982,914,000)	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				390,721,502,885	247,848,907,885	(142,872,595,000)	
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.8 Nilai	82.8 Nilai	32,917,975,065	32,984,603,065	66,628,000	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	15 Dokumen	83,976,000	50,368,000	(33,608,000)	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	67,685,700	36,477,700	(31,208,000)	Efisiensi
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	16,290,300	13,890,300	(2,400,000)	Efisiensi
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	75 Dokumen	26,971,628,217	26,969,708,217	(1,920,000)	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	216 Orang/ Bulan	25,526,326,517	25,526,326,517	-	Target Penambahan PPPK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	1,445,301,700	1,443,381,700	(1,920,000)	Efisiensi
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	887,658,800	509,814,800	(377,844,000)	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15,443,000	15,443,000	-	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10 Paket	42,914,800	42,914,800	-	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	87,500,000	87,500,000	-	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13,670,400	13,670,400	-	
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	13505 Dokumen	7649 Dokumen	31,522,600	31,522,600	-	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12,630,000	12,630,000	-	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	683,978,000	306,134,000	(377,844,000)	Efisiensi
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	897,741,340	1,377,741,340	480,000,000	
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	199,761,000	199,761,000	-	
2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit		480,000,000	480,000,000	Penambahan Sub Kegiatan Baru
2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	29 Unit	697,980,340	697,980,340	-	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	567,998,700	567,998,700	-	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2,998,700	2,998,700	-	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	385,000,000	385,000,000	-	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	180,000,000	180,000,000	-	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit	674 Unit	3,508,972,008	3,508,972,008	-	
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	29 Unit	2,151,128,888	2,151,128,888	-	
2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	489 Unit	80 Unit	6,400,000	6,400,000	-	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	89 Unit	99,490,000	99,490,000	-	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	1,164,773,120	1,164,773,120	-	
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	51 Unit	24 Unit	87,180,000	87,180,000	-	
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan	94.10 persen	94.10 persen	12,609,073,172	10,858,076,172	(1,750,997,000)	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	83.00 Indeks	83.00 Indeks	12,609,073,172	10,858,076,172	(1,750,997,000)	
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten Digital	120 Konten Digital	1,381,642,780	1,056,490,780	(325,152,000)	Efisiensi dan Geser Anggaran ke Biro Humas
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	90%	0.9	1,484,001,282	1,002,349,282	(481,652,000)	Efisiensi dan Geser Anggaran ke Biro Humas

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	1,687,524,460	1,687,524,460	-	
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	6 Kelompok	6 Kelompok	2,373,117,170	2,309,613,170	(63,504,000)	Efisiensi
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	225 Pemohon	225 Pemohon	1,357,171,032	1,288,405,032	(68,766,000)	Efisiensi
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	342,520,420	304,234,420	(38,286,000)	Efisiensi
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai	100 Media	100 Media	3,983,096,028	3,209,459,028	(773,637,000)	Efisiensi dan Geser Anggaran ke Biro Humas

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
		kriteria/juknis						
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82.07		318,908,902,114			
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika		93.10		179,179,180,114	(139,729,722,000)	penyesuaian dengan indikator renstra
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	100 Persen	318,908,902,114	179,179,180,114	(139,729,722,000)	
2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	2 Dokumen	2 Dokumen	2,935,189,600	2,588,763,600		
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	297,507,110,322	158,359,578,322	(139,147,532,000)	Pengurangan utk Paket tahun jamak
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	18,466,602,192	18,230,838,192	(235,764,000)	Efisiensi
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				431,471,640	346,958,640	(84,513,000)	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	4.20 nilai	4.20 nilai	431,471,640	346,958,640	(84,513,000)	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor	11 Sektor	431,471,640	346,958,640	(84,513,000)	
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	50 Orang	138,351,510	108,715,510	(29,636,000)	Efisiensi
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	100%	142,417,110	114,495,110	(27,922,000)	Efisiensi
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	2 Dokumen	150,703,020	123,748,020	(26,955,000)	Efisiensi
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				410,712,320	384,906,320	(25,806,000)	
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	76.00 nilai	76.00 nilai	410,712,320	384,906,320	(25,806,000)	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD	29 OPD	289,327,110	281,525,110	(7,802,000)	

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	34,024,900	34,024,900	-	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	172,677,410	172,677,410		
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	10,312,800	10,312,800	-	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	72,312,000	64,510,000		
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 OPD	29 OPD	121,385,210	103,381,210	(18,004,000)	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	121,385,210	103,381,210	(18,004,000)	Efisiensi
	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital				8,143,105,490	7,513,820,490	(629,285,000)	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,143,105,490	7,513,820,490	(629,285,000)	
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82.07		8,143,105,490			
		Persentase Layanan Teknologi Informatika		93.10		7,513,820,490	(629,285,000)	penyesuaian dengan indikator renstra
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	100 Persen	8,143,105,490	7,513,820,490	(629,285,000)	
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	25 Aplikasi	25 Aplikasi	4,293,218,250	4,099,398,250	(193,820,000)	Efisiensi

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	2 Laporan	3,849,887,240	3,414,422,240	(435,465,000)	Efisiensi & Pindah Belanja Modal Bangunan ke Sekretariat
	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali				18,142,447,044	17,313,228,044	(829,219,000)	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				18,142,447,044	17,313,228,044	(829,219,000)	
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82.07		18,142,447,044			
		Persentase Layanan Teknologi Informatika		93.10		17,313,228,044	(829,219,000)	penyesuaian dengan indikator renstra
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	100 Persen	18,142,447,044	17,313,228,044	(829,219,000)	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Catatan Penting
			Induk	Perubahan	APBD Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	9 Unit	9 Unit	11,514,213,894	11,075,241,894	(438,972,000)	Efisiensi & Pindah Belanja Modal Bangunan ke Sekretariat
2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	6,628,233,150	6,237,986,150	(390,247,000)	Efisiensi
TOTAL					391,563,686,845	248,580,772,845	(142,982,914,000)	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Beberapa usulan/masukan yang disampaikan peserta Forum Perangkat Daerah terhadap Renja Diskominfo Tahun 2025 pada prinsipnya tidak menambah program/kegiatan baru namun merupakan dukungan dan menyempurnakan Rencana Kerja sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Usulan tersebut sebagai berikut:

NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
1	Pastikan Isu Strategis diformulasikan dari 3 hal. Pertama hasil evaluasi capaian target yang telah ditentukan di tahun 2025, Kedua adanya dinamika perkembangan kebutuhan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian, dan Ketiga adanya inovasi-inovasi yang akan dilakukan.	Bappeda
2	Program Bali Smart Island dan jaringan free wifi telah dilaksanakan secara maksimal. Diharapkan program ini dapat diteruskan dan ditambah setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan akses internet masyarakat. Selain itu diharapkan agar tersedianya data sektoral yang memadai untuk memudahkan proses perolehan data yang baik.	Kabupaten Tabanan
3	Kabupaten Badung telah memiliki sistem 1 data sehingga diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi.	Kabupaten Badung
4	Banyak Wartawan yang belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga diharapkan kedepannya tersedia pelatihan/uji kompetensi terhadap wartawan. Selain itu diharapkan Pemerintah Provinsi menyediakan <i>press room</i> sebagai wadah teman-teman wartawan untuk berdiskusi dan bertukar informasi.	PWI
5	Diharapkan kedepannya terdapat kegiatan monitoring yang khusus bertujuan untuk	Kabupaten Klungkung

NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
	menentukan <i>blind spot</i> di daerah Nusa Penida.	
6	Diharapkan kedepan APJII dapat lebih dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Bali
7	Dilihat dari segi anggaran, urusan statistik tidak mengalami peningkatan jumlah yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan urusan Statistik tidak menjadi prioritas terakhir dan dapat lebih diperhatikan lagi.	BPS
8	Selama ini pada saat melakukan literasi media, materi yang disampaikan masih sebatas pengenalan terhadap <i>hoax</i> , belum sampai membahas bagaimana cara mendeteksi dan menyaring <i>hoax</i> tersebut sehingga kedepan diharapkan materi literasi media dapat mencakup hal tersebut.	Asosiasi Media Siber Indonesia Bali
9	Diharapkan Humas se-Kabupaten/Kota di Bali dapat ikut serta dalam Uji Kompetensi Wartawan sehingga dapat memberikan output yang lebih baik.	RRI Denpasar
10	Diharapkan media-media yang terverifikasi dapat lebih diapresiasi dalam hal kerjasama.	Jaringan Media Siber Indonesia Bali
11	Diharapkan pada Bali Digital Festival di tahun mendatang dapat mengadakan acara yang bergilir di semua Kabupaten/Kota di Bali sehingga tidak terpusat hanya di satu daerah.	Kabupaten Karangasem
12	Diharapkan Pemerintah Provinsi dapat ikut mendampingi Kabupaten/Kota untuk meningkatkan nilai SPBE dan proses integrasi antara portal satu data yang ada di Buleleng dan Provinsi dipercepat.	Kabupaten Buleleng

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 arah kebijakan prioritas nasional yang didukung oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yaitu terkait pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, maka untuk mencapai Transformasi Indonesia dilaksanakan melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola. Arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP). Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital;
2. Mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset;
4. Mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital, serta literasi digital secara luas;
5. Membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif;
6. Mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri;
7. Membangun mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Dari beberapa poin tersebut kegiatan yang dapat didukung oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui 4 Program yaitu

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, guna meningkatnya akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital dengan cara menyediakan akses internet, penyediaan aplikasi pemerintah, membangun infrastruktur untuk meningkatkan layanan TV digital didaerah tepencil;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, guna meningkatnya penyebaran program kegiatan pemerintah ke masyarakat serta meningkatnya literasi digital Masyarakat;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, guna menyediakan data yang memenuhi prinsip satu data Indonesia guna membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan; serta
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, guna meningkatkan IT Security Assessment dan Penanganan insiden siber terhadap sistem elektronik milik Pemerintah Provinsi Bali serta Literasi Keamanan Siber bagi ASN dilingkungan Pemprov Bali

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat namun juga mendorong terjadinya transformasi digital pada beberapa sektor prioritas. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Akses informasi yang semakin luas dan mudah juga berimbas terhadap perubahan pola hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pola hubungan secara interaktif dua arah menjadi hal yang lebih relevan untuk diterapkan. Diperlukan berbagai

inovasi dalam penyampaian kebijakan pemerintah agar dapat secara cepat dan tepat tersampaikan kemasyarakat. Hal tersebut dilakukan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung tercapainya visi Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan cara melaksanakan 22 (dua puluh dua) misi. Dimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai Instansi Teknis dalam mendukung misi dari Kepala Daerah tersebut lebih kepada mendukung di Bidang Infrastruktur digital yang berkualitas. dimana Misi Kepala Daerah yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah Misi 16 yaitu **“Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital”** yang memiliki:

- Tujuan : Meningkatnya infrastruktur digital berkualitas yang Daerah inklusif di seluruh wilayah Provinsi Bali
- Sasaran : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Daerah Komunikasi yang efektif dan efisien

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan daerah dan sasaran daerah yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 2025-2029 tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali merumuskan tujuan yaitu:

Tujuan Perangkat Daerah: Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan efisien

Indikator: Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan diatas merupakan tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Berdasarkan tujuan diatas maka akan dirumuskan sasaran yang hendak dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, dimana sasaran dari tujuan tersebut terdiri dari 4 (empat) sasaran, seperti yang tertuang dibawah ini.

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Dengan indikator: Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dengan indikator: Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)

Sasaran 3. Meningkatnya Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sadi Pemeintah Daerah

Dengan indikator: Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor

Dengan indikator: Indeks Pembangunan Statistik

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 merencanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

I. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f) Fasilitas kunjungan tamu.
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a) Pengadaan Mebel.
 - b) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Mebel.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a) Penyusunan Konten.
 - b) Diseminasi Informasi.
 - c) Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 - d) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.
 - e) Pelayanan Informasi Publik.
 - f) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik.
 - g) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

- 1) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a) Koordinasi penyusunan proses bisnis
 - b) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah.
 - c) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Provinsi.
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - b) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral.
 - c) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

- a) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - b) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - c) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - d) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.
- a) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

II. UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital

A. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

- 1) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
 - b) Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

III. UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali

A. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

- 1) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
 - b) Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 meliputi:

Dibidang urusan komunikasi dan informatika direncanakan; Menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan literasi media, Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan kapasitas kehumasan, Mengelola perangkat dan jaringan system informasi, pembangunan taman teknologi, menyediakan akses internet kepada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, SMA/SMK, dan UPT, Menyebarkan, mengelola informasi publik. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Dibidang urusan statistik direncanakan; melaksanakan pengumpulan dan menganalisis data statistik sektoral.

Dibidang persandian direncanakan meningkatkan kapasitas aparatur persandian, hubungan jaringan persandian pusat, provinsi dan kab/kota se Bali dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Seluruh rencana kerja tersebut dirangkum dalam 5 Program, 11 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.

Anggaran Perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 248,580,772,845 (Dua Ratus Empat Puluh Depalan Milliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), terinci sbb:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp 32,984,603,065.
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp 10,858,076,172.
- C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp 179,179,180,114.
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp 346,958,640.00.
- E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp 384,906,320.00.

Data Pagu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 ditampilkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI				248,580,772,845			215,280,943,180
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				248,580,772,845			215,280,943,180
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				247,848,907,885			213,740,371,180
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82.8 Nilai	32,984,603,065		83.05	25,242,721,180
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia		15 Dokumen	50,368,000		15 dokumen	52,500,000
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 Dokumen	36,477,700		3 dokumen	37,900,000
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 Laporan	13,890,300		12 dokumen	14,600,000
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia		75 Dokumen	26,969,708,217		75 Dokumen	18,293,655,000
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	216 Orang/ Bulan	25,526,326,517		216 Orang/ Bulan	16,589,675,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	11 Dokumen	1,443,381,700		11 Dokumen	1,703,980,000
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia		12 Bulan	509,814,800		12 bulan	766,804,000
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Paket	15,443,000		1 paket	6,350,000
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10 Paket	42,914,800		10 Paket	323,500,000
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	45 Paket	87,500,000		45 paket	105,875,000
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Paket	13,670,400		1 Paket	26,900,000
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7649 Dokumen	31,522,600		7235 dokumen	48,279,000
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 Laporan	12,630,000		12 laporan	13,900,000
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	50 Laporan	306,134,000		25 Laporan	242,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		3 Paket	1,377,741,340		3 Paket	408,421,000
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 Paket	199,761,000		3 paket	35,745,000
2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 unit	480,000,000		2 unit	300,000,000
2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	29 Unit	697,980,340		5 Unit	72,676,000
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		12 Bulan	567,998,700		12 Bulan	688,700,000
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Laporan	2,998,700		1 laporan	4,000,000
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 Laporan	385,000,000		12 laporan	442,700,000
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6 Laporan	180,000,000		4 Laporan	242,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai		674 Unit	3,508,972,008		674 unit	5,032,641,180
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	29 Unit	2,151,128,888		29 unit	2,588,866,180
2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	80 Unit	6,400,000		85 Unit	9,000,000
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	89 Unit	99,490,000		90 unit	219,500,000
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7 Unit	1,164,773,120		8 Unit	2,050,110,000
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	24 Unit	87,180,000		24 Unit	165,165,000
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan		94.10 persen	10,858,076,172		94.80	27,382,300,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi		83.00 Indeks	10,858,076,172		84 indeks	27,382,300,000
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	9 kab/kota	120 Konten Digital	1,056,490,780		48 Konten	2,110,000,000
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	9 kab/kota	90.00%	1,002,349,282		50.00%	1,677,400,000
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	9 kab/kota	1 Laporan	1,687,524,460		1 laporan	1,576,773,000
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	9 kab/kota	6 Kelompok	2,309,613,170		7 Komunitas	3,855,737,000
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	9 kab/kota	225 Pemohon	1,288,405,032		225 Permohonan	5,223,780,000
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	9 kab/kota	12 Rekomendasi	304,234,420		12 Rekomendasi	555,610,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	9 kab/kota	100 Media	3,209,459,028		24 Media	12,383,000,000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika		93.10	179,179,180,114		95,2	38,846,170,000
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi		100 Persen	179,179,180,114		100 persen	38,846,170,000
2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	9 kab/kota	2 Dokumen	2,588,763,600		2 Dokumen	4,880,370,000
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 Dokumen	158,359,578,322		2 Dokumen	13,537,700,000
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	9 kab/kota	29 Perangkat Daerah	18,230,838,192		29 Perangkat Daerah	20,428,100,000
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				346,958,640			717,772,000
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik		4.20 nilai	346,958,640			717,772,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi		11 Sektor	346,958,640		11 sektor	717,772,000
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	9 kab/kota	50 Orang	108,715,510		50 Orang	210,448,040
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	9 kab/kota	100%	114,495,110		100%	251,353,300
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	9 kab/kota	2 Dokumen	123,748,020		2 Dokumen	255,970,660
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				384,906,320			822,800,000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan		76.00 nilai	384,906,320			822,800,000
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan		29 OPD	281,525,110		29 OPD	633,160,000
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 Dokumen	34,024,900		2 Dokumen	89,650,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Laporan	172,677,410		1 Laporan	236,500,000
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Laporan	10,312,800		1 Laporan	175,010,000
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	9 kab/kota	29 Perangkat Daerah	64,510,000		29 Perangkat Daerah	132,000,000
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	9 kab/kota	29 OPD	103,381,210		29 OPD	189,640,000
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 kab/kota	29 Perangkat Daerah	103,381,210		29 Perangkat Daerah	189,640,000
	UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,513,820,490			8,069,380,000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,513,820,490			8,069,380,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika		93.10	7,513,820,490		95,2	8,069,380,000
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi		100 Persen	7,513,820,490		100 Persen	8,069,380,000
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 kab/kota	25 Aplikasi	4,099,398,250		25 Aplikasi	4,043,380,000
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	9 kab/kota	2 Laporan	3,414,422,240		2 Laporan	4,026,000,000
	UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17,313,228,044			114,199,800,000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17,313,228,044			114,199,800,000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika		93.10	17,313,228,044		95,2	114,199,800,000
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi		100 Persen	17,313,228,044		100 Persen	114,199,800,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas		9 Unit	11,075,241,894		9 Unit	14,300,000,000
2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		9 Kabupaten/ Kota	6,237,986,150		9 Kabupaten/ Kota	99,899,800,000

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan Renja ini mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029, dimana telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Perlu juga diantisipasi apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan usulan kebutuhan maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap belanja-belanja yang ada dengan prinsip meminimalkan penggunaan anggaran dan memaksimalkan volume yang telah diajukan. Dalam hal tersebut maka penentuan skala prioritas penyisiran diutamakan pada belanja penunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali tahun 2024-2026.

Secara umum terdapat penurunan anggaran pada Perubahan Renja tahun 2025 akibat Intruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi penggunaan anggaran serta adanya pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi “Turyapada Tower” Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali yang sebelumnya pada Renja 2025 dilaksanakan melalui mekanisme *Singleyears* menjadi mekanisme *Multyyears*/Tahun Jamak (Tahun 2025 dan Tahun 2026).

Selanjutnya semoga Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI BALI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK								139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00						215.280.943.180,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00							215.280.943.180,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							138.712.634.890,00	390.721.502.885,00	247.848.907.885,00	109.136.272.995,00							213.740.371.180,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)				82.80 Nilai	82.80 Nilai	19.994.299.045,00	32.917.975.065,00	32.984.603.065,00	5.248.422.135,00							25.242.721.180,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia				16 Dokumen	15 Dokumen	47.714.900,00	83.976.000,00	50.368.000,00	2.653.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	34.441.700,00	67.685.700,00	36.477.700,00	2.036.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			37.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	13.273.200,00	16.290.300,00	13.890.300,00	617.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			14.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia				75 Dokumen	75 Dokumen	16.130.179.925,00	26.971.628.217,00	26.969.708.217,00	10.839.528.292,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		18.293.655.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	216 Orang/ Bulan	16.081.128.225,00	25.526.326.517,00	25.526.326.517,00	9.445.198.292,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			16.589.675.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	49.051.700,00	1.445.301.700,00	1.443.381.700,00	1.394.330.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.703.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia				12 bulan	12 bulan	311.136.700,00	887.658.800,00	509.814.800,00	198.678.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		766.804.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.487.900,00	15.443.000,00	15.443.000,00	10.955.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			6.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	10 Paket	40.006.800,00	42.914.800,00	42.914.800,00	2.908.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			323.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			105.875.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.670.400,00	13.670.400,00	13.670.400,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			26.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13505 Dokumen	7649 Dokumen	31.522.600,00	31.522.600,00	31.522.600,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			48.279.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			13.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	50 Laporan	121.319.000,00	683.978.000,00	306.134.000,00	184.815.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			242.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</i>				3 Paket	3 Paket	97.813.960,00	897.741.340,00	1.377.741.340,00	1.279.927.380,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		408.421.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	3 Paket	32.240.600,00	199.761.000,00	199.761.000,00	167.520.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			35.745.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				-	2 Unit	0,00	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	29 Unit	65.573.360,00	697.980.340,00	697.980.340,00	632.406.980,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			72.676.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan</i>				12 bulan	12 bulan	567.998.700,00	567.998.700,00	567.998.700,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		688.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.998.700,00	2.998.700,00	2.998.700,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			442.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			242.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai				674 Unit	674 Unit	2.839.454.860,00	3.508.972.008,00	3.508.972.008,00	669.517.148,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		5.032.641.180,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	29 Unit	1.237.189.960,00	2.151.128.888,00	2.151.128.888,00	913.938.928,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.588.866.180,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				489 Unit	80 Unit	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	89 Unit	99.510.000,00	99.490.000,00	99.490.000,00	-20.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			219.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	1.411.874.900,00	1.164.773.120,00	1.164.773.120,00	-247.101.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.050.110.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				51 Unit	24 Unit	84.480.000,00	87.180.000,00	87.180.000,00	2.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			165.165.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan				94.10 persen	94.10 persen	13.218.105.160,00	12.609.073.172,00	10.858.076.172,00	14.164.194.840,00							27.382.300.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi				83.00 Indeks	83.00 Indeks	13.218.105.160,00	12.609.073.172,00	10.858.076.172,00	-2.360.028.988,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		27.382.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				120 Konten	120 Konten	1.498.987.520,00	1.381.642.780,00	1.056.490.780,00	-442.496.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			2.110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				90 Persentase	90 Persentase	1.400.000.200,00	1.484.001.282,00	1.002.349.282,00	-397.650.918,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.677.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.593.884.980,00	1.687.524.460,00	1.687.524.460,00	93.639.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			1.576.773.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>				6 Komunitas	6 Komunitas	2.418.762.680,00	2.373.117.170,00	2.309.613.170,00	-109.149.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			3.855.737.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik																		
			<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>				225 Permo honan	225 Permo honan	1.385.243.600,00	1.357.171.032,00	1.288.405.032,00	-96.838.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			5.223.780.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>				12 Rekome ndasi	12 Rekome ndasi	396.069.080,00	342.520.420,00	304.234.420,00	-91.834.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			555.610.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				100 Media	100 Media	4.525.157.100,00	3.983.096.028,00	3.209.459.028,00	-1.315.698.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			12.383.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika				82.07 Nilai	93.10 %	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	55.615.119.315,00							161.115.350.000,00	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi</i>				100 persen	100 persen	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	98.505.997.963,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		161.115.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		
			<i>Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000.000,00	2.935.189.600,00	2.588.763.600,00	-911.236.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			4.880.370.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	10.827.881.880,00	297.507.110.322,00	158.359.578.322,00	147.531.696.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			13.537.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	18.559.739.640,00	18.466.602.192,00	18.230.838.192,00	-328.901.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			20.428.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							460.728.560,00	431.471.640,00	346.958.640,00	-113.769.920,00							717.772.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik				4.20 Nilai	4.20 Nilai	460.728.560,00	431.471.640,00	346.958.640,00	257.043.440,00							717.772.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi				11 Sektor	11 Sektor	460.728.560,00	431.471.640,00	346.958.640,00	-113.769.920,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		717.772.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				50 Orang	50 Orang	145.328.240,00	138.351.510,00	108.715.510,00	-36.612.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			210.448.040,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	150.743.840,00	142.417.110,00	114.495.110,00	-36.248.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			251.353.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				2 Dokumen	2 Dokumen	164.656.480,00	150.703.020,00	123.748.020,00	-40.908.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			255.970.660,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							465.345.180,00	410.712.320,00	384.906.320,00	-80.438.860,00							822.800.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan				76 Nilai	76 Nilai	465.345.180,00	410.712.320,00	384.906.320,00	357.454.820,00							822.800.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan				29 OPD	29 OPD	330.632.840,00	289.327.110,00	281.525.110,00	-49.107.730,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		633.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	34.024.900,00	34.024.900,00	34.024.900,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			89.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	184.380.940,00	172.677.410,00	172.677.410,00	-11.703.530,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			236.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	39.915.000,00	10.312.800,00	10.312.800,00	-29.602.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			175.010.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	72.312.000,00	72.312.000,00	64.510.000,00	-7.802.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			132.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun				29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	134.712.340,00	121.385.210,00	103.381.210,00	-31.331.130,00			-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur		189.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	134.712.340,00	121.385.210,00	103.381.210,00	-31.331.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			189.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL								139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00					215.280.943.180,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00							215.280.943.180,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							138.712.634.890,00	390.721.502.885,00	247.848.907.885,00	109.136.272.995,00							213.740.371.180,00		
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika				82.07 Nilai	93.10 %	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	55.615.119.315,00							161.115.350.000,00		
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi				100 persen	100 persen	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	98.505.997.963,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		161.115.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				25 Aplikasi	25 Aplikasi	4.293.218.360,00	4.293.218.250,00	4.099.398.250,00	-193.820.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			4.043.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	2 Laporan	4.224.027.125,00	3.849.887.240,00	3.414.422.240,00	-809.604.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			4.026.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		UPTD TURYPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI								139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00						215.280.943.180,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	108.942.064.215,00							215.280.943.180,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							138.712.634.890,00	390.721.502.885,00	247.848.907.885,00	109.136.272.995,00							213.740.371.180,00	
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika				82.07 Nilai	93.10 %	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	55.615.119.315,00							161.115.350.000,00	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi				100 Persen	100 Persen	105.500.230.685,00	345.194.454.648,00	204.006.228.648,00	98.505.997.963,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	Aparatur dan Masyarakat		161.115.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas																		
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				9 unit	9 unit	14.575.363.980,00	11.514.213.894,00	11.075.241.894,00	-3.500.122.086,00	Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			14.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				9 kabupate n/kota	9 kabupate n/kota	49.519.999.700,00	6.628.233.150,00	6.237.986.150,00	-43.282.013.550,00	Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi			99.899.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	J U M L A H								139.638.708.630,00	391.563.686.845,00	248.580.772.845,00	1.599.943.026.112,00						215.280.943.180,00		



DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI

RENCANA KERJA (RENJA)

Perubahan Tahun 2025



Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Bali

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan Sesanti Angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Perubahan Renja ini memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan memperhatikan target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami harapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak dalam penyusunan selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 disusun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA perubahan Tahun 2025.

Bali, Mei 2025

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Bali,



DR. I WAYAN SUNADA, SP, M. Agb
NIP. 19671231 198703 1 056

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	29
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari rencana strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dimaksud seperti: (1) penyesuaian tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 1641 Tahun 2025 tentang Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 Sebagai Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor6);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 yang memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial.

Tujuan penyusunan Renja Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali 2025 adalah :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja.
2. Menjabarkan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2025.
3. Merancang program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tahun 2025
4. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 dengan RKPD Perubahan tahun 2025
5. Memberikan pedoman bagi seluruh bidang dan UPTD lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pada Bab ini memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sampai dengan triwulan I tahun 2025 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan kendala yang dihadapi dan solusi yang akan ditempuh.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

Pada Bab ini diuraikan tentang rencana program dan kegiatan disertai pendanaan tahun 2025 baik yang mengalami perubahan maupun tidak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan antara lain catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan di sektor pangan dan Pertanian di Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sampai dengan triwulan I Tahun 2025, rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang target kinerjanya sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan kinerja pada triwulan I, seperti untuk indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja dan untuk yang telah mencapai target pada triwulan I tahun 2025 kebanyakan adalah sub kegiatan rutin urusan kerumahtanggaan.

Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

1. Adanya refocusing anggaran dan pergeseran anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan baru bisa dilaksanakan menunggu DPPA perubahan anggaran

2. Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
3. Beberapa Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 2, 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1.
4. Kegiatan yang bersifat koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga menyebabkan berkurang beban konsumsi, perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga target kinerja pada sub kegiatan tersebut tidak akan tercapai;
5. Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan capaian kinerja pada triwulan I.
6. Adanya kesalahan uraian belanja pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
7. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 2, 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1.
8. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan-triwulan berikutnya, antara lain seperti:

1. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.
2. Koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran
3. Penataan kembali terhadap rancangan APBD 2025 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;
4. Dukungan penganggaran non-government dalam meningkatkan efektifitas pencapaian indikator sasaran
5. Koordinasi teknis secara efektif dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas dan terukur.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

TABEL. 2.1
CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI S/D TRIWULAN I TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2675	6.573.647.880	83	203.944.336	3,10	3,10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Pola Pangan Harapan	90	162.888.060	34	62.039.520	38,09	38,09	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	162.888.060	0,38	62.039.520	38,09	38,09	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Cadangan Pangan Daerah	1	6.410.759.820	0,02	141.904.816	2,21	2,21	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	1	6.410.759.820	0,02	141.904.816	2,21	2,21	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan yang Terpublikasi	89	547.694.020	30,65	188.645.301	34,44	34,44	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	16	547.694.020	5,51	188.645.301	34,44	34,44	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	547.694.020	0,34	188.645.301	34,44	34,44	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,8	97.783.980	44,54	45.459.760	46,49	46,49	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Persentase Produk Bersertifikat Organik	0,87		0,40		46,49		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji	1	97.783.980	0,46	45.459.760	46,49	46,49	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	1	97.783.980	0,46	45.459.760	46,49	46,49	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,5	47.303.247.520	33,39	19.380.673.578	40,97	40,97	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	658.610.240	2,33	219.503.704	33,33	33,33	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	326.317.920	2,03	110.503.040	33,86	33,86	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	332.292.320	0,33	109.000.664	32,80	32,80	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	43.278.617.300	0,40	17.319.613.606	40,02	40,02	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275	42.879.400.000	110,26	17.192.703.496	40,10	40,10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	399.217.300	0,32	126.910.110	31,79	31,79	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	143.144.300	0,20	29.053.500	20,30	20,30	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13.575.000	0,00	-	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	52.285.300	0,40	20.846.500	39,87	39,87	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	58.000.000	0,05	3.125.000	5,39	5,39	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	5.400.000	0,04	210.000	3,89	3,89	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	13.884.000	0,70	4.872.000	35,09	35,09	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	636.655.720	6,96	369.214.680	57,99	57,99	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	318.000.000	6,86	181.891.080	57,20	57,20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	318.655.720	7,05	187.323.600	58,79	58,79	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	2.586.219.960	0,56	1.443.288.088	55,81	55,81	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	58	1.609.754.960	42,16	1.170.138.748	72,69	72,69	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	771.642.800	8,21	264.119.340	34,23	34,23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	380	204.822.200	16,75	9.030.000	4,41	4,41	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	90	8.000.370.480	12	1.024.467.803		12,81	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,6		0,08				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,6		0,08				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,6		0,08				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,81		0,10				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3	2.829.064.060	0,05	49.851.194	1,76	1,76	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2	2.829.064.060	0,04	49.851.194	1,76	1,76	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak Unggulan Daerah	60000	2.967.980.400	3011	148.936.216	5,02	5,02	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3	2.967.980.400	0,15	148.936.216	5,02	5,02	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Target Areal Sasaran Komoditas Pertanian	3	2.203.326.020	1,12	825.680.393	37,47	37,47	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Yang Terawasi, Tersedia Dan Beredar Yang Memenuhi Standar Mutu yang Ditetapkan Seusai Sasaran 6 Tepat, Yaitu Tepat Jenis/Varietas, Mutu, Jumlah, Waktu, Tempat Dan Harga	3	2.203.326.020	1,12	825.680.393	37,47	37,47	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15	1.346.238.120	5	437.453.774	32,49	32,49	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	2	1.346.238.120	1	437.453.774	32,49	32,49	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	1.098.079.220	0	373.902.159	34,05	34,05	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2	248.158.900	1	63.551.615	25,61	25,61	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5	1.507.850.700	1	158.019.402	10,48	10,48	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi	119380	1.459.968.560	11295	138.137.722	9,46	9,46	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam Satu Daerah Provinsi	2	1.459.968.560	0,19	138.137.722	9,46	9,46	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem	8	47.882.140	3	19.881.680	41,52	41,52	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3	47.882.140	1	19.881.680	41,52	41,52	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan	40	166.928.560	13	55.282.368	33,12	33,12	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina	102	166.928.560	34	55.282.368	33,12	33,12	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	102	166.928.560	34	55.282.368	33,12	33,12	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,5	906.593.356	28,83	320.666.536	35,37	35,37	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			61.143.136		19.834.750			
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12.587.400	1,00	12.576.250	99,91	99,91	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	16.055.736	0,45	7.258.500	45,21	45,21	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	32.500.000	0,00	-	0,00	0,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			323.325.480		126.391.806			
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	49.200.000	4,37	17.916.646	36,42	36,42	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	274.125.480	4,75	108.475.160	39,57	39,57	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			522.124.740		174.439.980			
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	208.647.620	2,32	60.620.940	29,05	29,05	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	306.457.120	0,37	113.819.040	37,14	37,14	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	7.020.000	0,00	-	0,00	0,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	90	2.240.390.545	22,88	569.432.740	25,42	25,42	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,6		0,15		25,42		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,6		0,15		25,42		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,6		0,15		25,42		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,81		0,21		25,42		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100000	2.240.390.545	25417	569.432.740	25,42	25,42	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	umlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3	2.240.390.545	0,76	569.432.740	25,42	25,42	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,5	1.280.641.140	29,25	459.593.098	35,89	35,89	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.775.200		2.587.400			
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1.227.000	0,83	1.020.000	83,13	83,13	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	6.548.200	0,24	1.567.400	23,94	23,94	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50.000.000	0,00	-	0,00	0,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			341.136.000		159.049.878			
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	149.360.000	7,23	90.001.478	60,26	60,26	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	191.776.000	4,32	69.048.400	36,00	36,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			881.729.940		297.955.820			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78	195.541.420	34,43	86.317.740	44,14	44,14	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	683.278.520	1,55	211.638.080	30,97	30,97	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	148	2.910.000	0,00	-	0,00	0,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman OPT dan Dampak Perubahan Iklim DPI	82,91	1.613.539.660	44,20	860.281.080	53,32	53,32	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim DPI dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT	9	1.613.539.660	4,80	860.281.080	53,32	53,32	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4	541.631.980	1,23	166.266.370	30,70	30,70	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2	668.575.880	1,69	564.431.305	84,42	84,42	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	403.331.800	0,32	129.583.405	32,13	32,13	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,5	607.072.190	32,55	242.459.295	39,94	39,94	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	52.032.500	0,76	39.388.500	75,70	75,70	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.180.500	0,85	3.540.500	84,69	84,69	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	14.967.200	0,59	8.848.000	59,12	59,12	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	32.884.800	0,82	27.000.000	82,10	82,10	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	257.218.120	0,31	79.870.699	31,05	31,05	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	139.230.000	3,13	36.312.559	26,08	26,08	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	117.988.120	4,43	43.558.140	36,92	36,92	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	297.821.570	0,41	123.200.096	41,37	41,37	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	178.117.290	3,67	93.473.548	52,48	52,48	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	80.364.280	0,33	26.246.548	32,66	32,66	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73	39.340.000	6,46	3.480.000	8,85	8,85	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,8	648.531.480	21,75	147.232.166	22,70	22,70	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		Persentase Produk Bersertifikat Organik	0,87		0,20		22,70		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	20	648.531.480	4,54	147.232.166	22,70	22,70	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	8	460.769.620	1,74	100.184.444	21,74	21,74	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12	187.761.860	3,01	47.047.722	25,06	25,06	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5	630.274.170	1,63	205.895.271	32,67	32,67	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha PAH	1000	630.274.170	327	205.895.271	32,67	32,67	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		Jumlah PSAT yang diuji	75		24,50		32,67		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1000	292.988.820	455	121.219.976	45,50	41,37	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75	337.285.350	20	84.675.295	26,67	25,10	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bab ini diuraikan tentang kebutuhan dan pendanaan perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025, disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 serta berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sampai dengan triwulan I dengan melakukapenye suaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dukungan prioritas Pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pangan dan pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali juga mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2025.

Usulan target dan pendanaan anggaran perubahan tahun 2025, selengkapnya dapat dilihat lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA perubahan Tahun 2025.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan UPTD berkewajiban mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025.
 - b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan UPTD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai dasar acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025. Semoga dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN								70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00						94.882.350.318,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.330.189.300,00	2.201.538.334,00	2.903.894.734,00	573.705.434,00							9.322.198.012,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							2.330.189.300,00	2.201.538.334,00	2.903.894.734,00	573.705.434,00							9.322.198.012,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi				92 Persen	92 Persen	558.435.740,00	493.326.192,00	458.286.192,00	44.027.260,00							602.463.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian				18 Kelompok	18 Kelompok	558.435.740,00	493.326.192,00	458.286.192,00	-100.149.548,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Tani/Masyarakat		602.463.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				3 Laporan	3 Laporan	558.435.740,00	493.326.192,00	458.286.192,00	-100.149.548,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			602.463.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)				2.680 Kkl/k apita/hari	2.680 Kkl/k apita/hari	539.251.780,00	512.815.610,00	1.280.702.010,00	6.691.760.020,00							7.231.011.800,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen ketersediaan pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	198.308.160,00	148.245.830,00	122.605.830,00	-75.702.330,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur, kelompok masyarakat		179.176.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	198.308.160,00	148.245.830,00	122.605.830,00	-75.702.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			179.176.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina				2 Dokumen	166 Ton 9 LPM	340.943.620,00	364.569.780,00	1.158.096.180,00	817.152.560,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur dan 29 Kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat)		7.051.835.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	340.943.620,00	364.569.780,00	1.158.096.180,00	817.152.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			7.051.835.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi				-	95,9 Persen	615.567.140,00	607.358.002,00	576.868.002,00	205.378.860,00							820.946.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji				-	1 Dokumen	615.567.140,00	607.358.002,00	576.868.002,00	-38.699.138,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur dan Kelompok Masyarakat		820.946.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	122.947.780,00	145.368.130,00	133.368.130,00	10.420.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			107.562.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81,60 Nilai	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Dokumen	8 Dokumen	837.192.100,00	771.363.314,00	696.731.314,00	-140.460.786,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		724.470.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	494.101.920,00	469.849.162,00	410.577.162,00	-83.524.758,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			358.949.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	343.090.180,00	301.514.152,00	286.154.152,00	-56.936.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			365.521.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	43.209.753.020,00	59.543.237.002,00	59.539.397.002,00	16.329.643.982,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		47.606.479.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				293 Orang/ Bulan	293 Orang/ Bulan	42.879.400.000,00	59.247.337.822,00	59.247.337.822,00	16.367.937.822,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			47.167.340.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	330.353.020,00	295.899.180,00	292.059.180,00	-38.293.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			439.139.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.263.000,00	19.263.000,00	19.263.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			14.932.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	220.836.250,00	220.882.300,00	212.818.940,00	-8.017.310,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			57.513.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.987.800,00	67.003.400,00	67.003.400,00	9.015.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			63.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	6.300.000,00	19.125.000,00	19.125.000,00	12.825.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			5.940.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	70.780.000,00	107.840.000,00	67.008.000,00	-3.772.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			15.272.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	417.000.000,00	417.000.000,00	417.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			349.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	322.614.220,00	296.109.662,00	296.109.662,00	-26.504.558,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			350.521.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				58 Unit	58 Unit	1.545.044.960,00	1.845.842.822,00	1.845.842.822,00	300.797.862,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.770.730.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi				24 Unit	3 Unit	772.642.800,00	742.110.364,00	742.110.364,00	-30.532.436,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			848.807.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				380 Unit	314 Unit	192.445.000,00	180.800.000,00	180.800.000,00	-11.645.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			225.304.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian				90 Persen	90 Persen	12.894.195.880,00	14.937.925.066,00	23.618.623.366,00	1.683.982.120,00							14.578.178.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				3 Laporan	3 Laporan	5.159.525.180,00	5.203.591.720,00	10.170.151.720,00	5.010.626.540,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kios Pengecer dan Kelompok Tani		3.111.970.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	3 Laporan	5.159.525.180,00	5.203.591.720,00	10.170.151.720,00	5.010.626.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			3.111.970.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian				80 Persen	80 Persen	4.994.730.460,00	4.574.538.164,00	7.664.898.864,00	2.670.168.404,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Masyarakat		5.673.201.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				3 laporan	3 laporan	2.091.751.520,00	1.928.862.604,00	4.483.050.104,00	2.391.298.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			2.423.658.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Meningkatnya angka kelahiran ternak unggulan daerah</i>				6000 Ekor	6000 Ekor	2.692.574.040,00	5.112.600.982,00	5.736.378.582,00	3.043.804.542,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara		5.729.207.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			<i>Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	502.915.260,00	3.082.285.772,00	3.378.675.772,00	2.875.760.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			3.264.778.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian				15 Persen	15 Persen	1.260.928.040,00	1.130.808.892,00	1.998.847.192,00	219.932.960,00							1.480.861.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.928.040,00	1.130.808.892,00	1.998.847.192,00	737.919.152,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara		1.480.861.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.090.854.680,00	977.248.752,00	967.168.752,00	-123.685.928,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.207.887.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				1 Laporan	1 Laporan	170.073.360,00	153.560.140,00	1.031.678.440,00	861.605.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			272.974.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis				5 Persen	5 Persen	1.956.193.024,00	10.400.607.072,00	9.559.647.072,00	10.053.585.774,00							12.009.778.798,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR Yang Mendapatkan Pelayanan Vaksinasi Jumlah Kontrol Populasi HPR				19380 Ekor	200720 Ekor 30000 Ekor	1.290.364.280,00	9.791.667.602,00	8.968.467.602,00	7.678.103.322,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat Umum		11.263.808.798,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	1.290.364.280,00	9.791.667.602,00	8.968.467.602,00	7.678.103.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			11.263.808.798,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem				8 RPH	8 RPH	80.740.140,00	76.613.410,00	58.853.410,00	-21.886.730,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	RPH / TPH		52.670.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya																		
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				3 Kasus	3 Kasus	80.740.140,00	76.613.410,00	58.853.410,00	-21.886.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			52.670.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan				-	60 Persen	145.453.820,00	133.073.630,00	177.113.630,00	100.867.180,00							246.321.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina				-	102 Kelompok	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Tani		62.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	10 Orang	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			62.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina				102 Kelom pok/Unit	102 Kelom pok/Unit	145.453.820,00	133.073.630,00	120.113.630,00	-25.340.190,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Tani		183.621.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																			
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				102 Kelompok	102 Kelompok	145.453.820,00	133.073.630,00	120.113.630,00	-25.340.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			183.621.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN								70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00						94.882.350.318,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.330.189.300,00	2.201.538.334,00	2.903.894.734,00	573.705.434,00							9.322.198.012,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							2.330.189.300,00	2.201.538.334,00	2.903.894.734,00	573.705.434,00							9.322.198.012,00		
1.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Bersertifikat Organik Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi				1,10 95,9 Persen Persen	1,10 95,9 Persen Persen	615.567.140,00	607.358.002,00	576.868.002,00	205.378.860,00							820.946.000,00		
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang Bersertifikat Organik				3 Sertifikat	3 Sertifikat	615.567.140,00	607.358.002,00	576.868.002,00	-38.699.138,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelaku Usaha Pertanian Organik		820.946.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																			
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5 Sertifikat	5 Sertifikat	341.573.140,00	316.812.760,00	298.322.760,00	-43.250.380,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			506.846.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				12 Dokumen	12 Dokumen	151.046.220,00	145.177.112,00	145.177.112,00	-5.869.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			206.538.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajem en Kinerja				81,60 Nilai	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.927.800,00	3.927.800,00	3.927.800,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			4.598.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.579.860,00	32.579.860,00	32.579.860,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			16.463.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			36.173.280,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya <i>Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.230.000,00	127.230.000,00	127.230.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			153.153.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	117.101.420,00	104.721.230,00	104.721.230,00	-12.380.190,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			129.786.932,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	7 Unit	181.171.280,00	172.908.820,00	172.908.820,00	-8.262.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			195.929.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	80.364.280,00	72.110.820,00	72.110.820,00	-8.253.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			88.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				38 Unit	38 Unit	42.060.000,00	42.060.000,00	42.060.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			43.274.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00		
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis				-	5 Persen	1.956.193.024,00	10.400.607.072,00	9.559.647.072,00	10.053.585.774,00							12.009.778.798,00		
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<i>Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji</i>				-	1000 Unit 75 Dokumen	585.088.604,00	532.326.060,00	532.326.060,00	-52.762.544,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha		693.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi</i>				1000 Unit	1000 Unit	256.728.260,00	233.221.240,00	233.221.240,00	-23.507.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			322.287.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			<i>Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>				75 Dokumen	75 Dokumen	328.360.344,00	299.104.820,00	299.104.820,00	-29.255.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			371.013.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN								70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00						94.882.350.318,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajem en Kinerja				81,60 Nilai	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administ rasi Umum Perangkat Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	599.900,00	599.900,00	599.900,00	0,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tanguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			1.349.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.056.000,00	5.056.000,00	5.056.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tanguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			7.203.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logist ik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tanguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya <i>Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	239.360.000,00	220.520.000,00	220.520.000,00	-18.840.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			164.296.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	191.633.900,00	178.320.332,00	178.320.332,00	-13.313.568,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			210.953.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				78 Unit	78 Unit	232.146.420,00	232.277.312,00	232.277.312,00	130.892,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			215.095.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	610.414.240,00	561.897.642,00	561.897.642,00	-48.516.598,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			751.606.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				148 Unit	148 Unit	3.370.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	1.830.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tanguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			3.201.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)				82,91 Persen	82,91 Persen	1.375.141.416,00	1.251.181.194,00	1.330.406.594,00	399.750.584,00							1.774.892.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)				4 Ha	9 Kabupate n/Kota	1.375.141.416,00	1.251.181.194,00	1.330.406.594,00	-44.734.822,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Kelompok Tani/Subak		1.774.892.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				4 Ha	4 Ha	450.962.700,00	423.615.100,00	505.720.500,00	54.757.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			595.795.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				2 Ha	2 Ha	557.029.256,00	492.402.740,00	490.482.740,00	-66.546.516,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			735.433.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	367.149.460,00	335.163.354,00	334.203.354,00	-32.946.106,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			443.664.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK							70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00						94.882.350.318,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				-	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.095.200,00	6.095.200,00	6.095.200,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			13.846.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.126.500,00	11.126.500,00	11.126.500,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			17.661.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			35.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			54.120.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	272.324.680,00	262.970.816,00	262.970.816,00	-9.353.864,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			301.538.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	8 Unit	217.796.420,00	238.971.640,00	238.971.640,00	21.175.220,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			229.512.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	308.957.120,00	275.943.280,00	275.943.280,00	-33.013.840,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			337.102.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	7 Unit	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			7.722.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak				0,82 Persen	0,82 Persen	12.894.195.880,00	14.937.925.066,00	23.618.623.366,00	1.683.982.120,00							14.578.178.000,00		
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</i>				3 Laporan	3 Laporan	2.692.574.040,00	5.112.600.982,00	5.736.378.582,00	3.043.804.542,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.729.207.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 laporan	3 laporan	2.189.658.780,00	2.030.315.210,00	2.357.702.810,00	168.044.030,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			2.464.429.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN							70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00						94.882.350.318,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81,60 Nilai	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			3.836.760,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.798.400,00	7.269.200,00	7.269.200,00	470.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			8.723.404,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			39.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	90.409.000,00	135.109.000,00	135.109.000,00	44.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			162.130.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	80.327.480,00	72.074.020,00	72.074.020,00	-8.253.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			96.392.976,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				39 Unit	23 Unit	111.782.140,00	127.155.410,00	127.155.410,00	15.373.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			167.618.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	34.928.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-14.978.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			44.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				65 Unit	17 Unit	7.060.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	4.790.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			14.220.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan				0,70 Persen	0,70 Persen	12.894.195.880,00	14.937.925.066,00	23.618.623.366,00	1.683.982.120,00							14.578.178.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				3 Jenis	3 Jenis	4.994.730.460,00	4.574.538.164,00	7.664.898.864,00	2.670.168.404,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		5.673.201.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				75 Sertifikat	75 Sertifikat	368.616.260,00	330.785.372,00	327.905.372,00	-40.710.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			405.477.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				125 laporan	120 laporan	409.654.220,00	331.592.852,00	307.592.852,00	-102.061.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			423.133.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN							70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00						94.882.350.318,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							68.372.370.370,00	95.045.589.675,00	103.749.264.315,00	35.376.893.945,00							85.560.152.306,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				81,50 Nilai	81,60 Nilai	51.357.392.830,00	67.780.032.351,00	67.652.664.991,00	4.780.505.890,00							56.137.898.720,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	635.044.510,00	694.460.460,00	645.565.100,00	10.520.590,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		444.160.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.996.900,00	1.996.900,00	1.996.900,00	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			2.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.999.600,00	5.998.100,00	5.998.100,00	-1.500,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			38.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	2.160.869.120,00	2.105.966.563,00	2.105.966.563,00	-54.902.557,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.233.246.708,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.000.000,00	117.912.191,00	117.912.191,00	-5.087.809,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			135.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	113.868.420,00	107.999.312,00	107.999.312,00	-5.869.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			125.255.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	4.514.534.080,00	4.665.005.012,00	4.665.005.012,00	150.470.932,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		5.129.542.568,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	25 Unit	127.379.280,00	85.570.410,00	85.570.410,00	-41.808.870,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			140.122.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	39.182.140,00	42.566.492,00	42.566.492,00	3.384.352,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			43.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				65 Unit	4 Unit	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura				0,70 Persen	0,70 Persen	12.894.195.880,00	14.937.925.066,00	23.618.623.366,00	1.683.982.120,00							14.578.178.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</i>				125 Laporan 75 Sertifikat	1 Laporan	4.994.730.460,00	4.574.538.164,00	7.664.898.864,00	2.670.168.404,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		5.673.201.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak</i>				44000 Batang	37500 Batang	600.224.540,00	554.830.310,00	763.221.710,00	162.997.170,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			754.271.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji																		
			<i>Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji</i>				900000 Gram	5000000 Gram	716.502.220,00	662.854.730,00	914.853.530,00	198.351.310,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			780.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			<i>Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak</i>				3 Ton	3 Ton	431.673.360,00	401.042.372,00	503.705.372,00	72.032.012,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Kerambitan, Meliling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			473.112.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi																		
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak</i>				0,75 Ton	0,75 Ton	376.308.340,00	364.569.924,00	364.569.924,00	-11.738.416,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Candikuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			413.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan tanaman puspita dewata dan tanaman usada				1 Laporan	1 Laporan	47.366.200,00	47.194.200,00	47.194.200,00	-172.000,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat		63.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme																		
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				125 Laporan	1 Laporan	47.366.200,00	47.194.200,00	47.194.200,00	-172.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Rendang, Besakih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			63.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H								70.702.559.670,00	97.247.128.009,00	106.653.159.049,00	35.950.599.379,00						94.882.350.318,00		



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BALI

DOKUMEN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2024-2026, sehingga pembangunan dibidang transportasi yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunan nya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 9 Juli 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4 Review terhadap RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	25
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	34
4.1 Rencana Kerja Program Perangkat Daerah.....	32
BAB V. PENUTUP	38
5.1 Catatan Penting	38
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan.....	39
5.3 Rencana Tindaklanjut.....	39
Lampiran	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya paradigma baru dalam kehidupan sosial politik, ekonomi di masyarakat, menuntut adanya perubahan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan, menuju sistem pemerintahan yang baik dalam arti berdaya guna, berhasil guna, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta penegakan demokrasi dan keadilan (*Good Governance*).

Tuntutan cita-cita luhur tersebut akan dapat diwujudkan, apabila seluruh jajaran aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan memiliki akuntabilitas kinerja yang baik dalam arti arah kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai rencana maksud, tujuan yang jelas dan terarah, legalitas kewenangan, indikator sasaran yang terukur, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dalam arti bermanfaat bagi kepentingan publik.

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, sehingga sistem transportasi harus terus dibina, agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas barang dan jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan hubungan antar wilayah, nasional dan internasional dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pembangunan transportasi

perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Adanya isu – isu strategis yang berkembang dalam sektor perhubungan antara lain :

- a. Terjadinya Kemacetan lalu lintas terutama di daerah Kawasan Sarbagita dan Pusat-pusat kegiatan wisata;
- b. Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali;
- c. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum;
- d. Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal); dan
- e. Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan nasional (RPJMN 2025-2029). Dalam pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antar daerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri, meningkatkan akses informasi kepada masyarakat dengan memberi hak informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah Provinsi Bali dengan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana dengan 7 (tujuh) bidang prioritas pembangunan Bali yaitu: Bidang 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal; Bidang 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Bidang 3: Ekonomi *Kerthi* Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata; Bidang 4: Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi; Bidang 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi Bidang; 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali dan Bidang 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkan kelima bidang tersebut transporasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai urat nadi pembangunan di Provinsi Bali yaitu dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Melakukan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur, strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada Tujuan 5 Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yakni “Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru”. Salah satu pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan ekonomi Bali yang masih belum merata, sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah utara, selatan, dan barat serta timur Bali. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik diseluruh kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan ekonomi terutama potensi-potensi yang ada di pelosok-

pelosok pedesaan atau di pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah di Provinsi Bali.

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan secara khusus di sektor transportasi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Bali perlu pula mengakomodir program – program yang selaras dengan Pemerintah Pusat. Selain itu perlu pula mengakomodir program – program dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013.

Untuk menunjang strategi dan arah kebijakan maka urusan perhubungan melaksanakan :

- 1) Pengembangan dan preservasi jaringan jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas pengguna jalan;
- 2) Peningkatan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan serta peningkatan kendaraan yang berkeselamatan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan lalu lintas;
- 3) Revitalisasi angkutan umum, penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan;
- 4) Optimalisasi Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Pembangunan/pengembangan/peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam mendukung keseimbangan dan konektivitas wilayah;
- 6) Penataan jaringan transportasi darat, laut dan udara antar kabupaten/kota.

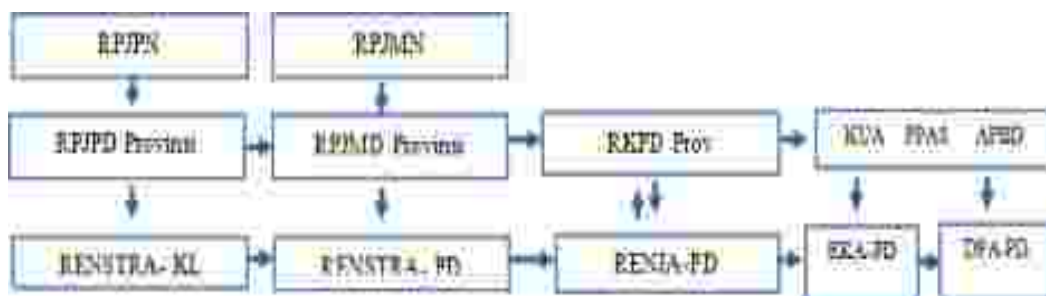
Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada RKPD Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2025, yang

merupakan turunan dan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang telah menyesuaikan dan mengacu pada RPD Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 serta mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Seluruh kegiatan beserta anggarannya dibahas pada Forum Perangkat Daerah. Hasil pembahasan pada Forum Perangkat Daerah ditindaklanjuti dalam pembahasan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi sampai pada akhirnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hubungan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada Diagram diatas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, selanjutnya akan menjadi acuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-204
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang diselaraskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dokumen perencanaan di atasnya yakni RPJMD Semesta Berencana 2024-2026 dan Renstra. Rancangan Rencana Kerja disusun juga untuk menggambarkan secara umum capaian kinerja yang ingin dicapai untuk dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen visi dan misi Rancangan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026;
2. Mendeskripsikan tentang program/kegiatan baik prioritas maupun non prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dalam 1 tahun anggaran;
3. Menghasilkan kinerja yang baik dan alokasi anggaran yang tepat sasaran serta akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun berjalan, terdapat perubahan pelaksanaan anggaran. Selain itu, terdapat penyesuaian atas usulan berdasarkan hasil musrenbang dan kebutuhan mendesak di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan melakukan perubahan Renja sebagai respons atas evaluasi kinerja dan dinamika kebijakan. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi:

- a) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- c) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d) Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- e) Penetapan Renja Perangkat Daerah

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan 4 Program dan 16 Kegiatan yang tersebar di seluruh Bidang dan UPTD. yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

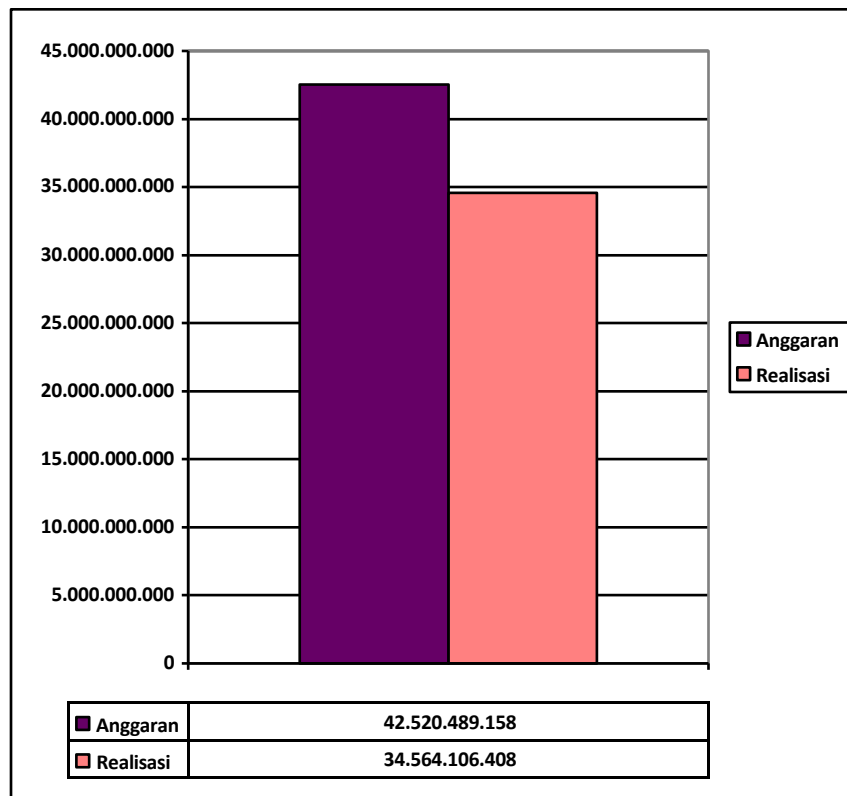
Rekapitulasi Sebaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Provinsi Bali Dalam APBD Tahun 2024

No.	Bidang/UPTD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pagu	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6

1	Sekretariat	1	6	23.616.604.577	22.077.275.227
2	Bidang Angkutan	1	2	502.850.080	434.730.945
3	bidang Lalu Lintas	1	2	504.180.940	455.739.683
4	Bidang Pelayaran	1	1	871.047.840	853.040.800
5	Bidang Keterpaduan Moda	1	1	472.437.140	453.934.073
6	UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas	2	5	2.450.394.222	2.141.575.662
7	UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita	2	5	11.527.841.343	5.762.717.605
8	UPTD. Perlengkapan Jalan	2	4	1.886.976.726	1.752.680.365
9	UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan	2	5	688.156.290	632.412.048
JUMLAH			31	42.520.489.158	34.564.106.408

Berdasarkan tabel monitoring realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Bali per Desember tahun 2024 maka secara keseluruhan dapat kami laporkan dari keseluruhan nilai rencana anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 42.520.489.158,- terealisasi sebesar Rp. 34.564.106.408,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.956.382.750,-. Menurut laporan realisasi fisik dan keuangan dana APBD Periode Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Bali, keseluruhan pelaksanaan Renja tahun 2024 sampai Triwulan IV dapat berjalan dengan baik.

Target dan Realisasi BL Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024



Walaupun dalam laporan pencapaian target menunjukkan kondisi yang baik/ideal bukan berarti tidak terjadi permasalahan. Terdapat beberapa target yang tidak tercapai seperti penurunan target pendapatan, capaian kinerja dan lainnya yang perlu untuk disampaikan dan dianalisa. Beberapa faktor yang berpengaruh dapat disampaikan sebagai berikut;

- Pencapaian Target Pendapatan

Capaian Target Pendapatan cukup jauh dari target yang disusun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni menurunnya pendapatan tiket bus Trans Sarbagita karena adanya kebijakan tiket gratis bagi pengguna pelajar/mahasiswa. Selain itu penurunan jumlah penumpang umum juga turut berdampak. Selain pendapatan Trans Sarbagita, pungutan retribusi Kartu Pengawasan juga mengalami sedikit penurunan jumlah pengurusan.

- Pencapaian Target Kinerja

Beberapa Target Kinerja menunjukkan data tidak tercapai sesuai target yang diharapkan. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh sebagai berikut;

- a. Tidak tercapainya target indikator Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 belum dilakukan pengambilalihan operasional pelabuhan pengumpan regional. Sehingga target 100% belum dapat dilakukan pengukuran.
- b. Tidak tercapainya target indikator Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pengguna jalan, dimana alokasi anggaran yang dipergunakan untuk melakukan penindakan belum cukup efektif untuk menimbulkan efek jera.
- c. Tidak tercapainya target indikator Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengurusan perijinan yang kurang patuh dan paham prosedur pengurusan perijinan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali s/d Tahun 2024 tertuang pada Tabel 2.1 terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada realisasi anggaran Belanja Langsung pada tahun 2024, secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan prioritas dapat terlaksana walaupun dengan kondisi yang kurang ideal. Tercapainya SOP pada penerapan operasional Pelabuhan pengumpan regional telah dijalankan dengan baik sesuai prosedur standar dan melayani 50% penatalaksanaan standar pelayanan pada pertengahan tahun ini. Sedangkan pada SPM Dinas Perhubungan juga menerapkan pada layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita, dimana SPM sendiri telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Capaian kinerja dari penerapan SPM Trans Sarbagita dapat dilihat dari pencapaian tingkat pelayanan

angkutan Trans Sarbagita itu sendiri, dimana pada tahun 2024 capaian sudah sesuai dengan target sebesar 73%.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dituangkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Capaian Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2025	
				2024	2025	2024	Semester 1	
1	Presentase lintasan kereta api yang terbangun			0.25	0.35	0.25	0.00	Secara fisik belum ada kontruksi pembangunan lintasan kereta api di Bali, untuk saat ini Pemerintah Provinsi Bali hanya memiliki FS LRT jalur Bandara-Seminyak, FS Potensi Pengembangan Autonomous Rail Rapid Transit untuk Perbaikan Angkutan Umum Perkotaan oleh PT. KAI (Bandara-Sanur), FS dan SID Jalur Keretaapi Lintasan Singaraja-Mengwi. untuk tahun ini di bidang keterpaduan moda melaksanakan kegiatan Pra studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Lintasan Cangu-Mengwi
2	Rasio konektivitas layanan angkutan			0.86	0.88	0.70	0.70	Kendaraan yang melayani sudah melebihi batas usia kendaraan 25 tahun

3	Persentase aksesibilitas pelayaran			75	80	75	0	Akumulasi Aksesibilitas Pelayaran dihitung diakhir tahun
4	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan			73%	73.45%	73%	73.45%	
5	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali.			82.5	83	82.5	83	
6	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional			65%	66%	65%	66.50%	
7	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM			50%	50%	50%	35%	
8	Persentase sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik			38.58	43.75	38.58	38.67	
9	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			83.85	83.90	83.85	0	Menunggu hasil nilai SAKIP

2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari analisa perkembangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa isu-isu penting pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali, sebagai berikut:

- Belum meratanya pembangunan ekonomi di Provinsi Bali (antar kabupaten/ kota)

- Masih rendahnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Bali
- Belum semua kabupaten/ kota terhubung oleh moda transportasi umum (hanya daerah yang dilalui oleh transportasi umum menuju Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbay)

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang sama. Isu – isu seperti keselamatan berlalu lintas, tingkat pelayanan ruas jalan, tingkat pelayanan angkutan umum, pemenuhan infrastruktur Perhubungan masih menjadi isu yang diangkat dan belum mendapat perhatian khusus. Selaras dengan isu tersebut, beberapa juga merupakan isu yang diangkat ketingkat nasional oleh Kementerian Perhubungan, sehingga terjadi sinergitas Program baik dari tingkat Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Isu - isu strategis urusan Perhubungan, sebagai berikut:

- Terjadinya Kemacetan lalu lintas terutama di daerah Kawasan Sarbagita dan Pusat-pusat kegiatan wisata
- Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali
- Masih rendahnya penggunaan angkutan umum
- Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal)
- Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah selain minimnya alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan, juga berasal dari beberapa permasalahan kewenangan yang belum diselesaikan serta permasalahan payung hukum yang belum jelas.

Dampaknya bila permasalahan itu tidak diselesaikan maka pemenuhan target kinerja yang berasal dari visi dan misi kepala daerah

akan menjadi terganggu dan cenderung tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan penelaahan yang lebih mendalam.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Saat ini Perangkat Daerah terus diminta untuk berinovasi terhadap peningkatan pelayanan kepada publik, melalui program-program kemasyarakatan dan program-program prioritas teknis yang akan memberikan dampak makro yang positif kepada masyarakat. Peluang untuk mewujudkan transportasi publik dan diharapkan dapat berkelanjutan, sedangkan pengembangan potensi lainnya seperti penyediaan infrastruktur penunjang transportasi Bali seperti Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal dapat dijadikan sebagai peluang untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal.

2.4 Review terhadap Perubahan RKPD 2025

Secara umum isi daripada Perubahan RKPD 2025 sudah dianalisis berdasarkan analisis kebutuhan, dimana usulan Program/Kegiatan yang ada didalam RKPD telah terakomodasi dengan baik pada Renja Perangkat Daerah.

Dari 4 program yang diusulkan dalam usulan awal RKPD secara keseluruhan dapat terakomodasi. Namun dari pembiayaan yang diusulkan dalam usulan awal RKPD belum dapat secara utuh terpenuhi mengingat keterbatasan keuangan Daerah, sehingga diperlukan analisa yang lebih mendalam terhadap Program/Kegiatan yang diprioritaskan untuk tahun 2025.

Review terhadap rancangan renja tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting

	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90	25.913.844.93 0,00	Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90	25.913.844.93 0,00	
2	Program Pengelolaan Keretaapian	9 Kab./Kota	Persentase lintasan Kereta Api yang Terbangun	35	671.694.840	Program Pengelolaan Keretaapian	9 Kab./Kota	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatk an kepastian pembiayaa n	35	671.694.840	
3	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Rasio Konektivita s layanan angkutan	0,88	3.708.813.452	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Rasio Konektivita s layanan angkutan	0,88	3.708.813.452	
			Persentase terpenuhiny a standar pelayanan minimum angkutan	73,45	741.997.680			Persentase terpenuhiny a standar pelayanan minimum angkutan	73,45	741.997.680	
			Indeks kepuasan layanan angkutan Trans/BaliT rans Sarbagita	83	8.063.449.173			Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transporta si Bali	83	8.063.449.173	
			Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	66	6.847.466.645			Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	66	6.847.466.645	
			Persentase Sarana dan Prasarana Keselamata n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	43.75	3.183.653.193		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamata n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	43.75	3.183.653.193	
4	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasional nya menerapka n SPM	50	6.847.466.645	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasional nya menerapka n SPM	50	6.847.466.645	

			Persentase Aksesibilitas Pelayaran	80	706.519.040			Persentase Aksesibilitas Pelayaran	80	706.519.040	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Awal Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, akan disampaikan pada Forum Perangkat Daerah yang akan diikuti oleh Seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Bali dan Instansi vertikal / Balai Kementerian Perhubungan di Provinsi Bali, Bapeda Provinsi Bali, Instansi terkait, tokoh – tokoh masyarakat Transportasi, kalangan akademisi, kelompok ahli dan Organisasi transportasi di Bali. Usulan dan masukan dari peserta forum selanjutnya akan ditelaah sehingga rencana kerja akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat terkait transportasi di Provinsi Bali.

Review terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Perhubungan Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Dinas Perhubungan					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,90 Nilai	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran</i>	1 Tahun	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran</i>	1 Tahun	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran</i>	1 Tahun	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran</i>	1 Tahun	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		<i>Rasio konektivitas layanan angkutan darat</i>	0,88 Rasio	
			<i>Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan</i>	73,45 Persen	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		<i>Persentase Aksesibilitas Pelayaran</i>	80 Persen	

4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		<i>Persentase lintasan kereta api yang terbangun</i>	35 Persen	
UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,90 Nilai	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		<i>Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional</i>	66 Persen	
UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,90 Nilai	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		<i>Indeks kepuasan layanan angkutan Tran</i>	83 Indeks	
UPTD PERLENGKAPAN JALAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,90 Nilai	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		<i>Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik</i>	43,75 Persen	
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,90 Nilai	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		<i>Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Menerapkan SPM</i>	50 Persen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu pada Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. **Konektivitas Nasional** adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif

dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026. Secara lebih detail, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kepuasan Transportasi (Aman, Nyaman, Selamat, dan Terjangkau)
- Sasaran 1 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali dengan Indikator Rasio Konektivitas Layanan Transportasi Bali (Rasio Konektivitas)
- Sasaran 2 : Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Transportasi (Indek)
- Sasaran 3 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali dengan Indikator Persentase Kecelakaan di Provinsi Bali (%)

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, bersifat idealistik dan mengandung nilai – nilai keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan merupakan arah perjalanan pemerintah dan pembangunan yang jelas berdasarkan kriteria – kriteria, aksesibilitas, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Sedangkan sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yakni suatu yang akan dicapai berdasarkan kebijakan, alokasi sumber daya,

program dan kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu yakni tahunan dan lima tahunan.

Agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai, maka sasaran yang ditetapkan harus bersifat spesifik, terukur, akuntabel dan menantang, tetapi dapat dilaksanakan dan berorientasi pada hasil sesuai sumber daya yang tersedia, tugas dan fungsi unit kerja. Dalam mendukung pencapaian RPD maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali juga menentukan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Perangkat sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia

Sasaran 1 : Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali

Sasaran 2 : Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali

Sasaran 3 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026						
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia	Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase lintasan keretaapi yang terbangun	25%	35%	45%
			Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,86	0,88	0,90
			Persentase Aksesibilitas Pelayanan	75	80	84
		Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100 km dari KSP menuju jalan nasional	65	66	66,5
			Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	73	73,45	73,85

			Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5	83	83,5
			Persentase Pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	50	75
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase sarana dan prasarana keselamatan lalulintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik	38,58	43,75	49,48
		Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,85	83,90	84

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 1 Sekretariat, 4 Bidang, dan 4 UPTD dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Bidang Lalu Lintas Jalan;
3. Bidang Angkutan Jalan;
4. Bidang Pelayaran;
5. Bidang Keterpaduan Moda;
6. UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan;
7. UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita;
8. UPTD. Perlengkapan Jalan; dan
9. UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah Provinsi Bali Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 merencanakan 4 Program, 16 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas)

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4.2 Pengadaan Mebel
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

A.2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. P2LLAJ)

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. TRANS BALI/TRANS SARBAGITA)

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- 1.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.1 Pengadaan Mebel
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- A.4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. PERLENGKAPAN JALAN)
 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- A.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. PENYELENGGARAAN PELABUHAN)

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - 2.1 Pengadaan Mebel
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - 1.1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
 - 1.2 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - 1.3 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
 - 2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - 2.2 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
3. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
- 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 4.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 5.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 6. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - 6.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - 6.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- C. Program Pengelolaan Pelayanan**
 - 1. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - 1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - 2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
 - 2.1 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
- D. Program Perkeretaapian**
 - 1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
 - 1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 ditetapkan dengan 4 Program dan 15 Kegiatan dengan 36 Sub Kegiatan yang tersebar pada Sekretariat, Bidang dan UPTD. Sebaran lokasi pelaksanaan Program/Kegiatan teknis secara umum tersebar pada 9 Kabupaten/Kota sesuai usulan berdasarkan kewenangan serta lingkup koordinasi. Sedangkan Program/Kegiatan rutin perkantoran berlokasi di Denpasar. Berikut Rekapitulasi rancangan pagu Program/Kegiatan pada Sekretariat, Bidang dan UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang terdapat dalam Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025.

Secara rinci rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif sebagai usulan dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disesuaikan dengan pagu tahap perencanaan RKPD Tahun 2025 serta Perkiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali 2024-2026, maka rancangan rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 mengampu 4 Program yang dilaksanakan oleh 4 Bidang maupun 4 UPTD pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, adalah terdiri dari :

I. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi Bali dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat dan bagian Katata Usahaan pada masing – masing UPTD.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan Tahun 2025			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	Denpasar	100%	28.064.366.986	APBD

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan oleh 6 kegiatan dimana 4 kegiatan di bidang dan 2 kegiatan di UPTD di Dinas Perhubungan Provinsi Bali yaitu Bidang Angkutan Jalan, Lalu Lintas Jalan, UPTD. Perlengkapan Jalan, UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan dan UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita dengan atau diampu oleh 6 kegiatan yaitu:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan Tahun 2025

Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	9 Kab./ Kota	0,86 Rasio	3.156.010.620	APBD
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional	9 Kab./ Kota	66%	90.000.000	APBD
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	9 Kab./ Kota	73,45%	700.000.000	APBD
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	9 Kab./ Kota	73,45%	447.283.980	APBD
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans SARBAGITA	9 Kab./ Kota	83	24.550.000.000	APBD
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9 Kab./ Kota	43,75	3.650.000.000	APBD

Rencana sub kegiatan yang akan mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin.

4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
5. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi.
6. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi.
8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
9. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

III. Program Pengelolaan Pelayaran akan dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelayaran dan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan, indikator program yang akan menjawab Program Pengelolaan Pelayaran dengan kebutuhan anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan Tahun 2025			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	9 Kab./ Kota	80%	60.050.092.840	APBD
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	9 Kab./ Kota	50%	400.000.000	APBD

Rencana sub kegiatan yang mendukung terwujudnya Program Pengelolaan Pelayaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.
2. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian diampu oleh 1 Bidang Keterpaduan Moda dengan kegiatan pada tahun 2025 masih sebatas kajian – kajian dan koordinasi untuk mewujudkan transportasi menggunakan keretaapi di Provinsi Bali. Adapun indikator program dan kebutuhan pagu yang akan di perlukan adalah sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan Tahun 2025			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	9 Kab./ Kota	35%	2.500.000.000	APBD

Rencana sub kegiatan untuk mewujudkan Program Pengelolaan Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman yang adaptif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan pembangunan serta perubahan kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Diharapkan Rencana kerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan akuntabel baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Mengingat sangat kompleknya visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan kewenangan Provinsi pada bidang perhubungan masih sangat sedikit, maka kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan mencapai sasaran dengan baik jika ada dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Dukungan dalam bentuk kebijakan dan penganggaran sangat diharapkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran.

Dukungan penganggaran terhadap Program Prioritas dan pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sangat diharapkan dapat konsisten dipertahankan, sehingga target dapat tercapai.

Dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas, maka diharapkan pelayanan jasa perhubungan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, teratur, aman, nyaman dan menjangkau keseluruhan wilayah sehingga mampu menunjang pembangunan Bali secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apabila di dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tersebut terjadi keterbatasan dana atau efisiensi anggaran, maka target Rencana Kerja (Renja) disesuaikan. Tindak lanjut alokasi

anggaran atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Tata cara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali 2024-2026 sesuai dengan prioritas sasaran.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Bali, diharapkan mendapatkan gambaran untuk dijadikan salah satu referensi dalam penentuan pagu indikatif Dinas Perhubungan yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

LAMPIRAN

1. Tabel 2.1
2. Tabel 3.3

Tabel T-C29.										
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan										
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024										
Dinas Perhubungan Provinsi Bali										
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Bali										
Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DINAS PERHUBUNGAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai		83,85 Persen	83,85 Persen	1001%	83,85 Persen		
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen		
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	5 Dokumen		
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan	96 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	100%	96 Orang/Bulan		
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen		
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		

2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Unit		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Paket	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	9 Unit		
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Tahun	55 Paket	55 Paket	55 Paket	100%	55 Paket		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen		
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	14 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	20 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	100%	45 Unit		

2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Drehabilitasi	6 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0,88 Rasio		0,86 Rasio	0,86 Rasio	100%	0,86 Rasio		
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan Jalan	1 Laporan 1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan		
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.02.1.06	Perseutujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang dihidakiarjuti	3 Laporan 3 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan		
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan		
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan		
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen					1 Laporan		
2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen					3000 Dokumen		
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	380 Unit	7 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	380 Unit	3000 Unit				10 Unit		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	80 Persen		50 Persen	50 Persen	1000%	75 Persen		
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah dokumen kajian	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35 Persen		50 Persen	50 Persen	100%	25 Persen		
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai		84 Persen	84 Persen		83,85 Persen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket		100 Persen	100 Persen	100%	11 Paket		
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan		100 Persen	100 Persen	100%	5 Laporan		
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit 12 Unit		100 Persen	100 Persen	100%	20 Unit		
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	8 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit		

2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	66 Persen		65 Persen	65 Persen	100%	65 Persen		
2.15.02.1.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit					14 Unit		
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit					14 Unit		
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan		
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai		79 Persen	79 Persen	100%	83,85 Persen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun		
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1 Paket		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket					1 Paket		
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen					1 Dokumen		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan					1 Laporan		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kursi yang disediakan	2 Unit 3 Paket					10 Unit		
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket					1 Paket		

2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	1 Tahun 1 Tahun		13 Unit	13 Unit	100%	25 Unit		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	29 Unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kapuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83 Indeks		75 Persen	75 Persen	100%	82,5 Persen		
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	7332 RIT		8760 RIT	8760 RIT	100%	7332 RIT		
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Unit	8 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit		
	UPTD PERLENGKAPAN JALAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai		79 Persen	79 Persen	100%	83,85 Persen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan 1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Dokumen		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	22 Laporan		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit		8 Unit	8 Unit	100%	24 Unit		
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	23 Unit		

2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit 16 Unit		11 Unit	11 Unit	100%	15 Unit		
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	2 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	12 Unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	43,74 Persen					38,58 Persen		
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	450 Unit 700 Unit		395 Unit	395 Unit	100%	388 Unit 760 Unit		
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	300 Unit	586 Unit	267 Unit	267 Unit	100%	363 Unit		
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	236 Unit	998 Unit	998 Unit	998 Unit	100%	998 Unit		
	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,90 Nilai		84 Persen	84 Persen	100%	83,85 Persen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Paket		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Dokumen		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan		

[illegible]

					Tabel 1-C.3:				
					Rumusan Rencana				
					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025				
					dan Prakiraan Maju Tahun 2026				
					Dinas Perhubungan Provinsi Bali				
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Bali									
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	DINAS PERHUBUNGAN				104.545.449.620,00				29.649.974.739,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				104.545.449.620,00				29.649.974.739,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				104.545.449.620,00				29.649.974.739,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83,90 Nilai	31.633.608.164,00			-	25.189.974.739,00
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen	38.167.000,00			-	45.000.000,00
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	5 Dokumen	12.200.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			25.000.000,00
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3 Laporan	25.967.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			20.000.000,00
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	24.634.739.316,00			-	19.562.974.739,00
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	103 Orang/ Bulan	24.619.225.316,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.552.974.739,00
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Dokumen	15.514.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	2.063.061.252,00			-	1.435.500.000,00
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.993.800,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			8.500.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	731.886.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			950.000.000,00
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	75.600.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			90.000.000,00
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.253.700,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			12.000.000,00
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	461.086.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			375.000.000,00
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	1.165.459.200,00			-	630.000.000,00
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.000.000.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			280.000.000,00

2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	80.478.800,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			350.000.000,00
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	819.473.020,00			-	931.500.000,00
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.710.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			6.500.000,00
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	295.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			375.000.000,00
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	342.775.436,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			550.000.000,00
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	2.912.709.376,00			-	2.555.000.000,00
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	904.767.964,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			925.000.000,00
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Unit	73.770.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			80.000.000,00
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	1.130.374.168,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			1.550.000.000,00

2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat		0,88 Rasio	71.787.988.746,00			-	1.690.000.000,00
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		1 Laporan 1 Laporan	1.919.434.760,00			-	550.000.000,00
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	297.783.542,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			400.000.000,00
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	22.500.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			150.000.000,00
2.15.02.1.06	Penetujian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		3 Laporan 3 Laporan	73.926.000,00			-	90.000.000,00
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	66.726.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			45.000.000,00
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	7.200.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			45.000.000,00
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan		1 Dokumen	70.876.000,00			-	500.000.000,00
2.15.02.1.10.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	70.876.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			500.000.000,00
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan		380 Unit	327.035.370,00			-	550.000.000,00
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380 Unit	327.035.370,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			550.000.000,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran		80 Persen	624.910.250,00			-	800.000.000,00
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Koordinasi Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Laporan	454.226.050,00			-	800.000.000,00
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	454.226.050,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			800.000.000,00
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lntasan kereta api yang terbangun		35 Persen	598.942.460,00			-	2.000.000.000,00
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Pro Stud Kelayakan Angkutan Umum Massal Lintasan Seminyak-Canggu-Cemagi		1 Dokumen	598.942.460,00			-	2.000.000.000,00
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	598.942.460,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			2.000.000.000,00

	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ				104.545.449.620,00				5.032.948.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.246.970.492,00				5.032.948.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				104.545.449.620,00				5.032.948.000,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83,90 Nilai	31.633.608.164,00			-	632.948.000,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		1 Laporan 1 Paket 1 Paket	2.063.061.252,00			-	398.148.000,00
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	4.244.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.248.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	70.967.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160.000.000,00
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			900.000,00
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	114.346.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			232.000.000,00
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	819.473.020,00			-	45.800.000,00
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	1.193.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.500.000,00
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	57.860.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.300.000,00
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	42.765.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43.000.000,00
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit 12 Unit	2.912.708.376,00			-	186.000.000,00
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	10 Unit	167.299.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			170.000.000,00
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	18 Unit	18.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.000.000,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional		66 Persen	71.787.988.746,00			-	4.400.000.000,00
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersehat dan Terpelihara		14 Unit	3.957.080.260,00			-	1.700.000.000,00
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersehat dan Terpelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	14 Unit	596.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.700.000.000,00
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		1 Laporan	1.919.434.760,00			-	2.700.000.000,00
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	1.599.151.218,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.700.000.000,00

	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA				104.545.449.620,00				30.787.500.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				104.545.449.620,00				30.787.500.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				104.545.449.620,00				30.787.500.000,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83,90 Nilai	31.633.608.164,00			-	787.500.000,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Perakuran perundang undangan yang tersedia Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	2.063.061.252,00			-	256.000.000,00
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	1 Paket	915.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.500.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	148.989.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			155.000.000,00
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	1 Paket	20.324.588,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27.000.000,00
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Paket	9.876.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	31.633.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52.500.000,00
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor yang tersedia Jumlah mebel yang tersedia		2 Unit 3 Paket	1.165.459.200,00			-	57.000.000,00
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	3 Paket	23.685.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			57.000.000,00
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah jasa pelayanan umum kantor (jasa kebersihan) yang tersedia Jumlah jasa surat menyurat tenaga materi yang tersedia		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	819.473.020,00			-	79.500.000,00
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	471.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000,00
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1 Laporan	33.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			34.000.000,00
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	1 Laporan	40.910.892,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45.000.000,00
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer yang tersedia Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, tenaga administrasi, tenaga supir, pajak kendaraan yang tersedia		1 Tahun 1 Tahun	2.912.708.376,00			-	395.000.000,00
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	6 Unit	313.788.132,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			380.000.000,00
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	18 Unit	18.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00

2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita		83 Indeks	71.787.988.748,00			-	30.000.000.000,00
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA		7332 RT	65.439.656.356,00			-	30.000.000.000,00
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	65.439.656.356,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000.000,00
	UPTD PERLENGKAPAN JALAN				104.545.448.620,00				2.817.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				104.545.448.620,00				2.817.000.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				104.545.448.620,00				2.817.000.000,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83,90 Nilai	31.633.608.164,00			-	337.000.000,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Laporan 1 Paket	2.063.061.252,00			-	41.000.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	5.276.800,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			6.000.000,00
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	16.966.400,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			35.000.000,00
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	1.165.459.200,00			-	116.000.000,00
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	5 Unit	61.295.600,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			116.000.000,00
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		2 Unit 16 Unit	2.912.709.376,00			-	180.000.000,00
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		3 Unit	150.654.492,00				
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	16 Unit	9.050.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			15.000.000,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik		43,75 Persen	71.787.988.748,00			-	2.480.000.000,00
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terepelihara		450 Unit 700 Unit	3.957.080.280,00			-	2.480.000.000,00
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Unit	2.435.925.033,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.710.000.000,00
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246 Unit	905.523.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			770.000.000,00

	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN				104.545.449.620,00				1.440.500.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				104.545.449.620,00				1.440.500.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				104.545.449.620,00				1.440.500.000,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83,90 Nilai	31.633.608.164,00			-	990.500.000,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Paket 1 Tahun	2.063.061.252,00			-	609.000.000,00
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	37.460.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9.000.000,00
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	314.401.444,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Tersedia Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia		1 Paket 1 Paket	1.165.459.200,00			-	190.000.000,00
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan		1 Paket	819.473.020,00			-	2.000.000,00
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	486.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000,00
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia		2 Unit 1 Paket	2.912.709.376,00			-	189.500.000,00
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	120.964.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	5.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9.500.000,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Menerapkan SPM		50 Persen	624.910.250,00			-	450.000.000,00
2.15.03.1.09	Pembangunan, Pemeliharaan, Pembiayaan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia		19 Laporan	70.684.200,00			-	450.000.000,00
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Laporan	139.540.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450.000.000,00
J U M L A H					42.989.972.308,00				68.487.922.739,00



PEMERINTAH PROVINSI BALI
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara nugrahaNya kami dapat menyelesaikan Perubahan Renja Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Rancangan Akhir Perubahan Renja Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Provinsi Bali Tahun 2025.

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali



Iri Arya Dhyana Kubontubuh, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690510 199603 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan	7
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	32
Bab IV Penutup.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2 Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan s.d. Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta perkiraan maju. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 ini disusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dengan disusunnya RPJMD Periode Tahun 2025-2029 maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap RKPD tahun 2025 untuk memastikan arahan perencanaan pembangunan dan penganggaran telah sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang saat ini dalam proses penyusunan.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali perlu melakukan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan maksud: (1) penyesuaian tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029; (2) penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus disesuaikan.

Sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *topdown* dan *bottom-up*. Perubahan RKPD

Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Semesta Berencana Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renja Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 adalah:

- a. Mensinkronkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, rencana kerja dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga terjadi sinergisitas dalam pendanaan.
- b. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- c. Media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* untuk menetapkan program/kegiatan Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Tujuan penyusunan Perubahan Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya program/kegiatan dibidang Koperasi dan UKM yang berkesesuaian dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- 2) Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas tanpa mengabaikan aspek kualitas melalui pemantapan, koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- 3) Terlaksananya seluruh kegiatan yang dibiayai dana APBN/APBD dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas;
- 4) Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan, dan pergeseran mata anggaran kegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025.

BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan I tahun 2025, kendala yang dihadapi dan solusi yang akan ditempuh.

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Dalam Bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun 2025 baik yang mengalami perubahan maupun tidak disertai dengan pendanaannya.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini menjelaskan harapan dari Rancangan Akhir Perubahan Renja Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 dan mengurai prinsip dan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

BAB II

Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan I tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidaknya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan terhadap Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : target 82,40 (nilai Sakip) dan anggaran Rp19.939.310.908 (Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.971.308.172 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau 14,87%.
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam : target 3,7% dan anggaran Rp256.122.594 (Dua ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan capaian kinerja sebesar

- 1,68% dan realisasi anggaran sebesar Rp26.036.846 (Dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau 10,17%.
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi : target 7% dan anggaran Rp93.674.810 (Sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 1,94% dan realisasi anggaran sebesar Rp12.079.082 (Dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) atau 12,89%.
 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi : target 3,3% dan anggaran Rp120.258.220 (Seratus dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 0,56% dan realisasi anggaran sebesar Rp17.667.164 (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau 14,69%.
 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) : target 6% dan anggaran Rp537.661.002 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu dua rupiah) dengan capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp104.942.484 (Seratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 19,52%.
 6. Program Pengembangan UKM : target 3% dan anggaran Rp400.443.504 (Empat ratus juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) dengan capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp38.695.728 (Tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau 9,66%.

UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : target 82,40 (nilai Sakip) dan anggaran Rp477.808.994 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp107.479.645 (Seratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan atau 14,87%.
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian : target 25% dan anggaran Rp2.553.310.416 (Dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus

sepuluh ribu empat ratus enam belas rupiah) dengan capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp48.612.514 (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus empat belas rupiah) atau 1,90%.

Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan III dan IV, sehingga target belum tercapai pada triwulan I atau II
2. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.

Untuk itu diperlukan langkah strategis dalam setiap pelaksanaan kinerja agar pencapaian target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat dicapai secara optimal dan memperoleh solusi penanganan yang tepat berpedoman dengan perundangan-undangan yang berlaku yaitu penyesuaian-penyesuaian terhadap RKPD Provinsi Bali Tahun 2025; penataan kembali terhadap APBD 2025 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien; percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 2 Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan s.d. Triwulan I Tahun 2025
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegia tan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kiner ja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggar an RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capai an Kinerja dan Realisas i Anggara n RPJMD s/d Tahun n- 1		Perang kat Daerah Penan g g jawab	Ket e ran g an
				5	6	7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		47.556.494. 975		0, 00	82, 40	Nilai Sakip	19.939.310. 908	0	2.971.308. 172	0	14,90 %		2.971.308.1 72			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENE NGAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = (8/7) x 100%	(10) = 6 + 8	(11) = (10/5) x 100%	12	13				
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00	3	Dokumen	143.164.212	1	35.557.076	33,33%	24,84%		35.557.076			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	121.098.720	2	Dokumen	134.899.312	0	32.476.276	0	24,07%		153.574.996			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	5.615.750	1	Laporan	8.264.900	1	3.080.800	0	37,28%		8.696.550			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0,00	1	Dokumen	16.437.269.734	0	2.273.380.268	0	13,83%		2.273.380.268			DINAS KOPE RASI, USAHA KECIL,	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an
				1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = (8/7) x 100%	(10) = 6 + 8	(11) = (10/5) x 100%	12	13				
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																			DAN MENE NGAH	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			67	10.801.409.908	67	Orang/ Bulan	16.437.269.734	0	2.273.380.268	0	13,83 %		13.074.790.176			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan				0,00	1	Doku men	20.000.000	0	0,00	0	0,00%		0,00			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0,00	4	Orang	20.000.000	0	0,00	0	0,00%		0,00			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = (8/7) x 100%	(10) = 6 + 8	(11) = (10/5) x 100%						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses				0,00	2	Dokumen	211.047.794	0	43.059.860	0	20,40%		43.059.860			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0,00	1	Paket	10.997.800	0	0	0	0		0			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0,00	1	Paket	48.405.800	0	11.948.500	0	24,68%		11.948.500			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0,00	1	Paket	76.071.194	0	10.550.000	0	13,87%		10.550.000			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = (8/7) x 100%	(10) = 6 + 8	(11) = (10/5) x 100%	12	13								
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	GAH	
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0,00	1	Paket	21.500.000	0	5.378.400	0	25,02%		5.378.400			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0,00	1	Laporan	4.500.000	0	0	0	0		0			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2	33.706.668	2	Laporan	49.573.000	0	15.182.960	0	25,41%		48.889.628			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capai an Kinerja dan Realisas i Anggara n RPJMD s/d Tahun n- 1		Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00	1	Doku men	700.452.200	0	0,00	0	0,00%		0,00			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			31	615.903.542	5	Unit	700.452.200	0	0,00	0	0,00%		0,00			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00	2	Doku men	1.143.253.156	0	214.003.148	0	18,72 %		214.003.148			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00	1	Lapor an	1.993.900	0	1.270.000	0	63,69 %		1.270.000			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN	

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capai an Kinerja dan Realisas i Anggara n RPJMD s/d Tahun n- 1		Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																			MENEN GAH	
	2.17.01.1. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0, 00	1	Lapor an	246.000.000	0	46.489.344	0	18,90 %		46.489.344			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.01.1. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0, 00	1	Laporan	895.259.256	0	166.243.804	0	40, 96%		166.243.804			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	1.372.815. 529	2	Doku men	1.304.123. 812	0	405.307.820	0	31,08 %		1.778.123. 349			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an
				1	2	3	4	7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0, 00	20	Unit	797.265.444	0	382.774.574	0	48,01 %		382.774.574			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0, 00	76	Unit	49.920.000	0	0	0	0		0			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0, 00	3	Unit	456.938.368	0	22.533.246	0	4,93%		22.533.246			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang difasilitasi IUSP		771.220.800		0, 00	3,7	Persentase (%)	256.122.594	1, 68	26.036.846		10,17 %		26.036.846		3,38%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = (8/7) x 100%	(10) = 6 + 8	(11) = (10/5) x 100%	12	13				
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																			MENENGAH	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diterbitkan			10	142.787.420	10	Unit	246.202.994	3	25.084.846		10,19%		167.872.266			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 Satu Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				0,00	10	Unit	246.202.994	3	25.084.846		10,19%		25.084.846			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan			1	5.292.000	1	Unit Usaha	9.919.600	0	952.000		9,60%		6.244.000			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				1	2	3	4	7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diterbitkan																DAN MENENGAH	
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 Satu Daerah Provinsi				0,00	1	Unit	9.919.600	0	952.000		9,60%		952.000			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas		229.530.000		0,00	7	Persentase (%)	93.674.810	1,94	12.079.082		12,89%		12.079.082		5,26%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi			218	38.267.910	90	Unit	26.908.000		2.292.000		8,52%		40.559.910			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0,00	90	Unit	26.908.000	0	2.292.000		8,52%		2.292.000			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an	
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi			86	89.718.225	70	Unit Usaha	66.766.810	73	9.787.082	14,66 %		99.505.307			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				0,00	70	Unit Usaha	66.766.810	73	9.787.082	14,66 %		99.505.307			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
4	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra		1.432.267.200		0, 00	3,3	Persentase (%)	120.258.220	0,56	17.667.164	14,69 %		17.667.164			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,		

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegia tan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kiner ja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggar an RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capai an Kinerja dan Realisas i Anggara n RPJMD s/d Tahun n- 1		Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an	
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			dengan BUMN, BUMD/Swasta															DAN MENEN GAH		
	2.17.06.1 .01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			146	175.150. 930	16 4	Unit Usaha	120.258.220	21	17.667.164		14,69 %		192818.094		DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH		
	2.17.06.1. 01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan				0,00	84	Unit Usaha	94.108.620	21	16.318.164	0	17,34 %		16.318.164		DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				5	6	7			8	(9) = (8/7) x 100%	(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Restrukturisasi Usaha	manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha																	
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi			0,00	80	Unit Usaha		26.149.600	0	1.349.000		5,16%		1.349.000			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
5	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha		2.500.468.000	0,00	6	Persentase (%)		537.661.002	0	104.942.484		19,52 %		104.942.484			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = (8/7) x 100%	(10) = 6 + 8	(11) = (10/5) x 100%	12	13				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			221	925.679.759	205	Unit Usaha	537.661.002	0	104.942.484		19,52 %		1.030.622.243			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				0,00	205	Unit Usaha	471.821.002	0	100.333.984		21,27 %		100.333.984			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggar an RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Tingkat Capai an Kinerja dan Realisas i Anggara n RPJMD s/d Tahun n-1	Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an								
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausaha an			0, 00	100	Orang	65.840.000	0	4.608.500	0	7,00%		4.608.500			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH		
6	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas		1.175.233.700		0,00	3	Persent ase (%)	400.443.504	0	38.695.728	0	9,66%		38.695.728			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			417	394.362.810	145	Unit Usaha	400.443.504	0	38.695.728		9,66%		433.058.538			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan,				0,00	110	Unit Usaha	207.163.804	0	33.486.228	0	16, 16%		33.486.228			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN	

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an	
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi																GAH	
	2.17.08.1.01 .0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				0, 00	35	Orang	50.000.000	0	1.869.500	0	3,74%		1.869.500			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
7	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		477.808.994		0, 00	82, 40	Nilai Sakip	477.808.994	0	107.479.645	0	22,49 %		107.479.645			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses				0, 00	2	Doku men	74.659.450	0	14.782.750	0	19,80 %		14.782.750			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.01.1. 06.0001	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen				0, 00	1	Paket	699.600	1	616.050	10 0	88,06 %		616.050			DINAS KOPER	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																ASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0,00	20	Unit	101.191.492	0	43.566.582	0	43,05 %		43.566.582			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0,00	1	Paket	56.904.050	0	5.817.000	0	10,22 %		5.817.000			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0,00	1	Paket	999.700	0	299.700	0	29,98 %		2969.700			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = (8/7) x 100%	(10) = 6 + 8	(11) = (10/5) x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0,00	1	Laporan	990.000	0	0	0	0,00%		0			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00	1	Laporan	1.920.000	0	0	0	0,00%		0				
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00	2	Dokumen	209.755.068	0	34.108.149	0	16,26%		34.108.149			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00	1	Laporan	989.100	0	630.000	0	83,22%		630.000			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0, 00	1	Lapor an	48.500.000	0	3.433.821	0	7,08%		3.433.821			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0, 00	1	Lapor an	160.265.968	0	30.044.328	0	18,75 %		30.044.328			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00	2	Doku men	193.394.476	0	58.588.746	0	30,29 %		58.588.746			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0, 00	1	Unit	101.191.492	0	43.566.582	0	60,03%		43.566.582			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN	

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an
1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%		(10) = 6 + 8		(11) = (10/5) x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0,00	5	Unit	2.070.000	0	0	0	0,00%		0			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,00	1	Unit	90.132.984	0	15.022.164	0	16,67 %		15.022.164			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
8	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi		6.510.848.070		0,00	25	Persentase (%)	2.553.310.416	0	48.612.514	0	1,90%		48.612.514			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegia tan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kiner ja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggar an RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capai an Kinerja dan Realisas i Anggara n RPJMD s/d Tahun n- 1		Perang kat Daerah Penan g gung jawab	Ket e ran g an
				1	2	3	4	5		6		7			8		(9) = (8/7) x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.05.1. 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0, 00	41 0	Orang	2.553.310. 416	0	48.612.514	0	1,90%		48.612.514			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	
	2.17.05.1. 01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian			1742	7.688.724. 592	50	Orang	2.553.310. 416	0	48.612.514	0	1,90%		48.612.514			DINAS KOPER ASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan merupakan awal kesuksesan dengan didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun, sebaik apapun suatu perencanaan tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan karena kunci sukses ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan secara rinci. Program-program di *break down* ke dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal pada rencana kerja (renja). Dalam tahapan Perubahan Renja terdapat penambahan anggaran antara lain: tambahan untuk tenaga pendamping koperasi sebesar Rp1.091.391.230 (Satu milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah), Belanja Jasa Pembuatan Akte Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan Fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) serta kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah). Perubahan rencana program, kegiatan, sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

TABEL 3
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				18.327.335.849	24.807.715.4 48	26.819.981 .678	8.492.645.829				31.193.000.000
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.327.335.849	24.807.715.4 48	26.819.981 .678	8.492.645.829				31.193.000.000
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				18.327.335.849	24.807.715.4 48	26.819.981 .678	8.492.645.829				31.193.000.000
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.38 Nilai	82.38 Nilai	16.422.964.489	20.456.497.9 02	20.417.119 .902	3.300.035.511				19.723.000.000
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	158.046.420	152.362.212	143.164.21 2	-14.882.208				160.000.000
	2.17.01.1.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	148.046.420	142.177.312	134.899.312	-13.147.108	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000
	2.17.01.1.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.184.900	8.264.900	-1.735.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	13.007.778.019	16.437.269.734	16.437.269.734	3.429.491.715				14.500.000.000
	2.17.01.1.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	67 Orang/ Bulan	67 Orang/ Bulan	13.007.778.019	16.437.269.734	16.437.269.734	3.429.491.715	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		14.500.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	0	-20.000.000				30.000 .000
	2.17.01.1.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	4 Orang	4 Orang	20.000.000	20.000.000	0	-20.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	278.975.244	295.887.244	285.707.244	6.732.000				441.500.000
	2.17.01.1.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	11.000.000	10.997.800	10.997.800	-2.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000
	2.17.01.1.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	41.500.000	48.405.800	48.405.800	6.905.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000
	2.17.01.1.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	76.071.194	76.071.194	76.071.194	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		125.000.000
	2.17.01.1.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	21.500.000	21.500.000	21.500.000	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000
	2.17.01.1.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000
	2.17.01.1.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	59.753.000	49.573.000	-10.427.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		125.000.000
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	700.452.200	700.452.200	575.452.200				500.000.000
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	5 Unit	125.000.000	700.452.200	700.452.200	575.452.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	1.372.735.640	1.353.008.224	1.353.008.224	-19.727.416				1.781.500.000
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1.993.900	1.993.900	-6.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000
	2.17.01.1.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	246.000.000	246.000.000	246.000.000	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		325.000.000
	2.17.01.1.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	917.007.080	895.259.256	895.259.256	-21.747.824	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	1.460.429.166	1.497.518.288	1.497.518.288	37.089.122				2.310.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	2.17.01.1.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	18 Unit	18 Unit	781.574.980	797.265.444	797.265.444	15.690.464	Kota Denpasar, Semua Kecamatan,S emua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		950.000.000
	2.17.01.1.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	76 Unit	76 Unit	50.000.000	49.920.000	49.920.000	-80.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000
	2.17.01.1.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	4 Unit	4 Unit	447.482.766	456.938.368	456.938.368	9.455.602	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		875.000.000
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3.70 Persen	3.70 Persen	243.046.420	308.686.594	306.122.594	106.953.580				350.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</i>	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	223.046.420	288.686.994	796.202.994	573.156.574				250.000.000
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	223.046.420	288.686.994	796.202.994	573.156.574	Kab.Badung Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana,	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanga sem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</i>	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	20.000.000	19.999.600	9.919.600	-10.080.400				100.000.000
	2.17.02.1.02. 0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	20.000.000	19.999.600	9.919.600	-10.080.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	7.00 Persen	7.00 Persen	187.682.140	183.432.810	93.674.810	62.317.860				250.000.000
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	50.000.000	49.934.000	26.908.000	-23.092.000				75.000.000
	2.17.03.1.01. 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi											
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	50.000.000	49.934.000	26.908.000	-23.092.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karang asem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi</i>	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	137.682.140	133.498.810	66.766.810	-70.915.330				175.000.00
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
			<i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	137.682.140	133.498.810	66.766.810	-70.915.330	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN,	3.30 Persen	3.30 Persen	200.364.280	192.110.220	120.258.220	399.635.720				600.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			BUMD/ Swasta										
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	164 Unit Usaha	164 Unit Usaha	200.364.280	192.110.220	120.258.220	-80.106.060				600.000.000
	2.17.06.1.01. 0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	84 Unit Usaha	84 Unit Usaha	150.364.280	142.110.620	94.108.620	-56.255.660	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karang asem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
	2.17.06.1.01. 0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
			<i>Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan</i>	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	50.000.000	49.999.600	26.149.600	-23.850.400	Kab. Badug, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuh an wirausaha	6.00 Persen	6.00 Persen	678.585.680	635.576.002	537.661.002	471.414. 320				1.150.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	205 Unit Usaha	205 Unit Usaha	678.585.680	635.576.002	537.661.002	-140.924. 678				1.150.000.000
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan											
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>	205 Unit Usaha	205 Unit Usaha	602.185.680	559.176.002	471.821.002	-130.364. 678	Kab. Badung, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		950.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karang asem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
	2.17.07.1.01. 0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 Orang	100 Orang	76.400.000	76.400.000	65.840.000	-10.560.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karang asem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		200.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	3.00 Persen	3.00 Persen	419.328.560	415.843.504	400.443.504	600.671. 440				1.020.000.000
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	145 Unit Usaha	145 Unit Usaha	419.328.560	415.843.504	400.443.504	-18.885.056				1.020.000.000
	2.17.08.1.01. 0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	219.328.560	215.843.804	207.163.804	-12.164.756	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karang asem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		250.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
	2.17.08.1.01. 0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM											
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	35 Orang	35 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		270.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanga sem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
	2.17.08.1.01. 0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			<i>Wirausaha yang Difasilitasi</i>	100 Orang	100 Orang	100.000.000	99.999.700	97.119.700	-2.880.300	Kab. Badung, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Smua Kel/Desa Kab. Karang asem, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kab. Klung kung, Semua	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa			
	2.17.08.1.01. 0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil											
			Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000	50.000.000	46.160.000	-3.840.000	Kab. Badung, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa			250.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Kab. Jembrana, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kab. Karang asem, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamat an,Semua Kel/Desa			
		UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				18.327.335.849	24.807.715.4 48	26.819.981 .678	8.492.645.829				31.193.000. 000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.327.335.849	24.807.715.4 48	26.819.981 .678	8.492.645.829				31.193.000. 000
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENEN GAH				18.327.335.849	24.807.715.4 48	26.819.981 .678	8.492.645.829				31.193.000 .000
1.	2.17.01	PROGRAM PENUN JANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.38 Nilai	82.38 Nilai	16.422.964.489	20.456.497.9 02	20.417.119 .902	3.300.035.511				19.723.000.000
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	278.975.244	295.887.244	285.707.24 4	6.732.000				441.500.000
	2.17.01.1.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	700.000	699.600	699.600	-400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000
	2.17.01.1.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	2.800.000	13.146.100	13.146.100	10.346.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000
	2.17.01.1.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	56.904.050	56.904.050	56.904.050	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000
	2.17.01.1.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1.000.000	999.700	999.700	-300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000
	2.17.01.1.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	990.000	990.000	-10.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000
	2.17.01.1.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			<i>Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1.920.000	1.920.000	-80.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	1.372.735.640	1.353.008.224	1.353.008.224	-19.727.416	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.781.500.000
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	989.100	989.100	-10.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	48.500.000	48.500.000	48.500.000	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	158.228.560	160.265.968	160.265.968	2.037.408	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	1.460.429.166	1.497.518.288	1.497.518.288	37.089.122	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.310.000.000
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya</i>	1 Unit	1 Unit	94.007.14	101.191.492	101.191.492	7.184.352	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	3 Unit	3 Unit	2.000.000	2.070.000	2.070.000	70.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	85.364.280	90.132.984	90.132.984	4.768.704	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25.00 Persen	25.00 Persen	175.364.280	2.615.568.41	3.644.701.646	7.924.635.72				8.100.000.000
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
			<i>Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</i>	410 Orang	410 Orang	175.364.280	2.615.568.41	3.644.701.646	3.469.337.366				8.100.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	2.17.05.1.01. 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi											
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	410 Orang	50 Orang	175.364.280	2.615.568.41	4.444.701. 646	4.269.337.366	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karang asem, Semua Kecamatan,	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		8.100.000. 000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
										Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
	J U M L A H					18.327.335.849	24.807.715.4 48	26.819.981 .678	1.599.943.026. 112				31.193.000. 000

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta target capaian yang akan diselaraskan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, karena adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2025, yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjaringan dari para pemangku kepentingan, proses teknokratis, *top-down* dan *bottom-up* dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.
- c. Partisipasi masyarakat dalam hal ini pelaku Koperasi dan UKM serta *stakeholder* (asosiasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan) dalam proses penyusunan program dan kegiatan melalui Forum Penyelenggaraan Perangkat Daerah ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan pelaku Koperasi dan UKM.
- d. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 serta selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-SKPD Tahun 2025 sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

INDONESIA MAJU

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

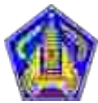


PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



-  disperindag.baliprov.go.id
-  [@disperindag_bali](https://www.instagram.com/disperindag_bali)
-  disperindag@baliprov.go.id
-  Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon



BAB I

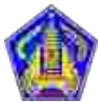
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Bali selain sektor Pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi penyelenggaraan dalam pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pembangunan Industri Daerah di Provinsi Bali sangat perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki berbagai potensi/keunggulan dalam menunjang nilai tambah produk-produk hasil karya para perajin Bali yang memiliki ciri khas yang berakar pada seni dan budaya berlandaskan Tri Hita Karana. Selain produk-produk seni, kebutuhan utama yaitu bahan pangan masyarakat termasuk wisatawan adalah kebutuhan pokok yang harus tersedia, maka ketersediaan bahan pokok haruslah terjaga stabilitasnya, termasuk juga memberikan perlindungan terhadap konsumen. Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melalui program dan kegiatan dalam rangka mendukung Pariwisata seperti meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar regional maupun global, serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok dan perlindungan terhadap konsumen.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan bahan masukan untuk Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025. Setelah Perubahan RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala daerah, maka Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali disempurnakan selanjutnya dikirim Kepada Bappeda Provinsi Bali untuk di verifikasi. Bila hasil verifikasi dari Bappeda Provinsi Bali memandang bahwa Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sinkron dengan Perubahan RKPD, maka Bappeda Provinsi Bali mengirim Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ke Gubernur melalui Sekretariat Daerah untuk ditetapkan menjadi Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi



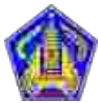
Bali. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

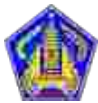
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

1.2 Dasar hukum

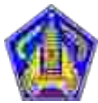
Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Surat Edaran Nomor 2594 Tahun 2025 Tentang Penyampaian Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 Sebagai Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2025 adalah menjabarkan, mensinkronkan dengan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dimana Renja Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat daerah, dan Renja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD.

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2025 adalah:

1. Merancang Perubahan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2025;
2. Optimalisasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 ;
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 dengan RKPD Perubahan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025.

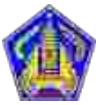
1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

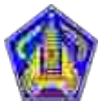


Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III Matrik Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Dalam BAB II; Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sampai Triwulan I Tahun 2025, seperti berikut :



TABEL 2.1
TABEL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
				5		6			7		9		9	
1	2	3	4	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		0,00	82,5	Nilai Sakip	18.947.994.311,00	0	3.238.665.561,00	0	17,09%		3.238.665.561,00
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	545.583.658,00	100	Persentase (%)	1.012.002.794,00	25	18.251.700,00	25	1,80%		563.835.358,00
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0,00	1	Paket	18.267.000,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	20	Paket	588.087.400,00	0	2.930.000,00	0	0,50%		2.930.000,00
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0,00	1	Paket	67.483.394,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0,00	2	Paket	14.840.000,00	0	0,00	0	0,00%		0,00



Pemerintah Provinsi Bali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4	5		6			7		9		9	
				K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0,00	24	Dokumen	6.424.000,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	28	Laporan	316.901.000,00	5	15.321.700,00	17,9	4,83%		15.321.700,00
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	100	1.201.729.000,00	100	Persentase (%)	1.143.326.050,00	25	140.566.484,00	25	12,29%		1.342.295.484,00
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0,00	12	Laporan	340.000.000,00	4	39.697.418,00	33,3	11,68%		39.697.418,00
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	12	Laporan	576.131.150,00	4	100.869.066,00	33,3	17,51%		100.869.066,00
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0,00	12	Laporan	227.194.900,00	4	0,00	33,3	0,00%		0,00
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		0,00	100	Persentase (%)	15.665.986.223,00	25	3.010.260.785,00	25	19,22%		3.010.260.785,00
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	13.778.274.325,00	81	Orang/Bulan	15.665.986.223,00	81	3.010.260.785,00	100	19,22%		16.788.535.110,00
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu		0,00	100	Persentase (%)	66.082.800,00	25	18.800.000,00	25	28,45%		18.800.000,00



Pemerintah Provinsi Bali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4	5		6			7		9		9	
				K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	55.336.841,00	3	Dokumen	66.082.800,00	1	18.800.000,00	33,3	28,45%		74.136.841,00
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		0,00	100	Persentase (%)	985.596.444,00	25	50.786.592,00	25	5,15%		50.786.592,00
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17	880.214.609,00	17	Unit	834.042.460,00	0	35.764.428,00	0	4,29%		915.979.037,00
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	2	Unit	151.553.984,00	0	15.022.164,00	0	9,91%		15.022.164,00
	3.30.01.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		0,00	100	Persentase (%)	75.000.000,00	25	0,00	25	0,00%		0,00
	3.30.01.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0,00	3	Orang	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM		0,00	82	Indeks	302.955.644,00	0	66.808.656,00	0	22,05%		66.808.656,00
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14197	317.422.120,00	14000	Dokumen	302.955.644,00	4362	66.808.656,00	31,2	22,05%		384.230.776,00
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		0,00	14000	Dokumen	302.955.644,00	4362	66.808.656,00	31,2	22,05%		66.808.656,00
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Jumlah Pasar ber SNI		0,00	1	Pasar	24.968.600,00	0	0,00	0	0,00%		0,00



Pemerintah Provinsi Bali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4	5		6			7		9		9	
				K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Toko Swalayan yang dibina	2	75.207.707,00	18	Toko	24.968.600,00	0	0,00	0	0,00%		75.207.707,00
			Jumlah pasar	2		18	Pasar		6		33,3			
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		0,00	36	Laporan	24.968.600,00	6	0,00	16,7	0,00%		0,00
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok		0,00	7	Persentase (%)	243.576.100,00	0	11.316.000,00	0	4,65%		11.316.000,00
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	12	46.757.000,00	18	Kali	243.576.100,00	4	11.316.000,00	22,2	4,65%		58.073.000,00
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		0,00	5	Dokumen	243.576.100,00	1	11.316.000,00	20	4,65%		11.316.000,00
5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif		0,00	55	Persentase (%)	99.999.600,00	0	17.234.000,00	0	17,23%		17.234.000,00
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran	10	315.796.717,00	4	Pelaku Usaha	99.999.600,00	6	17.234.000,00	150	17,23%		333.030.717,00



Pemerintah Provinsi Bali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
				5		6			7		9		9	
1	2	3	4	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi												
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi		0,00	50	Produk	99.999.600,00	38	17.234.000,00	76	17,23%		17.234.000,00
6	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen		0,00	49,72	Indeks	465.992.200,00	0	480.142.164,00	0	103,04%		480.142.164,00
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses		0,00	100	Persentase (%)	465.992.200,00	100	460.320.000,00	100	98,78%		460.320.000,00
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK yang Aktif	1	456.000.000,00	1	BPSK	456.000.000,00	1	456.000.000,00	100	100,00%		912.000.000,00
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM yang Aktif		0,00	3	LPKSM	9.992.200,00	3	4.320.000,00	100	43,23%		4.320.000,00
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga		0,00	100	Persentase (%)	0,00	25	19.822.164,00	25	#DIV/0!		19.822.164,00
			Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan			100	Persentase (%)		25		25			
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	168	106.236.190,00	100	Laporan		33	19.822.164,00	33	#DIV/0!		126.058.354,00



Pemerintah Provinsi Bali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
				K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali		0,00	30	Persentase (%)	300.832.962,00	0	52.577.574,00	0	17,48%		52.577.574,00
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal Bali	100	272.566.980,00	35	Pelaku Usaha	300.832.962,00	0	52.577.574,00	0	17,48%		325.144.554,00
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer		0,00	5	Laporan	300.832.962,00	0	52.577.574,00	0	17,48%		52.577.574,00
8	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh		0,00	1,5	Persentase (%)	1.838.308.786,00	0	385.894.066,00	0	20,99%		385.894.066,00
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina		0,00	1,5	Persentase (%)	1.838.308.786,00	0	385.894.066,00	0	20,99%		385.894.066,00
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	2.217.166.093,00	6	Dokumen	1.700.626.786,00	1	385.894.066,00	16,7	22,69%		2.603.060.159,00
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		0,00	9	Dokumen	137.682.000,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
9	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri		0,00	100	Persentase (%)	49.999.900,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI,	Persentase Data Industri yang terkumpul		0,00	100	Persentase (%)	49.999.900,00	0	0,00	0	0,00%		0,00



Pemerintah Provinsi Bali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
				5		6			7		9		9	
1	2	3	4	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)												
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas		0,00	150	Dokumen	49.999.900,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
10	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		0,00	82,5	Nilai	217.384.462,00	0	7.511.082,00	0	3,46%		7.511.082,00
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		0,00	100	Persentase (%)	68.777.560,00	25	0,00	25	0,00%		0,00
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	225.727.700,00	2	Paket	33.435.060,00	0	0,00	0	0,00%		225.727.700,00
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	12.963.250,00	1	Persentase (%)	24.450.500,00	0	0,00	0	0,00%		12.963.250,00
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	193.337.908,00	1	Laporan	7.680.000,00	0	0,00	0	0,00%		193.337.908,00
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0,00	2	Dokumen	3.212.000,00	0	0,00	0	0,00%		0,00



Pemerintah Provinsi Bali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4	5		6			7		9		9	
				K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan		0,00	100	Persentase (%)	44.555.410,00	25	7.511.082,00	25	16,86%		7.511.082,00
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	2	Laporan	44.555.410,00	0	7.511.082,00	0	16,86%		7.511.082,00
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		0,00	100	Persentase (%)	104.051.492,00	25		25	0,00%		0,00
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0,00	2	Unit	104.051.492,00				0,00%		0,00
11	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh		0,00	1,5	Persentase (%)	827.213.500,00	0	123.360.000,00	0	14,91%		123.360.000,00
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina		0,00	1,5	Persentase (%)	827.213.500,00	0	123.360.000,00	0	14,91%		123.360.000,00
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0,00	1	Dokumen	827.213.500,00	0	123.360.000,00	0	14,91%		123.360.000,00
12	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen		0,00	49,72	Indeks	244.401.176,00	0	24.693.246,00	0	10,10%		24.693.246,00
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan		0,00	45	Sertifikat	244.401.176,00	5	24.693.246,00	11,1	10,10%		24.693.246,00



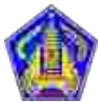
Pemerintah Provinsi Bali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4	5		6			7		9		9	
				K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	86	275.847.620,00	45	Laporan	244.401.176,00	5	24.693.246,00	11,1	10,10%		300.540.866,00
13	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		0,00	82,5	Nilai	340.005.070,00	0	39.163.046,00	0	11,52%		39.163.046,00
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		0,00	100	Persentase (%)	47.761.140,00	25	0,00	25	0,00%		0,00
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13.541.000,00	1	Paket	1.455.700,00	0	0,00	0	0,00%		13.541.000,00
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	89.338.800,00	1	Paket	16.038.040,00	0	0,00	0	0,00%		89.338.800,00
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	1	Paket	21.887.400,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0,00	1	Paket	2.100.000,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	1	Laporan	6.280.000,00	0	0,00	0	0,00%		0,00
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		0,00	100	Persentase (%)	171.274.886,00	25	31.651.964,00	25	18,48%		31.651.964,00
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	222.723.320,00	1	Laporan	12.000.000,00	0	1.607.636,00	0	13,40%		224.330.956,00



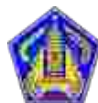
Pemerintah Provinsi Bali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	
1	2	3	4	5		6			7		9		9	
				K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	1	Laporan	159.274.886,00	0	30.044.328,00	0	18,86%		30.044.328,00
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	100	Persentase (%)	120.969.044,00	25	7.511.082,00	25	6,21%		7.511.082,00
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0,00	3	Unit	120.969.044,00	0	7.511.082,00	0	6,21%		7.511.082,00



BAB III
**Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Pada Bab III tentang Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan, sebagai berikut :



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
BALI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00			
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				21.445.882.826,00	21.094.346.865,00	20.730.726.565,00	-715.156.261,00			
1,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00 Indeks	82,00 Indeks	322.947.320,00	302.955.644,00	296.235.644,00	227.052.680,00			
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	14000 Dokumen	322.947.320,00	302.955.644,00	296.235.644,00	-26.711.676,00			Eksportir / Pelaku Usaha
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA										
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	14000 Dokumen	322.947.320,00	302.955.644,00	296.235.644,00	-26.711.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	1 Pasar	1 Pasar	24.968.600,00	24.968.600,00	13.448.600,00	125.031.400,00			
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina Jumlah Toko Swalayan yang dibina	2 Pasar	18 Pasar 18 Toko Swalayan	24.968.600,00	24.968.600,00	13.448.600,00	-11.520.000,00			Pasar Rakyat dan Toko Swalayan
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2 Laporan	36 Laporan	24.968.600,00	24.968.600,00	13.448.600,00	-11.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Semua Kel/Desa		
3,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7 Persen	<7 Persen	244.884.500,00	243.576.100,00	147.251.600,00	-69.884.500,00			
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	18 Kali	18 Kali	244.884.500,00	243.576.100,00	147.251.600,00	-97.632.900,00			Masyarakat
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	244.884.500,00	243.576.100,00	147.251.600,00	-97.632.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	
4,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55 Persen	55 Persen	99.999.600,00	99.999.600,00	48.499.200,00	200.000.400,00			
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	99.999.600,00	99.999.600,00	48.499.200,00	-51.500.400,00			Eksporitr / Pelaku USaha
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor										
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	50 Produk	50 Produk	99.999.600,00	99.999.600,00	48.499.200,00	-51.500.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,72 Indeks	49,72 Indeks	838.606.200,00	834.014.578,00	777.968.578,00	1.486.197.050,00			
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses	100 %	100 %	465.990.200,00	465.992.200,00	461.672.200,00	-4.318.000,00			Konsumen / Pelaku Usaha / BPSK / LPKSM
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen										



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	1 BPSK	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	Kota Denpasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen										
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	3 LPKSM	3 LPKSM	9.990.200,00	9.992.200,00	5.672.200,00	-4.318.000,00	Badung, Karangasem, Denpasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	125.363.980,00	123.621.202,00	102.501.202,00	-22.862.778,00			Konsumen / Pelaku Usaha
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	100 Laporan	100 Laporan	125.363.980,00	123.621.202,00	102.501.202,00	-22.862.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30 Persen	30 Persen	292.078.580,00	300.832.962,00	289.312.962,00	55.519.500,00			
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal Bali	100 Toko	35 Pelaku Usaha	292.078.580,00	300.832.962,00	289.312.962,00	-2.765.618,00			UKM / Pelaku Usaha
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi										
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	5 Laporan	5 Laporan	292.078.580,00	300.832.962,00	289.312.962,00	-2.765.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7,	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)	82,50	82,50	19.819.524.866,00	19.483.383.843,00	19.848.328.943,00	2.988.970.034,00			
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	62.743.600,00	66.082.800,00	41.290.800,00	-21.452.800,00			Aparatur
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	62.743.600,00	66.082.800,00	41.290.800,00	-21.452.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	16.000.000.000,00	15.665.986.223,00	15.665.986.223,00	-334.013.777,00			Aparatur
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	81 Orang/ Bulan	16.000.000.000,00	15.665.986.223,00	15.665.986.223,00	-334.013.777,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 % 1 Sub Kegiatan	100 % 1 Sub Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			Aparatur
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Semua Kel/Desa		
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	1.083.287.894,00	1.106.541.494,00	1.496.278.594,00	412.990.700,00			Aparatur
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.899.100,00	18.267.000,00	18.267.000,00	3.367.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	550.895.100,00	588.087.400,00	557.763.600,00	6.868.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	102.483.394,00	67.483.394,00	67.483.394,00	-35.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.840.500,00	14.840.000,00	14.840.000,00	-500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	6.424.000,00	6.424.000,00	6.424.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	28 Laporan	302.345.000,00	316.901.000,00	193.047.000,00	-109.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	5 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	1.384.335.560,00	1.359.156.346,00	1.359.156.346,00	-25.179.214,00			Aparatur
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	596.469.960,00	576.131.150,00	576.131.150,00	-20.338.810,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	227.194.900,00	227.194.900,00	227.194.900,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	1.214.157.812,00	1.210.616.980,00	1.210.616.980,00	-3.540.832,00			Aparatur
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										



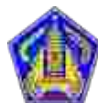
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	822.120.700,00	834.042.460,00	834.042.460,00	11.921.760,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	171.785.280,00	151.553.984,00	151.553.984,00	-20.231.296,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.664.207.860,00	2.910.906.648,00	6.130.678.648,00	3.466.470.788,00			
1,	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen	1,5 Persen	2.417.081.120,00	2.665.522.286,00	5.413.399.786,00	6.159.918.880,00			
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1.5 %	1.5 %	2.417.081.120,00	2.665.522.286,00	5.413.399.786,00	2.996.318.666,00			Industri di Bali
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9 Dokumen	9 Dokumen	137.682.000,00	137.682.000,00	126.162.000,00	-11.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	1.452.185.620,00	1.700.626.786,00	4.563.816.286,00	3.111.630.666,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	
2,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 Persen	100 Persen	49.999.900,00	49.999.900,00	26.959.900,00	550.000.100,00			
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100 %	100 %	49.999.900,00	49.999.900,00	26.959.900,00	-23.040.000,00			Industri di Bali
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)										



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150 Dokumen	150 Dokumen	49.999.900,00	49.999.900,00	26.959.900,00	-23.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		UPTD RUMAH KREATIF				24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00			
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.664.207.860,00	2.910.906.648,00	6.130.678.648,00	3.466.470.788,00			
1,	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)	82,50	82,50	19.819.524.866,00	19.483.383.843,00	19.848.328.943,00	2.988.970.034,00			
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	1.083.287.894,00	1.106.541.494,00	1.496.278.594,00	412.990.700,00			Aparatur
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	33.436.060,00	33.435.060,00	533.435.060,00	499.999.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.239.500,00	2.450.500,00	1.225.000,00	-1.014.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	7.680.000,00	3.840.000,00	-3.360.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1.384.335.560,00	1.359.156.346,00	1.359.156.346,00	-25.179.214,00			Aparatur
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	49.372.140,00	44.555.410,00	44.555.410,00	-4.816.730,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1.214.157.812,00	1.210.616.980,00	1.210.616.980,00	-3.540.832,00			Aparatur
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	101.667.140,00	104.051.492,00	104.051.492,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2,	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen	1,5 Persen	2.417.081.120,00	2.665.522.286,00	5.413.399.786,00	6.159.918.880,00			
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1.5 %	1.5 %	2.417.081.120,00	2.665.522.286,00	5.413.399.786,00	2.996.318.666,00			Industri di Bali
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	827.213.500,00	827.213.500,00	723.421.500,00	-103.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	2.751.314.527,00			
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				21.445.882.826,00	21.094.346.865,00	20.730.726.565,00	-715.156.261,00			
1,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,72 Indeks	49,72 Indeks	838.606.200,00	834.014.578,00	777.968.578,00	1.486.197.050,00			
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	45 Sertifikat	45 Sertifikat	247.252.020,00	244.401.176,00	213.795.176,00	-33.456.844,00			Pelaku Usaha / Eksportir / Konsumen
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian										
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	45 laporan	45 laporan	247.252.020,00	244.401.176,00	213.795.176,00	-33.456.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2,	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	82.50	82.50	19.819.524.866,00	19.483.383.843,00	19.848.328.943,00	2.988.970.034,00			
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	1.083.287.894,00	1.106.541.494,00	1.496.278.594,00	412.990.700,00			Aparatur
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.455.700,00	1.455.700,00	1.455.700,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Semua Kel/Desa		
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.922.500,00	21.887.400,00	77.147.800,00	57.225.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.038.040,00	16.038.040,00	16.038.040,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.797.000,00	6.280.000,00	0,00	-5.797.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	1.384.335.560,00	1.359.156.346,00	1.359.156.346,00	-25.179.214,00			Aparatur
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	159.298.560,00	159.274.886,00	159.274.886,00	-23.674,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1.214.157.812,00	1.210.616.980,00	1.210.616.980,00	-3.540.832,00			Aparatur
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	3 Unit	3 Unit	118.584.692,00	120.969.044,00	120.969.044,00	2.384.352,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	J U M L A H					24.110.090.686,00	24.005.253.513,00	26.861.405.213,00	1.599.943.026.112,00			



BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025. Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah penyusunan target, capaian kinerja dan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2025 sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan pemerintah. Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2025 sangat terbatas, hanya pada Triwulan III dan IV Tahun 2025, makanya perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan triwulan satu sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja disusun sehingga terdapat keselarasan dengan RKPD Perubahan Tahun 2025.

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali



Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199303 1 208



RENJA PERUBAHAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

2025



**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
JL. IR JUANDA NO 1 RENON DENPASAR**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat kami susun dan selesaikan tepat waktu.

Renja Perubahan ini disusun sebagai respons terhadap dinamika pembangunan kebudayaan di daerah, perubahan arah kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan aktual masyarakat Bali. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah, prioritas, serta landasan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, sehingga dapat mendukung pencapaian visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan, kami berusaha mengakomodasi berbagai perkembangan, memperhatikan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta menyelaraskan program dengan target-target prioritas Daerah. Kami sadar bahwa tantangan dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya Bali semakin kompleks, sehingga diperlukan perencanaan yang adaptif dan responsif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik internal Dinas Kebudayaan, instansi terkait, maupun masyarakat, atas kontribusi, dukungan, dan masukannya dalam penyusunan Renja Perubahan ini. Kami juga membuka ruang untuk masukan konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini ke depan, agar pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan di Provinsi Bali semakin optimal.

Semoga Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan yang berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Bali, 9 juli 2025
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,

IGEDE ARYA SUGIARTHA
NIP. 196612011991031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1

DAFTAR ISI.....2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 LATAR BELAKANG..... 3

1.2 LANDASAN HUKUM 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN.....11

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....11

2.2 CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 13

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 14

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 16

3.1 RENCANA KERJA TAHAP PERUBAHAN 16

BAB IV PENUTUP 34

4.1 KESIMPULAN.....34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebudayaan Bali dapat diartikan sebagai keseluruhan dari sistem nilai, perilaku, dan hasil karya masyarakat Bali yang terbentuk dari proses interaksi masyarakat di Bali dengan lingkungannya. Kebudayaan Bali dalam kehidupan bermasyarakat sangat fungsional, karena sebagai pembentuk jati diri dan identitas etnik yang dapat berfungsi majemuk bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala nasional kebudayaan Bali berperan penting dalam membangun dan memperkaya kebudayaan nasional, sedangkan dalam skala internasional kebudayaan Bali juga memiliki peran dalam mengembangkan kebudayaan dunia melalui suatu entitas warisan budaya dunia. Dengan melaksanakan pengelolaan kebudayaan dalam mengelola potensi unggulan daerah, maka akan menjadi modal dasar bagi perkembangan perekonomian daerah. Pengelolaan kebudayaan yang dimaksud dengan melakukan upaya-upaya seperti perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dalam kedudukannya kebudayaan Bali perlu dilestarikan dan dikembangkan secara dinamis dan berkesinambungan. Fungsi ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam upaya pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan Bali dalam lima tahun ke depan menjadikan kebudayaan Bali sebagai hulu yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali. Kebudayaan Bali juga dijadikan basis dari pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, membuktikan kesungguhan Pemerintah Pusat menjadikan kebudayaan sebagai investasi membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan tersebut perlu diberlakukannya sistem perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan bagian penting dalam menunjang keberhasilan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka proses pembangunan daerah setiap tahunnya organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

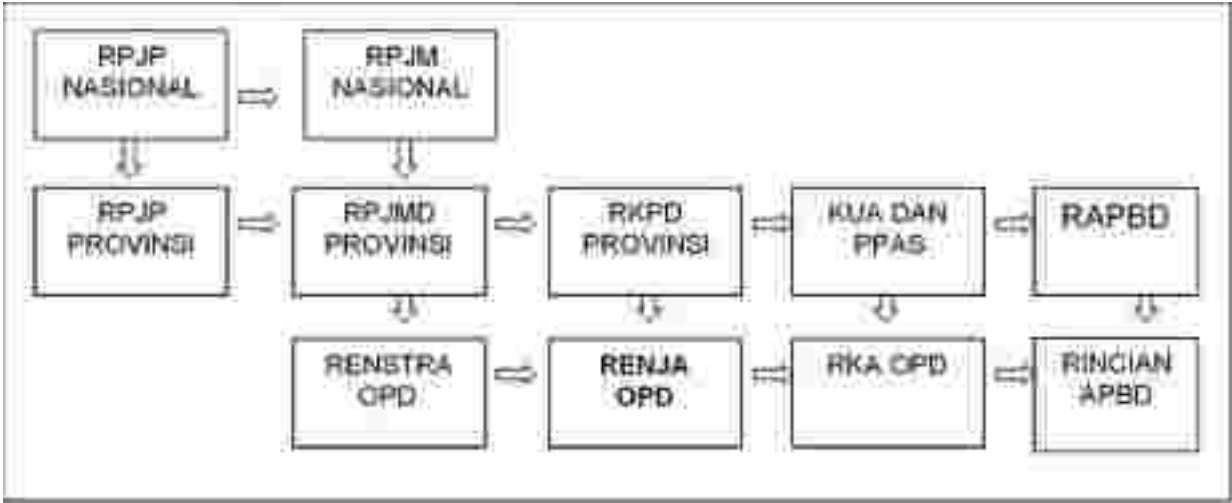
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam penyusunannya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali yang ditindaklanjuti dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Seluruh kegiatan beserta anggarannya selanjutnya dibahas pada Forum Perangkat Daerah. Hasil pembahasan pada Forum Perangkat Daerah kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, sampai pada akhirnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai dokumen tahunan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Renja merupakan dokumen yang secara substansial yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ke dalam program dan kegiatan. Disamping itu renja juga memuat arahan operasional dan acuan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja.

Gambar 1. 1 Proses Renja



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4/2014), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 79);
 17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 yaitu sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2024-2026. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 juga akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2025. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 2025 adalah:

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2025.
- 2) Merancang program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2025.
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun Perubahan 2025 dengan RKPD Perubahan tahun 2025.
- 5) Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 6) Tujuan tersusunnya Renja Perubahan ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Kebudayaan Provinsi Bali dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang maupun UPTD pada lingkup Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang fungsi perencanaan, keterkaitan renja dengan renstra, isi secara ringkas Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Peraturan Perundang - Undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun berjalan hingga Triwulan 2 mengacu pada

APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah berjalan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, maupun terhadap IKK sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD

Pelaksanaan review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berdasarkan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah

provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (jika telah dilaksanakan).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah merupakan cara penyusunan rencana kerja dan pendanaan sesuai dengan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap rencana kerja ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana perangkat daerah, kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam menetapkan rencana kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025, perlu untuk mempersiapkan pendanaan perangkat daerah.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan dalam melaksanakan program kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian, dan juga ketersediaan anggaran dalam pendanaan perangkat daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah, serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input*, *output*, dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Dalam pelaksanaan tercapai tidaknya kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Maka rencana kerja pada tahapan atau anggaran Perubahan tahun 2025, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali selama tahun 2025 yaitu dimulai dari bulan Januari hingga bulan Maret.

Sampai dengan akhir triwulan II atau bulan Juni, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 159.701.415.858,00** dimana anggaran tersebut terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBD serta Anggaran yang merupakan dana DAK.

Penyerapan anggaran belanja langsung setelah akhir triwulan II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 42.894.537.211,00 (19,68%)** dari total anggaran. Adapun realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Realisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 2025 (sampai dengan Triwulan II)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-0) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	DINAS KEBUDAYAAN										
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	66.179.154.733		16.513.093.736		24,95%	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5	52.648.227.592		21.276.847.582		40,41%	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5	815.059.070		108.593.230		13,32%	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5	144.883.000		3.840.000		2,65%	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	0,2	10.747.226.006		212.514.870		1,98%	DINAS KEBUDAYAAN	
					130.534.550.401		38.114.889.418				
	Rata-rata capaian kinerja (%)				0%		0%	38.114.889.418			
	Predikat kinerja										
2	UPTD TAMAN BUDAYA										
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	8.062.106.550		1.310.936.363		16,26%	UPTD TAMAN BUDAYA	
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5	2.687.762.600		183.460.000		6,83%	UPTD TAMAN BUDAYA	
					10.749.869.150		1.494.396.363				
	Rata-rata capaian kinerja (%)				0%		0%	1.494.396.363			
	Predikat kinerja										
3	UPTD MUSEUM BALI										
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	67.495.400.589		1.126.552.696		1,67%	UPTD MUSEUM BALI	
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali dan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75	2.511.307.000		391.591.867		15,59%	UPTD MUSEUM BALI	
					70.006.707.589		1.518.144.563				
	Rata-rata capaian kinerja (%)				0%		0%	1.518.144.563			
	Predikat kinerja										
4	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI										
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	3.663.410.148		1.478.092.346		40,35%	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI	

		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali dan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75	3.059.503.000		289.014.521		9,45%	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
					6.722.913.148		1.767.106.867			
	Rata-rata capaian kinerja (%)				0%		0%	1.767.106.867		
	Predikat kinerja									

2.2 CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai pembantu kepala daerah dalam urusan kebudayaan sangatlah beragam. Adapun beberapa permasalahan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kurangnya pelatihan seni dalam rangka memajukan seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat. Hal ini disebabkan karena; (a) kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan; (b) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (c) belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat
2. Masih kurangnya pendidikan formal Kebudayaan dan Tradisi, dan juga karena masuknya budaya-budaya luar sehingga dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan tertentu labil seperti unsur bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat.
3. Masih terbatasnya kondisi sarana dan prasarana pendukung kebudayaan, seperti kondisi bangunan Museum Bali dan Taman Budaya yang memprihatinkan, termasuk pemanfaatan teknologi dan dukungan peraturan perundangan bidang kebudayaan (UU, PERDA, PERGUB) yang masih kurang. Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan bidang Kebudayaan.

4. Terbatasnya penggalian, revitalisasi, dan restorasi seni tradisi yang sudah punah dan atau hampir punah. Hal tersebut dikarenakan Minimnya apresiasi dan kreativitas karya budaya, rendahnya apresiasi karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya disamping terbatasnya pemahaman masyarakat tentang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual Indonesia) serta terbatasnya akses (kesempatan, sarana, event) yang memadai bagi pengembangan seni dan budaya.
5. Banyaknya sejarah dan warisan budaya yang dicuri (kasus pencurian Pratima), hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan merawat kekayaan sejarah dan warisan budaya Bali serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cagar budaya dan permuseuman. Basis data yang belum jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya.
6. Minimnya informasi dan referensi tentang nilai tradisi budaya dan sejarah serta masih kurangnya peran lembaga tradisional dalam melestarikan kebudayaan daerah Bali.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dirumuskanlah beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pemajuan cagar budaya dan permuseuman
2. Belum maksimalnya penguatan dan pemajuan nilai sejarah dan tradisi
3. Belum maksimalnya penguatan dan pemajuan kesenian
4. Belum maksimalnya pemberdayaan tenaga kebudayaan
5. Belum maksimalnya perlindungan hasil karya budaya Bali
6. Belum maksimalnya penguatan dan pemajuan bahasa, aksara dan sastra
7. Belum maksimalnya sarana dan prasarana penunjang penguatan dan pemajuan kebudayaan
8. Belum maksimalnya peningkatan kualitas UPTD yang ada pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyempurnaan rancangan awal Renja bagi Perangkat Daerah Tahun 2025. Dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, rancangan awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali juga merupakan landasan dalam penyempurnaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang akan memuat program, kegiatan, indikator, target, serta pagu indikatifnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 akan dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 mempunyai kedudukan sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seluruh program/kegiatan yang akan dilaksanakan sepenuhnya adalah untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar utama dan hulu pembangunan Bali. Rancangan program/kegiatan sesuai dengan pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diusulkan terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yang juga terbagi ke masing-masing UPTD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 RENCANA KERJA TAHAP PERUBAHAN

Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai indikator kinerja, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman. Dalam pembuatannya, hanya 5 Program yang saat ini masuk ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, hal ini dikarenakan untuk Program Pengelolaan Permuseuman, masih menunggu informasi dari pusat terkait pendanaan dan pelaksanaan program kegiatannya.

Tentunya dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang sangat strategis tersebut diperlukan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan dan sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 telah dilakukan pemetaan/*mapping* terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Untuk Renja Perubahan tersebut beberapa sub kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan juga mempertimbangkan dana APBD yang tersedia. Adapun Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)		
				SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6				1	11	
		DINAS KEBUDAYAAN					127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
	2	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA N DASAR				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421		
	2.22	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYA AN				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421		
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajeme n Kinerja	82 Poin	82 Poin	75.851.865.867	152.344.200.120	95.646.925.036	94.350.584.133		
	2.22. 1.1. 1		Tertaksan anya perencana an, pengangg aran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	1	225. 3. 6	2 .3 6. 4	15 .4 6. 4	66.426. 2		
	2.22. 1.1. 1 . 1										
			Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	6	6	2 2.52 .26	1 6. 22.34	155.3 2.34	4 .226. 2		
	2.22. 1.1. 1 . 6										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	23.3 4.5	23.3 4.5	4.1 4.5	1 .2 .		

	2.22. 1.1. 2		Terlaksan anya administra si Keuangan perangkat daerah	1	1	21.534.322.46	5 . 1.14 .61	5 . 1.14 .61	3 .436. 2 .15	
	2.22. 1.1. 2 . 1									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	4	2 . 62. 31.66	5 .4 .4 1.111	5 .4 .4 1.111	3 .446.63 .444	
	2.22. 1.1. 2 . 3									
			Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	56 .4 .	55 .6 .5 6	55 .6 .5 6	. 12.2 4	
	2.22. 1.1. 2 . 4									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD	4	4	2. .	2. .	2. .		
	2.22. 1.1. 6		Terlaksan anya administra si umum perangkat daerah	1	1	5.64 .	1. .66 .36	2.146.555.46	1.3 . . 6	
	2.22. 1.1. 6 . 1									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	35	26	2 . 5.5	2 . 5.5	2 . 5.5		
	2.22. 1.1. 6 . 2									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	4	2	32. .	331. 54.66	1.442. 6. 6	1.41 . 6. 6	
	2.22. 1.1. 6 . 4									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	3	3	1 5. .	1 5. .	1 5. .		
	2.22. 1.1. 6 . 5									

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	5.6 .	5.6 .	5.6 .		
	2.22. 1.1. 6 . 6									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan	12	12	22. 15.2	22. 15.2	22. 15.2		
	2.22. 1.1. 6 .									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	6. 5 .	6. 5 .	6. 5 .		
	2.22. 1.1. 6 .									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	5	56.455.	55.4 .	46.24 .	1 .215.	
	2.22. 1.1.		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1	1	.23 .4 .	6.5 4.15 . 26	6. 51.6 5. 2	1.3 . 14.1	
	2.22. 1.1. . 1									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.4 5.	5.4 5.	5.4 5.		
	2.22. 1.1. . 2									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	36	5 . .	2 . .	2 . .	22 . .	
	2.22. 1.1. . 3									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6	2	24. 5 .	24. 5 .	24. 5 .		

			Disediaka n							
	2.22. 1.1. . 4									
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n		12	61 .5 .3	1.1 4.242. 6	1.144.5 .56	526. .26	
	2.22. 1.1.		Tertaksan anya Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	1	1	44. . 33. 6	4.413.2 .1	26.21 . 13. 1	1 . 5 .22 . 43	
	2.22. 1.1. . 1									
			Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya	14	14	22. 5 .	34.2 .46	1. .46	4 . 2 . 6	
	2.22. 1.1. . 6									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	21	14. 5 .	14. 5 .	14. 5 .		
	2.22. 1.1. .									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	3	3	1.16 .41 .	43. 12.	1. 32. .	565.3 3.	
2	2.22.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYA AN	Persentas e Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen	5 Persen	39.641.428.360	48.940.842.892	56.113.859.192	22.608.571.640	
	2.22. 2.1. 1	1	Terkelolan ya Kebudaya an yang Masyarak at Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten /Kota	25	25	2 . 31. 4.14	2 .516.164.616	2 .12 .2 .416	2. 6.414.2 6	

			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
	2.22. 2.1. 1 . 1									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	4	2	3 4. 46.	5 .5 .552	1.4 5.511. 52	1.11 . 64. 2	
	2.22. 2.1. 1 . 2									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2	1	26.64 .13 .16	24. 65.155. 64	24. 45. 24. 64	1. 2.113. 6	
	2.22. 2.1. 2 . 1		Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten /Kota dalam Daerah Provinsi	5	5	12.12 . 66. 2	1 .2 .46 .1 6	16. 5. 3 .6 6	4. . 63. 56	
	2.22. 2.1. 2 . 1									
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	32	32	1 .31 .2 .4	. 4 .5 6.	15.514.6 5.	5.1 .4 .4	
	2.22. 2.1. 2 . 3									
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	23	23	1. . 5 .34	1.34 . 1.2 6	1.3 .344. 6	41 .513.634	

	2.22. 2.1. 3	1	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	1	4 2.4 .4	1 .126.21 .1	1 . .53 .1	.5 . 52.	
	2.22. 2.1. 3 . 3									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	25	15	4 2.4 .4	1 .126.21 .1	1 . .53 .1	.5 . 52.	
3	2.22.03	PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISION AL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen	5 Persen	840.137.740	845.299.070	1.477.712.594	1.104.862.260	
	2.22. 3.1. 1		Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	51	51	4 .13 . 4	45.2 .	1.4 . 12.5 4	63 .5 4. 54	
	2.22. 3.1. 1 . 1									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	111	153	4 6.616.	4 3. 6.	1.12 . 4 .224	643.223.524	
	2.22. 3.1. 1 . 2									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	2	2	353.521. 4	361.312.3	34 . 2.3	5.64 .6	
4	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	5 Persen	5 Persen	185.801.400	185.453.000	144.883.000	39.198.600	

			at Tentang Sejarah dan Tradisi							
	2.22. 4.1. 1		Terlaksan anya Pembinaa n Sejarah Lokal Provinsi	2	2	1 5. 1.4	1 5.453.	144. 3.	4 . 1 .4	
	2.22. 4.1. 1 . 3									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarak at	2	2	1 5. 1.4	1 5.453.	144. 3.	4 . 1 .4	
5	2.22.05	PROGRAM PELESTARI AN DAN PENGELOL AAN CAGAR BUDAYA	Persentas e Cagar Budaya Dan Permuseu man yang Maju	0,2 Persen	0,2 Persen	10.964.649.040	10.859.622.006	747.226.006	-7.589.649.040	
	2.22. 5.1. 1		Terlaksan anya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	5	3	3 5. 33.42	24 . 53.23	216.15 .23	.5 6.1	
	2.22. 5.1. 1 . 2									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5	3	3 5. 33.42	24 . 53.23	216.15 .23	.5 6.1	
	2.22. 5.1. 2		Terlaksan anya Pengelola an Cagar Budaya yang diinventari sasi	33	245	1 .65 . 15.62	1 .61 . 6 . 6	531. 6 . 6	1 .12 . 46. 44	
	2.22. 5.1. 2 . 1									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistras i	1	11	1 .341.1 2. 2	1 .355. 61. 6	2 4.241. 6	1 . 66. 6 . 44	
	2.22. 5.1. 2 . 2									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikemban gkan	4	3	1. .2	5 .3 .	52.1 .	3 . 1.5	
	2.22. 5.1. 2 . 3									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaat kan	6	6	136.121.3	114.1 .3	114.1 .3	22. 14.	
	2.22. 5.1. 2 . 4									

			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatk an Kapasitas nya	2	225	.611.3	.61 .	.61 .	4	
		UPTD TAMAN BUDAYA				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
	2	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA N DASAR				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
	2.22	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYA AN				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajeme n Kinerja	81 Poin	81 Poin	75.851.865.867	152.344.200.120	95.646.925.036	94.350.584.133	
	2.22. 1.1. 6		Terlaksan anya pelayanan administra si umum perangkat daerah pada UPTD Taman Budaya	1	1	5.64 .	1. .66 .36	2.146.555.46	1.3 . . 6	
	2.22. 1.1. 6 . 1									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	1	1	6 . .	6 . .	6 . .	2.	
	2.22. 1.1. 6 . 4									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	3	3	4 . .3	4 . .	4 . .	6	
	2.22. 1.1. 6 . 5									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	2	2	5.5 .	5.5 .	5.5 .		
	2.22. 1.1. 6 . 6									

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan	12	12	.34 .	.34 .	.34 .		
	2.22. 1.1. 6 .									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	24. 4.	24. 4.	24. 4.		
	2.22. 1.1.		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	.64 .	.556.3	2 .334.3	1 .6 6.3	
	2.22. 1.1. . 11									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	2	42.5 .	42.4 .	242.24 .	1 . 4 .	
	2.22. 1.1.		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1	1	.23 .4 .	6.5 4.15 . 26	6. 51.6 5. 2	1.3 . 14.1	
	2.22. 1.1. . 2									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	5.6 .	5.6 .	5.6 .		
	2.22. 1.1. . 3									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		2	15. .	14. 3 .	14. 3 .	.	

			Disediaka n							
	2.22. 1.1. . 4									
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12	12	4. 32.24	1.14 .36 . 5	1.14 .36 . 5	152.635. 1	
	2.22. 1.1.		Tertaksan anya Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	1	1	44. . 33. 6	4.413.2 .1	26.21 . 13. 1	1 . 5 .22 . 43	
	2.22. 1.1. . 1									
			Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya	6	6	65. .	65. .	65. .		
	2.22. 1.1. . 6									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	3	2 . .	1 .4 .	3.51 .4 .	3.4 .4 .	
	2.22. 1.1. .									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	12	12	1.23 . 2 .4	1. 66. 2 . 2	2.12 .42 . 2	.6 .312	
2	2.22.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYA AN	Indeks Kepuasan masyarak at Pada UPTD Taman Budaya	75 Persen	75 Persen	39.641.428.360	48.940.842.892	56.113.859.192	22.608.571.640	
	2.22. 2.1. 1	1	Tertaksan anya Pengelola an Kebudaya an yang Masyarak at Pelakunya Lintas Daerah		2	2 . 31. 4.14	2 .516.164.616	2 .12 .2 .416	2. 6.414.2 6	

			Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memadai							
	2.22. 2.1. 1 . 2									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		2		2.52 . 4.	2.31 .246.6	2.31 .246.6	
	2.22. 2.1. 1 . 3									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara		4		3 .516.	3 .516.	3 .516.	
		UPTD MUSEUM BALI				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	81 Poin	75.851.865.867	152.344.200.120	95.646.925.036,	94.350.584.133	
	2.22. 1.1. 6		Tertaklanya administrasi umum perangkat daerah	1	1	5.64 .	1. .66 .36	2.146.555.46	1.3 . . 6	
	2.22. 1.1. 6 . 1									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	61.51 .5	61.51 .5	61.51 .5		
	2.22. 1.1. 6 . 4									

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	1 5. .	1 5. .	1 5. .		
	2.22. 1.1. 6 . 5									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	4	25.4 2.	25.4 2.	.3 1.	1 .1 1.	
	2.22. 1.1. 6 . 6									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	3	5.4 2.	5.4 2.	5.4 2.		
	2.22. 1.1. 6 .									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	13. 13.	13. 13.	5.1 5.	.53 .	
	2.22. 1.1.		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	.64 .	.556.3	2 .334.3	1 .6 6.3	
	2.22. 1.1. . 1									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4	21.14 .	21. 6.3	21. 6.3	61.	
	2.22. 1.1.		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1	1	.23 .4 .	6.5 4.15 . 26	6. 51.6 5. 2	1.3 . 14.1	
	2.22. 1.1. . 1									

			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	1	1	2.3 6.4	2.3 6.4	2.3 6.4		
	2.22. 1.1. . 2									
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	3	3	2 6. .	2 6. .	2 6. .		
	2.22. 1.1. . 3									
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	5	4	25.2 3.2	1 .264. 4	1 .264. 4	6. .36	
	2.22. 1.1. . 4									
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12	12	1.5 6.155.24	1. 2.64 .136	1. 2.64 .136	5 3.515.1 4	
	2.22. 1.1.		Tertaksan anya Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	1	1	44. . 33. 6	4.413.2 .1	26.21 . 13. 1	1 . 5 .22 . 43	
	2.22. 1.1. . 1									
			Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya	3	3	1 . 5.	1 1.6 .	1 1.6 .	6.1 5.	
	2.22. 1.1. . 6									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	6	34. 4 .	3 . .	3 . .	3.24 .	
	2.22. 1.1. .									

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	41.324.33	.3 . 66. 13	15.6 6.322. 53	25. 1 . . 4	
2	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Museum Bali	75 Persen	75 Persen	0	5.796.891.000	5.570.810.000	7.325.000.000	
	2.22. 6.1. 1		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali		25		5. 6. 1.	5.5 . 1 .	5.5 . 1 .	
	2.22. 6.1. 1 . 1									
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				. 3	.1 .3	.1 .3	
	2.22. 6.1. 1 . 3									
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		1		1.6 .445.4	1.463.3 .4	1.463.3 .4	
	2.22. 6.1. 1 . 4									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		6		16 . 4 .3	16 . 4 .3	16 . 4 .3	
		UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	81 Poin	75.851.865.867	152.344.200.120	95.646.925.036	94.350.584.133	

	2.22. 1.1. 6		Terlaksan anya administra si umum perangkat daerah	1	1	5.64 .	1. .66 .36	2.146.555.46	1.3 . . 6	
	2.22. 1.1. 6 . 1									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	1	1	2 . 5.3	2 . 5.3	2 . 5.3		
	2.22. 1.1. 6 . 2									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	5	5	4 . 21.4	53. 5 .	53. 5 .	3.235.6	
	2.22. 1.1. 6 . 4									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	3	3	51.5 3.1	51.5 3.1	51.5 3.1		
	2.22. 1.1. 6 . 5									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	2	2	6. .4	6. .4	6. .4		
	2.22. 1.1. 6 . 6									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n	3	3	4.44 .	4.44 .	4.44 .		
	2.22. 1.1. 6 .									
			Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	1	.2 .	.2 .		.2 .	

	2.22. 1.1.		Terlaksan anya Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	1	1	.64 .	.556.3	2 .334.3	1 .6 6.3	
	2.22. 1.1. . 1									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n	2	1	35. .	35. .	35. .		
	2.22. 1.1.		Terlaksan anya penyediaa n jasa penunjang urusan Pemerinta han Daerah	1	1	.23 .4 .	6.5 4.15 . 26	6. 51.6 5. 2	1.3 . 14.1	
	2.22. 1.1. . 1									
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	1	1	1.4 1.5	1.4 1.5	1.4 1.5		
	2.22. 1.1. . 2									
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12	12	35 . .	35 . .	35 . .		
	2.22. 1.1. . 3									
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	3	3	42. 3 .	42. 3 .	42. 3 .		
	2.22. 1.1. . 4									
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12	12	2. . 1 .1	46. 52. 24	1.1 4. 52.3	1.6 6. 64.	

	2.22. 1.1.		Terlaksan anya Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	1	1	44. . 33. 6	4.413.2 .1	26.21 . 13. 1	1 . 5 .22 . 43	
	2.22. 1.1. . 1									
			Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya	4	4	144. 45.	123. 5.	123. 5.	2 . .	
	2.22. 1.1. . 6									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	14. .	14. .	14. .		
	2.22. 1.1. . 1									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	1	1	3 . .	2. 2.32 . 24	2. 2.32 . 24	1. 2.32 . 24	
2	2.22.06	PROGRAM PENGELOL AAN PERMUSEU MAN	Indeks Kepuasan masyarak at Pada UPTD Monumen Perjuanga n Rakyat Bali	75 Persen	78,5 Persen	0	5.796.891.000	5.570.810.000	7.325.000.000	
	2.22. 6.1. 1		Terlaksan anya Pengelola an Museum Provinsi yang memadai		51		5. 6. 1.	5.5 . 1 .	5.5 . 1 .	
	2.22. 6.1. 1 . 1									
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindung an, Pengemba ngan, dan Pemanfata an		33		56.26 .2	56.26 .2	56.26 .2	
	2.22. 6.1. 1 . 3									
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarak at		1		2. . 13.2	2. 3 .41 .2	2. 3 .41 .2	

			terhadap Museum							
	2.22. 6.1. 1 . 4									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				264. 32.6	264. 32.6	264. 32.6	
	J U M L A H					127.483.882.407	218.972.308.088	159.701.415.828	32.217.533.421	

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dengan telah disusunnya Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 yang berpedoman dengan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, Adapun hal-hal yang perlu ditetapkan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Dalam Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 memuat rencana kebijakan serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang merupakan penjabaran tahunan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di tahun 2025;
- 2) Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang ada di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
- 3) Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Bali, keberadaan Renja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali diintegrasikan dengan rancangan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (RKA Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali).

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2025 yang telah disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.



PERUBAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI



TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan rancangan perencanaan pembangunan Pariwisata di Provinsi Bali dalam satu tahun. Penyusunan RENJA mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan karena situasi terkini pariwisata Bali serta ketersediaan anggaran pada anggaran kas daerah. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 dapat menjadi acuan resmi dalam menjalankan Program/Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

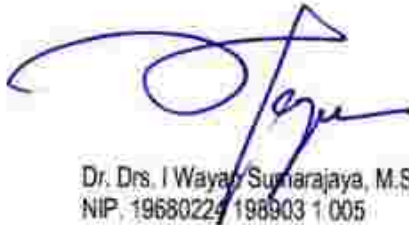
Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 masih belum sempurna, karenanya masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan sinar suci-Nya dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan Pariwisata di Bali

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali



Dr. Drs. I Wayan Sumarajaya, M.Si
NIP. 19680224 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR LAMPIRAN..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Dasar Hukum..... 4

 1.3. Maksud dan Tujuan 7

 1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI PALAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
 (RENJA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN
 2025..... 9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata
 Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II Tahun 2025..... 9

BAB III PERUBAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
 PARIWISATA..... 19

BAB IV PENUTUP..... 20



Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pariwisata Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2025.....10



Lampiran 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun
 berjalan) Provinsi Bali 21

Lampiran 2. Review terhadap Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 31

Lampiran 3. Rumusan Rencana Awal Perubahan Perubahan Rencana Kerja
 (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan wilayah Provinsi Bali tidak bisa dilepaskan dari keinginan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata. Kearifan lokal Bali sebagai daya dukung Pariwisata mewajibkan Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna mendukung Pariwisata. Sebagaimana diamanatkan aturan perundangan, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip *Money follow function* diubah menjadi *Money follow program* serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial.

Perencanaan Pariwisata mengacu pada *Money follow program* maksudnya; walaupun program dan kegiatan dimaksud merupakan tugas pokok dan fungsi, namun kalau bukan merupakan program prioritas, maka tuisi tersebut belum tentu terdani. Pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial maksudnya dalam menyusun Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) setiap perangkat daerah hendaknya menyeluruh, terpadu, dengan tema tertentu dan berdasarkan kewilayahan.

Tema pariwisata dalam Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat mendukung upaya Provinsi Bali dalam meningkatkan PAD. Masing-masing perangkat daerah diharapkan memiliki peran dan kontribusi dalam meningkatkan PAD. Terkait dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan PAD melalui, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang.

Isu utama pembangunan Bali saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Bali bagian Selatan dengan Bali Utara, Timur dan Barat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis, dan kualitas infrastruktur yang belum merata dan memadai, namun memiliki wilayah dan potensi sumber daya alam dan pengembangan yang belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah provinsi difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan

wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki berbagai potensi/keunggulan dalam menunjang PAD yang ditopang keberlanjutan Pariwisata. Untuk meningkatkan PAD dari sektor Pariwisata Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya, seperti :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

➤ **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - a. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- a. Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
- b. Kesiediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata

➤ **Program Pemasaran Pariwisata**

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - c. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

➤ **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - a. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

➤ **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - a. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
 - b. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
 - c. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD akan menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian Perubahan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah harus mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali dimaksud seperti perubahan target kinerja beberapa kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya.

Penyampaian Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1641 Tahun 2025 tentang Penyampaian Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai Pedoman Penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

- Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 8) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor Tahun 2022 tentang cipta kerja.
 - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 17) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2024
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 27) Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali;

- 28) Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
- 29) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
- 30) Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan.

Sebagai Dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 untuk periode satu tahun memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, baik itu dalam bentuk kerangka regulasi maupun dalam bentuk kerangka anggaran. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai patokan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Perangkat Daerah (PD) sehingga setiap kegiatan Perangkat Daerah menjadi jelas dan terarah, serta pencapaian sasaran dapat terukur, baik dari segi sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana. Dengan terukurnya outcome (hasil) dari kegiatan Perangkat Daerah mencerminkan kinerja suatu Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2025 bertujuan:

- a. Penyelarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi Perangkat Daerah.
- b. Mempertajam indikator dan target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi Perangkat Daerah.
- c. Penyesuaian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025

Sistematika Penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja), hubungan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Pariwisata Provinsi Bali, kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Bali. Sistematika Penulisan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI TRIWULAN II –TAHUN 2025

BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Berjalan berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2) Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

Bab III. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah diuraikan tentang perubahan Perubahan Rencana Kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PENUTUP

Bab IV Penutup, Pada bab ini diuraikan antara lain: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali sampai dengan triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Pada tahun 2025 Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Urusan Pariwisata melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II akan diuraikan secara detail berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi
Bali Triwulan II Tahun 2025

N O	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCAN A BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESE RAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENI NG BELANJ A	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARG ET	REALIS ASI	DEVI ASI	TARG ET	REALIS ASI	DEVI ASI	TARG ET	REALIS ASI	DEVI ASI	TARG ET	REALIS ASI	DEVI ASI	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
				(AK)/REALI SASI SD BLN INI	(C / ΣPAGU KEGIAT AN)	(=Z)	(ISI MANU AL PPTK)	(H-G)	(F x G)	(F xH)	(K-J)	(=G)	(F/DX1 00)	(N-M)	(FXM)	(FXN)	(Q-P)	(C-E)
1	3.26.01.1.01.000 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.996.812 ,00		57.173.115, 00	0,54%	62,94	51,61	(11,3 3)	0,34	0,28	(0,06)	62,94	46,48	(16,4 6)	0,34	0,25	(0,09)	65.823.697, 00
2	3.26.01.1.02.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.168.970. 608,00		5.616.911.1 49,00	57,38%	71,29	70,87	(0,42)	40,91	40,67	(0,24)	71,29	42,65	(28,6 4)	40,91	24,47	(16,4 3)	7.552.059.4 59,00
3	3.26.01.1.06.000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	7.216.600,0 0		5.346.000,0 0	0,03%	100,0 0	100,00	-	0,03	0,03	-	100,0 0	74,08	(25,9 2)	0,03	0,02	(0,01)	1.870.600,0 0

4	3.26.01.1.06.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.697.960 ,00		9.470.000,0 0	1,43%	99,58	21,17	(78,4 0)	1,42	0,30	(1,12)	99,58	2,89	(96,6 9)	1,42	0,04	(1,38)	318.227.960 ,00
5	3.26.01.1.06.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.617.494, 00		45.662.400, 00	0,30%	74,61	74,61	0,00	0,23	0,23	0,00	74,61	65,59	(9,02)	0,23	0,20	(0,03)	23.955.094, 00
6	3.26.01.1.06.000 5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.882.600,0 0		4.279.850,0 0	0,04%	70,91	70,91	0,00	0,03	0,03	0,00	70,91	43,31	(27,6 0)	0,03	0,02	(0,01)	5.602.750,0 0
7	3.26.01.1.06.000 9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.627.000, 00		17.420.700, 00	0,41%	63,83	63,84	0,00	0,26	0,26	0,00	63,83	18,61	(45,2 3)	0,26	0,08	(0,18)	76.206.300, 00
8	3.26.01.1.08.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	182.008.200 ,00		57.294.718, 00	0,79%	50,22	50,22	(0,00)	0,40	0,40	(0,00)	50,22	31,48	(18,7 4)	0,40	0,25	(0,15)	124.713.482 ,00
9	3.26.01.1.08.000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.312.719.8 80,00		563.677.26 5,00	5,72%	49,18	49,18	0,00	2,81	2,81	0,00	49,18	42,94	(6,24)	2,81	2,46	(0,36)	749.042.615 ,00
10	3.26.01.1.09.000 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	551.217.000 ,00		420.123.40 0,00	2,40%	86,88	79,85	(7,04)	2,09	1,92	(0,17)	86,88	76,22	(10,6 7)	2,09	1,83	(0,26)	131.093.600 ,00

	Operasional/Lapangan																	
1 1	3.26.01.1.09.001 0 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	313.400.000 ,00		-	1,37%	97,86	2,14	(95,7 2)	1,34	0,03	(1,31)	97,86	-	(97,8 6)	1,34	-	(1,34)	313.400.000 ,00
1 2	3.26.02.1.01.000 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	348.735.516 ,00		157.263.97 5,00	1,52%	54,60	57,45	2,85	0,83	0,87	0,04	54,60	45,10	(9,50)	0,83	0,69	(0,14)	191.471.541 ,00
1 3	3.26.02.1.03.000 7 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	149.195.900 ,00		34.114.250, 00	0,65%	46,46	42,57	(3,89)	0,30	0,28	(0,03)	46,46	22,87	(23,6 0)	0,30	0,15	(0,15)	115.081.650 ,00
1 4	3.26.02.1.04.000 9 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berkas Resiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Resiko Menengah Tinggi)	71.872.510, 00		31.121.495, 00	0,31%	65,85	55,38	(10,4 7)	0,21	0,17	(0,03)	65,85	43,30	(22,5 5)	0,21	0,14	(0,07)	40.751.015, 00

15	3.26.02.1.04.001 3 Kediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	193.716.230 ,00		77.843.115, 00	0,84%	55,35	55,73	0,38	0,47	0,47	0,00	55,35	40,18	(15,1 6)	0,47	0,34	(0,13)	115.873.115 ,00
16	3.26.03.1.01.000 1 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	276.946.020 ,00		46.195.410, 00	1,21%	70,00	29,54	(40,4 6)	0,84	0,36	(0,49)	70,00	16,68	(53,3 2)	0,84	0,20	(0,64)	230.750.610 ,00
17	3.26.03.1.01.000 5 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	322.393.804 ,00		83.734.570, 00	1,40%	34,55	29,76	(4,79)	0,49	0,42	(0,07)	34,55	25,97	(8,58)	0,49	0,36	(0,12)	238.659.234 ,00
18	3.26.03.1.01.000 6 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4.392.901.3 12,00		540.510.02 5,00	19,14%	98,72	50,38	(48,3 4)	18,90	9,64	(9,25)	98,72	12,30	(86,4 1)	18,90	2,36	(16,5 4)	3.852.391.2 87,00
19	3.26.04.1.01.000 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	97.601.384, 00		46.195.410, 00	0,43%	59,97	59,97	(0,00)	0,26	0,26	(0,00)	59,97	47,33	(12,6 4)	0,26	0,20	(0,05)	51.405.974, 00
20	3.26.04.1.02.001 7 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	42.486.700, 00		36.684.570, 00	0,19%	100,0 0	96,83	(3,17)	0,19	0,18	(0,01)	100,0 0	86,34	(13,6 6)	0,19	0,16	(0,03)	5.802.130,0 0

2 1	3.26.05.1.01.000 4 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	267.634.092 ,00		28.928.625, 00	1,17%	90,43	15,26	(75,1 7)	1,05	0,18	(0,88)	90,43	10,81	(79,6 2)	1,05	0,13	(0,93)	238.705.467 ,00
2 2	3.26.05.1.01.001 4 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	250.391.504 ,00		88.165.030, 00	1,09%	63,10	50,75	(12,3 4)	0,69	0,55	(0,13)	63,10	35,21	(27,8 9)	0,69	0,38	(0,30)	162.226.474 ,00
2 3	3.26.05.1.01.001 7 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	376.925.102 ,00		71.902.540, 00	1,64%	36,07	33,00	(3,07)	0,59	0,54	(0,05)	36,07	19,08	(16,9 9)	0,59	0,31	(0,28)	305.022.562 ,00
	JUMLAH	22.950.154. 228,00	-	8.040.017.6 12,00	100,00 %	74,66	60,87	(13,7 8)	74,66	60,87	(13,7 8)	74,66	35,03	(39,6 2)	74,66	35,03	(39,6 2)	14.910.136. 616,00

Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali sampai Triwulan II Tahun 2025 adalah;

a. Realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 23 Sub Kegiatan, yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- a. Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
 - b. Kesiediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
 - 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - c. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
 - 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - a. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - a. Fasilitas Sertifikat Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
 - b. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
 - c. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- b. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan**

Untuk Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang ditentukan yaitu dikarenakan rencana kegiatan dan anggaran kasnya dilakukan pada semester II Tahun 2025 sehingga di semester I kelihatan belum mencapai target.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

Untuk Tahun Anggaran 2025, program/kegiatan sudah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang disusun, namun dalam pelaksanaannya capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut terutama faktor belum tercapainya target kinerja yang ditentukan yaitu akan dilakukan semaksimal mungkin pada semester II Tahun 2025 sesuai dengan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan pada semester II sesuai rencana anggaran kas

BAB III

PERUBAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

Penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2025 diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja), misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2025, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di renja, atau program, kegiatan dan, sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pariwisata berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan, antara lain Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik jenis program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Adapun Perubahan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata terlampir dalam lampiran 3.

BAB IV PENUTUP

1) Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai

Penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan RPD Tahun 2024

- 2026 Apabila di dalam pelaksanaan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tersebut terjadi keterbatasan dana atau efisiensi anggaran, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.

2) Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, maka sudah disesuaikan dengan landasan dan dasar hukum yang berlaku. Substansi Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali disusun terukur berdasarkan tata laksana arah kebijakan dalam Perubahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

3) Rencana Tindak Lanjut

Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan kegiatan kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun disesuaikan dengan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan didasarkan pada Dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Kami berharap, bahwa Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPD untuk urusan pariwisata dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman.

Demikianlah Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 disusun, semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025. Terima kasi

Lampiran 1

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
															(%)		
1	2	3	4	5	6		7		8		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PARIWISATA																	
DINAS PARIWISATA																	
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali																
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen	85	16.159.354 .154,00	0	3.084.518. 810,00	85	16.159.354 .154,00	0	3.084.518. 810,00		3.084.518. 810,00		19 %	DINAS PARIWI SATA

			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kinerja DISPAR													
		3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			11	22.533.246,00	23	122.996.812,00	11	22.533.246,00					DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7	22.533.246,00	7	122.996.812,00	7	22.533.246,00					DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan			17	2.357.833.477,00	86	13.168.970.608,00	17	2.357.833.477,00					DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			49	2.357.833.477,00	77	13.168.970.608,00	49	2.357.833.477,00					DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	31.898.750,00	6	508.041.654,00	0	31.898.750,00					DINAS PARIWISATA
		3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			0	5.346.000,00	1	7.216.600,00	0	5.346.000,00					DINAS PARIWISATA

				Kantor yang Disediakan													
		3.26.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	1.000.000,00	4	327.697.960,00	0	1.000.000,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0	6.456.200,00	3	69.617.494,00	0	6.456.200,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	4.279.850,00	1	9.882.600,00	1	4.279.850,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.01.1.0 6.0009	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	14.816.700,00	3	93.627.000,00	0	14.816.700,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan			0	268.387.137,00	3	1.494.728.080,00	0	268.387.137,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				32.116.231,00	1	182.008.200,00		32.116.231,00					DINAS PARIWI SATA

		3.26.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				236.270.9 06,00	8	1.312.719. 880,00		236.270.9 06,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			0	403.866.2 00,00	3	864.617.00 0,00	0	403.866.2 00,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				403.866.2 00,00	9	551.217.00 0,00		403.866.2 00,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				0,00	20	313.400.00 0,00		0,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	16, 67	4.992.241. 136,00		81.867.98 8,00	16,6 7	4.992.241. 136,00		81.867.98 8,00		81.867.98 8,00		2%	DINAS PARIWI SATA

		3.26.03.1.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Pariwisata			5	81.867.98 8,00	23	4.992.241. 136,00	5	81.867.98 8,00				DINAS PARIWI SATA
		3.26.03.1.0 1.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			0	26.662.16 4,00	1	276.946.02 0,00	0	26.662.16 4,00				DINAS PARIWI SATA
		3.26.03.1.0 1.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembanga n Pemasaran Pariwisata			0	30.244.32 8,00	1	322.393.80 4,00	0	30.244.32 8,00				DINAS PARIWI SATA
		3.26.03.1.0 1.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			0	24.961.49 6,00	1	4.392.901. 312,00	0	24.961.49 6,00				DINAS PARIWI SATA
2	(tidak ada sasaran)															
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Persentase Destinasi Pariwisata	14	763.520.15 6,00		101.055.6 92,00	14	763.520.15 6,00		101.055.6 92,00		101.055.6 92,00	13 %	DINAS PARIWI SATA

			DESTINASI PARIWISATA	yang berkualitas dan Berdaya Saing													
		3.26.02.1.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya saing			0	58.637.57 4,00	90	348.735.51 6,00	0	58.637.57 4,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.02.1.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			0	58.637.57 4,00	1	348.735.51 6,00	0	58.637.57 4,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.02.1.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 laporan			0	0,00	1	149.195.90 0,00	0	0,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.02.1.0 3.0002	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			5	0,00	10	149.195.90 0,00	5	0,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.02.1.0 4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar			1 2	42.418.11 8,00	30	265.588.74 0,00	12	42.418.11 8,00					DINAS PARIWI SATA

		3.26.02.1.0 4.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tingkat Menengah Tinggi			1 2	13.974.87 2,00	10	71.872.510 ,00	12	13.974.87 2,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.02.1.0 4.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha			2	28.443.24 6,00	9	193.716.23 0,00	2	28.443.24 6,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3	140.088.08 4,00	1	40.636.73 4,00	3	140.088.08 4,00	1	40.636.73 4,00	40.636.73 4,00		29 %		DINAS PARIWI SATA
		3.26.04.1.0 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			4	15.142.16 4,00	9	97.601.384 ,00	4	15.142.16 4,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.04.1.0 1.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan			8	15.142.16 4,00	24	97.601.384 ,00	8	15.142.16 4,00					DINAS PARIWI SATA

				Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula													
		3.26.04.1.0 2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembang an Ekosistem Ekonomi Kreatif			1	25.494.57 0,00	1	42.486.700 ,00	1	25.494.57 0,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.04.1.0 2.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembang an Ekonomi Kreatif Daerah			1	25.494.57 0,00	1	42.486.700 ,00	1	25.494.57 0,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	47	894.950.69 8,00	0	79.587.83 4,00	47	894.950.69 8,00	0	79.587.83 4,00		79.587.83 4,00		9%	DINAS PARIWI SATA
		3.26.05.1.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataa n			0	79.587.83 4,00	235	894.950.69 8,00	0	79.587.83 4,00					DINAS PARIWI SATA
		3.26.05.1.0 1.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Orang yang Mengikuti			0	11.138.25 2,00	95	267.634.09 2,00	0	11.138.25 2,00					DINAS PARIWI SATA

			bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata													
		3.26.05.1.0 1.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			0	43.427.32 8,00	220	250.391.50 4,00	0	43.427.32 8,00					DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.0 1.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			0	25.022.25 4,00	20	376.925.10 2,00	0	25.022.25 4,00					DINAS PARIWISATA
Rata-rata capaian kinerja (%)									13.3 2%	3.387.667. 058,00	13.3 2%	3.387.667. 058,00					

Lampiran 2

Tabel 2.3
Review terhadap Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025

[illegible]

Lampiran 3.

Tabel 3.1

Rumusan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pariwisata						22.441.808.866,00	24.438.350.368,00	23.772.668.250,00						23.598.881.557,00			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						22.441.808.866,00	24.438.350.368,00	23.772.668.250,00						23.598.881.557,00			
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						22.441.808.866,00	24.438.350.368,00	23.772.668.250,00						23.598.881.557,00			
1	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG	Nilai Evaluasi Manajeme				85 Persen	85 Persen	14.355.008.902,00	16.245.740.294,00	16.981.868.176,00							15.072.759.346,00	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	125.118.104,00	122.996.812,00	122.996.812,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumatera Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMK M dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital ; serta Pariwisata		131.374.009,00	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.		Adminis trasi Keuanga n Perangk at Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	-			80 Dokumen	86 Dokumen	11.862.914.778,00	13.168.970.608,00	13.168.970.608,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perika	-	12.456.060.516,00	DINAS PARIWISATA

															Denp asar Timu r, Sume rta Kelod			n; UMK M dan Koper asi; Ekono mi Kreatif dan Digital ; serta Pariwi sata					
	3	2	0	1.		Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	Jumlah pelaksanaa n Administras i Umum Perangkat Daerah	-			6 Jenis	6 Jenis	589.429. 300,00	594.427. 794,00	594.427. 794,00			-	Ekono mi Kerthi Bali: Pertan ian, Kelaut an dan Perika nan; Perind ustria n dan Perda ganga n; UMK M dan Koper asi; Ekono mi Kreatif dan Digital	-		618.900. 765,00	DINA S PARI WISA TA

																	Pariwisata					
	3	26	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	327.201.700,00	327.714.100,00	356.550.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumatera Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital ; serta			343.561.785,00	DINAS PARIWISATA

																	Pariwisata					
	3	2	0	1.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
		6	1	0	0																	
				6	5																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.924.000,00	9.882.600,00	9.882.600,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMK M dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital ; serta			10.420.200,00	DINAS PARIWISATA

																	Pariwisata					
	3	26	01	106	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	177.587.000,00	179.997.000,00	93.627.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumatera Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital ; serta			186.466.350,00	DINAS PARIWISATA

																		Pariwi sata					
	3	2	0	1.		Penyedi	Jumlah jasa	-			3 Jenis	3 Jenis	1.207.92	1.494.72	1.494.72			-	Ekono	-		1.268.32	DINA
		6	1	0		aan Jasa	penunjang						9.720,00	8.080,00	8.080,00				mi			6.206,00	S
				8		Penunja	urusan												Kerthi				PARI
						ng	Pemerintah												Bali:				WISA
						Urusan	Daerah												Pertan				TA
						Pemerin	yang												ian,				
						tahan	disediakan												Kelaut				
						Daerah													an				
																			dan				
																			Perika				
																			nan;				
																			Perind				
																			ustria				
																			n dan				
																			Perda				
																			ganga				
																			n;				
																			UMK				
																			M dan				
																			Koper				
																			asi;				
																			Ekono				
																			mi				
																			Kreatif				
																			dan				
																			Digital				
																			; serta				
																			Pariwi				
																			sata				

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Lapora n	8 Lapora n	1.025.92 1.520,00	1.312.71 9.880,00	1.938.37 3.228,00	Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kota Denp asar, Denp asar Timu r, Sume rta Kelod	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	Ekono mi Kerthi Bali: Pertan ian, Kelaut an dan Perika nan; Perind ustria n dan Perda ganga n; UMK M dan Koper asi; Ekono mi Kreatif dan Digital ; serta Pariwi sata				1.077.21 7.596,00	DINA S PARI WISA TA
	3	2 6	0 1	1. 0 9		Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang dipelihara	-			3 Jenis	3 Jenis	569.617. 000,00	864.617. 000,00	864.617. 000,00			-	Ekono mi Kerthi Bali: Pertan ian, Kelaut an dan Perika	-			598.097. 850,00	DINA S PARI WISA TA

						tahan Daerah											nan; Perindustrian dan Perdagangan; UMK M dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital ; serta Pariwisata				
	3	2	0	1.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		6	1	0	0																

															rta Kelod			mi Kreatif dan Digital ; serta Pariwi sata						
2	3	2 6	0 2			PROGRA M PENING KATAN DAYA TARIK DESTINA SI PARIWIS ATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing				14 Persent ase	14 Persent ase	1.077.39 2.788,00	1.051.52 0.156,00	763.520. 156,00							1.166.24 5.197,00		
	3	2 6	0 2	1. 0 1		Pengelol aan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang berdaya saing	-			90 DTW	90 DTW	401.289. 780,00	391.935. 516,00	391.935. 516,00			-	Ekono mi Kerthi Bali: Pertan ian, Kelaut an dan Perika nan; Perind ustria n dan Perda ganga n; UMK M dan Koper asi;	-			421.353. 849,00	DINA S PARI WISA TA

	3	2	0	1.	0	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																
		6	2	0 2	0 0 1					1 Dokum en	1 Dokum en	0,00	0,00	0,00	Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	Ekono mi Kerthi Bali: Pertan ian, Kelaut an dan Perika nan; Perind ustria n dan Perda ganga n; UMK M dan Koper asi; Ekono mi Kreatif dan Digital ; serta Pariwi sata			34.983.1 90,00	DINA S PARI WISA TA

							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Lokasi	10 Lokasi	278.795.900,00	278.795.900,00	149.195.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pungutan bagi Wisatawan Asing	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMK M dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital ; serta Pariwisata			292.735.695,00	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar	-			30 Usaha	30 Usaha	397.307.108,00	380.788.740,00	380.788.740,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perika	-		417.172.463,00	DINAS PARIWISATA

						dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												nan; Perind ustria n dan Perda ganga n; UMK M dan Koper asi; Ekono mi Kreatif dan Digital ; serta Pariwi sata					
	3	2 6	0 2	1. 0 4	0 0 9	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)																	
							Jumlah Industri/Us aha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperole h Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	104.810. 688,00	100.672. 510,00	71.872.5 10,00	Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	Ekono mi Kerthi Bali: Pertan ian, Kelaut an dan Perika nan; Perind ustria n dan Perda ganga			110.051. 222,00	DINA S PARI WISA TA

																	Digital ; serta Pariwi sata						
	3	2	0	1.	0	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																	
		6	3	0 1	0 0 1		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokum en	1 Dokum en	213.797. 480,00	305.544. 020,00	276.946. 020,00	Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Pungu tan bagi Wisat awan Asing PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	Ekono mi Kerthi Bali: Pertan ian, Kelaut an dan Perika nan; Perind ustria n dan Perda ganga n; UMK M dan Koper asi; Ekono mi Kreatif dan Digital ; serta			224.487. 254,00	DINA S PARI WISA TA

																		Pariwisata					
4	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				3 Persentase	3 Persentase	150.100.836,00	157.368.084,00	140.088.084,00						157.605.877,00		
	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-			9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	107.614.136,00	114.881.384,00	114.881.384,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan;	-		112.994.842,00	DINAS PARIWISATA

[illegible]

																		UMK M dan Koper asi; Ekono mi Kreatif dan Digital ; serta Pariwi sata					
	3	2 6	0 4	1. 0 2		Pengem bangan Ekosiste m Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengemban gan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-			1 Dokum en	1 Dokum en	42.486.7 00,00	42.486.7 00,00	42.486.7 00,00			-	Ekono mi Kerthi Bali: Pertan ian, Kelaut an dan Perika nan; Perind ustria n dan Perda ganga n; UMK M dan Koper asi; Ekono mi Kreatif dan Digital ; serta	-		44.611.0 35,00	DINA S PARI WISA TA

																	Pariwisata						
	3	2	0	1.	0	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah																	
		6	4	0	0		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	42.486.700,00	42.486.700,00	42.486.700,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMK M dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital ; serta			44.611.035,00	DINAS PARIWISATA

																		Pariwisata					
5	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan				47 Persentase	47 Persentase	921.098.880,00	1.063.121.698,00	894.950.698,00						967.153.404,00		
	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	-			235 Orang	235 Orang	921.098.880,00	1.063.121.698,00	1.063.121.698,00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMK	-		967.153.404,00	DINAS PARIWISATA

[illegible]

																		Pariwi sata					
	J U M L A H												22.441.8 08.866,0 0	24.438.3 50.368,0 0	23.772.6 68.250,0 0							23.598.8 81.557,0 0	



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025

DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI BALI



KATA PENGANTAR

"Om Swastyastu"

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah dan bimbingan-Nya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dapat merampungkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025, yang mengacu kepada dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

Dalam pengelolaan pemerintahan, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 akan menjadi pedoman dan sebagai pegangan oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam pelaksanaan di lapangan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Diucapkan terima kasih atas peran serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025.

"Om Santih, Santih, Santih Om."

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali



Ir. Ida Bagus Setiawan, ST., M.Si
Pemerintah Muda (IV/c)
NIP. 19710420 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	14
2.3 Analisis Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	22
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI.....	36
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
BAB V PENUTUP	47

LAMPIRAN

- Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor 417 Tahun 2024, Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025.
- Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dan Pencapaian Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali s/d Tahun 2024.
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan bidang yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian di Provinsi Bali. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi secara kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai tenaga kerja yang andal untuk menjalankan proses produksi barang dan/atau jasa. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak–hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja krama Bali dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Mengingat penguatan ekosistem ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi Provinsi Bali, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali diharapkan mampu mewujudkan pembangunan serta penguatan ekosistem di bidang ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral sesuai kewenangannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang matang dengan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses perencanaan pembangunan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mengacu kepada dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2025 ini disusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dengan disusunnya RPJMD Periode Tahun 2025-2029 ini maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap RKPD tahun 2025 untuk memastikan arahan perencanaan pembangunan dan penganggaran telah sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang saat ini tengah disusun.

perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *topdown* dan *bottom-up*. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 - 11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
 - 12) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);

- 13) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
- 14) Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);
- 15) Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 45);
- 16) Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 12);
- 17) Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Bali Tahun 2021 Nomor 38);
- 18) Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);
- 19) Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Rohaniawan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 6);
- 20) Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025;
- 21) Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 22) Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk menguraikan dan menjabarkan Renstra

Perangkat Daerah dalam periode satu tahun, serta memberikan gambaran perencanaan program/kegiatan tahunan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali secara resmi. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dalam pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Merupakan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan, Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk sebesar Rp. 34.492.520.172.. Setelah melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 35.571.022.919,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi : Rp. 34.304.649.119,00
- Belanja Modal : Rp. 1.266.373.800,00

Penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama atau merupakan tahun awal dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyerapan anggaran belanja setelah perubahan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024 sebesar Rp. 33.345.057.127,00 atau 93,74% dari total anggaran belanja yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 35.571.022.919,00. Realisasi capaian kinerja juga ditentukan oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah sesuai target, bahkan meningkatkannya, dan juga capaian yang tidak sesuai target, diperlukan berbagai langkah inovatif, serta kerja sama dengan pihak - pihak terkait, bersinergi dengan lembaga terkait, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali, serta UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali, pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Daerah: **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan** (Prioritas 3) melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, dengan realisasi capaian sebagai berikut:

2.1.1. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 44.997.600,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Daya Saing Manusia dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja. Indikator kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi dengan target sebesar 30%. Realisasi capaian kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 33,6%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 44.836.900,00 (99,64%).

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 169.431.000,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja. Indikator kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja adalah Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dengan target sebesar 30%. Realisasi capaian kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar 117%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 160.462.160,00 (94,71%).

3) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Hubungan Industrial dengan anggaran sebesar Rp. 33.141.400,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Daya Saing Manusia dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja. Indikator kinerja Program Hubungan Industrial adalah Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan target sebesar 10,44%. Realisasi capaian kinerja Program Hubungan Industrial sebesar 14,35%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.896.040,00 (99,26%).

4) Program Hubungan Industrial

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 20.300.000,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Daya Saing Manusia dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja. Indikator kinerja Program Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Persentase Perusahaan yang Patuh Terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program Pengawasan Ketenagakerjaan sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.954.000,00 (98,30%).

5) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00, bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya penggunaan energi bersih, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali. Indikator kinerja Program Pengelolaan Aspek Kegeologian adalah Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan, dengan target sebesar 62,50%. Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Aspek Kegeologian sebesar 66,59%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.834.330,00 (97,93%).

6) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00, bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya penggunaan energi bersih, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali. Indikator kinerja Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan, dengan target sebesar 58,00%. Realisasi capaian kinerja Pengelolaan Mineral

dan Batubara sebesar 58,00%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.759.000,00 (96,99%).

7) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan anggaran sebesar Rp. 174.499.500,00, bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya penggunaan energi bersih, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali. Indikator kinerja Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan adalah Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, dengan target sebesar 70 MW. Realisasi capaian kinerja Program Pengelolaan Energi Terbarukan sebesar 21,73 MW, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 150.436.863,00 (86,21%).

8) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp24.884.800,00, bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Indikator kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah persentase kesepakatan penempatan transmigran yang sesuai ketentuan KSAD dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.400.910,00 (90,02%).

9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 32.117.378.678,00 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 86,80. Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Provinsi sebesar 85,31 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.168.752.926,00 (93,93%).

2.1.2. UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 695.618.165,00, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 86,80. Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 85,31 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 664.460.973,00 (95,52%).

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 336.350.000,00 terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Daya Saing Manusia dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja. Indikator kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, dengan target sebesar 70%. Realisasi capaian kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 95,22%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 325.631.250,00 (96,81%).

2.1.3. UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 307.347.088,00 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai

Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 83. Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 85,16 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 240.043.988,00 (78,10%).

2) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.379.944.000,00, bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Daya Saing Manusia dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali, serta Sasaran Strategis Perangkat Daerah; Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja. Indikator kinerja Program Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Persentase Perusahaan yang Menerapkan Pengujian K3 dengan target 100%. Realisasi capaian kinerja Program Pengawasan Ketenagakerjaan sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.235.457.000,00 (89,53%).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dan Pencapaian Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali s/d Tahun 2024 tertuang pada Tabel 2.1 terlampir

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk sebesar Rp. 43.428.115.058,00. Setelah melalui mekanisme pergeseran APBD Tahap I Tahun 2025 menjadi Rp. 43.100.750.646,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi : Rp. 42.956.686.646,00
- Belanja Modal : Rp. 144.064.000,00

Penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025, penyerapan anggaran belanja setelah pergeseran APBD tahap I pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025

sebesar Rp. 7.431.234.711,00 atau 17.24% dari total anggaran belanja yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 43.100.750.646,00.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali, serta UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali, pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Daerah: **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan** (Prioritas 3) melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, dengan realisasi capaian sebagai berikut:

2.2.1. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 30.997.600,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali. Indikator kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi dengan target sebesar 34 persen. Realisasi Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 anggaran sebesar Rp 450.000,00 (1,45%).

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 99.137.100,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, dan Meningkatnya Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri. Indikator kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja adalah Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dengan target sebesar 34 persen. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 2.273.180,00 (2,29%).

3) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 20.300.000,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Indikator kinerja Program Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos dengan target sebesar 100 persen. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi.

4) Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial dengan anggaran sebesar Rp. 6.831.921.000,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Indikator kinerja Program Hubungan Industrial adalah Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan target sebesar 11,97 persen. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 4.500.000,00 (0,07%).

5) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan anggaran sebesar Rp. 4.160.000,00, bertujuan untuk mendukung Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan. Indikator kinerja Program Pengelolaan Aspek Kegeologian adalah Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan, dengan target sebesar 65,00 persen. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi.

6) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan anggaran sebesar Rp. 10.100.000,00 bertujuan untuk mendukung Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan. Indikator kinerja Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan dengan target sebesar 61 persen. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi.

7) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan anggaran sebesar Rp. 51.825.500,00, bertujuan untuk mendukung Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan. Indikator kinerja Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan adalah Peningkatan Pemanfaatan Energi

Baru Terbarukan dengan target sebesar 75 MW. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 6.720.000,00 (12,97%).

8) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 24.884.800,00, bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, dan Meningkatnya Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri (Sasaran pada Misi 8). Indikator kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah persentase kesepakatan penempatan transmigran yang sesuai ketentuan KSAD dengan target sebesar 100 persen. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi.

9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 34.137.906.437,00 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 86,62. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 7.213.237.264,00 (21,13%).

2.2.2. UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 672.916.461,00, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 86,62. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 132.978.932,00 (19,76%).

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 250.590.000,00 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja. Indikator kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, dengan target sebesar 75 persen. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 2.880.000,00 (1,15%).

2.2.3. UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 559.761.698,00 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 86,62. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 68.195.335,00 (12,18%).

2) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 406.250.050,00, bertujuan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Daerah; Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Indikator kinerja Program Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Persentase perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja dengan target 100%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebagai berikut:

Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi (Rp.)
		Induk (Rp.)	Pergeseran (Rp.)	
1	2	3	4	5
	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	41.517.225.437	41.211.232.437	7.227.180.444
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.261.852.437	34.137.906.437	7.231.237.264
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.920.989.502	30.917.389.502	6.390.655.237
2 07 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.920.989.502	30.917.389.502	6.390.655.237
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.199.294	201.853.294	17.772.220
2 07 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.992.900	14.992.900	0
07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.179.800	41.179.800	0
2 07 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.133.994	65.133.994	5.665.000
2 07 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.124.600	15.124.600	1.647.120
2 07 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.614.000	8.614.000	1.392.400
2 07 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.050.000	10.050.000	1.050.000
2 07 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.104.000	46.758.000	8.017.700
2 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.064.000	116.064.000	0
2 07 01 1 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.064.000	116.064.000	0
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.444.423	1.013.444.423	197.086.737
2 07 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.873.100	2.873.100	1.830.000
2 07 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	384.000.000	384.000.000	79.994.525
2 07 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.571.323	626.571.323	115.262.212
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.889.155.218	1.889.155.218	607.723.070
2 07 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	741.917.508	741.917.508	377.474.092
2 07 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.265.968	213.265.968	34.960.846
2 07 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	933.971.742	933.971.742	195.288.132
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.997.600	30.997.600	450.000
2 07 03 1 04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600	30.997.600	450.000
2 07 03 1 04 0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	30.997.600	450.000
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	102.977.100	99.137.100	2.273.180
2 07 04 1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	66.663.300	65.223.300	150.000
2 07 04 1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	66.663.300	65.223.300	150.000
2.07.04.1.04.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	36.313.800	33.913.800	2.123.180

2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	36.313.800	33.913.800	2.123.180
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	6.960.714.000	6.831.921.000	4.500.000
2 07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000	5.566.000	0
2 07 05 1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000	5.566.000	0
2 07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	6.955.148.000	6.826.355.000	4.500.000
2 07 05 1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	25.775.000	25.775.000	0
2 07 05 1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	1.800.000	1.800.000	0
2 07 05 1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6.927.573.000	6.798.780.000	4.500.000
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000	20.300.000	0
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	20.300.000	20.300.000	0
2 07 06 1.01 0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	20.300.000	20.300.000	0
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	8.000.000	4.160.000	0
3 29 02 1 01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000	4.160.000	0
3 29 03 1 01 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000	4.160.000	0
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	12.500.000	10.100.000	0
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12.500.000	10.100.000	0
3 29 03 1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12.500.000	10.100.000	0
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	94.999.500	51.825.500	6.720.000
3 29 05 1.04	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	94.999.500	51.825.500	6.720.000

3 29 05 1.04 0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	94.999.500	51.825.500	6.720.000
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800	24.884.800	0
3.32.03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24.884.800	24.884.800	0
3.32.03 1.01.18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	24.884.800	24.884.800	0
UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata		935.284.461	923.506.461	135.858.932
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	678.934.461	672.916.461	132.978.932
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.754.194	30.736.194	2.340.800
2 07 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.252.600	3.252.600	0
2 07 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.117.700	6.117.700	500.000
2 07 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.899.394	12.899.394	1.840.800
2 07 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	986.500	986.500	0
2 07 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000	1.200.000	0
2 07 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.298.000	6.280.000	0
2 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.000.000	28.000.000	0
2 07 01 1 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	28.000.000	0
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.728.560	224.728.560	38.070.558
2 07 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	5.309.926
2 07 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.728.560	200.728.560	32.760.632
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.451.707	389.451.707	92.567.574
2 07 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.770.000	80.770.000	39.990.000
2 07 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.131.673	35.131.673	0
2 07 01 1.09 1000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.550.034	273.550.034	52.577.574
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	256.350.000	250.590.000	2.880.000
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	256.350.000	250.590.000	2.880.000
2 07 03 1.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	256.350.000	250.590.000	2.880.000
UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja		975.605.160	966.011.748	68.195.335
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	559.755.110	559.761.698	68.195.335
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.704.974	30.704.974	2.336.000
2 07 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.980.300	4.980.300	0
2 07 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.896.400	7.896.400	0
2 07 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.944.274	14.944.274	2.336.000
2 07 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.884.000	2.884.000	0

2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.797.596	115.797.596	19.366.643
2 07 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	957.700	957.700	610.000
2 07 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	2.376.327
2 07 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.839.896	102.839.896	16.380.316
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.252.540	413.259.128	46.492.692
2 07 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.559.904	129.566.492	8.937.282
2 07 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	0
2 07 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	268.692.636	268.692.636	37.555.410
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	415.850.050	406.250.050	0
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	415.850.050	406.250.050	0
2 07 06 1.01 0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	415.850.050	406.250.050	0
JUMLAH		43.428.115.058	43.100.750.646	7.431.234.711

2.3. Analisis Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (6) Sosial.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur terkait Urusan Pemerintahan. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya

Mineral Provinsi Bali menyelenggarakan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Tenaga Kerja, dan Urusan Pilihan yaitu Urusan Energi Sumber Daya Mineral, serta Transmigrasi, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tidak menyelenggarakan SPM.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan, selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dituangkan pada tabel 2.2 terlampir.

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian Pembangunan Nasional memiliki peran penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human kapital dalam pembangunan, baik Daerah maupun Nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah, karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktifitas perekonomian. Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Pada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI, disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan semakin memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dicapai oleh negara-negara berkembang pada umumnya terkait erat dengan ketepatan formulasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan investasi, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Gambaran umum atas kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah angkatan

kerja merupakan potensi yang dapat mengoptimalkan kinerja perekonomian Indonesia. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja juga menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak. Mayoritas pekerja di Indonesia masih tergolong berpendidikan rendah, yang identik dengan keterbatasan keahlian (*low skilled*), sehingga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri. Keterampilan/keahlian masih menjadi tantangan bagi daya saing Indonesia.

Di masa mendatang, sektor ekonomi semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian digital, mengingat mulai bermunculan gejala transformasi ekonomi ke arah *automation* (otomatisasi) atau digital ekonomi. Bagaimana tenaga kerja berpendidikan rendah mampu menghadapi proses transformasi ekonomi, tentunya diperlukan kebijakan untuk mempercepat peningkatan *skill* SDM agar dinamika sektor ekonomi mampu diimbangi dengan penyediaan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Dalam konteks kesejahteraan, transformasi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang tidak pasti, seiring hadirnya digitalisasi tentu membutuhkan penguatan perlindungan sosial.

Era automasi yang melahirkan revolusi industri 4.0 berdiri di atas tren bergesernya perekonomian dari *resources-based* (berbasis sumber daya) menjadi *knowledge-based economy* (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Dalam *knowledge-based economy*, titik tumpu perekonomian terletak pada kecepatan dalam mengembangkan teknologi dan informasi yang membutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi tinggi.

2.3.2. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Sejalan dengan Sasaran Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mewujudkan Kedaulatan Energi, dan mendukung Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mendukung pembangunan infrastruktur terintegrasi darat, laut dan udara khususnya

dalam penyediaan material, air dan energi listrik terutama penggunaan energi bersih. Program yang dilaksanakan disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan menggunakan Energi Bersih, dengan meningkatkan bauran energi bersih dan mengendalikan pengusahaan sumber daya mineral.

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pada Renstra K/L disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman energi dan sumber daya mineral. Lebih dari 100 tahun, minyak bumi menjadi tumpuan ekonomi Indonesia, namun cadangannya mulai menipis. Sementara itu, masih ada potensi energi lainnya tetapi pemanfaatannya belum optimal seperti batubara, CBM, shale gas, dan EBT. Keberagaman dan melimpahnya potensi EBT yang terdapat di Indonesia merupakan modal penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM berupaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT untuk mencapai sasaran-sasaran nasional. Untuk mendukung upaya energi yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sumber daya energi yang ada di

daerah bersangkutan seperti PLTA, PLTMH, PLTS, PLTB dan PLTSa sehingga dapat membantu efisiensi biaya penyaluran energinya.

Kementerian ESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan Nasional, melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Kondisi energi dan ketenagalistrikan pada tahun 2018, bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi Bali telah mencapai 100%. Kapasitas pembangkit listrik terpasang total sebesar 1.259 MW dengan rincian: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Celukan Bawang berbahan bakar batubara sebesar 380 MW, Kabel Laut Jawa Bali sebesar 340 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pesanggaran sebesar 200 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pesanggaran sebesar 125 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Gilimanuk sebesar 130 MW dan Pemaron sebesar 80 MW serta Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan sebesar $\pm 4,0$ MW yaitu dari Tenaga Air sebesar 1,4 MW dan Tenaga Surya sebesar 2,6 MW. Beban puncak sebesar 863,29 MW sehingga cadangan saat ini $\pm 30\%$ masih termasuk aman, dengan catatan semua pembangkit beroperasi dengan baik dan lancar.

Sesuai dengan rancangan dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali serta untuk mendukung program dan tujuan nasional untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, kondisi potensi dan pengembangan serta pemanfaatan energi bersih dan terbarukan menjadi sangat krusial sehingga diharapkan dari kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan dapat mendorong dan meningkatkan penggunaan energi bersih dan terbarukan tidak hanya pada pembangkitan termasuk juga pemanfaatan langsung pada kegiatan sehari-hari, sehingga pengurangan penggunaan energi fosil dan peningkatan energi terbarukan memberikan dampak untuk mengurangi gas rumah kaca. Keandalan dan pemenuhan Ketenagalistrikan di Bali

disediakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Bali dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi energi setempat dan dimanfaatkan ke dalam sistem jaringan ketenagalistrikan yang tersedia.

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya mineral dititikberatkan pada pengendalian usaha pemanfaatan air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk menjaga lingkungan yang bersih, hijau dan indah dengan memanfaatkan sumber daya mineral secara bijak dan sesuai arahan teknis. Bali memang tidak mempunyai potensi sumber daya mineral yang besar, namun potensi pertambangan batuan tersedia cukup banyak, terutama di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng untuk pasir-batu (Sirtu), serta daerah Pecatu, Ungasan dan Nusa Penida untuk Batu Gamping (Batu Kapur). Tidak bisa dipungkiri, bahwa komoditas tambang ini merupakan komoditas utama dalam pembangunan infrastruktur seperti bangunan fasilitas umum, pemukiman, maupun fasilitas akomodasi pariwisata.

Demikian juga halnya dengan Air Tanah. Sebelum tahun 1990-an, pengambilan air tanah melalui sumur bor masih sangat jarang, kecuali beberapa sumur bor milik PDAM. Kebutuhan air bersih/minum penduduk lebih bersumber pada mata air ataupun sumur gali. Seiring dengan perkembangan pembangunan, jumlah penduduk yang meningkat pesat, pengembangan pemukiman baru, serta pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata yang lebih agresif, sangat berdampak pada kebutuhan peyediaan air bersih. Kondisi ini tidak mampu diimbangi oleh PDAM dalam penyediaan dan pendistribusian air bersih. Pembuatan Sumur Bor sebagai sumber air bersih merupakan alternatif pilihan yang paling ekonomis, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun dunia usaha.

Kebutuhan terhadap kedua sumber daya alam ini ke depan akan terus meningkat, dan sangat disadari bahwa pemanfaatan yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengembangan Air Tanah dan

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan diharapkan dapat mengendalikan dan menjaga lingkungan di Bali.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Air Tanah berpindah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, maka kegiatan Energi, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Air Tanah menjadi hal yang sangat penting dengan didukung oleh pengembangan dan penambahan sumber daya manusia berbasis kompetensi bidang energi dan sumber daya mineral, kegiatan-kegiatan yang inovatif, serta sinergitas dengan instansi terkait dan dunia usaha wajib dilakukan dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran tersebut.

Semenjak bulan Maret tahun 2016, pasca dilakukan Serah Terima Dokumen Perizinan (P3D), penyelenggaraan administrasi perijinan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Rekomendasi Teknis dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

2.3.3. Urusan Transmigrasi

Menurut Undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi. Pemukiman trasnsmigrasi dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Dengan demikian, penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dapat teratasi. Untuk itu Pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah (KSAD). Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana (*rowing*), sedangkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*sterring*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, yaitu pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Pembangunan Nasional berbasis kewilayahan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar provinsi dalam satu pulau dan antar pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya serta sarana dan prasarana. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi.

Undang-undang ketransmigrasian (UU Nomor 15 Tahun 1997) mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (*hinterland*), termasuk antara kota dan desa.

Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antarwilayah yang masih cukup tinggi, yaitu: (1) tingkat kemiskinan, (2) tingkat rasio gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal.

Semenjak tahun 2021 tidak ada program/kegiatan yang mengampu terkait urusan transmigrasi yang dilaksanakan. Berdasarkan Permendagri 90/2019, terkait rumpun urusan dan kewenangan tidak terdapat program/kegiatan/sub kegiatan untuk mengakomodir program pengiriman KK transmigrasi. Provinsi Bali hanya merupakan daerah asal dan bukan merupakan daerah pengembangan kawasan transmigrasi. Akan tetapi, adanya pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Ketiga Urusan tersebut sangatlah beragam, diantaranya:

- 1) Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi minus 9 -> meningkatnya jumlah pengangguran.
- 2) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi --> meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- 3) Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata.
- 4) Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya --> penempatan PMI tidak sesuai ketentuan.

- 5) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.
- 6) Pengembangan energi terbarukan belum optimal --> risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi.
- 7) Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 8) Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali --> potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang.
- 9) Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan --> penurunan kualitas hidup dan Lingkungan.

Isu-isu penting/isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran.
- 2) Masih banyaknya Tenaga Kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi --> *link and match* dengan kebutuhan industri di dalam dan di luar negeri belum mantap.
- 3) Masih ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang tergiur oleh Badan Usaha Ilegal untuk bekerja ke luar negeri.
- 4) Kurang patuhnya pengusaha terhadap norma kerja, norma K3 dan kesejahteraan pekerja.
- 5) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pemanfaatan air tanah belum optimal.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengeleminir permasalahan tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Akses dan Kesempatan Kerja;
- 2) Mewujudkan Tenaga Kerja yang Unggul dan Berdaya Saing;
- 3) Meningkatkan Pelindungan Tenaga Kerja;
- 4) Mendata dan Menertibkan Pelaku Usaha Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri
- 5) Menyiapkan Database Ketenagakerjaan;
- 6) Mendorong Pemerintah Daerah Mensyaratkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Perizinan Lainnya;
- 7) Mendorong Investasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan;
- 8) Mendorong Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
- 9) Konservasi Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan;
- 10) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun dengan Mitra Pendukung/Stakeholder terkait.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat

arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses perencanaannya melalui berbagai proses, salah satunya adalah Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sepenuhnya adalah untuk mewujudkan tujuan dan Sasaran Pemerintah dan Perangkat Daerah. Rancangan program/kegiatan yang diusulkan terdiri dari 9 program, 27 kegiatan, dan 58 sub kegiatan, yang pemetaannya telah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Review terhadap rancangan renja tahun 2025 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tersaji pada tabel 2.3 terlampir.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, mekanisme pengusulan perencanaan adalah melalui *bottom up* atau partisipasi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan para *stakeholder*/pemangku kepentingan. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 telah dilaksanakan secara *hybrid* pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dihadiri oleh Akademisi, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Instansi Vertikal/Lembaga Terkait, serta perangkat daerah kabupaten/kota di Bali yang membidangi

ketenagakerjaan, serta yang memiliki potensi di sektor energi dan sumber daya mineral. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang diusulkan telah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah serta perangkat daerah. Usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan tersaji dalam tabel 2.4 terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2020-2025. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bidang Prioritas	Tujuan	Sasaran
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal	Meningkatnya Penguatan dan Pemajuan Adat serta Budaya Bali Berlandaskan Nilai- Nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi
		Meningkatnya peran Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi
		Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Subak
		Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali (Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci)
Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman
		Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi generasi muda Bali
		Tercapainya peningkatan prestasi olahraga Provinsi Bali pada level nasional dan internasional
		Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali
Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKMd dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata	Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali.	Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan
		Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
		Meningkatnya Investasi Daerah Yang Mendorong Pemerataan Pembangunan di Bali
		Terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru berbasis potensi dan keunggulan lokal di desa-desa setiap Kabupaten/Kota di Bali.
		Meningkatnya jumlah dan skala usaha UMKM dan koperasi yang berdaya saing
		Meningkatnya daya saing, kualitas, dan jangkauan pasar produk industri lokal Bali melalui standarisasi, sertifikasi, serta ekspansi ke pasar nasional dan internasional.
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan
Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
		Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah
		Meningkatnya cakupan luasan hutan lindung
		Meningkatnya sumber daya mineral
Bali Pulau Digital dan Keamanan Digital	Tersedianya infrastruktur digital berkualitas yang inklusif dan merata di seluruh pelosok Provinsi Bali	Meningkatnya pemanfaatan energi yang berkelanjutan
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi di Masyarakat
		Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
	Meningkatnya kualitas tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana terpadu
		Meningkatnya Profesionalisme ASN
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
		Meningkatnya kualitas layanan publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM) Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Ada pun tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tujuan Pemerintah Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
1. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah Indikator: 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi bersih	

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
1. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja Krama Bali	
3. Meningkatnya pengelolaan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	2. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali
4. Meningkatnya pemanfaatan energi yang berkelanjutan	

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan lokasi kegiatan pada daerah-daerah kantong kemiskinan, sehingga diharapkan kegiatan tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan

program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Untuk mengatasi isu-isu strategis, mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Bali, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dilaksanakanlah berbagai program dan kegiatan. Pada tahun 2025⁴ sebanyak 9 program yang diusulkan yaitu; (1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, (2) Program Penempatan Tenaga Kerja, (3) Program Hubungan Industrial (4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan, (5) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, (6) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (7) Program Pengelolaan Energi Terbarukan, (8) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan (9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari 9 (sembilan) program tersebut, terakomodir sebanyak 27 kegiatan, dan 508 sub kegiatan. Nomenklatur program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah menetapkan indikator serta satuan target pada masing-masing sub kegiatan.

Ada pun program dan kegiatan Tahun 2025 Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tersaji pada Tabel 3.1 terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai perwujudan strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasionalnya dituangkan dalam program sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Program lebih lanjut dijabarkan dengan beberapa kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam rencana strategis (renstra).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri atas 9 (sembilan) program, 24 kegiatan, dan 51 sub kegiatan, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp. 43.428.115.058,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral pagu indikatif Rp. 41.517.225.437,00
- b) UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata pagu indikatif Rp. 935.284.461,00
- c) UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja pagu indikatif Rp. 975.605.160,00

Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah berdampak pada penyesuaian kembali pengalokasian anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dirancang sebelumnya sehingga melalui mekanisme Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 kembali mengalami penyesuaian, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp. 43.264.724.738,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral pagu indikatif
Rp. 41.326.065.581,00
- b) UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata pagu indikatif
Rp. 956.267.093,00
- c) UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja pagu indikatif
Rp. 982.392.064,00

Ada pun rincian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				41.326.065.581
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)			34.252.734.581
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselamatkan Tepat Waktu			30.917.389.502
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Aparatur	30.917.389.502
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan			201.853.294
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	14.992.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	41.179.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	65.133.994
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	15.124.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	8.614.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	10.050.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	46.758.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			116.064.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	116.064.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			1.128.277.567
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	2.873.100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	384.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	741.404.467
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai			1.889.155.218
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	741.917.508
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	213.265.968
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	933.971.742
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi			30.997.600
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi			30.997.600
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Tenaga Kerja	30.997.600
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja			99.137.100
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha			65.223.300
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bangli, Susut, Abuan	Pencari Kerja	65.223.300
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya			33.913.800
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMP/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PMI (Pra dan Purna Penempatan)	33.913.800
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan			6.831.921.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan			5.566.000

Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perusahaan dan Tenaga Kerja	5.566.000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan			6.826.355.000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perusahaan dan Tenaga Kerja	25.775.000
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perusahaan dan Tenaga Kerja	1.800.000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6.798.780.000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos			20.300.000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja			20.300.000
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perusahaan dan Tenaga Kerja	20.300.000
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan			4.160.000
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan			4.160.000
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Masyarakat	4.160.000
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusaha sumber daya mineral yang sesuai ketentuan			10.100.000
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan			10.100.000

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Masyarakat	10.100.000
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan			51.825.500
Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah			51.825.500
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Masyarakat	51.825.500
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD			24.884.800
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target			24.884.800
Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Transmigran	24.884.800
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA				956.267.093
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)			705.677.093
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan			30.736.194
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	3.252.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	6.117.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	12.899.394
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	986.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	1.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	6.280.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			28.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	28.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			257.489.192
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	24.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	233.489.192
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai			389.451.707
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	80.770.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	35.131.673
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	273.550.034
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			250.590.000
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi			250.590.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Calon Tenaga Kerja / Masyarakat	250.590.000
UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA				982.392.064
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)			276.142.014
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan			30.704.974
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	4.980.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelayanan Perkantoran	7.896.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	14.944.274
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	2.884.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			132.177.912

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	957.700
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	12.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pelayanan Perkantoran	119.220.212
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai			413.259.128
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	129.566.492
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Sarana dan Prasarana	268.692.636
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3			406.250.050
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku			406.250.050
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perusahaan	406.250.050
				43.264.724.738

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Mendukung prinsip 3 E (Efektif, Efisien, Ekonomis) dengan cara meminimalisasi belanja yang relatif kurang efektif, dan merencanakan program kegiatan sesuai skala prioritas dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses perencanaan pembangunan mengacu kepada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang diusulkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025, sepenuhnya adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Proses perencanaan pembangunan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mengacu kepada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk menguraikan dan menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dalam

periode satu tahun, serta memberikan gambaran perencanaan program/kegiatan tahunan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali secara resmi. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri atas 9 program, 24 kegiatan, dan 52 sub kegiatan, dengan pendanaan indikatif sebesar Rp. 43.264.724.738,00. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk dapat mewujudkan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan, tentunya melalui program-program yang telah dirancang.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijakan, program maupun dalam berbagai kegiatan perlu mendapat kajian yang cermat, sehingga nantinya tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat maupun tersirat dalam Rencana Kerja khususnya Tahun Anggaran 2025 ini.

c. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 ini ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) yang lebih detail sesuai dengan bidang tugas masing-masing, agar kedepannya dapat memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963, 223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

NOMOR 417 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 45);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Bali Tahun 2021 Nomor 38);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025;
 - c. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 16 Februari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI
NOMOR 417 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI BALI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- Sekretaris : Fungsional Perencana Ahli Muda, Dinas
Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas,
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial
dan Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas
Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Bali.
3. Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi, Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali.
4. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
5. Kepala UPTD. Balai Latihan Kerja Industri
dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
6. Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali.
7. Desak Gde Mahasriyatni, S.E., Analis
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Dinas
Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Bali.
8. I Putu Agus Suwenten, Analis Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan, Dinas
Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BSrE



9. Ni Putu Sri Intan Damayanti, S.H., Tenaga Administrasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
10. Ida Ayu Dewi Prayogi Manuaba, S.E., Tenaga Administrasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





ສູ່ ພິ ສາ ມະ ນີ

SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah
Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025
Nomor : B.23.996/2193/II/DISNAKER ESDM

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang dilaksanakan secara *hybrid*, dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi dari IDA BAGUS SETIAWAN (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 20 Pebruari 2024
J a m : 10.00- 16.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Siddhakarya (Lt.1)
Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali,
dan Ruang Kerja Masing-Masing

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 20 Pebruari 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali:

No	Nama	Unit Perwakilan	Jabatan
1	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
2	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
3	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
4	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
5	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
6	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
7	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
8	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
9	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
10	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]
11	[Nama]	[Unit]	[Jabatan]



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NOMOR : B.23.996/2193//DISNAKER ESDM
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

Provinsi : Bali
Tanggal : 20 Februari 20234
Tempat : Ruang Rapat Sidhakarya (Lt.1)
Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali

No	Nama	Jabatan	Instansi	Alamat	Telepon	Handphone	Handphone
1	Dr. Irena	Ketua	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali	Jl. ...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN II :

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NOMOR : B.23.996/2193/II/DISNAKER ESDM
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
	DISNAKERESDM				34.378.249.091	38.523.995.500
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,82	86,84	32.748.927.691	36.023.820.500
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas dan Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen	20.000.000	22.000.000
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	22.000.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	28.567.230.000	31.423.953.000
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	140 Orang/Bulan	28.567.230.000	31.423.953.000
3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 persen	100 persen	427.427.600	470.170.400
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.498.600	18.148.500
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	58.244.200	64.068.600
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	76.900.000	84.590.000
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.356.800	32.292.500
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	9.900.000
f	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.600.000
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	231.428.000	254.570.800
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 persen	100 persen	529.939.400	582.933.300
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	529.939.400	582.933.300
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 persen	100 persen	1.132.771.323	1.246.048.500
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.200.000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	480.000.000	528.000.000
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	650.771.323	715.848.500
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 persen	100 persen	2.071.559.368	2.278.715.300



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	802.773.328	883.050.700
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	175.459.760	193.005.700
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	72 Unit	1.093.326.280	1.202.658.900
II	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	36 Persen	34 Persen	228.897.100	415.500.000
1	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	90 Orang	116 Orang	95.546.400	135.500.000
a	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	90 Dokumen	116 Dokumen	95.546.400	135.500.000
2	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	15 Perusahaan	30 Perusahaan	133.350.700	280.000.000
a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	30 Perusahaan	133.350.700	280.000.000
III	Program Hubungan Industrial	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	11,97 Persen	13,49 Persen	209.694.000	280.675.000
1	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub	2 Kep Gub	164.250.000	180.675.000
a	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	150.750.000	165.825.000
b	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Penetapan UMK	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	13.500.000	14.850.000
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 persen	100 persen	45.444.000	100.000.000
a	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara	70 Perkara	45.444.000	100.000.000
IV	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 persen	100 persen	40.158.100	103.000.000
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	80 Perusahaan	186 Perusahaan	40.158.100	103.000.000
a.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	80 Perusahaan	186 Perusahaan	40.158.100	103.000.000
V	Program: Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	34 Persen	36 Persen	470.572.200	909.000.000
1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha	40 Orang	145 Orang	133.117.200	531.000.000
a	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	145 Orang	133.117.200	531.000.000
2	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	270 Orang	275 Orang	337.455.000	378.000.000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



a	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	270 Orang	275 Orang	337.455.000	378.000.000
VI	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD	100 Persen	100 Persen	80.000.000	132.000.000
1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen	100 Persen	80.000.000	132.000.000
a	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	3 Lokasi	80.000.000	132.000.000
VII	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	61 Persen	64 persen	350.000.000	385.000.000
1	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen	15 Dokumen	350.000.000	385.000.000
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	15 Dokumen	350.000.000	385.000.000
VIII	Program: Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen	67.50 Persen	60.000.000	66.000.000
1	Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen	67.50 Persen	60.000.000	66.000.000
a	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	66.000.000
IX	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah pemanfaatan EBT terhadap jumlah daya mampu eksisting	75 MW	89 MW	190.000.000	209.000.000
1	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi Terhadap Kegiatan yang Izin Usahnya dikeluarkan Oleh Daerah Provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4.8 Persen		190.000.000	209.000.000
a	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	190.000.000	209.000.000
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA					2.003.526.112	2.900.878.693
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,82	86,84	953.526.112	1.048.878.693
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	53.931.300	59.324.400
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.549.000	3.903.900
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	8.390.300	9.229.300
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	13.000.000	14.300.000
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	3.500.000	3.850.000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



e	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	2 laporan	1.200.000	1.320.000
f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	24.292.000	26.721.200
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	265.338.080	291.871.888
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	24.000.000	26.400.000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	241.338.080	265.471.888
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	100 Persen	413.463.132	454.809.445
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	84.250.000	92.675.000
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	45.000.000	49.500.000
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 unit	38 unit	284.213.132	312.634.445
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	220.793.600	242.872.960
a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	13 Unit	192.793.600	212.072.960
b	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	8 Unit	28.000.000	30.800.000
II	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	75 Persen	80 Persen	1.050.000.000	1.852.000.000
1	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	96 Orang	160 Orang	1.050.000.000	1.852.000.000
a	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	96 Orang	160 Orang	950.000.000	1.742.000.000
b	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	1 Unit	100.000.000	110.000.000
UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA					1.620.733.436	1.837.251.785
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,82	86,84	1.185.683.436	1.305.251.785
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	62.252.400	68.477.600
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.764.000	10.740.400
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	22.208.400	24.429.200
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.500.000	18.150.000
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.780.000	5.258.000
e	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	18 Laporan	9.000.000	9.900.000
2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	588.484.300	647.332.700

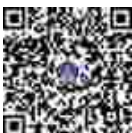


Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20 Unit	588.484.300	647.332.700
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	115.839.896	127.423.885
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.100.000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000	13.200.000
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	102.839.896	113.123.885
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	100 Persen	419.106.840	462.017.600
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	141.966.140	156.162.800
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000	22.000.000
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	75 Unit	257.140.700	283.854.800
II	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 Persen	100 Persen	435.050.000	532.000.000
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	90 perusahaan	100 perusahaan	435.050.000	532.000.000
a	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	90 perusahaan	100 perusahaan	435.050.000	532.000.000
TOTAL					38.002.508.639	43.262.125.978



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NOMOR : B.23.996/2193/I/DISNAKER ESDM
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5
I	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		34 Persen	Untuk Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah
1	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		90 Orang	
a	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Denpasar	90 Dokumen	
2	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		15 Perusahaan	
a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	9 Kab/Kota	15 Perusahaan	
3	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		96 Orang	
a	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Denpasar	96 Orang	
b	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Denpasar	1 Unit	
II	Program Hubungan Industrial		11.97 Persen	
1	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		2 Kep Gub	
a	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	9 Kab/Kota	1 Surat Keputusan	
b	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	9 Kab/Kota	1 Surat Keputusan	
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		100 persen	
a	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	9 Kab/Kota	30 Perkara	
III	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		100 persen	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		80 Perusahaan	
a.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	9 Kab/Kota	80 Perusahaan	

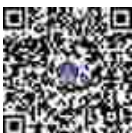


Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



b	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	9 Kab/Kota	90 perusahaan
IV	Program: Penempatan Tenaga Kerja		34 Persen
1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		40 Orang
a	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Badung dan Tabanan	40 Orang
2	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		270 Orang
a	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	9 Kab/Kota	270 Orang
V	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		100 Persen
1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100 Persen
a	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Sulawesi tengah dan Sulawesi Tenggara	2 Lokasi
VI	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara		61 Persen
1	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		15 Dokumen
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	9 Kab/Kota	15 Dokumen
VII	Program: Program Pengelolaan Aspek Kegeologian		65.00 Persen
1	Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		65.00 Persen
a	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	9 Kab/Kota	1 Laporan
VIII	Program Pengelolaan Energi Terbarukan		75 MW
1	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi Terhadap Kegiatan yang Izin Usahnya dikeluarkan Oleh Daerah Provinsi		4.8 Persen
a	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	9 Kab/Kota	1 Laporan



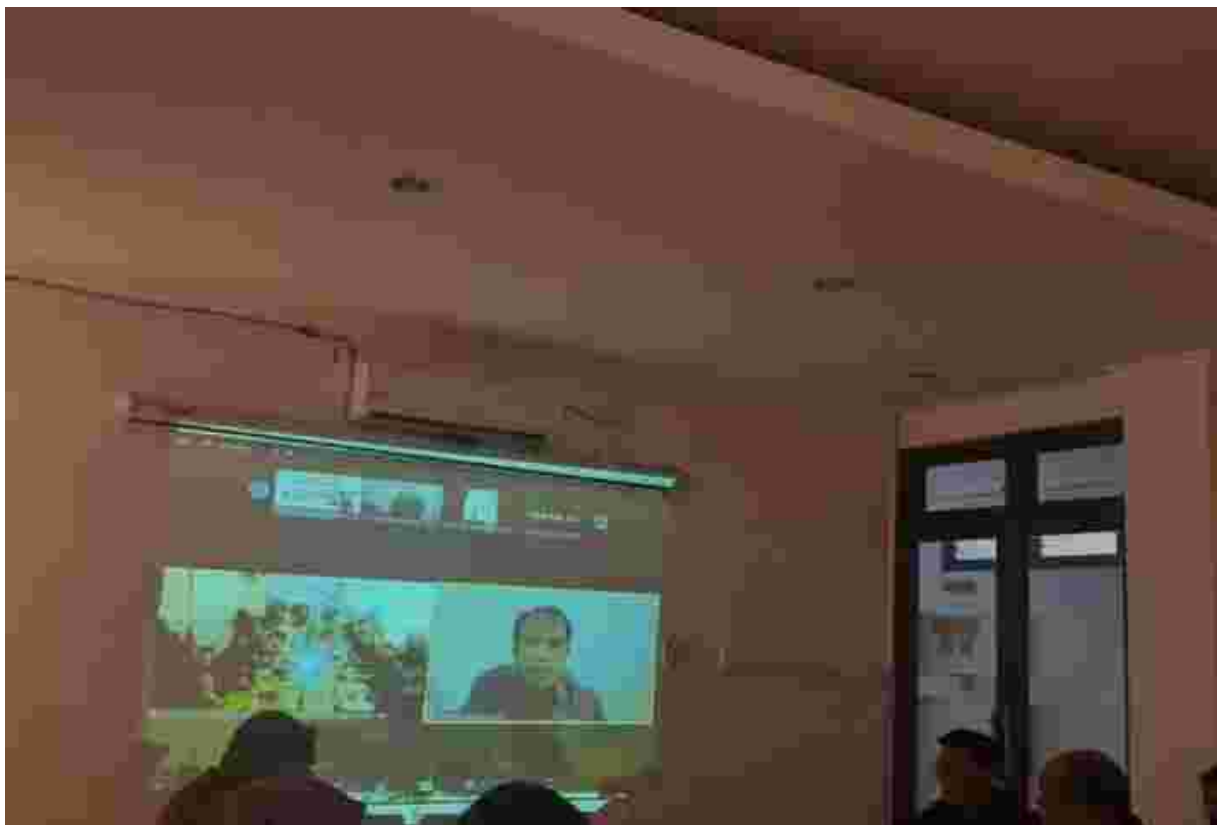
Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

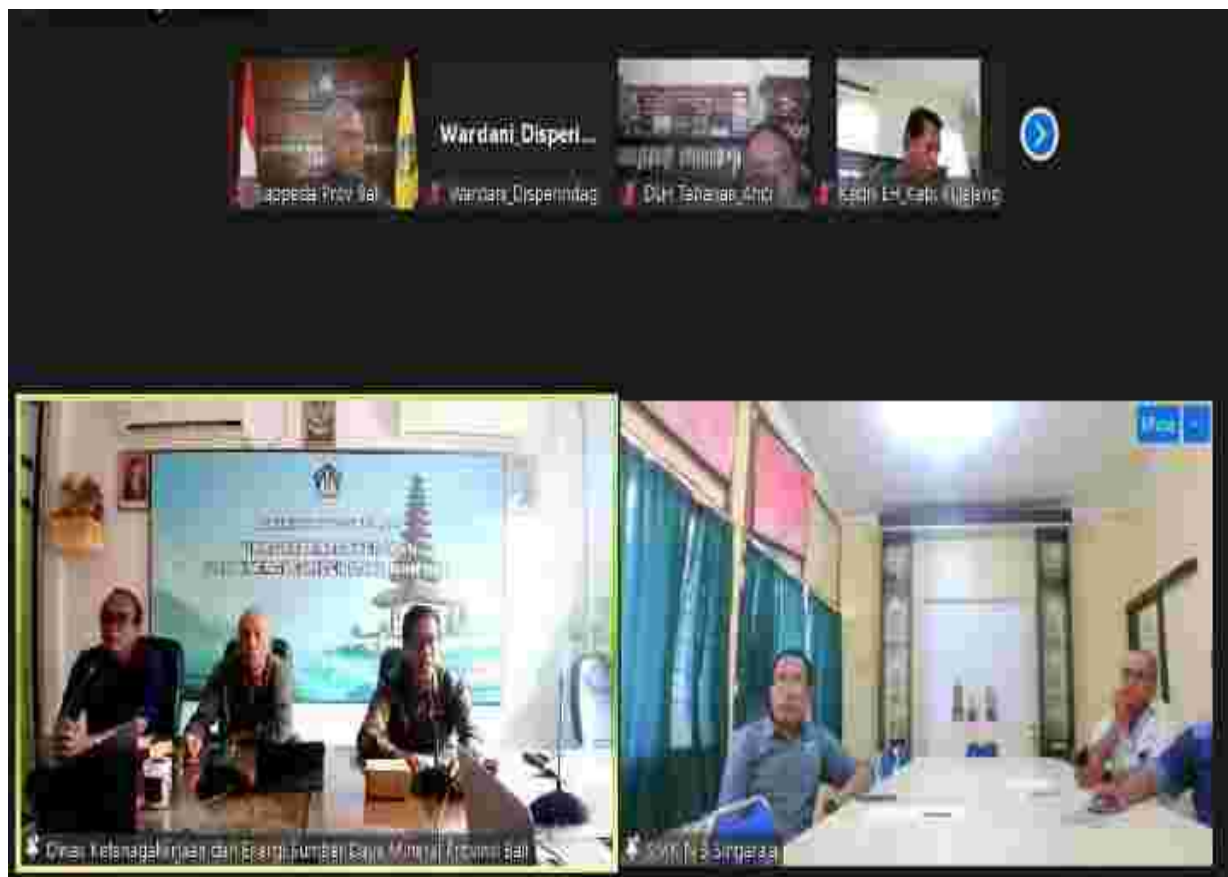


DOKUMENTASI
FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI BALI
TAHUN 2025









Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Bali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)	86.80 Nilai	86.54 Nilai	82.50 Nilai	86.74 Nilai	100 Persen	83.00 Nilai		
2.07.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100 Persen	140 Orang		
2.07.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
2.07.01.1.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100 Persen	1 Paket		
2.07.01.1.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	45 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	100 Persen	2 Paket		
2.07.01.1.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 Persen	1 Paket		
2.07.01.1.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	1 Paket		
2.07.01.1.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	1 Dokumen		
2.07.01.1.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	1 Laporan		
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Persen	1 Laporan		
2.07.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	-	-	-	-		
2.07.01.1.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	-	-	-	-		
2.07.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	1 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 Persen	3 Laporan		
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	1 Laporan		
2.07.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	11 Unit	13 Unit	13 Unit	100 Persen	13 Unit		
2.07.01.1.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 Persen	1 Unit		
2.07.01.1.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	9 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100 Persen	5 Unit		
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	30 Persen	51.02 Persen	-	-	-	55.21 Persen		
2.07.03.1.04.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	44 Orang	130 Orang	-	-	-	30 Dokumen		
2.07.03.1.04.0001.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	44 Dokumen	130 Orang	-	-	-	30 Dokumen		
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	30 Persen	1 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	100 Persen	4 Kawasan		
2.07.04.1.01.	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha	40 Orang	1 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	100 Persen	160 Orang		
2.07.04.1.01.0005.	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	1 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	100 Persen	160 Orang		
2.07.04.1.04.	Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	180 Orang	-	-	-	-	-		
2.07.04.1.04.0001.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia PMI/Pekerja Migran Indonesia PMI	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	180 Orang	-	-	-	-	-		
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	10.44 Persen	-	-	-	-	100 Persen		
2.07.05.1.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Persen	-	-	-	-	100 Persen		
2.07.05.1.02.0002.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	8 Perkara	-	-	-	-	24 Perkara		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.05.1.03.	Penetapan Upah Minimum Provinsi UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi UMSP, Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota UMSK	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub	-	-	-	-	100 Persen		
2.07.05.1.03.0001.	Penetapan Upah Minimum Provinsi UMP	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	-	-	-	-	1 Surat Keputusan		
2.07.05.1.03.0003.	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK	Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	-	-	-	-	1 Surat Keputusan		
2.07.06.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 Persen	6.22 Persen	6.71 Persen	6.71 Persen	100 Persen	6.71 Persen		
2.07.06.1.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	70 Perusahaan	100 Perusahaan	64 Perusahaan	64 Perusahaan	100 Persen	26 Perusahaan		
2.07.06.1.01.0001.	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA	70 Perusahaan	100 Perusahaan	64 Perusahaan	64 Perusahaan	100 Persen	26 Perusahaan		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3 29.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	62.50 Persen	-	-	-	-	60 Persen		
3 29.02.1.01.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	62.50 Persen	-	-	-	-	24 Laporam		
3 29.02.1.01.0003.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	-	-	-	-	24 Laporan		
3 29.05.	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusaha sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	58.00 Persen	55 Persen	-	-	-	60 Persen		
3 29.05.1.03.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen	355 Rektek	-	-	-	15 Dokumen		
3 29.05.1.03.0003.	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	355 Rektek	-	-	-	15 Dokumen		
3.29.05.	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	70 MW	8.62 MW	11 MW	10.6 MW	100 Persen	13 MW		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.29.05.1.08.	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4 Persen	2.27 Persen	1.2 Persen	1.26 Persen	100 Persen	1.4 Persen		
3.29.05.1.08.0005.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan		
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD	100 Persen	-	-	-	-	2 Lokasi		
3.32.03.1.01.	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Satu) Daerah Provinsi	Persentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen	-	-	-	-	1 Lokasi		
3.32.03.1.01.0018.	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	-	-	-	-	1 Lokasi		
UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	86.80 Nilai	86.54 Nilai	82.50 Nilai	86.74 Nilai	100 Persen	83.00 Nilai		
2.07.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
2.07.01.1.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	1 Paket		
2.07.01.1.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 Persen	4Paket		
2.07.01.1.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	12 Paket		
2.07.01.1.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	2 Paket		
2.07.01.1.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	-	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	2 Laporan		
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1 kegiatan	-	-	-	-		
2.07.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	-	-	-	100 Persen		
2.07.01.1.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	7 Unit	-	-	-	1 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	12 Laporan		
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	12 Laporan		
2.07.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100 Persen	2 Unit		
2.07.01.1.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	3 Unit		
2.07.01.1.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 Persen	45 Unit		
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	70 Persen	29.33 Persen	30 Persen	87.5 Persen	100 Persen	30 Persen		
2.07.03.1.01.	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	32 Orang	32 Orang	64 Orang	64 Orang	100 Persen	80 Orang		
2.07.03.1.01.0001.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	32 Orang	32 Orang	64 Orang	64 Orang	100 Persen	80 Orang		
UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	86.80 Nilai	86.54 Nilai	82.50 Nilai	86.74 Nilai	100 Persen	83.00 Nilai		
2.07.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
2.07.01.1.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	1 Paket		
2.07.01.1.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	51 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 Persen	3 Paket		

[illegible]

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	10	8	9			12
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan		1. Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja 2. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 3. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 4. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	57	66	68	68.50	61.21	65.77	68	68.50	
2	Persentase Penduduk yang Bekerja			98.61%	97.68%	97.43%	97.99%	95.20%	97.31%	97.43%	97.99%	
3	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal			35%	35%	43,37%	43,87%	49.40%	57.46%	43,37%	43,87%	
4	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			82.5	83	86.8	86.82	86.79	85.16	86.8	86.82	
5	Rasio Elektrifikasi		1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Bauran EBT		2. Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	1.2%	1.4%	8.45	10.65	1.26%	3.80%	8.45	10.65	
7	Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral			0	60%	62.50%	65%	58%	60%	62.50%	65%	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DISNAKERESDM				34,378,249,091	DISNAKERESDM				34,378,249,091
I	Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86.82	32,748,927,691	Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86.82	32,748,927,691
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas dan Sesuai Ketentuan	100 persen	20,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas dan Sesuai Ketentuan	100 persen	20,000,000
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar		2 Dokumen	20,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar		2 Dokumen	20,000,000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	100 persen	28,567,230,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	100 persen	28,567,230,000
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	28,567,230,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	28,567,230,000
3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 persen	427,427,600	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 persen	427,427,600
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,498,600	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,498,600
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58,244,200	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58,244,200
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	76,900,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	76,900,000
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,356,800	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,356,800
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	1 Dokumen	9,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	1 Dokumen	9,000,000
f	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	6,000,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	6,000,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	231,428,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	231,428,000
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 persen	529,939,400	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 persen	529,939,400
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	529,939,400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	529,939,400
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 persen	1,132,771,323	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 persen	1,132,771,323
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	480,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	480,000,000
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	650,771,323	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	650,771,323
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 persen	2,071,559,368	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 persen	2,071,559,368
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	802,773,328	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	802,773,328
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	175,459,760	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	175,459,760
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	1,093,326,280	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	1,093,326,280
II	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	34 Persen	228,897,100	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	34 Persen	228,897,100
1	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	90 Orang	95,546,400	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	90 Orang	95,546,400

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	90 Dokumen	95,546,400	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	90 Dokumen	95,546,400
2	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		Jumlah Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	15 Perusahaan	133,350,700	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		Jumlah Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	15 Perusahaan	133,350,700
a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	9 Kab/Kota	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	133,350,700	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	9 Kab/Kota	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	133,350,700
III	Program Hubungan Industrial		Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	11.97 Persen	209,694,000	Program Hubungan Industrial		Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	11.97 Persen	209,694,000
1	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub	164,250,000	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub	164,250,000
a	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	9 Kab/Kota	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	150,750,000	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	9 Kab/Kota	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	150,750,000
b	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	9 Kab/Kota	Jumlah Penetapan UMK	1 Surat Keputusan	13,500,000	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	9 Kab/Kota	Jumlah Penetapan UMK	1 Surat Keputusan	13,500,000
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 persen	45,444,000	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 persen	45,444,000
a	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	9 Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara	45,444,000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	9 Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara	45,444,000
IV	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		Persentase Perusahaan yang Patuh Terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 persen	40,158,100	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		Persentase Perusahaan yang Patuh Terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 persen	40,158,100
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	80 Perusahaan	40,158,100	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	80 Perusahaan	40,158,100

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	9 Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	80 Perusahaan	40,158,100	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	9 Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	80 Perusahaan	40,158,100
V	Program: Penempatan Tenaga Kerja		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	34 Persen	470,572,200	Program: Penempatan Tenaga Kerja		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	34 Persen	470,572,200
1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha	40 Orang	133,117,200	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha	40 Orang	133,117,200
a	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Badung dan Tabanan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	133,117,200	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Badung dan Tabanan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	133,117,200
2	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	270 Orang	337,455,000	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	270 Orang	337,455,000
a	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	9 Kab/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	270 Orang	337,455,000	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	9 Kab/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	270 Orang	337,455,000
VI	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang Sesuai Ketentuan KSAD	100 Persen	80,000,000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang Sesuai Ketentuan KSAD	100 Persen	80,000,000
1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen	80,000,000	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen	80,000,000
a	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Sulawesi tengah dan Sulawesi Tenggara	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	80,000,000	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Sulawesi tengah dan Sulawesi Tenggara	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	80,000,000
VII	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara		Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	61 Persen	350,000,000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara		Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	61 Persen	350,000,000

No.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen	350,000,000	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen	350,000,000
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	9 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	350,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	9 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	350,000,000
VIII	Program: Program Pengelolaan Aspek Kegeologian		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen	60,000,000	Program: Program Pengelolaan Aspek Kegeologian		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen	60,000,000
1	Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen	60,000,000	Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen	60,000,000
a	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	9 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	60,000,000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	9 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	60,000,000
IX	Program Pengelolaan Energi Terbarukan		Jumlah pemanfaatan EBT terhadap jumlah daya mampu eksisting	75 MW	190,000,000	Program Pengelolaan Energi Terbarukan		Jumlah pemanfaatan EBT terhadap jumlah daya mampu eksisting	75 MW	190,000,000
1	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi Terhadap Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan Oleh Daerah Provinsi		Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4.8 Persen	190,000,000	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi Terhadap Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan Oleh Daerah Provinsi		Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4.8 Persen	190,000,000
a	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	9 Kab/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	190,000,000	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	9 Kab/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	190,000,000

No.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA				2,003,526,112	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA				2,003,526,112
I	Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86.82	953,526,112	Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86.82	953,526,112
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	53,931,300	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	53,931,300
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,549,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,549,000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	8,390,300	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	8,390,300
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	13,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	13,000,000
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3,500,000
e	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	1,200,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	1,200,000
f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	24,292,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	24,292,000
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	265,338,080	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	265,338,080
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24,000,000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	241,338,080	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	241,338,080
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	413,463,132	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	413,463,132
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	84,250,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	84,250,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	45,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	45,000,000
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 unit	284,213,132	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 unit	284,213,132
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	220,793,600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	220,793,600
a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	192,793,600	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	192,793,600
b	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan	1 paket	28,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan	1 paket	28,000,000
II	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	75%	1,050,000,000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	75%	1,050,000,000
1	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	96 Orang	1,050,000,000	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	96 Orang	1,050,000,000
a	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Denpasar	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	96 Orang	950,000,000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Denpasar	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	96 Orang	950,000,000
b	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Denpasar	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	100,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Denpasar	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	100,000,000
	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA				1,620,733,436	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA				1,620,733,436
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86.82	1,185,683,436	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86.82	1,185,683,436
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	62,252,400	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	62,252,400

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	9,764,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	9,764,000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22,208,400	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22,208,400
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,500,000
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,780,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,780,000
e	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	9,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	9,000,000
2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	588,484,300	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	588,484,300
a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	588,484,300	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	588,484,300
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	115,839,896	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	115,839,896
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	102,839,896	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	102,839,896
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	419,106,840	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	419,106,840

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 UNIT	141,966,140	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 UNIT	141,966,140
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	257,140,700	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	257,140,700
II	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 Persen	435,050,000	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 Persen	435,050,000
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	90 perusahaan	435,050,000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	90 perusahaan	435,050,000
a	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	9 Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	90 perusahaan	435,050,000	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	9 Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	90 perusahaan	435,050,000
TOTAL					38,002,508,639					38,002,508,639

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	34 Persen	Untuk Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah
1	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	90 Orang	
a	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	90 Dokumen	
2	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		Jumlah Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	15 Perusahaan	
a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	9 Kab/Kota	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	
3	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	96 Orang	
a	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Denpasar	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	96 Orang	
b	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Denpasar	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	
II	Program Hubungan Industrial		Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	11.97 Persen	
1	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub	
a	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	9 Kab/Kota	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	
b	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	9 Kab/Kota	Jumlah Penetapan UMK	1 Surat Keputusan	
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 persen	
a	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	9 Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	30 Perkara	
III	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		Persentase Perusahaan yang Patuh Terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 persen	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	80 Perusahaan	
a.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	9 Kab/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	80 Perusahaan	
b	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	9 Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	90 perusahaan	
IV	Program: Penempatan Tenaga Kerja		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	34 Persen	
1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha	40 Orang	
a	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Badung dan Tabanan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	
2	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	270 Orang	
a	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	9 Kab/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	270 Orang	
V	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD	100 Persen	
1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen	
a	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Sulawesi tengah dan Sulawesi Tenggara	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	
VI	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara		Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	61 Persen	
1	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut		Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen	
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	9 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	
VII	Program: Program Pengelolaan Aspek Kegeologian		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen	
a	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	9 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	
VIII	Program Pengelolaan Energi Terbarukan		Jumlah pemanfaatan EBT terhadap jumlah daya mampu eksisting	75 MW	
1	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi Terhadap Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan Oleh Daerah Provinsi		Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4.8 Persen	
a	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	9 Kab/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Unit Organisasi : 2.07.3.29.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL					39,255,406,353				37,647,388,220
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39,115,022,053				36,899,388,220
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				39,115,022,053				36,899,388,220
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)		86.82 Nilai	31,927,606,353			86.84 Nilai	36,001,820,500
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu		100 Persen	28,567,230,040			100 Persen	31,423,953,000
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	140 Orang/ Bulan	28,567,230,040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140 Orang/ Bulan	31,423,953,000
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan		100 Persen	335,269,794			100 Persen	470,170,400
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	14,992,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	18,148,500
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2 Paket	41,179,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	64,068,600
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	69,683,994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	84,590,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	23,645,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	32,292,500
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Dokumen	8,614,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	9,900,000
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Laporan	10,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	6,600,000
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Laporan	167,104,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	254,570,800
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		100 Persen	67,487,000			100 Persen	582,933,300
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	4 Unit	67,487,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Unit	582,933,300
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		100 Persen	1,013,444,423			100 Persen	1,246,048,500
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Laporan	2,873,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2,200,000
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3 Laporan	384,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	528,000,000
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Laporan	626,571,323	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	715,848,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai		100 Persen	1,944,175,096			100 Persen	2,278,715,300
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	13 Unit	685,810,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	883,050,700
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Unit	185,728,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	193,005,700
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	72 Unit	1,072,635,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72 Unit	1,202,658,900
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi		34 Persen	30,997,600			34 Persen	105,101,000
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi		30 Orang	30,997,600			30 Orang	105,101,000
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	30 Dokumen	30,997,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	105,101,000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		34 Persen	102,977,100			36 Persen	517,629,420
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha		20 Orang	66,663,300			145 Orang	146,428,920
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bangli, Susut, Abuan	20 Orang	66,663,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		145 Orang	146,428,920

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		270 Orang	36,313,800			275 Orang	371,200,500
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 Orang	36,313,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		275 Orang	371,200,500
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan		11.97 Persen	7,033,141,000			13,49 Persen	230,663,400
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan		100 Persen	5,566,000			100 Persen	49,988,400
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Perkara	5,566,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Perkara	49,988,400
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan		2 Kep Gub	7,027,575,000			2 Kep Gub	180,675,000
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Surat Keputusan	25,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Surat Keputusan	165,825,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Surat Keputusan	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Surat Keputusan	14,850,000
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32273 Orang	7,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos		100 Persen	20,300,000			100 Persen	44,173,900
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja		40 Perusahaan	20,300,000			186 Perusahaan	44,173,900
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Perusahaan	20,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		186 Perusahaan	44,173,900
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				115,499,500				660,000,000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				115,499,500				660,000,000
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan		65.00 Persen	8,000,000			67.50 Persen	66,000,000
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan		65.00 Persen	8,000,000			67.50 Persen	66,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	66,000,000
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan		61.00 Persen	12,500,000			64 persen	385,000,000
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan		15 Dokumen	12,500,000			15 Dokumen	385,000,000
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	385,000,000
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan		75 MW	94,999,500			89 MW	209,000,000
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah		4.8 Persen	94,999,500				209,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	94,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	209,000,000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				24,884,800				88,000,000
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD		100 Persen	24,884,800			100 Persen	88,000,000
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target		100 Persen	24,884,800			100 Persen	88,000,000
3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	24,884,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Lokasi	88,000,000
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA				952,109,407				1,881,805,733
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				952,109,407				1,881,805,733
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				952,109,407				1,881,805,733
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)		86.82 Nilai	695,759,407			86.84 Nilai	836,805,733
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan		100 Persen	36,754,194			100 Persen	59,324,400
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	3,252,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	3,903,900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	6,117,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	9,229,300
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	12 Paket	12,899,394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	14,300,000
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2 Paket	986,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	3,850,000
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2 Laporan	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	1,320,000
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	4 Laporan	12,298,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	26,721,200
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		100 Persen	28,000,000			100 Persen	30,800,000
2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Unit	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	30,800,000
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		100 Persen	224,728,560			100 Persen	291,871,888
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	12 Laporan	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	26,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	12 Laporan	200,728,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	265,471,888
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai		100 Persen	406,276,653			100 Persen	454,809,445
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2 Unit	80,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	92,675,000
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3 Unit	35,131,673	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	49,500,000
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	38 Unit	290,374,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 Unit	312,634,445
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		75 Persen	256,350,000			80 Persen	1,045,000,000
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi		32 Orang	256,350,000			160 Orang	1,045,000,000
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	32 Orang	256,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160 Orang	1,045,000,000
	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA				974,327,800				1,125,574,085
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				974,327,800				1,125,574,085
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				974,327,800				1,125,574,085

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)		86.82 Nilai	558,477,750			86.82 Nilai	647,019,085
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan		100 Persen	30,704,974			100 Persen	58,577,600
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	4,980,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	10,740,400
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	7,896,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	24,429,200
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	14,944,274	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	18,150,000
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Paket	2,884,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5,258,000
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		100 Persen	115,797,596			100 Persen	127,423,885
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Laporan	957,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,100,000
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Laporan	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	13,200,000
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Laporan	102,839,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	113,123,885
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai		100 Persen	411,975,180			100 Persen	461,017,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3 Unit	127,182,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	156,162,800
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1 Unit	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	22,000,000
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	35 Unit	269,793,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Unit	282,854,800
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3		100 Persen	415,850,050			100 Persen	478,555,000
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku		90 Perusahaan	415,850,050			100 perusahaan	478,555,000
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Perusahaan	415,850,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 perusahaan	478,555,000
					41,181,843,560				40,654,768,038



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS KEHUTANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI BALI**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puja Pangastuti dan Angayu Bagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha Nya, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali disusun berdasarkan Pasal 363 s.d. pasal 366 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2594 Tahun 2025 tentang Penyampaian Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan urusan kehutanan dan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Bali melalui program kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat menjadi perbaikan berkelanjutan di periode mendatang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
Provinsi Bali,



Dr. Drs. I Made Rentin, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19730116 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025.....	8
A. Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025	8
B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
D. Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD	34
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	36
B. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	38
BAB IV PENUTUP	44
A. Catatan Penting	44
B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	44
C. Rencana Tindak Lanjut.....	44
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel 2.2. Capaian Indikator Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025.....	9
Tabel 2.3. Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025.....	19
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025	37
Tabel 3.2. Sasaran Strategis dan Kebijakan Program Tahun 2025.....	37
Tabel 3.3. Program Strategis Tahun 2025	38
Tabel 3.4. Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2025	40
Tabel 3.5. Rencana Perubahan Pendanaan Tahun 2025.....	42
Tabel 3.6. Rencana Perubahan Pendapatan Tahun 2025.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

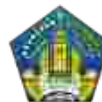
Provinsi Bali memiliki luas yaitu 5.780,66 km². Berdasarkan publikasi BPS Provinsi Bali, jumlah penduduk Provinsi Bali yaitu 4.433,3 ribu jiwa. Secara administrasi Provinsi Bali terbagi menjadi 8 Kabupaten dan 1 Kota, 57 Kecamatan, 716 Desa/Kelurahan, 1.493 Desa Pakraman.

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di Provinsi Bali berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2024 sebesar 1.323.279,66 ton/tahun. Pengurangan sampah mencapai 200.679,99 ton/tahun (15,17%) melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan daur ulang sampah di TPS 3R dan TPST dan penanganan sampah mencapai 707.886,11 ton/tahun (53,49%).

Di Provinsi Bali memiliki 294 TPS3R yang telah mengelola sampahnya di tingkat Desa/Desa Adat serta berperan dalam pengurangan jumlah sampah yang diangkut menuju TPA (Denpasar 26 unit, Badung 39 unit, Gianyar 45 unit, Tabanan 43 unit, Klungkung 40 unit, Karangasem 18 unit, Buleleng 53 unit, Jembrana 16 unit dan Bangli 14 unit).

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Bali, terjadi peningkatan setiap tahun. Tahun 2019 IKLH sebesar 63,09, Tahun 2020 sebesar 71,98, Tahun 2021 sebesar 70,70, Tahun 2022 sebesar 70,89, Tahun 2023 sebesar 71,38 dan Tahun 2024 sebesar 75,02.

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8103/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, kawasan hutan di Bali seluas 131.171,47 ha (Tabel 2.1.), yang terdiri dari HL seluas 96.687,86 ha (73,71%), HP seluas 2.013,07 ha (1,53%), HPT seluas 6.904,37 ha (5,22%), dan HPK seluas 169,85 ha (0,13%), Tahura seluas 1.158,08 ha (0,88%), TN Bali Barat (TNBB) seluas 19.026,97 ha (14,5%), TWA seluas 4.461,3 ha (3,4%), dan CA seluas 1.749,97 ha (1,33%). Potensi hutan dengan berbagai fungsi ini telah memberikan kontribusi yang besar, baik pada aspek ekonomi



maupun lingkungan yang terkait dengan penyerapan dan emisi karbon. Potensi kawasan hutan di Bali sebesar 73,71% merupakan hutan lindung yang memiliki fungsi untuk perlindungan tata air dan tanah serta sebagai pendukung kehidupan flora dan fauna. Fungsi lainnya adalah sebagai pendukung pariwisata (ekowisata), budidaya, kesehatan, pendidikan, dan penelitian.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, bahwa di Provinsi Bali telah memiliki 137 Perhutanan Sosial tersebar di KPH se-Bali terdiri dari Hutan Desa (HD) 55 unit, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 49 unit, Hutan Adat (HA) 6 unit, Kemitraan 26 unit dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 1 unit. Luas keseluruhan Perhutanan Sosial 27.240,30 Ha, dengan jumlah KK terdampak 92.724 KK.

Berdasarkan Pasal 352 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1641 Tahun 2025 tentang Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 Sebagai Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2025.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

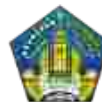


tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Tahura dan Taman Wisata Alam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Kenakeragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola;
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perintisan Pengembangan Generasi Lingkungan;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043;
34. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru;
35. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
37. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
38. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
39. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;
40. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender;
41. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
42. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
43. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
44. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

45. Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;
46. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja yaitu sebagai hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, perlu adanya penyesuaian dalam optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025, serta pemenuhan target dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dalam mengimplementasikan program/kegiatan pembangunan di urusan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2025.

D. Sistematika

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025

- A. Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025
- B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



D. Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

B. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Penutup

A. Catatan penting

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

C. Rencana tindak lanjut



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

TRIWULAN I TAHUN 2025

A. Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, Nomor DPA/A.1/3.28.2.11.0.00.01.000/001/2025, Tanggal 2 Januari 2025, alokasi anggaran pendapatan sebesar Rp1.210.800.000,00 dan alokasi belanja sebesar Rp60.984.144.527,00. Menunjuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan tindaklanjut sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1526 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Efisiensi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, sehingga mengalami Pergeseran Anggaran pada APBD-Pergeseran pada Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, Nomor DPPA/A.2/3.28.2.11.0.00.01.0000/001/2025, Tanggal 25 Maret 2025, alokasi belanja menjadi sebesar Rp59.945.206.756,00. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

NO	KETERANGAN	ANGGARAN		REALISASI s.d. TRIWULAN I 2025	
		INDUK	PERGESERAN	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)		
I	Pendapatan Asli Daerah	1.219.380.000	1.219.380.000	9.161.280	0,75
1	Retribusi Daerah	27.780.000	27.780.000	9.144.000	32,92
2	Lain-lain PAD yang Sah	1.191.600.000	1.191.600.000	17.280	0,00
II	Belanja Daerah	60.984.144.527	59.945.206.756	11.362.885.557	18,96
1	Belanja Operasi	58.041.529.027	57.898.975.256	11.362.885.557	19,63
	a. Belanja Pegawai	39.982.439.046	39.982.439.046	7.907.018.437	19,78
	b. Belanja Barang & Jasa	18.059.089.981	17.916.536.210	3.455.867.120	19,29
2	Belanja Modal	2.942.615.500	2.046.231.500	0	0,00
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	217.615.500	1.284.771.500	0	0,00
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	206.460.000	0	0,00
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.725.000.000	555.000.000	0	0,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 18,96% atau Rp11.362.885.557,00 dari pagu anggaran pergeseran sebesar Rp59.945.206.756,00. Sedangkan realisasi pendapatan Triwulan I Tahun 2025 yaitu Rp9.161.280,00 atau 0,75% dari target pendapatan sebesar Rp1.219.380.000,00. Jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 21 (dua puluh satu) program, 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) sub kegiatan.

Hasil evaluasi capaian sasaran strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

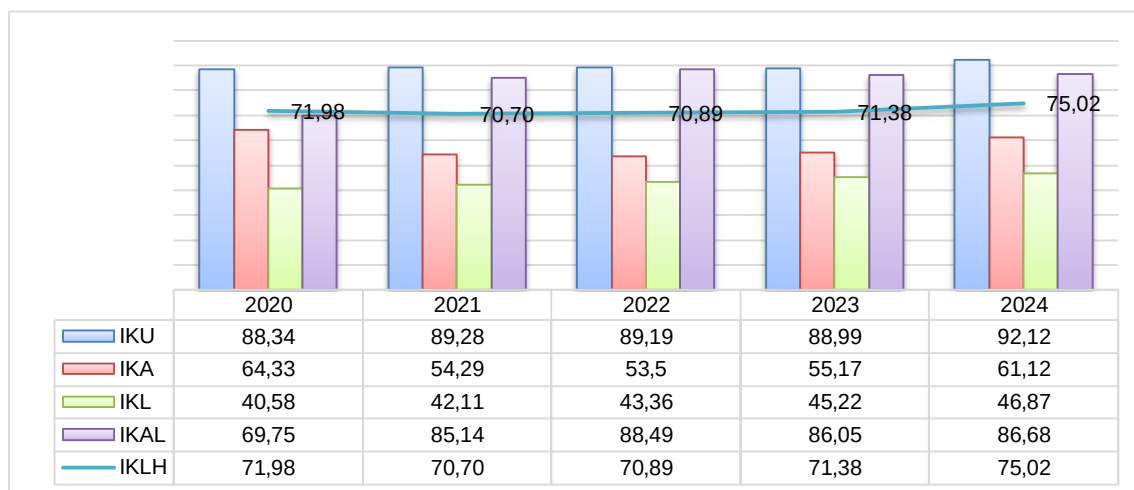
Tabel 2.2. Capaian Indikator Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN		SATUAN	TARGET	TAHUN 2025	
	URAIAN	INDIKATOR			REALISASI s.d. TRIWULAN I 2025	CAPAIAN (%)
Terwujudnya kualitas lingkungan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,19	-	-



TUJUAN	SASARAN		SATUAN	TAHUN 2025		
	URAIAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI s.d. TRIWULAN I 2025	CAPAIAN (%)
hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan	2 Meningkatnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Persentase Tutupan Lahan	Persen	73,71	73,71	100

Capaian Triwulan I Tahun 2025 pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum dapat diukur karena masih dalam tahap pemantauan dan perhitungan komponen. Sedangkan capaian indikator Persentase Tutupan Lahan dihitung berdasarkan luas kawasan hutan lindung di Provinsi Bali yaitu 96.687,86 Hektar (73,71%) dari luas kawasan hutan yaitu 131.171,47 Hektar.



Gambar 2.1. Capaian IKLH Provinsi Bali

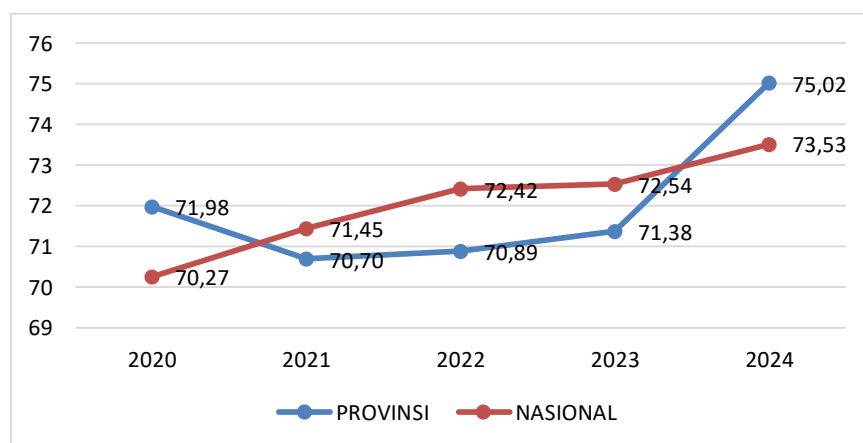
Capaian IKLH Provinsi Bali Tahun 2024 yaitu 75,02 mengalami peningkatan 11,36 poin dibanding Tahun 2023 yaitu 71,38. Peningkatan capaian IKLH ini disebabkan adanya perubahan perhitungan komponen IKLH oleh Kementerian LHK yang saat ini menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Dari komponen IKLH Tahun 2024 mengalami peningkatan capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dibanding dengan Tahun 2023. Namun terdapat komponen yang



capaiannya di bawah target tahun 2024 yaitu pada komponen Indeks Kualitas Air (IKA). Data hasil pengukuran pemantauan kualitas air diperoleh hasil Status Mutu Air pada aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), berdasarkan kelas air badan air Kelas 2 (merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut) yaitu pada Tukad Jinah diperoleh hasil status mutu air memenuhi baku mutu saat periode pemantauan I dan cemar ringan saat periode pemantauan II hal disebabkan karena pada saat dilakukan pemantauan tahap I di Tukad Jinah masih dalam kondisi musim hujan yang mengakibatkan terjadinya pengenceran terhadap air sungai yang berpotensi menurunkan konsentrasi pencemar kualitas air di sungai. Sedangkan pada Tukad Melangit dan Tukad Unda memperoleh hasil cemar ringan.

Perbandingan capaian IKLH Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 2.2. Capaian IKLH Provinsi Bali dan Nasional

Berdasarkan grafik di atas, capaian IKLH Provinsi Bali Tahun 2024 yaitu 75,02 lebih tinggi 1,49 poin dibanding capaian IKLH Nasional yaitu 73,53. Namun berdasarkan komponen IKLH antara lain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), masih terdapat komponen yang berada di bawah capaian nasional yaitu komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan selisih 15,08 poin. Hal ini disebabkan karena Provinsi Bali memiliki luas daratan yang



relatif terbatas dibanding daerah lain, hal ini juga mempengaruhi keterbatasan proses pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, seiring dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali. Namun Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan upaya perlindungan hutan dan lahan, gerakan penanaman di seluruh wilayah KPH se-Bali serta melaksanakan kolaborasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta *stakeholder* terkait lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2025-2045, Nomor BA-17/SETPPKL/ PEHKT/REN.2.4/B/04/2024, Tanggal 24 April 2024, target IKLH Provinsi Bali yaitu 76,19.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

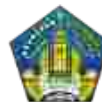
Indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Persentase Penurunan Emisi GRK, dengan target 63,10; 88,65; 69,95; 13,26%. Sub kegiatan yang mendukung antara lain:

a). Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

- Pemantauan Kualitas Air Sungai.

Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan laut tersebut bertujuan untuk mengetahui konsentrasi pencemar di sungai dan laut di Provinsi Bali. Dilaksanakan dengan pengambilan parameter air pada 3 sungai yakni Tukad Jinah, Tukad Unda dan Tukad Melangit masing-masing sebanyak di 3 titik pengambilan sampel (titik hulu, tengah dan hilir) sebanyak 2 kali dalam setahun yang mewakili musim hujan dan musim kemarau, dengan parameter yang dipantau meliputi: *pH*, *TSS*, *BOD*, *COD*, *DO* *Nitrat*, *Total Fosfat*, dan *Fecal Coliform*.

- Pemantauan Kualitas Air Laut.



Pemantauan kualitas air laut dilaksanakan sekali dalam setahun yang dipantau oleh KLHK.

- Pembahasan dan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan baku Mutu Air Limbah dan Emisi.

Sesuai kewenangannya, DKLH Provinsi Bali berkewajiban untuk menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Emisi.

- Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode *Passive Sampler* oleh KLHK. Pemasangan alat pemantau kualitas udara *ambien passive sampler* di 9 Kabupaten/Kota se-Bali yang mewakili kawasan industri, perkantoran, pemukiman, dan kawasan padat transportasi. Parameter yang dipantau dalam pengujian kualitas udara *passive sampler* ini antara lain parameter NO₂ dan SO₂.
- Pemantauan Kualitas Udara dengan *Air Quality Monitoring System (AQMS)*. Pemantauan dipasang di Pusat Pemerintahan Kota Denpasar (Lumintang). Parameter yang dipantau meliputi: *Partikulat (PM₁₀ dan PM_{2.5})*, *Karbon Monoksida (CO)*, *Sulfur Dioksida (SO₂)*, *Nitrogen Dioksida (NO₂)*, *Ozon (O₃)*, dan *Hidrokarbon (HC)*.

b). Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan.

- Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi/lembaga terkait dengan rencana pelaksanaan inventarisasi data sumber emisi gas rumah kaca dan Program Kampung Iklim (ProKlim).
- Pelaksanaan inventarisasi data sumber emisi gas rumah kaca meliputi pengumpulan data, penginputan data ke *platform* SIGNSMART, verifikasi, analisis, dan evaluasi data Inventarisasi Emisi GRK.

Pengumpulan data meliputi sektor energi, IPPU, lahan, limbah, pertanian dan peternakan.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kegiatan verifikasi lapangan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang bekerja sama dengan Balai Pengendalian Perubahan



Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara untuk melaksanakan verifikasi lapangan.

c). Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

- Rencana 1 dokumen pengambilan contoh uji parameter kualitas lingkungan.
- Pengembangan personil UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup melalui keikutsertaan dalam pelatihan/bimbingan teknis/webinar.
- Proses pelaksanaan tahapan akreditasi laboratorium lingkungan hidup.

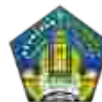
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik dengan target sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung antara lain:

- a). Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, dengan rencana 1 dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).
- b). Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS, dengan rencana kinerja sebanyak 1 dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dipantau dan dievaluasi.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan dengan target sebesar 70%. Sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan target kinerja jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sebanyak 10 badan usaha, pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.



4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

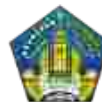
Indikator kinerja Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yaitu persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target sebesar 35%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan target kinerja jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH sebanyak 20 entitas, melalui kegiatan Adiwiyata dan Kalpataru.

5. Program Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indikator kinerja Program Keanekaragaman Hayati (Kehati) yaitu persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan target sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman hayati di Provinsi Bali terdiri dari 12 tipe ekosistem alami dan beberapa ekosistem buatan. Setiap ekosistem tersusun atas spesies-spesies yang telah teradaptasi dengan lingkungan tersebut, sehingga membentuk pola keanekaragaman yang khas dengan berbagai macam pemanfaatan. Secara umum, pemanfaatan keanekaragaman spesies dapat digunakan sebagai sumber pangan, bahan konstruksi, maupun sebagai bahan obat. Secara ekonomi, banyak spesies liar yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bahan rempah dan obat tradisional, sehingga telah dilakukan proses budidaya untuk menjaga keanekaragaman genetiknya.

6. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3

Indikator kinerja Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 yaitu persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3 sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan

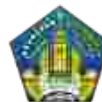


Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha. Pelaksanaan monitoring evaluasi pengelolaan B3 dan limbah B3 di 9 Kab/Kota.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yaitu persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan target sebesar 30%; 70%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

- Melaksanakan percepatan mendukung Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Gerakan Bali Bersih Sampah.
- Fasilitasi, pendampingan, sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah berbasis sumber, pengurangan sampah plastik sekali pakai melalui Percepatan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) – Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (Padas),
- Memantapkan budaya hidup bersih kepada seluruh elemen masyarakat, melalui Gerakan Bersih Sampah Sepanjang Pantai dan melaksanakan pemantauan kebersihan serta mengedukasi pemedek untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong kresek, pipet dan *styrofoam*) di Pura Besakih.
- Melaksanakan pemantauan kebersihan pada area Pusat Kebudayaan Bali (PKB).
- Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan kegiatan pemilahan sampah dan pengangkutan terpilah dan terjadwal.
- Mendorong optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber dan pemanfaatan fasilitas TPS3R dan TPST di Kabupaten/Kota untuk mengurangi pengangkutan sampah ke TPA.
- Merencanakan optimalisasi pengolahan sampah berbasis teknologi dengan penerapan *Waste to Energy* / Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk mengolah sampah residu dan atau sampah yang tidak mampu ditangani



secara konvensional. Koordinasi telah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ESDM.

8. Program Pengelolaan Persampahan

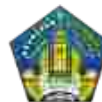
Indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan yaitu persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional dengan target sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional dengan target 1 unit jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik.

- Melaksanakan operasional TPA.
- Penataan dan pemadatan TPA.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi operasional TPA.
- Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan TPA.

9. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Indikator kinerja Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Indeks Kualitas Lahan 42,16 dan persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dengan target sebesar 6,82%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS, dengan target kinerja jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS sebanyak 1 dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS.

- Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan penanaman pohon.
- Penyerahan bantuan bibit melalui Tim Penggerak PKK Provinsi Bali di Desa/Desa Adat se-Bali.
- Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.
- Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
- Monitoring Perhutanan Sosial.



10. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Indikator kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu persentase peningkatan kelas kelompok dengan target sebesar 4,23%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, dengan realisasi kinerja jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas sebanyak 25 orang.

- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan

Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan melalui bimbingan teknis serta rapat koordinasi kepada 25 orang penyuluh kehutanan, yang rencana dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun.

- Fasilitasi kenaikan kelas kelompok menuju Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dengan melaksanakan pendampingan KTH.

11. Program Pengelolaan Hutan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Hutan yaitu persentase penurunan kerusakan kawasan hutan dengan target sebesar 3,16%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan, dengan target kinerja 1 laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan dalam rangka penanganan kasus *illegal logging* dilaksanakan di wilayah UPTD KPH se-Bal dan fasilitasi pendampingan tata batas kawasan hutan.

12. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja Program Pengelolaan Hutan yaitu persentase Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan dengan target sebesar 100%. Sub kegiatan yang mendukung yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi, dengan target kinerja 1 dokumen verifikasi pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.



Tabel 2.3. Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025

NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
DINAS											
1	3.28.01.1.01.0001-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.694.200,00	9.700.000,00	67,43	61,02	(6,41)	67,43	25,73	(41,70)	27.994.200,00	-
2	3.26.01.1.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.168.919.046,00	7.936.918.437,00	35,66	35,66	-	35,66	19,76	(15,90)	32.232.000.609,00	-
3	3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.479.800,00	2.510.000,00	39,78	22,67	(17,11)	39,78	6,88	(32,90)	33.969.800,00	Efisiensi perjadin
4	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.097.000,00	-	100,00	-	(100,00)	100,00	-	(100,00)	17.097.000,00	-
5	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.975.000,00	2.382.000,00	73,23	36,83	(36,41)	73,23	4,97	(68,27)	45.593.000,00	-
6	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.000.000,00	8.431.900,00	12,53	12,53	-	12,53	8,69	(3,84)	88.568.100,00	-
7	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.350.000,00	4.500.000,00	85,51	85,51	-	85,51	43,48	(42,03)	5.850.000,00	-
8	3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.500.000,00	1.050.000,00	20,00	20,00	-	20,00	5,38	(14,62)	18.450.000,00	-
9	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat	294.640.000,00	13.430.150,00	29,33	7,49	(21,84)	29,33	4,56	(24,77)	281.209.850,00	Efisiensi perjadin



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
10	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.560.000,00	46.231.625,00	24,99	24,99	-	24,99	23,52	(1,47)	150.328.375,00	-
11	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.283.344,00	78.389.410,00	64,55	63,93	(0,62)	64,55	18,97	(45,58)	334.893.934,00	-
12	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	840.290.360,00	312.225.910,00	46,53	44,26	(2,27)	46,53	37,16	(9,37)	528.064.450,00	-
13	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	472.289.248,00	90.132.984,00	34,43	27,36	(7,08)	34,43	19,08	(15,35)	382.156.264,00	-
14	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	101.639.800,00	-	0,46	24,77	24,31	0,46	-	(0,46)	101.639.800,00	Efisiensi perjadi
15	2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	84.782.820,00	15.022.164,00	32,44	23,79	(8,65)	32,44	17,72	(14,72)	69.760.656,00	Efisiensi perjadi
16	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan PencemaranLingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.333.600,00	-	3,58	3,58	-	3,58	-	(3,58)	70.333.600,00	Efisiensi perjadi



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
17	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.080.000,00	-	30,16	11,70	(18,45)	30,16	-	(30,16)	25.080.000,00	Efisiensi perjadin
18	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	40.041.000,00	300.000,00	23,03	1,08	(21,95)	23,03	0,75	(22,28)	39.741.000,00	Efisiensi perjadin
19	2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.816.300,00	-	19,08	4,68	(14,40)	19,08	-	(19,08)	37.816.300,00	Efisiensi perjadin
20	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.399.700,00	-	7,27	4,46	(2,81)	7,27	-	(7,27)	10.399.700,00	Efisiensi perjadin
21	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.083.910.230,00	24.173.246,00	3,45	2,96	(0,49)	3,45	2,23	(1,22)	1.059.736.984,00	Efisiensi perjadin



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
22	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34.399.700,00	-	32,61	11,89	(20,72)	32,61	-	(32,61)	34.399.700,00	Efisiensi perjadi
23	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	10.394.300,00	-	7,64	5,52	(2,12)	7,64	-	(7,64)	10.394.300,00	Efisiensi perjadi
24	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	152.398.230,00	28.653.240,00	30,09	21,83	(8,26)	30,09	18,80	(11,28)	123.744.990,00	Efisiensi perjadi
25	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	16.520.500,00	-	7,93	4,45	(3,49)	7,93	-	(7,93)	16.520.500,00	Efisiensi perjadi
26	3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	64.074.810,00	11.831.082,00	31,73	23,26	(8,47)	31,73	18,46	(13,26)	52.243.728,00	Efisiensi perjadi
UPTD KPH BALI BARAT											
27	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.137.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.137.000,00	-



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
28	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.811.900,00	750.000,00	100,00	10,89	(89,11)	100,00	6,94	(93,06)	10.061.900,00	-
29	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.000.000,00	2.257.500,00	6,65	6,65	-	6,65	6,64	(0,01)	31.742.500,00	-
30	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.502.800,00	-	56,26	-	(56,26)	56,26	-	(56,26)	2.502.800,00	-
31	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.960.000,00	1.920.000,00	29,63	25,00	(4,63)	29,63	14,81	(14,81)	11.040.000,00	-
32	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.940.000,00	5.595.940,00	25,00	25,00	-	25,00	23,37	(1,63)	18.344.060,00	-
33	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.379.792,00	7.511.082,00	16,92	16,92	-	16,92	16,92	-	36.868.710,00	-
34	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.425.000,00	-	11,50	-	(11,50)	11,50	-	(11,50)	123.425.000,00	-
35	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.382.984,00	15.022.164,00	17,39	17,39	-	17,39	17,39	-	71.360.820,00	-
UPTD KPH BALI SELATAN											



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
36	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.373.700,00	1.059.000,00	100,00	100,00	-	100,00	77,09	(22,91)	314.700,00	-
37	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.355.700,00	8.835.200,00	100,00	100,00	-	100,00	77,80	(22,20)	2.520.500,00	-
38	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-
39	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.707.300,00	-	100,00	-	(100,00)	100,00	-	(100,00)	1.707.300,00	-
40	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.560.000,00	3.840.000,00	36,36	36,36	(0,00)	36,36	36,36	-	6.720.000,00	-
41	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	1.428.630,00	25,01	25,01	-	25,01	17,86	(7,15)	6.571.370,00	-
42	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.397.312,00	25.162.246,00	23,33	23,33	-	23,33	22,79	(0,54)	85.235.066,00	-
43	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.154.492,00	125.788.482,00	60,85	60,85	-	60,85	56,37	(4,49)	97.366.010,00	-
44	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	9.990.000,00	2.260.000,00	39,64	25,23	(14,41)	39,64	22,62	(17,02)	7.730.000,00	-



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
UPTD KPH BALI TIMUR											
45	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.129.800,00	-	100,00	-	(100,00)	100,00	-	(100,00)	3.129.800,00	-
46	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.443.900,00	400.000,00	100,00	100,00	-	100,00	2,98	(97,02)	13.043.900,00	-
47	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.000.000,00	1.954.000,00	41,70	41,70	-	41,70	5,28	(36,42)	35.046.000,00	-
48	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.698.100,00	-	47,48	47,48	(0,00)	47,48	-	(47,48)	3.698.100,00	-
49	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.050.000,00	4.123.355,00	28,47	28,47	-	28,47	22,84	(5,62)	13.926.645,00	-
50	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.434.092,00	7.511.082,00	34,06	24,23	(9,83)	34,06	16,90	(17,16)	36.923.010,00	-
51	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.554.597,00	176.796.056,00	45,26	42,65	(2,61)	45,26	36,19	(9,07)	311.758.541,00	-
52	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi	7.140.000,00	-	39,78	-	(39,78)	39,78	-	(39,78)	7.140.000,00	-



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
UPTD KPH BALI UTARA											
53	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.205.900,00	-	100,00	-	(100,00)	100,00	-	(100,00)	3.205.900,00	-
54	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.025.900,00	6.188.000,00	100,00	68,54	(31,46)	100,00	61,72	(38,28)	3.837.900,00	-
55	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.650.000,00	1.568.800,00	7,65	7,65	-	7,65	4,53	(3,12)	33.081.200,00	-
56	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.920.000,00	-	41,38	27,59	(13,79)	41,38	-	(41,38)	13.920.000,00	-
57	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.500.000,00	6.277.776,00	27,14	27,14	-	27,14	19,93	(7,21)	25.222.224,00	-
58	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.753.592,00	7.511.082,00	33,03	24,61	(8,43)	33,03	17,17	(15,87)	36.242.510,00	-
59	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.705.410,00	60.836.982,00	42,83	42,83	-	42,83	40,64	(2,19)	88.868.428,00	-



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
60	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	657.084.954,00	127.688.394,00	29,49	29,49	-	29,49	19,43	(10,06)	529.396.560,00	-
UPTD TAHURA NGURAH RAI											
61	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.530.500,00	1.802.000,00	100,00	100,00	-	100,00	71,21	(28,79)	728.500,00	-
62	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.920.800,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	(100,00)	6.920.800,00	-
63	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	3.427.000,00	25,00	25,00	-	25,00	22,85	(2,15)	11.573.000,00	-
64	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Efisiensi anggaran
65	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.000.000,00	47.016.800,00	25,00	25,00	-	25,00	14,51	(10,49)	276.983.200,00	-
66	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.354.292,00	40.186.330,00	87,96	86,93	(1,03)	87,96	16,51	(71,45)	203.167.962,00	-
67	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.130.000,00	53.472.700,00	60,54	58,31	(2,23)	60,54	47,69	(12,85)	58.657.300,00	-



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
68	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.823.635,00	92.621.696,00	72,09	68,09	(4,00)	72,09	15,42	(56,67)	508.201.939,00	Efisiensi anggaran
69	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.970.000,00	-	17,96	17,96	-	17,96	-	(17,96)	11.970.000,00	-
UPTD LABORATORIUM LH											
70	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.866.500,00	200.000,00	100,00	6,45	(93,55)	100,00	4,11	(95,89)	4.666.500,00	-
71	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	935.500,00	-	-	-	-	-	-	-	935.500,00	-
72	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.914.540,00	-	85,82	42,91	(42,91)	85,82	-	(85,82)	31.914.540,00	-
73	2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.970.820,00	15.022.164,00	37,29	21,98	(15,31)	37,29	15,33	(21,96)	82.948.656,00	-
74	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	235.876.092,00	5.000.000,00	28,98	14,59	(14,39)	28,98	2,12	(26,86)	230.876.092,00	Efisiensi perjadi
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH											



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
75	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.229.000,00	4.550.000,00	100,00	100,00	-	100,00	87,01	(12,99)	679.000,00	-
76	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.701.300,00	-	44,69	44,69	-	44,69	-	(44,69)	11.701.300,00	-
77	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000,00	3.932.100,00	13,12	13,12	-	13,12	9,36	(3,76)	38.067.900,00	-
78	2.11.01.1.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.917.000,00	990.000,00	67,23	67,23	-	67,23	25,27	(41,96)	2.927.000,00	-
79	2.11.01.1.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.250.000,00	-	20,00	5,00	(15,00)	20,00	-	(20,00)	2.250.000,00	-
80	2.11.01.1.09.0002 Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaaa, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.930.974,00	96.515.310,00	31,50	32,07	0,57	31,50	29,16	(2,34)	234.415.664,00	-
81	2.11.01.1.09.0011 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.270.000,00	-	5,15	8,46	3,31	5,15	-	(5,15)	118.270.000,00	-
82	2.11.11.1.01.0003 Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	11.056.372.590,00	1.809.981.538,00	16,61	16,53	(0,08)	16,61	16,37	(0,24)	9.246.391.052,00	Efisiensi perjadin



NO	SUB KEGIATAN	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	PERSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN/ UPAYA PEMECAHANNYA/ KETERANGAN LAINNYA
				FISIK			KEUANGAN				
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
	JUMLAH	59.945.206.756,00	11.362.885.557,00	32,22	31,62	(0,60)	32,22	18,96	(13,26)	48.582.321.199,00	



B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program/kegiatan urusan lingkungan hidup dan kehutanan hingga Triwulan I Tahun 2025 memiliki permasalahan antara lain yaitu:

a) Urusan Kehutanan

- 1) Masih perlunya koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut dengan UPT Kementerian dalam rangka mendukung dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan kehutanan.
- 2) Terdapat kerjasama kawasan hutan yang masih perlu dilakukan pengawasan dan peninjauan kembali.

b) Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di sumber belum optimal, fasilitas pengelolaan sampah di sumber belum bisa mengolah seluruh sampah di masing-masing desa.
- 2) Belum semua desa memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah yang memadai seperti: kendaraan angkut sampah yang sudah tua dan rusak, fasilitas TPS3R dan Bank Sampah masih sedikit dan sebagian tidak beroperasi dengan baik.
- 3) Pengangkutan sampah belum terjadwal berdasarkan sampah yang terpilah di rumah tangga.
- 4) Sebagian masyarakat sudah memilah tetapi dalam proses pengangkutan sampahnya tercampur kembali.
- 5) Masih banyaknya Desa/Kelurahan dan Desa Adat yang belum menyusun peraturan desa/perarem.
- 6) Masih adanya temuan Pengawasan Lingkungan Hidup Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah di TPA Suwung.



Solusi pemecahan permasalahan urusan kehutanan dan lingkungan hidup yaitu:

a) Urusan Kehutanan

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut dengan UPT Kementerian dalam rangka mendukung dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan kehutanan.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama kawasan hutan.

b) Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Menyusun Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
- 2) Membentuk Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Plastik Sekali Pakai.
- 3) Melaksanakan pembahasan bersama Tim Percepatan.
- 4) Melakukan pendampingan ke masyarakat/desa dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pendampingan ini bisa berupa pelatihan, pembinaan, edukasi, sosialisasi.
- 5) Mendorong Pengelolaan Sampah Berbasis Desa melalui pendampingan kepada Desa Adat dalam menyusun pararem tentang pengelolaan sampah serta pelaksanaannya berkoordinasi dengan DPMA dan MDA Kab/Kota.
- 6) Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan Pengawasan Lingkungan Hidup Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH dengan melakukan pergeseran anggaran dan penyelesaian teknis.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis urusan kehutanan dan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Air (IKA) masih di bawah target berarti masih terjadinya pencemaran air yang berasal dari pelaksanaan pembuangan air limbah dunia usaha ke badan air serta pembuangan air limbah domestik, dengan status sungai cemar ringan, sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) telah melampaui target. Capaian IKLH Provinsi Bali



maish lebih tinggi 1,49 poin dibanding capaian IKLH Nasional, namun berdasarkan komponen IKLH, masih terdapat komponen yang berada di bawah capaian nasional yaitu komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan selisih 15,08 poin. Hal ini disebabkan karena Provinsi Bali memiliki luas daratan yang relatif terbatas dibanding daerah lain, hal ini juga mempengaruhi keterbatasan proses pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, seiring dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali. Namun Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan upaya perlindungan hutan dan lahan, gerakan penanaman di seluruh wilayah KPH se-Bali serta melaksanakan kolaborasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta *stakeholder* terkait lainnya, guna menambah fungsi kawasan hutan.

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah berbasis sumber belum sepenuhnya dilaksanakan karena kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di sumber belum optimal, belum semua Desa/Kelurahan dan Desa Adat memiliki TPS 3R dan TPST, fasilitas pengelolaan sampah di sumber belum bisa mengolah seluruh sampah di masing-masing desa, belum semua desa memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah yang memadai seperti: kendaraan angkut sampah yang sudah tua dan rusak, fasilitas TPS3R dan Bank Sampah masih sedikit dan sebagian tidak beroperasi dengan baik, pengangkutan sampah belum terjadwal berdasarkan sampah yang terpilah di rumah tangga, sehingga TPA Sarbagita dan TPA Kabupaten/Kota sebagian besar sudah overload. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan sampah plastik sekali pakai telah dan sedang diambil, sehingga dapat mempercepat penyelesaian permasalahan persampahan di Provinsi Bali.

3. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan serta tata kelola hutan.



Masih adanya perambahan kawasan hutan, illegal loggong dan kebakaran hutan, masih adanya permasalahan tata batas kawasan hutan dengan masyarakat, pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal serta masih adanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.

4. Belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat.

Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, masih perlunya rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah UPTD KPH se-Bali. Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem kehidupan tetap terjaga.

D. Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

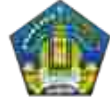
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025, maka telah dilaksanakan penyesuaian belanja program kegiatan di lingkungan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2025 melalui APBD Pergeseran yang mendahului Perubahan APBD Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 diperlukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku dan menindaklanjuti hasil temuan Pengawasan Lingkungan Hidup Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah di TPA Suwung.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam program kegiatan masyarakat yang mendukung proses percepatan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, maka diusulkan beberapa kegiatan yang mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah di Provinsi Bali, dengan menetapkan Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yaitu Ibu Ni Putu Putri Suastini Koster dan membentuk Tim Percepatan Pengelolaan Sampah yang melibatkan Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, pemangku kepentingan bidang lingkungan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah



Kabupaten Kota serta *stakeholder* terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan lingkungan terkait pengelolaan sampah di Provinsi Bali.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

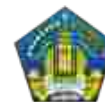
A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Bali Periode 2025-2029 yaitu **Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.**

Yang bermakna; “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala - Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Perwujudan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) Misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan sebagai strategi untuk menjaga, memperkuat, dan memajukan Alam, Manusia, serta Kebudayaan Bali dan dipetakan ke dalam 6 (enam) Bidang Prioritas Pembangunan, yaitu:

- Bidang 1. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.
- Bidang 2. Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.
- Bidang 3. Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata.
- Bidang 4. Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi.
- Bidang 5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.
- Bidang 6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.



Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mendukung prioritas ke-5 yaitu Lingkungan, Kehutanan dan Energi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta pengendalian daya rusak air (sungai, danau, laut dan pantai).

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yaitu **Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan**. Sasaran strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator sasaran: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Meningkatnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan
Indikator sasaran: Persentase Tutupan Lahan

Tabel 3.1. Tujuan Sasaran Strategis Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN		SATUAN	TARGET
	URAIAN	INDIKATOR		
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,19
	2 Meningkatnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Persentase Tutupan Lahan	Persen	73,71

Tabel 3.2. Sasaran Strategis dan Kebijakan Program Tahun 2025

SASARAN		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	
URAIAN	INDIKATOR			KEBIJAKAN	PROGRAM
1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,19	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup



SASARAN		SATUAN	TARGET 2025	STRATEGI	
URAIAN	INDIKATOR			KEBIJAKAN	PROGRAM
				Melaksanakan pembinaan dan pengawasan persetujuan lingkungan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Melaksanakan pendampingan pembinaan dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
				Meningkatkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber	Program Pengelolaan Persampahan
				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan di TPA Regional	
				Melaksanakan fasilitasi pengelolaan, pengumpulan Bahan Berbahaya Beracun dan limbah Bahan Berbahaya Beracun	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3
2 Meningkatkan kelestarian hutan yang berkelanjutan	Persentase Tutupan Lahan	Persen	73,71	Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
				Meningkatkan Perlindungan Hutan, Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Program Pengelolaan Hutan
				Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

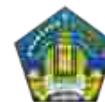
B. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.3. Program Strategis Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	63,10 (sesuai BA 73,20)
	Indeks Kualitas udara	88,65 (sesuai BA 80,34)

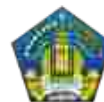


PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
	Indeks Kualitas Air Laut	69,95 (sesuai BA 86,16)
	Persentase penurunan emisi GRK	13,26
	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	94,85%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	70%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	35%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%
Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3	100%
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	30%
	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	70%
	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	6,82%
	Indeks Kualitas Lahan	42,16 (sesuai BA 63,07)
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok	4,23%
Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,16%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	100%



Tabel 3.4. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
1)	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
a	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Penyusunan IKPLHD, melakukan telaahan terhadap kebijakan dan dokumen perencanaan sektoral untuk memastikan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam RPPLH terakomodasi.
2)	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
a	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Koordinasi pelaksanaan KLHS, pemantauan dan evaluasi KLHS tingkat provinsi, verifikasi validasi dan evaluasi KLHS Kab/Kota
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
1)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali	
a	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
1)	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
a	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Pengaduan yang teregistrasi dan tertangani
4	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
1)	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pendampingan, pembinaan dan penilaian masyarakat, sekolah, kelompok/perorangan dalam Adiwiyata, Kalpataru
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	
1)	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan kualitas air, air laut dan udara
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penyusunan dokumen inventarisasi emisi GRK, monitoring dan evaluasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam Proklamasi
2)	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
a	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Pengujian parameter kualitas lingkungan dan penyusunan dokumen mutu
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN KAYATI (KEHATI)	
1)	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN
a	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan taman kehati
7	PROGRAM PENGENDALIAN B3 DAN LIMBAH B3	
1)	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
a	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Fasilitasi monitoring evaluasi pengelolaan B3 dan limbah B3
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
1)	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	
a	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Fasilitasi, pendampingan, sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah berbasis sumber, pengurangan sampah plastik sekali pakai, percepatan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
1)	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
a	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Pemrosesan akhir TPA, pemeliharaan sarana prasarana TPA, operasional TPA, rehabilitasi dan pemulihan lingkungan dengan aksi penanaman mangrove di sekitar TPA
URUSAN KEHUTANAN		
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
1)	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Perlindungan hutan, monev pemanfaatan hasil hutan, penataan batas kawasan hutan
2	PROGRAM PENDIDIKAN, PENYULUHAN, PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
1)	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
a	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan
3	PROGRAM PERNGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
1)	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	
a	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Rehabilitasi hutan dan lahan, monev DASpenyiapan kawasan Perhutanan Sosial, peningkatan kelas KUPS, monitoring Perhutanan Sosial



Rencana perubahan pendanaan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.5. Rencana Perubahan Pendanaan Tahun 2025

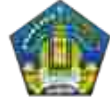
NO	UNIT	PAGU APBD INDUK (Rp)	PAGU APBD PERGESERAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45.107.980.988	44.383.868.988	44.383.868.988	-
2	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	341.539.476	341.539.476	341.539.476	-
3	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	401.538.504	401.538.504	401.538.504	-
4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	615.450.489	615.450.489	615.450.489	-
5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	943.845.756	943.845.756	943.845.756	-
6	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1.602.637.965	1.316.729.227	1.316.729.227	-
7	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	388.444.485	371.563.452	371.563.452	-
8	UPTD Pengelolaan Sampah	11.582.706.864	11.570.670.864	24.769.120.864	13.198.450.000
TOTAL		60.984.144.527	59.945.206.756	73.143.656.756	13.198.450.000

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2025 secara lengkap dalam lampiran, selain itu Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali juga memiliki rencana Perubahan Pendapatan Tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 3.6. Rencana Perubahan Pendapatan Tahun 2025

URAIAN	PENDAPATAN INDUK (Rp)	PERUBAHAN PENDAPATAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
Retribusi Jasa Usaha			
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Kantin)	15.840.000	36.576.000	20.736.000
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Laboratorium)	11.940.000	6.960.000	(4.980.000)
Lain-lain PAD yang sah			
- Hasil Kerjasama Daerah Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	1.191.600.000	1.191.600.000	-
- Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0	47.760	47.760
TOTAL	1.219.380.000	1.235.183.760	15.803.760



BAB IV

PENUTUP

A. Catatan Penting

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

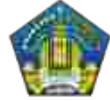
1. Rancangan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2025 terdapat 21 (dua puluh satu) program, 43 (empat puluh tiga) kegiatan dan 89 (delapan puluh sembilan) sub kegiatan, termasuk program rutin pada Dinas dan 7 UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
2. Rencana Perubahan Anggaran Belanja Tahun 2025 pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali menjadi Rp73.143.656.756,00 dan Rencana Perubahan Pendapatan menjadi Rp1.235.183.760,00.
3. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 diperlukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku dan menindaklanjuti hasil temuan Pengawasan Lingkungan Hidup Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah di TPA Suwung.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 serta sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Bali terpilih berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Surat Edaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program kegiatan.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan



yang berlaku dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun.

2. Terdapat usulan Perubahan Anggaran Tahun 2025 yang masih dalam proses persetujuan, diharapkan dapat diakomodir dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025.

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00						59.314.808.687,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
1.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik				100 Persen	100 Persen	225.364.280,00	217.110.620,00	186.422.620,00	105.385.720,00							330.750.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	105.000.000,00	104.999.800,00	101.639.800,00	-3.360.200,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	104.999.800,00	101.639.800,00	-3.360.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan				-	100 Persen	120.364.280,00	112.110.820,00	84.782.820,00	-35.581.460,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		220.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	120.364.280,00	112.110.820,00	84.782.820,00	-35.581.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			220.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas air Indeks kualitas air laut Indeks kualitas udara				13.26 63.10 69.95 88.65 Persen Nilai Nilai Nilai	13.26 63.10 69.95 88.65 Persen Nilai Nilai Nilai	513.381.155,00	520.210.725,00	331.289.692,00	51.103.845,00							564.485.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	513.381.155,00	520.210.725,00	331.289.692,00	-182.091.463,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		564.485.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	157.493.955,00	157.493.600,00	70.333.600,00	-87.160.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			159.365.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	109.960.200,00	109.960.000,00	25.080.000,00	-84.880.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			142.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				100 Persen	100 Persen	73.266.000,00	73.261.000,00	40.041.000,00	808.734.000,00							882.000.000,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	73.266.000,00	73.261.000,00	40.041.000,00	-33.225.000,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		882.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Unit	1 Unit	73.266.000,00	73.261.000,00	40.041.000,00	-33.225.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			882.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3				100 Persen	100 Persen	58.056.600,00	58.056.300,00	37.816.300,00	101.333.400,00							159.390.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	58.056.600,00	58.056.300,00	37.816.300,00	-20.240.300,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		159.390.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	58.056.600,00	58.056.300,00	37.816.300,00	-20.240.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			159.390.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan				70 Persen	70 Persen	20.000.000,00	19.999.700,00	10.399.700,00	79.225.000,00							99.225.000,00		
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	19.999.700,00	10.399.700,00	-9.600.300,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	20.000.000,00	19.999.700,00	10.399.700,00	-9.600.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga				30 70 Persen Persen	30 70 Persen Persen	222.535.665,00	1.117.590.230,00	1.083.910.230,00	164.441.835,00							386.977.500,00		
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pembinaan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber				9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	222.535.665,00	1.117.590.230,00	1.083.910.230,00	861.374.565,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		386.977.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	222.535.665,00	1.117.590.230,00	1.083.910.230,00	861.374.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			386.977.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				35 Persen	35 Persen	58.000.000,00	57.999.700,00	34.399.700,00	41.225.000,00							99.225.000,00		
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembag a/pendidikan dalam PPLH				100 Persen	100 Persen	58.000.000,00	57.999.700,00	34.399.700,00	-23.600.300,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				20 Entitas	20 Entitas	58.000.000,00	57.999.700,00	34.399.700,00	-23.600.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	19.994.300,00	10.394.300,00	79.225.000,00							99.225.000,00		
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang terekistrasi				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	19.994.300,00	10.394.300,00	-9.605.700,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi																			
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	1 Pengaduan	20.000.000,00	19.994.300,00	10.394.300,00	-9.605.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00		
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajem en Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00		
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	37.695.000,00	37.694.200,00	37.694.200,00	-800,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		39.579.750,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37.695.000,00	37.694.200,00	37.694.200,00	-800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			39.579.750,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	36.423.802.432,00	40.212.598.846,00	40.205.398.846,00	3.781.596.414,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		39.294.992.554,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				194 Orang/ Bulan	194 Orang/ Bulan	36.380.122.432,00	40.168.919.046,00	40.168.919.046,00	3.788.796.614,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			39.249.128.554,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	43.680.000,00	43.679.800,00	36.479.800,00	-7.200.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			45.864.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu</i>				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	17.097.000,00	17.097.000,00	17.097.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			17.970.750,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	35.571.400,00	47.975.000,00	47.975.000,00	12.403.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			37.356.444,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			101.981.250,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	16.096.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	-5.746.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			40.792.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	65.100.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-45.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			68.355.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	280.516.000,00	593.922.000,00	294.640.000,00	14.124.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			197.347.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan</i>				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	196.560.000,00	196.560.000,00	196.560.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			206.388.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	399.355.463,00	413.283.344,00	413.283.344,00	13.927.881,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			419.323.236,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan</i>				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				47 Unit	46 Unit	1.100.454.577,00	840.290.360,00	840.290.360,00	-260.164.217,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			1.424.980.134,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	44 Unit	495.813.540,00	472.289.248,00	472.289.248,00	-23.524.292,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			645.277.859,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan				3.16 Persen	3.16 Persen	210.780.420,00	198.400.230,00	152.398.230,00	122.836.080,00							333.616.500,00		
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				100 Persen	100 Persen	210.780.420,00	198.400.230,00	152.398.230,00	-58.382.190,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		333.616.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																			
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	210.780.420,00	198.400.230,00	152.398.230,00	-58.382.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			333.616.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok				4.23 Persen	4.23 Persen	30.000.500,00	30.000.500,00	16.520.500,00	-30.000.500,00							0,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				100 Persen	100 Persen	30.000.500,00	30.000.500,00	16.520.500,00	-13.480.000,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan																			
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				25 Orang	25 Orang	30.000.500,00	30.000.500,00	16.520.500,00	-13.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
4.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Indeks Kualitas Lahan Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan				42.16 6.82 Nilai Persen	42.16 6.82 Nilai Persen	93.681.640,00	89.554.810,00	64.074.810,00	121.174.663,00							214.856.303,00		
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				100 Persen	100 Persen	93.681.640,00	89.554.810,00	64.074.810,00	-29.606.830,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		214.856.303,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS																			
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	1 Dokumen	93.681.640,00	89.554.810,00	64.074.810,00	-29.606.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			214.856.303,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA								56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00					59.314.808.687,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00		
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajem en Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.212.370,00	3.205.900,00	3.205.900,00	-6.470,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.372.989,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.033.535,00	10.025.900,00	10.025.900,00	-7.635,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			7.385.211,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.650.000,00	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			36.382.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.028.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	-108.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			14.729.400,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			33.075.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	41.376.875,00	43.753.592,00	43.753.592,00	2.376.717,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			43.445.719,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	8 Unit	153.844.220,00	149.705.410,00	149.705.410,00	-4.138.810,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			164.686.431,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	11 Unit	685.788.520,00	657.084.954,00	657.084.954,00	-28.703.566,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			629.527.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR																				59.314.808.687,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00				
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00				
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajem en Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00				
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.131.520,00	3.129.800,00	3.129.800,00	-1.720,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.288.096,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.450.185,00	13.443.900,00	13.443.900,00	-6.285,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			14.122.694,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.012.500,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-12.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			38.863.125,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.698.100,00	3.698.100,00	3.698.100,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.883.005,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.050.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			16.096.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42.052.622,00	44.434.092,00	44.434.092,00	2.381.470,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			44.155.253,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	508.546.273,00	488.554.597,00	488.554.597,00	-19.991.676,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			533.973.587,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	10 Unit	7.260.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	-120.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			11.002.950,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN								56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00						59.314.808.687,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajem en Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.383.150,00	1.373.700,00	1.373.700,00	-9.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			2.417.231,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.363.690,00	11.355.700,00	11.355.700,00	-7.990,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			14.056.655,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			27.562.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.731.600,00	1.707.300,00	1.707.300,00	-24.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.023.055,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			41.895.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			16.586.846,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	116.266.420,00	110.397.312,00	110.397.312,00	-5.869.108,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			129.855.475,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	220.770.140,00	223.154.492,00	223.154.492,00	2.384.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			199.109.513,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			11.013.975,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT							56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00							59.314.808.687,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.140.130,00	3.137.000,00	3.137.000,00	-3.130,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.297.137,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.814.475,00	10.811.900,00	10.811.900,00	-2.575,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			11.355.199,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			35.831.250,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.503.100,00	2.502.800,00	2.502.800,00	-300,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			2.628.977,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			8.379.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23.940.000,00	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			25.137.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	41.996.315,00	44.379.792,00	44.379.792,00	2.383.477,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			44.067.639,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	12 Unit	123.425.000,00	123.425.000,00	123.425.000,00	0,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			193.931.730,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	81.714.280,00	86.382.984,00	86.382.984,00	4.668.704,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			93.550.318,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI							56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00						59.314.808.687,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							43.783.876.776,00	47.181.527.728,00	46.504.174.990,00	2.720.298.214,00							47.318.491.012,00		
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00		
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.548.800,00	2.530.500,00	2.530.500,00	-18.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			2.669.483,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.922.400,00	6.920.800,00	6.920.800,00	-1.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			23.628.560,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			16.537.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.598.900,00	2.598.700,00	0,00	-2.598.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			2.728.908,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai				100 Persen	100 Persen	1.705.074.639,00	1.501.652.424,00	1.501.652.424,00	-203.422.215,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		1.021.692.591,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	420.000.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00	-96.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	365.976.944,00	243.354.292,00	243.354.292,00	-122.622.652,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			43.561.923,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	112.142.740,00	112.130.000,00	112.130.000,00	-12.740,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			97.064.377,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	884.133.673,00	600.823.635,00	-399.176.365,00	Kota Denpasar, Deripasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			1.610.794.021,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	11.970.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			17.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP							56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00						59.314.808.687,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan				94.85 Persen	94.85 Persen	513.381.155,00	520.210.725,00	331.289.692,00	51.103.845,00							564.485.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi				27 Persen	27 Persen	513.381.155,00	520.210.725,00	331.289.692,00	-182.091.463,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		564.485.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	245.927.000,00	252.757.125,00	235.876.092,00	-10.050.908,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			263.120.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemn Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.729.600,00	4.866.500,00	4.866.500,00	1.136.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			8.820.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	852.000,00	935.500,00	935.500,00	83.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			2.205.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH				-	100 Persen	39.999.300,00	31.914.540,00	31.914.540,00	-8.084.760,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	39.999.300,00	31.914.540,00	31.914.540,00	-8.084.760,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	106.254.286,00	97.970.820,00	97.970.820,00	-8.283.466,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			279.373.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH								56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00					59.314.808.687,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							13.059.072.424,00	13.802.616.799,00	26.639.481.766,00	13.580.409.342,00							11.996.317.675,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional				100 Persen	100 Persen	11.188.173.848,00	11.068.408.590,00	24.254.822.590,00	-2.775.966.548,00							8.412.207.300,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	11.188.173.848,00	11.068.408.590,00	24.254.822.590,00	13.066.648.742,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		8.412.207.300,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				1 Unit	1 Unit	11.188.173.848,00	11.068.408.590,00	24.254.822.590,00	13.066.648.742,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			8.412.207.300,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)				A Nilai	A Nilai	44.129.709.092,00	47.513.557.822,00	46.921.167.084,00	3.603.141.992,00							47.732.851.084,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah				100 Persen	100 Persen	844.224.955,00	1.116.275.300,00	814.394.600,00	-29.830.355,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		864.969.419,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.232.000,00	5.229.000,00	5.229.000,00	-3.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			5.512.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.701.500,00	11.701.300,00	11.701.300,00	-200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			8.820.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			44.100.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.917.000,00	3.917.000,00	3.917.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			7.717.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.670.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-3.420.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			5.953.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah				100 Persen	100 Persen	5.078.912.766,00	4.613.422.512,00	4.330.112.474,00	-748.800.292,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		6.401.366.770,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	342.669.190,00	330.930.974,00	330.930.974,00	-11.738.216,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			358.795.175,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	27 Unit	118.270.000,00	118.270.000,00	118.270.000,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			131.285.700,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								56.842.949.200,00	60.984.144.527,00	73.143.656.756,00	16.300.707.556,00						59.314.808.687,00		



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI
YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA
MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029, sehingga pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Petrus Ulama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 2

1.2 Landasan Hukum..... 6

1.3 Maksud dan Tujuan..... 8

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025..... 8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN LALU..... 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 TW I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 14

2.3 Isu - Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 17

2.4 Review Terhadap RKPD 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 23

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 24

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 24

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025..... 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

4.1	<i>Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025.....</i>	33

BAB V PENUTUP 37

5.1	<i>Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian</i>	38

5.2	<i>Kaidah Pelaksanaan</i>	38

5.3	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	39

LAMPIRAN 41



DAFTAR TABEL

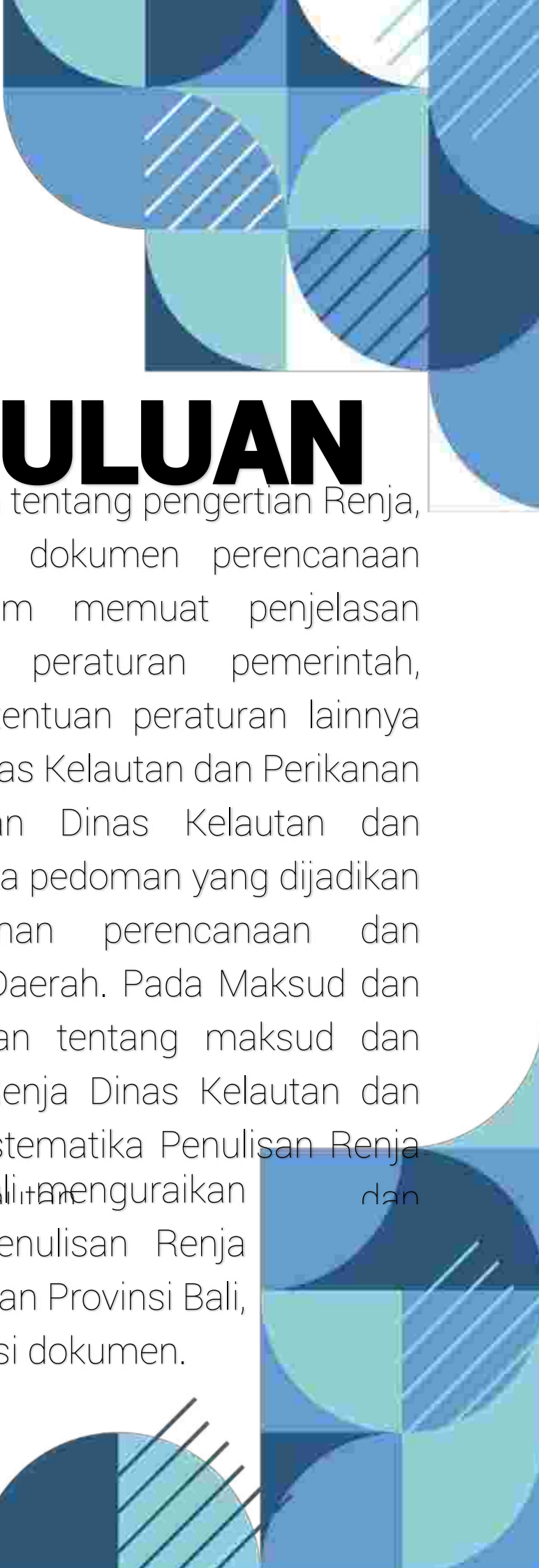
Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 TW I	12
Tabel 2. 2 Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali..	14
Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 TW I	16
Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	19



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. 1	Hubungan Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Dokumen Lainnya	5
Gambar 3. 1	Potensi Perikanan Tangkap	27
Gambar 3. 2	Potensi Perikanan Budidaya	28
Gambar 3. 3	Potensi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	28
Gambar 3. 4	Garam Tradisional Lokal Bali	29
Gambar 3. 5	Potensi Perikanan Hias Laut.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja dan Perikanan Provinsi Bali menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, sebagaimana amanat pemerintah pusat, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip *Money Follow Function* diubah menjadi *Money Follow Program* serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial.

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), Pemberdayaan masyarakat pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan, Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap, dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Untuk itu, kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi, Fasilitas pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN), Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Fasilitas pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara dalam pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 diajukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi, Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Bali tahun 2025 diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Bali selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari Gubernur Bali.

Terkait dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 pada bulan Juni Tahun 2025, didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi RPD Provinsi Bali Tahun 2023-2026.

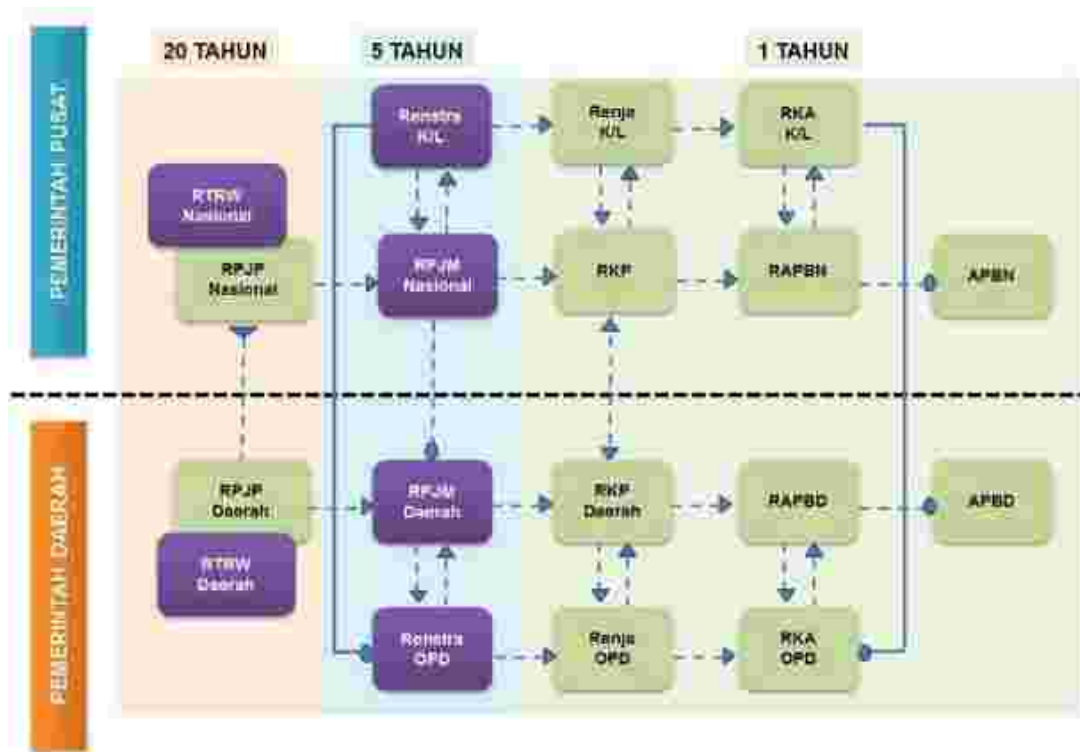
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 diawali dengan mengajukan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali dengan materi orientasi meliputi tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat daerah dan kesiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat,

maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1. 1

Hubungan Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Dokumen Lainnya



Mengacu pada gambar di atas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD mengacu pada RKPD sebagai dampak adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi, dengan mengacu pada Renstra PD, Renja PD dan KUA/PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya akan menjadi acuan DPA PD, yang merupakan penjabaran dari APBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Bali Nomor 2); dan
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 khususnya Rencana Kerja Tahun 2025 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2025 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2025 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2025 adalah :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 terutama pada tahun 2025;
2. Merancang program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025;
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
4. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 dengan RKPD Perubahan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Pada Bab III Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan

sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Bab IV Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA

DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN

PROVINSI BALI

Bab II berisi tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I berisi berupa Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Review terhadap RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 TW I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan), kemudian di tetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan; dengan berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 Sampai dengan TW I sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 TW I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	6,02%	4,41%	76,17%	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67%	(Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,22%	91,97%	91,77%	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha	3%	4,2%	210%	$Xkp=(X1+X2+X3+X4)/4$
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	81	100%	Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa **pada Tahun 2025 kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali tercatat sebesar 4,41%** dari total kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 13,43% pada Triwulan I Tahun 2025, Kontribusi terbesar PDRB berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Bali pada periode ini adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai sekitar 20,64% dari total PDRB Provinsi Bali. Kontribusi yang besar dari sektor tersebut mencerminkan struktur ekonomi Provinsi Bali yang di dominasi oleh sektor pariwisata. **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di tahun 2025 sebesar 4% dari 6% yang telah di targetkan pada tahun 2025**, data ini diperoleh berdasarkan jumlah pemanfaatan ruang laut berdasarkan data BPSPL Denpasar sebanyak 523 Pelaku Usaha dengan Jumlah Verifikasi yang dikeluarkan sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 19 Pelaku Usaha.

Meningkatnya kesejahteraan Nelayan di Provinsi Bali di hitung melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 91,97% di Tahun 2025, NTN dihitung dari Indeks Harga yang diterima nelayan dibagi dengan Indeks Harga yang dibayar nelayan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk biaya produksi. **Pada Sasaran terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan**

perikanan dihitung melalui Indeks Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha yang di kelompokkan berdasarkan sub sektor antara lain (1) kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut; (2) kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap; (3) kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya; dan (4) kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada tahun 2025 TW I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang berkaitan dengan Sasaran Strategis ini baru melaksanakan kegiatan terkait Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Kewenangan Provinsi serta kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menyebabkan **Capaian Sasaran ini berdasarkan sampel yang diawasi telah tercapai sebesar 4,2% dari 3% yang telah di targetkan.**

Pada sasaran meningkatnya manajemen kinerja organisasi di gunakan tolak ukur **Nilai Manajemen Kinerja Organisasi Tahun 2024 tercapai sebesar 81 Nilai atau sudah tercapai sebesar 100%**, pengukuran di lakukan untuk melihat kinerja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator kinerja dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	6,02%	4,41%	73,26%	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan produksi seperti melakukan peningkatan jumlah benih ikan yang dihasilkan oleh UPTD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							P2B, meningkatkan tingkat konsumsi ikan
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67%	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilakukan adalah menyusun penetapan KKP Jembrana dan KKP Bali Selatan yang masih sedang berproses
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,19%	91,97%	91,77%	Pencapaian realisasi belum mencapai target	Upaya yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan alat tangkap dan rumpon untuk peningkatan produksi nelayan
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha	3%	4,2%	140%	Pencapaian realisasi telah melampaui target	Sudah dilaksanakan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	81 Nilai	98,78%	Pencapaian realisasi telah mencapai target	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis di atas terukur dan dapat dicapai meskipun realisasinya **belum semua mencapai 100%**. Terhadap permasalahan yang muncul dapat ditangani melalui solusi antara lain (1) Sasaran Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB solusi yang dilakukan antara lain Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui peningkatan pengajuan penerbitan izin usaha perikanan serta peningkatan pengelolaan budidaya perikanan di darat, kemudian untuk solusi Meningkatkan konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan melalui peningkatan unit usaha pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar izin usaha serta peningkatan mutu produk hasil perikanan; (2) Sasaran Strategis Mengoptimalkan pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil solusi yang dilakukan antara lain Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan melalui peningkatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan pengajuan verifikasi teknis kesesuaian ruang perizinan berusaha, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) Sasaran Meningkatnya kesejahteraan Nelayan solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap melalui peningkatan produksi perikanan tangkap serta peningkatan usaha perikanan tangkap di pelabuhan; (4) Sasaran Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui menyelenggarakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan serta menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepada unit usaha perikanan; dan (5) Sasaran Strategis Meningkatnya manajemen kinerja organisasi solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui menyusun laporan keuangan dengan baik, peningkatan layanan administrasi umum perangkat daerah, mewujudkan pengadaan barang milik daerah, peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, serta mewujudkan barang milik daerah dalam kondisi baik.

Kemudian untuk mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut dapat diamati pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 TW I

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	6,02%	4,41 %	73,26%	1.842.638.406	338.069.492	18,35
2	Mengoptimalkan pengelolaan	6%	4%	66,67 %	154.596.492	13.411.082	8,67

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil						
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	100,19%	91,97%	90,00%	472.272.902	28.462.164	6,03
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	3%	4,2%	140%	181.509.884	15.322.164	8,44
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	82	81	98,78%	33.523.890.869	5.411.890.133	16,14
TOTAL					36.174.908.553	5.807.155.035	16,05

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut dengan jumlah dana yang dianggarkan cukup besar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik walaupun capaian realisasi tergolong masih rendah **Tahun 2025 TW I sebesar Rp. 5.807.155.035.00-** dengan target tahun 2025 sebesar Rp. 36.174.908.553.00- dengan tingkat **capaian sebesar 16,05%.**

2.3 Isu - Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan untuk menunjang Percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tanggung dan Sejahtera serta Peningkatan Daya Saing Daerah. Secara umum sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumber daya dapat pulih (*Renewable resources*), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (*Nonrenewable resources*), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*Environmental services*). Sumber daya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota

lainnya, sedangkan sumber daya tidak dapat pulih di antaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumber daya energi kelautan terdiri dari : OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Permasalahan yang teridentifikasi pada tahun 2025 antara lain yaitu belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB, belum optimalnya angka konsumsi ikan di provinsi bali, serta belum terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara itu yang menjadi isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2025 yaitu perlunya mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tingkat konsumsi dan produksi produk hasil olahan perikanan juga perlu ditingkatkan, serta fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sub sektor perikanan tangkap, sub sektor perikanan budidaya, dan sub sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapat perhatian yang lebih.

2.4 Review Terhadap RKPD

Dalam Review terhadap RKPD Perubahan diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD Perubahan dengan hasil analisis kebutuhan terutama pada tahun 2025. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2025, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan indikator sudah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (**Lampiran I**).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Perangkat Daerah ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2. 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan	Denpasar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	<i>Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat</i>

	Pemerintahan Daerah Provinsi				
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	46 %	$= \frac{(\text{Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan} / \text{Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K}) \times 100\%}{}$
			Persentase Efektivitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	73 %	$= \frac{(\text{Potensi PAD di kawasan Konservasi} / \text{jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan}) \times 100\%}{}$
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 %	$= \frac{((\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya}) / \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya}) \times 100\%}{}$
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 %	$= \frac{((\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1) / \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1) \times 100\%}{}$
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3 %	$\text{Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU)} = \frac{(\text{KPU} / \text{JKPU}) \times 100\%}{}$ KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan

6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Produksi Olahahan Hasil Perikanan	2 %	$= ((\text{Jumlah produksi olahahan produk perikanan Tahun } n - \text{Jumlah Produksi olahahan produk perikanan Tahun } - n) / \text{Jumlah Produksi olahahan produk perikanan tahun } -n \times 100\%)$
			Tingkat Konsumsi Ikan	49,65 Kg/ Kapita/ Tahun	AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
			Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 %	$= ((\text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } n - \text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } - n) / \text{Jumlah sampel yang di uji tahun } -n \times 100\%)$

Untuk lebih lengkapnya terkait hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu dapat dilihat pada **Lampiran**. (Tabel T-C. 29, Tabel T-C. 30, Tabel T-C. 31 dan Tabel T-C. 32).





BAB III

TUJUAN DAN

SASARAN

PERANGKAT

DAERAH

Bab 3 ini akan membahas hal-hal sebagai berikut yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025



3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Prioritas Pembangunan Nasional yang berkaitan dan sektor Kelautan dan Perikanan secara ringkas yaitu :

1. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Terkait dengan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu Meningkatkan perekonomian Krama Bali dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi serta Mewujudkan Stabilitas Harga - Harga Kebutuhan Bahan Pokok dengan indikator Angka Inflasi, hasil atau *outcome* yang di harapkan nantinya yaitu untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang menjadi prioritas atau Sasaran Pemerintah Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif;
2. Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi;
3. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan.

Sasaran Strategis untuk menunjang kegiatan Kesekretariatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026 yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik.

Strategi dan Arah Kebijakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu:

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dikembangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kelautan dan Perikanan berisikan mengenai :

3.3.1 Faktor - Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

a. Pengentasan Kemiskinan di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pengentasan kemiskinan di Sektor Kelautan dan Perikanan memerlukan berbagai pertimbangan strategis agar program dan kegiatan yang dilaksanakan

dapat berjalan efektif dan efisien. Faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan meliputi:

- 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Program yang dirumuskan harus mempertimbangkan kelestarian sumber daya laut dan perikanan. Hal ini termasuk memastikan bahwa praktik penangkapan ikan tidak merusak ekosistem dan dapat mempertahankan populasi ikan untuk jangka panjang.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat: Pertimbangan ini melibatkan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat pesisir untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik.
- 3) Sarana dan Prasarana yang Memadai: Penyediaan perahu tempel dan kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan akan membantu mereka mencapai lokasi penangkapan ikan dengan lebih cepat dan efisien, serta Penyediaan alat tangkap ikan yang berkualitas dan sesuai dengan jenis ikan yang ditangkap akan meningkatkan jumlah dan kualitas hasil tangkapan.

b. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

- 1) Potensi Perikanan Tangkap:

Provinsi Bali memiliki potensi perikanan tangkap yang signifikan, dengan sumber daya ikan yang melimpah di berbagai wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di sekitarnya, potensi ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Bali

Gambar 3. 1
 Potensi Perikanan Tangkap

Potensi Sumber Daya Ikan	Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap	Komoditas Potensial/Pendukung
1. SDI di perairan laut wilayah Bali (0 – 12 mil laut): • Potensi lestari = 147.278,75 ton/tahun ✓ Ikan pelagis = 123.906,0 ton/tahun ✓ Ikan demersal dan ikan karang = 23.372,75 ton/tahun • Tingkat pemanfaatannya (2019-2023) = 70,36 % 2. SDI di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (12-200 mil laut): • WPP-NRI 573 = 1.287.540 ton/tahun • WPP-NRI 718 = 1.992.730 ton/tahun 3. SDI di kawasan antarwilayah Laut Bali (>12 mil laut) • WPP-NRI 713 = 1.177.857 ton/tahun	1. Tuna: • Kapasitas produksi : 18.000 – 20.000 ton/tahun • Sentra produksi: Denpasar, Buleleng, Karangasem 2. Cakalang: • Kapasitas produksi : 10.000 – 12.000 ton/tahun • Sentra produksi: Denpasar, Buleleng, Karangasem 3. Tongkol: • Kapasitas produksi: 22.000 – 25.000 ton/tahun • Sentra produksi: Buleleng, Karangasem, Klungkung 4. Lemuru: • Kapasitas produksi: 20.000 – 30.000 ton/tahun • Sentra produksi: Jembrana, Badung	1. Lobster: • Kapasitas: 150 – 200 ton/tahun • Sentra: Gianyar, Badung, Tabanan 2. Ikan dasar – kurai, karapu, layur, kakap, beronang: • Kapasitas: 2.000 – 5.000 ton/tahun • Sentra: Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan 3. Cumi-cumi: • Kapasitas: 5.000 – 10.000 ton/tahun • Sentra: Buleleng, Jembrana, Denpasar 4. Ikan layang: • Kapasitas: 7.000 – 10.000 ton/tahun • Sentra: Buleleng, Jembrana 5. Ikan lemadang, layaran, setuhuk: • Kapasitas: 5.000 – 10.000 ton/tahun • Sentra: Denpasar, Buleleng, Badung

2) Potensi Perikanan Budidaya:

Provinsi Bali memiliki potensi perikanan budidaya yang besar, didukung oleh kondisi alam yang ideal dan keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan pengelolaan yang tepat, perikanan budidaya di Bali dapat menjadi sektor yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Gambar 3. 2
Potensi Perikanan Budidaya

Potensi Sumber Daya Lahan/Perairan	Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya:	Komoditas Baru Potensial
1. Potensi Perairan Budidaya Laut: 9.122,5 Ha • Lokasi: Buleleng, Karangasem, Jembrana, Klungkung, Denpasar • Tingkat pemanfaatan = 0,4 % 2. Potensi Lahan Budidaya Air Payau: 1.501 Ha • Lokasi: Buleleng, Jembrana • Tingkat pemanfaatan = 22,8 % 3. Budidaya Lahan Budidaya Air Tawar: 15.968 Ha • Lokasi: seluruh kabupaten/kota • Tingkat pemanfaatan = 7,2 %	1. Benih ikan bandeng: 3 miliar ekor/tahun (Buleleng) 2. Benih ikan kerapu: 25 juta ekor/tahun (Buleleng, Jembrana) 3. Benih Vanale: 1,5 miliar/tahun (Buleleng, Jembrana) 4. Ikan kerapu: 3.000 ton/tahun (Buleleng, Jembrana) 5. Udang vaname: 20.000 ton/tahun (Buleleng, Jembrana) 6. Rumput laut: 140.000 ton/tahun (Klungkung, Buleleng, Jembrana, Badung, Denpasar) 7. Ikan nila: 10.000 ton/tahun (Tabanan, Bangli, Jembrana) 7. Ikan gurami: 2.000 ton/tahun (Tabanan, Jembrana) 8. Lele: 5.000 ton/tahun (Tabanan, Jembrana, Denpasar) 9. Udang galah: 1.000 ton/tahun (Gianyar, Karangasem)	1. Abalon: Klungkung, Buleleng, Karangasem 2. Kepiting bakau: Jembrana, Buleleng, Denpasar 3. Rajungan: Klungkung, Buleleng 4. Teripang: Klungkung, Buleleng 5. Lobster: Buleleng, Karangasem, Jembrana 6. Anggur laut: Buleleng 7. Kakap putih: Buleleng 8. Kakap air tawar: Tabanan, Jembrana

3) Potensi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan:

Provinsi Bali memiliki potensi pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang melimpah, menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan nilai tambah produk kelautan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sektor ini secara berkelanjutan.

Gambar 3. 3
Potensi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Jenis & Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	3. Sentra/Pemusatan Industri Pengolahan Ikan:
1. Usaha mikro dan kecil pengolahan & pemasaran hasil perikanan : • Jumlah UMK: 931 unit ✓ Pemindangan = 136 UMK ✓ Pembekuan = 23 UMK ✓ Pemindangan = 433 UMK ✓ Pengolahan Produk Segar = 80 UMK ✓ Pengasapan/Pengeringan = 29 UMK ✓ Penggaraman/Pengeringan = 45 UMK ✓ Pereduksian = 24 UMK ✓ Pengolahan lainnya = 171 UMK • Tenaga kerja = 17.541 orang • Pelaku Usaha: CV = 18; Koperasi = 2; Badan Hukum lainnya = 26 2. Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Non-UPI Menengah dan Besar • Jumlah Usaha = 74 perusahaan • Tenaga Kerja = 30.668 orang • Jenis Usaha: ikan kaleng, produk beku, produk segar, ekstrak rumput laut, ikan hidup, snack ikan (stick & chip), abon ikan, fish jelly products, keripik belut, spirulina powder	3. Sentra/Pemusatan Industri Pengolahan Ikan: • Sentra pemindangan: Kusamba (Klungkung) = 80 UMK • Pelabuhan Benoa = 27 UMB • Denpasar Selatan = 13 UMB • Pengambangan = 12 UMB • Gerokgak = 7 UMB 

4) Garam Tradisional Lokal Bali:

Garam tradisional lokal Bali merupakan warisan budaya yang tak ternilai, diproduksi secara tradisional dengan teknik yang telah diwariskan secara turun temurun, mencerminkan kekayaan alam dan keahlian lokal dalam menghasilkan garam berkualitas tinggi.

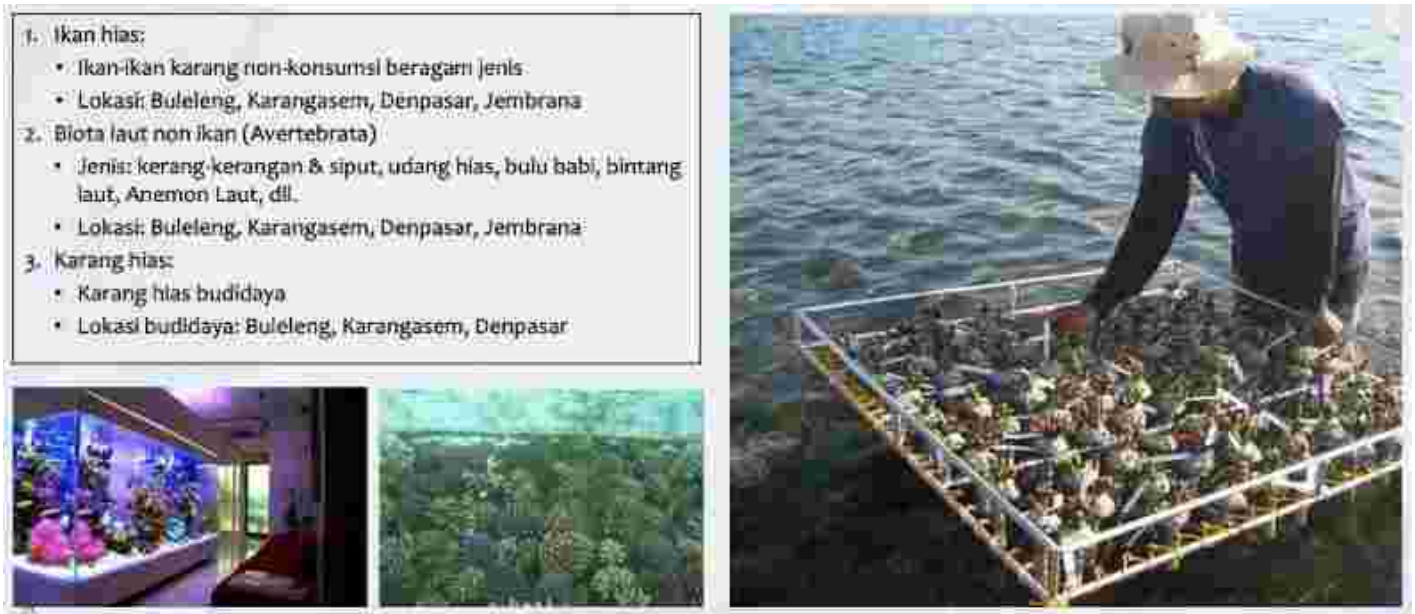
Gambar 3. 4
 Garam Tradisional Lokal Bali



5) Potensi Perikanan Produk Hias Laut:

Potensi perikanan produk hias laut di Bali menawarkan peluang besar dalam mengembangkan pasar internasional, dengan keanekaragaman spesies yang memikat dan mendukung industri pariwisata serta keberlanjutan ekosistem laut.

Gambar 3. 5
Potensi Perikanan Hias Laut



c. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya menghadapi peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha di daerah atas diselenggarakannya penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang lebih efektif dan lebih mudah, dibutuhkan kesiapan pengawasan kegiatan usaha yang lebih efektif, efisien, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan sinergitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Bali.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program pembangunan kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategi dan arah kebijakan yang

dilakukan, tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Dalam jangka pendek program yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan untuk **“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”** disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang sebagian besar berada pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Namun demikian, bukan berarti masalah-masalah lainnya diabaikan, seperti pelestarian lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran**. (Tabel T-C. 33)





BAB IV

RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN

PERANGKAT

PADA BAB IV

Pada Bab IV Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali akan diuraikan tentang rencana kerja dan pendanaan yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah



4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025

Untuk melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 34.347.385.507,00. Program–program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

1.6.2 *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

1.6.3 *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

1.6.4 *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

2.1 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

2.1.1 *Sub Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K*

2.1.2 *Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

2.1.3 *Sub Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru*

2.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

2.2.1 *Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil*

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

3.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

3.1.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*

3.2 Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

3.2.1 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan*

3.3 Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

3.3.1 *Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT*

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

4.1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

4.1.1 *Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*

4.2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

4.2.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota*

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

5.1.1 *Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi*

5.1.2 *Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sampai dengan 12 Mil sesuai Kewenangan Provinsi*

5.1.3 *Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai dengan 12 Mil sesuai dengan Kewenangan Provinsi*

5.1.4 *Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)*

5.2 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

5.2.1 *Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Kewenangan Provinsi*

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

6.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6.2 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

6.2.1 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*

6.2.2 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar*

6.3 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6.3.1 Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Secara detail Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam **Lampiran.** (Tabel T-C. 33)





BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan antara lain Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut



5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 memuat Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025. Penyusunan Rancangan Awal Renja ini telah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis. Renja Perubahan ini merupakan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025.

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bukan ditentukan oleh dokumen Renja melainkan implementasinya terutama adanya dukungan dari sektor terkait lainnya, dan masyarakat secara luas serta adanya komitmen dan kerja keras dari segenap aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam mencapai harapan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran serta mengacu pada ketentuan yang berlaku;

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali wajib mengevaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bidang terkait dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali;
3. Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 ini dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan ; dan
 - c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari

Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan . Kami berharap, bahwa Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 pada urusan Kelautan dan Perikanan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan.

Demikian, dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 telah disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali



Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003

A vibrant underwater photograph of a coral reef. The scene is illuminated by bright sunlight filtering down from the surface, creating a shimmering effect on the water. The reef is composed of various types of coral, including large, branching structures and smaller, more delicate forms. Several small, colorful fish are visible swimming around the coral. The overall atmosphere is serene and beautiful, showcasing the diversity of marine life.

LAMPIRAN

Tabel T- C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan III
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(5+7+10)	12=(11/4)		
3					Urusan Pemerintahan Pilihan												
3	25				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan												
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%	
3	25	01	1.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	0%	100%	0%	0,00%	0%	0%	0%	0%	
3	25	01	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	0	4	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.01	07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	0	4	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	700	260	260	260	100,00%	60	44	564	81%	
3	25	01	1.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	590	114	118	108	91,53%	118	102	324	55%	
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) I Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	0	1	0	0,00%	5	5	5	31%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	23	0	1	0	0,00%	7	2	2	9%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	17	1	1	1	100,00%	5	4	6	35%	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	0	1	0	0,00%	3	2	2	18%	
3	25	01	1.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	0	12	0	0,00%	12	9	9	15%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	0	1	0	0,00%	3	2	2	18%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	0	12	0	0,00%	12	0	0	0%	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	0	12	0	0,00%	12	9	9	15%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	43	8	8	8	100,00%	9	7	23	53%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	3	3	3	100,00%	3	2	8	53%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	0	1	0	0,00%	10	1	1	3%	
3	25	02			Program : Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	100%	0%	0%	0%	0,00%	44%	44,00%	44,00%	44%	
						Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	Kawasan	5	2	5	4	80,00%	0	0	4	80%	
3	25	02	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	102.575,33	21.192,51	76.822,74	44.712,50	58,20%	102.575,33	44.813,58	44.712,50	44%	
3	25	02	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	1	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	57.862,83	21.192,51	21.192,51	21.192,51	100,00%	44.712,50	20.057,00	21.192,51	37%	
3	25	02	1.01	03	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	22.022,74	0,00	22.022,74	0	0,00%	0	0	0,00	0%	
3	25	02	1.02		Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	Pelaku Usaha	150	33	40	62	155,00%	0	0	95	63%	
3	25	02	1.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	110	32	40	48	120,00%	0	0	80	73%	
3	25	02	1.03		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	Kelompok	23	4	4	2	50,00%	4	12	18	78%	
3	25	02	1.03	01	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	210	40	30	38	126,67%	40	40	118	56%	
3	25	02	1.03	02	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	15	4	0	0	0,00%	4	12	16	107%	
3	25	02	1.03	03	Sub Kegiatan : Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	150	0	0	0	0,00%	40	40	40	27%	
3	25	02	1.03	04	Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Sserta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	20	4	4	2	50,00%	4	0	6	30%	
3	25	03			Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	6	0	0%	0	0,00%	2%	1%	1%	17%	
						Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	212.436,35	124.010,15	107.269,84	110.863,70	103,35%	103696,1	76429,7	311.303,55	147%	
3	25	03	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	317.351,54	0	0,00	0	0,00%	103.696,10	76.429,70	76.429,70	24%	
						Tersedianya data dan Informasi sumber daya ikan	Kali	6	0	3	0	0,00%	0	0	0	0%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) I Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	03	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	15	1	3	0	0,00%	0	0	1	7%	
3	25	03	1.01	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	16	0	4	0	0,00%	4	1	1	6%	
3	25	03	1.01	03	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	50	5	25	20	80,00%	0	0	25	50%	
3	25	03	1.09		Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	25.500	0	0	0	0,00%	8.000	3.675	3.675	14%	
3	25	03	1.09	02	Sub Kegiatan : Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	90	0	0	0	0,00%	30	30	30	33%	
3	25	04			Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	6	0%	0%	0	0,00%	2%	1%	0,01	17%	
						Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	38.342,02	32.060,08	19.360,82	32.220,50	166,42%	32645,1	23966,41	88.246,99	230%	
3	25	04	1.01		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	Sertifikat	465	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.01	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	3	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.05		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	99.906,86	0	0,00	0,00	0,00%	32.645,10	23.966,41	23.966,41	24%	
						Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kali	72	0	40	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.05	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	25	0	10	10	100,00%	1	0	10	40%	
3	25	04	1.05	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti Bimtek Rumpuk Laut	Orang	210	0	120	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.05	06	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	162	0	40	0	0,00%	6	6	6	4%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	05			Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	9	0%	0%	0%	0,00%	2%	1,00%	1,00%	11%	
						Jumlah pelaku usaha taat Hukum	Pelaku Usaha	41	0	23	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	05	1.01		Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Pelaku Usaha	127	0	18	0	0,00%	30	16	16	13%	
3	25	05	1.01	01	Sub Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	13	0	5	0	0,00%	1	1	1	8%	
3	25	05	1.01	02	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	13	0	5	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	05	1.01	03	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	9	0	3	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	05	1.01	04	Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	125	0	5	0	0,00%	40	40	40	32%	
3	25	05	1.02		Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan kepada unit usaha oengolahan dan distribusi hasil perikanan	Unit Usaha	82	0	5	0	0,00%	20	0	0	0%	
3	25	05	1.02	03	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	13	0	5	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	06			Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persen	6	0	0%	0	0,00%	2%	1%	1%	17%	
						Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Th	50,64	0	0	0	0,00%	48,68	48	48	95%	
						Jumlah produk perikanan bersertifikat	SKP	300	282	151	189	125,17%	0	0	471	157%	
3	25	06	1.01		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	Unit Usaha	100	25	25	28	112,00%	25	46	99	99%	
3	25	06	1.01	3	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	Unit Usaha	140	25	25	28	112,00%	25	46	99	71%	
3	25	06	1.02	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	140	25	25	28	112,00%	25	46	99	71%	
3	25	06	1.03		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Potensi Peluang Usaha Investasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Potensi	18	0	9	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	06	1.03	01	Sub Kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	2	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%	
UPTD Produksi Perikanan Budidaya																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0		80	100%	
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	1	1	100,00%	1	1	2	40%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	1	3	60%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	0	2	40%	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	0	1	1	100,00%	2	0	1	13%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	0%	0%	0,00%	100%	75%	75%	75%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	0	0	0	0,00%	3	0	0	0%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	100,00%	12	0	24	40%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100,00%	12	9	33	55%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	5	5	5	100,00%	5	3	13	52%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	0	0	0	0,00%	3	1	1	11%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	0	3	3	100,00%	3	3	6	40%	
3	25	04			Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	6%	0%	0%	0%	0,00%	2%	1%	0,01	17%	
						Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	Komoditas	6	3	3	3	100,00%	0	0	6	100%	
3	25	04	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	6.210.000	2.692.450	1.210.000	1.210.000	100,00%	1.250.000	2.247.600	6.150.050	99%	
3	25	04	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	0	0	0	0,00%	2	2	2	33%	
						Jumlah paket teknologi perikanan budidaya	Paket	6	3	3	3	100,00%	0	0	6	100%	
3	25	04	1.01	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15	0	0	0	0,00%	4	2	2	13%	
						jumlah benih, calon induk dan induk	Ekor	2.310.000	2.692.450	1.210.000	1.210.000	100,00%	0	0	3.902.450	169%	
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%	
3	25	01	1.06			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75,00%	100,00%	100%	
3	25	01	1.06	01		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.06	02		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	1	0	0,00%	1	1,00	1,00	17%	
3	25	01	1.06	04		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	1,00	3,00	50%	
3	25	01	1.06	05		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.07			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	0%	0	0,00%	100%	75%	75%	75%	
3	25	01	1.07	10		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0,00%	1	0,25	0,25	8%	
3	25	01	1.08			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	100%	0%	0,00%	100%	75,00%	75,00%	75%	
3	25	01	1.08	01		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	0	12	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.08	02		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	0	12	0	0,00%	12	7,00	7,00	10%	
3	25	01	1.08	02		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	0	2	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.09			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75,00%	100,00%	100%	
3	25	01	1.09	02		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	1	4	4	100,00%	4	3,00	8,00	33%	
3	25	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	96	0	16	0	0,00%	16	2,00	2,00	2%	
3	25	01	1.09	09		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	100,00%	1	0,47	2,47	41%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	0	0	0	0,00%	2	0,00	0	0%	
3	25	06			Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	6%	0%	0%	0%	0,00%	2%	1,00%	0,01	17%	
						Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan	Sampel	14.850	2.955	5.000	2680	53,60%	0	0	5.635	38%	
3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	7.800	0	0	0	0,00%	2.500	2.744	2.744	35%	
						Jumlah UPI yang Menerapkan Persyaratan Sertifikasi SNI	UPI	111	140	37	70	189,19%	0	0	210	189%	
3	25	06	1.02	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	180	133	30	63	210,00%	30	85	281	156%	
3	25	06	1.02	02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	42	7	7	7	100,00%	7	4	18	43%	
UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%	
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	0	1	1	100,00%	2	2	3	33%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	1	3	50%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	0	2	33%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) I Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	0	1	1	100,00%	2	0	1	11%	
3	25	01	1.06	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Dokumen	36	0	12	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.06	08	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.06	09	Sub Kegiatan :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	0	12	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	1	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	66%	100%	100%	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	0	12	12	100,00%	12	12	24	33%	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	0	12	12	100,00%	12	8	20	28%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	5	5	5	100,00%	5	4	14	47%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	0	1	100%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	100,00%	1	0	2	40%	
3	25	02			Program : Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	persen	74%	0	0%	0	0,00%	71%	2,42%	2,42%	3%	
						Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	5	1	1	2	200,00%	0	0	2	40%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	02	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	6	0	0	0	0,00%	4	2	2	33%	
						Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Ha	21.192,51	21.192,51	21.192,51	21.192,51	100,00%	0	0	21.192,51	100%	
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	46.838,10	21.192,51	21.192,51	21.192,51	100,00%	44.712,50	20.057,00	21.192,51	45%	
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
UPTD Pelabuhan Perikanan																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%	
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	0	2	33%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	33	1	1	1	100,00%	10	10	12	36%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	0	2	40%	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	1	1	1	100,00%	2	0	2	22%	
3	25	01	1.06	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Dokumen	12	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12	12	100,00%	0	0	24	67%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	0%	0%	0,00%	100%	50%	50%	50%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	0	0	0	0,00%	12	0	0	0%	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	100,00%	12	5	29	40%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	2	2	2	100,00%	2	2	6	50%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	0	1	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	03			Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	6%	0	0	0	0,00%	2%	1%	0,01	17%	
						Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Pelabuhan	2	1	2	2	100,00%	0	2	5	250%	
3	25	03	1.06		Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	Ton	25.500	4.750	5.000	4.981	99,62%	8.000	3.675	13.406	53%	
						Jumlah nelayan yang terampil dalam penanganan CPIB dan keamanan keselamatan nelayan	Layanan	292	0	116	50	43,10%	0	0	50	17%	
3	25	03	1.06	01	Sub Kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan	Pelabuhan Perikanan	2	0	2	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	03	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	152	0	2	0	0,00%	50	0	0	0%	
3	25	03	1.06	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	307	3	116	4	3,45%	5	2	9	3%	

LAMPIRAN II

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Trealisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			79 Nilai	80 Nilai	N/A	N/A	79 Nilai	80 Nilai	N/A	N/A	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			N/A	N/A	81	82	N/A	N/A	81	82	
3	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya			4 Kawasan	5 Kawasan	N/A	N/A	2	4	N/A	N/A	
4	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola			1 Kawasan	1 Kawasan	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	
5	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			N/A	N/A	44%	46%	N/A	N/A	44%	46%	Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K dikali 100%
6	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			N/A	N/A	71%	73%	N/A	N/A	76,49%	73%	Potensi PAD di kawasan Konservasi/(jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
7	Jumlah produksi perikanan tangkap			105.166,51 Ton	107.269,84 Ton	N/A	N/A	124.010,15 Ton	110.863,70 Ton	N/A	N/A	
8	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan			1 Pelabuhan	2 Pelabuhan	N/A	N/A	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	N/A	N/A	
9	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1) x 100%
10	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			18.981,20 Ton	19.360,82 Ton			32.060,08 Ton	31.220,50 Ton	N/A	N/A	
11	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut			3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	N/A	N/A	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	N/A	N/A	
12	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1) x 100%
13	Jumlah pelaku usaha taat Hukum			18 Pelaku Usaha	23 Pelaku Usaha	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Trealisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
14	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			N/A	N/A	2%	3%	N/A	N/A	1%	3%	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang ter-data pada tahun berjalan
15	Jumlah produk perikanan bersertifikat			149 SKP	151 SKP	N/A	N/A	282 SKP	189 SKP	N/A	N/A	
16	Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan			4.950 Sampel	5000 Sampel	N/A	N/A	2.695 sampel	3.720 Sampel	N/A	N/A	
17	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun n-1)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun n-1) x 100%
18	Tingkat Konsumsi Ikan			N/A	N/A	48,68 Kg/Kpt/ Tahun	49,65 Kg/Kpt/ Tahun	N/A	N/A	48 Kg/Kpt/Tahun	49,65 Kg/Kpt/ Tahun	AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
19	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah sampel yang di uji Tahun n - Jumlah sampel yang di uji Tahun - n)/Jumlah sampel yang di uji tahun -n x 100%)

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2025

No	Rancangan RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
			Capaian	Indikatif			Capaian	Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	33.523.890.869,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	33.523.890.869,00	Dinas dan UPTD
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	46 Persen	104.596.492,00	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	46 Persen	104.596.492,00	Dinas
		Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	73 Persen	50.000.000,00		Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	73 Persen	50.000.000,00	UPTD KKP
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen	472.272.902,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen	472.272.902,00	Dinas dan UPTD Pelabuhan Perikanan
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen	1.023.918.104,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen	1.023.918.104,00	Dinas dan UPTD P2B
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3 Persen	181.509.884,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3 Persen	181.509.884,00	
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2 Persen	323.958.502,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2 Persen	323.958.502,00	Dinas
		Tingkat Konsumsi Ikan	49,65 Kg/Kapita/Th	-		Tingkat Konsumsi Ikan	49,65 Kg/Kapita/Th	-	Dinas

No	Rancangan RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
			Capaian	Indikatif			Capaian	Dana	
		Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen	494.761.800,00		Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen	494.761.800,00	UPTD PPMHP
Total				36.174.908.553,00	Total				36.174.908.553,00

Tabel T-C.33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
											K	RP	K	RP		
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				36.174.908.553		38.506.976.775		
			3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				32.149.599.099		30.743.518.441		
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik								Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86		87				Survey Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi							Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82		83				Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	82	30.915.912.819	83	25.939.471.414	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01	1.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	76.748.000	100	78.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	25	01	1.01	0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	76.748.000	4	78.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersusunnya laporan keuangan dengan baik	3	25	01	1.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	60	25.447.615.889	60	23.748.340.878	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3	25	01	1.02	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1610	25.447.615.889	1.610	23.748.340.878	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	1.107.803.300	100	259.712.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	25	01	1.06	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	7.459.500	5	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	728.957.900	7	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	189.642.400	5	124.712.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	18.923.500	3	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	25	01	1.06	0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	162.820.000	12	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	279.565.620	100	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	279.565.620	3	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	134.661.000	100	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.611.000	12	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	131.050.000	12	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	3.869.519.010	100	1.747.418.156	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	25	01	1.09	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	950.364.936	9	571.337.984	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.828.924.074	3	776.080.172	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	90.230.000	10	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS	
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil								Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%		6%			= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSEN	46%	104.596.492	100%	150.511.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01			Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	102.575,33	34.495.000	102.575,33	60.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	3	25	02	1.01	0008		Sub Kegiatan : Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	12	34.495.000	15	60.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03			Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	Kelompok	5	70.101.492	6	90.511.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03	0001		Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	40	70.101.492	60	90.511.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Terwujudnya stabilitas harga- harga kebutuhan bahan pokok										Angka inflasi	Persen	3±1		3±1			Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan									Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,25		100,28			Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	PERSEN	2%	424.573.902	2%	555.847.147	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3	25	03	1.01			Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	105.770,02	390.850.902	107.885,42	500.847.147	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	1.01	0002		Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	390.850.902	4	500.847.147	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	1.09			Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	8.500	33.723.000	9.000	55.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	3	25	03	1.09	0001	Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen		30	33.723.000	30	55.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen		5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen		6,02		6,25			Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PERSEN		2%	199.047.500	2%	3.532.415.457	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Laut	3	25	04	1.05		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton		33.297,90	199.047.500	33.963,86	3.532.415.457	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0004	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		3	171.427.500	5	3.532.415.457	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.05	0013	Sub Kegiatan : Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Dokumen		12	27.620.000	12	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Terwujudnya stabilitas harga- harga kebutuhan bahan pokok									Angka inflasi	Persen		3±1		3±1			Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan								Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen		3%		4%			Xkp=(X1+X2+X3+X4)/4 X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	PERSEN		3%	181.509.884	4%	175.769.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
											K	RP	K	RP		
		Terselenggaranya pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	3	25	05	1.01		Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Pelaku Usaha	32	181.509.884	34	175.769.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	05	1.01	0016	Sub Kegiatan : Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	30	31.268.900	1	42.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3	25	05	1.01	0017	Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	40	150.240.984	40	133.529.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,02		6,25			Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN	Persen	2%	323.958.502	2%	389.503.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun - n)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun -n x 100%)
									TINGKAT KONSUMSI IKAN	KG/ KAPITA/ TAHUN	49,65		50,64			AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	Unit Usaha	30	323.958.502	35	389.503.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	3	25	06	1.02	0004	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	30	323.958.502	35	389.503.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI												1.073.004.792		1.940.079.617		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
										K	RP	K	RP		
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik								Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86		87			Survey Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi							Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82		83			Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	82	1.023.004.792	83	1.090.079.617	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	66.348.100	100	44.181.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.848.100	2	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	41.500.000	1	38.181.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	956.656.692	100	1.045.898.417	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	172.510.000	5	83.211.113	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	784.146.692	1	962.687.304	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali								Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil							Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%		6%			= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02	1.01	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE PEFEKTIFITAS KAWASAN KONSERVASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	PERSEN	73%	50.000.000	74%	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	5	50.000.000	6	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01	0002	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	46.838,10	50.000.000	46.838,10	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
UPTD PELABUHAN PERIKANAN												333.431.430		576.059.500			
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik									Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86		87			Survey Kepuasan Masyarakat	
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi								Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82		83			Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	82	285.732.430	83	306.059.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	86.085.900	100	59.559.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	26.835.900	10	23.506.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.500.000	1	36.053.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	25	01	1.06	0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	26.750.000	1	26.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	20.445.200	100	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.445.200	1	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	1	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	12.000.000	100	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.000.000	12	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	167.201.330	100	225.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	127.800.000	2	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	39.401.330	1	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
Terwujudnya stabilitas harga- harga kebutuhan bahan pokok									Angka inflasi	Persen	3±1		3±1			Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS	
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan								Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,25		100,28			Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Persen	2%	47.699.000	2%	270.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)	
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	1.06		Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	Ton	8.500	47.699.000	9.000	270.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	1	47.699.000	5	270.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN												1.148.256.568		3.233.511.321			
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik									Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86		87			Survey Kepuasan Masyarakat	
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi								Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82		83			Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	82	653.494.768	83	3.143.196.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	41.933.000	100	107.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	8.433.000	1	7.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	32.500.000	1	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	2	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	37.072.080	100	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	37.072.080	1	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	118.020.500	100	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.020.500	12	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	117.000.000	12	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	456.469.188	100	3.013.696.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	92.232.000	4	293.196.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	349.457.188	1	2.700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	14.780.000	22	20.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS	
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,02		6,25			Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK HASIL PERIKANAN	PERSEN	2%	494.761.800	2%	90.314.425	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah sample yang di uji Tahun n - Jumlah sample yang di uji Tahun - n)/Jumlah sample yang di uji tahun -n x 100%)	
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	2.600	494.761.800	2.700	90.314.425	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	3	25	06	1.02	0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	7	53.241.000	7	90.314.425	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	3	25	06	1.02	0004	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	7	441.520.800	30	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA												1.470.616.664			2.013.807.896		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik									Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		86		87			Survey Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi								Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai		82		83			Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai		82	645.746.060	83	1.163.807.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen		100	46.277.200	100	51.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	25	01	1.06	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	4.664.000	1	8.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3	7.117.200	1	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2	32.500.000	1	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	1.996.000	2	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen		100	38.554.200	100	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	38.554.200	3	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen		100	129.070.200	100	140.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	471.000	12	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	128.599.200	12	140.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		100	431.844.460	100	952.307.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	166.497.984	5	252.307.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	265.346.476	3	700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS	
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,02		6,25			Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budiday	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PERSEN	2%	824.870.604	2%	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)	
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Dara	3	25	04	1.06		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	1.300.000	824.870.604	1.350.000	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3	25	04	1.06	0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	824.870.604	6	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI**



KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Semesta Berencana Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat disusun, dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Semesta Berencana Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Bali, 9 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI,



Dr. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681129 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I	PENDAHULUAN
	1
1.1.	Latar Belakang
	1
1.2.	Landasan Hukum
	4
1.3.	Maksud dan Tujuan
	6
1.4.	Sistematika Penulisan
	7
Bab II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
	TAHUN BERKENAAN
	8
Bab III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
	DAERAH
	16
Bab IV	PENUTUP
	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu instrumen yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan kapasitas fiskal pemerintah untuk berinvestasi, oleh karenanya peran serta pihak swasta maupun asing sangat diperlukan.

Pelaksanaan penanaman modal dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah ketersediaan potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal yang kondusif akan menjadi ladang yang subur bagi tumbuh kembangnya investasi di suatu daerah.

Oleh karenanya kebijakan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi penentu minat penanam modal karena para penanam modal menginginkan adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan terhadap modal yang diinvestasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali dalam menarik partisipasi para penanam modal nasional maupun asing untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah Bali telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi UMKM, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan nilai tambah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya seperti :

1. Membangun sinergitas promosi investasi dengan Kabupaten/Kota se-Bali untuk menyiapkan bahan promosi yang terintegrasi.
2. Melakukan pendekatan melalui surat ke Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI agar event-event promosi investasi lebih banyak bisa diselenggarakan di Provinsi Bali.
3. Memanfaatkan fasilitas jendela promosi penanaman modal, melaksanakan kajian potensi investasi dengan pihak ketiga yaitu pembuatan video berbasis Informasi dan Teknologi (IT) dengan mengunggah peluang dan potensi investasi daerah pada sistem potensi investasi regional (PIR) yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Potensi Daerah pada Kementerian Investasi/BKPM RI dan INAACCES Kemenlu RI.
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk dapat lebih sinergitas melakukan promosi baik nasional maupun internasional terhadap peluang dan potensi pariwisata lain yang ada di daerah.
5. Memberikan layanan konsultasi dan memberikan solusi kepada pelaku usaha terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan investasi.
6. Melakukan pembinaan dan evaluasi ke lapangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Memberikan stempel pada setiap produk perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan biaya Rp.0,- dan ditanda tangani secara elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, sehingga izin yang dikeluarkan bersifat transparan dan akuntabel, serta tidak ada peluang terjadinya unsur KKN pada Sistem PRESTISE.
8. Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik kepada pelaku usaha masyarakat bahwa dalam pengajuan permohonan izin dan non izin tidak dipungut biaya, pasti, cepat dan mudah bisa dilaksanakan darimana, kapan saja sepanjang ada internet serta tidak menggunakan calo.
9. Memberikan layanan pendampingan OSS (*Online Single Submission*) kepada pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam penginputan data.

10. Melakukan pelayanan keliling ke sembilan Kabupaten/Kota untuk penerbitan/penyelesaian Nomor Induk Berusaha, izin dan non izin.
11. Melakukan pengembangan aplikasi perizinan dan non perizinan (*prestise*).
12. Melakukan fasilitasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dengan menghadirkan narasumber secara langsung.
13. Penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
14. Tidak korupsi sesuai arahan yang ditetapkan, pemasangan CCTV, banner dan lain-lain di beberapa titik kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
15. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.

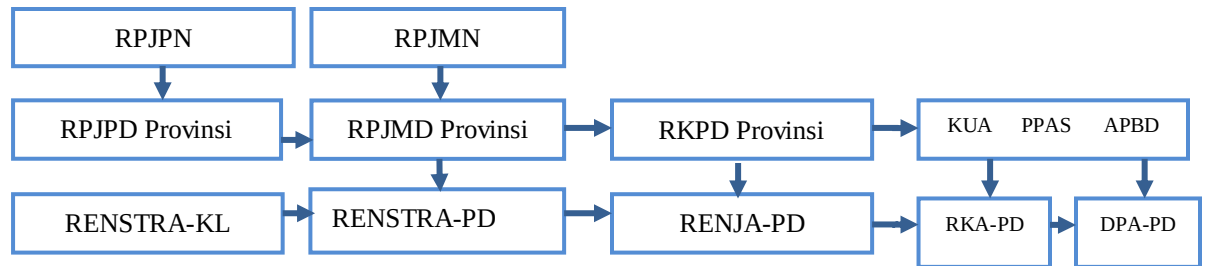
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada dokumen perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan. Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);

- 13) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renja Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Mewujudkan konsistensi, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Dasar Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Pada Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pada Bab ini diuraikan tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 meliputi capaian kinerja dan keuangan, kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III ini diuraikan tentang matrik perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini diuraikan antara lain catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun dari ketersediaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan serta kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

TAHUN BERKENAAN

Dalam BAB II Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 meliputi capaian kinerja dan keuangan, kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Evaluasi dilaksanakan pada dasarnya untuk menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya evaluasi dilaksanakan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I pada tahun 2025 secara keseluruhan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dari total 6 program sudah tercapai target sampai dengan triwulan I sebanyak 1 program (16,7%), untuk kegiatan dari 9 kegiatan sudah tercapai target sampai dengan triwulan I sebanyak 1 kegiatan (11%) dan untuk sub kegiatan dari 19 sub kegiatan sudah tercapai target sampai dengan triwulan I sebanyak 9 sub kegiatan (47,4%), dengan pagu dana sebesar Rp.19.793.937.440,00 realisasi keuangan mencapai Rp.3.467.104.521,00 (17,52%),

Terkait faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yaitu rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga target belum tercapai pada triwulan I.

Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan pada triwulan-triwulan berikutnya yaitu salah satunya melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				19,793,937,440		3,467,104,521			DPMPTSP
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79	nilai	18,575,024,900	0	3,274,358,553	0	17.63	DPMPTSP
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	40	dokumen	15,130,595,620	0	2,711,577,160	0	17.92	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	105	Orang/ Bulan	15,130,595,620	58	2,711,577,160	55.24	17.92	DPMPTSP
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	388,864,400	40	46,779,300	40	12.03	DPMPTSP

2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	5,073,400	1	4,131,000	100	81.42	DPMPTSP
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	73,134,300	1	0	100	0	DPMPTSP
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket	70,000,000	1	6,750,000	33.33	9.64	DPMPTSP
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	24,133,700	1	8,491,280	100	35.18	DPMPTSP
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	Laporan	216,523,000	2	27,407,020	100	12.66	DPMPTSP
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	dokumen	1,475,820,930	1	301,963,083	100	20.46	DPMPTSP
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Laporan	3,846,500	1	2,450,000	100	63.69	DPMPTSP
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2	Laporan	152,000,000	2	35,290,197	100	23.22	DPMPTSP

2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	1,319,974,430	1	264,222,886	100	20.02	DPMPTSP
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20	Unit	1,579,743,950	12	214,039,010	60	13.55	DPMPTSP
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	unit	1,336,436,050	7	214,039,010	35	16.02	DPMPTSP
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	243,307,900	5	0	50	0	DPMPTSP
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	12,650	proyek	189,266,230	0	22,533,246	0	11.91	DPMPTSP
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	2	dokumen	189,266,230	0	22,533,246	0	11.91	DPMPTSP
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi Provinsi	2	dokumen	189,266,230	0	22,533,246	0	11.91	DPMPTSP

2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	33.5	persen	136,193,520	8	17,902,164	23.88	13.14	DPMPTSP
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	2	dokumen	136,193,520	0	17,902,164	0	13.14	DPMPTSP
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	1	dokumen	136,193,520	0	17,902,164	0	13.14	DPMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	100	persen	640,175,740	40	114,755,148	40	17.93	DPMPTSP
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan Provinsi	100	persen	640,175,740	40	114,755,148	40	17.93	DPMPTSP

2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	400	pelaku usaha	498,754,100	744	84,710,820	100	16.98	DPMPTSP
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	10	pelaku usaha	141,421,640	57	30,044,328	100	21.24	DPMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai investasi	12.3	Triliun	182,326,230	0	22,533,246	0	12.36	DPMPTSP
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	92	persen	182,326,230	0	22,533,246	0	12.36	DPMPTSP
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan	18	kegiatan usaha	17,280,000	0	0	0	0	DPMPTSP

			inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha								
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	13	kegiatan usaha	126,146,230	0	22,533,246	0	17.86	DPMPTSP
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40	pelaku usaha	38,900,000	0	0	0	0	DPMPTSP
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100	persen	70,950,820	100	15,022,164	100	21.17	DPMPTSP

	2.18.06.1.01	Urusan Pengelola Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	2	dokumen	70,950,820	0	15,022,164	0	21.17	DPMPTSP
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2	dokumen	70,950,820	0	15,022,164	0	21.17	DPMPTSP

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								17,755,928,560.00	20,171,142,940.00	19,793,937,440.00	2,038,008,880.00							22,161,696,700.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17,755,928,560.00	20,171,142,940.00	19,793,937,440.00	2,038,008,880.00							22,161,696,700.00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							17,755,928,560.00	20,171,142,940.00	19,793,937,440.00	2,038,008,880.00							22,161,696,700.00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				79 Nilai	79 Nilai	16,186,129,199.00	18,687,270,400.00	18,575,024,900.00	3,275,567,501.00							19,461,696,700.00	
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan				40 dokumen	40 dokumen	13,575,703,875.00	15,130,595,620.00	15,130,595,620.00	1,554,891,745.00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		14,000,000,000.00	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	13,575,703,875.00	15,130,595,620.00	15,130,595,620.00	1,554,891,745.00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUANGAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14,000,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	517,692,644.00	501,109,900.00	388,864,400.00	-128,828,244.00				Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		402,696,700.00
	2.18.01.1.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,599,100.00	5,073,400.00	5,073,400.00	-7,525,700.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25,000,000.00
	2.18.01.1.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72,473,244.00	0.00	0.00	-72,473,244.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0.00
	2.18.01.1.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	0.00	73,134,300.00	73,134,300.00	73,134,300.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			72,471,700.00
	2.18.01.1.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80,000,000.00	0.00	0.00	-80,000,000.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0.00
	2.18.01.1.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18.01.1.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,225,300.00	0.00	0.00	-25,225,300.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0.00
	2.18.01.1.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	0.00	25,516,200.00	24,133,700.00	24,133,700.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25,225,000.00
	2.18.01.1.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 laporan	327,395,000.00	327,386,000.00	216,523,000.00	-110,872,000.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200,000,000.00
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 dokumen	1 dokume n	1,481,471,980.00	1,475,820,930.00	1,475,820,930.00	-5,651,050.00				Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1,659,000,000.00
	2.18.01.1.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 laporan	2,464,900.00	3,846,500.00	3,846,500.00	1,381,600.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5,000,000.00
	2.18.01.1.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 laporan	160,000,000.00	152,000,000.00	152,000,000.00	-8,000,000.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			154,000,000.00
	2.18.01.1.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,319,007,080.00	1,319,974,430.00	1,319,974,430.00	967,350.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1,500,000,000.00
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				20 unit	20 Unit	611,260,700.00	1,579,743,950.00	1,579,743,950.00	968,483,250.00				Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3,400,000,000.00
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	549,440,700.00	1,336,436,050.00	1,336,436,050.00	786,995,350.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2,500,000,000.00
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	61,820,000.00	243,307,900.00	243,307,900.00	181,487,900.00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			900,000,000.00
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMMA)				12.650 proyek	12.650 Proyek	259,998,420.00	215,186,230.00	189,266,230.00	140,001,580.00							400,000,000.00
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha				2 dokumen	2 Dokumen	259,998,420.00	215,186,230.00	189,266,230.00	-70,732,190.00			-	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400,000,000.00
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				2 Dokumen	2 Dokum en	259,998,420.00	215,186,230.00	189,266,230.00	-70,732,190.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			400,000,000.00
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali				33.5 persen	33.5 Persen	277,600,560.00	151,553,520.00	136,193,520.00	122,399,440.00							400,000,000.00
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal				2 dokumen	1 Dokum en	277,600,560.00	151,553,520.00	136,193,520.00	-141,407,040.00				Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarak at Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400,000,000.00
	2.18.03.1.01 .0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokum en	277,600,560.00	151,553,520.00	136,193,520.00	-141,407,040.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			400,000,000.00
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku				100 persen	100 persen	609,629,960.00	818,735,740.00	640,175,740.00	490,370,040.00							1,100,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi				100 persen	100 persen	609,629,960.00	818,735,740.00	640,175,740.00	30,545,780.00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		1,100,000,000.00
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	456,021,400.00	667,234,100.00	498,754,100.00	42,732,700.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			900,000,000.00
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	153,608,560.00	151,501,640.00	141,421,640.00	-12,186,920.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200,000,000.00
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi				12.3 Triliun	12.3 Triliun	331,846,141.00	223,606,230.00	182,326,230.00	268,153,859.00							600,000,000.00
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal				92 persen	92 Persen	331,846,141.00	223,606,230.00	182,326,230.00	-149,519,911.00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		600,000,000.00
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18.05.1.01 .0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya																	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan usaha	18 Kegiatan usaha	49,575,000.00	34,560,000.00	17,280,000.00	-32,295,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			300,000,000.00
	2.18.05.1.01 .0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				321 Kegiatan usaha	13 Kegiatan usaha	232,505,941.00	150,146,230.00	126,146,230.00	-106,359,711.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200,000,000.00
	2.18.05.1.01 .0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				325 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	49,765,200.00	38,900,000.00	38,900,000.00	-10,865,200.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100,000,000.00
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan				100 persen	100 Persen	90,724,280.00	74,790,820.00	70,950,820.00	109,275,720.00							200,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi				2 dokumen	2 Dokumen	90,724,280.00	74,790,820.00	70,950,820.00	-19,773,460.00				Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200,000,000.00
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	90,724,280.00	74,790,820.00	70,950,820.00	-19,773,460.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata			200,000,000.00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Semesta Berencana Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bertujuan mensinkronisasikan program dan kegiatan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2025 sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sesuai dengan kondisi dan dinamika saat ini.

Faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I yaitu rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran, sehingga target belum tercapai pada triwulan I.

Adapun upaya yang perlu dilakukan pada triwulan-triwulan berikutnya yaitu salah satunya melakukan konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.

Demikian, semoga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2025.



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sampai dengan TW I, rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunan-nya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,



I/G.A/K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN	
 TRIWULAN I TAHUN 2025	7
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pemajuan	
Masyarakat Adat Provinsi Bali sampai Triwulan I	7
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	12
2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali	14
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMAJUAN	
 MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2025	15
BAB V PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	8
Tabel 3.1 : Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebagai perangkat daerah juga berkewajiban menyusun perencanaan baik yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun maupun tahunan. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat dan fungsi dinas pemajuan masyarakat adat sebagai perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat.

Dalam Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat atau disebut dengan Desa *Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya dari para Leluhur/Tetua Bali. Bali dan *Kramanya* memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang sangat tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang

bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya. Tata kehidupan *Krama* Bali yang khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang *metaksu*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah untuk :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
4. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting yaitu memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 (tahun berjalan) mengacu pada APBD tahun berjalan dan Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

dalam bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Daerah serta Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Penguatan dan Pemberdayaan Adat di Provinsi Bali

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2025

dalam bab ini diuraikan mengenai pagu anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025. Pengalokasian pagu anggaran masing program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu program prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab V : Penutup

Lampiran-lampiran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sampai Triwulan I

Hasil evaluasi dipergunakan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Dalam rangka melaksanakan RENJA Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 480.783.920.457,- (Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) untuk pembiayaan dengan 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Adapun hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sampai dengan triwulan I tahun 2025, dapat dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Per Tahun		Realisasi Sampai Dengan Triwulan I				Keterangan
							Keuangan	Kinerja	Keuangan	%	Kinerja	%	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2	22				Bidang Urusan Kebudayaan								
2	22	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi								
2	22	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.797.300	7	7.785.000	21%	1	14%	
2	22	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	24.904.900	6	6.735.000	27%	1	17%	
2	22	01	1.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.892.400	1	1.050.000	8,8%	0	0%	
2	22	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diproses	10.752.350.771	44	1.948.214.906	18%	11	25%	
2	22	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses	10.752.350.771	44	1.948.214.906	18%	11	25%	

2	22	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan barang dan jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diproses	342.515.100	875	34.889.200	10%	211	24%	
2	22	01	1.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai	10.934.200	1	8.443.000	77%	1	100%	
2	22	01	1.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jasa pengadaan dan cetak yang diproses dan siap pakai	36.145.200	1	-	0%	-	0%	
2	22	01	1.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang diadakan	19.243.700	720	2.707.500	14%	180	25%	
2	22	01	1.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.192.000	125	23.738.700	8,6%	30	24%	
2	22	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang diadakan dan siap pakai	267.604.080	15	-	0%	-	0%	
2	22	01	1.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	267.604.080	15	-	0%	-	0%	
2	22	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dan siap pakai	548.166.834	35	152.718.225	27%	10	29%	
2	22	01	1.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia dan siap pakai	548.166.834	35	152.718.225	27%	10	29%	

2	22	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	2.312.289.248	18	342.897.608	15%	4	22%	
2	22	01	1.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai	566.441.852	6	57.476.492	10%	1	16%	
2	22	01	1.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1.745.847.396	12	285.421.116	16%	3	25%	
2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan							
2	22	09	8.01		Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah keluaran pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	465.844.680.388	600	115.657.763.726	24%	150	25%	
2	22	09	8.01	01	Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	465.625.070.676	300	115.630.925.280	25%	75	25%	
2	22	09	8.01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	219.609.712	300	26.838.446	12%	75	25%	
2	22	09	8.02		Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	705.727.988	75	70.452.992	10%	17	23%	
2	22	09	8.02	01	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	151.055.550	30	21.331.500	14%	7	23%	

2	22	09	8.02	02	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	554.672.438	45	49.121.492	9%	10	22%	
2	22	09	8.03		Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses	352.245.230	6	29.689.246	8%	2	33%	
2	22	09	8.03	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	352.245.230	6	29.689.246	8%	2	33%	
T o t a l							479.071.323.992	1.675	118.244.410.903	24%	406	24%	

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan Tata Kelola pemerintahan Desa Adat, yaitu:
 - a. Masih terdapat Desa Adat yang belum membentuk kelembagaan Desa Adat sesuai Perda 4 Tahun 2019;
 - b. Masih terdapat Desa Adat yang belum membentuk lembaga Desa Adat sesuai Perda 4 Tahun 2019; dan
 - c. Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Desa Adat.
2. Perekonomian Desa Adat belum optimal untuk menopang pembangunan Desa Adat, yaitu:
 - a. Tatakelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum optimal (Tata kelola Kelembagaan, Tata Kelola Usaha, Tata Kelola Keuangan);
 - b. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - c. Terdapat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang masuk ke ranah Hukum karena fraud dan korupsi yang dilakukan oleh pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - d. *Prajuru* Desa Adat belum mampu melihat potensi dan peluang ekonomi pada sektor rill;
 - e. Keterbatasan modal Desa Adat untuk membangun *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) ; dan
 - f. Kemampuan SDM untuk membangun dan mengelola *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) masih kurang.

3. Pemajuan Hukum Adat (*Awig-Awig* dan *Pararem*) belum sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan Pedoman Penyuratan *Awig-Awig/Pararem*:
 - a. Permasalahan Dudukan oleh Desa Adat dan Banjar Adat
 - b. Tindak lanjut rekomendasi dari Ombudsman RI perwakilan Bali terhadap SOP registrasi *Pararem*.
 - c. Perlu dilaksanakan sosialisasi Pedoman *Penyuratan Awig-Awig* dan Pedoman *Penyuratan Pararem Kasukretan Krama* di *wewidangan* Desa Adat
4. Kualitas SDM Pemerintahan Desa Adat belum optimal yaitu :
 - a. Ada Desa Adat belum membuat/menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun
 - b. Memfasilitasi Desa Adat untuk membuat peta batas *wewidangan* Desa AdatBelum optimalnya proses perencanaan, penataan kawasan, pelaksanaan pembangunan di Desa Adat.
5. Isu-isu terkait Subak :
 - a. Belum terdatanya Subak dan Subak Abian secara optimal, dan belum sinkronnya jumlah data Subak dan Subak Abian antaraKabupaten/Kota dengan Provinsi;
 - b. Alih fungsi lahan, jumlah lahan berkurang tetapi jumlah Subak selalu berkembang.

2.3. Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali perlu adanya penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen RKPD Provinsi Bali dengan Renja Perangkat daerah. Dari hasil review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, didapat bahwa jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan RKPD Provinsi Bali dengan Renja Perubahan Dinas Pemajuan masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu sebanyak 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.482.164.038.708,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).

2.4. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 akan disampaikan pada Forum Perangkat Daerah yang akan diikuti oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Adat, Majelis Desa Adat, Akademisi, lembaga adat, maupun dari Perangkat Daerah Provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait. Usulan/masukan dari peserta forum selanjutnya akan ditelaah sehingga renja akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2025

Keberhasilan pencapaian pembangunan dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat di Provinsi Bali, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 yang bersumber dari APBD difokuskan kepada:

- A. Kerangka pendanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat, melalui :
1. Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. Pendataan dan Penataan Lembaga Pemerintahan Desa Adat;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Desa Adat;
 - c. Memantapkan kebijakan tata Kelola modern pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Adat sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
 - d. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT);
 - e. Pendampingan dan Verifikasi Proposal Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2025;
 - f. Pencairan 1.493 Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2025;
 - g. Fasilitasi Klinik Konsultasi pengelolaan tata kelola keuangan Desa Adat;
 - h. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Adat;
 - i. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas *Pasikian/Paiketan* Lembaga Adat Tingkat Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan (PAKIS Bali, *Yowana* dan *Pacalang*;

2. Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. Desiminasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta turunannya melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online;
 - b. Pendampingan Penyuratan *Awig-Awig* dan *Pararem*;
 - c. Sosialisasi Pedoman Teknis *Penyuratan Awig-Awig* dan *Pararem*;
 - d. Registrasi *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
 - e. Pemantapan penyempurnaan Aplikasi JIDHAT (Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat);
 - f. Sosialisasi/Desiminasi Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* Adat;
 - g. Memfasilitasi penyelesaian *Wicara* Adat;
 - h. Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat;
 - i. Memantapkan Pelaksanaan Kesepakatan Tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDUBERADAT);
 - j. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT di Desa Adat;
 - k. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT tingkat Provinsi, Kab/Kota, dan Kecamatan; dan
 - l. Publikasi SIPANDUBERADAT melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online.

- B. Kerangka pendanaan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat, melalui :
1. Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat, difokuskan pada:
 - a. Sosialisasi Perda tentang *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD);
 - b. Sosialisasi Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD); dan
 - c. Monev dan pembinaan LPD.
 2. Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. Pendataan Desa Adat yang sudah membentuk sektor riil;
 - b. Sosialisasi Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUPDA ;
 - c. Fasilitasi pembentukan BUPDA di Desa Adat di Kab/Kota se-Bali;
 - d. Pembuatan Sistem Tata Kelola BUPDA Desa Adat Berbasis Aplikasi;
 - e. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Perekonomian Desa Adat; dan
 - f. Monitoring dan Pendataan Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
- C. Kerangka pendanaan Penyelenggaraan Desa Adat, melalui :
1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan, difokuskan pada :
 - a. Pemutakhiran dan Sosialisasi Data Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Umat Hindu;
 - b. Pemetaan batas wewidangan Desa Adat secara digital di Kabupaten/Kota;
 - c. Pembuatan Profil Desa Adat berbasis Website bekerjasama dengan INSTIKI Bali;
 - d. Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat Tahun 2025;

- e. Pemutahiran data dan informasi potensi Desa Adat;
- f. Pemutakhiran Data *Subak* dan *Subak Abian*;
- g. *Sosialisasi* Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2025; dan
- h. Verifikasi usulan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2025.

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dirancang kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.482.164.038.708,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) yang dirinci sesuai dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 6 (enam) Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.15.639.383.884 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
2. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.466.524.654.824 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Rencana kerja dan kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 secara rinci dituangkan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									482.164.038.708			531.828.181.188		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									482.164.038.708			531.828.181.188		
2	22	9			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI									466.524.654.824			514.681.931.188 m		
2	22	9	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat									465.844.815.188			512.866.931.188		
2	22	9	8.01	1	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pemerintahannya	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	300 Desa Adat	85	465.625.077.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	511.904.431.188	
2	22	9	8.01	2	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	300 Desa Adat	85	219.737.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	962.500.000	
2	22	9	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat									327.491.706			1.155.000.000		
2	22	9	8.02	1	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	30 Desa Adat	11,05	65.266.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	495.000.000	
2	22	9	8.02	2	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	45 Desa Adat	11,05	262.225.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	660.000.000	
2	22	9	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat									352.347.930			660.000.000		
2	22	9	8.03	3	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	4 Laporan	82,78	352.347.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	660.000.000	

2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								15.639.383.884						17.196.250.000	
2	22	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								37.000.000						40.700.000	
2	22	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,85	6 Dokumen	100%	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	28.600.000		
2	22	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,85	1 Laporan	100%	12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	12.100.000		
2	22	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.131.795.722					12.100.000.000		
2	22	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Denpasar	80,85	52 Orang/Bulan	100%	12.131.795.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	12.100.000.000		
2	22	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								342.515.100					725.175.000		
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,85	1 Paket	100%	10.934.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	7.425.000		
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,85	1 Paket	100%	36.145.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	39.050.000		
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,85	720 Dokumen	100%	19.243.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	18.700.000		
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,85	125 Laporan	100%	276.192.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	660.000.000		
2	22	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								267.604.080					550.000.000		
2	22	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	Denpasar	80,85	15 Unit	100%	267.604.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	550.000.000		

2	22	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								548.179.734					385.000.000
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	80,85	35 Laporan	100%	548.179.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	385.000.000
2	22	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.312.289.248					4.399.564.106
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,85	6 Unit	100%	566.441.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	990.000.000
2	22	1	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,85	12 Unit	100%	1.745.847.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	3.409.564.106
TOTAL													482.164.038.708					531.828.181.188

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Rancangan RKPD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2025, serta Agenda Pembangunan Nasional dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan berpengaruh terhadap Bidang Prioritas Pembangunan Bali, khususnya Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya.

Dalam RENJA Perubahan ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I dan rencana program/kegiatan pada Tahun 2025. kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian tentu saja dalam pelaksanaan kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 ini diupayakan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Bali Tahun 2025;
2. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam RKA.

3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dirancang kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.482.164.038.708,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan dalam upaya mempercepat terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan strategis yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan demi terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat yang berkualitas.

Bali, 9 Juli 2025
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,

I G A K KARTIKA JAYA SEPUTRA
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19680613 199403 1 012

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH
DAERAH (RENJA)**

**Sekretariat DPRD Provinsi Bali
Tahun 2025**



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu.

Astiti Anghayu Bagia kami panjatkan kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, sehingga Sesuai dengan susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang ketiganya diselenggarakan dalam kerangka representasi rakyat, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali harus mampu mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja dewan. Dengan demikian diperlukan perencanaan yang matang, baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah dan pembangunan, sehingga mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Om, Santih, Santih, Santih Om.

Bali, 26 Juni 2025
Sekretaris DPRD Provinsi Bali

Ketut Nayaka, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
B NIP. 19680911 198903 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penyusunan Renja.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...15	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
3.3 Program dan Kegiatan... ..	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	20
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	20
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka tahapan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 diwajibkan untuk menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali 2024-2026 sebagai dasar penyusunan Renja, didasarkan pada Rancangan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Sebagaimana telah dibuahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
 22. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);
 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021. (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 42);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025. Penjabaran ini merupakan upaya menjaga konsistensi dan sinkronisasi perencanaan Pemerintah Daerah dan perencanaan pada perangkat daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali 2025 adalah :

1. Menentukan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2025.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025 dengan RKPD tahun 2025.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Sistematika Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; dan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Bali Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara n RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab													
						I		II		III		IV		(%)														
						-7		-8		-9		-10		-11														
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11	-12												
K																	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																												
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan																											
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86	129.898.278.266,00	18.879.031.808,00	0,00		0,00		0,00		15%	SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
		4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan terhadap penganggaran belanja OPD	100	552.920.020,00	93.597.224,00	0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
		4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	335.389.710,00	83.206.142,00	0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
		4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	217.530.310,00	10.391.082,00	0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
		4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	14.084.061.598,00	2.055.624.591,00	0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
		4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	13.882.480.678,00	2.040.602.427,00	0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
		4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	12	101.166.410,00	7.511.082,00	0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
		4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi	12	100.414.510,00	7.511.082,00	0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV		K	Rp		
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD													
		4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	8.595.466.382,00		799.142.338,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	3	149.002.100,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	439.034.000,00	0	490.000,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1.734.090.446,00	1	79.937.000,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	137.117.600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	1.075.320.000,00	3	122.700.000,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	5.060.902.236,00	3	596.015.338,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	12.508.990.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	12.508.990.500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100	2.543.024.042,00		386.639.836,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia untuk kegiatan surat menyurat	12	15.700.000,00	3	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	850.000.000,00	3	121.796.294,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.677.324.042,00	3	259.843.542,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan	100	28.798.342.450,00		565.118.620,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
							I		II		III		IV						
							-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Daerah	baik															
		4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61	3.750.756.238,00	11	422.669.875,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	24.404.546.212,00	1	142.448.745,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	643.040.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100	61.568.152.634,00		14.882.863.323,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55	59.732.867.624,00	55	14.797.917.841,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	729	1.579.698.500,00	0	68.794.400,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55	255.586.510,00	0	16.151.082,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	1.247.320.640,00		96.045.876,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	30	184.444.240,00	0	30.044.328,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48	1.062.876.400,00	12	66.001.548,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2	(tidak ada sasaran)																		
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	100	94.132.418.522,00		19.660.911.338,00		0,00		0,00		0,00		21%			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100	11.868.172.860,00		558.563.132,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1.030.112.520,00	0	187.555.104,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	21	10.196.314.330,00	1	363.496.946,00		0,00		0,00		0,00					SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						I		II		III		IV					
						-7		-8		-9		-10					
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	641.746.010,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terbentuknya Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100	2.787.061.132,00		37.555.510,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	75.911.892,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	64.867.710,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	895.785.110,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	872.174.410,00	0	7.511.182,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	1	878.322.010,00	0	7.511.082,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100	22.191.813.064,00		3.690.541.262,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	5.347.460.414,00	3	812.986.282,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	5.044.255.800,00	3	791.926.242,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	5.017.200.830,00	3	744.945.454,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	6.051.103.820,00	3	977.626.656,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	1	731.792.200,00	1	363.056.628,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100	12.328.427.020,00		1.894.261.634,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	2.524.381.230,00	1	1.285.892.978,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						I		II		III		IV						
						-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18	4.467.166.400,00	18	405.000.000,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	670.186.800,00	5	60.000.000,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1.389.943.820,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60	3.276.748.770,00	15	128.346.492,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terserap dan terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk menunjang tugas dan Fungsi DPRD	100	37.864.757.932,00		12.288.297.070,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	1.968.968.812,00	3	704.888.246,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	676.537.500,00	0	144.296.660,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	35.219.251.620,00	1	11.439.112.164,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase pelaksanaan pengawasan kode etikDPRD dalam rangka menunjang tugas dan Fungsi DPRD	100	588.000.664,00		75.508.436,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	588.000.664,00	0	75.508.436,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan menunjang tugas dan fungsi DPRD	100	6.504.185.850,00		1.116.184.294,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10	4.960.601.230,00	2	775.742.946,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	180	369.032.820,00	0	15.022.164,00		0,00		0,00		0,00			SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretaris DPRD
Provinsi Bali
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali			5%	5%	5%		5%	5%	5%		
2	Persentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD						100%				100%	

Secara umum Pencapaian Program dan Kegiatan di Tahun 2023 dapat diketahui bahwa telah mencapai target. Dari dua program yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2023 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan, terdapat 9 Sub Kegiatan yang realisasi keuangan berada di bawah 75% antara lain:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- i. Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat 19 sub kegiatan yang realisasi keuangannya berada di bawah 75% antara lain :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- e. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
- f. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan
- g. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
- h. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum
- i. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur
- j. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat
- k. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian
- l. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
- m. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- n. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
- o. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam daerah
- p. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

- q. Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
- r. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- s. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Bali sebagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdapat isu-isu strategis yang dihadapi dan perlu dipecahkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut, antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas layanan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat;
3. Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah-ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat;
4. Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik;
5. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan hasil yang maksimal untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

2.4 Review terhadap Perubahan RKPD

Sekretariat DPRD Provinsi Bali didukung dengan 2 Program, 15 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 224.030.696.788,- Secara detil dapat dilihat dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Bali

No	Rancangan Awal RKPD					Perubahan RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86	Rp. 259.120.598.399	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86	Rp. 277.671.654.488	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD	100%		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD	100%		

Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - (6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut

DPRD

- (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- h. Layanan Administrasi DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPR
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 - a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik
 - b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - (1) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 - (2) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - (3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 - (4) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD
 - (5) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - (1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - (2) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - (3) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - (4) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - (5) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 - (2) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - (5) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
 - e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - (1) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
 - f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - g. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - (2) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Pagu akhir validasi sebesar Rp. 277.671.654.488,- Pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD dikarenakan adanya penambahan sub kegiatan baru dan persiapan pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2024-2029.

Proses membandingkan rencana awal dengan analisa kebutuhan adalah untuk mengetahui sejauh mana usulan-usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD dapat diakomodir oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, di samping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD Provinsi Bali, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku
kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan melakukan penyelarasan terhadap kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional dan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Bali

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi perangkat daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD Provinsi Bali menetapkan tujuan, yaitu **“Terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang prima”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara *Specific* (spesifik), *Measureable* (dapat diukur), *Attributable* (Bermanfaat), *Reliable* (Dapat dipercaya), *Timely* (Tepat waktu) dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan sasaran yaitu Meningkatkan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD, untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi perangkat daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- b. Target kinerja sesuai RPD Tahun 2024-2026;
- c. Hasil Evaluasi dari Realisasi Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam penyusunan Renja 2025 ini terbagi dalam 2 program, 15 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Adapun pembagian program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - (6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

- Operasional atau Lapangan
- (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- h. Layanan Administrasi DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
 - (2) SubKegiatanFasilitasiRapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 - a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - (1) SubKegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
 - b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - (1) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 - (2) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - (3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 - (4) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD
 - (5) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - (1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - (2) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - (3) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - (4) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - (5) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 - (2) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - (5) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
 - e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - (1) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

- (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
- f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - (2) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan Alat Kelengkapan DPRD. Berdasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Rancangan Akhir Renja secara keseluruhan pendanaan belanja langsung untuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada Renja Tahun 2025 sebesar Rp. 277.671.654.488,-, berdasarkan kebijakan pimpinan terdapat perencanaan anggaran yang didasari beberapa kondisi yaitu Kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Perencanaan Anggaran mengubah total pendanaan belanja langsung untuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Rincian program dan kegiatan beserta pagu anggaran, indikator dan target kinerja, serta lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran.

BAB V

PENUTUP

Sebagai satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini memiliki kedudukan yang sangat penting untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Rencana Kerja ini menerjemahkan perencanaan jangka menengah ke dalam rencana tahunan yang bersifat operasional dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang.

Rencana Kerja (Renja) ini bukanlah sebuah dokumen yang berdiri sendiri. Di satu sisi, Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Bali, mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2025 dan di sisi lain menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2025.

Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2025 ini ditetapkan oleh Kepala Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan pada esensinya merupakan komitmen bersama dari semua jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Oleh karena itu semua jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD Provinsi Bali bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh demi tercapainya target-target kinerja selama tahun 2025 serta terwujudnya tujuan serta sasaran strategis yang ingin dicapai.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD								259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00						286.742.921.162,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)				86 Persen	86 Persen	120.001.456.735,00	133.739.752.666,00	129.898.278.266,00	18.637.873.443,00							138.639.330.178,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD				100 Persen	100 Persen	794.007.780,00	798.629.120,00	552.920.020,00	-241.087.760,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		956.008.340,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	491.165.710,00	335.389.710,00	335.389.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			500.401.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	311.606.140,00	307.463.410,00	217.530.310,00	-94.075.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			455.606.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	11.114.825.303,00	14.189.800.598,00	14.084.061.598,00	2.969.236.295,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		22.059.538.086,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/Bulan	134 Orang/Bulan	10.799.965.123,00	13.882.480.678,00	13.882.480.678,00	3.082.515.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			21.599.930.246,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	159.607.840,00	155.478.410,00	101.166.410,00	-58.441.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			209.607.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	151.841.510,00	100.414.510,00	100.414.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

[illegible]

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	899.275.600,00	460.016.000,00	439.034.000,00	-460.241.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN - ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			989.275.600,00	SEKRE TARIA T DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.358.543.300,00	1.834.120.446,00	1.734.090.446,00	375.547.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.458.543.300,00	SEKRET ARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	168.631.600,00	137.117.600,00	137.117.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			165.240.000,00	SEKRET ARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.062.108.000,00	1.075.320.000,00	1.075.320.000,00	13.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.562.108.000,00	SEKRET ARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.161.250.920,00	8.802.329.336,00	5.060.902.236,00	-100.348.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.761.250.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	4.562.944.000,00	12.511.975.500,00	12.508.990.500,00	7.946.046.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.962.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	4.562.944.000,00	12.511.975.500,00	12.508.990.500,00	7.946.046.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.962.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas				100 Persen	100 Persen	2.523.742.864,00	2.073.024.042,00	2.543.024.042,00	19.281.178,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.634.242.864,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	380.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			910.000.000,00	SEKRET ARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.613.742.864,00	1.677.324.042,00	1.677.324.042,00	63.581.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.713.742.864,00	SEKRET ARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik				100 Persen	100 Persen	25.594.604.710,00	28.798.342.450,00	28.798.342.450,00	3.203.737.740,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		26.164.604.710,00	SEKRET ARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				61 Unit	61 Unit	3.610.132.060,00	3.750.756.238,00	3.750.756.238,00	140.624.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.910.132.060,00	SEKRET ARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	21.368.892.650,00	24.404.546.212,00	24.404.546.212,00	3.035.653.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			21.568.892.650,00	SEKRET ARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	22 Unit	0,00	643.040.000,00	643.040.000,00	643.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			685.580.000,00	SEKRET ARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	60.513.985.118,00	61.741.728.634,00	61.568.152.634,00	1.054.167.516,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			63.923.985.118,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				55 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	57.682.611.078,00	59.732.867.624,00	59.732.867.624,00	2.050.256.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.682.611.078,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				729 Paket	729 Paket	0,00	1.694.242.500,00	1.579.698.500,00	1.579.698.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.909.994.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	55 Orang	321.379.540,00	314.618.510,00	255.586.510,00	-65.793.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			331.379.540,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	6.111.589.240,00	1.116.764.640,00	1.247.320.640,00	-4.864.268.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.811.589.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD				30 Laporan	30 Laporan	0,00	184.444.240,00	184.444.240,00	184.444.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.904.342.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				48 Laporan	48 Laporan	0,00	932.320.400,00	1.062.876.400,00	1.062.876.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.907.246.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	NON URUSAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00							286.742.921.162,00	
1.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)				100 Persen	100 Persen	139.119.141.664,00	144.401.979.722,00	147.773.376.222,00	8.984.449.320,00							148.103.590.984,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	19.998.271.680,00	22.948.289.160,00	11.868.172.860,00	-8.130.098.820,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.163.721.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.939.550.680,00	1.931.295.420,00	1.030.112.520,00	-909.438.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				21 Dokumen	21 Dokumen	17.264.544.320,00	20.090.198.230,00	10.196.314.330,00	-7.068.229.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.264.544.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	794.176.680,00	926.795.510,00	641.746.010,00	-152.430.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			899.176.680,00	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	8.277.959.200,00	8.805.586.632,00	2.787.061.132,00	-5.490.898.068,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.077.959.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1.649.331.340,00	1.765.207.192,00	75.911.892,00	-1.573.419.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.749.331.340,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1.662.496.040,00	1.685.902.010,00	64.867.710,00	-1.597.628.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.762.496.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.956.040,00	1.839.257.410,00	895.785.110,00	-760.170.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.655.956.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.654.204.040,00	1.702.591.710,00	872.174.410,00	-782.029.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.954.204.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.655.971.740,00	1.812.628.310,00	878.322.010,00	-777.649.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.955.971.740,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	37.595.503.616,00	40.337.963.464,00	22.191.813.064,00	-15.403.690.552,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		40.095.503.616,00	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	9.295.573.080,00	9.602.197.714,00	5.347.460.414,00	-3.948.112.666,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.995.573.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	9.216.366.500,00	9.599.763.250,00	5.044.255.800,00	-4.172.110.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.316.366.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	8.454.536.920,00	8.786.622.980,00	5.017.200.830,00	-3.437.336.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.954.536.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Urusan Pemerintah an Bidang Perekonom ian				12 Laporan	12 Laporan	9.011.091.116,00	10.684.155.020,00	6.051.103.820,00	-2.959.987.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.911.091.116,00	SEKRET ARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																			
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.617.936.000,00	1.665.224.500,00	731.792.200,00	-886.143.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.917.936.000,00	SEKRET ARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	17.113.601.008,00	17.683.881.420,00	12.328.427.020,00	-4.785.173.988,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		19.223.601.008,00	SEKRET ARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.352.255.820,00	6.285.481.230,00	2.524.381.230,00	-3.827.874.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.952.255.820,00	SEKRET ARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																			
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				18 Orang	18 Orang	3.288.832.448,00	4.872.166.400,00	4.467.166.400,00	1.178.333.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.988.832.448,00	SEKRET ARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	920.451.180,00	730.186.800,00	670.186.800,00	-250.264.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			930.451.180,00	SEKRET ARIAT DPRD	

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.204.342.880,00	1.477.743.520,00	1.389.943.820,00	-814.399.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.904.342.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				60 Dokumen	60 Dokumen	4.347.718.680,00	4.318.303.470,00	3.276.748.770,00	-1.070.969.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.447.718.680,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Tersekap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	41.461.463.180,00	39.919.033.132,00	91.505.715.632,00	50.044.252.452,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		44.161.463.180,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	3.816.718.420,00	3.810.849.012,00	1.968.968.812,00	-1.847.749.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.916.718.420,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.376.673.400,00	886.076.800,00	54.317.495.200,00	51.940.821.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.976.673.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	35.268.071.360,00	35.222.107.320,00	35.219.251.620,00	-48.819.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			37.268.071.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	836.713.080,00	862.378.564,00	588.000.664,00	-248.712.416,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		896.713.080,00	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				3 Laporan	3 Laporan	836.713.080,00	862.378.564,00	588.000.664,00	-248.712.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			896.713.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	13.835.629.900,00	13.844.847.350,00	6.504.185.850,00	-7.331.444.050,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		14.484.629.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				10 Dokumen	10 Dokumen	9.661.184.220,00	9.648.671.930,00	4.960.601.230,00	-4.700.582.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.184.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		

Renja Sekretariat DPRD Provinsi Bali Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				180 Laporan	180 Laporan	485.055.880,00	507.423.720,00	369.032.820,00	-116.023.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			495.055.880,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				6 Dokumen	1 Dokumen	3.689.389.800,00	3.688.751.700,00	1.174.551.800,00	-2.514.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.989.389.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
	JUMLAH									259.120.598.399,00	278.141.732.388,00	277.671.654.488,00	18.551.056.089,00						286.742.921.162,00		



PEMERINTAH PROVINSI BALI

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH



2025



**Jl. Basuki Rahmat-Niti Mandala
Renon Denpasar**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dengan baik.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam adanya perencanaan ini. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Bali, 1 Juli 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Dewa Made Indra

NIP. 19670203 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.3.1 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan	30
2.3.2 Biro Hukum	31
2.3.3 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian.....	31
2.3.4 Biro Organisasi	31
2.3.5 Biro Umum	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	59
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali	60
3.3 Program dan Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	75
BAB V PENUTUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap tahun Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September 2023 dimana berakhir periode RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka diperlukan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif.

Penambahan satu perangkat daerah pada Sekretariat Daerah bias merujuk pada pembentukan unit baru dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah, atau pengalihan tugas dan fungsi dari unit lain ke Sekretariat Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, terutama dalam hal koordinasi, penyusunan kebijakan, dan pelayanan administrative. Terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali menyesuaikan nomenklaturnya menjadi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali serta dan bertambahnya 1 Biro yaitu Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonomi Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah sampai dengan ditetapkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Strategis (Renstra PD) Tahun 2024-2026, yang digunakan sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dari tahun 2024-2026.

Fokus utama Pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mencakup Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam periode Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat :

1. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan sub kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran serta kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali (RKPD) Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 19);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran prioritas, program dan kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistic, integrasi dan spasial.

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Maksud Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah untuk mengetahui perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja dan

efisiensi sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah yang menunjang Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antar Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
2. Sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024, sehingga terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
3. Menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan Hukum, Maksud Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Berikut tabel T-C.29 yang disesuaikan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM dan IKK.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan usulan pemangku kepentingan yang dituangkan dalam tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Kerja dan Kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada RENSTRA dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (tolok ukur menggunakan Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun sebelumnya. Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Jumlah anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.253.365.989.075 (dua ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.228.698.124.325. (dua ratus dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan capaian kinerja sudah terealisasi sebesar 97.48%.

Tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Bali sudah melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang dilaksanakan oleh seluruh Biro yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Adapun Biro-Biro yang dimaksud antara lain:

1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali;
2. Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
3. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
4. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali;

5. Biro Umum Setda Provinsi Bali; dan
6. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali

Hasil Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan pada Biro-biro di Lingkungan Setda Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023

NO	NAMA BIRO	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp.)
				TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
1.	Sekretariat Daerah	Rp. 58.815.415.699	Rp. 56.763.836.792	100%	99,90%	100%	96,51%	Rp. 2.051.578.907
2.	Biro Pemerintahan dan Kesra	Rp.79.434.346.666	Rp.75.238.365.923	100%	100%	100%	94,72%	Rp.4.195.980.743
3.	Biro Hukum	Rp.5.870.907.752	Rp.5.549.561.221	100%	100%	100%	94,53%	Rp.321.346.531
4.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Rp.7.399.282.364	Rp.5.718.489.520	100%	96,62%	100%	77,09%	Rp.1.680.792.844
5.	Biro Organisasi	Rp.2.793.509.644	Rp.1.876.931.594	100%	90,40%	100%	67,19%	Rp.916.578.050
6	Biro Umum	Rp.99.052.526.950	Rp.83.550.939.275	100%	97,95%	100%	84,35%	Rp.15.501.587.675
7	Biro Humas dan Protokol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL		Rp.253.365.989.075	Rp.228.698.124.325	100%	97,48%	100%	90.26%	Rp.24.667.864.750

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan realisasi APBD Perangkat Daerah. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Semester I Tahun 2025
Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Biro Pemerintahan dan Kesra

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	Nilai	2.244.738.440	40	1.052.250.836	48,8	46,88%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	426.015.500	50	165.111.380	50	38,76%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	426.015.500	2	165.111.380	50	38,76%		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	%	771.990.800	50	197.780.675	50	25,62%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	13.740.500	1	13.380.100	100	97,38%		
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	405.009.300	2	42.391.000	100	10,47%		
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	23.223.000	1	11.514.800	100	49,58%		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	330.018.000	0	130.494.775	0	39,54%		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata	100	%	1.046.732.140	50	689.358.781	50	65,86%	Biro Pemerintahan dan Kesra	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	Unit	915.172.140	8	613.686.281	53,3	67,06%		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105	Unit	86.560.000	52	33.265.000	49,5	38,43%		
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	4	Unit	45.000.000	2	42.407.500	50	94,24%		
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	70	%	1.684.752.680	30	711.450.769	42,9	42,23%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	100	%	590.360.320	50	233.890.786	50	39,62%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	11	Dokumen	403.600.120	4	203.292.150	36,4	50,37%		
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2	Dokumen	186.760.200	1	30.598.636	50	16,38%		
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100	%	467.854.500	50	143.695.892	50	30,71%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	Dokumen	413.874.600	2	114.142.875	100	27,58%		
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2	Dokumen	1.684.752.680	1	29.553.017	50	54,75%		
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	60	%	590.360.320	30	333.864.091	46,2	53,29%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1	Dokumen	403.600.120	1	112.788.660	100	44,07%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	Laporan	186.760.200	1	221.075.431	100	59,65%		
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual	100	%	36.223.802.240	50	6.552.785.770	50	18,09%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi	100	%	6.205.667.720	50	2.635.133.126	50	42,46%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100	Unit	5.573.030.940	50	2.506.837.405	50	44,98%		
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6	Lembaga	632.636.780	2	128.295.721	33,3	20,28%		
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100	%	30.018.134.520	50	3.917.652.644	50	13,05%	Biro Pemerintahan dan Kesra	
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	Dokumen	30.018.134.520	1	3.917.652.644	100	13,05%		

Biro Hukum

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				6,603,263,220						
	4.01.05	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitas dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%		4,228,154,080	68.72	1,626,583,384.00	68.7	38.47%	Biro Hukum	
	4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	1195	Dokumen	2,165,824,520	832	642,512,839.00	69.6	29.67%	Biro Hukum	
	4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45	Dokumen	1,296,793,360	10	243,009,330.00	22.2	18.74%		
	4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000	Dokumen	162,015,760	674	74,205,770.00	67.4	45.80%		
	4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50	Dokumen	255,212,640	17	117,126,650.00	34	45.89%		
	4.01.05.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang	100	Dokumen	451,802,760	131	208,171,089.00	131	46.08%		
	4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan	55	Kasus	2,062,329,560	27	984,070,545.00	49.1	47.72%	Biro Hukum	
	4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45	Kasus	1,821,410,700	20	895,421,125.00	44.4	49.16%		
	4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang	10	Kasus	240,918,860	7	88,649,420.00	70	36.80%		
	4.01.01	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,5		2,375,109,140	0	665,815,134.00	0	28.03%	Biro Hukum	
	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	4	Paket	1,072,579,200	2	111,512,095.00	50	10.40%	Biro Hukum	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15,774,200	0.5	8,014,000.00	50	50.80%		
	4.01.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	942,342,500	0.5	76,374,940.00	50	8.10%		
	4.01.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	14,999,500	1	6,285,000.00	50	41.90%		
	4.01.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	99,463,000	4	20,838,155.00	33.3	20.95%		
	4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	96	Unit	1,302,529,940	52	554,303,039.00	54.2	42.56%	Biro Hukum	
	4.01.01.1.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	403,261,420	4	201,152,737.00	50	49.88%		
	4.01.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	844,478,520	4	319,215,302.00	44.4	37.80%		
	4.01.01.1.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	4,800,000	10	4,800,000.00	100	100.00%		
	4.01.01.1.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	Unit	49,990,000	34	29,135,000.00	49.3	58.28%		

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Persentase (%)	3.445.032.360,00	50	851.579.593,00	60,2	24,72%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83	Persentase (%)	13.500.000,00	50	2.353.500,00	60,2	17,43%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	13.500.000,00	1	2.353.500,00	50	17,43%		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Dokumen	2.828.412.360,00	0	579.453.581,00	0	20,49%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	2.554.259.360,00	0	530.621.200,00	0	20,77%		
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1	Paket	56.957.000,00	0	0,00	0	0,00%		
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	217.196.000,00	0	48.832.381,00	0	22,48%		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Dokumen	603.120.000,00	0	269.772.512,00	0	44,73%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	37	Unit	473.250.000,00	22	254.614.512,00	59,5	53,80%		
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292	Unit	129.870.000,00	32	15.158.000,00	11	11,67%		
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	Persentase (%)	1.112.579.000,00	50	239.670.122,00	50	21,54%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	Persentase (%)	574.787.000,00	50	60.906.052,00	50	10,60%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	Laporan	574.787.000,00	1	60.906.052,00	50	10,60%		
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100	Persentase (%)	431.002.000,00	50	149.552.750,00	50	34,70%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	Laporan	431.002.000,00	1	149.552.750,00	50	34,70%		
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,5	Persentase (%)	106.790.000,00	0	29.211.320,00	0	27,35%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	106.790.000,00	0	29.211.320,00	0	27,35%		
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	90	Persentase (%)	765.655.000,00	50	58.777.362,00	55,6	7,68%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Laporan	115.976.000,00	6	28.701.110,00	50	24,75%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	12	Laporan	24.600.000,00	6	9.108.500,00	50	37,03%		
	4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	11	Unit	64.976.000,00	0	19.592.610,00	0	30,15%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	1	Laporan		0		0			
	4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	12	Laporan	26.400.000,00	6	0,00	50	0,00%		
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase rata-rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90	Persentase (%)	499.563.000,00	45	17.960.560,00	50	3,60%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12	Laporan	450.027.000,00	6	8.160.000,00	50	1,81%		
	4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	12	Laporan	49.536.000,00	6	9.800.560,00	50	19,78%		
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan kelembagaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3	Level	150.116.000,00	3	12.115.692,00	100	8,07%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	Tahun		0		0			
	4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	200	Orang	103.502.000,00	11	7.741.300,00	5,5	7,48%		
	4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12	Laporan	17.520.000,00	6	0,00	50	0,00%		
	4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	12	Kali	29.094.000,00	5	4.374.392,00	41,7	15,04%		
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87	Persentase (%)	82.125.000,00	40	4.856.500,00	46	5,91%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87	Persentase (%)	39.964.000,00	40	2.207.500,00	46	5,52%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	Laporan	39.964.000,00	0	2.207.500,00	0	5,52%		
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87	Persentase (%)	42.161.000,00	40	2.649.000,00	46	6,28%	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian	
	4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	Laporan	42.161.000,00	1	2.649.000,00	50	6,28%		

Biro Organisasi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	60	Persentase (%)	525.774.880,00	30	130.566.255,00	50	24,83%	Biro Organisasi	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22,35	Persentase (%)	337.728.460,00	10	77.873.580,00	44,7	23,06%	Biro Organisasi	
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80	Perpustakaan	67.682.140,00	45	19.524.225,00	56,3	28,85%		
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000	Eksemplar	137.682.140,00	170	16.284.225,00	17	11,83%		
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1	Perpustakaan	64.682.040,00	0	25.780.905,00	0	39,86%		
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	67.682.140,00	1	16.284.225,00	100	24,06%		
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	37	Persentase (%)	188.046.420,00	15	52.692.675,00	40,5	28,02%	Biro Organisasi	
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15	Perpustakaan	125.364.280,00	7	36.408.450,00	46,7	29,04%		
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan	5	Lokus	62.682.140,00	0	16.284.225,00	0	25,98%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Masyarakat	Khusus									
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4,2	Persentase (%)	101.668.480,00	2,05	32.568.450,00	48,8	32,03%	Biro Organisasi	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	300	Eksemplar	50.300.940,00	165	16.284.225,00	55	32,37%	Biro Organisasi	
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300	Eksemplar	50.300.940,00	165	16.284.225,00	55	32,37%		
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	10	Naskah	51.367.540,00	2	16.284.225,00	20	31,70%		
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10	Eksemplar	51.367.540,00	2	16.284.225,00	20	31,70%		
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi	85	Nilai	2.061.662.050,00	45	584.152.466,00	52,9	28,33%	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	Persentase (%)	1.197.663.010,00	50	118.048.316,00	50	9,86%	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	17.059.760,00	7	15.541.200,00	100	91,10%		
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	905.615.250,00	5	56.911.000,00	33,3	6,28%		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	274.988.000,00	0	45.596.116,00	0	16,58%		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Ter Inventaris dengan baik	1	Laporan	859.643.340,00	0	464.070.050,00	0	53,98%	Biro Organisasi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	Unit	769.583.340,00	8	457.620.050,00	53,3	59,46%		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	Unit	90.060.000,00	70	6.450.000,00	53,8	7,16%		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1	Dokumen	4.355.700,00	0	2.034.100,00	0	46,70%	Biro Organisasi	
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	4.355.700,00	0	2.034.100,00	0	46,70%		
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasinya Baik	87	Persentase (%)	963.091.000,00	50	321.133.745,00	57,5	33,34%	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	87	Persentase (%)	387.682.140,00	37	152.832.685,00	42,5	39,42%	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	80.000.000,00	0	19.235.340,00	0	24,04%		
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	120.000.000,00	0	37.899.000,00	0	31,58%		
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29	Dokumen	187.682.140,00	12	95.698.345,00	41,4	50,99%		
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	87	Persentase (%)	575.408.860,00	35	168.301.060,00	40,2	29,25%	Biro Organisasi	
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2	Dokumen	109.861.840,00	0	26.700.400,00	0	24,30%		
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4	Dokumen	157.247.940,00	0	39.282.380,00	0	24,98%		
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	120.733.040,00	0	38.657.900,00	0	32,02%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3	Dokumen	167.680.940,00	0	61.970.980,00	0	36,96%		
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	Laporan	19.885.100,00	0	1.689.400,00	0	8,50%		

Biro Umum

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
1	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan	64	Nilai	643.907.040,00	0	160.621.340,00	0	24,94%	Biro Umum	
			Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	100	Persentase (%)		0		0			
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100	Persentase (%)	338.192.440,00	25	89.500.280,00	25	26,46%	Biro Umum	
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000	Berkas	338.192.440,00	0	89.500.280,00	0	26,46%		
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22	Persentase (%)	305.714.600,00	0	71.121.060,00	0	23,26%	Biro Umum	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	400	Pengguna	40.757.500,00	131	4.984.160,00	32,8	12,23%		
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45	Laporan	264.957.100,00	0	66.136.900,00	0	24,96%		
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
2	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	Nilai	119.906.028.326,00	0	40.216.684.310,00	0	33,54%	Biro Umum	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persentase (%)	580.056.020,00	45	233.676.940,00	45	40,29%	Biro Umum	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	580.056.020,00	2	233.676.940,00	33,3	40,29%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase (%)	59.754.214.120,00	45	24.671.387.321,00	45	41,29%	Biro Umum	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	301	Orang/Bulan	59.053.914.000,00	301	24.435.878.256,00	100	41,38%		
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	700.300.120,00	3	235.509.065,00	25	33,63%		
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persentase (%)	393.118.900,00	45	142.516.675,00	45	36,25%	Biro Umum	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21	Laporan	393.118.900,00	4	142.516.675,00	19	36,25%		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persentase (%)	12.757.994.456,00	45	3.539.501.536,00	45	27,74%	Biro Umum	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	689.399.360,00	1	121.288.650,00	50	17,59%		
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1.406.794.620,00	4	447.776.901,00	80	31,83%		
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4.544.170.576,00	3	988.505.396,00	25	21,75%		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	5.576.965.520,00	3	1.757.544.829,00	25	31,51%		
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	540.664.380,00	1	224.385.760,00	50	41,50%		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persentase (%)	14.545.338.984,00	45	4.071.071.430,00	45	27,99%	Biro Umum	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	2.011.354.000,00	3	672.854.404,00	25	33,45%		
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	7.567.861.984,00	3	1.686.833.878,00	25	22,29%		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.966.123.000,00	3	1.711.383.148,00	25	34,46%		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persentase (%)	10.334.019.412,00	45	2.120.922.977,00	45	20,52%		
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141	Unit	5.696.544.050,00	25	1.897.088.157,00	17,7	33,30%		
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	Unit	4.637.475.362,00	4	223.834.820,00	16,7	4,83%		
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persentase (%)	6.359.010.754,00	45	1.910.000.000,00	45	30,04%	Biro Umum	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	247.336.742,00	0	0,00	0	0,00%		
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	6.111.674.012,00	2	1.910.000.000,00	100	31,25%		
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	Persentase (%)	12.907.498.040,00	45	2.859.026.961,00	45	22,15%	Biro Umum	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47	Paket	11.958.441.820,00	23	2.655.806.359,00	48,9	22,21%		
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40	Paket	789.556.220,00	10	167.670.602,00	25	21,24%		
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	Paket	159.500.000,00	0	35.550.000,00	0	22,29%		
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	Persentase (%)	421.114.100,00	45	127.476.000,00	45	30,27%	Biro Umum	
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	421.114.100,00	3	127.476.000,00	25	30,27%		
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100	Persentase (%)	1.853.663.540,00	45	541.104.470,00	45	29,19%	Biro Umum	
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12	Laporan	1.853.663.540,00	3	541.104.470,00	25	29,19%		

Biro Humas dan Protokol

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Bali masih difokuskan pada kondusivitas pemulihan perekonomian pasca wabah corona (covid-19), yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk masyarakat. Kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Provinsi Bali pada tahun 2019 mendapat nilai 78 dengan Predikat BB. Hal tersebut memacu Pemerintah Provinsi Bali untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya. Pada tahun 2020 mendapatkan nilai 78.40 dan untuk penilaian tahun 2021 belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai leading sektor dan seluruh Pemerintah Provinsi Bali. Ini merupakan tantangan tersendiri terhadap Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Bali.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

2.3.1 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali, Meliputi:
 - a. Belum Optimalnya Perolehan Nilai/Skor Penyusunan LPPD.
 - b. Masih Adanya Potensi Sengketa Batas Wilayah.
 - c. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kerjasama Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Daerah.
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Sradha dan Bhakti di Kalangan Krama Bali.

2.3.2 Biro Hukum

1. Kualitas Perancangan dan Pelayanan Produk Hukum Daerah Belum Optimal.
2. Pelayanan Aksesibilitas Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Belum Optimal.
3. Pelayanan dan Penanganan Kasus-Kasus Hukum dan Pelaporan HAM Belum Optimal.
4. Perda dan Perkada yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja.

2.3.3 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

1. Belum Optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya Tujuan Strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya dan layanan);
2. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan;
3. Pengadaan barang/jasa pemerintahan berpotensi menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30% - 40% dari total APBD);
4. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah;
5. Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan Administrasi Pelaporan Pembangunan Daerah.

2.3.4 Biro Organisasi

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Belum Optimal.
2. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal.
3. Pelayanan Publik Belum Optimal.
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah;

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada Bagian/Unit Kerja masih kurang;
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.3.5 Biro Umum

1. Belum Optimalnya Pelayanan Terhadap Atensi Pimpinan;
2. Belum Optimalnya Kualitas SDM di Bidang Teknologi Informasi; dan
3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.

2.3.6 Biro Humas dan Protokol

1. Tingginya Dinamika Kegiatan Pimpinan yang butuh Atensi Cepat dan Tepat;
2. Kurang Maksimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
3. Belum Memadainya Tenaga Keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan Asing.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C. 31.

Tabel 2.4
Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Biro Pemerintahan dan Kesra

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	2.225.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	2.169.598.780	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	450.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	351.457.120	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	450.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	351.457.120	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	735.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	799.949.520	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.976.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	400.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	419.289.920	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang		Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 Paket	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang		Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 Paket	25.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cetakan dan Penggandaan		Penggandaan yang Disediakan			Cetakan dan Penggandaan		Penggandaan yang Disediakan			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	339.683.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata	100%	1.040.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata	100%	1.018.192.140	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	900.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	903.572.140	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	90.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	86.820.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	27.800.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	75	2.100.000.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	75	2.500.210.780	
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	700.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	651.639.420	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	500.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	451.640.920	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	1 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	1 Dokumen	199.998.500	
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	650.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	549.995.500	
	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	450.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	399.995.800	
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	149.999.700	
	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah		Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	65%	750.000.000	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah		Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	65%	1.298.575.860	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	1 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	1 Dokumen	349.905.360	
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	400.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	948.670.500	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan	100%	35.650.000.000	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan	100%	12.404.153.120	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rakyat yang disusun					Rakyat yang disusun			
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi	100%	5.650.000.000	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi	100%	3.536.006.880	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	5.000.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	2.872.232.100	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	650.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	663.774.780	
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	30.000.000.000	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	8.868.146.240	
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	30.000.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	8.868.146.240	

Biro Hukum

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Denpasar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan Dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	4.671.346.418	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Denpasar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan Dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	4.671.346.418	
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Denpasar	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan Dalam Rangka Kepastian Hukum	1220 Dokumen	2.392.406.972	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Denpasar	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan Dalam Rangka Kepastian Hukum	1220 Dokumen	2.392.406.972	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.426.472.696	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.426.472.696	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	178.217.336	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	178.217.336	
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Denpasar	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	290.733.904	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Denpasar	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	290.733.904	
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	125 Dokumen	496.983.036	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	125 Dokumen	496.983.036	
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan	65 Kasus	2.278.939.446	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan	65 Kasus	2.278.939.446	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	1.998.728.700	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	1.998.728.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	280.210.746	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	280.210.746	
II	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,5	2.743.274.754	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,5	2.743.274.754	
A	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	1.310.491.820	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	1.310.491.820	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.351.620	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.351.620	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.036.576.750	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.036.576.750	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.499.450	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.499.450	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.064.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.064.000	
B	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	97 Unit	1.432.782.934	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	97 Unit	1.432.782.934	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah yang Dilaksanakan					Daerah yang Dilaksanakan			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	443.587.562	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	443.587.562	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	928.926.372	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	928.926.372	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.280.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.280.000	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	54.989.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	54.989.000	

Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	3.161.829.660	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	3.319.000.000	
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	14.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	14.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	16.000.000	
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.487.829.660	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.603.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2.162.829.660	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2.270.000.000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 Paket	40.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 Paket	43.000.000	
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 Tahun	285.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 Tahun	290.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	660.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	700.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	37 Unit	530.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	37 Unit	550.000.000	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292 Unit	130.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292 Unit	150.000.000	
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100 Persen	543.228.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100 Persen	653.200.000	
			Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	250.000.000			Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	270.000.000	
A	Kegiatan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian		Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	250.000.000	Kegiatan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian		Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	270.000.000	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Denpasar	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	250.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Denpasar	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	270.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Laporan	150.028.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Laporan	220.000.000	
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 Persen	150.028.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 Persen	220.000.000	
B	Kegiatan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Laporan	143.200.000	Kegiatan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Laporan	163.200.000	
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan	100 Persen	143.200.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan	100 Persen	163.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	12 Laporan	12.477.675.000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	12 Laporan	503.000.000	
A	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	12.187.675.000	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	196.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	11 Unit / 1 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	11 Unit / 1 Laporan	33.000.000	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	12 Laporan	12.127.675.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	12 Laporan	130.000.000	
3	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	90 Persen	30.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	90 Persen	33.000.000	
B	Kegiatan Layanan pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	140.000.000	Kegiatan Layanan pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	146.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12 Laporan	70.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12 Laporan	73.000.000	
2	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	Level 3 / 1 Tahun	70.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	Level 3 / 1 Tahun	73.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan Jasa		Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Kegiatan / 90 Orang	150.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan Jasa		Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Kegiatan / 100 Orang	161.000.000	
1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	12 Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	12 Laporan	105.000.000	
2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12 Kali	20.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12 Kali	23.000.000	
3	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/ jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah	100 Persen	30.000.000	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/ jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah	100 Persen	33.000.000	
IV	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	60.000.000	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	66.000.000	
A	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	1 Laporan	30.000.000	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	1 Laporan	33.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Denpasar	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	30.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Denpasar	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	33.000.000	
B	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	30.000.000	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	33.000.000	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	33.000.000	

Biro Organisasi

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PEMBINA PERPUSTAKAAN	Denpasar	Peningkatan Persentase Perpustakaan yang Dikelola Dengan Baik	70%	760.000.000	PROGRAM PEMBINA PERPUSTAKAAN	Denpasar	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik	58%	483.774.880	
A	Kegiatan Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Denpasar	Persentase Perpustakaan yang Tertangani Dengan Baik	12%	510.000.000	Kegiatan Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Denpasar	Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	12%	290.728.460	
1	Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Denpasar	Jumlah Perpustakaan Elektronik Yang Dikembangkan dan Dipelihara Dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	75.000.000						
2	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Denpasar	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Pendidikan Khusus Yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	150.000.000	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Denpasar	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Pendidikan Khusus Yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	67.682.140	
3	Pengelola Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Denpasar	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dikelola Dan Dikembangkan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	200.000.000	Pengelola Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Denpasar	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dikelola Dan Dikembangkan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	97.682.040	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan	Denpasar	Jumlah Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	85.000.000	Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan	Denpasar	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	125.364.280	
B	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Denpasar	Persentase Perpustakaan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	39%	250.000.000	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Denpasar	Persentase Perpustakaan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	39%	193.046.420	
1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Denpasar	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi Yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	150.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Denpasar	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi Yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	125.364.280	
2	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Tk Menengah Khusus Serta Masyarakat	Denpasar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi Pada Pendidikan Tingkat Menengah Dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	100.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Denpasar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi Pada Pendidikan Tingkat Menengah Dan Pendidikan Khusus	3 Lokus	67.682.140	
II	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Denpasar	Persentase Naskah Daerah Bali Yang Dihimpun	-	160.000.000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Denpasar	Persentase Naskah Daerah Bali Yang Dihimpun	4.20 %	105.364.280	
A	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak Dan Karya Rekam Koleksi Daerah Di Daerah Provinsi	Denpasar	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali Yang Dihimpun	300 Eksemplar	80.000.000	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak Dan Karya Rekam Koleksi Daerah Di Daerah Provinsi	Denpasar	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali Yang Dihimpun	300 Eksemplar	105.364.280	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penghimpunan Dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam	Denpasar	Jumlah Koleksi KCKR Yang Dihimpun Dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	80.000.000	Penghimpunan Dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam	Denpasar	Jumlah Koleksi KCKR Yang Dihimpun Dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	105.364.280	
B	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Denpasar	Jumlah Naskah Kuno Yang Dilestarikan	10 Eksemplar	80.000.000						
1	Pengembangan, Pengolahan Dan Pengalihmediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan Dan Didayagunakan	Denpasar	Jumlah Naskah Kuno Yang Dilakukan Pengembangan Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan Dan Didayagunakan	10 Eksemplar	75.000.000						
II	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	86 Nilai	1.915.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	86 Nilai	1.804.833.110	
A	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu Diterbitkan	1 Dokumen	5.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Diterbitkan	1 Dokumen	4.976.000	
1	Koordinasi Dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.976.000	
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase Laporan Perbaikan Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%	1.020.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase Laporan Perbaikan Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%	934.105.170	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	19.999.900	
B	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	15 Paket	750.000.000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	15 Paket	614.053.270	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.052.000	
2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Terinventarisir Baik Dengan	1 Laporan	890.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Terinventarisir Baik Dengan	1 Laporan	865.751.940	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	800.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	775.001.940	
4	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	130 Unit	90.000.000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	131 Unit	90.750.000	
5	Program Penataan Organisasi	Denpasar	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	89%	1.425.000.000	Program Penataan Organisasi	Denpasar	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	89%	933.366.700	
III	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Denpasar	Persentase Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran	89%	500.000.000	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Denpasar	Persentase Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran	89%	287.682.140	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	80.000.000	
1	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000	
B	Penataan Analisis Jabatan	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	200.000.000	Penataan Analisis Jabatan	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	137.682.140	
1	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja	Denpasar	Persentase Perangkat Daerah Yang Capaian Rencana Aksinya Baik	89%	925.000.000	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja	Denpasar	Persentase Perangkat Daerah Yang Capaian Rencana Aksinya Baik	89%	645.684.560	
2	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	225.000.000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	187.671.540	
3	Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	200.000.000	Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	167.653.040	
C	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	75.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	14.997.000	
1	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	175.000.000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	137.681.140	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	250.000.000	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	137.681.840	

Biro Umum

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Nilai Evaluasi Kearsipan	64	621.633.452	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Nilai Evaluasi Kearsipan	64	743.908.500	
			Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat yang Tertib Arsip	100%				Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat yang Tertib Arsip	100%		
A	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Terwujudnya Penataan Arsip	100%	289.256.301	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Terwujudnya Penataan Arsip	100%	378.193.000	
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Denpasar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	289.256.301	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Denpasar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	378.193.000	
B	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	332.377.151	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	365.715.500	
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	44.935.916	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	60.757.500	
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	287.441.235	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	304.958.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	97.359.959.924	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	90.600.654.270	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	763.760.467	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	600.058.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	763.760.467	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	600.058.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	811.191.069	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	712.618.860	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	811.191.069	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	712.618.860	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	560.382.054	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	375.436.860	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	560.382.054	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	375.436.860	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20.102.544.496	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	21.834.109.564	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	737.500.727	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	701.629.360	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.806.307.930	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.766.767.920	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.642.120.950	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.506.488.700	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.239.216.529	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.268.558.584	
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	677.398.350	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	590.665.000	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24.140.935.380	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	18.006.262.976	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.217.518.886	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.292.764.360	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.495.412.740	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.115.678.116	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.428.003.754	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.597.820.500	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	13.635.033.355	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	12.939.089.716	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	7.961.464.364	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	6.956.498.580	
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	5.673.568.991	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	5.982.591.136	
G	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	7.320.309.418	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	6.511.675.000	
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	7.320.309.418	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	6.511.675.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		Meningkatnya Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100%	26.554.666.195	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		Meningkatnya Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100%	27.019.667.714	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	19.162.541.684	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	16.587.955.616	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	7.052.214.493	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	10.152.215.000	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	339.910.018	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	279.497.098	
I	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	795.910.847	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	541.115.000	
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	795.910.847	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	541.115.000	
J	Fasilitasi Keprotokolan		Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	100%	2.675.226.642	Fasilitasi Keprotokolan		Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	100%	2.060.620.580	
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.675.226.643	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.060.620.580	

SEKRETARIAT DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	62.253.946.442	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	62.253.946.442	
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	62.006.609.700	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	62.006.609.700	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	301 Orang/ Bulan	62.006.609.700	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	301 Orang/ Bulan	62.006.609.700	
B	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	247.336.742	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	247.336.742	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	247.336.742	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	247.336.742	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengkoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah “Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menunjang persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.

Dalam rangka perwujudan visi RPJP 2005-2025 dimaksud, dilakukan melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berdasarkan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Memperjelas arahan perwujudan visi pembangunan dimaksud, Sembilan Agenda Prioritas ditetapkan Presiden untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang selanjutnya dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas.

Ke Sembilan Agenda Prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

- 1) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 3) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;
- 4) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

- memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- 5) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
 - 6) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
 - 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
 - 8) Melaksanakan revolusi karakter bangsa; dan
 - 9) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, berdasarkan dengan visi dan misi presiden dan arahan presiden yang terdiri dari Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi yang diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) SDM berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- 7) Stabilitas politik, hukum dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, teratur, dan dapat dicapai. Sekretariat Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam Menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Provinsi Serta pelayanan administratif.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Bali merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud adalah:

Tabel 3.1
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Biro Pemerintahan dan Kesra

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	1.971.790.774
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	332.213.362
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	332.213.362
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	634.660.920
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.976.600
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	416.282.320
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.727.000
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	170.675.000
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata	100%	1.004.916.492
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	905.956.492
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	86.160.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	12.800.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	75	1.834.911.012
A	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	522.296.590

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	410.877.990
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	111.418.600
B	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	373.114.800
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	262.095.300
2	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	111.019.500
C	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	65%	939.499.622
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1 Dokumen	257.041.422
2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	682.458.200
III	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	100%	29.034.524.424
A	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi	100%	3.241.424.748
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	2.687.143.996
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	554.280.752
B	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	25.793.099.676
1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	25.793.099.676

Biro Hukum

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan Dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	4.170.928.210,00
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan Dalam Rangka Kepastian Hukum	1220 Dokumen	1.664.241.474,00
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	855.050.722,00
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	161.709.540,00
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	263.058.042,00
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	125 Dokumen	384.423.170,00
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan	65 Kasus	2.506.686.736,00
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	2.246.823.296,00
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	259.863.440,00
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,5	2.182.593.118,00
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	887.126.934,00
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.740.700,00
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	774.135.334,00
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.990.900,00
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.260.000,00

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	97 Unit	1.295.466.184,00
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	468.823.394,00
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	766.752.790,00
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	1.600.000,00
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	58.290.000,00

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	2.843.350.136,00
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	13.950.000,00
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	13.950.000,00
B.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.194.620.136,00
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2.015.493.836,00
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak yang terpenuhi	1 Paket	30.666.300,00
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 Tahun	148.460.000,00
C.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	634.780.000,00
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	37 Unit	543.480.000,00
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292 Unit	91.300.000,00
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100 Persen	457.739.800,00
		Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	250.000.000
A.	Kegiatan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	231.620.000,00
1.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	231.620.000,00
B.	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	2 Laporan	131.620.000,00

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
		Kelautan, dan Perikanan		
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 Persen	131.620.000,00
C.	Kegiatan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Laporan	94.499.800,00
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan	100 Persen	94.499.800,00
III	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	12 Laporan	31.201.284.175,00
A.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	30.987.925.175,00
1.	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	11 Unit / 1 Laporan	21.330.000,00
2.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	12 Laporan	30.924.130.175,00
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	90 Persen	42.465.000,00
B.	Kegiatan Layanan pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	99.271.000,00
1.	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12 Laporan	51.105.000,00
2.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	Level 3 / 1 Tahun	48.166.000,00
C.	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Kegiatan / 90 Orang	114.088.000,00
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	12 Laporan	73.948.000,00

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
2.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12 Kali	10.140.000,00
3.	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/ jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah	100 Persen	30.000.000,00
IV	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	43.575.000,00
A.	Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	1 Laporan	20.910.000,00
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	20.910.000,00
B.	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	22.665.000,00
1.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	22.665.000,00

Biro Organisasi

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Persentase Perpustakaan Yang Tertangani Dengan Baik	58%	453.187.944,00
A.	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan Yang Dikelola Dengan Baik	12%	266.769.168,00
1.	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Pendidikan Khusus Yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	55.666.492,00
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dikelola Dan Dikembangkan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	100.066.392,00
3.	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	111.036.284,00
4.	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	39%	186.418.776,00
B.	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Lokus	63.965.792,00
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	122.452.984,00
2.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali Yang Dihimpun	4.20 %	98.092.984,00
II	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali Yang Dihimpun	300 Eksemplar	98.092.984,00
A.	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR Yang Dihimpun Dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	98.092.984,00
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	86 Nilai	1.646.222.359,00
B.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu Diterbitkan	1 Dokumen	4.976.000,00

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.976.000,00
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perbaikan Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%	790.988.307,00
A.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	16.460.400,00
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	15 Paket	614.051.907,00
B.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	160.476.000,00
1.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Ter Inventaris Dengan Baik	1 Laporan	850.258.052,00
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	769.808.052,00
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	131 Unit	80.450.000,00
C.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	89%	692.615.760,00
1.	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran	89%	222.545.792,00
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	54.880.000,00
IV	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.560.000,00
A.	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	112.105.792,00
1.	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah Yang Capaian Rencana Aksinya Baik	89%	470.069.968,00

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
2.	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	136.243.892,00
3.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	116.325.392,00
B.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	14.997.000,00
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	101.993.492,00
2.	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	100.510.192,00
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	75.000.000
4.	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	175.000.000
5.	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	250.000.000

Biro Umum

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
A	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan	64	722.619.826
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	100%	
I	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100%	367.563.066
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	367.563.066
II	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	355.056.760
2	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	49.957.500
3	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	305.099.260
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	160.459.983.746
III	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	538.866.743
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	538.866.748
IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	79.389.224.238
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/Bulan	78.743.344.494
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	645.879.744
V	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	320.620.172
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	320.620.172

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20.162.880.515
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	685.137.840
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.647.671.358
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.336.554.462
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	4.465.579.684
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	520.540.874
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	17.456.678.900
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.069.469.360
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.056.844.128
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.330.365.412
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	16.862.996.606
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	6.876.182.652
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	6.101.393.226
IX	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100 %	8.915.650.544
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.988.309.510

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
19	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	5.927.341.034
X	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	26.235.707.234
20	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	16.340.186.288
21	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	9.491.023.848
22	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	404.498.098
XI	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	229.115.000
23	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	229.115.000
XII	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 %	1.562.034.124
24	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	1.562.034.124

Biro Humas dan Protokol

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
A	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	77.440.000
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	77.440.000
B	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	5.701.250.000
2	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	6 Dokumen	278.165.600
3	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 laporan	5.019.828.000
4	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	5 laporan	403.256.000
C	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	100%	222.560.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Laporan	100.000.000
6	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	6 Laporan	122.560.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahunan. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan serta kebutuhan pendanaannya.

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat daerah Provinsi Bali tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82	1.971.790.774	PAD		84	2.368.000.000
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	332.213.362	PAD		100%	500.000.000
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	4 Dokumen	332.213.362	PAD		4 Dokumen	500.000.000
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum		100%	634.660.920	PAD		100%	768.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Denpasar	1 Paket	15.976.600	PAD		1 Paket	16.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	2 Paket	416.282.320	PAD		2 Paket	400.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	31.727.000	PAD		1 Paket	22.000.000
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	1 Laporan	170.675.000	PAD		1 Laporan	330.000.000
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata		100%	1.004.916.492	PAD		100%	1.100.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Denpasar	15 Unit	905.956.492	PAD		15 Unit	950.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	124 Unit	86.160.000	PAD		124 Unit	95.000.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Denpasar	160 Unit	12.800.000	PAD		160 Unit	55.000.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali		75%	1.834.911.012	PAD		78%	2.315.000.000
A	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	522.296.590	PAD		100%	770.000.000
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Denpasar	3 Dokumen	410.877.990	PAD		3 Dokumen	550.000.000
2	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	Denpasae	2 Dokumen	111.418.600	PAD		2 Dokumen	220.000.000
B	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti		100%	373.114.800	PAD		100%	720.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Denpasar	2 Dokumen	262.095.300	PAD		2 Dokumen	500.000.000
2	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Denpasar	1 Dokumen	111.019.500	PAD		1 Dokumen	220.000.000
C	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi		100%	939.499.622	PAD		100%	825.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi	Denpasar	2 Dokumen	257.041.422	PAD		2 Dokumen	385.000.000
2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Denpasar	1 Laporan	682.458.200	PAD		1 Laporan	440.000.000
III	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindak Lanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan budaya spiritual		100%	29.034.524.424	PAD		100%	36.675.000.000
A	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual		100%	3.241.424.748	PAD		100%	6.175.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Denpasar	100 Unit	2.687.143.996	PAD		100 Unit	5.500.000.000
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Denpasar	6 Lembaga	554.280.752	PAD		6 Lembaga	675.000.000
B	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		100%	25.793.099.676	PAD		100%	30.500.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Denpasar	1 Dokumen	25.793.099.676	PAD		1 Dokumen	30.000.000.000

BIRO HUKUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
I	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum		100%		PAD		100 %	5.116.066.437
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum		1220 Dokumen		PAD		1245 Dokumen	2.620.647.669
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Denpasar	45 Dokumen		PAD		45 Dokumen	1.569.119.966
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Denpasar	1000 Dokumen		PAD		1000 Dokumen	196.039.070
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Denpasar	50 Dokumen		PAD		50 Dokumen	319.807.294
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	9 Kabupaten/ Kota	125 Dokumen		PAD		150 Dokumen	546.681.340
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan		65 Kasus		PAD		65 Kasus	2.495.418.768
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	9 Kabupaten/ Kota	45 Kasus		PAD		45 Kasus	2.203.906.947
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	9 Kabupaten/ Kota	20 Kasus		PAD		25 Kasus	291.511.821
II	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		80,5		PAD		81	3.017.602.229
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		5 Paket		PAD		4 Paket	1.441.541.002

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 Paket		PAD		1 Paket	19.086.782
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	2 Paket		PAD		2 Paket	1.140.234.425
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Denpasar	1 Paket		PAD		1 Paket	18.149.395
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	1 Laporan		PAD		1Laporan	264.070.400
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan		112 Unit		PAD		112 Unit	1.576.061.227
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Denpasar	1 Unit		PAD		1 Unit	487.946.318
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Denpasar	14 Unit		PAD		14 Unit	1.021.819.009
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Denpasar	20 Unit		PAD		20 Unit	5.808.000
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	77 Unit		PAD		77 Unit	60.487.900

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali		82,5	2.843.350.136	PAD		83	3.319.000.000
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen	13.950.000	PAD		8 Dokumen	16.000.000
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	8 Dokumen	13.950.000	PAD		8 Dokumen	16.000.000
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	2.194.620.136	PAD		12 Bulan	2.603.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	12 Paket	2.015.493.836	PAD		12 Paket	2.270.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	30.666.300	PAD		1 Paket	43.000.000
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	12 Bulan	148.460.000	PAD		12 Bulan	290.000.000
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		12 Bulan	634.780.000	PAD		12 Bulan	700.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Denpasar	37 Unit	543.480.000	PAD		37 Unit	550.000.000
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	185 Unit	91.300.000	PAD		185 Unit	150.000.000
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti		100 Persen	457.739.800	PAD		100 Persen	653.200.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku		2 Dokumen	231.620.000	Insentif Fiskal PAD		2 Dokumen	270.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Denpasar	2 Dokumen	231.620.000	PAD		2 Dokumen	270.000.000
B	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		2 Dokumen	131.620.000	PAD		2 Dokumen	270.000.000
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Denpasar	2 Dokumen	131.620.000	PAD		2 Dokumen	220.000.000
C	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		1 Dokumen	94.499.800	PAD		1 Dokumen	220.000.000
		Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah		5,5 Persen				5,5 Persen	
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Denpasar	1 Dokumen	94.499.800	PAD		1 Dokumen	163.200.000
III	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa		85 Persen	31.201.284.175	PAD		85 Persen	503.000.000
A	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		12 Laporan	30.987.925.175	PAD		12 Laporan	196.000.000
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	12 Laporan	21.330.000	PAD		1 Laporan	33.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	1 Laporan	30.924.130.175	PAD		1 Laporan	130.000.000
3 B	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	12 Laporan 12 Lapooran	42.465.000 99.271.000	PAD		12 Laporan 12 Laporan	33.000.000 146.000.000
		Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik				PAD			
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar	12 Laporan	51.105.000	PAD		12 Laporan	73.000.000
2	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	12 Laporan	48.166.000	PAD		12 Laporan	73.000.000
C	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		4 Level	114.088.000	PAD		4 Level	161.000.000
1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	90 Orang	73.948.000	PAD		90 Orang	105.000.000
2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	1 Dokumen	10.140.000	PAD		1 Dokumen	23.000.000
3	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	1 Dokumen	30.000.000	PAD		1 Dokumen	33.000.000
IV	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku		87 Persen	43.575.000	PAD		87 Persen	66.000.000
A	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku		1 Laporan	20.910.000	PAD		1 Laporan	33.000.000
1	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Denpasar	1 Laporan	20.910.000	PAD		1 Laporan	33.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku		1 Laporan	22.665.000	PAD		1 Laporan	33.000.000
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	2 Laporan	22.665.000	PAD		2 Laporan	33.000.000

BIRO ORGANISASI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	Denpasar	58%	453.187.944	PAD		58%	1.030.000.000
A	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	Denpasar	22.35%	266.769.168	PAD		10%	880.000.000
1	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Denpasar	50 Perpustakaan	55.666.492	PAD		46 Perpustakaan	250.000.000
2	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Denpasar	500 Eksemplar	100.066.392	PAD		1000 Eksemplar	250.000.000
3	Pemanfaatan dan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) yang dimanfaatkan oleh Masyarakat	Denpasar			PAD		1 Dokumen	110.000.000
4	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan.	Denpasar	1 Dokumen	111.036.284	PAD		1 Dokumen	270.000.000
B	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Denpasar	39%	186.418.776	PAD		41%	150.000.000
1	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Denpasar	3 Lokus	63.965.792	PAD			0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Denpasar	15 Perpustakaan	122.452.984	PAD		15 Perpustakaan	150.000.000
II	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	Denpasar	4.20%	98.092.984	PAD		4.20%	225.000.000
A	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	Semua Kab/Kota	300 Eksemplar	98.092.984	PAD		300 Eksemplar	125.000.000
1	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Semua Kab/Kota	300 Eksemplar	98.092.984	PAD		300 Eksemplar	125.000.000
B	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Semua Kab/Kota			PAD		10 Ekspemplar	100.000.000
1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalih mediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Semua Kab/Kota			PAD		10 Ekspemplar	100.000.000
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Denpasar	86 Nilai	1.646.222.359	PAD		87 Nilai	2.182.000.000
A	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	Denpasar	1 Dokumen	4.976.000	PAD		1 Dokumen	10.000.000
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Denpasar	1 Dokumen	4.976.000	PAD		1 Dokumen	10.000.000
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	Denpasar	100%	790.988.307	PAD		100%	1.222.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	16.460.400	PAD		7 Paket	22.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	15 Paket	614.051.907	PAD		15 Paket	850.000.000
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	1 Laporan	160.476.000	PAD		1 Laporan	350.000.000
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang ter inventaris dengan baik	Denpasar	1 Laporan	850.258.052	PAD		1 Laporan	950.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Denpasar	13 Unit	769.808.052	PAD		13 unit	850.000.000
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	117 Unit	80.450.000	PAD		117 Unit	100.000.000
IV	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	Denpasar	89%	692.615.760	PAD		91%	1.570.000.000
A	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Denpasar	89%	222.545.792	PAD		91%	555.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	1 Dokumen	54.880.000	PAD		1 Dokumen	165.000.000
2	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	1 Dokumen	55.560.000	PAD		1 Dokumen	165.000.000
3	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Denpasar	29 Dokumen	112.105.792	PAD		29 Dokumen	225.000.000
B	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	Denpasar	89%	470.069.968	PAD		91%	1.015.000.000
1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Denpasar	1 Dokumen	136.243.892	PAD		1 Dokumen	250.000.000
2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Denpasar	3 Dokumen	116.325.392	PAD		3 Dokumen	220.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Denpasar	1 Laporan	14.997.000	PAD		1 Laporan	85.000.000
4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Denpasar	2 Dokumen	101.993.492	PAD		2 Dokumen	185.000.000
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Denpasar	4 Dokumen	100.510.192	PAD		4 Dokumen	275.000.000

BIRO UMUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
II	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan		64	743.908.500			64	660.076.422
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat yang Tertib Arsip		100%				100%	
A	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip		100%	367.563.066			100%	303.719.116
1	Sub Kegiatan Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Denpasar	1.000 Berkas	367.563.066	PAD		1.000 Berkas	303.719.116
B	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik		22%	355.056.760			22%	356.357.306
1	Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Semua Kabupaten/ Kota	150 Pengguna	49.957.500	PAD		150 Pengguna	47.182.711
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/ Kota	45 Laporan	305.099.260	PAD		45 Laporan	309.174.595
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali		83	80.994.019.426			83	102.223.757.919
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	538.866.748	PAD		100%	801.948.490
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	538.866.748	PAD		6 Dokumen	801.948.490

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	645.879.744			100%	851.750.622
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	645.879.744	PAD		12 Dokumen	851.750.622
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	320.620.172			100%	584.201.156
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	21 Laporan	320.620.172	PAD		21 Laporan	584.201.156
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	15.655.484.218			100%	21.107.671.721
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	2 Paket	685.137.840	PAD		2 Paket	774.375.764
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	5 Paket	2.647.671.358	PAD		5 Paket	2.946.623.326
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	7.336.554.462	PAD		12 Laporan	8.024.226.998
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	4.465.579.684	PAD		12 Laporan	8.651.177.366
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	520.540.874	PAD		2 Dokumen	711.268.267
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	17.456.678.900			100%	25.347.982.149

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	2.069.469.360	PAD		12 Laporan	2.328.394.831
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	10.056.844.128	PAD		12 Laporan	17.320.183.377
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	108 Laporan	5.330.365.412	PAD		108 Laporan	5.699.403.941
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	12.977.575.878			100%	14.316.785.022
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kabupaten/ Kota	141 Unit	6.876.182.652	PAD		141 Unit	8.359.537.582
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Kabupaten/ Kota	24 Unit	6.101.393.226	PAD		24 Unit	5.957.247.440
G	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil		100%	5.372.057.408			100%	7.686.324.889
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	2 Orang/ Bulan	5.372.057.408	PAD		2 Orang/ Bulan	7.686.324.889
H	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100%	26.235.707.234			100%	27.882.399.506
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	47 Paket	16.340.186.288	PAD		47 Paket	20.120.668.769

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	40 Paket	9.491.023.848	PAD		40 Paket	7.404.825.218
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	1 Paket	404.497.098	PAD		1 Paket	356.905.519
I	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	100%	229.115.000			100%	835.706.389
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	229.115.000	PAD		12 Laporan	835.706.389
J	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan		100%	1.562.034.124			100%	2.808.987.975
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	1.562.034.124	PAD		12 Laporan	2.808.987.975

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali							
A	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	77.440.000			100%	500.000.000
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Denpasar	20 unit	77.440.000	PAD		40 unit	500.000.000
B	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan		100%	5.701.250.000			100%	16.100.000.000
1	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	Semua Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	278.165.600	PAD		12 Dokumen	2.200.000.000
2	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	5 Laporan	5.019.828.000	PAD		12 Laporan	12.200.000.000
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	5 Laporan	403.256.000	PAD		12 Laporan	1.700.000.000
C	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitas Keprotokolan		100%	222.560.000			100%	4.000.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	6 Laporan	100.000.000	PAD		12 Laporan	1.800.000.000
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	6 Laporan	122.560.000	PAD		12 Laporan	2.200.000.000

SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	Denpasar	83	81.731.654.004	PAD		83	62.253.946.442
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	100%	78.743.344.494	PAD		100%	62.006.609.700
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	301 Orang/ Bulan	78.743.344.494	PAD		301 Orang/ Bulan	62.006.609.700
B	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Denpasar	100%	2.988.309.510	PAD		100%	247.336.742
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	2 Orang/ Bulan	2.988.309.510	PAD		2 Orang/ Bulan	247.336.742

BAB V

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025.

Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025.



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PENGHUBUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya, Rencana Kerja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disusun. Perubahan ini dilakukan untuk menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu Renja dapat dilakukan revisi, hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan.

Secara umum, Badan Penghubung Provinsi Bali telah dapat melaksanakan program/kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) 2025, namun dengan keterbatasan anggaran induk maka ada beberapa perubahan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yaitu untuk memenuhi kebutuhan operasional dan arahan pimpinan. Mengingat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Badan Penghubung Provinsi Bali membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Jakarta, 9 Juli 2025

Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali



Arifin Efendi, ST.,MT

NIP. 19710714 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Capaian kinerja dan keuangan	7
2.2 Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.....	20
BAB III MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	21
BAB IV P E N U T U P	26

LAMPIRAN :

Renja Perubahan TA 2025

RKA PERUBAHAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Perubahan RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan kedua tahun berjalan, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Perubahan RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Perubahan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Penyusunan Renja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan kedua tahun berjalan, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, review rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan penelaahan kebijakan nasional serta refocusing anggaran.

Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai salah satu PD di Provinsi Bali memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali, dituangkan dalam

Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu Rencana Kerja dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dan Renja dimaksud seperti (1) penyelarasan tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai

dengan triwulan II tahun 2025; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan perubahan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP).
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar seksi pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Memuat capaian kinerja dan keuangan, kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat matrik perubahan rencana dan pendanaannya

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Capaian Kinerja dan Keuangan

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan Badan Penghubung. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian sasaran Badan Penghubung yang tertuang dalam dokumen Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan sampai triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Subbid di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali telah mencapai IKM 93,11 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.3.899.846.159 dari total pagu induk sebesar Rp.9.730.050.683 atau 40,08% seluruh sub kegiatan. Semua program dan kegiatan pada triwulan I dan II dapat berjalan sesuai target. Berikut rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing program dan kegiatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan pemerintahan							
	Bidang Pengelolaan Penghubung							
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	89,83	99,81	90	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	89,83	89,81	90	-	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jakarta						
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pagelaran seni Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali)	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS (rutin)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	83,48	101,80%	82	-	-
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	100%	100%	100%	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	-	-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	16 PNS	16 PNS	100%	19 PNS	-	-
	Kegiatan Administrasi umum	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	100%	100%	100%	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen listrik/ penerangan	2 paket	2 paket	100%	1 paket	-	-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bangunan Kantor	bangunan kantor						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 paket	3 paket	100%	3 paket	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	2 paket	2 paket	100%	2 paket	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	4 paket	4 paket	100%	2 paket	-	-
	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	--

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi						
	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	8 unit	8 unit	100%	79 unit	-	-
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan	100%	100%	100%	100%	-	-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pemerintahan daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu Jumlah materai yang tersedia	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		waktu						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	13 unit	13 unit	100%	13 unit	-	-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	3 unit	3 unit	100%	3 unit	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	4 unit	4 unit	100%	8 unit	-

Tabel

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan setelah rasionalisasi triwulan II

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu	Realisasi s.d Triwulan 2	
			Keuangan	Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.884.268.316,00	2.862.292.834,00	-
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.300,00	1.575.000,00	80%
	Penyediaan dokumen perencanaan	4.999.300,00	1.575.000,00	4 dokumen
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.119.038.696,00	1.501.487.770,00	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.119.038.696,00	1.501.487.770,00	15 PNS
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.848.600,00	104.573.754,00	80%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	14.989.400,00	14.041.500,00	1 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.981.200,00	41.099.630,00	3 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	26.750.000,00	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.567.000,00	5.566.900,00	2 paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.311.000,00	17.115.724,00	6 bulan
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.503.420,00	36.410.000,00	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.503.420,00	36.410.000,00	3 unit
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.474.896.236,00	619.784.445,00	50%

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.989.100,00	2.923.000,00	6 bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.800.000,00	83.329.264,00	6 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.159.107.136,00	533.532.181,00	6 bulan
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.857.982.064,00	598.486.200,00	50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.332.537.868,00	407.668.520,00	13 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	383.675.000,00	149.903.680,00	6 bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.769.196,00	40.889.665,00	6 bulan
2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	2.845.782.367,00	1.037.553.325,00	93,11 indeks
G	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.845.782.367,00	1.037.553.325,00	93,11 indeks
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	113.273.387,00	32.000.000,00	6 laporan
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	304.482.196,00	76.274.665,00	6 laporan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.428.026.784,00	929.278.660,00	6 laporan
		9.730.050.683,00	3.899.846.159,00	

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, hampir seluruh sub kegiatan sudah dapat berjalan sesuai target kinerja, cuma 1 sub kegiatan yang belum ada realisasi keuangan karena terkendala mencari mencari penyedia yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pejabat Pengadaan dan susah mencari konsultan pengawas.

Kinerja Badan Penghubung sesuai dengan sasaran Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali telah mencapai nilai IKM 93,11 dapat di rinci sebagai berikut :

1. IKM Penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga : 93,35 (sangat baik)
2. IKM Pelanggan wisma Badan Penghubung : 92,85 (sangat baik)
3. IKM Pengunjung Anjungan Daerah Bali TMII : 93,13 (sangat baik)

TABEL

Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025 (tw 2)

No	Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025
	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	93,11
		Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		93,35
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		93,13
		Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		92,85

2.2 Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut

Secara umum beberapa faktor penghambat kinerja program/kegiatan adalah :

1) Sumber Daya Manusia belum memadai

Secara kuantitas dan kualitas tenaga PNS maupun tenaga kontrak di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, maka untuk menunjang pelayanan yang prima perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Saat ini jumlah PNS yang ada di Badan Penghubung sejumlah 15 orang dan PPPK sebanyak 3 orang sedangkan kebutuhan ideal sesuai ABK dan Peta Jabatan sebanyak 50 orang.

2) Sarana dan Prasarana belum memadai

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan tamu wisma yang datang ke Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta kami perlu meremajakan beberapa sarana dan prasarana yang ada, dimana sarana prasarana yang ada dalam kondisi tidak maksimal, hal ini dikarenakan semua rata-rata sudah berusia diatas 10 (sepuluh) tahun.

3) Jumlah kamar/wisma dan bangunan wisma yang sudah tidak representatif sehingga tidak dapat bersaing dengan city hotel yang telah banyak dibangun di sekitar wisma.

4) Keterbatasan anggaran sehingga membuat rencana yang mendukung pelaksanaan pelayanan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, perlu ditetapkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan ke BKPSDM Provinsi Bali untuk mendapatkan tambahan tenaga PNS ataupun PPPK baik melalui mutasi lintas PD maupun perekrutan tenaga ASN yang baru.
2. Mengajukan anggaran yang sangat urgent dibutuhkan di APBD perubahan 2025 untuk kelancaran pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

BAB III

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan penguatan anggaran dalam rangka operasional dan pelayanan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk dapat menunda anggaran yang tidak mendesak. Kebijakan tersebut menyebabkan perlu dilakukan perubahan capaian target kinerja dan pendanaan pada beberapa kegiatan yang sebelumnya telah disusun pada Renja Badan Penghubung Induk Tahun 2025.

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 meliputi hal-hal, sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap target kinerja sub kegiatan berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025;
2. Penambahan anggaran untuk operasional pelayanan pimpinan.
3. Penambahan anggaran dalam rangka Pemeliharaan Kendaraan Dinas
4. Penambahan anggaran dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor.
5. Penambahan anggaran dalam rangka pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung.
6. Penambahan anggaran dalam rangka Belanja Modal untuk mendukung pelaksanaan tugas di Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII.

Perubahan anggaran pada program/kegiatan pembangunan pada perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel Renja Perubahan keluaran SIPD (terlampir).

Pada pergeseran dan perubahan APBD 2025 Badan Penghubung telah disetujui untuk menambah anggaran sesuai nota dinas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang telah dikompulir di Subbid Pemerintahan Bappeda Provinsi Bali untuk dapat diberikan tambahan sesuai dengan skala prioritas. Adapun pengajuan nota dinas penambahan anggaran Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

**Nota dinas Nomor : B.35.900.1.2/1680/TU/Banhub tanggal 9 Mei 2025, Hal :
Permintaan Tambahan Anggaran untuk Operasional Pimpinan,
Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor serta Pengadaan Belanja Modal pada DPPA Tahun 2025 :**

Mengusulkan tambahan anggaran untuk mengakomodir kekurangan dan peremajaan sarana prasarana yang kondisinya tidak maksimal sebagai berikut :

1. BBM : Rp. 50.000.000,-
2. Makanan dan minuman tamu pimpinan : Rp.100.000.000,-
3. Makanan dan minuman rapat rutin : Rp.5.000.000,-
4. Tenaga keamanan/jasa pengawalan : Rp.100.000.000,-
5. Tol dan parkir : Rp.20.000.000,-
6. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah : Rp.85.000.000,-
7. Pemeliharaan kendaraan dinas : Rp.80.000.000,-
8. Pemeliharaan gedung kantor : Rp.151.300.000,-
9. Belanja modal kendaraan bermotor roda 2 : Rp.70.000.000,-
10. Belanja modal sarana dan prasarana ruang VIP Kepala Daerah :
Rp.85.000.000,-
11. Belanja Modal Personal Computer dan Peralatan Personal Computer :
Rp.170.000.000,-

Total : Rp.916.300.000,00,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

**Nota dinas Nomor : B.35.900.1.2/1732/TU/Banhub, tanggal 14 Mei 2025,
Hal : Permintaan Tambahan Anggaran untuk Pengelolaan Kesenian di
Anjungan Daerah Bali pada DPPA Tahun 2025**

Mengusulkan tambahan anggaran untuk mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pentas seni dan budaya Bali juga untuk kegiatan perkantoran dimaksud sebagai berikut :

1. Pengadaan AC 2 PK : Rp.34.500.000,-
2. Pengadaan Kendaraan Pick UP : Rp.330.000.000,-
3. Pengadaan Pakaian Penabuh sebenarnya 20 stel : Rp.45.000.000,-
4. Pentas seni : Rp. 15.000.000,-
5. Pengadaan meja dan kursi staf : Rp. 40.000.000,-

Total : Rp.464.500.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Selain penambahan anggaran, ada pula Sub. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran yaitu :

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dimana pada Pagu Induk sebesar Rp.8.499.300,00 (Delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan pagu perubahan Rp.6.090.500,00 (Enam juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.2.408.800,00 (Dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
2. Sub. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dimana pada Pagu Induk sebesar Rp.159.928.487,00 (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan pagu perubahan Rp.115.336.387,00 (Seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.44.592.100,00 (Empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).

Sehingga total anggaran perubahan pada Badan Penghubung Provinsi Bali menjadi Rp.11.017.823.314,00 (Sebelas milyar tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah). Dengan rincian masing-masing sub. Kegiatan sebagai berikut :

No	Nama Sub. Kegiatan	Pagu Induk	Pagu Perubahan	Bertambah/ berkurang
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.300,00	4.999.300,00	0,00
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.119.038.696,00	3.168.063.101,00	49.024.405,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	14.989.400,00	14.989.400,00	0,00

	Bangunan Kantor			
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.981.200,00	67.693.600,00	12.712.400,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.499.300,00	6.090.500,00	(2.408.800,00)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	62.171.000,00	99.764.000,00	37.593.000,00
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.503.420,00	544.230.256,00	314.726.836,00
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.989.100,00	8.989.100,00	0,00
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.800.000,00	306.800.000,00	0,00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.159.107.136,00	1.213.956.466,00	54.849.330,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.332.537.868,00	1.581.337.868,00	248.800.000,00

13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	395.343.000,00	537.975.000,00	142.632.000,00
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.769.196,00	151.625.796,00	9.856.600,00
15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	159.928.487,00	115.336.387,00	(44.592.100,00)
16	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	314.769.196,00	326.087.665,00	11.318.469,00
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.485.776.784,00	2.779.884.875,00	294.108.091,00
Total		9.889.203.083,00	11.017.823.314,00	1.128.620.231,00

BAB IV

PENUTUP

Dengan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penghubung Provinsi Bali, diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan penerima pelayanan. Selanjutnya Renja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjaringan dari para pemangku kepentingan, top-down dan bottom-up diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penerima pelayanan di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan Provinsi Bali dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai pelayanan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENGHUBUNG							9.757.562.920,00	9.889.203.083,00	10.780.850.683,00	1.023.287.763,00						11.132.000.000,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.757.562.920,00	9.889.203.083,00	10.780.850.683,00	1.023.287.763,00							11.132.000.000,00		
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG							9.757.562.920,00	9.889.203.083,00	10.780.850.683,00	1.023.287.763,00							11.132.000.000,00		
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajem en Kinerja (Badan Penghubung)				82 Nilai	82 Nilai	6.434.088.379,00	6.928.728.616,00	7.537.068.316,00	887.911.621,00							7.322.000.000,00		
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat				100 persen	100 persen	4.999.300,00	4.999.300,00	4.999.300,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.999.300,00	4.999.300,00	4.999.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.987.398.459,00	3.119.038.696,00	3.119.038.696,00	131.640.237,00			-	- -	-		3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/ Bulan	16 Orang/ Bulan	2.987.398.459,00	3.119.038.696,00	3.119.038.696,00	131.640.237,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	230.640.900,00	230.640.900,00	252.848.600,00	22.207.700,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		299.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.989.400,00	14.989.400,00	14.989.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	54.981.200,00	54.981.200,00	67.981.200,00	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.499.300,00	8.499.300,00	5.567.000,00	-2.932.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	62.171.000,00	62.171.000,00	74.311.000,00	12.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	229.503.420,00	229.503.420,00	546.003.420,00	316.500.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	38 Unit	229.503.420,00	229.503.420,00	546.003.420,00	316.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.474.896.236,00	1.474.896.236,00	1.474.896.236,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.642.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.989.100,00	8.989.100,00	8.989.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	306.800.000,00	306.800.000,00	306.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			325.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.159.107.136,00	1.159.107.136,00	1.159.107.136,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.506.650.064,00	1.869.650.064,00	2.139.282.064,00	632.632.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.925.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	969.537.868,00	1.332.537.868,00	1.462.537.868,00	493.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	395.343.000,00	395.343.000,00	534.975.000,00	139.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	141.769.196,00	141.769.196,00	141.769.196,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta				90 Indeks	90 Indeks	3.323.474.541,00	2.960.474.467,00	3.243.782.367,00	486.525.459,00							3.810.000.000,00		
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung				90 Indeks	90 Indeks	3.323.474.541,00	2.960.474.467,00	3.243.782.367,00	-79.692.174,00			-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		3.810.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 Laporan	12 Laporan	159.920.561,00	159.928.487,00	113.273.387,00	-46.647.174,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			160.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																			
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				12 Laporan	12 Laporan	314.777.196,00	314.769.196,00	364.482.196,00	49.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	12 Laporan	2.848.776.784,00	2.485.776.784,00	2.766.026.784,00	-82.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
			J U M L A H						9.757.562.920,00	9.889.203.083,00	10.780.850.683,00	1.023.287.763,00							11.132.000.000,00		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Sesudah Pergeseran				Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 0
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				Rp. 59.000.000				Rp. 59.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan									
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1 Tahun	Tahun	Rp. 59.000.000	Rp. 59.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 59.000.000	Rp. 59.000.000	Rp. 0
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 0
	:: Sewa Gedung									
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 0
Jumlah Pendapatan					Rp. 60.000.000	Jumlah Pendapatan			Rp. 60.000.000	Rp. 0
Provinsi Bali, ... Kepala Badan Penghubung										
Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003										

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
3.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
3	I Gusti Putu Widiantera, SE., M.Si.	196909241994031005	Anggota	
4	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
5	I Putu Suarta, S.H., M.H.	196810101994031016	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025																			

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Badan Penghubung																			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp. 9.372.901.876	Rp. 516.301.207			Rp. 9.889.203.083	Rp. 10.144.407.649	Rp. 873.415.665			Rp. 11.017.823.314	Rp. 11.132.000.000,00
5	07				PENGLOLAAN PENGHUBUNG				Rp. 9.372.901.876	Rp. 516.301.207			Rp. 9.889.203.083	Rp. 10.144.407.649	Rp. 873.415.665			Rp. 11.017.823.314	Rp. 11.132.000.000,00
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 6.479.046.196	Rp. 449.682.420			Rp. 6.928.728.616	Rp. 7.054.480.131	Rp. 742.034.256			Rp. 7.796.514.387	Rp. 7.322.000.000,00
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 4.999.300				Rp. 4.999.300	Rp. 4.999.300				Rp. 4.999.300	Rp. 5.500.000,00
5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.999.300				Rp. 4.999.300	Rp. 4.999.300				Rp. 4.999.300	Rp. 5.500.000,00
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.119.038.696				Rp. 3.119.038.696	Rp. 3.168.063.101				Rp. 3.168.063.101	Rp. 3.100.000.000,00
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.119.038.696				Rp. 3.119.038.696	Rp. 3.168.063.101				Rp. 3.168.063.101	Rp. 3.100.000.000,00
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 230.640.900				Rp. 230.640.900	Rp. 271.821.500	Rp. 6.716.000			Rp. 278.537.500	Rp. 299.000.000,00
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.989.400				Rp. 14.989.400	Rp. 14.989.400				Rp. 14.989.400	Rp. 20.000.000,00
5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.981.200				Rp. 54.981.200	Rp. 60.977.600	Rp. 6.716.000			Rp. 67.693.600	Rp. 60.000.000,00
5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 100.000.000,00
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.499.300				Rp. 8.499.300	Rp. 6.090.500				Rp. 6.090.500	Rp. 9.000.000,00
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.171.000				Rp. 62.171.000	Rp. 99.764.000				Rp. 99.764.000	Rp. 110.000.000,00
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 229.503.420			Rp. 229.503.420	Rp. 29.091.000	Rp. 515.139.256			Rp. 544.230.256	Rp. 350.000.000,00
5	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 229.503.420			Rp. 229.503.420	Rp. 29.091.000	Rp. 515.139.256			Rp. 544.230.256	Rp. 350.000.000,00
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.474.896.236				Rp. 1.474.896.236	Rp. 1.529.745.566				Rp. 1.529.745.566	Rp. 1.642.500.000,00
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.989.100				Rp. 8.989.100	Rp. 8.989.100				Rp. 8.989.100	Rp. 17.500.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung

Rincian Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)
		Sebelum	Sesudah	
DATA LAPORAN KOSONG				
Provinsi Bali, ... Kepala Badan Penghubung Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
3.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
3	I Gusti Putu Widiantera, SE., M.Si.	196909241994031005	Anggota	
4	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
5	I Putu Suarta, S.H., M.H.	196810101994031016	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.999.300,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung) Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai 82 nilai	Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung) Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai 82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.999.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.999.300,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.999.300,00					4.999.300,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.999.300,00					4.999.300,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.999.300,00					4.999.300,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.999.300,00					4.999.300,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.999.300,00					4.999.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.630.800,00					1.630.800,00	0,00
	[#] Kertas HVS F4 70 gr Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.630.800,00					1.630.800,00	0,00
	[-] Kertas HVS F4 70 gr Sinar Dunia					1.630.800,00					1.630.800,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Sinar Dunia	18 Rim	Rim	90.600,00	-	1.630.800,00	18 Rim	Rim	90.600,00	-	1.630.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					503.500,00					503.500,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					503.500,00					503.500,00	0,00
	[-] Foto Copy					503.500,00					503.500,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : -	1007 Lembar	Lembar -	500,00	-	503.500,00	1007 Lembar	Lembar -	500,00	-	503.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.865.000,00					2.865.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.865.000,00					2.865.000,00	0,00
	[-] Makan					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	63 Kotak	Kotak	30.000,00	-	1.890.000,00	63 Kotak	Kotak	30.000,00	-	1.890.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.168.063.101,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.119.038.696,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.168.063.101,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan
Hasil	: -	-	Hasil	: Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.119.038.696,00					3.168.063.101,00	49.024.405,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.119.038.696,00					3.168.063.101,00	49.024.405,00
5.1.01	Belanja Pegawai					3.056.488.696,00					3.109.813.101,00	53.324.405,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					1.501.720.413,00					1.579.939.093,00	78.218.680,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.089.156.376,00					1.004.944.136,00	-84.212.240,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					932.807.176,00					875.969.878,00	-56.837.298,00
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					932.807.176,00					875.969.878,00	-56.837.298,00
	[-] Golongan II					0,00					169.489.000,00	169.489.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	169.489.000,00	-	169.489.000,00	169.489.000,00
	[-] Golongan III					0,00					421.400.078,00	421.400.078,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	421.400.078,00	-	421.400.078,00	421.400.078,00
	[-] Golongan IV					932.807.176,00					285.080.800,00	-647.726.376,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun -	932.807.176,00	-	932.807.176,00	1 Tahun	Tahun -	285.080.800,00	-	285.080.800,00	-647.726.376,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					156.349.200,00					128.974.258,00	-27.374.942,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					156.349.200,00					128.974.258,00	-27.374.942,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					156.349.200,00					128.974.258,00	-27.374.942,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun -	156.349.200,00	-	156.349.200,00	1 Tahun	Tahun -	128.974.258,00	-	128.974.258,00	-27.374.942,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					103.988.486,00					104.756.973,00	768.487,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					82.919.438,00					84.882.228,00	1.962.790,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					82.919.438,00					84.882.228,00	1.962.790,00
	[-] Golongan II					0,00					15.074.627,00	15.074.627,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	15.074.627,00	-	15.074.627,00	15.074.627,00
	[-] Golongan III					0,00					45.497.588,00	45.497.588,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	45.497.588,00	-	45.497.588,00	45.497.588,00
	[-] Golongan IV					82.919.438,00					24.310.013,00	-58.609.425,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun -	82.919.438,00	-	82.919.438,00	1 Tahun	Tahun -	24.310.013,00	-	24.310.013,00	-58.609.425,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					21.069.048,00					19.874.745,00	-1.194.303,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					21.069.048,00					19.874.745,00	-1.194.303,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					21.069.048,00					19.874.745,00	-1.194.303,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun -	21.069.048,00	-	21.069.048,00	1 Tahun	Tahun -	19.874.745,00	-	19.874.745,00	-1.194.303,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					47.880.000,00					52.069.500,00	4.189.500,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					47.880.000,00					52.069.500,00	4.189.500,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					47.880.000,00					52.069.500,00	4.189.500,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					47.880.000,00					52.069.500,00	4.189.500,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun -	47.880.000,00	-	47.880.000,00	1 Tahun	Tahun -	52.069.500,00	-	52.069.500,00	4.189.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					7.280.000,00					7.917.000,00	637.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					7.280.000,00					7.917.000,00	637.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.280.000,00					7.917.000,00	637.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					7.280.000,00					7.917.000,00	637.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun -	7.280.000,00	-	7.280.000,00	1 Tahun	Tahun -	7.917.000,00	-	7.917.000,00	637.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					48.276.628,00					39.175.425,00	-9.101.203,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					41.061.628,00					33.162.925,00	-7.898.703,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					41.061.628,00					33.162.925,00	-7.898.703,00
	[-] Golongan II					0,00					10.020.975,00	10.020.975,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	10.020.975,00	-	10.020.975,00	10.020.975,00
	[-] Golongan III					0,00					19.120.975,00	19.120.975,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	19.120.975,00	-	19.120.975,00	19.120.975,00
	[-] Golongan IV					41.061.628,00					4.020.975,00	-37.040.653,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun -	41.061.628,00	-	41.061.628,00	1 Tahun	Tahun -	4.020.975,00	-	4.020.975,00	-37.040.653,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					7.215.000,00					6.012.500,00	-1.202.500,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					7.215.000,00					6.012.500,00	-1.202.500,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					7.215.000,00					6.012.500,00	-1.202.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun -	7.215.000,00	-	7.215.000,00	1 Tahun	Tahun -	6.012.500,00	-	6.012.500,00	-1.202.500,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					70.541.040,00					64.590.834,00	-5.950.206,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					56.163.520,00					51.253.696,00	-4.909.824,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					56.163.520,00					51.253.696,00	-4.909.824,00
	[-] Golongan II					0,00					13.851.232,00	13.851.232,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	13.851.232,00	-	13.851.232,00	13.851.232,00
	[-] Golongan III					0,00					24.851.232,00	24.851.232,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	24.851.232,00	-	24.851.232,00	24.851.232,00
	[-] Golongan IV					56.163.520,00					12.551.232,00	-43.612.288,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun -	56.163.520,00	-	56.163.520,00	1 Tahun	Tahun -	12.551.232,00	-	12.551.232,00	-43.612.288,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					14.377.520,00					13.337.138,00	-1.040.382,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					14.377.520,00					13.337.138,00	-1.040.382,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					14.377.520,00					13.337.138,00	-1.040.382,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun -	14.377.520,00	-	14.377.520,00	1 Tahun	Tahun -	13.337.138,00	-	13.337.138,00	-1.040.382,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					15.940.000,00					186.084.852,00	170.144.852,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					14.440.000,00					182.500.000,00	168.060.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					14.440.000,00					182.500.000,00	168.060.000,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					14.440.000,00					182.500.000,00	168.060.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun -	14.440.000,00	-	14.440.000,00	1 Tahun	Tahun -	182.500.000,00	-	182.500.000,00	168.060.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					1.500.000,00						3.584.852,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					1.500.000,00						3.584.852,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					1.500.000,00						3.584.852,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun -	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Tahun	Tahun -	3.584.852,00	-	3.584.852,00	2.084.852,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					23.936,00						25.620,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					17.800,00						19.484,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					17.800,00						19.484,00
	[-] Golongan II					0,00						3.920,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	3.920,00	-	3.920,00	3.920,00
	[-] Golongan III					0,00						7.112,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	7.112,00	-	7.112,00	7.112,00
	[-] Golongan IV					17.800,00						8.452,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun -	17.800,00	-	17.800,00	1 Tahun	Tahun -	8.452,00	-	8.452,00	-9.348,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					6.136,00						6.136,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					6.136,00						6.136,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					6.136,00						6.136,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun -	6.136,00	-	6.136,00	1 Tahun	Tahun -	6.136,00	-	6.136,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					94.100.862,00						98.319.114,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					83.974.740,00						78.000.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					83.974.740,00						78.000.000,00
	[-] Golongan II					0,00						16.450.173,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	16.450.173,00	-	16.450.173,00	16.450.173,00
	[-] Golongan III					0,00						30.824.913,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	30.824.913,00	-	30.824.913,00	30.824.913,00
	[-] Golongan IV					83.974.740,00						30.724.914,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun -	83.974.740,00	-	83.974.740,00	1 Tahun	Tahun -	30.724.914,00	-	30.724.914,00	-53.249.826,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					10.126.122,00						20.319.114,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					10.126.122,00						20.319.114,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					10.126.122,00						20.319.114,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun -	10.126.122,00	-	10.126.122,00	1 Tahun	Tahun -	20.319.114,00	-	20.319.114,00	10.192.992,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					2.662.104,00						2.824.740,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					2.331.144,00						2.331.144,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.331.144,00						2.331.144,00
	[-] Golongan II					0,00						437.058,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	437.058,00	-	437.058,00	437.058,00
	[-] Golongan III					0,00						1.051.798,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	1.051.798,00	-	1.051.798,00	1.051.798,00
	[-] Golongan IV					2.331.144,00						842.288,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	2.331.144,00	-	2.331.144,00	1 Tahun	Tahun -	842.288,00	-	842.288,00	-1.488.856,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					330.960,00						493.596,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					330.960,00						493.596,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					330.960,00						493.596,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	330.960,00	-	330.960,00	1 Tahun	Tahun -	493.596,00	-	493.596,00	162.636,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					8.130.855,00						7.459.799,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					7.126.008,00						5.979.014,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.126.008,00						5.979.014,00
	[-] Golongan II					0,00						1.029.426,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	1.029.426,00	-	1.029.426,00	1.029.426,00
	[-] Golongan III					0,00						3.074.617,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	3.074.617,00	-	3.074.617,00	3.074.617,00
	[-] Golongan IV					7.126.008,00						1.874.971,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun -	7.126.008,00	-	7.126.008,00	1 Tahun	Tahun -	1.874.971,00	-	1.874.971,00	-5.251.037,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					1.004.847,00						1.480.785,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					1.004.847,00						1.480.785,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					1.004.847,00						1.480.785,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun -	1.004.847,00	-	1.004.847,00	1 Tahun	Tahun -	1.480.785,00	-	1.480.785,00	475.938,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					13.740.126,00						11.771.100,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					7.128.000,00						6.697.350,00	-430.650,00
	[#] Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.128.000,00						6.697.350,00	-430.650,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					7.128.000,00						6.697.350,00	-430.650,00
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun -	7.128.000,00	-	7.128.000,00	1 Tahun	Tahun -	6.697.350,00	-	6.697.350,00	-430.650,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					6.612.126,00						5.073.750,00	-1.538.376,00
	[#] Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					6.612.126,00						5.073.750,00	-1.538.376,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					6.612.126,00						5.073.750,00	-1.538.376,00
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun -	6.612.126,00	-	6.612.126,00	1 Tahun	Tahun -	5.073.750,00	-	5.073.750,00	-1.538.376,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.554.768.283,00						1.529.874.008,00	-24.894.275,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					1.010.565.546,00						979.236.637,00	-31.328.909,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					947.921.426,00						916.592.517,00	-31.328.909,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					947.921.426,00						916.592.517,00	-31.328.909,00
	[-] Kelas Jabatan 12					133.232.218,00						128.143.088,00	-5.089.130,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	133.232.218,00	-	133.232.218,00	1 Tahun	Tahun -	128.143.088,00	-	128.143.088,00	-5.089.130,00	
	[-] Kelas Jabatan 5					80.055.920,00						78.700.513,00	-1.355.407,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	80.055.920,00	-	80.055.920,00	1 Tahun	Tahun -	78.700.513,00	-	78.700.513,00	-1.355.407,00	
	[-] Kelas Jabatan 6					191.987.600,00						188.737.157,00	-3.250.443,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	191.987.600,00	-	191.987.600,00	1 Tahun	Tahun -	188.737.157,00	-	188.737.157,00	-3.250.443,00	
	[-] Kelas Jabatan 7					230.882.320,00						217.191.804,00	-13.690.516,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	230.882.320,00	-	230.882.320,00	1 Tahun	Tahun -	217.191.804,00	-	217.191.804,00	-13.690.516,00	
	[-] Kelas Jabatan 9					311.763.368,00						303.819.955,00	-7.943.413,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	311.763.368,00	-	311.763.368,00	1 Tahun	Tahun -	303.819.955,00	-	303.819.955,00	-7.943.413,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					62.644.120,00						62.644.120,00	0,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					62.644.120,00						62.644.120,00	0,00
	[-] Kelas Jabatan 8					62.644.120,00						62.644.120,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	62.644.120,00	-	62.644.120,00	1 Tahun	Tahun -	62.644.120,00	-	62.644.120,00	0,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					156.607.659,00						158.062.472,00	1.454.813,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					156.607.659,00						158.062.472,00	1.454.813,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					156.607.659,00						158.062.472,00	1.454.813,00
	[-] Kelas Jabatan 12					39.969.666,00						41.668.032,00	1.698.366,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	39.969.666,00	-	39.969.666,00	1 Tahun	Tahun -	41.668.032,00	-	41.668.032,00	1.698.366,00	
	[-] Kelas Jabatan 5					8.055.592,00						8.345.760,00	290.168,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	8.055.592,00	-	8.055.592,00	1 Tahun	Tahun -	8.345.760,00	-	8.345.760,00	290.168,00	
	[-] Kelas Jabatan 6					19.198.760,00						20.014.545,00	815.785,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	19.198.760,00	-	19.198.760,00	1 Tahun	Tahun -	20.014.545,00	-	20.014.545,00	815.785,00	
	[-] Kelas Jabatan 7					27.030.968,00						23.032.005,00	-3.998.963,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	27.030.968,00	-	27.030.968,00	1 Tahun	Tahun -	23.032.005,00	-	23.032.005,00	-3.998.963,00	
	[-] Kelas Jabatan 9					62.352.673,00						65.002.130,00	2.649.457,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	62.352.673,00	-	62.352.673,00	1 Tahun	Tahun -	65.002.130,00	-	65.002.130,00	2.649.457,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					387.595.078,00						392.574.899,00	4.979.821,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					362.537.430,00						367.517.251,00	4.979.821,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					362.537.430,00						367.517.251,00	4.979.821,00
	[-] Kelas Jabatan 12					79.939.331,00						83.336.064,00	3.396.733,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	79.939.331,00	-	79.939.331,00	1 Tahun	Tahun -	83.336.064,00	-	83.336.064,00	3.396.733,00	
	[-] Kelas Jabatan 5					24.016.776,00						25.037.279,00	1.020.503,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	24.016.776,00	-	24.016.776,00	1 Tahun	Tahun -	25.037.279,00	-	25.037.279,00	1.020.503,00	
	[-] Kelas Jabatan 6					57.596.280,00						60.043.634,00	2.447.354,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	57.596.280,00	-	57.596.280,00	1 Tahun	Tahun -	60.043.634,00	-	60.043.634,00	2.447.354,00	
	[-] Kelas Jabatan 7					76.279.696,00						69.096.014,00	-7.183.682,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	76.279.696,00	-	76.279.696,00	1 Tahun	Tahun -	69.096.014,00	-	69.096.014,00	-7.183.682,00	
	[-] Kelas Jabatan 9					124.705.347,00						130.004.260,00	5.298.913,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	124.705.347,00	-	124.705.347,00	1 Tahun	Tahun -	130.004.260,00	-	130.004.260,00	5.298.913,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					25.057.648,00						25.057.648,00	0,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					25.057.648,00						25.057.648,00	0,00
	[-] Kelas Jabatan 8					25.057.648,00						25.057.648,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	25.057.648,00	-	25.057.648,00	1 Tahun	Tahun -	25.057.648,00	-	25.057.648,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					62.550.000,00						58.250.000,00	-4.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					62.550.000,00						58.250.000,00	-4.300.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
3	I Gusti Putu Widianara, SE., M.Si.	196909241994031005	Anggota	
4	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
5	I Putu Suarta, S.H., M.H.	196810101994031016	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 14.989.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.989.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.989.400,00
Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					14.989.400,00					14.989.400,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					14.989.400,00					14.989.400,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.989.400,00					14.989.400,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.989.400,00					14.989.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.989.400,00					14.989.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					405.600,00					405.600,00	0,00
	[#] Belanja alat listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					405.600,00					405.600,00	0,00
	[-] Isolasi					405.600,00					405.600,00	0,00
	Perekat/isolasi Spesifikasi : Isolasi Listrik Hitam/Hijau/Putih Berry	104 Buah	Buah	3.900,00	-	405.600,00	104 Buah	Buah	3.900,00	-	405.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					14.583.800,00					14.583.800,00	0,00
	[#] Belanja alat listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.583.800,00					14.583.800,00	0,00
	[-] kabel					1.267.200,00					1.267.200,00	0,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel (Electrical) ukuran 2x0,75mm / 300-500v	144 Meter	Meter	8.800,00	-	1.267.200,00	144 Meter	Meter	8.800,00	-	1.267.200,00	0,00
	[-] lampu LED					5.146.500,00					5.146.500,00	0,00
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Philips (LED) 12 W	47 Buah	Buah	109.500,00	-	5.146.500,00	47 Buah	Buah	109.500,00	-	5.146.500,00	0,00
	[-] lampu lurus biasa					7.674.800,00					7.674.800,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 67.693.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.981.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.693.600,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					54.981.200,00					67.693.600,00	12.712.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					54.981.200,00					60.977.600,00	5.996.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					54.981.200,00					60.977.600,00	5.996.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					54.981.200,00					60.977.600,00	5.996.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					54.981.200,00					59.087.200,00	4.106.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.231.900,00					3.231.900,00	0,00
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.231.900,00					3.231.900,00	0,00
	[-] binder					149.400,00					149.400,00	0,00
	Binder Spesifikasi : Fastener Plastik Acco	9 Pack	Pack	16.600,00	-	149.400,00	9 Pack	Pack	16.600,00	-	149.400,00	0,00
	[-] cutter					339.000,00					339.000,00	0,00
	Cutter Spesifikasi : Cutter L-500 Besar Joyko	10 Buah	Buah	33.900,00	-	339.000,00	10 Buah	Buah	33.900,00	-	339.000,00	0,00
	[-] isi steples					1.872.400,00					1.872.400,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M Kenko	302 Buah	Buah	6.200,00	-	1.872.400,00	302 Buah	Buah	6.200,00	-	1.872.400,00	0,00
	[-] perekat					27.500,00					27.500,00	0,00
	Perekat Spesifikasi : Lem Alat Perekat Kecil Dlukol	11 Botol	Botol	2.500,00	-	27.500,00	11 Botol	Botol	2.500,00	-	27.500,00	0,00
	[-] perekat/isolasi					415.000,00					415.000,00	0,00
	Perekat/isolasi Spesifikasi : 12 mm x 33 m Panfix	10 Buah	Buah	26.100,00	-	261.000,00	10 Buah	Buah	26.100,00	-	261.000,00	0,00
	Perekat/isolasi Spesifikasi : Plakban kain 1 hitam tebal Sks	7 Buah	Buah	22.000,00	-	154.000,00	7 Buah	Buah	22.000,00	-	154.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] post-it					153.000,00					153.000,00	0,00
	Post-It Spesifikasi : Sign Here 76x51 mm 5 warna Big	17 Buah	Buah	9.000,00	-	153.000,00	17 Buah	Buah	9.000,00	-	153.000,00	0,00
	[-] spidol					65.600,00					65.600,00	0,00
	Spidol Spesifikasi : Spidol Marker White Board Snowman	8 Buah	Buah	8.200,00	-	65.600,00	8 Buah	Buah	8.200,00	-	65.600,00	0,00
	[-] staples					210.000,00					210.000,00	0,00
	Staples Spesifikasi : Type Hp-10 Kangaro	4 Buah	Buah	52.500,00	-	210.000,00	4 Buah	Buah	52.500,00	-	210.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					17.896.200,00					17.896.200,00	0,00
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.896.200,00					17.896.200,00	0,00
	[-] berbagai kertas					138.600,00					138.600,00	0,00
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Asturo	21 Pcs	Pcs	6.600,00	-	138.600,00	21 Pcs	Pcs	6.600,00	-	138.600,00	0,00
	[-] kertas HVS					17.757.600,00					17.757.600,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr Sinar Dunia	196 Rim	Rim	90.600,00	-	17.757.600,00	196 Rim	Rim	90.600,00	-	17.757.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.845.500,00					2.845.500,00	0,00
	[#] Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.845.500,00					2.845.500,00	0,00
	[-] barang cetakan					2.845.500,00					2.845.500,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	35 Meter	Meter	81.300,00	-	2.845.500,00	35 Meter	Meter	81.300,00	-	2.845.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					12.294.100,00					12.294.100,00	0,00
	[#] Bahan kimia untuk pembersih/pembasmi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.359.900,00					11.359.900,00	0,00
	[-] detergen					3.875.900,00					3.875.900,00	0,00
	Detergen Spesifikasi : Cairan detergen botol 780 MI	113 Botol	Botol	34.300,00	-	3.875.900,00	113 Botol	Botol	34.300,00	-	3.875.900,00	0,00
	[-] pembersih kaca					738.500,00					738.500,00	0,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Pembersih Kaca 440 MI Cling	35 Buah	Buah	21.100,00	-	738.500,00	35 Buah	Buah	21.100,00	-	738.500,00	0,00
	[-] pembersih lantai					3.048.700,00					3.048.700,00	0,00
	Pembersih lantai Spesifikasi : Pembersih lantai 800 MI	55 Botol	Botol	33.700,00	-	1.853.500,00	55 Botol	Botol	33.700,00	-	1.853.500,00	0,00
	Pembersih lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai / Wpc Biru 800 MI	72 Botol	Botol	16.600,00	-	1.195.200,00	72 Botol	Botol	16.600,00	-	1.195.200,00	0,00
	[-] sabun					817.000,00					817.000,00	0,00
	Sabun cuci piring-refill Spesifikasi : Sabun cuci piring refill 210 ml	86 Buah	Buah	9.500,00	-	817.000,00	86 Buah	Buah	9.500,00	-	817.000,00	0,00
	[-] sabun cuci piring					2.879.800,00					2.879.800,00	0,00
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Sabun cuci piring 400 MI	77 Buah	Botol	37.400,00	-	2.879.800,00	77 Buah	Botol	37.400,00	-	2.879.800,00	0,00
	[#] Pengharum Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					934.200,00					934.200,00	0,00
	[-] pengharum ruangan					934.200,00					934.200,00	0,00
	Pengharum ruangan Spesifikasi : Pengharum ruangan spray 360 gr	18 Botol	Botol	51.900,00	-	934.200,00	18 Botol	Botol	51.900,00	-	934.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					18.713.500,00					22.819.500,00	4.106.000,00
	[#] Alat/Bahan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.849.000,00					2.849.000,00	0,00
	[-] Tissue					2.849.000,00					2.849.000,00	0,00
	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	60 Kotak	Kotak	34.400,00	-	2.064.000,00	60 Kotak	Kotak	34.400,00	-	2.064.000,00	0,00
	Tissue Spesifikasi : Tissue roll tessa	50 GULUNG	GULUNG	15.700,00	-	785.000,00	50 GULUNG	GULUNG	15.700,00	-	785.000,00	0,00
	[#] Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.864.500,00					17.725.500,00	1.861.000,00
	[-] handuk					9.305.000,00					11.166.000,00	1.861.000,00
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Handuk Besar Cotton 100% 60x120 Cm	50 Buah	Buah	186.100,00	-	9.305.000,00	50 Buah	Buah	186.100,00	-	9.305.000,00	0,00
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Handuk Besar Cotton 100% 60x120 Cm	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	186.100,00	-	1.861.000,00	1.861.000,00
	[-] kain lap/pel					500.500,00					500.500,00	0,00
	Kain Lap/Pel Spesifikasi : lap Kuning Flanel	13 Buah	Buah	38.500,00	-	500.500,00	13 Buah	Buah	38.500,00	-	500.500,00	0,00
	[-] kanebo					709.800,00					709.800,00	0,00
	Kain Lap/Pel Spesifikasi : Kanebo/Plas Chamois / Kanebo/Plas Chamois / 43X32X0.2 Cm	6 Buah	Buah	118.300,00	-	709.800,00	6 Buah	Buah	118.300,00	-	709.800,00	0,00
	[-] kemoceng					288.000,00					288.000,00	0,00
	Kemoceng Spesifikasi : Kemoceng Bulu Ayam biasa	6 Buah	Buah	48.000,00	-	288.000,00	6 Buah	Buah	48.000,00	-	288.000,00	0,00
	[-] pengki					1.125.900,00					1.125.900,00	0,00
	Pengki Spesifikasi : Pengki Plastik	9 Buah	Buah	125.100,00	-	1.125.900,00	9 Buah	Buah	125.100,00	-	1.125.900,00	0,00
	[-] sapu ijuk					1.002.000,00					1.002.000,00	0,00
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	10 Buah	Buah	100.200,00	-	1.002.000,00	10 Buah	Buah	100.200,00	-	1.002.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] sapu lidi					996.200,00					996.200,00	0,00
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi Gagang Kayu	5 Buah	Buah	148.200,00	-	741.000,00	5 Buah	Buah	148.200,00	-	741.000,00	0,00
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi Kasur Gepeng Putih	8 Buah	Buah	31.900,00	-	255.200,00	8 Buah	Buah	31.900,00	-	255.200,00	0,00
	[-] sikat					117.000,00					117.000,00	0,00
	Sikat Spesifikasi : Sikat Baju	3 Buah	Buah	39.000,00	-	117.000,00	3 Buah	Buah	39.000,00	-	117.000,00	0,00
	[-] spon cuci piring					318.000,00					318.000,00	0,00
	Alat dapur Spesifikasi : Spons Cuci Piring Merk Polytex	15 Buah	Buah	21.200,00	-	318.000,00	15 Buah	Buah	21.200,00	-	318.000,00	0,00
	[-] tempat sampah					1.502.100,00					1.502.100,00	0,00
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah 12 Ltr	9 Buah	Buah	166.900,00	-	1.502.100,00	9 Buah	Buah	166.900,00	-	1.502.100,00	0,00
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					2.245.000,00	2.245.000,00
	[-] Cangkir					0,00					398.000,00	398.000,00
	Alat makan dan minum Spesifikasi : Cangkir Keramik	-	Set	0,00	-	0,00	4 Set	Set	99.500,00	-	398.000,00	398.000,00
	[-] piring					0,00					1.460.000,00	1.460.000,00
	Piring Makan Spesifikasi : Piring Makan Keramik (diameter 27 cm)	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	73.000,00	-	1.460.000,00	1.460.000,00
	[-] Sendok makan dan garpu					0,00					387.000,00	387.000,00
	Alat makan dan minum Spesifikasi : Garpu isi 6	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set	Set	63.100,00	-	126.200,00	126.200,00
	Alat makan dan minum Spesifikasi : Sendok Makan isi 12	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	260.800,00	-	260.800,00	260.800,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					0,00					1.890.400,00	1.890.400,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					0,00					490.000,00	490.000,00
	[#] Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					490.000,00	490.000,00
	[-] keset					0,00					0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi : Keset (Keset/Alas Kaki Model yang sekarang sekeliling kesetnya di press)	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	250.000,00	-	0,00	0,00
	[-] tempat sampah					0,00					490.000,00	490.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi : Tong Sampah (Tempat Sampah injak min. kapasitas 20 L)	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	245.000,00	-	490.000,00	490.000,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur					0,00					791.400,00	791.400,00
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					791.400,00	791.400,00
	[-] Mangkok					0,00					444.000,00	444.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur Spesifikasi : Mangkok (Mangkok kuah melamin ukuran min. 4,5 INCH)	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set	Set	222.000,00	-	444.000,00	444.000,00
	[-] piring					0,00					347.400,00	347.400,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur Spesifikasi : Piring Oval (Piring Bahan Porselen Berbentuk Oval)	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set	Set	173.700,00	-	347.400,00	347.400,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00					609.000,00	609.000,00
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					609.000,00	609.000,00
	[-] Hanger VIP					0,00					609.000,00	609.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Hanger VIP (Hanger Pakaian stainless)	-	Lusin	0,00	-	0,00	3 Lusin	Lusin	203.000,00	-	609.000,00	609.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					6.716.000,00	6.716.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					6.716.000,00	6.716.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00					6.716.000,00	6.716.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0,00					6.716.000,00	6.716.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00					6.716.000,00	6.716.000,00
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					6.716.000,00	6.716.000,00
	[-] Sprei VIP					0,00					6.216.000,00	6.216.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sprei Set (Satu Set Sprei Tempat Tidur Premium ukuran min. P 15 cm x L 90 cm x T 200 cm)	-	Set	0,00	-	0,00	4 Set	Set	1.554.000,00	-	6.216.000,00	6.216.000,00
	[-] Taplak meja					0,00					500.000,00	500.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 90.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					90.000.000,00					90.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					90.000.000,00					90.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					90.000.000,00					90.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					90.000.000,00					90.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					90.000.000,00					90.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					90.000.000,00					90.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Sajen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90.000.000,00					90.000.000,00	0,00
	[-] Piodalan di Badan Penghubung dan Anjungan Bali TMII					60.500.000,00					60.500.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sajen Upacara Keagamaan Besar/Odalan pada Badan Penghubung dan Anjungan Bali TMII	1 Tahun	Tahun	60.500.000,00	-	60.500.000,00	1 Tahun	Tahun	60.500.000,00	-	60.500.000,00	0,00
	[-] Sajen Sehari-hari di Badan Penghubung dan Anjungan Bali					12.500.000,00					12.500.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sajen Upacara Keagamaan Kecil/Harian pada Badan Penghubung dan Anjungan Bali TMII	1 Tahun	Tahun	12.500.000,00	-	12.500.000,00	1 Tahun	Tahun	12.500.000,00	-	12.500.000,00	0,00
	[-] Sajen Upacara Keagamaan Sedang					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.090.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.499.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.090.500,00
Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					8.499.300,00					6.090.500,00	-2.408.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					8.499.300,00					6.090.500,00	-2.408.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.499.300,00					6.090.500,00	-2.408.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.499.300,00					6.090.500,00	-2.408.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.499.300,00					6.090.500,00	-2.408.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					8.499.300,00					6.090.500,00	-2.408.800,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					523.500,00	523.500,00
	[-] Foto copy					0,00					523.500,00	523.500,00
	Fotocopy Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	-	Lembar	0,00	-	0,00	1047 Lembar	Lembar	500,00	-	523.500,00	523.500,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.940.300,00					3.810.000,00	-2.130.300,00
	[-] Amplop					1.274.400,00					720.000,00	-554.400,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Amplop Coklat tanggung kop (Amplop Samson C)	177 Buah	Buah	7.200,00	-	1.274.400,00	100 Buah	Buah	7.200,00	-	720.000,00	-554.400,00
	[-] stop map					4.665.900,00					3.090.000,00	-1.575.900,00
	Map Spesifikasi : Stop Map Lambang Daerah Berwarna Buffalo	151 Pack	Pack	30.900,00	-	4.665.900,00	100 Pack	Pack	30.900,00	-	3.090.000,00	-1.575.900,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.239.000,00					767.000,00	-472.000,00
	[-] Amplop					885.000,00					590.000,00	-295.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Amplop coklat besar Kop (Amplop Samson E)	150 Buah	Buah	5.900,00	-	885.000,00	100 Buah	Buah	5.900,00	-	590.000,00	-295.000,00
	[-] kwitansi					354.000,00					177.000,00	-177.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 99.764.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.171.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.764.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					62.171.000,00					99.764.000,00	37.593.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					62.171.000,00					99.764.000,00	37.593.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					62.171.000,00					99.764.000,00	37.593.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.400.000,00					8.595.000,00	6.195.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.400.000,00					8.595.000,00	6.195.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.400.000,00					8.595.000,00	6.195.000,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.400.000,00					8.595.000,00	6.195.000,00
	[-] Nasi Kotak					1.500.000,00					5.100.000,00	3.600.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Kotak	Kotak	30.000,00	-	1.500.000,00	170 Kotak	Kotak	30.000,00	-	5.100.000,00	3.600.000,00
	[-] Snack biasa					900.000,00					3.495.000,00	2.595.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Biasa	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	900.000,00	233 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.495.000,00	2.595.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					59.771.000,00					91.169.000,00	31.398.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					59.771.000,00					91.169.000,00	31.398.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					59.771.000,00					91.169.000,00	31.398.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.990.000,00					54.768.000,00	15.778.000,00
	[-] penginapan					6.370.000,00					9.100.000,00	2.730.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 544.230.256,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 229.503.420,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 544.230.256,00
Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	79 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kinerja perangkat daerah Meningkatnya kinerja perangkat daerah	90 Indeks 100 % 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					229.503.420,00					544.230.256,00	314.726.836,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					29.091.000,00	29.091.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					29.091.000,00	29.091.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					29.091.000,00	29.091.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					29.091.000,00	29.091.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00					29.091.000,00	29.091.000,00
	[#] Belanja Korden VIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					29.091.000,00	29.091.000,00
	[-] Korden					0,00					29.091.000,00	29.091.000,00
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Korden satu set	-	Set	0,00	-	0,00	30 Set	Set	969.700,00	-	29.091.000,00	29.091.000,00
	[#] Belanja kebutuhan barang VIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Cangkir					0,00					0,00	0,00
	Alat makan dan minum Spesifikasi : Cangkir Keramik	-	Set	0,00	-	0,00	-	Set	99.500,00	-	0,00	0,00
	[-] Garpu					0,00					0,00	0,00
	Alat makan dan minum Spesifikasi : Garpu isi 6	-	Set	0,00	-	0,00	-	Set	63.100,00	-	0,00	0,00
	[-] Handuk VIP					0,00					0,00	0,00
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Handuk Besar Cotton 100% 60x120 Cm	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	186.100,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Kaset					0,00					0,00	0,00
	Kaset Spesifikasi : Kaset Beludru	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	231.200,00	-	0,00	0,00
	[-] Piring makan					0,00					0,00	0,00
	Piring Makan Spesifikasi : Piring Makan Keramik (diameter 27 cm)	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	73.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Sendok makan					0,00					0,00	0,00
	Alat makan dan minum Spesifikasi : Sendok Makan isi 12	-	Set	0,00	-	0,00	-	Set	260.800,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					0,00					0,00	0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja kebutuhan barang VIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Tempat sampah					0,00					0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi : Tong Sampah (Tempat Sampah injak min. kapasitas 20 L)	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	245.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja kebutuhan barang VIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Mangkok					0,00					0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur Spesifikasi : Mangkok (Mangkok kuah melamin ukuran min. 4,5 INCH)	-	Set	0,00	-	0,00	-	Set	222.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Piring makan					0,00					0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur Spesifikasi : Piring Oval (Piring Bahan Porselen Berbentuk Oval)	-	Set	0,00	-	0,00	-	Set	173.700,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja kebutuhan barang VIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Hanger VIP					0,00					0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Hanger VIP (Hanger Pakaian stainless)	-	Lusin	0,00	-	0,00	-	Lusin	203.000,00	-	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					229.503.420,00					515.139.256,00	285.635.836,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					229.503.420,00					515.139.256,00	285.635.836,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					169.249.720,00					262.389.141,00	93.139.421,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					157.543.920,00					250.683.341,00	93.139.421,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					0,00					42.922.400,00	42.922.400,00
	[#] Belanja Kursi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					18.948.000,00	18.948.000,00
	[-] Kursi kerja					0,00					18.948.000,00	18.948.000,00
	Kursi Kantor Spesifikasi : Kursi kerja staf	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	4.737.000,00	-	18.948.000,00	18.948.000,00
	[#] Belanja Meja Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					23.974.400,00	23.974.400,00
	[-] Meja Kerja					0,00					23.974.400,00	23.974.400,00
	Meja Kantor Spesifikasi : Meja guru/meja kerja/meja 1 biro/meja staff MK08 UNIM desking (1500(P) x 0750(L) x 730(T) mm) Indovickers	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	5.993.600,00	-	23.974.400,00	23.974.400,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					0,00					6.655.000,00	6.655.000,00
	[#] Vacuum Cleaner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					6.655.000,00	6.655.000,00
	[-] Vacuum Cleaner					0,00					6.655.000,00	6.655.000,00
	Belanja Modal Alat Pembersih Spesifikasi : Vacuum Cleaner (Penyedot Debu Dàya Hisap Kuat min. kapasitas 10 L)	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	6.655.000,00	-	6.655.000,00	6.655.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					57.406.320,00					89.245.800,00	31.839.480,00
	[#] Belanja AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					57.406.320,00					89.245.800,00	31.839.480,00
	[-] AC 1 PK					36.180.000,00					36.180.000,00	0,00
	AC 1 PK Spesifikasi : AC 1 PK, Instalasi, Garansi Min. 1 Tahun, TKDN Min. 25%	5 Unit	Unit	7.236.000,00	-	36.180.000,00	5 Unit	Unit	7.236.000,00	-	36.180.000,00	0,00
	[-] AC 2 PK					21.226.320,00					53.065.800,00	31.839.480,00
	AC 2 PK Spesifikasi : AC 2 PK, Instalasi, Garansi Min. 1 Tahun, TKDN Min. 25%	2 Unit	Unit	10.613.160,00	-	21.226.320,00	5 Unit	Unit	10.613.160,00	-	53.065.800,00	31.839.480,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					0,00					11.020.141,00	11.020.141,00
	[#] Belanja kebutuhan barang VIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					11.020.141,00	11.020.141,00
	[-] Kompor listrik					0,00					2.550.001,00	2.550.001,00
	Belanja Modal Alat Dapur Spesifikasi : Kompor Listrik (Kompor Tenaga Listrik)	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	2.550.001,00	-	2.550.001,00	2.550.001,00
	[-] Magic com					0,00					1.950.000,00	1.950.000,00
	Belanja Modal Alat Dapur Spesifikasi : Magic Com	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	1.950.000,00	-	1.950.000,00	1.950.000,00
	[-] microwave					0,00					6.520.140,00	6.520.140,00
	Belanja Modal Alat Dapur Spesifikasi : Microwave (Panasonic Microwave NN-GF574M)	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	6.520.140,00	-	6.520.140,00	6.520.140,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					100.137.600,00					100.840.000,00	702.400,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Pembelian TV LED Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.137.600,00						100.137.600,00	0,00
	[-] TV LED					100.137.600,00						100.137.600,00	0,00
	Televisi 43 Inch Spesifikasi : Smart TV 4K 43 Inch, Garansi Min. 1 Tahun, TKDN Min. 25%	8 Unit	Unit	12.517.200,00	-	100.137.600,00	8 Unit	Unit	12.517.200,00	-	100.137.600,00	0,00	
	[#] Belanja kebutuhan barang VIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						702.400,00	702.400,00
	[-] Sprei					0,00						0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sprei Set (Satu Set Sprei Tempat Tidur Premium ukuran min. P 15 cm x L 90 cm x T 200 cm)	-	Set	0,00	-	0,00	-	Set	1.554.000,00	-	0,00	0,00	
	[-] Taplak meja					0,00						0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Taplak Meja Ruang Makan (Taplak Meja Makan Bahan Kain ukuran min. 200 x 180)	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	500.000,00	-	0,00	0,00	
	[-] Teko listrik					0,00						702.400,00	702.400,00
	Pemanas air Spesifikasi : SUBRON Teko Termos Listrik Pemanas Air Thermos Kettle Electric 2 Liter - Silver	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	702.400,00	-	702.400,00	702.400,00	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					11.705.800,00						11.705.800,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					11.705.800,00						11.705.800,00	0,00
	[#] Belanja Kursi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.705.800,00						11.705.800,00	0,00
	[-] Kursi kerja					11.705.800,00						11.705.800,00	0,00
	Kursi kerja pejabat eselon IV Spesifikasi : Kursi kerja pejabat eselon IV ukuran : 45 x 65 x 120 cm	2 Buah	Buah	5.852.900,00	-	11.705.800,00	2 Buah	Buah	5.852.900,00	-	11.705.800,00	0,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					14.485.800,00						47.923.915,00	33.438.115,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					0,00						33.438.115,00	33.438.115,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					0,00						33.438.115,00	33.438.115,00
	[#] Sound system Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						33.438.115,00	33.438.115,00
	[-] sound system					0,00						33.438.115,00	33.438.115,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System (Ceiling Speaker + intalasi dan komponen pendukung lainnya)	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	1.792.523,00	-	8.962.615,00	8.962.615,00	
	Sound System Spesifikasi : Sound System	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	24.475.500,00	-	24.475.500,00	24.475.500,00	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					14.485.800,00						14.485.800,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya					14.485.800,00						14.485.800,00	0,00
	[#] Handy Talky Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.485.800,00						14.485.800,00	0,00
	[-] HT					14.485.800,00						14.485.800,00	0,00
	Alat Komunikasi Spesifikasi : Handy Talky VZ-28	7 Unit	Unit	2.069.400,00	-	14.485.800,00	7 Unit	Unit	2.069.400,00	-	14.485.800,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					45.767.900,00						204.826.200,00	159.058.300,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					40.890.400,00						195.071.200,00	154.180.800,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					40.890.400,00						195.071.200,00	154.180.800,00
	[#] Belanja Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40.890.400,00						40.890.400,00	0,00
	[-] Laptop					40.890.400,00						40.890.400,00	0,00
	Laptop/Notebook (Administrasi) Spesifikasi : Processor Min.Core i7 Gen 13, RAM Min. 8 GB RAM, Storage Min. 512 GB SSD/NVME, Monitor Min. 14 inch, Sistem Operasi, Garansi Min. 1 Tahun, TKDN min. 25%	2 Unit	Unit	20.445.200,00	-	40.890.400,00	2 Unit	Unit	20.445.200,00	-	40.890.400,00	0,00	
	[#] Belanja Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						154.180.800,00	154.180.800,00
	[-] Komputer PC					0,00						154.180.800,00	154.180.800,00
	Personal Computer (Grafis/High End) Spesifikasi : Processor Min.Core i7 Gen 13, Min. 16 GB RAM, Storage Min. 256 GB SSD/NVME + Min. 1TB HDD / Min. 1TB SSD, VGA Min. 2 GB, Monitor Min. 21,5 inch, Sistem Operasi, Garansi Min. 1 Tahun, TKDN min. 25%	-	Unit	0,00	-	0,00	4 Unit	Unit	38.545.200,00	-	154.180.800,00	154.180.800,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					4.877.500,00						9.755.000,00	4.877.500,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					4.877.500,00						9.755.000,00	4.877.500,00
	[#] Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.877.500,00						9.755.000,00	4.877.500,00
	[-] Printer					4.877.500,00						9.755.000,00	4.877.500,00
	Printer Spesifikasi : Printer L3110 Ecotank, Dimensi 375 X 347 X 179 Mm	1 Unit	Unit	4.877.500,00	-	4.877.500,00	2 Unit	Unit	4.877.500,00	-	9.755.000,00	4.877.500,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						229.503.420,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				544.230.256,00	314.726.836,00	
							Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung						
							Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
3	I Gusti Putu Widianara, SE., M.Si.	196909241994031005	Anggota	
4	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
5	I Putu Suarta, S.H., M.H.	196810101994031016	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.989.100,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.989.100,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.989.100,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					8.989.100,00					8.989.100,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					8.989.100,00					8.989.100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.989.100,00					8.989.100,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					989.100,00					989.100,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					989.100,00					989.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					989.100,00					989.100,00	0,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					989.100,00					989.100,00	0,00
	[-] Materai					989.100,00					989.100,00	0,00
	Meterai Spesifikasi : Materai 10.000	63 Lembar	Lembar	15.700,00	-	989.100,00	63 Lembar	Lembar	15.700,00	-	989.100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Paket Pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[-] Paket Pengiriman					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 306.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 306.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 306.800.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					306.800.000,00					306.800.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					306.800.000,00					306.800.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					306.800.000,00					306.800.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					306.800.000,00					306.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					306.800.000,00					306.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					46.800.000,00					46.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46.800.000,00					46.800.000,00	0,00
	[-] Tagihan Telepon					46.800.000,00					46.800.000,00	0,00
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	46.800.000,00	-	46.800.000,00	1 Tahun	Tahun	46.800.000,00	-	46.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					260.000.000,00					260.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					260.000.000,00					260.000.000,00	0,00
	[-] Tagihan Listrik					260.000.000,00					260.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.213.956.466,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.159.107.136,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.213.956.466,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.159.107.136,00					1.213.956.466,00	54.849.330,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.159.107.136,00					1.213.956.466,00	54.849.330,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.159.107.136,00					1.213.956.466,00	54.849.330,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.159.107.136,00					1.213.956.466,00	54.849.330,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.103.990.272,00					1.158.839.602,00	54.849.330,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					123.617.144,00					123.617.144,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					123.617.144,00					123.617.144,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					123.617.144,00					123.617.144,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi pada Badan Penghubung dan Anjungan Bali TMII	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	121.617.144,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	121.617.144,00	0,00
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					380.872.680,00					435.722.010,00	54.849.330,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					380.872.680,00					435.722.010,00	54.849.330,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					380.872.680,00					435.722.010,00	54.849.330,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan/ Cleaning Service pada Badan Penghubung Provinsi Bali	1 Tahun	Tahun	133.638.392,00	-	133.638.392,00	1 Tahun	Tahun	133.638.392,00	-	133.638.392,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tambahan Anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Cleaning Service pada Badan Penghubung Provinsi Bali	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	54.849.330,00	-	54.849.330,00	54.849.330,00	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kebersihan pada Badan Penghubung dan Anjungan Bali TMII	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	243.234.288,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	243.234.288,00	0,00	
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	4 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					509.500.448,00						509.500.448,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					509.500.448,00						509.500.448,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Keamanan					509.500.448,00						509.500.448,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam pada Badan Penghubung Provinsi Bali	1 Tahun	Tahun	200.457.588,00	-	200.457.588,00	1 Tahun	Tahun	200.457.588,00	-	200.457.588,00	0,00	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Tenaga Keamanan pada Badan Penghubung dan Anjungan Bali TMII	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	304.042.860,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	304.042.860,00	0,00	
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	5 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	5.000.000,00	5 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					90.000.000,00						90.000.000,00	0,00
	[#] Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90.000.000,00						90.000.000,00	0,00
	[-] Belanja pembayaran pajak					90.000.000,00						90.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Pembayaran PBB/luran/Asosiasi pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	90.000.000,00	-	90.000.000,00	1 Tahun	Tahun	90.000.000,00	-	90.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					55.116.864,00						55.116.864,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					26.755.740,00						26.755.740,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.864.680,00						4.864.680,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					4.864.680,00						4.864.680,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Non ASN pada Badan Penghubung	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	4.864.680,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	4.864.680,00	0,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.729.360,00						9.729.360,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					9.729.360,00						9.729.360,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Non ASN pada Badan Penghubung	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	9.729.360,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	9.729.360,00	0,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.161.700,00						12.161.700,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Keamanan					12.161.700,00						12.161.700,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Non ASN pada Badan Penghubung	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	12.161.700,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	12.161.700,00	0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.605.384,00						1.605.384,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					291.888,00						291.888,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					291.888,00						291.888,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Badan Penghubung	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	291.888,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	291.888,00	0,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					583.776,00						583.776,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					583.776,00						583.776,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Badan Penghubung	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	583.776,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	583.776,00	0,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					729.720,00						729.720,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Keamanan					729.720,00						729.720,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Badan Penghubung	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	729.720,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	729.720,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					2.006.664,00						2.006.664,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					364.848,00						364.848,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					364.848,00						364.848,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Badan Penghubung	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	364.848,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	364.848,00	0,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					729.696,00						729.696,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					729.696,00						729.696,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Badan Penghubung	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	729.696,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	729.696,00	0,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					912.120,00						912.120,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Keamanan					912.120,00						912.120,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Badan Penghubung	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	912.120,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	912.120,00	0,00	
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					24.749.076,00						24.749.076,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.499.832,00						4.499.832,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					4.499.832,00						4.499.832,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.581.337.868,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.332.537.868,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.581.337.868,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.332.537.868,00					1.581.337.868,00	248.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.332.537.868,00					1.581.337.868,00	248.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.332.537.868,00					1.581.337.868,00	248.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					332.144.300,00					316.544.300,00	-15.600.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					332.144.300,00					316.544.300,00	-15.600.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					332.144.300,00					316.544.300,00	-15.600.000,00
	[#] Bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					320.809.300,00					305.209.300,00	-15.600.000,00
	[-] pertamax					290.820.000,00					275.220.000,00	-15.600.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	19388 Liter	Liter	15.000,00	-	290.820.000,00	18348 Liter	Liter	15.000,00	-	275.220.000,00	-15.600.000,00
	[-] solar non subsidi					29.989.300,00					29.989.300,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar Non-Subsidi	1507 Liter	Liter	19.900,00	-	29.989.300,00	1507 Liter	Liter	19.900,00	-	29.989.300,00	0,00
	[#] Oli mobil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.335.000,00					11.335.000,00	0,00
	[-] Oli Diesel					2.065.000,00					2.065.000,00	0,00
	Oli Mobil Spesifikasi : Oli Mobil Shell Rimula R2 Diesel Sae 40 5000 MI	5 Kaleng	Kaleng	413.000,00	-	2.065.000,00	5 Kaleng	Kaleng	413.000,00	-	2.065.000,00	0,00
	[-] Oli mobil					9.270.000,00					9.270.000,00	0,00
	Oli Mobil Spesifikasi : Oli Mobil Shell Hx7 - 10W-40 1000 MI	50 Kaleng	Kaleng	185.400,00	-	9.270.000,00	50 Kaleng	Kaleng	185.400,00	-	9.270.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					916.593.568,00					1.085.393.568,00	168.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					876.508.576,00					1.045.308.576,00	168.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					363.000.000,00					481.800.000,00	118.800.000,00
	[#] Tenaga sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					363.000.000,00					481.800.000,00	118.800.000,00
	[-] Bulan Januari s.d April					363.000.000,00					121.000.000,00	-242.000.000,00
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan.	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000,00	-	33.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000,00	-	11.000.000,00	-22.000.000,00
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Sopir Gubernur dan Ketua DPRD	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	96.000.000,00	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	32.000.000,00	-64.000.000,00
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Sopir Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	42.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	14.000.000,00	-28.000.000,00
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	192.000.000,00	4 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	64.000.000,00	-128.000.000,00
	[-] Bulan Mei s.d Desember					0,00					360.800.000,00	360.800.000,00
	Satuan biaya jasa Pelayanan Umum (Sopir Pejabat) Spesifikasi : Sopir Gubernur dan Sopir Ketua DPRD	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	6.100.000,00	-	97.600.000,00	97.600.000,00
	Satuan biaya jasa Pelayanan Umum (Sopir Pejabat) Spesifikasi : Sopir Kepala Kantor/Kepala Badan Penghubung	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
	Satuan biaya jasa Pelayanan Umum (Sopir Pejabat) Spesifikasi : Sopir Sekretaris Daerah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	44.000.000,00	44.000.000,00
	Satuan biaya jasa Pelayanan Umum (Sopir Pejabat) Spesifikasi : Sopir Wakil Gubernur dan Sopir Wakil Ketua DPRD	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	6.100.000,00	-	195.200.000,00	195.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					494.468.576,00					494.468.576,00	0,00
	[#] Tenaga sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					494.468.576,00					494.468.576,00	0,00
	[-] sopir					486.468.576,00					486.468.576,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir pada Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	486.468.576,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	486.468.576,00	0,00
	[-] THR Sopir					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	8 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	8.000.000,00	8 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					0,00					50.000.000,00	50.000.000,00
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					50.000.000,00	50.000.000,00
	[-] Belanja listrik kendaraan dinas					0,00					50.000.000,00	50.000.000,00
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja listrik di SPKLU untuk kendaraan dinas bertenaga listrik pada Badan Penghubung Provinsi Bali	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					19.040.000,00					19.040.000,00	0,00
	[#] Pajak STNK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.040.000,00					19.040.000,00	0,00
	[-] pajak STNK					19.040.000,00					19.040.000,00	0,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	19.040.000,00	-	19.040.000,00	1 Tahun	Tahun	19.040.000,00	-	19.040.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					40.084.992,00					40.084.992,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					19.458.720,00					19.458.720,00	0,00
	[#] Tenaga sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.458.720,00					19.458.720,00	0,00
	[-] BPJS Kesehatan					19.458.720,00					19.458.720,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Non ASN pada Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	19.458.720,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	19.458.720,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.167.552,00					1.167.552,00	0,00
	[#] Tenaga sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.167.552,00					1.167.552,00	0,00
	[-] Iuran Kecelakaan Kerja					1.167.552,00					1.167.552,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	1.167.552,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	1.167.552,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.459.392,00					1.459.392,00	0,00
	[#] Tenaga sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.459.392,00					1.459.392,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian					1.459.392,00					1.459.392,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Badan Penghubung	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	1.459.392,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	1.459.392,00	0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					17.999.328,00					17.999.328,00	0,00
	[#] Tenaga sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.999.328,00					17.999.328,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Hari Tua					17.999.328,00					17.999.328,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Badan Penghubung	8 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	187.493,00	-	17.999.328,00	8 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	187.493,00	-	17.999.328,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					83.800.000,00					179.400.000,00	95.600.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					83.800.000,00					179.400.000,00	95.600.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					83.800.000,00					173.800.000,00	90.000.000,00
	[#] Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					83.800.000,00					173.800.000,00	90.000.000,00
	[-] pemeliharaan kendaraan dinas					83.800.000,00					173.800.000,00	90.000.000,00
	Belanja Pemelihaaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kendaraan Roda 4/sejenisnya	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	18.000.000,00	-	90.000.000,00	90.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 537.975.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 395.343.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 537.975.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					395.343.000,00					537.975.000,00	142.632.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					175.164.000,00					317.796.000,00	142.632.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					175.164.000,00					317.796.000,00	142.632.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00	
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00	
	[-] Honorarium Pengelola BMD					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00	
	Pengguna Barang Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan>15 Milyar s/d 30 Milyar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					151.300.000,00					302.600.000,00	151.300.000,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					151.300.000,00					302.600.000,00	151.300.000,00	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					151.300.000,00					302.600.000,00	151.300.000,00	
	[#] Belanja pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					151.300.000,00					302.600.000,00	151.300.000,00	
	[-] Pemeliharaan gedung kantor Anggaran Induk					151.300.000,00					151.300.000,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	151.300.000,00	-	151.300.000,00	1 Tahun	Tahun	151.300.000,00	-	151.300.000,00	0,00	
	[-] Tambahan pemeliharaan gedung kantor Anggaran Perubahan					0,00					151.300.000,00	151.300.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Tambahan pemeliharaan Gedung Badan Penghubung Provinsi Bali	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	151.300.000,00	-	151.300.000,00	151.300.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					23.864.000,00					12.196.000,00	-11.668.000,00	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 151.625.796,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 141.769.196,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.625.796,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					141.769.196,00					151.625.796,00	9.856.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					141.769.196,00					151.625.796,00	9.856.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					141.769.196,00					151.625.796,00	9.856.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					9.856.600,00	9.856.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					9.856.600,00	9.856.600,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					0,00					9.856.600,00	9.856.600,00
	[#] Belanja isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					9.856.600,00	9.856.600,00
	[-] Isi Tabung Pemadam					0,00					9.856.600,00	9.856.600,00
	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : ABC Dry Powder 1 Kg	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	474.100,00	-	474.100,00	474.100,00
	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : ABC Dry Powder 3.5 Kg	-	Unit	0,00	-	0,00	6 Unit	Unit	932.600,00	-	5.595.600,00	5.595.600,00
	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : ABC Dry Powder 9 Kg	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	1.262.300,00	-	3.786.900,00	3.786.900,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					81.219.196,00					81.219.196,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					76.208.572,00					76.208.572,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					61.808.572,00					61.808.572,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga tukang kebun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					61.808.572,00					61.808.572,00	0,00
	[-] Tenaga Tukang Kebun					60.808.572,00					60.808.572,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kebersihan pada Badan Penghubung dan Anjungan Bali TMII	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	60.808.572,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	60.808.572,00	0,00
	[-] THR Tenaga Pendukung Kegiatan					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					14.400.000,00						0,00
	[#] Laundry Sprai, Selimut Wisma Badan Penghubung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.400.000,00						0,00
	[-] laundry selimut					6.400.000,00						0,00
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Spesifikasi : -	160 Pcs	Pcs -	40.000,00	-	6.400.000,00	160 Pcs	Pcs -	40.000,00	-	6.400.000,00	0,00
	[-] laundry sprai					8.000.000,00						0,00
	Belanja Loundry Jakarta Spesifikasi : Laundry Sprei	400 Pcs	Pcs	20.000,00	-	8.000.000,00	400 Pcs	Pcs	20.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					5.010.624,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.432.340,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Tukang Kebun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.432.340,00						0,00
	[-] Tenaga Tukang Kebun					2.432.340,00						0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Non ASN pada Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	2.432.340,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	2.432.340,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					145.944,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Tukang Kebun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					145.944,00						0,00
	[-] Tenaga Tukang Kebun					145.944,00						0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	145.944,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	145.944,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					182.424,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Tukang Kebun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					182.424,00						0,00
	[-] Tenaga Tukang Kebun					182.424,00						0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	182.424,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	182.424,00	0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					2.249.916,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Tukang Kebun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.249.916,00						0,00
	[-] Tenaga Tukang Kebun					2.249.916,00						0,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.493,00	-	2.249.916,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.493,00	-	2.249.916,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					60.550.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					60.550.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					2.000.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00						0,00
	[-] pemeliharaan CCTV					2.000.000,00						0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV	1 Tahun	Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Tahun	Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					8.000.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Meja dan Kursi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.000.000,00						0,00
	[-] pemeliharaan meja dan kursi					8.000.000,00						0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Mebel Spesifikasi : Pemeliharaaan Inventaris Kantor (Meja & kursi)	100 Unit / Tahun	Unit / Tahun	80.000,00	-	8.000.000,00	100 Unit / Tahun	Unit / Tahun	80.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					27.450.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.450.000,00						0,00
	[-] pemeliharaan AC					27.450.000,00						0,00
	Pemeliharaan AC Spesifikasi : AC Split	45 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	27.450.000,00	45 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	27.450.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					8.500.000,00						0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Home Use Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.500.000,00						0,00
	[-] mesin pemotong rumput					2.000.000,00						0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Potong rumput	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] pemeliharaan TV					6.500.000,00						0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan TV	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	650.000,00	-	6.500.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	650.000,00	-	6.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					14.600.000,00						0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.600.000,00						0,00
	[-] pemeliharaan komputer					14.600.000,00						0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
Kegiatan	: 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 115.336.387,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	90 indeks 90 Indeks	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	90 indeks 90 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.928.487,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.336.387,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan
Hasil	: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks	Hasil	: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					159.928.487,00					115.336.387,00	-44.592.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					93.309.700,00					48.717.600,00	-44.592.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					93.309.700,00					48.717.600,00	-44.592.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					33.209.700,00					16.604.600,00	-16.605.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.209.700,00					16.604.600,00	-16.605.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.700.000,00					2.350.000,00	-2.350.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.700.000,00					2.350.000,00	-2.350.000,00
	[-] Alat tulis kantor					4.700.000,00					2.350.000,00	-2.350.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Boxy	200 Buah	Buah	16.000,00	-	3.200.000,00	100 Buah	Buah	16.000,00	-	1.600.000,00	-1.600.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku isi 58 Sinar Dunia	200 Buah	Buah	7.500,00	-	1.500.000,00	100 Buah	Buah	7.500,00	-	750.000,00	-750.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.509.700,00					1.254.600,00	-1.255.100,00
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.509.700,00					1.254.600,00	-1.255.100,00
	[-] Belanja cetak					2.509.700,00					1.254.600,00	-1.255.100,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	24 Meter	Meter	81.300,00	-	1.951.200,00	12 Meter	Meter	81.300,00	-	975.600,00	-975.600,00
	Fotocopy Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	1117 Lembar	Lembar	500,00	-	558.500,00	558 Lembar	Lembar	500,00	-	279.000,00	-279.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					26.000.000,00						13.000.000,00	-13.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.000.000,00						13.000.000,00	-13.000.000,00
	[-] Makanan dan minuman					26.000.000,00						13.000.000,00	-13.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan Prasmanan Biasa	200 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	20.000.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	10.000.000,00	-10.000.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Biasa	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	6.000.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.000.000,00	-3.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					18.800.000,00						9.400.000,00	-9.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					18.800.000,00						9.400.000,00	-9.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					18.800.000,00						9.400.000,00	-9.400.000,00
	[#] Belanja tenaga narasumber/tenaga ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.800.000,00						9.400.000,00	-9.400.000,00
	[-] moderator					2.800.000,00						1.400.000,00	-1.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.800.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	1.400.000,00	-1.400.000,00	
	[-] Narasumber					16.000.000,00						8.000.000,00	-8.000.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	16 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	16.000.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	-8.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					41.300.000,00						22.713.000,00	-18.587.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					41.300.000,00						22.713.000,00	-18.587.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					21.300.000,00						12.713.000,00	-8.587.000,00
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.300.000,00						12.713.000,00	-8.587.000,00
	[-] Penginapan					8.252.000,00						6.189.000,00	-2.063.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di - D.K.I JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	8.252.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	6.189.000,00	-2.063.000,00	
	[-] Tiket					13.048.000,00						6.524.000,00	-6.524.000,00
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : EKONOMI	4 Orang / PP	Orang / PP	3.262.000,00	-	13.048.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	3.262.000,00	-	6.524.000,00	-6.524.000,00	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					20.000.000,00						10.000.000,00	-10.000.000,00
	[#] Transport Peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00						10.000.000,00	-10.000.000,00
	[-] Transport peserta					20.000.000,00						10.000.000,00	-10.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi Spesifikasi : Pengganti Uang Transportasi	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	20.000.000,00	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	10.000.000,00	-10.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					66.618.787,00						66.618.787,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					66.618.787,00						66.618.787,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					66.618.787,00						66.618.787,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					66.618.787,00						66.618.787,00	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					45.000.000,00						45.000.000,00	0,00
	[#] Kendaraan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.000.000,00						45.000.000,00	0,00
	[-] Kendaraan listrik roda 3					45.000.000,00						45.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Kendaraan listrik roda tiga	1 Unit	Unit	45.000.000,00	-	45.000.000,00	1 Unit	Unit	45.000.000,00	-	45.000.000,00	0,00	
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					21.618.787,00						21.618.787,00	0,00
	[#] Kendaraan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.618.787,00						21.618.787,00	0,00
	[-] Kendaraan listrik roda 2					21.618.787,00						21.618.787,00	0,00
	Sepeda Motor Listrik Spesifikasi : Volta 401 (Jarak Tempuh 55 Km, Kecepatan Maksimal 55 Km/Jam, Warna Biru, Merah, Hitam)	1 Unit	Unit	21.618.787,00	-	21.618.787,00	1 Unit	Unit	21.618.787,00	-	21.618.787,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						159.928.487,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				115.336.387,00	-44.592.100,00	
							Provinsi Bali,..... Kepala Badan Penghubung						
							Arifin Efendi, ST., MT NIP. 197107142000031003						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
3	I Gusti Putu Widianara, SE., M.Si.	196909241994031005	Anggota	
4	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
5	I Putu Suarta, S.H., M.H.	196810101994031016	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
Kegiatan	: 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 326.087.665,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks 90 indeks	Capaian Program	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks 90 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 314.769.196,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 326.087.665,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan
Hasil	: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks	Hasil	: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					314.769.196,00					326.087.665,00	11.318.469,00
5.1	BELANJA OPERASI					314.769.196,00					326.087.665,00	11.318.469,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					314.769.196,00					326.087.665,00	11.318.469,00
5.1.02.01	Belanja Barang					49.423.000,00					91.984.000,00	42.561.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					49.423.000,00					91.984.000,00	42.561.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.878.000,00					2.439.000,00	-2.439.000,00
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.878.000,00					2.439.000,00	-2.439.000,00
	[-] Spanduk					4.878.000,00					2.439.000,00	-2.439.000,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	60 Meter	Meter	81.300,00	-	4.878.000,00	30 Meter	Meter	81.300,00	-	2.439.000,00	-2.439.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.545.000,00					4.545.000,00	0,00
	[#] makanan dan minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.545.000,00					4.545.000,00	0,00
	[-] makanan dan minuman					4.545.000,00					4.545.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Biasa	103 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.545.000,00	103 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.545.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack VIP	100 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	3.000.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					40.000.000,00					40.000.000,00	0,00
	[#] makanan dan minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40.000.000,00					40.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] makanan dan minuman					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan Prasmanan Biasa	100 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	10.000.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[-] Prasmanan untuk Parade Kesenian					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan Prasmanan Biasa	300 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	30.000.000,00	300 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					0,00					45.000.000,00	45.000.000,00
	[#] Belanja pakaian penabuh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					45.000.000,00	45.000.000,00
	[-] Pakaian penabuh					0,00					45.000.000,00	45.000.000,00
	Belanja Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Penabuh (Setelan Pakaian Penabuh Gamelan Bali terdiri dari Udeng, Safari, Kamen, Saput, Anteng)	-	Stel	0,00	-	0,00	20 Stel	Stel	2.250.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00
	Pakaian adat Spesifikasi : Pakaian Adat Pria Udeng, Safari, Kamen dan Saput	-	Stel	0,00	-	0,00	-	Stel	641.900,00	-	0,00	0,00
	Pakaian Adat Spesifikasi : Saput + Udeng Endek bahan endek	-	Set	0,00	-	0,00	-	Set	526.800,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja pakaian penabuh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Pakaian penabuh					0,00					0,00	0,00
	Kain Endek Spesifikasi : Endek Katun Ukuran 2,5 m	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	450.100,00	-	0,00	0,00
	Kemeja Spesifikasi : Kemeja Endek Tangan Panjang	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	552.200,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					250.399.196,00					227.004.665,00	-23.394.531,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					234.608.572,00					214.136.905,00	-20.471.667,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					172.800.000,00					187.800.000,00	15.000.000,00
	[#] Jasa tenaga pengajar dan pembuat konten Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					82.800.000,00					82.800.000,00	0,00
	[-] Pengajar Tari Bali					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	Jasa Pengajar Spesifikasi : Pengajar Seni Tari Bali/Karawitan (di Luar Wilayah Bali)	240 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000,00	-	72.000.000,00	240 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000,00	-	72.000.000,00	0,00
	[-] Tim Kreatif					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00
	Belanja jasa Petugas Sound System/Ligthing, Stage Manager, Penyanggre Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian dan Tim Kreatif Spesifikasi : Petugas Tim Kreatif	72 Orang / Jam	Orang / Jam	150.000,00	-	10.800.000,00	72 Orang / Jam	Orang / Jam	150.000,00	-	10.800.000,00	0,00
	[#] Paket Kesenian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90.000.000,00					105.000.000,00	15.000.000,00
	[-] Kesenian					90.000.000,00					105.000.000,00	15.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Pagelaran Seni Hiburan/Kegiatan Lomba	6 Kali	Kali	15.000.000,00	-	90.000.000,00	7 Kali	Kali	15.000.000,00	-	105.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					61.808.572,00					26.336.905,00	-35.471.667,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					61.808.572,00					26.336.905,00	-35.471.667,00
	[-] Tenaga administrasi					60.808.572,00					25.336.905,00	-35.471.667,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Administrasi pada Badan Penghubung dan Anjungan Bali TMII	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	60.808.572,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	25.336.905,00	-35.471.667,00
	[-] THR non ASN					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					5.010.624,00					2.087.760,00	-2.922.864,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.432.340,00					1.013.475,00	-1.418.865,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.432.340,00					1.013.475,00	-1.418.865,00
	[-] BPJS Kesehatan					2.432.340,00					1.013.475,00	-1.418.865,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Non ASN pada Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	2.432.340,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	1.013.475,00	-1.418.865,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					145.944,00					60.810,00	-85.134,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					145.944,00					60.810,00	-85.134,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					145.944,00					60.810,00	-85.134,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	145.944,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	60.810,00	-85.134,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					182.424,00					76.010,00	-106.414,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					182.424,00					76.010,00	-106.414,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian					182.424,00					76.010,00	-106.414,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	182.424,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	76.010,00	-106.414,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					2.249.916,00					937.465,00	-1.312.451,00
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.249.916,00					937.465,00	-1.312.451,00
	[-] Iuran Jaminan Hari Tua					2.249.916,00					937.465,00	-1.312.451,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.493,00	-	2.249.916,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	187.493,00	-	937.465,00	-1.312.451,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					10.780.000,00					10.780.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
Kegiatan	: 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.779.884.875,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	90 indeks 90 Indeks	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	90 indeks 90 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.485.776.784,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.779.884.875,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan
Hasil	: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks	Hasil	: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					2.485.776.784,00					2.779.884.875,00	294.108.091,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.485.776.784,00					2.715.122.253,00	229.345.469,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.485.776.784,00					2.715.122.253,00	229.345.469,00
5.1.02.01	Belanja Barang					344.600.000,00					402.700.000,00	58.100.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					344.600.000,00					402.700.000,00	58.100.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					84.000.000,00					42.000.000,00	-42.000.000,00
	[#] Belanja Karangan Bunga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.000.000,00					42.000.000,00	-42.000.000,00
	[-] Karangan Bunga					84.000.000,00					42.000.000,00	-42.000.000,00
	Belanja Rangkaian Bunga Spesifikasi : Ucapan dengan Rangkaian Bunga Premium	24 Buah	Buah	3.500.000,00	-	84.000.000,00	12 Buah	Buah	3.500.000,00	-	42.000.000,00	-42.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					260.600.000,00					360.700.000,00	100.100.000,00
	[#] Belanja makanan dan minuman tamu pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					260.600.000,00					360.700.000,00	100.100.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan					260.600.000,00					360.700.000,00	100.100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan Prasmanan Biasa	2606 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	260.600.000,00	3607 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	360.700.000,00	100.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.109.676.784,00						2.240.282.253,00	130.605.469,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.019.634.288,00						2.133.162.621,00	113.528.333,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					1.695.400.000,00						1.744.400.000,00	49.000.000,00
	[#] Jasa Pelayanan Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.694.400.000,00						1.743.400.000,00	49.000.000,00
	[-] Bulan Januari s.d Mei					168.000.000,00						70.000.000,00	-98.000.000,00
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung,Kelas Jabatan 5	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	168.000.000,00	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	70.000.000,00	-98.000.000,00	
	[-] Bulan Juni s.d Desember 2025					0,00						147.000.000,00	147.000.000,00
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung,Kelas Jabatan 5	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	147.000.000,00	147.000.000,00	
	[-] Jasa Pelayanan Pimpinan					1.526.400.000,00						1.526.400.000,00	0,00
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung,Kelas Jabatan 12	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	96.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	96.000.000,00	0,00	
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung,Kelas Jabatan 6	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200.000,00	-	432.000.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200.000,00	-	432.000.000,00	0,00	
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung,Kelas Jabatan 7	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.400.000,00	-	532.800.000,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.400.000,00	-	532.800.000,00	0,00	
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung,Kelas Jabatan 8	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.600.000,00	-	91.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.600.000,00	-	91.200.000,00	0,00	
	Belanja jasa Pelayanan Umum Spesifikasi : Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung,Kelas Jabatan 9	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.800.000,00	-	374.400.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.800.000,00	-	374.400.000,00	0,00	
	[#] Belanja jasa tenaga keprotokolan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	[-] Belanja jasa protokol					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					185.425.716,00						185.425.716,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					185.425.716,00						185.425.716,00	0,00
	[-] Belanja jasa pramuwisma					185.425.716,00						185.425.716,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kebersihan pada Badan Penghubung dan Anjungan Bali TMII	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	182.425.716,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	182.425.716,00	0,00	
	Belanja Tunjangan Hari Raya Non ASN Spesifikasi : THR Non ASN	3 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					60.000.000,00						160.000.000,00	100.000.000,00
	[#] Jasa Pengawalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000,00						160.000.000,00	100.000.000,00
	[-] Jasa Pengawalan					60.000.000,00						160.000.000,00	100.000.000,00
	Jasa Pengamanan oleh Anggota PJR dan Anggota Intelkam dalam rangka Pengawalan Spesifikasi : Tugas mengawal Pejabat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,Roda 2 (dua)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	2.000.000,00	-	60.000.000,00	80 Orang / Hari	Orang / Hari	2.000.000,00	-	160.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					60.808.572,00						25.336.905,00	-35.471.667,00
	[#] Belanja jasa tenaga keprotokolan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.808.572,00						25.336.905,00	-35.471.667,00
	[-] Belanja jasa protokol					60.808.572,00						25.336.905,00	-35.471.667,00
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Tenaga Protokol pada Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	60.808.572,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	5.067.381,00	-	25.336.905,00	-35.471.667,00	
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Sertifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	[-] belanja sertifikasi					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	Belanja Registrasi/Keanggotaan Spesifikasi : Kartu Pas Bandara Soekarno Hatta pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	18.000.000,00	-	18.000.000,00	1 Tahun	Tahun	18.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					20.042.496,00						17.119.632,00	-2.922.864,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					9.729.360,00						8.310.495,00	-1.418.865,00
	[#] Belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.297.020,00						7.297.020,00	0,00
	[-] Belanja jasa pramuwisma					7.297.020,00						7.297.020,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Non ASN pada Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	7.297.020,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	7.297.020,00	0,00	
	[#] Belanja jasa tenaga keprotokolan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.432.340,00						1.013.475,00	-1.418.865,00
	[-] Belanja jasa protokol					2.432.340,00						1.013.475,00	-1.418.865,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Non ASN pada Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	2.432.340,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	202.695,00	-	1.013.475,00	-1.418.865,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					583.776,00						498.642,00	-85.134,00
	[#] Belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					437.832,00						437.832,00	0,00
	[-] Belanja jasa pramuwisma					437.832,00						437.832,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	437.832,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	437.832,00	0,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja jasa tenaga keprotokolan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					145.944,00					60.810,00	-85.134,00
	[-] Belanja jasa protokol					145.944,00					60.810,00	-85.134,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	145.944,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	12.162,00	-	60.810,00	-85.134,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					729.696,00					623.282,00	-106.414,00
	[#] Belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					547.272,00					547.272,00	0,00
	[-] Belanja jasa pramuwisma					547.272,00					547.272,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	547.272,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	547.272,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga keprotokolan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					182.424,00					76.010,00	-106.414,00
	[-] Belanja jasa protokol					182.424,00					76.010,00	-106.414,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	182.424,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	15.202,00	-	76.010,00	-106.414,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					8.999.664,00					7.687.213,00	-1.312.451,00
	[#] Belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.749.748,00					6.749.748,00	0,00
	[-] Belanja jasa pramuwisma					6.749.748,00					6.749.748,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Badan Penghubung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.493,00	-	6.749.748,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.493,00	-	6.749.748,00	0,00
	[#] Belanja jasa tenaga keprotokolan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.249.916,00					937.465,00	-1.312.451,00
	[-] Belanja jasa protokol					2.249.916,00					937.465,00	-1.312.451,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Badan Penghubung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.493,00	-	2.249.916,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	187.493,00	-	937.465,00	-1.312.451,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi					70.000.000,00					90.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.02.06.0006	Belanja Sewa Jalan Tol					70.000.000,00					90.000.000,00	20.000.000,00
	[#] Belanja Tol dan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70.000.000,00					90.000.000,00	20.000.000,00
	[-] Tol dan Parkir					70.000.000,00					90.000.000,00	20.000.000,00
	Belanja Sewa Jalan Tol Spesifikasi : Jasa Tol dan Parkir pada Badan Penghubung	1 Tahun	Tahun	70.000.000,00	-	70.000.000,00	1 Tahun	Tahun	70.000.000,00	-	70.000.000,00	0,00
	Belanja Sewa Jalan Tol Spesifikasi : Tambahan Jasa Tol dan parkir Tamu Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					31.500.000,00					72.140.000,00	40.640.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					31.500.000,00					72.140.000,00	40.640.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					31.500.000,00					72.140.000,00	40.640.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.500.000,00					42.000.000,00	10.500.000,00
	[-] perjalanan dinas dalam daerah Jakarta					31.500.000,00					42.000.000,00	10.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	150 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000,00	-	31.500.000,00	200 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000,00	-	42.000.000,00	10.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	210.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					30.140.000,00	30.140.000,00
	[-] Penginapan					0,00					6.840.000,00	6.840.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di - JAWA BARAT Spesifikasi : GOLONGAN II / I	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	4.560.000,00	4.560.000,00
	Penginapan Dalam Negeri di - JAWA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	2.280.000,00	2.280.000,00
	[-] Tiket					0,00					0,00	0,00
	Tiket Denpasar - Jakarta Spesifikasi : EKONOMI	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	-	Orang / PP	3.262.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Uang harian					0,00					23.300.000,00	23.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	17.280.000,00	17.280.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	6.020.000,00	6.020.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					64.762.622,00	64.762.622,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					64.762.622,00	64.762.622,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					0,00					64.762.622,00	64.762.622,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					0,00					64.762.622,00	64.762.622,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					0,00					64.762.622,00	64.762.622,00
	[#] Belanja modal kendaraan bermotor roda dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					64.762.622,00	64.762.622,00
	[-] Belanja Sepeda Motor Roda Dua					0,00					64.762.622,00	64.762.622,00
	Sepeda Motor Spesifikasi : Honda Vario 160 ABS	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	36.605.470,00	-	0,00	0,00
	Sepeda Motor Spesifikasi : Yamaha All New Nmax 155	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	39.569.997,00	-	39.569.997,00	39.569.997,00

